

2024

Annual Report
Laporan Tahunan



BRIDGING SUCCESS: NAVIGATING PATHWAYS TO OPPORTUNITIES

Penjelasan Tema

THEME EXPLANATION



BRIDGING SUCCESS: NAVIGATING PATHWAYS TO OPPORTUNITIES

Ditengah ketidakpastian, KPEI memperkuat perannya dalam memperluas peluang yang lebih besar tidak hanya berfungsi sebagai *Central Counterparty* (CCP) atau lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi bursa di pasar modal, melainkan juga telah ditetapkan sebagai Pihak yang Ditunjuk untuk Menjalankan Fungsi CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), khususnya untuk transaksi derivatif yang diselenggarakan oleh Bursa. Keberadaan KPEI sebagai CCP PUVA memperkuat posisinya sebagai pilar penting dalam ekosistem pasar keuangan Indonesia, mendukung integrasi dan pendalaman pasar, serta meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global. Penambahan peran ini, menjadi tonggak penting dalam penguatan struktur pasar keuangan Indonesia.

Amid uncertainty, IDCLEAR strengthens its role by expanding greater opportunities, not only functioning as a Central Counterparty (CCP) guaranteeing the settlement of securities transactions in the regular and negotiation markets, but it has also been appointed as the Designated Party to Perform the CCP Function in the Main and/or Alternative Markets (PUVA), especially for derivative transactions organized by the Exchange. IDCLEAR's presence as the PUVA CCP reinforces its position as a key pillar in Indonesia's financial market ecosystem, supporting market integration and deepening, as well as enhancing competitiveness at the regional and global levels. This added role marks a significant milestone in strengthening the structure of Indonesia's derivatives market.

Kesinambungan Tema

THEME CONTINUITY

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

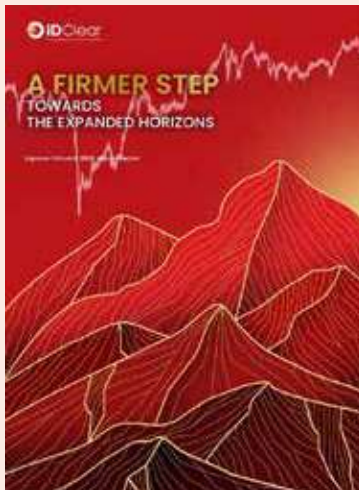
Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights



2023

"A Firmer Step Towards the Expanded Horizons"

KPEI terus memantapkan langkahnya dalam menyediakan layanan kliring dan penjaminan yang andal dan mumpuni di pasar modal Indonesia. Berkolaborasi dengan regulator, SRO, dan institusi lainnya, KPEI mencatatkan berbagai pencapaian di sepanjang tahun yang menegaskan komitmen Perusahaan untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. KPEI juga siap untuk hadir memperluas layanan dan pengguna jasanya untuk menciptakan kesempatan berkontribusi dalam mengembangkan pasar keuangan nasional.

IDClear continues to enhance its journey in providing reliable and capable clearing and guarantee services in the Indonesian capital market. Collaborating with regulators, SROs, and other institutions, IDClear recorded various achievements throughout the year, which reaffirmed the Company's commitment to being the best in its field. IDClear is also ready to expand its services and support users in creating opportunities to contribute to the development of the national financial market.



2022

"Integrating Financial Ecosystem through Broadened Role and Collaboration"

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal Indonesia, KPEI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang dibangunnya dari tahun ke tahun. Seiring dengan semangat tersebut, KPEI juga berupaya untuk senantiasa berinovasi dengan melakukan integrasi peran dan perluasan kolaborasinya ke pasar keuangan Indonesia.

In carrying out its role as a clearing and guarantee institution in the Indonesian capital market, IDClear is committed to continuously improving the quality of services it has built year after year. In line with this spirit, IDClear strives to continuously innovate itself by integrating its roles and expanding its collaboration into the Indonesian financial market.



2021

"Performing Beyond Challenges"

Selama lebih dari dua dasawarsa berkarya, KPEI telah menjalankan peran sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan menyediakan layanan terbaik di pasar modal Indonesia. Rekam jejak yang teruji disertai kapabilitas yang mumpuni KPEI diperkuat dengan penunjukan oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring atas transaksi semua instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan pemberian persetujuan prinsip kepada KPEI sebagai *Central Counterparty* (CCP) untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the Counter* (OTC SBNT) yang semakin memperluas layanan KPEI tidak hanya di pasar modal tetapi juga di pasar keuangan. Dalam menjalankan perannya tersebut KPEI senantiasa mengedepankan penerapan praktik terbaik dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengutamakan program Ekonomi Hijau atau *Environmental, Social & Governance* (ESG).

For more than two decades of its accomplishments, IDClear has carried out its role as a Clearing and Guarantee Institution by providing the best services in the Indonesia capital market. The proven track record accompanied by IDClear's capabilities is strengthened by the appointment by Bank Indonesia as the clearing organizer for the transactions of all Government Bonds (SBN) instruments and the granting of principle approval to IDClear as a Central Counterparty (CCP) for Over-The-Counter Interest Rate and Exchange Rate (SBNT OTC) Derivatives Transaction, which further expands IDClear services not only in the capital market but also in financial markets. In carrying out its role, IDClear always prioritizes the best practices of the principles of Good Corporate Governance and prioritizes the Green Economy or Environmental, Social & Governance (ESG) program.



2020

"KPEI's New Normal: Withstanding and Striving"

Kondisi perekonomian global maupun nasional yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan KPEI mencanangkan strategi resiliensi melalui penyesuaian operasional dan sistem layanan, program efisiensi, di samping juga memberikan dukungan berupa kebijakan insentif kepada pelaku pasar modal. Di tengah kondisi *New Normal* yang cukup menantang, KPEI dapat tetap mempertahankan kinerja baik serta menjalankan perannya sebagai *Central Counterparty* (CCP) berkualitas dan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang terpercaya. Salah satunya dengan turut mendukung Pemerintah menanggulangi dampak pandemi dalam implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.

The global and national economic depression impacted by the COVID-19 pandemic in 2020 has prompted IDClear to implement resilience strategy through various adjustments in operational and services system, efficiency programs, as well as providing support through incentive policies for the capital market participants. In the midst of the challenging New Normal condition, IDClear was able to maintain a solid performance and carry out its role as a quality Central Counterparty (CCP) and reliable Clearing and Guarantee Institution. One of which includes supporting the Government in the implementation of National Economic Recovery program to overcome the impact due to the pandemic.



2019

“Prudent and Efficient for an Attractive Capital Market”

KPEI berkomitmen untuk berkontribusi penuh dalam menjaga dan meningkatkan *market confidence* dalam bertransaksi di pasar modal Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, KPEI, melalui perannya sebagai salah satu pilar infrastruktur pasar modal Indonesia, secara berkesinambungan mengambil bagian dalam menghadirkan pasar modal yang atraktif, melalui ketersediaan sistem kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi efek yang efisien, aman dan penuh kehati-hatian.

IDClear is fully committed to contribute to securing and further improving market confidence in capital market transactions in Indonesia. Through its role as one of the pillars of Indonesia capital market infrastructure, IDClear has continuously taken the initiatives to promote and realize an attractive capital market through an efficient, secure and prudent clearing and settlement guarantee transaction system.



2018

“Strengthening Infrastructure Through Efficient Market”

Melalui tema tersebut KPEI menunjukkan kiprah kinerja dan sumbangsinya dalam mendukung pengembangan pasar modal Indonesia menja di sara na berinvestasi yang menarik, aman, efisien dan transparan bagi pelaku pasar.

Through this theme, KPEI presents its performance and contributions in fostering the Indonesia capital market development to become an attractive, secure, efficient and transparent investment facility for the market participants.

Daftar Isi

TABLE OF CONTENTS

2	Penjelasan Tema Theme Explanation
3	Kesinambungan Tema Theme Continuity
6	Daftar Isi Table of Contents

01 Ikhtisar Utama

Highlights

10	Sekilas Pencapaian KPEI 2024 IDClear 2024 Highlights
11	Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Key Financial Data
13	Ikhtisar Operasional Operational Highlights
15	Peristiwa Penting Event Highlights

02 Laporan Manajemen

Management Reports

33	Laporan Dewan Komisaris Report of The Board of Commissioners
49	Laporan Direksi Report of The Board of Directors
64	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2024 PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Statement by The Members of The Board of Commissioners and Directors Regarding their Responsibility for The 2024 Annual Report of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

03 Profil Perusahaan

Company Profile

68	Informasi Umum Perusahaan Company's General Information
71	Riwayat Singkat Perusahaan Company Brief History
74	Jejak Langkah Milestones
78	Bidang Usaha Business Activities

92	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture
94	Brand KPEI IDClear Brand
95	Ikon KPEI IDClear's Icon
95	Keanggotaan pada Asosiasi Association Membership
96	Struktur Organisasi Organizational Structure
100	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners' Profile
103	Profil Direksi Board of Directors' Profile
108	Komite-Komite Committees
110	Informasi Sumber Daya Manusia Human Resource Information
112	Informasi Pemegang Saham Shareholder Information
112	Informasi Persentase Kepemilikan Langsung Maupun Tidak Langsung atas Saham KPEI oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pada Awal dan Akhir Tahun Buku Information on Direct and Indirect Shareholding Percentages In Idclear Shares By The Board of Directors and Commissioners at The Beginning and End of The Financial Year
113	Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Subsidiaries and Associates
116	Struktur Pasar Modal Indonesia Indonesia Capital Market Structure
117	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant and Public Accounting Firm (KAP)
117	Lembaga dan Profesi Penunjang Supporting Institutions and Professions
118	Sertifikasi Certifications
120	Informasi pada Situs Perusahaan Information on Company Website

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

124	Tinjauan Makroekonomi 2024 Macroeconomic Overview 2024
130	Kebijakan Strategis KPEI 2024 IDClear Strategic Policies For 2024
138	Kinerja Operasional Operational Performance
145	Tinjauan Keuangan Financial Overview



152	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Debt Services Ability and Collectability Turnover Ratio
153	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on The Capital Structure
154	Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Goods Investments
154	Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment
155	Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen Employees and/or Management Share Ownership Program
155	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of The Use of Public Offering Proceeds
156	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated/Related Parties
156	Komitmen dan Kontigensi Commitments and Contingencies
157	Penerbitan dan/atau Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir Issuance of and/or Amendment to Laws and Regulations Affecting The Company in The Last Financial Year
159	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir Changes in Accounting Policies Applied by The Company in The Most Recent Financial year
160	Informasi Keuangan Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

05 Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview

164	Hukum Legal
172	Keanggotaan dan Pengembangan Pasar Membership and Market Development
180	Teknologi Informasi Information Technology
193	Human Capital Human Capital

06 Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

208	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Corporate Governance

226	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
232	Dewan Komisaris Board Of Commissioners
238	Direksi Board Of Directors
255	Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris Dan Direksi Information Transparency on The Board of Commissioners and The Board of Directors
274	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organ of The Board of Commissioners
301	Komite dan Organ Pendukung Direksi Committees and Supporting Organs of The Board of Directors
296	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
316	Satuan Pemeriksa Internal Internal Audit Unit
322	Akuntan Publik Public Accountant
324	Pengendalian Internal Internal Control
328	Manajemen Risiko Korporasi Corporate Risk Management
336	Perkara Hukum Legal Cases
336	Sanksi Administrasi Administrative Sanctions
337	Kode Etik Code Of Conduct
340	Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi Policy on Anti-Bribery and Anti-Corruption
341	Whistleblowing System Whistleblowing System

07 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

346	Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Governance of Social and Environmental Responsibility

08 Lampiran

Appendix



Ikhtisar Utama

Highlights



Kinerja KPEI mencerminkan ketangguhan dalam menavigasi dinamika pasar yang fluktuatif, layaknya kapal yang tetap stabil di tengah gelombang laut. Berlandaskan fondasi strategis yang kuat, KPEI menghadirkan perlindungan optimal bagi investor dan menjaga keandalan ekosistem pasar modal. Komitmen ini diperkuat melalui inovasi berkelanjutan dan penguatan peran sebagai penopang kepercayaan serta pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

IDClear's performance reflects its resilience in navigating volatile market dynamics, like a ship that remains stable amidst ocean waves. Based on a strong strategic foundation, IDClear provides optimal protection for investors and maintains the reliability of the capital market ecosystem. This commitment is reinforced through continuous innovation and strengthening its role as a pillar of trust and sustainable market growth.



01



Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights

Sekilas Pencapaian KPEI 2024

IDCLEAR 2024 HIGHLIGHTS

Kinerja Keuangan | Financial Performance

Laba Rugi | Profit or Loss



Total Pendapatan
Total Revenues

Rp697,12

miliar | billion



Pendapatan Investasi
Investment Income

Rp107,22

miliar | billion



Total Laba Bersih Tahun Berjalan
Total Net Profit for the Year

Rp149,17

miliar | billion

Posisi Keuangan | Financial Position



Total Ekuitas
Total Equity

Rp2.511,18

miliar | billion



Total Aset
Total Asset

Rp4.400,32

miliar | billion

Kinerja Operasional | Operational Performance



Rata-Rata Nilai Penyelesaian Transaksi Harian Bursa
Exchange's Average Daily Transaction Settlement Value

Rp4,24

triliun | trillion



Dana Jaminan
Guarantee Funds

Rp8,52

triliun | trillion



Pengelolaan Agunan
Collateral Management

Rp33,13

triliun | trillion

Kinerja Strategis | Strategic Performance



Penambahan Anggota Kliring Baru
Addition of New Clearing Member

3 Anggota Kliring
Clearing Member



Penambahan Partisipan PME Bilateral
Addition of Billateral SBL Member

8 Partisipan
Member



Penambahan Partisipan Triparty Repo
Addition of Triparty Repo Member

2 Partisipan
Member

Ikhtisar Data Keuangan Penting

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Seluruh notasi angka dalam bahasa Indonesia
All numerical notations are in Indonesian

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Rp Juta)
Table of Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp Million)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan Revenues	697.120	588.180	760.680	658.952	473.758
Beban Expenses	512.432	459.599	440.702	366.452	308.838
Laba (Rugi) sebelum pajak Profit (loss) Before Tax	184.688	128.581	319.978	292.500	164.290
Beban Pajak Tax Expenses	(35.514)	(22.600)	(65.914)	(66.937)	(42.069)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	149.174	105.981	254.064	225.563	122.851
Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income	(9.045)	2.099	(9.397)	3.997	6.698
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	140.129	108.080	244.667	229.560	129.549

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

Tabel Laporan Posisi Keuangan (Rp Juta)
Table of Statement of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	3.319.406	3.465.580	4.239.940	3.616.231	3.780.659
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	1.080.912	894.847	856.202	740.854	658.127
Dana Pengaman Security Funds	1.876	1.171	1.147	1.128	1.104
Dana Disisihkan sebagai Cadangan Reserved for Guarantee	399.437	194.138	181.433	164.514	158.371
Investasi Saham Investments in Shares	281.916	293.763	291.494	288.207	284.531
Aset Keuangan Lainnya Other Financial Assets	66.880	78.359	70.860	34.660	34.660
Aset Tetap Fixed Assets	263.018	274.076	248.499	194.147	132.610
Aset Hak Guna Right-of-use Assets	43.450	31.288	45.583	43.901	32.856
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	12.928	11.938	8.240	6.401	5.658
Aset Lain-Lain Other Assets	11.407	10.114	8.946	7.897	8.337
Total Aset Total Assets	4.400.318	4.360.427	5.096.142	4.357.085	4.438.787

Tabel Laporan Posisi Keuangan (Rp Juta)
Table of Statement of Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	1.840.782	2.153.996	2.983.390	2.491.804	2.809.313
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	48.352	35.376	49.777	46.973	40.727
Total Liabilitas Total Liabilities	1.889.134	2.189.372	3.033.167	2.538.777	2.850.040
Total Ekuitas Total Equity	2.511.184	2.171.055	2.062.975	1.818.308	1.588.747
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.400.318	4.360.427	5.096.142	4.357.085	4.438.787

Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows

Tabel Laporan Arus Kas (Rp Juta)
Table of Statement of Cash Flows (Rp Million)

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Kas Neto dari Aktivitas Operasi Net Cash from Operating Activities	140.383	84.951	195.559	289.609	88.504
Kas Neto dari Aktivitas Investasi Net Cash from Investing Activities	(429.453)	(189.792)	(133.453)	(12.341)	(16.498)
Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan Net Cash from Financing Activities	176.755	(16.450)	(15.442)	(12.498)	26.781
(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(112.316)	(121.291)	46.663	264.770	98.787
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	908.470	1.029.762	983.098	718.328	619.541
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	796.155	908.470	1.029.762	983.098	718.328

Rasio Keuangan Financial Ratios

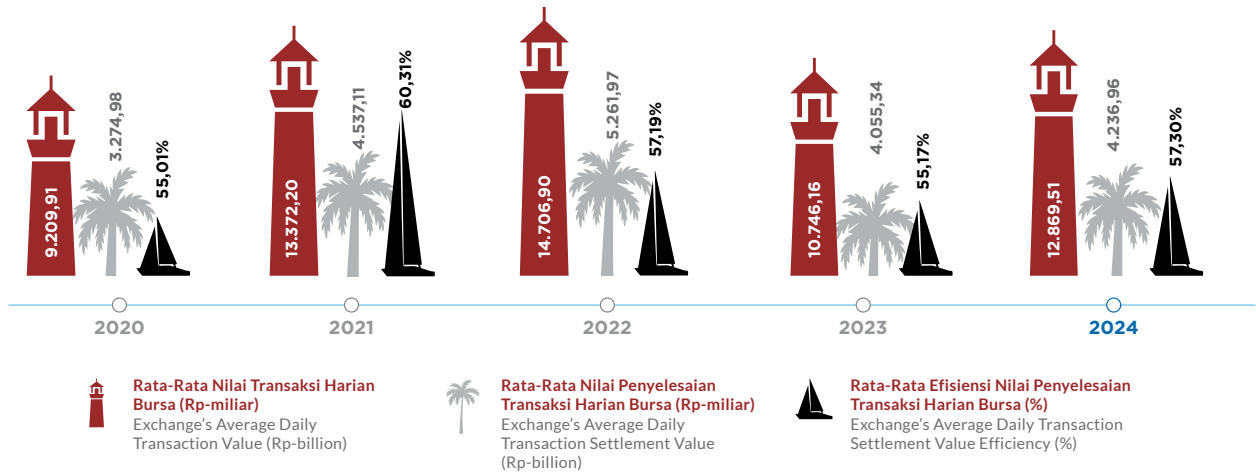
Rasio Keuangan (%) Financial Ratios (%)	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Lancar Current Ratio	180,33	160,89	142,12	145,13	134,58
Beban terhadap Pendapatan Cost to Income	73,51	78,14	57,94	55,61	65,19
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	21,40	18,02	33,40	34,23	25,93
Tingkat Pengembalian Aset Return on Assets	5,47	4,46	11,13	10,91	6,93
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	5,94	4,88	12,32	12,41	7,73
Perputaran Total Aset Assets Turnover	7,24	5,52	14,71	15,23	9,85
Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset Profit (Loss) to Assets	6,77	5,41	14,02	14,14	9,30
Laba (Rugi) terhadap Ekuitas Profit (Loss) to Equity	7,35	5,92	15,51	16,09	10,38
Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity	8,61	9,49	10,63	13,74	11,60
Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets	7,92	8,67	9,61	12,08	10,40

Ikhtisar Operasional

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Nilai Transaksi dan Penyelesaian

Transaction and Settlement Value



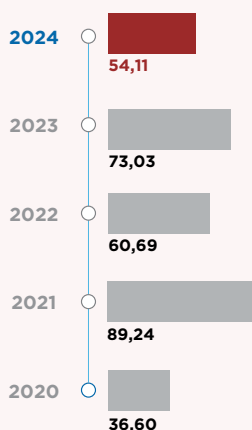
Volume Nilai Transaksi dan Penyelesaian

Volume of Transaction and Settlement Value
(Miliar Lembar/Billions of Shares)



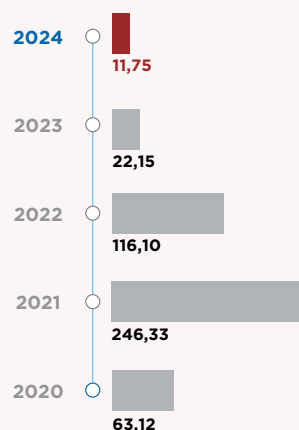
Total Nilai Pinjam Meminjam Efek (Rp miliar)

Total Securities Lending and Borrowing Value (Rp billion)



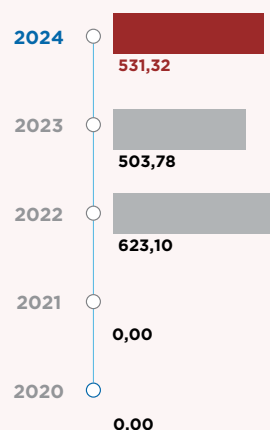
Total Volume Pinjam Meminjam Efek (Juta Lembar)

Total Securities Lending and Borrowing Volume Securities (millions of shares)



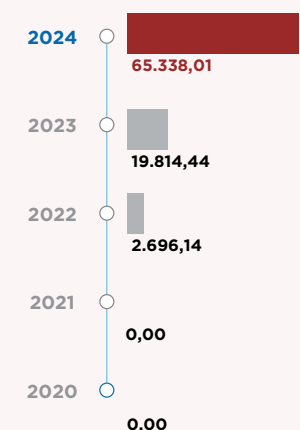
Total Nilai Triparty Repo (Rp miliar)

Total Triparty Repo Value (Rp billion)



Total Volume Triparty Repo (Juta Lembar)

Total Triparty Repo Volume (millions of shares)



Total Dana Jaminan (Rp Miliar)

Total of Guarantee Fund (Rp Billion)

2020	2021	2022	2023	2024
5.470,01	6.213,72	7.006,96	7.743,12	8.524,73

Total Cadangan Jaminan (Rp Miliar)

Reserve for Guarantee Fund (Rp Billion)

2020	2021	2022	2023	2024
153,37	164,51	181,44	194,14	199,44

Total Nilai Alternate Cash Settlement (Rp Miliar)

Total Alternate Cash Settlement Value (Rp Billion)

2020	2021	2022	2023	2024
83,08	97,12	146,20	14,26	18,98

Penggunaan Dana Talangan (Rp Miliar)

Bailout Usage (Rp Billion)

2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	27,26	-

Total Transaksi CCP PUVA

Total CCP PUVA Transactions

(30 September 2024 – 31 Desember 2024)
(September 30, 2024 – December 31, 2024)

Jenis Instrumen Types of Instruments	Jumlah Transaksi Number of Transactions	Jumlah Nett Posisi Net Position Amount	Nosional Transaksi - USD Notional Transactions - USD	Nosional Nett Posisi - USD Notional Net Position - USD	Efisiensi Netting Netting Efficiency
DNDF	220	192	382,000,000.00	322,000,000.00	15,7%

Sumber Keuangan

Financial Resources

(Rp Miliar/Rp Billion)

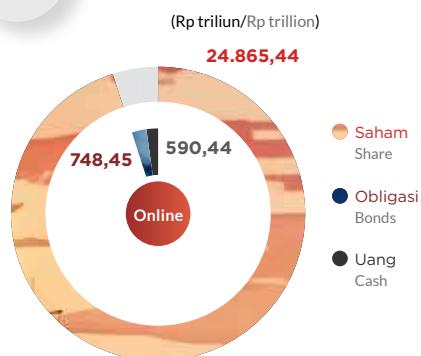
Default Fund Contribution	SITG	Collateral CM
40.257.036.971,12	200.000.000.000,00	99.786.954.929,48

(Rp Juta/Rp Million)

Realisasi Bunga Default Fund (Periode Okt – Des 2024) Realization of Default Fund Interest (October – December 2024 period)	Realisasi Bunga Initial Margin Cash (Periode Nov – Des 2024) Realization of Initial Margin Cash Interest (Dec 2024 Period)
468.861.246,00	106.440.931,00

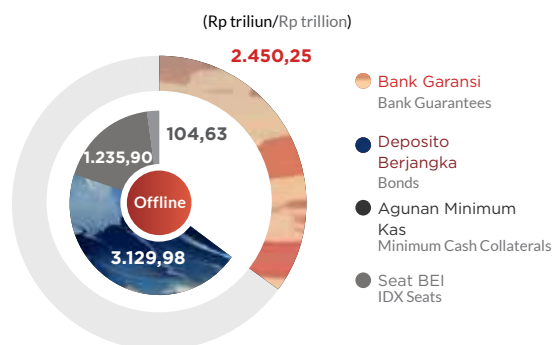


Agunan Collateral



Agunan Online | Online Collateral

Agunan yang dikuasakan ke KPEI berupa dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dalam rekening secara elektronik di KSEI.
Collateral authorized to IDClear in the form of cash and/or securities, which is administered electronically in an account in KSEI.



Agunan Offline | Offline Collateral

Agunan yang dikuasakan ke KPEI berupa dana dan/atau instrumen keuangan lainnya yang diadministrasikan secara fisik oleh KPEI.
Collateral authorized to IDClear in the form of cash and/or other financial instruments, which is administered physically by IDClear.

Peristiwa Penting

EVENT HIGHLIGHTS

Sosialisasi, Workshop, Edukasi, dan FGD

Socialization, Workshops, Education, and Focus Group Discussions



17

Januari | January

Edukasi dan Sharing Session Pasar Modal bersama Bareskrim Polri

Capital Market Education and Sharing Session with Bareskrim Polri



18

Januari | January

Audiensi KPEI Bersama PROPAMI

IDClear Audience with PROPAMI



26

Januari | January

Sharing Session KPEI dan BEI: Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)

IDClear and IDX Sharing Session: Net Adjusted Working Capital (NAWC)



7

Februari | February

Sosialisasi Peraturan dan Surat Edaran KPEI

IDClear Regulation and Circular Letter Dissemination



13

Februari | February

KPEI dan KBI Selenggarakan *Sharing Session* terkait Kliring dan Pengelolaan Risiko

IDClear and KBI Hold *Sharing Session* on Clearing and Risk Management



28

Februari | February

***Sharing Session* SRO bersama PEI dan JSF**

SRO *Sharing Session* with PEI and JSF



21

Maret | March

***Focus Group Discussion* Penguatan Stratifikasi Keanggotaan KPEI**

Focus Group Discussion on Strengthening IDClear Membership Stratification



22

Maret | March

Sosialisasi Penyelesaian Transaksi Bursa Level Anggota Kliring untuk Transaksi Ekuiti

Socialization of Exchange Transaction Settlement of Clearing Member Level for Equity Transaction



2

April | April

KPEI Selenggarakan Pemaparan terkait Produk Derivatif SBNT OTC

IDClear Holds Presentation on SBNT OTC Derivative Products



22

April | April

Pelatihan Pasar Modal bersama Bareskrim Polri

Capital Market Training with Bareskrim Polri



26

April | April

KPEI Selenggarakan Sosialisasi Teknis Penyempurnaan Mekanisme Penyelesaian Transaksi Ekuiti (Omnibus)
IDClear Holds Technical Dissemination on the Enhancement of Equity Transaction Settlement Mechanism (Omnibus)



7

Mei | May

KPEI Selenggarakan Hands-On Sistem Operasional Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter
IDClear Holds Hands-On Training on Over-the-Counter Interest Rate and Exchange Rate Derivatives Trading System



15

Mei | May

Sosialisasi Peraturan dan Surat Edaran KPEI
Socialization of IDCLEAR Regulations and Circular Letters



17

Mei | May

SRO dan OJK Selenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Jambi
SRO and OJK Holds Integrated Capital Market Dissemination and Education in Jambi



19

Mei | May

SRO Selenggarakan Kegiatan ICME Capacity Building and Networking 2024
SRO Organizes ICME Capacity Building and Networking 2024 Event



27

Mei | May

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal di Jayapura
Capital Market Socialization and Education in Jayapura



4

Juni | June

Sekolah Pasar Modal di Universitas Al Khairiyah Cilegon
Capital Market School at Universitas Al Khairiyah Cilegon



4

Juni | June

Sekolah Pasar Modal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Capital Market School at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



6

Juni | June

Sosialisasi Rencana IDCclear dalam Implementasi Triparty Agent Repo SBN dan Collateral Management System
Socialization of IDCclear Plan in the Implementation of Triparty Agent Repo SBN and Collateral Management System



19

Juni | June

Pelatihan ERM Fundamental dan Risk Officer Forum
ERM Fundamental Training and Risk Officer Forum



11

Juli | July

KPEI Selenggarakan Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan
IDCclear Holds Expert Briefing on IT Disaster Recovery Plan



6

Agustus | August

KPEI Selenggarakan Sosialisasi terkait Praktik ESG di Industri Pasar Modal Indonesia
IDCclear Holds Dissemination on ESG Practices in the Indonesian Capital Market Industry



9

Agustus | August

SRO dan OJK Selenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Makassar

SRO and OJK Hold Integrated Capital Market Dissemination and Education in Makassar



27

September | September

SRO dan OJK Selenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Riau

SRO and OJK Hold Integrated Capital Market Dissemination and Education in Riau



4

Oktober | October

SRO dan OJK Selenggarakan Kuliah Umum di Universitas Kuningan

SRO and OJK Hold Public Lecture at Universitas Kuningan



15

Oktober | October

KPEI Selenggarakan FGD Triparty Agent Repo SBN

IDClear Holds FGD on Triparty Agent Repo for Government Bonds/Securities (SBN)



1

November | November

KPEI bersama dengan SRO dan OJK menyelenggarakan Media Gathering SRO 2024

IDClear, together with SRO and OJK, Holds SRO Media Gathering 2024



4

November | November

KPEI Selenggarakan Sosialisasi terkait Pinjam Meminjam Efek, Triparty Repo, dan Reksa Dana sebagai Agunan Offline

IDClear Holds Dissemination on Securities Borrowing and Lending, Triparty Repo, and Mutual Funds as Offline Collateral



13

November | November

Pelatihan Pasar Modal Bersama Bank Syariah Indonesia
Capital Market Training with Bank Syariah Indonesia



21

November | November

KPEI Adakan Sharing Session "Empowering Change: Building Awareness and Action in Sustainable Finance"
IDClear Holds Sharing Session "Empowering Change: Building Awareness and Action in Sustainable Finance"



19

Desember | December

KPEI Selenggarakan Working Group PME
IDClear Holds PME Working Group Meeting

International Conference Meeting, Sharing Session

29

Februari | February**KPEI Menghadiri Konferensi Tahunan ASIFMA 2024 di Hong Kong**

IDClear Attends the 2024 ASIFMA Annual Conference in Hong Kong



5

Maret | March**KPEI menghadiri 18th Annual PASLA (RMA) Conference on Asian Securities Lending 2024**IDClear Attends the 18th Annual PASLA (RMA) Conference on Asian Securities Lending 2024

21

Maret | March**KPEI Menghadiri Kegiatan The 40th Annual Clearing and Derivatives Conference WFE Clear**KPEI Attends The 40th Annual Clearing and Derivatives Conference of WFE Clear

22

April | April**KPEI Menghadiri Securities and Exchange Commission Regional Training Program**

IDClear Attends Securities and Exchange Commission Regional Training Program



25

April | April**KPEI Menghadiri Junior Central of Student Development (CSD) Workshop 2024**

KPEI Attends Junior Central of Student Development (CSD) 2024 Workshop



26

April | April**Courtesy Meeting SRO dengan NASDAQ dan US Securities Exchange Commission**

Courtesy Meeting between SRO and NASDAQ and US Securities Exchange Commission



27

Mei | May

KPEI Menghadiri CCP Global Annual General Meeting 2024
IDClear Attends CCP Global Annual General Meeting 2024



29

Juli | July

KPEI Menghadiri 24th Cross Training Seminar Asia-Pacific Central Securities Depository Group
IDClear Attends the 24th Cross Training Seminar of the Asia-Pacific Central Securities Depository Group



26

September | September

Sharing Session bersama BNY Mellon terkait Triparty Collateral Management
Sharing Session with BNY Mellon on Triparty Collateral Management



21

Oktober | October

KPEI dan OJK Melaksanakan Kunjungan ke Pasar Modal dan Keuangan India
IDClear and OJK Conduct a Visit to the Capital Market and Financial Sector of India



27

Oktober | October

OJK, BEI, dan KPEI Adakan Benchmarking Financial Derivatives Regulations and Licensing ke Jepang
OJK, IDX, and IDClear Conduct Benchmarking on Financial Derivatives Regulations and Licensing to Japan



8

November | November

KPEI Bersama dengan SRO Menghadiri Simposium OJK - OECD/INFE 2024
IDClear and SRO Attend OJK - OECD/INFE 2024 Symposium



13

November | November

Sharing Session Implementasi Surveilans CCP PUVA
Sharing Session on the Implementation of CCP PUVA Surveillance



20

November | November

Kunjungan SRO ke Korea Securities Finance Corporation (KSFC)
SRO Visit to Korea Securities Finance Corporation (KSFC)



4

Desember | December

KPEI Menghadiri Kick Off CCP Global International Default Simulation (CIDS 2025)
IDClear Attends Kick-Off of CCP Global International Default Simulation (CIDS 2025)

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights

MoU & Penandatanganan Perjanjian

Memorandum of Understanding & Agreement Signing



30

Juli | July

Penandatanganan MOU KPEI dan VERMEG
MOU Signing between IDClear and VERMEG



12

Agustus | August

Penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham CCP PUVA
Signing of the Shareholders Agreement of CCP PUVA



2

September | September

Penandatanganan Perjanjian Interkoneksi KPEI dan Bank Indonesia
Signing of the Interconnection Agreement between IDClear and Bank Indonesia

Kegiatan Rutin & Peristiwa Internal Perusahaan Regular Activities & Internal Company Events



2

Januari | January

Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2024

Official Opening of the 2024 Trading on the Indonesia Stock Exchange



24

Juni | June

Penyerahan Sertifikat Surat Persetujuan Anggota Kliring Individual kepada Magenta Kapital Sekuritas Indonesia

Submission of Individual Clearing Member Approval Certificate to Magenta Kapital Sekuritas Indonesia



24

Juni | June

KPEI Selenggarakan RUPS Tahunan 2024

IDClear Holds Annual GMS 2024



22

Juli | July

Penyerahan Sertifikat Surat Persetujuan Anggota Kliring Individual kepada OSO Sekuritas

Issuance of Clearing Member Approval Certificate to OSO Sekuritas



5

Agustus | August

Seremoni Hari Ulang Tahun ke 28 Kliring Penjaminan Efek Indonesia

28th Anniversary Ceremony of Indonesia Clearing and Guarantee Corporation



12

Agustus | August

Konferensi Pers 47 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia

Press Conference on the 47th Anniversary of the Reactivation of the Indonesian Capital Market



12

Agustus | August

Seremoni 47 Tahun Diaktifikannya Kembali Pasar Modal Indonesia

47th Anniversary Ceremony of the Reactivation of the Indonesian Capital Market



26

Agustus | August

Penyerahan Sertifikat Surat Persetujuan Anggota Kliring Individual kepada Tuntun Sekuritas Indonesia

Issuance of Clearing Member Approval Certificate to Tuntun Sekuritas Indonesia



17

September | September

KPEI Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024

IDClear Holds Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024



21

Oktober | October

KPEI Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024

IDClear Holds Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024



30

Desember | December

Peresmian Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2024

Closing Ceremony of Indonesia Stock Exchange Trading Year 2024

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Corporate Social Responsibility



3

Maret | March

Penyerahan Bantuan Sumur Bor di Pulau Rote dalam rangka CSR HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia

Bore Well Donation in Rote Island as Part of the 46th Anniversary CSR of the Indonesian Capital Market



20

Juni | June

CSR Penyerahan Bantuan Pengadaan Penampungan Air di Desa Poh Bergong Denpasar

CSR Donation for Water Storage Facility in Poh Bergong Village, Denpasar



6

Juli | July

KPEI Selenggarakan CSR Penanaman Pohon Produktif di Desa Jayagiri Bandung

IDClear Holds CSR Activity on Planting Productive Trees in Jayagiri Village, Bandung

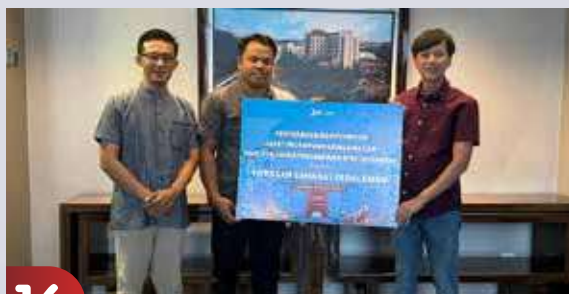


4

Oktober | October

Pasar Modal Indonesia Berikan Bantuan Sarana Pendidikan dan Dukungan untuk UMKM di Kabupaten Kuningan

Indonesian Capital Market Provides Educational Facilities and Support for MSMEs in Kuningan Regency



16

November | November

KPEI Serahkan Bantuan CSR Pelampung di Palembang

IDClear Provides CSR Donation of Life Jackets in Palembang



20

Desember | December

SRO Pasar Modal Salurkan Bantuan untuk Lingkungan dan Sektor Pendidikan di Semarang

Capital Market SRO Distributes Environmental and Educational Support in Semarang

Launching Produk Product Launch



September | September

Peluncuran *Central Counterparty* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Launch of Central Counterparty for Money Market and Foreign Exchange Market



November | November

Peluncuran *Single Stock Futures*

Launch of Single Stock Futures



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



Laporan Manajemen

Management Report



Manajemen sebagai cakrawala strategis menuntun arah Perusahaan dengan visi jangka panjang dan ketajaman membaca dinamika pasar menciptakan ruang adaptif yang terarah demi menjaga kesinambungan kinerja, stabilitas, dan daya saing berkelanjutan.

Management as a strategic horizon guides the Company's direction with a long-term vision and the acumen to read market dynamics creates a purposeful adaptive space to maintain performance continuity, stability, and sustainable competitiveness.



02

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights



Perluasan peran KPEI sebagai *Central Counterparty* (CCP) untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) menjadi momentum penting dalam membangun infrastruktur keuangan yang lebih terintegrasi, aman, dan andal.

The expansion of IDClear's role as a Central Counterparty (CCP) for the Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA) is an important milestone in building a more integrated, secure, and reliable financial infrastructure.

Hoesen

Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Dewan Komisaris

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya mewakili Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), bermaksud melaporkan Pelaksanaan tugas pengawasan atas kepemimpinan Direksi dalam menjalankan operasional KPEI sepanjang tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan periode yang sarat tantangan bagi pasar modal global dan nasional. Tekanan geopolitik, ketidakpastian ekonomi dunia, serta perubahan dalam lanskap investasi menjadi faktor eksternal yang memengaruhi ekosistem pasar keuangan. Di tengah kondisi tersebut, KPEI berhasil menunjukkan ketangguhan (*resilience*) dan kinerja yang solid, mempertahankan peran strategisnya sebagai lembaga kliring dan penjaminan yang mendukung stabilitas transaksi di pasar modal Indonesia serta konektivitasnya dengan sistem keuangan global.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dengan berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG). Fokus pengawasan kami mencakup penguatan manajemen risiko, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, transformasi digital, serta keberlanjutan layanan. Kami meyakini bahwa pengawasan yang efektif bukan hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan (*sustainability*) dan daya saing KPEI di masa depan.

Melalui laporan ini, kami bermaksud untuk menyampaikan tinjauan komprehensif atas capaian kinerja Perusahaan, efektivitas pengawasan yang dilakukan, identifikasi risiko dan tantangan ke depan, serta rekomendasi strategis bagi penguatan kinerja dan keberlanjutan KPEI ke depan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi, dan para pemangku kepentingan atas sinergi dan dedikasi yang telah memungkinkan KPEI mempertahankan perannya yang krusial dalam mendukung integritas pasar modal nasional sepanjang tahun 2024 dan berhasil mewujudkan *operational excellence* dengan fokus pada kualitas *human capital* dan sistem informasi teknologi yang andal.

TINJAUAN ATAS KINERJA KPEI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, KPEI menunjukkan kinerja yang resilien dan adaptif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal Indonesia.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude to God Almighty, I on behalf of the Board of Commissioners of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear), hereby present the report on the supervisory duties carried out over the leadership of the Board of Directors in managing IDClear's operations throughout 2024.

The year 2024 was a period marked by significant challenges for both global and national capital markets. Geopolitical tensions, global economic uncertainties, and shifts in the investment landscape were among the external factors impacting the financial market ecosystem. Amidst these conditions, IDClear demonstrated resilience and delivered solid performance, maintaining its strategic role as the clearing and guarantee institution that supports the stability of transactions in Indonesia's capital market and its connectivity with the global financial system.

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners consistently exercises its oversight function based on the principles of Good Corporate Governance (GCG). Our supervisory focus includes strengthening risk management, enhancing human resource capabilities, digital transformation, and service sustainability. We believe that effective supervision not only safeguards short-term stability but also builds a solid foundation for IDClear's long-term sustainability (*sustainability*) and future competitiveness.

Through this report, we aim to present a comprehensive review of the Company's performance achievements, the effectiveness of our supervisory activities, identification of risks and future challenges, as well as strategic recommendations to enhance IDClear's performance and long-term sustainability. The Board of Commissioners extends its appreciation to the Board of Directors and all stakeholders for their synergy and dedication, which have enabled IDClear to maintain its crucial role in supporting the integrity of the national capital market throughout 2024 and successfully realized operational excellence with a focus on the quality of human capital and reliable information technology systems.

REVIEW OF IDCLEAR'S PERFORMANCE IN 2024

Throughout 2024, IDClear demonstrated resilient and adaptive performance in fulfilling its role as the clearing and guarantee institution in the Indonesian capital

Di tengah tekanan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, pasar modal Indonesia berhasil tumbuh positif, tercermin dari kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 3,25% secara tahunan, ditutup pada level 7.036,57 per 27 Desember 2024. Bahkan, IHSG mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 7.905,390 pada 19 September 2024, bersamaan dengan rekor kapitalisasi pasar sebesar Rp13.475 triliun.

Kondisi pasar yang aktif dan dinamis ini berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas perdagangan sepanjang tahun, dengan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp12,87 triliun, volume transaksi harian sebesar 20,87 miliar lembar saham, dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,13 juta kali. Peningkatan aktivitas ini turut diimbangi oleh peningkatan jumlah investor, yang tumbuh menjadi 14,84 juta, termasuk lebih dari 6,37 juta investor saham, meningkat lebih dari satu juta investor dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata jumlah investor aktif harian per 24 Desember 2024 mencapai 147 ribu.

Di tengah kondisi pasar yang semakin kompleks tersebut, KPEI mampu menjaga stabilitas operasional dan keandalan layanan. Perusahaan membukukan laba sebesar Rp149,17 miliar dan mencatatkan peningkatan ekuitas menjadi Rp2,51 triliun, didukung oleh akumulasi laba ditahan yang mencerminkan efisiensi operasional dan efektivitas pengelolaan strategi usaha. Capaian tersebut menunjukkan ketangguhan model bisnis KPEI dalam menghadapi tekanan eksternal serta kemampuannya dalam menjawab pertumbuhan pasar yang pesat.

Dewan Komisaris menilai bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi dari implementasi manajemen risiko, efektivitas perencanaan strategis, serta fokus pada efisiensi dan peningkatan nilai tambah layanan. Sebagian besar target kinerja Direksi yang dituangkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI) berhasil tercapai, meskipun terdapat sejumlah catatan penting dalam aspek operasional yang menjadi perhatian pengawasan ke depan.

Salah satu tonggak pencapaian strategis pada 2024 adalah perolehan izin KPEI sebagai *Central Counterparty* (CCP) untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dari Bank Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya memperluas cakupan peran KPEI dalam mendukung ekosistem keuangan nasional, tetapi juga menjadi momentum penting dalam membangun infrastruktur keuangan yang lebih terintegrasi, aman, dan andal. Pencapaian ini mencerminkan komitmen KPEI dalam memperkuat posisi sebagai pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang modern dan berstandar internasional.

Namun demikian, Dewan Komisaris menekankan bahwa kinerja tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dari konteks eksternal yang semakin kompleks. Ketergantungan pasar modal Indonesia terhadap investor asing, tekanan dari ketidakpastian geopolitik global, dan dampak

market. Amidst geopolitical tensions and global economic uncertainties, the Indonesian capital market managed to achieve positive growth, as reflected by the 3.25% year-on-year increase in the Indonesia Composite Stock Index (IHSG), which closed at 7,036.57 as of December 27, 2024. Notably, the IHSG reached an all-time high of 7,905.390 on September 19, 2024, accompanied by a record market capitalization of Rp13,475 trillion.

The active and dynamic market conditions had a direct impact on the increase in trading activity throughout the year, with the average daily transaction value (RNTH) reaching Rp12.87 trillion, a daily transaction volume of 20.87 billion shares, and a daily transaction frequency of 1.13 million times. This rise in activity was accompanied by growth in the number of investors, which reached 14.84 million, including more than 6.37 million equity investors, an increase of over one million investors compared to the previous year. As of December 24, 2024, the average number of daily active investors stood at 147 thousand.

Amid increasingly complex market conditions, IDCLEAR successfully maintained operational stability and service reliability. The company posted a profit of Rp149.17 billion and recorded an increase in equity to Rp2.51 trillion, supported by retained earnings accumulation that reflects operational efficiency and effective business strategy management. These achievements highlight the resilience of IDCLEAR's business model in the face of external pressures and its capability to respond to rapid market growth.

The Board of Commissioners views these achievements as the result of synergies from risk management implementation, strategic planning effectiveness, and a strong focus on efficiency and enhancing the value of services. Most of the performance targets set for the Board of Directors in the Key Performance Indicators (KPIs) were successfully achieved, although there are several important operational notes that will remain a focus of future supervisory attention.

One of the key strategic milestones in 2024 was IDCLEAR's attainment of a license as a Central Counterparty (CCP) for the Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA) from Bank Indonesia. This initiative not only expands IDCLEAR's role in supporting the national financial ecosystem but also marks an important step toward building a more integrated, secure, and reliable financial infrastructure. This accomplishment reflects IDCLEAR's commitment to strengthening its position as a key pillar of a modern, internationally benchmarked national financial system.

Nevertheless, the Board of Commissioners emphasizes that the 2024 performance cannot be separated from an increasingly complex external context. The Indonesian capital market's reliance on foreign investors, pressures from global geopolitical uncertainties, and the impact of

kebijakan moneter negara maju, termasuk Amerika Serikat, yang antara lain dengan kebijakan perdagangan internasionalnya, telah meningkatkan potensi volatilitas dan risiko sistemik. Arus keluar modal (*capital outflow*) menjadi perhatian tersendiri, dan dipandang sebagai salah satu pemicu utama meningkatnya risiko pasar (*market risk*) yang harus diantisipasi ke depan.

Dewan Komisaris mencermati bahwa meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas data, baik dari sisi investor maupun emiten, telah menimbulkan tekanan signifikan terhadap kapasitas operasional KPEI. Tantangan utama yang dihadapi KPEI adalah menjaga kecepatan, akurasi, dan ketahanan sistem dalam memproses data dalam skala besar, terutama di tengah lonjakan transaksi dan fluktuasi pasar yang tinggi. Hal ini menuntut penguatan berkelanjutan terhadap infrastruktur teknologi informasi, sistem manajemen risiko, dan kualitas layanan.

Selain performa sistem, konsistensi dalam kompetensi layanan juga menjadi perhatian, di mana keandalan operasional tidak hanya bergantung pada individu, melainkan harus menjadi bagian dari kompetensi kelembagaan. Dengan lonjakan transaksi yang terus meningkat, KPEI perlu terus berinvestasi dalam peningkatan kapasitas operasional dan penguatan manajemen risiko guna menjaga stabilitas dan keandalan pasar secara menyeluruh, serta peningkatan kualitas *human capital* dan sistem teknologi informasi.

Dengan seluruh pencapaian dan tantangan tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas pencapaian dalam menjaga stabilitas dan integritas layanan KPEI, serta menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus menjadi landasan untuk terus membangun ketahanan institusi. Konsolidasi internal, penguatan *human capital* dan teknologi informasi, serta peningkatan sistem pengelolaan risiko menjadi prioritas strategis untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing KPEI dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara intensif, sistematis, dan independen terhadap kinerja Direksi serta jalannya operasional Perusahaan. Pengawasan dilakukan melalui rapat yang dilakukan secara berkala, diskusi strategis dengan Direksi dan manajer lini, koordinasi bersama Komite di bawah Dewan Komisaris. Fokus utama pengawasan tahun ini diarahkan pada empat area strategis, yaitu penguatan manajemen risiko, transformasi teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan operasional, serta pengembangan kompetensi kapabilitas sumber daya manusia.

Dalam aspek manajemen risiko, Dewan Komisaris mencermati secara khusus dinamika risiko pasar, risiko

monetary policies in advanced economies, including the United States, particularly through its international trade policies, have all contributed to heightened potential for volatility and systemic risk. Capital outflows have become a particular concern and are seen as one of the main triggers for the rising market risk that must be anticipated going forward.

The Board of Commissioners observes that the increasing volume of transactions and data complexity, from both investors and issuers, has placed significant pressure on IDClear's operational capacity. A key challenge faced by the Company is maintaining speed, accuracy, and system resilience in processing large-scale data, particularly amid transaction surges and heightened market volatility. This situation demands continuous strengthening of information technology infrastructure, risk management systems, and service quality.

Beyond system performance, service competency consistency is also a critical concern. Operational reliability must not rely solely on individuals but be embedded as part of institutional competence. With transaction volumes continuing to rise, IDClear must persistently invest in enhancing operational capacity and reinforcing risk management to safeguard overall market stability and reliability as a whole, as well as improving the quality of human capital and information technology systems.

Considering these achievements and challenges, the Board of Commissioners expresses its appreciation for the accomplishments in maintaining the stability and integrity of IDClear's services and emphasizes that these successes must serve as a foundation for continuously building institutional resilience. Internal consolidation, strengthening of human capital and information technology, as well as the enhancement of risk management systems are strategic priorities to ensure IDClear's sustainability and competitiveness in the face of an increasingly complex and globally integrated market landscape.

IMPLEMENTATION OF SUPERVISORY FUNCTION

Throughout 2024, the Board of Commissioners carried out its supervisory function in an intensive, systematic, and independent manner over the performance of the Board of Directors and the Company's operations. Supervision was conducted through regular meetings, strategic discussions with the Board of Directors and line management, as well as coordination with the Committee under the Board of Commissioners. This year's supervisory focus was directed toward four strategic areas: strengthening risk management, advancing information technology transformation, improving the quality of operational services, and developing human resource capability and competence.

In the area of risk management, the Board of Commissioners closely monitored the dynamics of market risk, operational

operasional, dan risiko strategis yang meningkat seiring dengan eskalasi ketidakpastian global, pertumbuhan volume transaksi, serta ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang semakin kompleks. Sebagai lembaga kliring dan penjaminan, kemampuan KPEI dalam melakukan pengukuran, pemantauan, dan risiko merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas dan integritas KPEI sebagai regulator di pasar modal Indonesia. Dewan Komisaris menilai bahwa metodologi *risk management* KPEI telah selaras dengan praktik terbaik internasional, namun implementasi teknis dan kesiapan operasional perlu terus diperkuat, terutama untuk menjamin kecepatan dan akurasi pemrosesan di tengah lonjakan volume transaksi harian. Dengan meningkatnya eksposur terhadap risiko pasar yang bersifat sistemik, pendekatan manajemen risiko berbasis data dan sistem yang adaptif menjadi semakin krusial.

Selain itu, Dewan Komisaris juga memantau secara aktif proses penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai sistem pengelolaan risiko menyeluruh di tingkat institusi. ERM dipandang krusial dalam memastikan keberlanjutan KPEI, tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari sisi tata kelola, kepatuhan pada regulasi dan hukum, dan keberlangsungan layanan.

Pengawasan juga dilakukan pada proses transformasi teknologi informasi, mengingat sistem Teknologi Informasi merupakan tulang punggung seluruh proses kliring dan penjaminan. Dewan Komisaris mendukung penuh inisiatif strategis pembaruan sistem yang dimulai pada tahun 2024, serta menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam memastikan keberlanjutan operasional pasca-transformasi. Transformasi digital tidak hanya menuntut adopsi teknologi terbaru, tetapi juga menekankan perlunya *change management* yang efektif dan penguatan budaya digital di seluruh lini organisasi.

Dewan Komisaris menekankan pentingnya pengendalian risiko strategis secara sistemik dan berkelanjutan, khususnya yang bersumber dari aspek sumber daya manusia dan proses internal yang masih memerlukan penguatan dan optimalisasi. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang menyeluruh, Dewan Komisaris berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan, inisiatif, dan keputusan manajemen dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta mendukung daya saing dan kesinambungan bisnis KPEI sebagai lembaga kliring dan penjaminan yang terpercaya dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, sinergi solid antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengarahkan Perusahaan menuju perwujudan aspirasinya, yakni menjadi *Central Counterparty* (CCP) terpercaya untuk transaksi bursa, OTC, dan bilateral dengan menyediakan infrastruktur terbaik di kelasnya untuk layanan kliring, manajemen risiko, dan pengelolaan agunan baik di ekosistem pasar modal serta pasar keuangan Indonesia.

risk, and strategic risk, which have intensified in line with escalating global uncertainties, increasing transaction volumes, and growing reliance on complex technology infrastructure. As a clearing and guarantee institution, IDClear's ability to measure, monitor, and manage risks is fundamental to maintaining its stability and integrity as a regulator in the Indonesian capital market. The Board of Commissioners assesses that IDClear's risk management methodology is aligned with international best practices. However, its technical implementation and operational readiness must continue to be strengthened, particularly to ensure the speed and accuracy of processing amid surging daily transaction volumes. With increased exposure to systemic market risks, a data-driven and adaptive risk management approach has become increasingly crucial.

Furthermore, the Board of Commissioners actively monitored the strengthening of Enterprise Risk Management (ERM) as a comprehensive, institution-wide risk management system. ERM is deemed crucial to ensuring IDClear's sustainability, not only from a financial perspective, but also in terms of governance, regulatory and legal compliance, and service continuity.

Supervision was also conducted over the information technology (IT) transformation process, given that Information Technology system is the backbone of all clearing and guarantee activities. The Board of Commissioners fully supports the strategic system renewal initiative launched in 2024 and highlights the importance of human resource readiness in ensuring post-transformation operational continuity. Digital transformation not only demands the adoption of the latest technologies but also calls for effective change management and the strengthening of a digital culture across all levels of the organization.

The Board of Commissioners emphasizes the importance of systemic and sustainable strategic risk control, particularly those risks arising from human resources and internal processes that still require strengthening and optimization. Through the comprehensive implementation of its supervisory function, the Board of Commissioners is committed to ensuring that every policy, initiative, and management decision is executed in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), while supporting the competitiveness and business continuity of IDClear as a trusted and adaptive clearing and guarantee institution. Thus, a solid synergy between the Board of Commissioners and the Board of Directors is essential in steering the Company toward realizing its aspiration to become a trusted Central Counterparty (CCP) for exchange, OTC, and bilateral transactions by providing best-in-class infrastructure for clearing services, risk management, and collateral management within both the capital market ecosystem and Indonesia's broader financial market.

ANALISIS TANTANGAN DAN RISIKO EKSTERNAL

Tahun 2024 ditandai oleh dinamika global yang kompleks dan ketidakpastian, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi stabilitas pasar modal Indonesia serta eksposur sistemik terhadap lembaga infrastruktur seperti KPEI. Dewan Komisaris menilai bahwa tantangan eksternal yang muncul sepanjang tahun telah menimbulkan tekanan terhadap resiliensi kelembagaan, khususnya dalam konteks pengelolaan risiko pasar dan operasional.

Salah satu risiko utama yang menjadi perhatian adalah meningkatnya ketergantungan pasar modal Indonesia terhadap investor institusional asing. Dengan kapasitas investor domestik yang masih terbatas, fluktuasi arus modal global (*capital flow*) dapat berdampak langsung pada volatilitas pasar dan memperbesar risiko sistemik. Sepanjang 2024, meskipun aliran dana asing relatif stabil, potensi terjadinya *capital outflow* tetap tinggi, terutama menjelang transisi kebijakan moneter global, gejolak geopolitik, dan pengetatan fiskal di negara-negara maju.

Situasi tersebut diperburuk oleh ketidakpastian geopolitik yang terus meningkat, termasuk dampak dari kepemimpinan baru di Amerika Serikat, eskalasi konflik global, serta ketegangan perdagangan internasional. Dewan Komisaris mencermati bahwa kondisi ini telah memicu sentimen kehati-hatian di pasar, yang berpotensi memperlemah likuiditas dan mempertinggi risiko pasar (*market risk*). Dalam konteks pasar domestik, Pemilu 2024 juga menambah dimensi ketidakpastian, terutama terhadap arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional ke depan.

Dari sudut pandang makro ekonomi, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, kenaikan suku bunga acuan, dan inflasi yang tetap tinggi di negara-negara utama menjadi faktor eksternal lain yang turut membayangi stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, domestik menghadapi tantangan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan institusional KPEI sebagai *institutional risk manager* utama di pasar modal Indonesia. Seiring dengan semakin tingginya keterhubungan lintas batas (*cross-border interconnectivity*) di sektor keuangan, setiap guncangan eksternal memiliki potensi untuk menciptakan tekanan pada operasional Perusahaan, likuiditas dana jaminan, serta tingkat kepercayaan terhadap fungsi penjaminan yang dijalankan KPEI.

Dewan Komisaris menekankan bahwa pemahaman dan antisipasi terhadap dinamika eksternal harus menjadi bagian integral dari agenda strategis KPEI tidak hanya menjadi domain Direksi, tetapi juga menjadi perhatian Dewan Komisaris dan seluruh organisasi. Respons terhadap tantangan global ini harus diwujudkan dalam bentuk sistem

ANALYSIS OF EXTERNAL CHALLENGES AND RISKS

The year 2024 was marked by complex global dynamics and uncertainties that directly and indirectly affected the stability of the Indonesian capital market as well as the systemic exposure of infrastructure institutions like IDClear. The Board of Commissioners assesses that the external challenges encountered throughout the year have exerted pressure on institutional resilience, particularly in the context of managing market and operational risks.

One of the main risks of concern is the increasing dependence of the Indonesian capital market on foreign institutional investors. Given the still limited capacity of domestic investors, fluctuations in global capital flows can directly impact market volatility and amplify systemic risk. Throughout 2024, although foreign fund inflows remained relatively stable, the potential for capital outflows remained high, especially ahead of global monetary policy transitions, geopolitical turmoil, and fiscal tightening in advanced economies.

This situation has been exacerbated by rising geopolitical uncertainty, including the impact of new leadership in the United States, escalating global conflicts, and heightened international trade tensions. The Board of Commissioners notes that these conditions have triggered cautious sentiment in the market, potentially weakening liquidity and increasing market risk. In the domestic context, the 2024 general election added another layer of uncertainty, particularly regarding the direction of future fiscal and economic policies.

From a macroeconomic perspective, the global economic slowdown, rising benchmark interest rates, and persistently high inflation in major economies are additional external factors that have weighed on financial system stability. Meanwhile, domestically, Indonesia faces challenges in maintaining economic growth momentum and sustaining investor confidence in the integrity of the market.

In this context, the Board of Commissioners emphasizes the importance of enhancing IDClear's institutional preparedness as the primary institutional risk manager in the Indonesian capital market. With the increasing cross-border interconnectivity in the financial sector, any external shock has the potential to exert pressure on the Company's operations, guarantee fund liquidity, and market confidence in IDClear's clearing and guarantee functions.

The Board stresses that understanding and anticipating external dynamics must be an integral part of IDClear's strategic agenda, not only within the scope of the Board of Directors but also as a shared concern of the Board of Commissioners and the entire organization. Responses to global challenges must be reflected in the form of

pengelolaan risiko yang adaptif dan terintegrasi, termasuk melalui penguatan kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM), penguatan posisi permodalan, pengembangan tata kelola berbasis risiko, serta peningkatan ketangguhan operasional di semua lini.

PENGUATAN INTERNAL DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN

Menanggapi tantangan eksternal dan meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kualitas layanan infrastruktur keuangan, Dewan Komisaris menilai bahwa penguatan internal merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan dan ketahanan KPEI ke depan. Upaya ini difokuskan pada tiga dimensi utama yaitu pengembangan sumber daya manusia (*human capital*), transformasi teknologi informasi, serta perencanaan suksesi kepemimpinan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris menekankan bahwa daya saing KPEI sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, di samping peran sistem teknologi sebagai tulang punggung operasional Perusahaan. Sebagai entitas jasa keuangan, keberhasilan KPEI dalam menjalankan mandat kliring dan penjaminan sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan ketangguhan insan organisasinya. Dalam hal ini, Dewan Komisaris terus mendorong penguatan kompetensi kelembagaan (*institutionalized competence*), yakni pengembangan kapabilitas dan standar profesionalisme yang terintegrasi dalam proses bisnis, budaya kerja, serta sistem organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini dimaksudkan agar pencapaian kinerja unggul tidak bersifat personal, melainkan menjadi bagian dari sistem yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang menempati posisi strategis dapat menghasilkan standar layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi.

Sepanjang 2024, Dewan Komisaris memberi arahan kepada Direksi untuk terus memperkuat fungsi pengelolaan SDM melalui program pelatihan terstruktur, peningkatan standar perilaku kerja (*behavioral competence*), serta pembentukan sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang efektif. Isu penurunan kualitas koordinasi, khususnya dalam era kerja *hybrid* dan tingginya pergantian personel, menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, diperlukan sistem rekrutmen, *onboarding*, dan kaderisasi yang mampu memastikan kesinambungan kualitas layanan lintas generasi.

Dari sisi teknologi informasi, Dewan Komisaris mendukung penuh langkah transformasi digital yang telah dijalankan, termasuk proses pengadaan dan implementasi sistem baru yang lebih adaptif terhadap pertumbuhan data dan transaksi. Namun demikian, Dewan Komisaris menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem teknologi tidak hanya ditentukan pada kualitas perangkat lunaknya, tetapi pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelola dan mengoperasikannya dan mengembangkan sistem secara berkelanjutan. Visi jangka panjang yang ingin dicapai adalah

adaptive and integrated risk management systems, including through the strengthening of the Enterprise Risk Management (ERM) framework, capitalization enhancement, development of risk-based governance, and improved operational resilience across all functions.

INTERNAL STRENGTHENING AND LEADERSHIP SUCCESSION

In response to external challenges and the rising market expectations for the quality of financial infrastructure services, the Board of Commissioners views internal strengthening as a fundamental pillar for IDClear's long-term sustainability and resilience. These efforts are focused on three main dimensions: the development of human capital, the transformation of information technology, and the implementation of a structured and sustainable leadership succession plan.

The Board of Commissioners emphasizes that IDClear's competitiveness heavily relies on the quality of its human capital, in addition to the pivotal role of technology systems as the operational backbone of the Company. As a financial services entity, IDClear's success in fulfilling its clearing and guarantee mandates is highly dependent on the competence, integrity, and resilience of its people. In this regard, the Board of Commissioners continues to encourage the strengthening of institutionalized competence, namely the development of capabilities and professionalism standards that are integrated into business processes, work culture, and the overall organizational system. This approach is intended so that the achievement of superior performance is not personalized, but becomes part of a sustainable system. This is essential to guarantee that every individual in a strategic position delivers consistently high-quality service standards.

Throughout 2024, the Board of Commissioners provided guidance to the Board of Directors to continuously enhance human capital management through structured training programs, improved behavioral competence standards, and the establishment of an effective knowledge management system. The decline in coordination quality, especially in the context of hybrid work arrangements and high personnel turnover has become a particular concern. Therefore, a recruitment, onboarding, and succession system is required to ensure the continuity and consistency of service quality across generations.

From the information technology perspective, the Board of Commissioners fully supports the digital transformation initiatives undertaken by IDClear, including the procurement and implementation of new systems designed to be more adaptive to growing data and transaction volumes. Nevertheless, the Board of Commissioners emphasizes that the success of technology system implementation is not solely determined by software quality, but also by the readiness of human resources to manage, operate, and continuously develop these systems. The long-term vision is

terbentuknya sinergi antara sistem dan SDM yang mampu memberikan kualitas layanan yang stabil dan tangguh dalam menghadapi dinamika pasar masa kini maupun masa depan.

Terkait dengan suksesi kepemimpinan, Dewan Komisaris memandang bahwa proses peralihan peran strategis di tubuh KPEI harus disiapkan sejak dini, secara proaktif dan berbasis meritokrasi. Dengan adanya potensi perubahan struktur manajemen di tahun-tahun mendatang, penting bagi perusahaan untuk memiliki *pipeline* talenta yang siap menduduki peran strategis, didukung dengan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan pemahaman mendalam terhadap mandat kelembagaan. Oleh karena itu, sejak tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi untuk membangun program suksesi yang terintegrasi dengan strategi pengembangan SDM dan budaya organisasi.

Dewan Komisaris juga menegaskan bahwa penguatan internal bukan sekadar agenda manajerial, tetapi bagian dari upaya menjaga *going concern* dan integritas KPEI sebagai salah satu pilar utama pasar modal Indonesia. Budaya kerja yang solid dan profesional, teknologi yang andal, dan serta kepemimpinan yang visioner merupakan tiga pilar utama untuk memastikan bahwa KPEI akan tetap relevan, adaptif, dan kompetitif dalam ekosistem keuangan nasional yang terus berubah.

REKOMENDASI STRATEGIS KEPADA DIREKSI

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan tanggung jawab *fiduciary* Dewan Komisaris, sejumlah rekomendasi strategis telah disampaikan kepada Direksi sepanjang tahun 2024. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pemantauan atas dinamika eksternal dan internal, serta diskusi intensif dengan jajaran manajemen dan komite-komite pendukung Dewan Komisaris. Adapun rekomendasi strategis kepada Direksi, antara lain:

- 1. Konsolidasi Internal dan Penguatan Kapasitas Operasional**
Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan konsolidasi menyeluruh terhadap fungsi-fungsi operasional, khususnya dalam rangka menghadapi peningkatan volume transaksi, pertumbuhan jumlah investor, dan kompleksitas produk di pasar modal. Perlu dilakukan pemetaan terhadap kapasitas sistem, kesiapan unit kerja, serta efektivitas koordinasi lintas fungsi guna mencegah potensi kesalahan yang dapat mengganggu kelancaran layanan kliring dan penjaminan.
- 2. Penguatan Manajemen Risiko dan Penerapan ERM secara Terstruktur**
Seiring dengan peningkatan eksposur risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategis, Dewan Komisaris merekomendasikan penguatan kerangka manajemen risiko perusahaan, baik pada level operasional maupun enterprise. Penerapan ERM harus ditingkatkan agar

to establish a synergy between systems and human capital that delivers consistent, resilient service quality capable of withstanding current and future market dynamics.

Regarding leadership succession, the Board of Commissioners views that the transition of strategic roles within IDClear must be proactively and systematically prepared, grounded in a merit-based approach. With potential changes in the management structure in the coming years, it is vital for the Company to maintain a talent pipeline that is ready to assume key leadership roles, supported by strong technical capabilities, leadership qualities, and a deep understanding of the institution's mandate. Since 2023, the Board of Commissioners has recommended the establishment of a succession program that is integrated with IDClear's human capital development strategy and organizational culture.

The Board of Commissioners also emphasizes that internal strengthening is not merely a managerial agenda, but a fundamental effort to uphold IDClear's going concern and institutional integrity as one of the key pillars of the Indonesian capital market. A strong and professional work culture, reliable technology, and visionary leadership are the three essential pillars to ensure that IDClear remains relevant, adaptive, and competitive within an ever-evolving national financial ecosystem.

STRATEGIC RECOMMENDATIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

As part of the implementation of the supervisory function and the fiduciary responsibilities of the Board of Commissioners, several strategic recommendations were submitted to the Board of Directors throughout 2024. These recommendations were formulated based on performance evaluations, monitoring of external and internal dynamics, as well as intensive discussions with the management team and the supporting committees under the Board of Commissioners. The strategic recommendations to the Board of Directors include, among others:

- 1. Internal Consolidation and Strengthening Operational Capacity**
The Board of Commissioners urges the Board of Directors to conduct a comprehensive consolidation of operational functions, especially to address the increasing transaction volumes, growing number of investors, and the complexity of products in the capital market. It is necessary to map system capacities, readiness of work units, and the effectiveness of cross-functional coordination to prevent potential errors that could disrupt the smooth clearing and guarantee services.
- 2. Strengthening Risk Management and Structured Implementation of ERM**
In line with the increased exposure to market risk, operational risk, and strategic risk, the Board of Commissioners recommends strengthening the Company's risk management framework, both at the operational and enterprise levels. The implementation of

mampu mengantisipasi berbagai skenario, termasuk kejadian risiko sistemik, gangguan teknologi, atau disrupsi kelembagaan yang dapat mengancam kelangsungan layanan.

3. Transformasi Teknologi dan Tata Kelola Sistem Informasi

Dewan Komisaris mendukung upaya transformasi sistem teknologi informasi yang tengah berlangsung dan merekomendasikan agar proyek tersebut dikelola dengan pendekatan manajemen perubahan yang komprehensif. Selain implementasi teknologi mutakhir, perlu dikembangkan kebijakan pengelolaan TI yang mencakup aspek keamanan, pemeliharaan berkelanjutan, kesiapan SDM pengelola sistem, serta interoperabilitas antar sistem.

4. Pengembangan SDM dan Pembangunan Kompetensi Kelembagaan

Mengingat pentingnya sumber daya manusia sebagai pilar utama keberhasilan KPEI, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk memperkuat kebijakan pengembangan SDM yang berorientasi pada jangka panjang. Program pelatihan, rotasi internal, serta penguatan nilai dan budaya kerja harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan SDM. Pembangunan kompetensi harus diarahkan pada penciptaan *pool of talent* yang mampu mendukung keberlangsungan layanan tanpa tergantung pada individu tertentu.

5. Perencanaan Suksesi dan Penguatan Kepemimpinan Organisasi

Dewan Komisaris menekankan pentingnya penyusunan rencana suksesi (*succession plan*) yang sistematis dan berbasis pada sistem meritokrasi atau penilaian objektif terhadap potensi dan kinerja karyawan. Hal ini sangat penting mengingat adanya keterbatasan waktu pada siklus kepemimpinan di KPEI. Dengan menyiapkan pemimpin masa depan sejak dini, keberlangsungan kepemimpinan yang berkualitas, arah strategis dan budaya organisasi dapat dijaga secara berkesinambungan.

6. Pengembangan Bisnis dan Diversifikasi Layanan Secara Selektif

Dewan Komisaris juga menyarankan agar Direksi melakukan kajian strategis terhadap potensi perluasan layanan atau diversifikasi usaha yang relevan dengan mandat kelembagaan. Namun demikian, setiap ekspansi harus dilakukan secara selektif, berbasis risiko dan kelayakan finansial, serta tidak mengganggu fokus utama KPEI sebagai lembaga penjaminan dan kliring yang andal.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KPEI dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Dewan Komisaris percaya bahwa dengan pelaksanaan strategi yang tepat dan didukung oleh manajemen yang kompeten, KPEI akan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu lembaga yang menjaga stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia.

Enterprise Risk Management (ERM) must be enhanced to anticipate various scenarios, including systemic risk events, technological disruptions, or institutional disturbances that could threaten service continuity.

3. Technology Transformation and Information Systems Governance

The Board of Commissioners supports the ongoing information technology system transformation efforts and recommends that the project be managed with a comprehensive change management approach. In addition to the implementation of advanced technologies, it is essential to develop IT governance policies that encompass security aspects, sustainable maintenance, the readiness of system-operating personnel, as well as interoperability between systems.

4. Human Capital Development and Institutional Competence Building

Recognizing the importance of human resources as a key pillar of IDClear's success, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to strengthen long-term-oriented human capital development policies. Training programs, internal rotations, and reinforcement of values and work culture must be an integral part of the HR management strategy. Competence building should aim at creating a pool of talent capable of sustaining service delivery without reliance on specific individuals.

5. Succession Planning and Strengthening Organizational Leadership

The Board of Commissioners emphasizes the importance of developing a systematic succession plan based on a meritocratic system or an objective assessment of employee potential and performance. This is particularly important given the time constraints of the leadership cycle at KPEI. By preparing future leaders early, the continuity of high-quality leadership, strategic direction, and organizational culture can be maintained sustainably.

6. Business Development and Selective Service Diversification

The Board of Commissioners also recommends that the Board of Directors conduct a strategic review of potential service expansion or business diversification relevant to the institutional mandate. However, any expansion must be carried out selectively, based on risk and financial feasibility, and must not detract from KPEI's primary focus as a reliable clearing and guarantee institution.

Overall, these recommendations are intended to strengthen IDClear's institutional capacity in facing increasingly complex future challenges. The Board of Commissioners believes that with the implementation of the right strategies and support from a competent management team, IDClear will be able to maintain its role as a institution safeguarding the stability and integrity of the Indonesian capital market.

Ronald Waas

Komisaris
Commissioner

Hoesen

Komisaris Utama
President Commissioner

Uriep Budhi Prasetyo

Komisaris
Commissioner



PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DAN INTEGRITAS ORGANISASI

Sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan strategis, Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pasar, efektivitas operasional, serta keberlanjutan jangka panjang KPEI. Oleh karena itu, komitmen terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus terinternalisasi secara menyeluruh dalam setiap lapisan organisasi.

Dewan Komisaris secara konsisten mendorong terbentuknya budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya menjadi norma perilaku, tetapi juga menjadi kerangka pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam menghadapi tekanan pasar, dinamika regulasi, serta risiko reputasi. Dalam berbagai rapat evaluatif dan dialog strategis, Dewan Komisaris menekankan bahwa keberhasilan operasional tanpa integritas hanya akan bersifat semu dan tidak berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, kami telah memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2024 beserta revisinya, serta memantau kinerja pelaksanaan rencana dan pemanfaatan anggaran tersebut setiap triwulan. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam memimpin jalannya bisnis Perusahaan dan menjawab tantangan yang muncul dengan strategi yang efektif dan pendekatan yang berkelanjutan.

Dengan mengacu pada target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi yang disusun setiap tahun sebagai tolak ukur penilaian kinerja mereka baik secara individu maupun kolektif, kami menilai bahwa kinerja Direksi cukup baik. Dewan Komisaris terus mendukung dan mengarahkan Direksi agar pencapaian KPI mereka meningkat di masa mendatang.

Dari hasil pengawasan selama tahun 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa struktur tata kelola di KPEI telah dijalankan dengan prinsip-prinsip GCG yang memadai. Mekanisme pemisahan fungsi antara organ perusahaan, keberadaan komite-komite di KPEI turut membantu kinerja Dewan Komisaris, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban telah berfungsi secara efektif dalam menjaga keseimbangan kontrol dan pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh empat komite utama, masing-masing memiliki peran spesifik yang krusial dalam memperkuat kualitas tata kelola perusahaan. Komite Audit secara aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kualitas

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND ORGANIZATIONAL INTEGRITY

As part of its strategic oversight responsibilities, the Board of Commissioners views the implementation of good corporate governance as a fundamental pillar in maintaining market trust, operational effectiveness, and IDClear's long-term sustainability. Therefore, a strong commitment to integrity, transparency, and accountability must be thoroughly internalized across all levels of the organization.

The Board of Commissioners consistently promotes a culture of integrity and accountability across all levels of management and employees. These core values are not only behavioral norms but also serve as a strategic decision-making framework, especially when facing market pressures, regulatory dynamics, and reputational risks. In various evaluative meetings and strategic dialogues, the Board of Commissioners has emphasized that operational success without integrity is merely superficial and unsustainable.

In carrying out its oversight duties over the Company's management by the Board of Directors, we have approved the 2024 Annual Work Plan and Budget (RKAT) and its revisions and monitored the performance of its implementation and budget utilization on a quarterly basis. The Board of Commissioners ensures that the Board of Directors has demonstrated their best performance in leading the Company's operations and responding to emerging challenges with effective strategies and a sustainable approach.

Referring to the Key Performance Indicators (KPIs) of the Board of Directors, which are established annually as benchmarks for assessing the performance both individually and collectively, we assess that the Board of Directors has performed adequately. The Board of Commissioners continues to support and guide the Board of Directors to further improve their KPI achievements in the future.

Based on the oversight conducted throughout 2024, the Board of Commissioners considers that IDClear's governance structure has been implemented in accordance with sound Good Corporate Governance (GCG) principles. The mechanisms for the segregation of functions among corporate organs, the existence of committees at IDClear also helps the performance of the Board of Commissioners, as well as the reporting and accountability systems, have all functioned effectively in maintaining a balanced control and decision-making process.

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is supported by four main committees, each with a specific and crucial role in strengthening the quality of corporate governance. The Audit Committee actively performs oversight of the quality of financial

pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta pelaksanaan pengendalian internal yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Komite ini juga menelaah berbagai aspek kepatuhan terhadap regulasi dan memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti dengan tindakan korektif yang memadai.

Sementara itu, Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko berperan dalam mendukung Dewan Komisaris dalam pengawasan atas penerapan manajemen risiko dan kebijakan kredit penjaminan, khususnya dalam merespons dinamika pasar dan kompleksitas transaksi. Komite ini menelaah kesesuaian kerangka kebijakan risiko, kecukupan mitigasi terhadap potensi gagal bayar, serta konsistensi antara profil risiko dan daya tahan keuangan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan dana jaminan.

Komite Haircut berfungsi meninjau dan memberikan masukan terhadap kebijakan penyesuaian nilai jaminan (*haircut policy*) yang digunakan dalam mekanisme penjaminan transaksi. Dalam situasi pasar yang *volatile*, akurasi dan keandalan perhitungan *haircut* menjadi elemen penting untuk menjaga integritas sistem kliring dan penjaminan, sekaligus melindungi kepentingan semua pihak dalam ekosistem pasar modal.

Komite Investasi mendampingi Dewan Komisaris dalam memberikan evaluasi terhadap strategi dan pelaksanaan investasi KPEI, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana jaminan dan dana operasional perusahaan. Komite ini memastikan bahwa keputusan investasi dilakukan secara *prudent*, sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan keuangan perusahaan.

Adapun Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko memiliki fungsi dalam memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan operasional dalam mendukung pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi PUVA, serta memberikan rekomendasi atas penanganan gagal bayar pada anggota CCP PUVA.

Sinergi antara Dewan Komisaris dan seluruh komite pendukung telah memperkuat fungsi *check and balances* di lingkungan KPEI. Peran aktif masing-masing komite dalam memberikan kajian, rekomendasi, dan pengawasan memungkinkan Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas secara lebih efektif, baik dalam aspek pengendalian risiko, transparansi keuangan, maupun arah strategis pengelolaan institusi.

Dewan Komisaris juga memantau secara berkala pelaksanaan fungsi kepatuhan serta penguatan sistem pengendalian internal. KPEI telah mengembangkan kebijakan dan prosedur internal untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional mematuhi ketentuan

reporting, the effectiveness of the internal audit system, and the implementation of internal controls that promote transparency and accountability. The Committee also reviews various compliance aspects with prevailing regulations and ensures that audit findings are followed up with adequate corrective actions.

Meanwhile, the Credit Policy and Risk Management Committee supports the Board of Commissioners in supervising the implementation of risk management and guarantee credit policies, particularly in response to market dynamics and transaction complexity. The Committee reviews the adequacy of the risk policy framework, the sufficiency of mitigation measures against potential defaults, and the consistency between the Company's risk profile and its financial resilience, including in the management of the guarantee fund.

The Haircut Committee functions to review and provide input on the collateral value adjustment policy (*haircut policy*) used in the transaction guarantee mechanism. In volatile market conditions, the accuracy and reliability of haircut calculations are crucial elements for maintaining the integrity of the clearing and guarantee systems, while also protecting the interests of all parties within the capital market ecosystem.

The Investment Committee supports the Board of Commissioners by evaluating IDClear's investment strategy and execution, particularly in relation to the management of the guarantee fund and the Company's operational funds. This Committee ensures that investment decisions are made prudently, aligned with the established risk appetite, and consistent with the principles of caution and the financial sustainability of the Company.

The CCP Clearing and Risk Handling Committee has a function in providing input, advice, and recommendations to the Board of Directors and the Board of Commissioners in connection with operational policies in supporting the implementation of clearing and guaranteeing PUVA transaction settlements, as well as providing recommendations for handling defaults on PUVA CCP members.

Synergy between the Board of Commissioners and all supporting committees has strengthened the check-and-balances function within IDClear. The active roles of each committee in providing assessments, recommendations, and oversight have enabled the Board of Commissioners to carry out its duties more effectively, particularly in the areas of risk control, financial transparency, and strategic institutional management.

The Board of Commissioners also regularly monitors the implementation of compliance functions and the strengthening of internal control systems. IDClear has developed internal policies and procedures to ensure that all operational activities comply with prevailing

perundang-undangan dan standar industri yang berlaku. Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mendorong penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kapasitas satuan kerja yang menangani fungsi kontrol dan kepatuhan.

Terkait sistem *anti-fraud* dan *whistleblowing*, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas pelaksanaannya. Dewan Komisaris menilai bahwa keberadaan kebijakan anti-kecurangan, mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dan saluran komunikasi internal telah menjadi langkah positif dalam mendorong transparansi dan pelaporan insiden secara aman. Namun demikian, penguatan kultur etika dan keberanian melaporkan pelanggaran tetap harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, penting untuk terus membangun iklim organisasi yang aman dan suportif, di mana integritas dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Dewan Komisaris juga menegaskan pentingnya penguatan budaya etika sebagai bagian dari sistem nilai kelembagaan. Etika bisnis yang tinggi tidak hanya diwujudkan dalam kode etik atau kebijakan tertulis, tetapi harus ditanamkan melalui keteladanan pimpinan, penguatan sistem insentif berbasis nilai, serta internalisasi nilai-nilai Perusahaan ke dalam proses kerja harian.

Dewan Komisaris menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi tata kelola dan budaya integritas tidak hanya ditentukan oleh sistem yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan, konsistensi pengawasan, dan partisipasi aktif seluruh insan KPEI dalam menjunjung nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA TAHUN 2025

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2025 merupakan periode strategis sekaligus menantang bagi KPEI dalam memperkuat perannya sebagai lembaga kliring dan penjaminan yang tangguh, kredibel, dan adaptif. Meskipun kondisi pasar diproyeksikan masih akan dibayangi oleh ketidakpastian global, termasuk dampak lanjutan dari kebijakan moneter dan kebijakan perdagangan internasional negara maju, dinamika geopolitik, serta volatilitas ekonomi, KPEI diposisikan secara unik untuk memainkan peran stabilisator yang krusial dalam menjaga kepercayaan terhadap pasar modal nasional.

Sebagai *Central Counterparty* dari sistem transaksi pasar modal, KPEI dituntut tidak hanya menjaga kelangsungan operasional melalui proses kliring dan penjaminan, tetapi juga memperkuat perannya dalam memastikan stabilitas sistemik dan integritas pasar secara menyeluruh. Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa keberhasilan KPEI di tahun-tahun mendatang sangat

laws and industry standards. Nevertheless, the Board of Commissioners continues to encourage ongoing improvements to the risk-based supervision system and the enhancement of the capacity of units responsible for control and compliance functions.

Regarding the anti-fraud and whistleblowing systems, the Board of Commissioners places special attention on their effectiveness. The Board of Commissioners believes that the existence of anti-fraud policies, a whistleblowing mechanism, and internal communication channels represent positive steps in promoting transparency and secure incident reporting. However, strengthening the ethical culture and encouraging the courage to report violations must remain a priority. Therefore, it is essential to continue fostering a safe and supportive organizational climate, where integrity is regarded as a shared responsibility, not merely a matter of administrative compliance.

The Board of Commissioners also emphasizes the importance of strengthening an ethical culture as an integral part of the institution's value system. High standards of business ethics should not only be reflected in codes of conduct or written policies, but must be instilled through exemplary leadership, value-based incentive systems, and the internalization of Corporate values into daily work processes.

The Board of Commissioners highlights that the successful implementation of governance and a culture of integrity is not solely determined by the systems in place, but also by the quality of leadership, the consistency of oversight, and the active participation of all IDClear personnel in upholding the values of professionalism, accountability, and public trust.

OUTLOOK ON BUSINESS PROSPECTS FOR 2025

The Board of Commissioners views 2025 as both a strategic and challenging period for IDClear to strengthen its role as a resilient, credible, and adaptive clearing and guarantee institution. Although market conditions are projected to remain under the shadow of global uncertainties, including ongoing impacts from monetary and trade policies of major economies, geopolitical dynamics, and economic volatility, IDClear is uniquely positioned to play a crucial stabilizing role in maintaining trust in the national capital market.

As the central counterparty in the capital market transaction system, IDClear is expected not only to maintain operational continuity through its clearing and guarantee processes but also to strengthen its role in ensuring systemic stability and overall market integrity. In this context, the Board of Commissioners believes that IDClear's future success will heavily depend on its ability to enhance resilience, across

bergantung pada kemampuan institusi dalam memperkuat *resilience*, baik dari sisi *human capital*, sistem, struktur organisasi, maupun budaya kerja.

Dewan Komisaris optimis bahwa dengan langkah-langkah strategis yang telah dirintis sejak tahun 2023 dan diperkuat sepanjang tahun 2024, termasuk pembaruan infrastruktur teknologi informasi, pembangunan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola berbasis risiko, KPEI memiliki fondasi yang kokoh untuk melanjutkan perannya secara berkelanjutan. Agenda transformasi yang tengah dijalankan harus dipertahankan momentumnya, termasuk dalam memastikan implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) secara menyeluruh dan penguatan sistem pengendalian internal yang adaptif terhadap dinamika pasar.

Dewan Komisaris menegaskan bahwa penguatan *Enterprise Risk Management* (ERM) dan sistem pengendalian internal yang adaptif dan berbasis data merupakan kunci untuk menjaga resiliensi KPEI. Kemampuan institusi dalam memproyeksikan risiko, merespons dinamika pasar, serta menyusun mitigasi yang terukur menjadi indikator utama keberhasilan di tahun 2025.

Di sisi lain, konsistensi layanan harus tetap terjaga di tengah potensi ekspansi instrumen pasar seperti derivatif, repo, dan pasar uang. Kesiapan KPEI dalam mendukung inovasi ini akan memperkuat peran strategisnya dalam mendalami dan mengefisienkan ekosistem keuangan nasional, sejalan dengan arah kebijakan OJK.

Dengan tata kelola yang solid, kepemimpinan yang responsif, dan kolaborasi seluruh elemen organisasi, Dewan Komisaris meyakini KPEI mampu menjawab tantangan 2025 secara tangguh dan relevan. Dewan Komisaris akan terus mengawal dan mendukung transformasi manajemen demi memastikan keberlanjutan peran KPEI sebagai salah satu pilar utama infrastruktur di pasar modal dan pasar keuangan Indonesia. Kami akan terus mengawal dan mendukung setiap langkah transformasi yang dijalankan demi menjaga keberlangsungan, kredibilitas, dan daya saing KPEI di masa depan.

PENUTUP

Menutup Laporan Dewan Komisaris ini, kami menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kepemimpinan seluruh jajaran Direksi atas komitmen serta kerja keras dalam menjalankan mandat operasional, strategis, dan tata kelola sepanjang tahun 2024. Di tengah lingkungan eksternal yang dinamis dan penuh ketidakpastian, Direksi telah menunjukkan kemampuan adaptif dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang tercermin dalam kinerja keuangan yang solid, penguatan kelembagaan, serta berbagai pencapaian transformasional.

human capital, systems, organizational structure, and work culture.

The Board is optimistic that with the strategic initiatives initiated since 2023 and further reinforced throughout 2024, including the renewal of information technology infrastructure, development of human resource competencies, and the strengthening of risk-based governance, IDClear has established a solid foundation to sustain its institutional role. The ongoing transformation agenda must maintain its momentum, particularly in ensuring the comprehensive implementation of Enterprise Risk Management (ERM) and the reinforcement of an internal control system that is adaptive to market dynamics.

The Board of Commissioners emphasizes that strengthening Enterprise Risk Management (ERM) and developing an adaptive, data-driven internal control system are key to maintaining IDClear's resilience. The institution's ability to project risks, respond to market dynamics, and design measurable mitigation strategies will serve as primary indicators of success in 2025.

On the other hand, service consistency must be maintained amid potential market instrument expansions such as derivatives, repos, and the money market. IDClear's readiness to support these innovations will further solidify its strategic role in deepening and enhancing the efficiency of the national financial ecosystem, in alignment with OJK's policy direction.

With solid governance, responsive leadership, and collaboration across all elements of the organization, the Board of Commissioners believes that IDClear is well-positioned to face the challenges of 2025 with resilience and relevance. The Board of Commissioners will continue to oversee and support the management transformation to ensure the sustainability of IDClear's role as one of the key pillars of Indonesia's financial market infrastructure. We remain committed to closely monitoring and supporting every step of the transformation to safeguard IDClear's continuity, credibility, and competitiveness in the years ahead.

CLOSING

In closing this Report of the Board of Commissioners, we would like to extend our appreciation for the performance and leadership of the entire members of the Board of Directors for their commitment and hard work in carrying out their operational, strategic, and governance mandates throughout 2024. Amid a dynamic and uncertain external environment, the Board of Directors has demonstrated adaptive capabilities and responsible leadership, as reflected in solid financial performance, institutional strengthening, and various transformational achievements.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh karyawan KPEI yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga kualitas layanan, profesionalisme, dan integritas kelembagaan. Setiap langkah yang dilakukan oleh insan KPEI merupakan bagian penting dari upaya kolektif menjaga stabilitas pasar modal Indonesia dan memperkuat kepercayaan investor.

Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga-lembaga Jasa Keuangan di pasar modal serta pasar keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Kemitraan yang baik dengan seluruh pihak menjadi modal penting bagi keberlanjutan peran KPEI sebagai lembaga penjaminan dan kliring yang strategis.

Ke depan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, memperkuat pengawasan strategis, serta memberikan arahan yang konstruktif demi menjaga keberlangsungan, ketangguhan, dan daya saing KPEI dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan keberlanjutan, kami meyakini KPEI akan terus berkembang sebagai institusi yang relevan dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.

We also express our sincere appreciation to all IDClear employees who have shown outstanding dedication in maintaining service quality, professionalism, and institutional integrity. Every action taken by the people of IDClear is a vital part of the collective effort to maintain the stability of the Indonesian capital market and strengthen investor confidence.

We also extend our gratitude to the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), Indonesia Stock Exchange (IDX), Financial Services Institutions in the capital market and financial market, as well as all stakeholders for their continued support, trust, and collaboration. Strong partnerships with all parties serve as a key foundation for the sustainability of IDClear's strategic role as a clearing and guarantee institution.

Looking ahead, the Board of Commissioners is committed to continuously overseeing the implementation of good corporate governance, strengthening strategic supervision, and providing constructive guidance to ensure the sustainability, resilience, and competitiveness of IDClear in facing future challenges.

With a spirit of collaboration, integrity, and sustainability, we believe that IDClear will continue to grow as a relevant and competitive institution, both nationally and globally.

Jakarta, Juni 2025

Jakarta, June 2025

Atas Nama Dewan Komisaris,
On Behalf of the Board of Commissioners



Hoesen

Komisaris Utama
President Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan
 This page is intentionally left blank





Penetapan KPEI sebagai *Central Counterparty* (CCP) untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) menjadi salah satu pencapaian strategis pada tahun 2024. Langkah ini merepresentasikan perluasan peran KPEI dari penyedia jasa kliring di pasar modal menuju kontribusi yang lebih menyeluruh dalam ekosistem keuangan nasional, serta menegaskan komitmen untuk menyediakan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan agunan yang terintegrasi dan andal

The designation of IDCclear as the Central Counterparty (CCP) for the Money and Foreign Exchange Market (PUVA) is one of the strategic achievements in 2024. This step represents the expansion of IDCclear's role from a clearing service provider in the capital market to a more comprehensive contribution to the national financial ecosystem, as well as affirming its commitment to providing integrated and reliable clearing, guarantee, risk management, and collateral services.

Iding Pardi

Direktur Utama
President Director



Laporan Direksi

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa izinkan saya mewakili Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), menyampaikan laporan kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2024. Laporan ini memuat berbagai pencapaian strategis yang telah diraih, tantangan yang berhasil diatasi, serta arah kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Selama tahun berjalan, KPEI terus memperkuat perannya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atas penyelesaian transaksi di bursa efek, serta mengambil langkah penting dalam memperluas cakupan layanan guna mendukung perkembangan pasar keuangan nasional.

Salah satu pencapaian penting KPEI tahun ini adalah penetapannya sebagai *Central Counterparty* (CCP) untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), yang menjadi tonggak bersejarah dalam perluasan peran KPEI dari sebelumnya berfokus pada pasar modal menuju kontribusi yang lebih luas dalam ekosistem pasar keuangan nasional. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen KPEI dalam memperkuat fondasi pasar keuangan melalui layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan pengelolaan agunan yang andal dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan upaya Perusahaan untuk mendukung pasar keuangan yang semakin transparan, efisien, dan likuid. Direksi meyakini bahwa langkah strategis ini akan memperkuat posisi KPEI dalam ekosistem pasar keuangan nasional, sekaligus juga memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL

Tahun 2024 ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian yang tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan bertahan pada level 3,2% untuk periode 2024–2025. Namun, tekanan terhadap perekonomian global masih membayangi, seiring dengan meningkatnya risiko geopolitik, kebijakan moneter yang ketat, volatilitas pasar, serta perlambatan ekonomi di Tiongkok. Meskipun inflasi global menunjukkan tren penurunan, prospek pemulihan masih dibayangi oleh fragmentasi perdagangan dan disrupsi rantai pasok yang dipicu oleh proses dekarbonisasi dan digitalisasi. Volatilitas harga komoditas turut menambah tekanan, terutama bagi negara berkembang yang mengalami arus modal tidak stabil dan pelemahan nilai tukar.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude to God Almighty, allow me, on behalf of the Board of Directors of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear), to present the report on the Company's performance throughout 2024. This report outlines various strategic achievements, challenges successfully addressed, and the policy directions and strategies undertaken to realize the Company's vision and mission. Throughout the year, IDClear has continued to strengthen its role as a Clearing and Guarantee Institution for the settlement of exchange transactions, while also taking significant steps to expand the scope of its services in support of the development of the national financial market.

One significant achievement this year is the designation of IDClear as the Central Counterparty (CCP) for the money market and foreign exchange market (PUVA), which marks a historic milestone in IDClear's expansion of roles from previously focusing on the capital market to a broader role within the national financial market ecosystem. This step is a concrete manifestation of IDClear's commitment to strengthening the financial market foundation through reliable and integrated clearing, guarantee, risk management, and collateral management services. This is in line with the Company's efforts to support an increasingly transparent, efficient, and liquid financial market. The Board of Directors believes that this strategic step will strengthen IDClear's position in the national financial market ecosystem, while also providing a real contribution to the financial system stability and national economic growth.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

The year 2024 was marked by a slowdown in global economic growth amid high uncertainty. The global economic growth projection was expected to hold steady at 3.2% for the 2024–2025 period. However, pressures on the global economy remained, driven by rising geopolitical risks, tight monetary policies, market volatility, and economic slowdown in China. Although global inflation showed a downward trend, the recovery outlook was still clouded by trade fragmentation and supply chain disruptions, caused by the processes of decarbonization and digitalization. Commodity price volatility further added pressure, especially for developing countries experiencing unstable capital flows and currency depreciation.

Di tengah tantangan global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid, tercermin dari pertumbuhan PDB sebesar 5,05% pada triwulan III 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat, inflasi yang terkendali, serta kebijakan moneter akomodatif dari Bank Indonesia. Sektor industri, khususnya manufaktur dan hilirisasi mineral, mencatat kinerja positif yang mendukung agenda transformasi ekonomi nasional, sementara sektor jasa menunjukkan pemulihan pesat berkat percepatan digitalisasi. Di sisi lain, sektor keuangan tetap resilien dengan permodalan yang kuat, pertumbuhan kredit positif, serta peningkatan inklusi keuangan melalui penguatan ekosistem keuangan digital.

Meskipun dihadapkan pada berbagai sentimen negatif dari dinamika ekonomi dan politik global, pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang positif sepanjang tahun 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi di level 7.905,390 dan ditutup pada posisi 7.036,57 pada akhir tahun, tumbuh 3,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas perdagangan juga menunjukkan pemulihan, dengan Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) mencapai Rp12,9 triliun, volume transaksi harian sebesar 19,9 miliar lembar saham, dan frekuensi transaksi harian mencapai 1,13 juta kali.

Jumlah investor pasar modal terus meningkat, mencapai 14,84 juta investor, termasuk 6,37 juta investor saham, naik lebih dari 1 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata investor aktif harian tercatat sebanyak 147 ribu orang hingga akhir Desember 2024. Dari sisi pencatatan, Bursa Efek Indonesia (BEI) membukukan 943 perusahaan tercatat, dengan 41 IPO baru menempati peringkat ke-10 dunia dalam jumlah IPO, dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp14,3 triliun. Di tengah peningkatan partisipasi dan pencatatan, pasar modal Indonesia juga terus memperkuat fondasinya melalui komitmen terhadap keberlanjutan, sejalan dengan arah transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah ketidakpastian global. Pemerintah terus berfokus pada percepatan transformasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta pengelolaan risiko secara cermat guna menjaga momentum pertumbuhan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

KPEI menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pasar modal nasional melalui inisiatif strategis yang selaras dengan arah kebijakan regulator. Salah satu langkah utama yang tengah dipersiapkan adalah implementasi layanan derivatif keuangan, sebagai bagian dari upaya memperluas produk, memperdalam segmentasi investor, dan meningkatkan likuiditas di pasar modal Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Amid global challenges, Indonesia's economy continued to demonstrate solid resilience, as reflected in its GDP growth of 5.05% in the third quarter of 2024. This growth was driven by strong household consumption, controlled inflation, and accommodative monetary policy from Bank Indonesia. The industrial sector, particularly manufacturing and mineral downstreaming, recorded positive performance that supported the national economic transformation agenda, while the services sector showed a rapid recovery due to accelerated digitalization. On the other hand, the financial sector remained resilient with strong capital, positive credit growth, and increased financial inclusion through the strengthening of digital financial ecosystem.

Despite various negative sentiments arising from global economic and political dynamics, the Indonesian capital market demonstrated resilience and positive growth throughout 2024. The Indonesia Stock Exchange Composite Index (IHSG) reached an all-time high at the level of 7,905.390 and closed at 7,036.57 by year-end, growing by 3.25% compared to the previous year's index. Trading activity also showed recovery, with the average daily transaction value reaching Rp12.9 trillion, daily transaction volume at 19.9 billion shares, and daily transaction frequency reaching 1.13 million times.

The number of capital market investors continued to rise, reaching 14.84 million investors, including 6.37 million stock investors, an increase of more than 1 million compared to the previous year's number. The average number of daily active investors was recorded at 147 thousand people at the end of December 2024. On the listing side, Indonesia Stock Exchange (IDX) recorded 943 listed companies, with 41 new IPOs, placing Indonesia 10th globally in terms of IPO count, with a total of Rp14.3 trillion in funds raised. Amid increasing participation and listings, the Indonesian capital market also continues to strengthen its foundation through a firm commitment to sustainability, in line with the direction of inclusive and sustainable national economic transformation.

Overall, the Indonesian economic foundation remains strong amid global uncertainty. The government continues to focus on accelerating economic transformation, enhancing competitiveness, and carefully managing risks to sustain growth momentum toward the vision of Golden Indonesia 2045.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

IDClear reaffirms its commitment to supporting the national capital market development through strategic initiatives, aligned with the direction of regulatory policies. One key initiative currently being prepared is the implementation of financial derivatives clearing services, as part of efforts to expand product offerings, deepen investor segmentation, and enhance liquidity in Indonesia's capital market. This initiative aligns with the mandate of Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK

Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan derivatif ini mulai berjalan efektif pada akhir 2024.

Layanan derivatif keuangan KPEI akan difokuskan pada kontrak berjangka dengan *underlying* indeks saham asing, seperti Nikkei 225 Jepang dan Hang Seng Hong Kong. Sebagai nilai tambah, penyelesaian transaksi menggunakan mata uang rupiah akan menjadi salah satu keunggulan, yang diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat daya saing pasar modal domestik, khususnya bagi investor yang selama ini menghadapi kendala terkait valuta asing.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, KPEI selalu berupaya untuk memainkan peran yang semakin signifikan dalam pengembangan ekosistem pasar modal Indonesia yang lebih dalam dan berdaya saing tinggi. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya KPEI untuk memenuhi standar pasar modal internasional. Dengan memperluas jenis instrumen yang tersedia di pasar modal, KPEI berharap dapat menarik lebih banyak investor global ke Indonesia.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Direksi menjalankan peran strategis dalam merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan Perusahaan serta penguatan peran KPEI dalam ekosistem pasar modal Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggung jawab memastikan setiap strategi yang diambil sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi secara aktif mengarahkan penyusunan inisiatif strategis, termasuk pengembangan layanan baru, peningkatan infrastruktur sistem, serta penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Selain itu, Direksi memastikan pelaksanaan strategi berjalan efektif melalui pembagian tugas yang jelas antar anggota, namun tetap menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab kolektif atas kinerja Perusahaan.

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Tahun 2024 merupakan periode penting bagi KPEI dalam memperkuat perannya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) sekaligus memperluas mandatnya sebagai *Central Counterparty* (CCP) di pasar keuangan. Kinerja operasional KPEI tetap solid, dengan penyelesaian transaksi berjalan lancar, didukung sistem yang andal dan pengelolaan risiko yang *prudent*. Keberhasilan KPEI dalam menjalankan strategi bisnis sebagaimana telah dijelaskan di atas, antara lain diukur melalui sembilan indikator kinerja utama (KPI). Sebagian besar KPI berhasil kami melampaui dari target yang telah dicanangkan.

Law), which transfers the regulation and supervision of financial derivatives from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) to the Financial Services Authority (OJK). The financial derivatives service is set to become effective by the end of 2024.

IDCclear's financial derivatives services will focus on futures contracts with foreign stock index underlying, such as Japan's Nikkei 225 and Hong Kong's Hang Seng. As an added value, transaction settlement will be conducted in Indonesian rupiah, which will be one of the advantages and is expected to not only improve efficiency but also strengthen the competitiveness of domestic capital market, particularly for investors who have long faced challenges related to foreign exchange.

Through these strategic initiatives, IDCclear consistently strives to play an increasingly significant role in developing a deeper and more competitive Indonesian capital market ecosystem. This step is also part of IDCclear's efforts to meet international capital market standards. By expanding the range of instruments available in the capital market, IDCclear aims to attract more global investors to Indonesia.

BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

The Board of Directors plays a strategic role in formulating, establishing, and implementing policies that support the achievement of the Company's objectives and the strengthening of IDCclear's role within the Indonesian capital market ecosystem. In carrying out its duties, the Board of Directors is responsible for ensuring that every adopted strategy aligns with the Company's vision, mission, and values, as well as complies with the prevailing laws and regulations. The Board of Directors actively oversees the development of strategic initiatives, including the introduction of new services, enhancement of system infrastructure, and strengthening of governance and risk management. Furthermore, the Board of Directors ensures effective strategy execution through a clear division of duties among its members, while upholding the principle of collective responsibility for the Company's performance.

2024 PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

The year 2024 marked a significant period for IDCclear in strengthening its role as a Clearing and Guarantee Institution (LKP), while also expanding its mandate as a Central Counterparty (CCP) in the financial market. IDCclear's operational performance remained solid, with smooth transaction settlements supported by reliable systems and prudent risk management. IDCclear's success in executing its business strategy, as outlined above, is measured among others through nine Key Performance Indicators (KPIs), most of which surpassed the established targets.

Dalam hal persentase ketersediaan sistem-sistem utama, kami mencatat skor 99,64%, di atas target sebesar 99,4%. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjalankan praktik bisnis berstandar internasional sebagai CCP, KPEI berhasil meraih skor 99,51% dalam pemenuhan standar internasional melampaui target sebesar 99%. Selain itu, KPEI juga berhasil mempertahankan tingkat kecukupan agunan sesuai target, yaitu sebesar 100%. Dari sisi layanan, tingkat kepuasan Anggota Kliring (AK) sebagai pengguna jasa kami tercatat sebesar 82,87%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 82%.

Selain itu Penambahan jumlah investor yang berhasil dicapai dengan adanya peningkatan sebesar 22%, dari 12,17 juta Single Investor Identification (SID) menjadi 14,84 juta SID pada tahun 2024 merupakan hasil kolaborasi seluruh SRO yang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam penambahan jumlah investor melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal. Sementara itu, terdapat satu *Key Performance Indicator* (KPI) yang belum tercapai, yaitu Ketepatan Waktu Proses Penyelesaian. Sepanjang tahun ini dan ke depan, KPEI terus berupaya menyediakan sistem dan infrastruktur yang stabil dan andal, seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan perluasan layanan. Hal ini telah diantisipasi melalui investasi pada sistem dan infrastruktur, yang mulai diimplementasikan sejak tahun ini. KPEI telah mengoperasikan sistem dan infrastruktur baru, sekaligus memulai pengembangan sistem utama yang bersifat *multi years*. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen KPEI untuk memperkuat sistem kliring, penyelesaian, dan manajemen risiko, dengan kesadaran penuh bahwa sistem yang andal dan memadai merupakan tulang punggung operasional perusahaan.

Di bidang pengembangan layanan, KPEI mencatat sejumlah capaian strategis. Salah satu pencapaian kinerja KPEI yang paling membanggakan sepanjang tahun 2024 adalah peluncuran layanan Central Counterparty (CCP) untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Inisiatif strategis ini menandai transformasi signifikan KPEI dalam memperkuat perannya sebagai pilar penting mendukung integrasi dan pendalaman pasar keuangan nasional sebagai wujud nyata dari pemenuhan amanat UU PPSK, komitmen reformasi pasar derivatif *Over the Counter* (OTC) oleh G20, serta pelaksanaan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN PPPK) dan *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.

Setelah melalui proses panjang sejak 2019, KPEI berhasil memperoleh berbagai persetujuan penting, termasuk izin usaha sebagai CCP PUVA, status *Qualifying CCP* (QCCP) dari Bank Indonesia, serta menjadi peserta resmi sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Scriptless Securites Settlement System* (BI-SSSS). Bergabungnya Bank Indonesia dan delapan bank nasional sebagai pemegang saham baru menandai sinergi kuat antar pelaku pasar. Kehadiran CCP PUVA diharapkan

In terms of the availability rate of key systems, we recorded a score of 99.64%, exceeding the target of 99.4%. As part of our commitment to adopting international business standards as a CCP, IDCclear achieved a score of 99.51% in meeting international standards, surpassing the 99% target. Furthermore, IDCclear successfully maintained the target level of collateral sufficiency at 100%. In terms of services, the satisfaction level of clearing members (CM) as our service users was recorded at 82.87%, exceeding the established target of 82%.

Furthermore, the number of investors increased with a growth of 22%, from 12.17 million SIDs to 14.84 million SIDs in 2024, which was the result of collaboration among all SROs committed to continuously improving performance, especially in increasing the number of investors through dissemination and capital market education activities. Meanwhile, there was one non-achieved Key Performance Indicator (KPI) yet, namely the Timeliness of Settlement Process. Throughout this year and moving forward, IDCclear continues to strive to provide stable and reliable systems and infrastructure, in line with the increasing transaction volumes and service expansions. This has been anticipated through investments in systems and infrastructure, which began to be implemented this year. IDCclear has operated new systems and infrastructure while also initiating the development of a multi-year core system. This initiative is part of IDCclear's commitment to strengthening clearing, settlement, and risk management systems, with full awareness that reliable and adequate systems are the backbone of the Company's operations.

In the area of service development, IDCclear recorded several strategic achievements. One of the most notable performance milestones of IDCclear in 2024 was the launch of the Central Counterparty (CCP) services for the Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA). This strategic initiative marks a significant transformation of IDCclear in strengthening its role as a key pillar supporting the integration and deepening of the national financial market as a concrete manifestation of fulfilling the mandate of the Financial Sector Development and Strengthening Law (P2SK Law), the G20's commitment to reform the Over-the-Counter (OTC) derivatives market, as well as the implementation of the National Strategy for Financial Market Development and Deepening (SN PPPK) and the 2025 Money Market Development Blueprint (BPPU).

After a long process since 2019, IDCclear successfully obtained several key approvals, including the business license as a CCP PUVA, the Qualifying CCP (QCCP) status from Bank Indonesia, and official participation in BI-RTGS and BI-SSSS systems. The inclusion of Bank Indonesia and eight national banks as new shareholders signifies strong synergy among market participants. The presence of CCP PUVA is expected to strengthen Indonesia's financial market infrastructure through increased efficiency, enhanced risk

dapat memperkuat infrastruktur pasar keuangan Indonesia melalui peningkatan efisiensi, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta perlindungan terhadap risiko sistemik di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Status ini melengkapi perizinan OJK sebagai LKP dan pengakuan *Third Country CCP* (TC-CCP) dari European Securities and Markets Authority (ESMA) untuk cakupan pasar modal.

KPEI juga aktif menjalin kolaborasi strategis, salah satunya melalui penandatanganan MoU dengan Vermeg dalam rangka pengembangan layanan *collateral management*. Di sisi produk dan sistem, KPEI memperluas instrumen dalam fasilitas Triparty REPO dengan penambahan obligasi negara ritel (ORI), serta menyempurnakan sistem kliring dan manajemen risiko untuk mendukung peluncuran *Single Stock Futures* (SSF) di Bursa Efek Indonesia. KPEI turut memperbarui Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP MKBD) guna meningkatkan efisiensi pelaporan anggota kliring.

KINERJA OPERASIONAL

Kinerja operasional KPEI sepanjang tahun 2024 menunjukkan ketahanan dan efektivitas sistem kliring dan penjaminan di tengah dinamika pasar. Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia tetap aktif dengan total frekuensi penyelesaian transaksi mencapai 273,8 juta kali dan nilai transaksi sebesar Rp3.050 triliun, mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang tinggi terhadap fundamental pasar domestik.

Hingga 20 Desember 2024, rata-rata nilai penyelesaian harian yang dicatatkan KPEI mencapai Rp4,23 triliun, dengan efisiensi penyelesaian di pasar reguler sebesar 57,30%, serta volume rata-rata penyelesaian transaksi sebesar 6,76 miliar lembar saham dan efisiensi penyelesaian 61,25%. Pada sisi pasar pendukung, Transaksi Pinjam Meminjam Efek (PME) mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp54,10 miliar dengan volume 11,74 juta lembar saham sepanjang tahun.

Sebagai bagian dari manajemen risiko penyelesaian transaksi bursa dan pengelolaan risiko kredit, KPEI mengelola total agunan sebesar Rp33,12 triliun, terdiri dari Rp26,20 triliun agunan *online* dan Rp6,92 triliun agunan *offline*. Dana Jaminan juga menunjukkan posisi likuiditas yang sangat kuat di akhir 2024, tercatat sebesar Rp8,52 triliun, yang sebagian besar dialokasikan ke instrumen yang aman dan likuid, yakni Deposito (Rp7,92 triliun atau 93%) dan Surat Berharga Negara (Rp602 miliar atau 7%). Sebagai bagian dari penguatan cadangan, KPEI juga menyisihkan Rp5,3 miliar atau 5% dari laba bersih tahun 2023 ke dalam Cadangan Jaminan, menjadikan total cadangan yang dikelola mencapai Rp199,44 miliar.

Fasilitas Intraday terus dimanfaatkan secara aktif oleh pelaku pasar untuk mendukung kelancaran penyelesaian transaksi, dengan penggunaan tertinggi pada Oktober sebesar Rp32,1 triliun, dan akumulasi penggunaan

management, and greater protection against systemic risks amid an increasingly complex global economic environment. This status complements the license granted by the Financial Services Authority (OJK) as a Clearing and Guarantee Institution (LKP) and the Third-Country CCP (TC-CCP) recognition from the European Securities and Markets Authority (ESMA) for the capital market scope.

IDCclear has also been actively engaging in strategic collaborations, one of which was the signing of MoU with Vermeg for the development of collateral management services. On the product and system side, IDCclear expanded the instruments available in Triparty REPO facility by adding retail government bonds (ORI) and enhanced its clearing and risk management systems to support the launch of Single Stock Futures (SSF) on Indonesia Stock Exchange (IDX). Additionally, IDCclear updated the Adjusted Net Working Capital Reporting System (SPP MKBD) to improve the reporting efficiency of clearing members.

OPERATIONAL PERFORMANCE

Throughout 2024, IDCclear's operational performance demonstrated the resilience and effectiveness of its clearing and guarantee systems amid global market dynamics. Trading activity on Indonesia Stock Exchange remained vibrant, with total settlement transaction frequency reaching 273.8 million times and transaction value amounting to Rp3,050 trillion, reflecting strong investor confidence in the domestic market fundamentals.

As of December 20, 2024, the average daily settlement value recorded by IDCclear reached Rp4.23 trillion, with a settlement efficiency rate of 57.30% in the regular market as well as the average settlement volume stood at 6.76 billion shares, with a settlement efficiency rate of 61.25%. In the supporting market segment, Securities Lending and Borrowing (SLB) transactions recorded a transaction value of Rp54.10 billion with a volume of 11.74 million shares throughout the year.

As part of the risk management of stock exchange transaction settlement and credit risk management, IDCclear managed a total collateral value of Rp33.12 trillion, consisting of Rp26.20 trillion in online collateral and Rp6.92 trillion in offline collateral. The Guarantee Fund also reflected a very strong liquidity position at the end of 2024, amounting to Rp8.52 trillion, with the majority allocated to safe and liquid instruments: Deposits (Rp7.92 trillion or 93%) and Government Securities (Rp602 billion or 7%). As part of reserve strengthening, IDCclear also allocated Rp5.3 billion or 5% of its 2023 net profit into the Guarantee Reserve, bringing the total managed reserve to Rp199.44 billion.

The Intraday Facility continued to be actively utilized by market participants to support smooth settlement processes, with peak usage recorded in October at Rp32.1 trillion and cumulative usage throughout the year

sepanjang tahun mencapai Rp295,3 triliun. Sepanjang 2024, tidak terdapat kasus gagal bayar oleh Anggota Kliring (AK), menegaskan efektivitas sistem manajemen risiko dan operasional KPEI yang solid.

Dengan infrastruktur yang tangguh dan pengelolaan risiko yang prudent, struktur pasar modal Indonesia hingga akhir 2024 berada dalam kondisi siap menghadapi tantangan ke depan. KPEI, melalui perannya yang strategis dalam sistem kliring dan penjaminan, berkontribusi langsung terhadap stabilitas sistem keuangan nasional serta dukungan terhadap pembiayaan sektor riil dan pertumbuhan investasi.

PERBANDINGAN KINERJA FINANSIAL TAHUN 2024 DAN TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2024, KPEI mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif. Total aset per 31 Desember 2024 mencapai Rp4,40 triliun, naik 0,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, total liabilitas dan ekuitas juga tumbuh 0,91%, mencerminkan struktur keuangan yang tetap solid. Pendapatan Perusahaan meningkat signifikan sebesar 18,52% menjadi Rp697,12 miliar, seiring meningkatnya aktivitas jasa kliring dan penjaminan di tengah dinamika positif pasar modal. Kinerja ini turut mendorong laba bersih tahun berjalan yang tumbuh sebesar 40,75% menjadi Rp149,17 miliar, mencerminkan keberhasilan strategi usaha serta efisiensi pengelolaan biaya dan risiko yang dijalankan selama tahun 2024.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN FUNGSI PENUNJANG UTAMA

Sebagai bagian penting dari upaya penguatan organisasi, KPEI senantiasa menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mendukung keberhasilan bisnis dan menjaga keunggulan kompetitif di industri pasar modal dan pasar keuangan. KPEI berkomitmen untuk terus mengelola dan mengembangkan SDM secara berkelanjutan agar senantiasa selaras dengan dinamika pasar yang semakin kompleks dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

KPEI fokus pada pengembangan kompetensi SDM melalui berbagai program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kepemimpinan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas profesional karyawan di semua tingkatan. Program-program ini disesuaikan untuk mendukung peran KPEI yang terus berkembang, baik sebagai Lembaga Kliring Penjaminan (LKP) di pasar modal, maupun dalam ekosistem pasar keuangan yang lebih luas.

Sementara itu, di bidang Teknologi Informasi (TI), KPEI secara konsisten melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sistem dan layanan TI dengan mengintegrasikan berbagai inovasi terbaru. Upaya ini bertujuan untuk mendorong kinerja operasional yang lebih efektif, menjaga keamanan data dan transaksi, serta memastikan ketersediaan dan keandalan sistem secara

reaching Rp295.3 trillion. Throughout 2024, there were no default cases by Clearing Members (CMs), reaffirming the effectiveness of IDClear's solid risk management and operational systems.

With strong infrastructure and prudent risk management, the structure of Indonesia's capital market remained well-positioned to face future challenges by the end of 2024. Through its strategic role in the clearing and guarantee system, IDClear directly contributed to the stability of the national financial system as well as to supporting the financing of the real sector and investment growth.

COMPARISON OF FINANCIAL PERFORMANCE IN 2024 AND 2023

Throughout 2024, IDClear recorded positive financial performance growth. As of December 31, 2024, total assets reached Rp4.40 trillion, an increase of 0.91% compared to the previous year's assets. In line with this, total liabilities and equity also grew by 0.91%, reflecting a consistently solid financial structure. The Company's revenue rose significantly by 18.52% to Rp697.12 billion, in line with increased clearing and guarantee service activities amid positive capital market dynamics. This performance also contributed to increase net profit for the year, which grew by 40.75% to Rp149.17 billion, reflecting the success of the business strategy and the effectiveness of cost and risk management carried out throughout 2024.

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF CORE SUPPORTING FUNCTIONS

As a vital part of organizational strengthening efforts, IDClear consistently positions human resources (HR) as its primary asset in supporting business success and maintaining competitive advantage in the capital and financial market industries. IDClear is committed to continuously managing and developing its human capital to align with the increasingly complex market dynamics and the ever-evolving business needs.

IDClear focuses on developing HR competencies through various training programs, certifications, and leadership development initiatives designed to enhance the professional capacity of employees at all levels. These programs are tailored to support IDClear's expanding role, both as a Clearing and Guarantee Institution (LKP) in the capital market and within the broader financial market ecosystem.

Meanwhile, in Information Technology (IT), IDClear consistently takes strategic steps to enhance its IT systems and services by integrating the latest innovations. These efforts aim to drive more effective operational performance, safeguard data and transaction security, and ensure comprehensive system availability and reliability. The Board of Directors ensures that IT serves not only as

menyeluruh. Direksi memastikan bahwa TI tidak hanya berfungsi sebagai penopang operasional, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pengembangan layanan bisnis baru yang memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, KPEI menerapkan struktur pengelolaan TI yang sinergis antara Divisi Operasional Teknologi Informasi (OIT) dan Divisi Pengembangan Teknologi Informasi (PTI). Divisi OIT bertanggung jawab atas kelancaran operasional sistem yang menopang seluruh proses bisnis inti, sementara Divisi PTI berperan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi sistem baru yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan pengguna jasa.

Sebagai bagian dari adaptasi terhadap peran KPEI yang terus berkembang di ekosistem pasar keuangan, pada 1 November 2024, dilakukan penyesuaian struktur organisasi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Perusahaan seiring dengan perluasan peran KPEI dalam ekosistem pasar keuangan serta sebagai upaya dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks. Salah satu perubahan penting adalah pelebaran peran divisi-divisi yang terkait dengan TI, di mana Divisi Keuangan dan Akuntansi (KAK) serta Divisi *Human Capital* dan *General Affair* (HCG) kini terintegrasi dalam struktur organisasi TI, guna mendukung sinergi yang lebih kuat antara pengelolaan sumber daya, teknologi, dan proses bisnis.

Sejalan dengan transformasi ini, KPEI juga telah menyusun kebijakan TI secara komprehensif untuk mendukung tugas dan tanggung jawab kedua divisi tersebut. Kebijakan ini disusun dengan cermat, mengacu pada kebutuhan operasional yang semakin kompleks, serta selaras dengan arah strategis Perusahaan dalam pengembangan pasar modal dan pasar keuangan Indonesia.

PENGUATAN KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Sebagai Lembaga Kliring Penjaminan yang memegang peran strategis dalam ekosistem pasar modal Indonesia, KPEI senantiasa berkomitmen untuk selalu sejalan dengan standar dan prinsip internasional yang ditetapkan oleh otoritas global, khususnya *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip IOSCO menjadi salah satu pilar utama dalam operasional KPEI, guna memastikan bahwa seluruh proses kliring dan penjaminan berjalan sesuai dengan praktik terbaik yang berlaku secara global.

Dalam rangka terus memperkuat posisi serta memastikan bahwa KPEI selalu *comply* dengan perkembangan standar internasional dan tren global di bidang kliring dan penjaminan, KPEI aktif membangun kerja sama dengan berbagai lembaga kliring internasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah keikutsertaan KPEI sebagai anggota dalam jaringan CCP internasional. Keterlibatan

an operational support function but also as a key enabler in developing new business services that deliver added value to stakeholders.

In its implementation, IDClear adopts a synergistic IT management structure involving the Information Technology Operations Division (OIT) and the Information Technology Development Division (PTI). The OIT Division is responsible for ensuring the smooth operation of systems that support all core business processes, while the PTI Division focuses on designing, developing, and implementing new system innovations that are responsive to market demands and user needs.

As part of adapting to IDClear's evolving role within the financial market ecosystem, an organizational restructuring was implemented on November 1, 2024. This change aims to enhance the effectiveness of the Company's functions and responsibilities in line with IDClear's expanding role in the financial market ecosystem, and to better address the increasingly complex market dynamics. One of the key changes includes the expansion of roles within IT-related divisions, where the Finance and Accounting Division as well as the Human Capital and General Affairs Division are now integrated within the IT organizational structure. This integration is intended to strengthen synergies among resource management, technology, and business processes.

Aligned with this transformation, IDClear has also developed comprehensive IT policies to support the duties and responsibilities of these two divisions. These policies are carefully designed based on the increasing complexity of operational needs and are aligned with the Company's strategic direction in developing Indonesia's capital and financial markets.

STRENGTHENING INTERNATIONAL COMMUNICATION AND COOPERATION

As a Clearing and Guarantee Institution that plays a strategic role in Indonesia's capital market ecosystem, IDClear remains committed to aligning with international standards and principles set by global authorities, particularly the International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Compliance with IOSCO principles serves as one of the main pillars of IDClear's operations, ensuring that all clearing and guarantee processes are conducted in accordance with globally recognized best practices.

To continuously strengthen its position and ensure that IDClear remains compliant with the evolving international standards and global trends in the field of clearing and settlement, IDClear actively fosters collaboration with various international clearing institutions. One of the strategic steps taken is IDClear's participation as a member of the international CCP network. This involvement

ini menjadi wujud nyata inisiatif KPEI untuk senantiasa *update* terhadap perkembangan prinsip, kebijakan, serta praktik terbaik di tingkat global, khususnya terkait dengan pengelolaan risiko, efisiensi penyelesaian transaksi, dan penguatan infrastruktur pasar keuangan.

Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional tersebut, KPEI tidak hanya memperoleh manfaat dalam bentuk pertukaran pengetahuan dan informasi terkini, tetapi juga turut berkontribusi dalam pengembangan standar global yang lebih inklusif. Hal ini sekaligus menegaskan posisi KPEI sebagai lembaga yang mampu menjaga relevansi dan daya saing di tengah dinamika pasar keuangan global yang terus berkembang.

Dengan memperkuat komunikasi dan kolaborasi internasional, KPEI memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur yang diterapkan senantiasa selaras dengan arah perkembangan global. Langkah ini juga menjadi fondasi penting dalam mendukung tujuan KPEI untuk terus menjadi lembaga kliring yang andal, kredibel, dan diakui di tingkat regional maupun internasional.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

KPEI senantiasa menempatkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas operasional dan pengembangan bisnis. Penerapan prinsip GCG yang komprehensif dan berkelanjutan ini telah menjadi pilar penting dalam memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap KPEI, sekaligus menjadi penentu keberhasilan PerusahaanPerusahaanPerusahaan dalam meraih pengakuan di tingkat global.

Komitmen KPEI terhadap tata kelola yang unggul tercermin dalam pencapaian strategis, yakni pengakuan sebagai *Third Country Central Counterparty (TC-CCP)* oleh European Securities & Market Authority (ESMA), regulator pasar keuangan Uni Eropa. Pengakuan ini tidak hanya membuka peluang bagi KPEI untuk menyediakan layanan kliring bagi anggota kliring dan bursa berbasis di Uni Eropa, tetapi juga menandai KPEI sebagai lembaga kliring nasional yang memenuhi standar internasional tertinggi dalam pengelolaan risiko dan tata kelola.

Selaras dengan upaya penguatan tata kelola, KPEI juga mencatat kemajuan signifikan di sektor pasar derivatif, di mana Perusahaan telah memperoleh izin prinsip dari Bank Indonesia untuk beroperasi sebagai CCP dalam menangani transaksi derivatif pasar suku bunga dan nilai tukar *Over-the-Counter* (OTC SBNT). Saat ini, KPEI tengah berada dalam tahap akhir proses perizinan untuk memulai operasional sebagai CCP OTC SBNT, yang akan semakin memperluas cakupan layanan dan peran strategis KPEI dalam ekosistem keuangan nasional.

reflects IDClear's concrete initiative to stay updated on the latest developments in principles, policies, and global best practices, particularly those related to risk management, transaction settlement efficiency, and the enhancement of financial market infrastructure.

Through its active participation in international forums, IDClear not only benefits from the exchange of knowledge and up to date information but also contributes to the development of more inclusive global standards. This further reinforces IDClear's position as an institution capable of maintaining its relevance and competitiveness amidst the ever-evolving global financial market landscape.

By strengthening international communication and collaboration, IDClear ensures that all policies, systems, and procedures implemented domestically are consistently aligned with global developments. This approach also serves as a crucial foundation in supporting IDClear's objective to remain a reliable, credible, and regionally and internationally recognized central counterparty.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

IDClear consistently places the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the fundamental foundation in every operational activity and business development. The comprehensive and sustainable application of GCG principles has become a crucial pillar in strengthening the business community's trust in IDClear, as well as a key determinant of the Company's success in gaining recognition at the global level.

IDClear's commitment to excellent governance is reflected in its strategic achievement of being recognized as a Third Country Central Counterparty (TC-CCP) by the European Securities & Markets Authority (ESMA), the financial market regulator of the European Union. This recognition not only opens opportunities for IDClear to provide clearing services to clearing members and exchanges based in the European Union but also marks IDClear as a national clearing institution that meets the highest international standards in risk management and governance.

In line with efforts to strengthen governance, IDClear has also recorded significant progress in the derivatives market sector, where the Company has obtained a principal license from Bank Indonesia to operate as a CCP for handling *Over-the-Counter* interest rate and foreign exchange derivative transactions (OTC SBNT). IDClear is currently in the final stage of the licensing process to commence operations as a CCP for OTC SBNT, which will further expand its service coverage and strategic role within the national financial ecosystem.

Antonius Herman Azwar

Direktur Kliring dan Penjaminan
Director of Clearing and Guarantee

Iding Pardi

Direktur Utama
President Director

Umi Kulsum

Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis
*Director of Information Technology
and Business Support*



Penguatan tata kelola dan penegakan integritas terus menjadi fokus utama dalam penerapan praktik GCG secara berkelanjutan di KPEI. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan regulasi, tetapi juga melalui upaya internal yang konsisten untuk menanamkan budaya GCG di seluruh lapisan organisasi. KPEI memastikan bahwa nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari yang menopang kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam memastikan kerangka tata kelola yang efektif dan relevan, Pedoman tata kelola perusahaan yang baik terus diperbarui secara berkala sesuai dengan dinamika bisnis dan regulasi terbaru. Hingga 31 Desember 2024, KPEI telah memiliki 5 pedoman, 7 piagam kerja, dan 44 kebijakan perusahaan yang menjadi panduan utama dalam pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Dengan penerapan GCG yang kuat dan terstruktur, KPEI terus melangkah maju untuk menjadi lembaga kliring yang andal, kredibel, dan berdaya saing di kancah regional maupun global.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2024

Sebagai bagian dari komitmen untuk terus memperkuat implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, KPEI secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan praktik tata kelola di seluruh tingkatan organisasi. Dalam merancang strategi yang efektif guna meningkatkan kinerja praktik GCG di masa mendatang, KPEI merujuk pada berbagai referensi yang relevan, termasuk standar internasional yang diakui secara global.

Salah satu tolok ukur yang digunakan adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), yang menjadi standar penilaian tata kelola di kawasan Asia Tenggara. ACGS merupakan inisiatif dari *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) yang bertujuan mendukung integrasi pasar modal antar negara ASEAN dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi praktik GCG terbaik yang berbasis pada standar internasional. Sebagai alat evaluasi kuantitatif, ACGS mengukur tingkat kepatuhan KPEI terhadap lima prinsip utama tata kelola yang dirumuskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Pada tahun 2024, implementasi prinsip governansi di KPEI menunjukkan hasil yang baik, di mana total skor ACGS yang diraih mencapai 85,53. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat KPEI dalam mengadopsi standar internasional secara konsisten serta memastikan bahwa seluruh prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif di setiap proses bisnis perusahaan.

Melalui hasil ini, KPEI tidak hanya menegaskan posisinya sebagai lembaga yang kredibel dalam penyelenggaraan jasa kliring di pasar keuangan, tetapi juga membuktikan bahwa

The reinforcement of governance and the enforcement of integrity remain central focuses in the continuous implementation of GCG practices at IDClear. This commitment is realized not only through regulatory compliance but also through consistent internal efforts to instill a GCG culture across all levels of the organization. IDClear ensures that the values of integrity, accountability, transparency, and responsibility are embedded in the Company's daily work culture, supporting service quality and strengthening stakeholder trust.

To ensure an effective and relevant governance framework, the Good Corporate Governance (GCG) guidelines are continuously updated in line with the latest business dynamics and regulatory developments. As of December 31, 2024, IDClear has established 5 guidelines, 7 charters, and 44 corporate policies that serve as the main references for governance implementation, risk management, and internal control. With strong and structured GCG implementation, IDClear continues to move forward toward becoming a reliable, credible, and competitive clearing institution at both regional and global levels.

ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN 2024

As part of its commitment to continuously strengthening the implementation of good corporate governance principles, IDClear consistently undertakes various improvement and refinement efforts of governance practices at all levels of the organization. In designing effective strategies to enhance the performance of GCG practices in the future, IDClear refers to various relevant references, including internationally recognized standards.

One of the benchmarks used is the *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), which serves as the governance assessment standard across Southeast Asia. ACGS is an initiative of the *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF) aimed at supporting capital market integration among ASEAN countries and encouraging companies to adopt international best practices in GCG. As a quantitative evaluation tool, ACGS measures IDClear's level of compliance with the five key governance principles formulated by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

In 2024, the implementation of governance principles at IDClear showed positive results, with a total ACGS score of 85.53. This achievement reflects IDClear's strong commitment to consistently adopting international standards and ensuring that all GCG principles are effectively implemented in every aspect of the Company's business processes.

Through this result, IDClear not only reaffirms its position as a credible institution in providing clearing services in the financial market but also demonstrates that the

penerapan tata kelola yang unggul menjadi pondasi penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

PENGUATAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka memperkuat peran sebagai CCP berstandar internasional, KPEI terus mengembangkan sistem manajemen risiko yang mengacu pada praktik terbaik *Enterprise Risk Management* (ERM). Sistem ini menjadi landasan pengelolaan risiko yang efektif untuk melindungi aset Perusahaan dan memastikan tercapainya target bisnis. KPEI juga menanamkan budaya sadar risiko di seluruh unit kerja, sehingga setiap potensi risiko dapat diidentifikasi, dikendalikan, dan diminimalkan melalui strategi mitigasi yang tepat. Proses manajemen risiko mencakup penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan, serta pemantauan risiko yang dilaksanakan secara sistematis oleh Unit Pemantauan dan Pelaporan Risiko Korporasi (PRK).

Pada 2024, KPEI menyelesaikan pengembangan sistem ERM baru yang mempermudah *proses risk assessment*, *Business Impact Analysis* (BIA), pelaporan, dan pemantauan risiko. Pelatihan bagi *risk officer*, *risk owner*, serta kegiatan peningkatan *Risk Awareness* digelar untuk mendukung implementasi sistem ini. Di bidang *Business Continuity Management* (BCM), penguatan dilakukan melalui penyempurnaan *Alternative Arrangements* dan dokumen *IT Disaster Recovery Plan* (IT DRP) guna memastikan kelangsungan layanan kliring dan penjaminan, termasuk sebagai CCP untuk pasar uang dan valuta asing. Kegiatan BCM juga rutin dijalankan, termasuk simulasi BCP, uji coba sistem cadangan, dan pelatihan penyusunan dokumen IT DRP.

Dengan merefleksikan hasil penilaian mandiri sepanjang tahun, Perusahaan dinilai telah memiliki kesadaran penuh untuk menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik, serta siap untuk meningkatkan kualitasnya di masa mendatang.

PROSPEK DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025

Memasuki tahun 2025, prospek usaha KPEI tetap positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang mulai stabil pasca tekanan inflasi dan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju. Di tingkat nasional, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh solid didukung oleh konsumsi domestik, stabilitas sektor keuangan, dan peningkatan investasi, termasuk di pasar modal yang terus berkembang. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi KPEI untuk memperluas perannya dalam menopang pertumbuhan pasar keuangan nasional.

Mengantisipasi dinamika tersebut, KPEI telah menyiapkan rencana strategis 2025 yang berfokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, dan penguatan infrastruktur. Program utama mencakup pengembangan modul Triparty REPO

implementation of strong governance is a vital foundation for maintaining stakeholder trust and supporting sustainable business growth.

STRENGTHENING RISK MANAGEMENT

In its efforts to reinforce its role as an internationally recognized CCP, IDCclear continues to develop a risk management system based on *Enterprise Risk Management* (ERM) best practices. This system serves as the foundation for effective risk management to protect the Company's assets and ensure the achievement of business objectives. IDCclear also fosters a risk-aware culture across all work units, enabling the identification, control, and minimization of potential risks through appropriate mitigation strategies. The risk management process includes context setting, risk assessment, risk treatment, and risk monitoring, all of which are systematically carried out by the Corporate Risk Monitoring and Reporting Unit (PRK).

In 2024, IDCclear completed the development of a new ERM system designed to simplify the processes of risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), reporting, and risk monitoring. Training sessions for risk officers and risk owners, along with Risk Awareness enhancement activities, were conducted to support the system's implementation. Regarding Business Continuity Management (BCM), Alternative Arrangements and the IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) documents are refined to ensure the continuity of clearing and guarantee services, including as a CCP for money market and foreign exchange market. Regular BCM activities were carried out, including BCP simulations, backup system testing, and IT DRP document preparation training.

Reflecting the results of self-assessment conducted throughout the year, the Company was deemed to have a strong awareness of Good Corporate Governance implementation and is well-positioned to further enhance its governance quality in the future.

OUTLOOK AND STRATEGIC PLANS FOR 2025

Entering 2025, IDCclear's business outlook remains positive, in line with the projected stabilization of global economic growth following inflationary pressures and normalization of monetary policies in major developed economies. At national level, Indonesia's economy is expected to grow solidly, supported by domestic consumption, financial sector stability, and increased investment, including continued development in the capital market. These conditions present significant opportunities for IDCclear to expand its role in supporting the national financial market growth.

To anticipate these dynamics, IDCclear has prepared its 2025 strategic plan focusing on product innovation, operational efficiency, and infrastructure strengthening. Key programs include the development of a Triparty REPO

untuk SBN, sistem kliring dan manajemen risiko untuk derivatif keuangan, sistem e-IPO untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), serta sistem *collateral management* terintegrasi untuk berbagai produk pasar modal. Selain itu, KPEI akan meningkatkan efektivitas proses operasional melalui pengembangan penyelesaian level AK (omnibus) untuk transaksi ekuitas, integrasi pelaporan Triparty REPO dengan BEI dan KSEI, serta penyempurnaan sistem kliring dan *risk management*.

Dalam hal pengawasan, KPEI bersama SRO lainnya akan mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi yang lebih canggih untuk menjaga stabilitas pasar. Di bidang teknologi dan SDM, KPEI berkomitmen menyempurnakan infrastruktur dan teknologi informasi, sekaligus meningkatkan kompetensi karyawan guna memastikan keandalan layanan dan mendukung ekspansi bisnis. Dengan strategi ini, KPEI optimistis dapat terus memainkan peran sentral dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar modal Indonesia di tengah pemulihan ekonomi global.

Dengan komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan mitigasi risiko sistemik, KPEI berada pada posisi strategis untuk memperkuat perannya sebagai CCP PUVA di Indonesia. Melalui ekspansi produk, peningkatan partisipasi perbankan, dan pengakuan internasional, KPEI diharapkan dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan pasar keuangan Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga kliring dan penjamin penyelesaian transaksi di pasar modal, KPEI menghadapi sejumlah tantangan strategis yang terus berkembang. Sebagai entitas yang telah beroperasi secara *multimarket*, tantangan terbesar KPEI adalah menjaga koordinasi yang efektif dengan dua otoritas utama, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KPEI harus senantiasa menyeimbangkan pengaturan dan regulasi yang berasal dari kedua pihak, agar tetap selaras dengan perkembangan pasar tanpa mengabaikan aspek kepatuhan.

Di sisi lain, seiring dengan pertumbuhan layanan dan dinamika pasar yang semakin cepat, KPEI dituntut untuk memastikan sistem operasionalnya tetap andal, stabil, dan bebas dari insiden. Dengan semakin banyaknya pengguna dan pemangku kepentingan yang mengandalkan layanan KPEI, ekspektasi terhadap kualitas dan keandalan sistem juga meningkat tajam. Hal ini menuntut KPEI untuk terus menjaga infrastruktur teknologi yang kokoh dan responsif terhadap perubahan.

Tantangan lainnya terletak pada pengelolaan sumber daya manusia. KPEI berkomitmen untuk membangun tim yang profesional, berkualitas, dan adaptif terhadap perubahan yang pesat di industri jasa keuangan. SDM yang adaptif

module for Government Securities (SBN), a clearing and risk management system for financial derivatives, an e-IPO system for Debt and Sukuk Securities (EBUS), and an integrated collateral management system for various capital market products. In addition, IDClear will enhance the effectiveness of operational processes through the development of omnibus-level settlement for equity transactions, the integration of Triparty REPO reporting with IDX and KSEI, as well as improvements to its clearing and risk management systems.

In terms of supervision, IDClear with other SROs will develop a more advanced integrated surveillance system to maintain market stability. In the areas of technology and human resources, IDClear is committed to enhancing its infrastructure and information technology while also improving employee competencies to ensure service reliability and support business expansion. With this strategy, IDClear remains optimistic about continuing its central role in promoting the growth and stability of Indonesia's capital market amid the global economic recovery.

With its commitment to efficiency, transparency, and systemic risk mitigation, IDClear is strategically positioned to strengthen its role as the CCP for PUVA in Indonesia. Through product expansion, increased banking participation, and international recognition, IDClear is expected to further support the stability and growth of Indonesia's financial markets in the years ahead.

CHALLENGES FACED

In carrying out its role as the clearing and guarantee institution for transaction settlements in the capital market, IDClear faces several evolving strategic challenges. As a multi-market operating entity, IDClear's greatest challenge is maintaining effective coordination with two main authorities, namely Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). IDClear must continuously balance the regulations and oversight from both parties to remain aligned with market developments without compromising compliance.

On the other hand, alongside the growth of services and the increasingly rapid market dynamics, IDClear is required to ensure that its operational systems remain reliable, stable, and incident-free. With a growing number of users and stakeholders relying on IDClear's services, expectations for system quality and reliability have also sharply increased. This demands that IDClear continuously maintain a robust and responsive technology infrastructure to adapt to changes.

Other challenges lie in human resource management. IDClear is committed to building a professional, high-quality, and adaptable team capable of keeping pace with rapid changes in the financial services industry.

dengan mampu mengikuti perkembangan teknologi, regulasi, dan dinamika pasar menjadi kunci keberhasilan KPEI ke depan.

Sebagai CCP yang sejak krisis keuangan global 2008 diandalkan untuk mencegah risiko sistemik di pasar keuangan, KPEI juga menghadapi ekspektasi tinggi untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko. Mewujudkan proses yang lebih efisien, memadai, dan sesuai dengan *best practice* internasional menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab melalui inovasi dan penguatan sistem manajemen risiko.

Meskipun prospek positif, KPEI menghadapi tantangan dalam memperluas partisipasi dan mengembangkan produk baru. Untuk itu, KPEI bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa pengembangan instrumen baru sesuai dengan regulasi dan standar global.

Secara keseluruhan, tantangan KPEI berfokus pada tiga aspek utama, yaitu penguatan infrastruktur sistem, peningkatan kualitas dan adaptasi SDM, serta sinergi yang lebih kuat dengan regulator, sambil terus mendorong operasional yang efisien dan andal untuk mendukung stabilitas pasar keuangan nasional.

APRESIASI DAN PENUTUP

Mengakhiri laporan ini, Direksi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan sepanjang tahun. Kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta seluruh *Self-Regulatory Organization* (SRO) atas sinergi yang terus terjalin dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal dan pasar keuangan Indonesia.

Kami menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan sepanjang tahun ini. Secara khusus, kami menyambut hangat kehadiran pemegang saham baru yang telah bergabung dalam perjalanan strategis Perusahaan. Partisipasi aktif mereka mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap arah, kapabilitas, dan prospek jangka panjang Perusahaan, serta memperkuat komitmen kami untuk terus menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dukungan tersebut menjadi pendorong utama dalam menjalankan peran kami sebagai CCP yang andal baik di pasar modal maupun pasar uang.

We express our deepest appreciation to all shareholders for their trust and support throughout this year. In particular, we warmly welcome the presence of new shareholders who have joined the Company's strategic journey. Their active participation reflects their strong belief in the Company's direction, capabilities, and long-term prospects, and strengthens our commitment to continue creating sustainable value for all stakeholders. This support is a key driver in carrying out our role as a reliable CCP in both the capital and money markets.

Penghargaan khusus juga kami sampaikan kepada para Anggota Kliring, perbankan, mitra bisnis, dan pengguna jasa yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan pengembangan layanan KPEI. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan

Having adaptable human resources who can keep up with technological advancements, regulations, and market dynamics is key to IDClear's future success.

As a CCP trusted since the 2008 global financial crisis to prevent systemic risk in the financial markets, IDClear also faces high expectations to continuously improve operational efficiency and minimize risk. Achieving more efficient, adequate processes aligned with international best practices presents a unique challenge that must be addressed through innovation and strengthening risk management systems.

Despite positive prospects, IDClear faces challenges in expanding participation and developing new products. To address this, IDClear collaborates with Bank Indonesia and international institutions to ensure that the development of new instruments complies with regulations and global standards.

Overall, IDClear's challenges focus on three main aspects: strengthening system infrastructure, improving the quality and adaptability of human resources, and fostering stronger synergy with regulators, while continuously driving efficient and reliable operations to support the stability of the national financial market.

APPRECIATION AND CLOSING

In closing this report, the Board of Directors expresses its highest appreciation to all stakeholders for the trust and support given throughout the year. We extend our gratitude to the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and all Self-Regulatory Organizations (SROs) for the ongoing synergy in maintaining the stability and integrity of Indonesia's capital and financial markets.

Special recognition is given to Clearing Members, banks, business partners, and service users who have played an important role in the journey and development of IDClear's services. We also appreciate the entire management and staff for their dedication, professionalism, and adaptive

atas dedikasi, profesionalisme, dan semangat adaptif yang senantiasa ditunjukkan dalam menghadapi tantangan dan mendorong inovasi.

Memasuki tahun 2025, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran KPEI sebagai lembaga kliring sentral yang andal, inovatif, dan berdaya saing, dengan terus mendukung pertumbuhan pasar modal nasional. Dengan kolaborasi yang solid dan semangat transformasi, kami optimistis KPEI akan mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian Indonesia ke depan.

spirit consistently demonstrated in facing challenges and driving innovation.

Entering 2025, we are committed to continuously strengthening IDClear's role as a reliable, innovative, and competitive central clearing institution, by keep supporting the national capital market growth. With solid collaboration and a spirit of transformation, we are optimistic that IDClear will be able to make an increasingly significant contribution to Indonesia's economy in the future.

Jakarta, Juni 2025

Jakarta, June 2025

Atas Nama Direksi,

On Behalf of the Board of Directors



Iding Pardi

Direktur Utama

President Director

30

Halaman ini sengaja dikosongkan
 This page is intentionally left blank



Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia tahun buku 2024 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan Dana Jaminan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners



Hoesen
(Komisaris Utama)
(President Commissioner)



Ronald Waas
(Komisaris)
(Commissioner)



Uriep Budhi Prasetyo
(Komisaris)
(Commissioner)

Statement by the Members of the Board of Commissioners and Directors Regarding Their Responsibility for the 2024 Annual Report of Indonesia Clearing and Guarantee Corporation

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of Indonesia Clearing and Guarantee Corporation for financial year of 2024 is presented in its entirety, and are fully responsible for the correctness of the contents in the Company's Annual Report, Financial Statement, and Financial Statement of Guarantee Fund.

This statement is hereby made in all truthfulness.

DIREKSI

Board of Directors



Iding Pardi
(Direktur Utama)
(President Director)



Antonius Herman Azwar
(Direktur Kliring dan Penjaminan)
(Director of Clearing and Guarantee)



Umi Kulsum
(Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis)
(Director of Information Technology and Business Support)



Profil Perusahaan

Company Profile



Seperti mercusuar di tengah samudra yang luas, KPEI hadir sebagai lembaga kliring dan penjaminan yang andal bagi ekosistem pasar modal dan pasar keuangan Indonesia. Dalam lanskap pasar yang terus berkembang KPEI senantiasa mendukung integrasi dan pendalaman pasar melalui perannya sebagai *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Komitmen ini menegaskan posisi KPEI sebagai penjaga stabilitas, pelindung kepercayaan, dan pengarah strategi menuju integrasi yang lebih dalam serta daya saing yang berkelanjutan di tingkat regional dan global.

Like a lighthouse in the middle of a vast ocean, KPEI is present as a reliable clearing and guarantee institution for Indonesia's capital and financial market ecosystem. In the evolving market landscape, KPEI continues to support market integration and deepening through its role as Central Counterparty (CCP) in the Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA). This commitment affirms KPEI's position as the guardian of stability, protector of trust, and strategic director towards deeper integration and sustainable competitiveness at the regional and global levels.



03

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights

Informasi Umum Perusahaan

COMPANY'S GENERAL INFORMATION



Nama Perusahaan

Company Name

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
Indonesia Clearing and Guarantee Corporation



Nama Merek

Brand Name

IDClear



Kegiatan Usaha

Business Activities

- Penyelenggara jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien
- Penyelenggara jasa kliring dan penjaminan transaksi keuangan dalam Pasar Keuangan; dan
- Penyelenggara guna menunjang jasa keuangan lainnya.
- Provider of clearing and settlement guarantee services for exchange transactions in an orderly, fair, and efficient manner
- Provider of clearing and guarantee services for financial transactions in the Financial Market
- Provider of services to support other financial services



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

5 Agustus 1996
August 5, 1996



Status dan Bentuk Badan Hukum

Company Status & Legal Form

Perseroan Terbatas Tertutup
Closed Limited Liability Company



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Law No. 8 of 1995 on Capital Market



Izin Usaha

Business License

- Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998 tanggal 1 Juni 1998 perihal Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Surat Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 2 Juni 2024 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Central Counterparty kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Decree of Bapepam No. Kep-26/PM/1998 dated June 1, 1998, concerning the Granting of Business License as a Clearing and Guarantee Institution to PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Letter of Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B dated June 2, 2024, on the Granting of Business License as a Central Counterparty to PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia



Kepemilikan Saham

Share Ownership

- PT Bursa Efek Indonesia (88,89%)
- PT Bank Indonesia (2,22%)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1,11%)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (1,11%)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (1,11%)
- PT Bank Central Asia Tbk (1,11%)
- PT Bank Permata Tbk (1,11%)
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk (1,11%)
- PT Bank CIMB Niaga Tbk (1,11%)
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1,11%)



Produk dan Layanan

Products and Services

- Jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Keuangan;
- Jasa Kliring Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA);
- Jasa Penjaminan dan Pengelolaan Risiko;
- Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME);
- Jasa Pengelolaan Agunan;
- Jasa Triparty Repo.
- Clearing and Settlement Services for Exchange Transactions in the Financial Market;
- Clearing Services for Alternative Market Operators (PPA);
- Guarantee and Risk Management Services;
- Securities Borrowing and Lending Services (SBL);
- Collateral Management Services;
- Triparty Repo Services.



Pasar yang Dilayani

Markets Served

Pasar Modal dan Pasar Keuangan di Indonesia
Capital Market and Financial Market in Indonesia



Modal Dasar
Authorized Capital

Rp4.000.000.000.000

(empat triliun rupiah)
(four trillion rupiah)



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Subscribed and Fully Paid-Up Capital

Rp1.800.000.000.000

(satu triliun delapan ratus miliar rupiah)
(one trillion eight hundred billion rupiah)



Jumlah Pegawai
Total Employees

157 orang (2024)
157 personnel (2024)



Wilayah Operasional
Operational Area

Indonesia



Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190,
Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 5th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190,
Indonesia

Nomor Telepon
Phone Number

+62-21 515 5115; 515 5125
Toll Free 0800-100-KPEI (5734)

E-mail

customer.care@idclear.co.id

Media Sosial
Social Media

- LinkedIn : IDCclear
- Facebook : Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Instagram : @id_clear
- X/Twitter : @Ask_IdClear
- Youtube : IDCclear – Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Tiktok : @id_clear





PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan pada 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES), dengan kepemilikan masing-masing 90% dan 10%. Pendirian KPEI didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dengan tujuan untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Pada tahun 2007, Pemerintah menggabungkan BEJ dan BES menjadi BEI, sehingga saat itu BEI merupakan pemegang saham tunggal KPEI.

Pada tanggal 24 September 1996, KPEI memperoleh status badan hukum berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan pada tanggal 1 Juni 1998, KPEI mendapatkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998 dan pada tanggal 2 Juni 2024, KPEI juga telah mendapatkan Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B.

KPEI SEBAGAI SRO

Pasal 22 UUPM, menjelaskan, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) bersama Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang berfungsi sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) dengan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan internal di pasar modal. LKP dalam hal ini adalah Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia adalah BEI, sementara LPP adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) was established in Jakarta on August 5, 1996, by Jakarta Stock Exchange (BEJ) and by Surabaya Stock Exchange (BES), with ownership shares of 90% and 10%, respectively. IDClear was founded pursuant to Law No. 8 of 1995 on the Capital Market ("Capital Market Law") with the objective of providing clearing and settlement guarantee services for exchange transactions in an orderly, fair, and efficient manner. In 2007, the Government merged BEJ and BES into Indonesia Stock Exchange (IDX), making IDX the sole shareholder of IDClear.

On September 24, 1996, IDClear obtained legal entity status based on approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia. On June 1, 1998, IDClear received its business license as a Clearing and Guarantee Institution based on Bapepam Decree No. Kep-26/PM/1998, and on June 2, 2024, IDClear was also granted a business license as a Central Counterparty based on Bank Indonesia Letter No. 26/02/DGS-DPPK/Srt/B.

IDCLEAR AS SRO

Article 22 of the Capital Market Law, explains, the Clearing and Guarantee Corporation (LKP) together with the Indonesia Stock Exchange and the Indonesia Central Securities Depository as the Depository and Settlement Institution (LPP) which functions as a Self-Regulatory Organization (SRO) with responsibility for internal regulation and supervision in the capital market. The LKP in this case is the Indonesian Securities Guarantee Clearing, the Indonesia Stock Exchange is the IDX, while the LPP is the Indonesian Central Securities Depository.



Riwayat Singkat Perusahaan

COMPANY BRIEF HISTORY —

Self-Regulatory Organization (SRO) atau Organisasi Regulator Mandiri merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan anggotanya sendiri, dengan tujuan untuk menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, dengan tetap berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai SRO, KPEI memiliki kewenangan untuk membuat aturan internal yang mengikat para anggotanya serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pasar modal Indonesia. KPEI juga bertanggung jawab untuk memastikan sistem kliring dan penjaminan berjalan dengan baik, sehingga pasar modal Indonesia tetap stabil dan terpercaya.

Sementara itu, sebagai sebuah entitas usaha, bidang usaha KPEI adalah sebagai penyelenggara layanan kliring atas transaksi bursa maupun transaksi di luar bursa, dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Sesuai perkembangannya, KPEI dapat memperluas lingkup usahanya dengan menyelenggarakan aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, dengan persetujuan OJK serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2021, KPEI ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring atas transaksi semua instrumen Surat Berharga Negara (SBN), yang lalu didukung oleh keberhasilan mengintegrasikan sistem kliring KPEI *Electronics Bonds Clearing System (e-BOCS)* dengan Bank Indonesia-*Scriptless Settlement System (BI-SSSS)*.

A Self-Regulatory Organization (SRO) is an entity that holds the authority to regulate and supervise the activities of its members, with the aim of creating an orderly, fair, and efficient market, while remaining under the oversight of the primary regulator, Financial Services Authority (OJK).

As an SRO, IDClear has the authority to issue internal regulations binding on its members and to ensure compliance with capital market regulations in Indonesia. IDClear is also responsible for ensuring the effective functioning of the clearing and guarantee system, thereby contributing to the stability and credibility of the Indonesian capital market.

Meanwhile, as a business entity, IDClear operates as a provider of clearing services for both exchange and over-the-counter (OTC) transactions, as well as a guarantor for the settlement of exchange transactions. In line with its development, IDClear may expand its scope of business to include supporting financial services activities, subject to approval from Financial Services Authority (OJK) and in accordance with applicable laws and regulations.

In 2021, IDClear was appointed by Bank Indonesia as the clearing provider for all transactions involving Government Securities (SBN), supported by the successful integration of IDClear's *Electronics Bonds Clearing System (e-BOCS)* clearing system with the Bank Indonesia-*Scriptless Settlement System (BI-SSSS)*.

Menghadapi tahun 2022, pasar modal Indonesia terbukti menjadi salah satu pasar modal yang bertahan dan tetap atraktif bagi investor regional maupun global. KPEI berfokus pada peningkatan kapasitas yang terus dilakukan di berbagai aspek untuk mengantisipasi potensi pertumbuhan serta memfasilitasi kebutuhan perkembangan usaha.

Memasuki tahun 2023, kinerja pasar modal Indonesia menggambarkan upaya linier SRO pasar modal untuk memberikan layanan yang terbaik melalui perbaikan dan pengembangan yang berkesinambungan. KPEI mencatatkan prestasi berupa rekognisi dari European Securities and Markets Authority (ESMA) sebagai *Third Country Central Counterparty* (TC-CCP) yang berarti KPEI dapat memberikan layanan kliring kepada anggota kliring (*clearing members*) dan bursa (*trading venue*) yang didirikan di Uni Eropa. Pengakuan ini membuktikan reputasi KPEI telah meraih kepercayaan dan bersanding dengan lembaga sejenis dalam menerapkan standar CCP yang diakui di Eropa dan global. Berbagai pencapaian di tahun 2023, turut didukung oleh penyempurnaan berbagai area tata kelola usaha. Selaras dengan agenda regulator dalam rangka pengembangan tata kelola perusahaan di pasar modal, KPEI telah mulai mengadopsi standar *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang menggunakan prinsip tata kelola perusahaan dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD).

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), yang pada tanggal 28 Juni 2024 lalu menerima izin usaha dari Bank Indonesia sebagai *Central Counterparty* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA) di Indonesia. Hal ini ditandai dengan seremoni peluncuran *Central Counterparty* (CCP) di Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2024. Pada saat yang sama, KPEI juga mendapatkan status *Qualifying CCP* (QCCP) dari Bank Indonesia, yang menegaskan bahwa pengaturan, prosedur, dan mekanisme di KPEI telah sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku global. Langkah pengembangan CCP sebagai salah satu Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) di Indonesia merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, serta komitmen G20 OTC *Derivatives Market Reform*. Dengan kehadiran CCP PUVA, pasar keuangan Indonesia diharapkan dapat lebih terlindungi dari risiko sistemik, terutama di tengah ekonomi global yang semakin dinamis dan terkoneksi.

KPEI yang selama ini telah berperan menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atas transaksi efek di pasar modal, telah memperluas cakupan layanannya sebagai CCP bagi sektor PUVA. Pencapaian ini menandai transformasi signifikan KPEI dalam perjalanannya untuk memperkuat perannya sebagai pilar penting dalam mendukung integrasi dan pendalaman

Entering 2022, the Indonesian capital market proved to be one of the resilient and attractive markets for both regional and global investors. IDClear focused on continuously enhancing its capacity across various aspects to anticipate potential growth and facilitate evolving business needs.

Entering 2023, the performance of Indonesia's capital market reflected the linear effort of capital market SROs in providing the best services through continuous improvement and development. IDClear recorded an achievement in being recognized by the European Securities and Markets Authority (ESMA) as a Third Country Central Counterparty (TC-CCP), meaning that IDClear is permitted to provide clearing services to clearing members and trading venues established within the European Union. This recognition demonstrates that IDClear has earned a strong reputation and is aligned with peer institutions in implementing CCP standards acknowledged in Europe and globally. Various achievements in 2023 were also supported by improvements across multiple areas of corporate governance. In line with the regulator's agenda to enhance corporate governance in the capital market, IDClear has begun adopting the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) standard, which is based on the corporate governance principles of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear), which received its business license from Bank Indonesia on June 28, 2024, as the Central Counterparty for Money Market and Foreign Exchange Market (CCP PUVA) in Indonesia. This milestone was marked by a ceremonial launch of the Central Counterparty (CCP) at Bank Indonesia on September 30, 2024. At the same time, IDClear was also granted the status of a Qualifying CCP (QCCP) by Bank Indonesia, affirming that IDClear's arrangements, procedures, and mechanisms align with globally accepted principles and standards. The development of CCP as part of Indonesia's Financial Market Infrastructure (FMI) fulfills the mandate of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU PPSK), the 2025 Money Market Development Blueprint (BPPU), and the commitment of G20 OTC Derivatives Market Reform. With the establishment of CCP PUVA, Indonesia's financial market is expected to become more resilient against systemic risk, particularly amid an increasingly dynamic and interconnected global economy.

IDClear, which has long served its role as the Clearing and Guarantee Institution (LKP) for securities transactions in the capital market, already expand its service coverage as a CCP for the money market and foreign exchange market sectors. This achievement marks a significant transformation for IDClear in its journey to strengthen its role as a key pillar in supporting the integration and deepening of the national

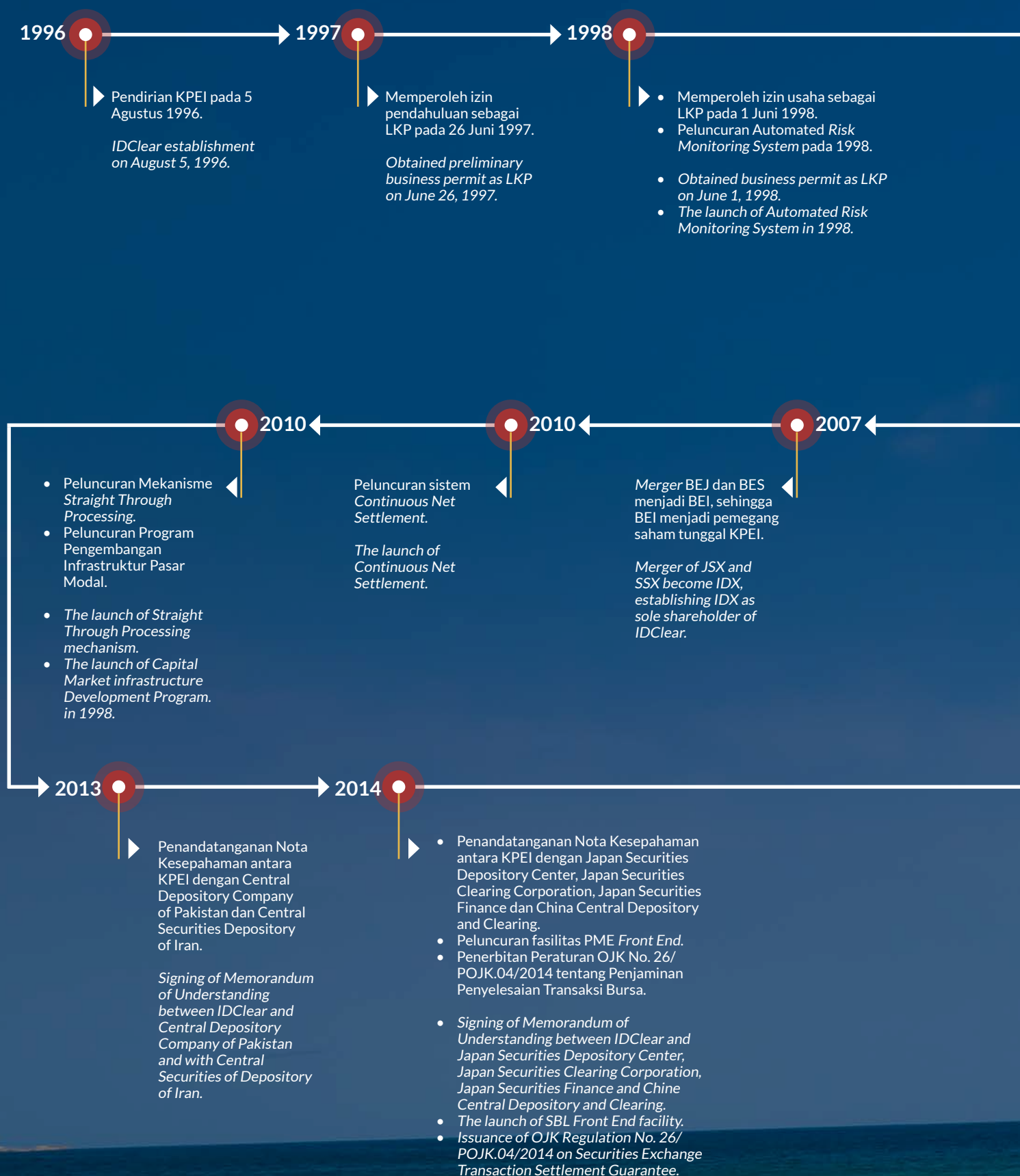
pasar keuangan nasional. Peresmian KPEI sebagai CCP PUVA merupakan suatu pencapaian penting bagi pasar keuangan Indonesia menuju pasar yang lebih aman, efisien, dan transparan. KPEI siap memberikan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan manajemen agunan yang andal untuk mendukung implementasi mekanisme CCP serta pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

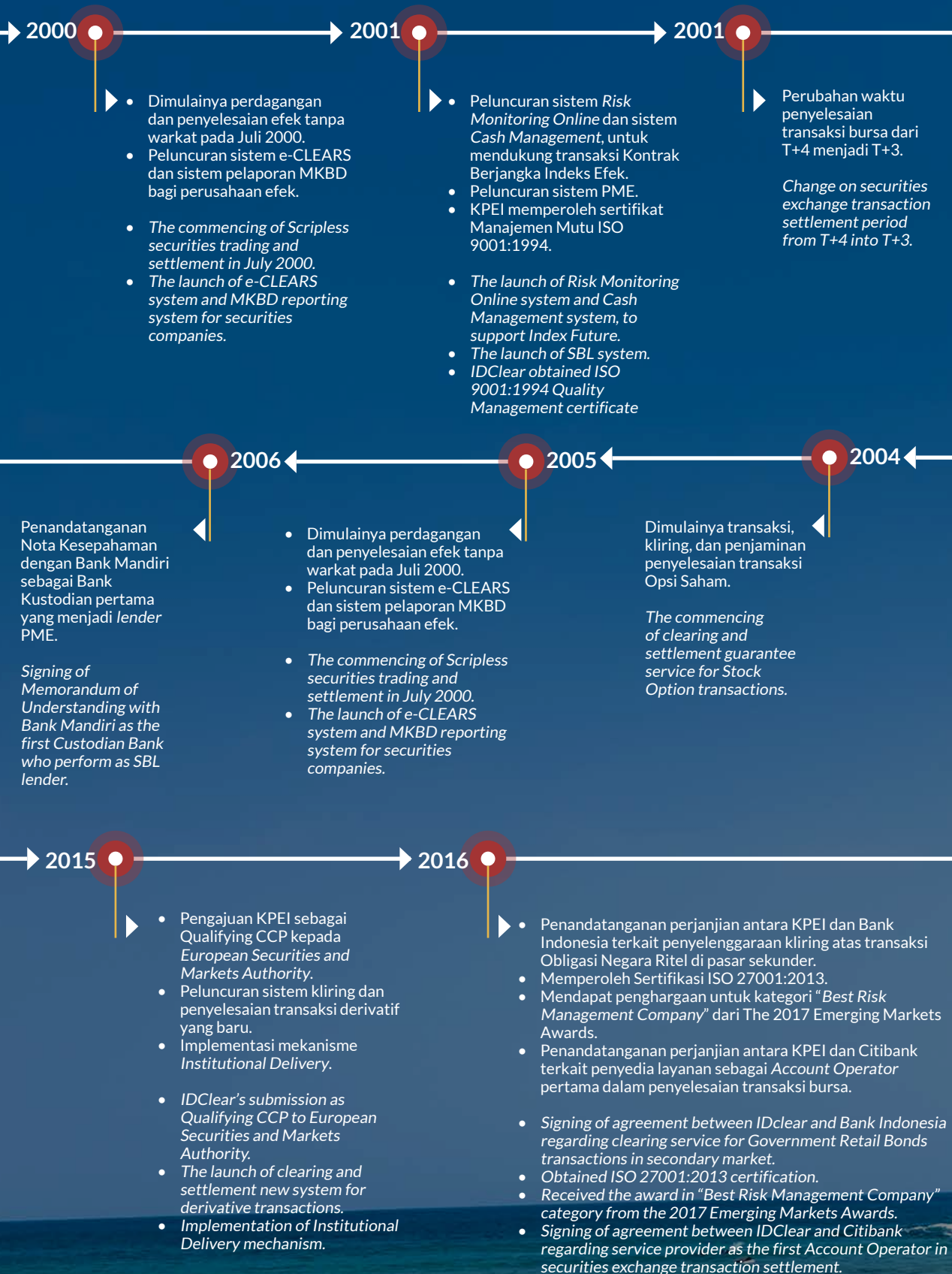
financial market. The inauguration of IDCclear as a CCP PUVA represents an important milestone for Indonesia's financial market toward becoming a more efficient, and transparent. IDCclear is ready to provide reliable clearing, guarantee, risk management, and collateral management services to support the implementation of the CCP mechanism and the development of the money market and foreign exchange market.



Jejak Langkah

MILESTONES





2017

- Penandatanganan perjanjian antara KPEI dan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan kliring atas transaksi Obligasi Negara Ritel di pasar sekunder.
- Memperoleh Sertifikasi ISO 27001:2013.
- Mendapat penghargaan untuk kategori "Best Risk Management Company" dari The 2017 Emerging Markets Awards.
- Penandatanganan perjanjian antara KPEI dan Citibank terkait penyedia layanan sebagai Account Operator pertama dalam penyelesaian transaksi bursa.
- *Signing of agreement between IDClear and Bank Indonesia regarding clearing service for Government Retail Bonds transactions in secondary market.*
- *Obtained ISO 27001:2013 certification.*
- *Received the award in "Best Risk Management Company" category from the 2017 Emerging Markets Awards.*
- *Signing of agreement between IDClear and Citibank regarding service provider as the first Account Operator in securities exchange transaction settlement.*

2018

- Peluncuran sistem e-CLEARs baru.
- Implementasi percepatan siklus penyelesaian transaksi bursa dari T+3 menjadi T+2.
- *The launch of new e-CLEARs.*
- *Implementation of accelerated settlement cycle of securities exchange transaction from T+3 into T+2.*

2023

- Meluncurkan aplikasi m-Clears versi 1.2.0.
- Audit Gabungan 4 ISO:
- ISO 9001/SMM; ISO 27001/SMKI; ISO 37001/SMAP; ISO 22301/SMKU.
- Meluncurkan Produk PME Bilateral.
- Menyelesaikan Sistem Collateral Management untuk OTC Derivatif SBNT.
- Meraih Platinum Award di Kompetisi Laporan Tahunan Internasional LACP 2022 Vision Award.
- Memperoleh Pengakuan TC-CCP oleh ESMA.
- Launched m-Clears application version 1.2.0
- Combined Audit 4 ISO: ISO 9001/SMM; ISO 27001/SMKI; ISO 37001/SMAP; ISO 22301/SMKU.
- Launched Bilateral SBL Product
- Completed Collateral Management System for OTC SBNT Derivatives
- Achieved Platinum Award at the International Annual Report Competition LACP 2022 Vision Award.
- Obtained TC-CCP Recognition by ESMA.

- Implementasi Shortcut Settlement.
- Implementasi Kliring Waran Terstruktur.
- Implementasi Layanan PME Bilateral.
- Perolehan Penghargaan CFI Award sebagai Best Exchange Transaction Clearing Services Southeast Asia 2022.
- Implementation of Shortcut Settlement.
- Implementation of Structured Warrants Clearing.
- Implementation of Bilateral SBL Service.
- Obtained CFI Award as Best Exchange Transaction Clearing Services Southeast Asia 2022.

2022

2024

- Penambahan pemegang saham KPEI, seiring dengan perluasan perannya di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA);
- Mendapatkan status Qualifying CCP (QCCP) PUVA dari Bank Indonesia;
- Telah berhasil melakukan transisi ISO 27001: 2013 menjadi ISO 27001:2022;
- Dapat mempertahankan 3 ISO (SMM, SMKU, SMAP) pada pelaksanaan Combined Audit ISO.
- *The addition of IDClear shareholders is in line with the expansion of its role in the money market and foreign exchange market;*
- *Obtained Qualifying CCP (QCCP) PUVA status from Bank Indonesia;*
- *Successfully transitioned from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022;*
- *Maintained three ISO certifications (QMS, ISMS, and ABMS) during the Combined ISO Audit.*

2019

- Implementasi Fasilitas *Triparty Repo*.
- Implementasi Fitur *Buy-In* pada layanan PME.
- Implementasi Portal AK dan Partisipan.
- Implementasi aplikasi Profil Keanggotaan KPEI.
- Mendapatkan Rekor MURI atas Pelaksanaan *Public Expose* Pertama dengan menggunakan Webinar bersama dengan OJK dan SRO lain.
- Mendapatkan penghargaan "*GRC Awards*" pada ajang *Asean Risk Awards 2019*.
- *Implementation of Triparty Repo Facility.*
- *Implementation of Buy-In Feature in SBL service.*
- *Implementation of "Portal AK and Partisipan"*
- *Implementation of "Profil Keanggotaan KPEI" application.*
- *Obtained MURI record for organizing First Public Expose by Webinar with OJK and other SRO.*
- *Received GRC Award in Asean Risk Awards 2019.*

2021

- Memperoleh fatwa syariah dari DSN-MUI No. 138/ DSN-MUI/ IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.
- Melakukan Rebranding KPEI.
- Melakukan peningkatan kapasitas dan peningkatan performance melalui reengineering proses pada sistem e-CLEARs.
- Mendapatkan persetujuan sebagai peserta BI-SSSS dan penunjukkan sebagai penyelenggara kliring transaksi SBN di pasar sekunder oleh Bank Indonesia.
- Meningkatkan kapasitas sistem e-IPO.
- Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan ISO 37001:2016.
- Obtained sharia fatwa from DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/IX/2020 on the Implementation of Sharia Principles in the Mechanism of Clearing and Guarantee of Equity-based Securities Transaction Settlement at the Stock Exchange
- Rebranded IDCLEAR
- Capacity increase and performance improvement through e-CLEARs system reengineering process
- Obtained the approval as a BI-SSSS participant and the appointment as an SBN transaction clearing operator on Bank Indonesia secondary market
- Improved e-IPO system capacity
- Obtained certification of Anti Bribery Management System ISO 37001:2016

- Mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bank Indonesia untuk menjadi Lembaga CCP bagi transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar – *Over the Counter* (CCP OTC SBNT).
- Penerapan kebijakan relaksasi dan pengurangan kutipan Dana Jaminan untuk memberikan stimulus pergerakan saham dan aktivitas transaksi di pasar modal selama 6 bulan.
- Penerapan kebijakan relaksasi dalam perhitungan collateral dan MKBD khusus untuk saham-saham terdaftar pada LQ-45.
- Mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keberlangsungan
- Usaha (*Business Continuity Management System*) ISO 22301:2012.
- Mendapatkan *renewal* sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013.
- Meluncurkan layanan aplikasi m-CLEARs.
- Implementasi layanan elektronik e-IPO bersama SRO lainnya.
- Meningkatkan kepemilikan saham KPEI di KSEI menjadi 12,5%.
- Mendapatkan penghargaan Gold Medal pada ajang 2019 Vision Award, Annual Report Competition.
- Acquired Principal Agreement from Bank Indonesia to become CCP institution for Derivative Transactions of Interest Rate and Exchange Rate – *Over the Counter* (CCP SBNT)
- Implementation of relaxation policy and reduction of Guarantee Fund quote to stimulate stock movements and transactional activities in the capital market for 6 months
- Implementation of a relaxation policy in collateral and MKBD calculations particularly for shares in the LQ-45 index
- Acquired Business Continuity Management System ISO 22301:2012 certification
- Renewed Information Security Management System (SMKI) ISO 27001:2013 certification
- Launched m-CLEARs application
- Implemented e-IPO service with other SRO
- Increased shares ownership of IDCLEAR in KSEI to 12.5%
- Awarded with "Gold Medal" in 2019 Vision Award, Annual Report Competition
- *Implementation of "Portal AK and Partisipan"*
- *Implementation of "Profil Keanggotaan KPEI" application.*
- *Obtained MURI record for organizing First Public Expose by Webinar with OJK and other SRO.*
- *Received GRC Award in Asean Risk Awards 2019.*

2020

Bidang Usaha

BUSINESS ACTIVITIES

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Pasar Modal dengan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian atas Transaksi Bursa dan Transaksi Efek di luar Bursa yang teratur, wajar dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendukung kegiatan Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Keuangan dengan melaksanakan fungsi sebagai *Central Counterparty* (CCP) guna mencapai Pasar Keuangan yang berintegritas, efisien, tertib, teratur dan transparan serta menyelenggarakan aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KPEI dapat melakukan kegiatan usaha utama, yaitu:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan antara lain sebagai:

1. Penyelenggara jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien;
2. Penyelenggara jasa kliring dan penjaminan transaksi keuangan dalam Pasar Keuangan; dan
3. Penyelenggara guna menunjang jasa keuangan lainnya.

Secara detail, kegiatan usaha yang dilakukan oleh KPEI guna mendukung maksud dan tujuan perseroan antara lain:

1. Melakukan kegiatan kliring atas Transaksi Bursa dan Transaksi Efek di luar Bursa serta instrumen keuangan dalam Pasar Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan penjaminan penyelesaian Transaksi Efek di Pasar Modal dan transaksi keuangan dalam Pasar Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memungut dan mengelola Dana Jaminan serta mengelola Agunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjadi CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) atas kegiatan yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan/atau Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) selaku otoritas dengan menjalankan fungsi novasi, kliring, pengelolaan risiko sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyediakan teknologi dan infrastruktur;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objectives of the Company's establishment are to support the Government's policy in developing the Capital Market by providing clearing and settlement guarantee services for Exchange Transactions and Off-Exchange Securities Transactions in an orderly, fair, and efficient manner in accordance with prevailing laws and regulations; to support Government initiatives in Financial Market Development by acting as a Central Counterparty in order to achieve an integrated, efficient, orderly, and transparent Financial Market; and to carry out other supporting financial services activities.

To achieve these purposes and objectives, IDClear may engage in the following core business activities, which are:

The Company's Main Business Activities include:

1. Provider of clearing and settlement guarantee services for exchange transactions in an orderly, fair, and efficient manner;
2. Provider of clearing and guarantee services for financial transactions in the Financial Market; and
3. Provider of services to support other financial services.

In detail, the business activities carried out by IDClear to support the Company's purposes and objectives include:

1. Conducting clearing activities on Exchange transactions and securities transactions outside the Exchange and financial instruments in the financial market in accordance with applicable laws and regulations;
2. Carrying out the guarantee of the settlement of securities transactions in the capital market and financial transactions in the financial market in accordance with applicable laws and regulations;
3. Collecting and managing the Guarantee Fund and managing collateral in accordance with applicable laws and regulations;
4. Acting as a Central Counterparty (CCP) in the Money Market and Foreign Exchange Market for activities that have obtained approval from Financial Services Authority (hereinafter referred to as OJK) and/or Bank Indonesia (hereinafter referred to as BI) as the competent authorities, by performing novation, clearing, and risk management functions in accordance with the prevailing laws and regulations, while providing the required technology and infrastructure;

- Menjalankan segala kegiatan dalam usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 3 ayat 3.1, menjalankan usaha-usahanya, baik atas tanggungannya sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan jasa lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh OJK dan/atau instansi berwenang lainnya.

PRODUK DAN JASA

Sesuai bidang usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, KPEI menyediakan produk dan layanan meliputi:



Jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa
Clearing and Settlement



Jasa Penjaminan dan Pengelolaan Risiko
Guarantee and Risk Management Services



Jasa Pengelolaan Agunan
Collateral Management Services



Central Counterparty Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA)
Central Counterparty for Money Market and Foreign Exchange Market (CCP PUVA)

- Carrying out all activities in pursuit of and in alignment with the Company's purposes and objectives as stated in Article 3 paragraph 3.1, and conducting its business, either on its own behalf or in cooperation with individuals or other entities, in such a manner and form as deemed necessary by the Company and without prejudice to the prevailing laws and regulations;
- Providing other services related to the Company's purposes, objectives, and business activities, and/or as stipulated under the prevailing laws and regulations and approved by Financial Services Authority (OJK) and/or other relevant authorities.

PRODUCTS AND SERVICES

In accordance with the line of business stipulated in the Company's Articles of Association, IDCclear provides the following products and services:



Jasa Kliring Transaksi di Luar Bursa
Clearing Services for Regulated Over the Counter Transactions



Jasa Pinjam Meminjam Efek
Securities Borrowing and Lending Services



Layanan Lainnya
Other Services

Jasa Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa

Sebagai penyedia jasa kliring dan penyelesaian transaksi *Central Counterparty* (CCP), yaitu proses perhitungan hak dan kewajiban Anggota Kliring (AK) yang timbul dari transaksi Bursa maupun transaksi di luar Bursa melalui sistem *Electronic Trading Platform* (ETP) yang dilakukan di BEI. Hasil dari kegiatan kliring berupa Daftar Hasil Kliring (DHK) yang akan dikirim ke AK sebagai tagihan atas transaksi yang sudah dilakukan dan wajib diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian.

KPEI memiliki 3 (tiga) layanan kliring dan penyelesaian transaksi bursa yang diselenggarakan. Berikut berdasarkan produk yang ditransaksikan, yaitu:

- Kliring Transaksi Efek Bersifat Ekuitas
- Kliring dan Penyelesaian Transaksi Derivatif
- Kliring Transaksi Efek Bersifat Utang

Clearing and Settlement Services for Securities Exchange Transaction

As a provider of clearing and settlement services for Central Counterparty (CCP), this refers to the process of calculating the rights and obligations of Clearing Members (CM) arising from Exchange and Over the Counter (OTC) transactions conducted through the Electronic Trading Platform (ETP) at IDX. The result of the clearing activity is the Clearing Result List (DHK), which will be sent to the Clearing Members as an invoice for completed transactions, mandating fulfillment within the specified settlement timeframe.

IDCclear provides three (3) exchange transaction clearing and settlement services. The following are based on the transacted products, as follows:

- Clearing for Equity Transaction
- Clearing and Settlement for Derivative Transactions
- Clearing for Bonds Transactions

1. Kliring Transaksi Efek Bersifat Ekuitas

Proses kliring transaksi Bursa atas efek bersifat ekuitas dilakukan dengan metode *netting* dan/atau metode *trade-for-trade* (TFT). Penentuan metode kliring untuk transaksi ekuitas ditentukan berdasarkan jenis pasar yang dipilih Anggota Kliring (AK) ketika bertransaksi di BEI, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Metode *Netting*

- Digunakan untuk seluruh transaksi Bursa atas efek bersifat ekuitas yang terjadi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- Pasar Reguler memiliki jangka waktu penyelesaian sampai dengan dua hari Bursa sejak transaksi dilakukan atau disebut T+2.
- Pasar Tunai memiliki jangka waktu penyelesaian pada hari yang sama dengan waktu transaksi atau T+0.

b. Metode *Trade for Trade* (TFT)

Digunakan untuk transaksi Bursa atas efek bersifat ekuitas yang terjadi di Pasar Negosiasi yang memiliki jangka waktu penyelesaian sesuai dengan negosiasi antara 2 Anggota Kliring yang melakukan transaksi tersebut. KPEI menyelenggarakan kliring transaksi Bursa atas efek bersifat ekuitas menggunakan sistem yang disebut *Electronic Clearing & Guarantee System* (e-CLEARs). e-CLEARs melayani proses kliring untuk produk ekuitas meliputi Saham, Waran, Waran Terstruktur, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, *Exchange Traded Fund* dan uang. Aplikasi berbasis web ini memiliki kemampuan untuk melakukan kliring dan menyediakan dokumen DHK untuk AK dan level nasabah.

Dalam pemenuhan penyelesaian kewajiban kepada KPEI di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, bagi AK yang tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah efek, KPEI menyediakan beberapa alternatif sebagai berikut:

- Melakukan transaksi Pinjam Meminjam Efek ke KPEI;
- Melakukan pembelian efek di pasar tunai; atau
- Mengganti kewajibannya menjadi serah uang pengganti (disebut *Alternate Cash Settlement* atau ACS) sebesar 125% dari harga tertinggi pada T+0 di Pasar Reguler atau T+2 sesi satu di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk efek yang tidak dapat diserahkan. Informasi perkiraan nilai ACS tersedia dalam dokumen DHK.

2. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Derivatif

Proses kliring transaksi derivatif dilakukan dengan metode *netting* berdasarkan data transaksi dari Pasar Reguler. Produk derivatif yang dapat dikliringkan di KPEI meliputi:

- Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE);
- Kontrak Berjangka Saham (KBS);
- Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSUN); dan

1. Clearing for Equity Transaction

Clearing for equity transaction is processed by netting and per transaction or by trade-for-trade (TFT) methods. The clearing method is determined by the type of market selected by Clearing Members (CM) when conducting transaction in IDX as follows:

a. Netting Methods

- Used for all equity transactions in Regular Market or Cash Market.
- Regular Market provides settlement period up to two trading days after the transactions or T+2
- Cash Market provides settlement period on the same day or T+0.

b. Trade for Trade (TFT) Methods

Used for exchange transactions on equity securities occurring in the Negotiated Market, with a settlement period based on the negotiation between the two Clearing Members conducting the transaction. IDCLEAR provides clearing for exchange transactions on equity securities using a system called the Electronic Clearing & Guarantee System (e-CLEARs). e-CLEARs serves the clearing process for equity products including Shares, Warrants, Structured Warrants, Pre-emptive Rights, Exchange Traded Funds, and cash. This web-based application is capable of performing clearing and providing Clearing Result Documents (DHK) for both Clearing Members and customer-level accounts.

In meeting the obligations for settlement with IDCLEAR in Regular Market and Cash Market, in cases where Clearing Members (CM) are unable to fulfill either partially or entirely their obligations for securities delivery, IDCLEAR offers several alternatives as follows:

- Engaging in securities lending and borrowing transactions with IDCLEAR;
- Conducting the purchase of securities in the cash market; or
- Replacing the obligation with Alternate Cash Settlement (ACS) amounting to 125% of the highest price on T+0 in the Regular Market and Cash Market for securities that cannot be delivered. Estimated ACS values are available in DHK document.

2. Clearing and Settlement for Derivative Transactions

Clearing for derivative transactions can only be processed by netting method in the Regular Market. The derivative products that can be cleared by IDCLEAR are as follows:

- Future Contracts Index;
- Single Stock Futures (SSF);
- Indonesia Government Bond Futures (IGBF); and

- Kontrak Berjangka Sekumpulan Surat Utang Negara (KBSSUN); dan
- Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA).

KPEI menggunakan Sistem Kliring Derivatif (SKD) dalam menjalankan proses kliring dan penyelesaian transaksi derivatif yang mampu menyediakan Daftar Hasil Kliring (DHK) dari level AK hingga level nasabah. DHK memiliki konten informasi mengenai hak dan kewajiban berupa keuntungan/kerugian (*profit & loss*) secara harian serta informasi kebutuhan margin.

Sebelum melakukan transaksi derivatif, Anggota Kliring (AK) wajib menempatkan dana terlebih dahulu ke Rekening Dana Pengaman (Rekening 054) dan Rekening Efek Utama Jaminan (REU 044), begitu juga dengan Nasabah wajib menyetorkan dana di Sub Rekening Efek Jaminan (SRE 044). KSEI akan mengirimkan *sync balance* ke sistem e-Clears (KPEI) dan akan diteruskan ke sistem Kliring dan Penyelesaian Derivatif (SKD) terkait dana yang tersedia di Rekening Dana Pengaman, Rekening Efek Utama Jaminan, dan Sub Rekening Efek Jaminan dalam bentuk *update balance*.

Proses penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dilakukan pada satu hari Bursa dari waktu transaksi atau T+1 (hingga waktu jatuh tempo kontrak). Dilakukan secara tunai dengan dana yang sudah tersedia di Rekening Jaminan atau Sub Rekening Jaminan Kontrak Berjangka selambat-lambatnya pada T+1 pukul 12.00 WIB.

Jenis produk derivatif yang diperdagangkan oleh Bursa Efek Indonesia meliputi:

- Produk Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE)
Transaksi produk KBIE menggunakan underlying indeks LQ45 dan IDX-30.
- Produk Kontrak Berjangka Saham (KBS)
Transaksi produk KBS menggunakan underlying saham-saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ-45.
- Produk Kontrak Berjangka Surat Utang Negara (KBSSUN)
Transaksi produk KBSSUN menggunakan underlying surat utang negara seri benchmark dengan tenor lima tahun dan sepuluh tahun.
- Produk Kontrak Berjangka Sekumpulan Surat Utang Negara (KBSSUN)
Transaksi produk KBSSUN menggunakan underlying sekumpulan surat utang negara dengan tenor lima tahun dan sepuluh tahun.
- Produk Kontrak Berjangka Indeks Asing (KBIA)
Transaksi produk KBIA saat ini menggunakan underlying indeks MSCI Hong Kong Listed Large Cap yang merepresentasikan pergerakan saham - saham dengan kapitalisasi pasar besar yang tercatat di Bursa Hong Kong.

Bagi AK yang tidak dapat memenuhi kewajiban secara tunai, maka KPEI akan melakukan penanganan kegagalan sesuai dengan Peraturan KPEI No. III-2 Poin IX tentang Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Anggota Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

- Indonesia Government Basket Bond Futures (IGBBF); and
- Foreign Index Futures (FIFC).

IDCclear uses the Derivatives Clearing System (SKD) in carrying out the clearing and settlement process of derivative transactions that can provide a List of Clearing Results (DHK) from the CM level to the customer level. The DHK contains information on rights and obligations in the form of profit & loss daily as well as information on margin requirements.

Before conducting derivative transactions, Clearing Members (AK) are required to place funds in the Safeguard Fund Account (Account 054) and the Main Collateral Securities Account (REU 044), and likewise, Customers are required to deposit funds in the Collateral Securities Sub-Account (SRE 044). KSEI will send a sync balance to the e-Clears system (IDCclear), which will then be forwarded to the Derivatives Clearing and Settlement System (SKD) related to the available funds in the Safeguard Fund Account, the Main Collateral Securities Account, and the Collateral Securities Sub-Account in the form of a balance update.

The settlement process of Futures Contract Transactions is carried out on one Exchange Day from the time of transaction or T+1 (until the contract's maturity date). It is settled in cash using the funds available in the Collateral Account or Futures Contract Sub Collateral Account no later than T+1 at 12:00 PM WIB.

Types of derivative products traded on the Indonesia Stock Exchange include:

- Future Contracts Index product
IF transactions use the LQ45 and IDX-30 indices as the underlying assets.
- Single Stock Futures (SSF) product
SSF transactions use shares included in the LQ45 index calculation as the underlying assets.
- Indonesia Government Bond Futures (IGBF) product
IGBF transactions use benchmark series government bonds with five-year and ten-year tenors as the underlying assets.
- Indonesia Government Basket Bond Futures (IGBBF) product
IGBBF transactions use a basket of government bonds with five-year and ten-year tenors as the underlying assets.
- Foreign Index Futures (FIFC) product
Currently, FIFC transactions use the MSCI Hong Kong Listed Large Cap Index as the underlying asset, representing the movement of large-cap stocks listed on the Hong Kong Stock Exchange.

For Clearing Members (AK) who are unable to fulfill obligations in cash, IDCclear will handle the default in accordance with IDCclear Regulation No. III-2, Point IX regarding the Default on Fulfillment of Obligations by Clearing Members and the Guarantee of Settlement of Exchange Transactions.

3. Kliring Transaksi Efek Bersifat Utang

Untuk proses kliring transaksi efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) hanya dilakukan di luar bursa melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA). Metode kliring untuk produk ini adalah *trade-for-trade* (TFT) dengan menggunakan sistem KPEI yang disebut *Electronic Bond Clearing System* (e-BOCS) PPA yang sudah tersedia dan berlaku sejak 29 Oktober 2021. Sistem ini menghasilkan dokumen informasi berupa Laporan Hasil Kliring (LHK) dan Daftar Hasil Kliring (DHK).

Penyelesaian transaksi di luar Bursa dilakukan dengan sistem milik KSEI yang disebut *Central Depository and Book Entry Settlement System* atau C-BEST, dan Bank Indonesia (BI) melalui sistem Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Partisipan Kliring EBUS dapat melakukan proses kliring dengan cara melakukan konfirmasi dan afirmasi oleh *Settlement Agent* untuk menerima instruksi penyelesaian dan DHK. Instruksi penyelesaian secara *Straight-Through Processing* (STP) akan dikirim dari e-BOCS PPA ke C-BEST atau BI-SSSS.

Untuk transaksi Efek Bersifat Utang di Luar Bursa, saat ini KPEI hanya melakukan layanan kliring tanpa menyelenggarakan fungsi penjaminan atas penyelesaian transaksi tersebut. Aktivitas kliring untuk transaksi EBUS di SPPA diselesaikan dengan tanggal penyelesaian yang beragam. Penyelesaian dilakukan berdasarkan tanggal penyelesaian yang disepakati oleh Partisipan di SPPA dengan pilihan penyelesaian sebagai berikut:

- Penyelesaian T+0, yaitu penyelesaian yang dilakukan di tanggal yang sama dengan tanggal transaksi.
- Penyelesaian T+1 hingga T+7, yaitu penyelesaian yang dilakukan satu hari hingga tujuh hari setelah tanggal transaksi.

Jasa Pinjam Meminjam Efek

Layanan jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) adalah peralihan hak guna efek sementara dari pemberi pinjaman ke penerima pinjaman dalam periode tertentu. Dalam mekanisme layanan PME, KPEI memiliki dua peran, yaitu:

- KPEI berperan sebagai *penjamin (guarantor) dan pihak penengah (Central Counterparty)* yang memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman sekaligus menjadi pihak yang meminjamkan efek untuk penerima pinjaman, walaupun pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak saling mengetahui.
- KPEI berperan sebagai *intermediaries*, yaitu penyedia Fasilitas PME Bilateral, di mana KPEI dalam hal ini bukanlah sebagai pihak penengah dan penjamin, serta pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sudah saling mengenal dan sepakat satu sama lain.

Layanan PME disediakan untuk menghindari potensi kegagalan serah saham ke KPEI dalam proses

3. Clearing for Bonds Transactions

For the clearing process of Debt and Sukuk Securities (EBUS) transactions, it is conducted exclusively over the counter through the Alternative Market Operator System (SPPA). The clearing method used for this product is trade-for-trade (TFT) using IDClear's system called the electronic Bond Clearing System (e-BOCS) PPA, which has been available and in effect since October 29, 2021. This system produces informational documents in the form of Clearing Result Report (LHK) and Clearing Result List (DHK).

Settlement of OTC transactions is carried out through the system owned by KSEI, known as Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST), and by Bank Indonesia (BI) through Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). EBUS Clearing Participants may conduct the clearing process through confirmation and affirmation by a Settlement Agent to receive settlement instructions and DHK. Settlement instructions using Straight-Through Processing (STP) will be sent from e-BOCS PPA to C-BEST or BI-SSSS.

For Over the Counter (OTC) Bond transactions, IDClear currently provides clearing services only and does not perform the guaranteed function for the settlement of such transactions. The clearing activity for EBUS transactions on the SPPA platform is settled with varying settlement dates. The settlement is carried out based on the settlement date agreed upon by Participants on SPPA, with the following settlement options:

- T+0 settlement, which is conducted on the same day as the transaction date.
- T+1 to T+7 settlement, which is conducted one to seven days after the transaction date.

Securities Lending and Borrowing (SBL)

Securities Lending and Borrowing (SBL) services are the transfer of temporary securities rights from lender to borrower within a certain period. In the SBL service mechanism, IDClear has two roles, namely:

- IDClear acts as the guarantor and intermediary (Central Counterparty) that obtains securities from the lender and simultaneously lends them to the borrower, even though the lender and borrower are unaware of each other's identity.
- IDClear acts as intermediaries, namely Bilateral SBL Facility providers, where IDClear in this case is not an intermediary and guarantor, and the lenders and loan recipients already know each other and agree with each other.

The SBL service is provided to mitigate the potential risk of share delivery failure to IDClear during the

penyelesaian transaksi Bursa maupun mendukung transaksi bursa lainnya. Anggota PME merupakan AK ataupun Bank Kustodi. Dengan menjadi anggota PME, AK maupun BK sebagai *Lender* akan mendapatkan tambahan pendapatan ataupun sebagai AK sebagai *Borrower* upaya menerapkan strategi investasi jangka panjang. Saat ini, KPEI menyediakan dua jenis layanan PME, yakni; PME yang dijamin (*Reguler dan PME Front End*), dan PME Bilateral (*Arranged dan Customized*), dengan perbedaan sebagai berikut:

a. PME yang Dijamin

Layanan PME yang Dijamin memberikan fasilitas kepada pihak yang melakukan transaksi, berupa *open term* dimana pengembalian dapat dilakukan sebelum jatuh tempo dan peminjaman saham dapat diperpanjang secara otomatis, serta *fixed term* di mana pengembalian pinjamannya hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo dan tidak dapat dilakukan perpanjangan periode peminjaman. PME yang Dijamin terdiri dari PME Reguler dan PME *Front End* yang mempunyai perbedaan pada penghitungan *fee*, sebagai berikut:

- PME Reguler
Mempunyai mekanisme perhitungan *fee* tetap, yakni maksimal 13% p.a kepada pihak penerima pinjaman serta maksimal 12% p.a kepada pemberi pinjaman.
- PME *Front End*
Menerapkan perhitungan *fee* melalui proses tawar menawar, dengan maksimal pendapatan bagi pemberi pinjaman sebesar 17% p.a.

Proses transaksi hingga penyelesaian PME dilakukan di KPEI menggunakan sistem e-CLEARs dan aplikasi PME *Front End*, serta hanya dapat dilakukan oleh AK dan Bank Kustodian. Apabila saat jatuh tempo pihak penerima pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau tidak dapat menyerahkan dana atau saham pengganti dividen saat terjadi *corporate action* (atau disebut *manufactured dividend*), maka atas permintaan peminjam, KPEI akan melakukan *buy-in*, yaitu pembelian saham di Pasar Tunai atas saham yang tidak dapat dikembalikan.

Apabila *buy-in* berhasil dilakukan, maka pemberi pinjaman akan memperoleh pengembalian berupa saham, namun jika *buy-in* tidak berhasil dilakukan, maka peminjam akan dikenakan *non reimbursement compensation* (NRC) sebagai bentuk penalty sebesar 125% dari harga tertinggi saham yang akan diberikan kepada pemberi pinjaman dan tidak dapat dikembalikan.

b. PME Bilateral

PME Bilateral merupakan suatu jenis layanan PME KPEI yang dapat digunakan oleh partisipan dalam rangka pemenuhan kewajiban serah efek ataupun

settlement process of exchange transactions as well as to support other exchange-related transactions. SBL members consist of Clearing Members (CM) or Custodian Banks (BK). By becoming SBL members, CM or BK as lenders can gain additional income, while CM as borrowers can apply long-term investment strategies. Currently, IDCclear offers two types of SBL services: Guaranteed SBL (Regular and Front End SBL), and Bilateral SBL (Arranged and Customized), with the following differences:

a. Guaranteed SBL

IDCclear SBL services provides facilities to the party who makes the transaction, namely open term where the return can be made before maturity and the loan of shares can be extended automatically, and fixed terms where the loan return can only be done when it is due, and the loan period cannot be extended. Guaranteed SBL consists of Regular SBL and Front End SBL, which differ in fee calculation methods, as follows:

- Regular SBL
employs a mechanism for calculating fixed fees, with a maximum of 13% p.a. to borrowers and a maximum of 12% p.a. to lenders.
- Front End SBL
applies a fee calculation through a bargaining process, with a maximum income for lenders of 17% p.a.

The transactions process leading up to SBL settlement is conducted through IDCclear's e-CLEARs system and the Front End SBL application, exclusively accessible to CM and Custodian Banks. In the event that the lender is unable to repay the loan upon maturity or fulfill delivery of funds or shares in place of dividends during a corporate action (also known as a manufactured dividend), IDCclear will, upon the borrower's request, initiate a buy-in process. This involves purchasing shares in the Cash Market for those that cannot be returned.

If the buy-in is successfully executed, the lender will receive shares as a return. However, if the buy-in is not successfully executed, the borrower will be subject to a non-reimbursement compensation (NRC) penalty amounting to 125% of the highest price of the shares, which will be given to the lender and cannot be reclaimed.

b. Bilateral SBL

Bilateral SBL is an IDCclear's SBL service allowing participants to meet securities or securities financing obligations. It emphasizes transaction

securities financing. Konsep yang diterapkan atas layanan PME Bilateral yakni fleksibilitas transaksi sesuai *risk appetite*, pengelolaan pinjaman dan pengembalian pinjaman, *collateral management* (*mark to market*, *margin call*, *substitution*) dan penanganan kegiatan korporasi.

Pihak-pihak yang dapat melakukan transaksi PME Bilateral yakni:

- *Lender*, terdiri dari Perusahaan Efek, Bank Kustodian, Pendanaan Efek Indonesia, dan lainnya;
- *Borrower*, terdiri dari Perusahaan Efek, Bank Kustodian, dan lainnya.

PME Bilateral terdiri dari dua jenis dengan perbedaan pada agunan, yaitu:

- 1) *Arranged*, yaitu pinjaman bilateral yang merupakan jenis agunan baik efek dan dana diblokir di rekening *borrower*.
- 2) *Customized*, yaitu pinjaman bilateral yang merupakan jenis agunan efek diblokir di rekening *borrower*, sedangkan *cash*-nya dapat diteruskan ke *lender*.

Dengan fleksibilitas yang diberikan, nilai tambah yang akan diperoleh para partisipan dari layanan PME Bilateral meliputi:

- Instrumen pinjaman lebih luas yakni mencakup saham dan obligasi;
- Besaran biaya/fee berdasarkan kesepakatan partisipan yang melakukan transaksi PME;
- Agunan PME Bilateral yang dapat ditempatkan yaitu saham, Efek Bersifat Utang, sukuk, dan *cash*;
- Jumlah unit penjaminan efek saham berdasarkan kesepakatan antar partisipan (minimum satu lembar saham);
- Pengembalian efek dapat dilakukan sebelum batas waktu pinjaman;
- Pemberlakuan *Margin Call* berdasarkan hasil *Mark to Market* atas agunan;
- Penyediaan data transaksi PME Bilateral, baik sebagai pemberi pinjaman maupun sebagai penerima pinjaman; dan
- Penanganan peristiwa kegagalan PME Bilateral (*failed deliver reimbursement*, *manufacture income*, *margin call*) dengan *cash return*, NRC, *collateral liquidation*, *penalty*.

Triparty Repo

Repo merupakan transaksi jual efek yang diikuti dengan perjanjian membeli kembali efek tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya fasilitas ini, KPEI membantu para pihak yang bertransaksi Repo dalam hal pengelolaan agunan, pengelolaan *margin*, penggantian agunan, pemantauan dan penyelesaian transaksi, serta perhitungan pendapatan dan penggantian dividen atau bunga obligasi.

flexibility tailored to risk appetite, loan and collateral management, including mark-to-market, margin calls, substitutions, and corporate activity handling.

Parties eligible to engage in Bilateral SBL transactions include:

- Lender, comprising Securities Companies, Custodian Banks, Indonesian Securities Funds, and others;
- Borrower, including Securities Companies, Custodian Banks, and others.

Bilateral SBL consists of two types with differences in collateral, namely:

- 1) *Arranged*, is bilateral loans that involve the blocking of both securities and funds in the borrower's account.
- 2) *Customized*, is bilateral loans that involve the blocking of securities as collateral in the borrower's account, while the cash can be forwarded to the lender.

With the flexibility offered, participants can expect to gain added value from Bilateral SBL services such as:

- Loan instruments are broader, including stocks and bonds;
- The amount of fee is based on the agreement of participants who conduct SBL transactions;
- Bilateral SBL collateral that can be placed are shares, debt securities, sukuk, and cash;
- The number of pledge units for stock securities is based on an agreement between participants (minimum one share);
- Return of securities can be done before the loan deadline;
- Imposition of *Margin Call* based on the results of *Mark to Market* on collateral;
- Provision of Bilateral SBL transaction data, both as a lender and as a loan recipient; and
- Handling of Bilateral SBL failure events (*failed deliver reimbursement*, *manufacture income*, *margin call*) with *cash return*, NRC, *collateral liquidation*, *penalty*.

Triparty Repo

Repo is securities selling transaction followed by agreement to repurchase the securities within an agreed upon time frame. With this facility, IDCclear supports the parties involved in Repo transaction in collateral and margin management, collateral replacement, transaction settlement and monitoring, as well as calculation of revenue and dividend or bonds interest replacement.

Triparty Repo merupakan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) dengan peran KPEI sebagai pihak ketiga yang menyediakan fasilitas sistem. KPEI menyediakan sistem *Triparty Repo* sesuai standar yang ditentukan oleh OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Dalam POJK tersebut, disyaratkan penggunaan dokumen *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA).

Indonesia Annex dalam pelaksanaan transaksi Repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, sehingga transaksi Repo dapat dilakukan secara efisien, lebih aman, terstandarisasi dan termonitor dengan baik.

Jasa Penjaminan dan Pengelolaan Risiko

Fungsi layanan penjaminan yang disediakan KPEI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi Bursa. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan kepada KPEI dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 Angka 1 dan Peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

Layanan penjaminan dan pengelolaan risiko KPEI telah mengacu pada standar internasional, yaitu *Principles for Financial Market Infrastructures* yang diterbitkan oleh *The Committee on Payment and Settlement Systems* (CPSS) dan *Technical Committee of The International Organization of Securities Commissions* (IOSCO). Dalam prinsip tersebut, KPEI diwajibkan melakukan pengukuran, pemantauan dan pengelolaan terhadap tiga jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

a. Risiko Kredit

Sesuai dengan jenis kegiatan usahanya yaitu jasa kliring dan penjaminan, KPEI menghadapi risiko kredit yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu sebagai akibat dari ketidakmampuan AK dalam memenuhi kewajiban kepada KPEI. Risiko kredit tersebut menjadi ancaman bagi KPEI sebagai CCP dan berisiko sistemik bagi stabilitas pasar keuangan. Risiko kredit dapat ditimbulkan oleh Anggota Kliring (AK), bank pembayar dan/atau bank penerbit deposito atau bank garansi yang menjadi agunan AK, serta *Stock Loans Counterparties* yaitu pihak yang berhubungan dengan KPEI dan menimbulkan risiko kredit sebagai akibat dari aktivitas pinjam meminjam efek.

b. Risiko Likuiditas

KPEI terus memastikan pengukuran, pengawasan, dan pengelolaan risiko likuiditas dilakukan secara efektif. KPEI mengelola kecukupan sumber pendanaan yang likuid dalam semua mata uang yang relevan, baik pada hari yang sama maupun antar hari dengan mempertimbangkan tingkat keyakinan tertentu, dan dengan kondisi *stress scenario* tertentu. Hal tersebut dilakukan terhadap AK dan afiliasinya yang berpotensi menyebabkan adanya kebutuhan likuiditas yang sangat besar pada kondisi pasar ekstrem yang mungkin untuk terjadi. Risiko likuiditas KPEI sepenuhnya diukur dalam bentuk Rupiah (IDR).

Triparty Repo is a Repurchase Agreement (Repo) involving IDClear as third party. IDClear provides system for Triparty Repo, that conforms to the standard set by OJK in OJK Regulation No. 09/POJK.04/2015 regarding Guideline of Repurchase Agreement Transaction for Financial Services Institution. The OJK Regulation requires the application of Global Master Repurchase Agreement (GMRA).

Indonesia Annex documents in Repo transactions performed by Financial Services Institutions, to ensure Repo transaction is carried out efficiently, more securely, fully standardized and well monitored.

Guarantee and Risk Management Services

The function of the guarantee services provided by IDClear aim to provide legal certainty for the settlement of rights and obligations of Clearing Members (CM) arising from Exchange transactions. This is in accordance with the mandate given to IDClear in Law No. 8 of 1995 on the Capital Market in Article 1 No. 1 and OJK Regulation No. 26/POJK.04/2014 on Exchange Transaction Settlement Guarantee.

IDClear's guarantee and risk management services adhere to international standards, specifically the Principles for Financial Market Infrastructures issued by The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO). These principles mandate IDClear to measure, monitor, and manage three types of risk, which are credit risk, liquidity risk, and market risk.

a. Credit Risk

In line with its business activities, particularly in clearing and guarantee services, IDClear encounters credit risk, which can arise when CM fails to meet its obligations to IDClear. This credit risk poses a threat to KPEI as a CCP and represents a systemic risk to the stability of the financial market. This risk may extend to CM, the paying bank, and/or the issuing bank of the deposit or bank guarantee secured by CM. Additionally, Stock Loans Counterparties, entities associated with IDClear, face credit risk due to securities borrowing and lending activities.

b. Liquidity Risk

IDClear ensures the effective measurement, monitoring, and management of liquidity risk. IDClear maintains the adequacy of liquid funding resources in all relevant currencies on the same day or different days by considering certain level of confidence and certain condition of stress scenario. These apply to CM and its affiliates that can potentially prompt large amount of liquidity requirements in an extreme market condition. IDClear liquidity risk is fully measured in Rupiah (IDR).

c. Risiko Pasar

KPEI terpapar pada risiko pasar pada saat menilai risiko atas setiap posisi transaksi terbuka yang belum diselesaikan AK maupun nasabahnya. Risiko pasar timbul sebagai akibat adanya selisih harga saat transaksi dengan harga pasar terakhir.

Upaya Mitigasi

Dalam Upaya mitigasi, KPEI telah merumuskan beberapa perangkat pengendalian risiko untuk mencegah kemungkinan terjadi risiko-risiko tersebut di atas serta mitigasinya, berupa:

1. Keanggotaan

Pihak yang berhak mendapat jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dari KPEI adalah Anggota Bursa Efek (AB) atau pihak lain yang telah melalui proses asesmen KPEI, terutama dari risiko kredit untuk disetujui untuk menjadi AK. Persyaratan penting lainnya adalah AK tersebut setuju untuk menyerahkan kontribusi awal Dana Jaminan dan agunan dengan jenis, jumlah dan tata caranya yang ditetapkan oleh KPEI, sesuai Peraturan KPEI No. II-3, dan Peraturan KPEI No. III-1.

2. Batasan Transaksi

KPEI menetapkan batasan transaksi berupa nilai maksimum transaksi Bursa bagi setiap AK. Nilai ini diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai agunan yang telah disetorkan AK ke KPEI dengan perhitungan risiko atas posisi transaksi yang belum diselesaikan milik AK dan/atau nasabahnya.

3. Perhitungan Risiko

KPEI menghitung setiap posisi terbuka akibat aktivitas transaksi AK dengan menggunakan metode *margin*. *Margin* dihitung pada setiap posisi terbuka di masing-masing pasar yakni ekuitas, derivatif, pinjam meminjam efek, serta Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Komponen *margin* terdiri dari *initial margin* dan *variation margin*, di mana untuk perhitungan *initial margin* menggunakan pilihan metodologi *Value at Risk*, *Alternate Value at Risk*, *Factor Model* dan *the Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN)*, tergantung dari jenis produknya. Nilai *margin* akan menjadi pengurang nilai agunan AK yang merupakan basis penentuan Batasan transaksi AK.

4. Pengujian Perhitungan Risiko

KPEI melakukan pengujian hasil perhitungan risiko untuk memastikan bahwa perhitungan tersebut valid dan layak untuk diterapkan. Pengujian ini dilakukan dalam dua cara, yaitu *backtesting* dan *stress testing*. *Back testing* adalah metode statistik yang memverifikasi kerugian yang sesungguhnya terjadi dibandingkan dengan kerugian yang diproyeksikan sebelumnya dengan perhitungan *initial margin*. Sedangkan, *stress testing* digunakan untuk melihat kecukupan sumber keuangan KPEI, jika terjadi kegagalan pada AK yang memiliki risiko (eksposur) terbesar pada kondisi ekstrem.

c. Market Risk

IDClear is exposed to market risk when assessing the risk of any open transaction position that has not been settled by CM or its customers. Market risk arises due to the difference between the price at the time of the transaction and the last market price.

Mitigation Efforts

In the mitigation efforts, IDClear has formulated several risk control measures to prevent the occurrence of the aforementioned risks and mitigate them, including:

1. Membership

The clearing and settlement guarantee services in IDClear are only provided to Exchange Member (EM) or other parties that have been assessed by IDClear (primarily in credit risk) and approved to be CM. The CM must agree to submit an initial contribution of Guarantee Fund and collateral, the type, amount, and procedure of which will be determined by IDClear, in accordance with Regulation of IDClear No. II-3, and IDClear Regulation No. III-1.

2. Trading Limit

IDClear establishes transaction limits in the form of maximum exchange transaction values for each CM. This value is obtained from the comparison between the collateral value deposited by CM to IDClear and the risk calculation of the open transaction positions of CM and/or its customers.

3. Risk Calculation

IDClear calculates each open transaction of CM transactional activity using the margin method. Margin is calculated upon every open position in each market, which are equity, derivative, bonds, and securities borrowing and lending, including the Money Market and Foreign Exchange Market. Margin components consist of initial margin and variation margin. Initial margin is calculated using the Value at Risk, Alternate Value at Risk, Factor Model, or Standard Portfolio Analysis of Risk (SPAN) methodology, depends on the product type. Margin value will be used as a subtraction to CM collateral value which will be the basis in the determination of CM trading limit.

4. Risk Calculation Testing

IDClear conducts testing of risk calculation results to ensure their validity and suitability for application. This testing is implemented in two ways: backtesting and stress testing. Backtesting is a statistical method that verifies actual losses against projected losses previously calculated with initial margin calculations. Meanwhile, stress testing is used to assess the adequacy of IDClear's financial resources in case of failure of CM with the highest risk (exposure) under extreme conditions.

Penanganan Kegagalan Penyelesaian Transaksi Bursa

Apabila AK tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban atas penyelesaian transaksi Bursa yang menyebabkan AK tersebut gagal bayar, KPEI secara seketika dan langsung akan mengambil alih tanggung jawab AK tersebut. KPEI akan menggunakan sumber keuangan dalam menanggulangi gagal bayar AK guna menjamin penyelesaian transaksi Bursa tetap terlaksana. Sumber keuangan yang dapat digunakan KPEI tertuang dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 dengan urutan sumber diatur sebagai berikut:



Jasa Pengelolaan Agunan

Pengelolaan agunan merupakan salah satu perangkat pengendalian risiko yang diterapkan KPEI untuk mengelola risiko kredit *counterparty* dari AK. KPEI mewajibkan AK untuk menyetorkan agunan dalam bentuk dana, efek dan/atau instrumen keuangan lainnya yang telah mendapat persetujuan dari KPEI sebagai jaminan atas kewajiban penyelesaian transaksi Bursa, baik untuk kepentingan AK maupun nasabahnya. Agunan AK kemudian dikelola oleh KPEI dan dapat digunakan sebagai perhitungan dasar batasan transaksi dan penyelesaian kegagalan AK kepada KPEI.

Agunan AK dikelola oleh KPEI dalam bentuk *online* dan *offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

- Agunan *Online* merupakan agunan yang dikuasakan ke KPEI berupa dana dan atau Efek yang diadministrasikan secara elektronik di KSEI, yang terdiri dari Uang Kas, Obligasi, Saham, dan *Exchange-Traded Fund* (ETF).
- Agunan *Offline* merupakan agunan yang dikuasakan ke KPEI berupa dana dan/atau instrumen keuangan lainnya yang diadministrasikan secara fisik oleh KPEI, yang terdiri dari Dana Minimum Kas, Saham BEI, Bank Garansi, Deposito, Unit Penyertaan Reksa Dana

Layanan Lainnya

Penyedia Sistem Penawaran Umum Perdana Elektronik (e-IPO) Berupa Penyelesaian dan Distribusi IPO

KPEI bersama dengan SRO lainnya ditunjuk oleh OJK sebagai Penyedia Sistem Penawaran Umum Perdana Elektronik (e-IPO). Peran KPEI dalam sistem e-IPO adalah melakukan proses verifikasi ketersediaan dana atas pesanan, penyelesaian dana pesanan dan distribusi efek atas kegiatan e-IPO. Untuk mendapatkan layanan e-IPO, AK wajib memiliki perikatan perjanjian dengan KPEI.

Handling of Failures in Securities Exchange Transaction Settlements

If a Clearing Member (CM) fails to fulfill part or all its obligations for the settlement of exchange transactions, resulting in a default, IDClear will immediately take over the responsibilities of the defaulting CM. IDClear will utilize financial resources to ensure that the settlement of exchange transactions continues to be executed. The financial resources that IDClear can utilize are stipulated in OJK Regulation No. 26/POJK.04/2014, with the order of resources as follows:

Collateral Management Services

Collateral management is one of the risk control tools implemented by IDClear to manage counterparty credit risk from Clearing Members (AK). IDClear requires CM to deposit collateral in the form of funds/cash, e-Securities, and/or other financial instruments approved by IDClear as collateral for the settlement obligations of exchange transactions, both for the benefit of CM and its clients. The collateral deposited by CM is then managed by IDClear and can be used as the basis for calculating transaction limits and settling CM's failures to IDClear.

CM's collateral is managed by IDClear in both online and offline forms, with the following mechanisms:

- Online Collateral refers to collateral authorized to IDClear in the form of funds and/or Securities that are electronically administered in KSEI, consisting of Cash, Bonds, Shares, and Exchange-Traded Funds (ETFs).
- Offline Collateral refers to collateral authorized to IDClear in the form of funds and/or other financial instruments that are physically administered by IDClear, consisting of Minimum Cash Funds, IDX Shares, Bank Guarantees, Deposits, and Mutual Fund Units.

Other Services

Electronic Initial Public Offering (e-IPO) System Provider in the form of IPO Settlement and Distribution

IDClear and other SRO were appointed by OJK as Provider of Electronic Initial Public Offering System (e-IPO). The role of IDClear in the e-IPO system is to verify fund availability for ordering, settlement of ordered fund, and distribution of securities for e-IPO activities. To procure e-IPO service, CM must have binding agreement with IDClear.

Dalam melakukan pemenuhan dana pesanan dan distribusi efek hingga level investor dilakukan melalui rekening jaminan (004) yang berada di KSEI. KPEI melakukan validasi kecukupan dana pesanan pada H-2 dari tanggal pencatatan atau di hari terakhir masa penawaran. Sedangkan validasi kecukupan dana penjaminan dan dana pesanan pasti untuk nasabah kelembagaan dilakukan pada H-1 dari tanggal pencatatan atau satu hari setelah akhir masa penawaran.

Untuk distribusi efek IPO, peran Biro Administrasi Efek (BAE) hanya mendistribusikan efek kepada Partisipan Admin (Penjamin Emisi yang ditunjuk). Kemudian, atas efek tersebut akan dilakukan mekanisme DVP (*delivery versus payment*) dengan KPEI sehingga KPEI yang melakukan distribusi efek ke rekening jaminan dan Sub Rekening Jaminan (004) hingga level investor. Kewajiban bagi emiten untuk menggunakan sistem e-IPO ini telah berlaku mulai 1 Januari 2021 dan para Partisipan wajib melakukan perubahan operasional yang dibutuhkan pada sistem *back office* masing-masing.

Penggunaan sistem e-IPO ini juga bertujuan menyediakan akses dan kesempatan yang lebih luas dan fair dalam memesan efek pada kegiatan IPO untuk seluruh masyarakat serta meningkatkan transparansi di pasar perdana.

Central Counterparty Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA)

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), berperan menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atas transaksi efek di pasar modal. Sejak 30 September 2024, KPEI memperluas cakupan layanannya sebagai *Central Counterparty* (CCP) untuk Sektor Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di Indonesia. CCP PUVA ini menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi, manajemen risiko, pengelolaan agunan, dan pengawasan terhadap pasar transaksi PUVA. KPEI juga mendapatkan status *Qualifying CCP* (QCCP) dari Bank Indonesia (BI), yang memperkuat posisi KPEI sebagai CCP PUVA.

Implementasi CCP PUVA merupakan wujud nyata komitmen Indonesia memodernisasi dan memperkuat infrastruktur pasar keuangan. CCP PUVA sebagai langkah transformasi signifikan KPEI untuk memperkuat perannya sebagai pilar penting dalam mendukung integrasi dan pendalaman pasar keuangan nasional.

Melalui CCP PUVA, ke depannya pasar keuangan akan lebih stabil dan aman sehingga membuka peluang untuk lebih banyak transaksi, baik domestik maupun internasional. KPEI siap memberikan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan manajemen agunan yang andal untuk mendukung implementasi mekanisme CCP dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Fulfilment of ordered fund and distribution of securities for investors are carried out through security account (004) in KSEI. IDClear shall validate ordered fund sufficiency on H-2 from the date of record or on the last day of the offering period. Meanwhile, validation of the sufficiency of guarantee funds and fixed ordered funds from Custodian Bank is carried out on H-1 from the date of record or after the last day of the offering period.

In terms of IPO securities distribution, Securities Administration Bureau (BAE)'s only role is to distribute securities to Participant Admin (the appointed underwriter). Then, DVP (*delivery versus payment*) mechanism with IDClear will be applied on the securities, so IDClear will be the one to distribute the securities to the security account and Sub-Security Account (004) up to the level of investor. Issuers are obliged to use this e-IPO system effective as of 1 January 2021, which means Participants are expected to prepare operational changes in their own back-office systems.

The use of e-IPO system also aims to provide broader and fairer access and opportunities for ordering securities in IPO activities for the entire public and to enhance transparency in the primary market.

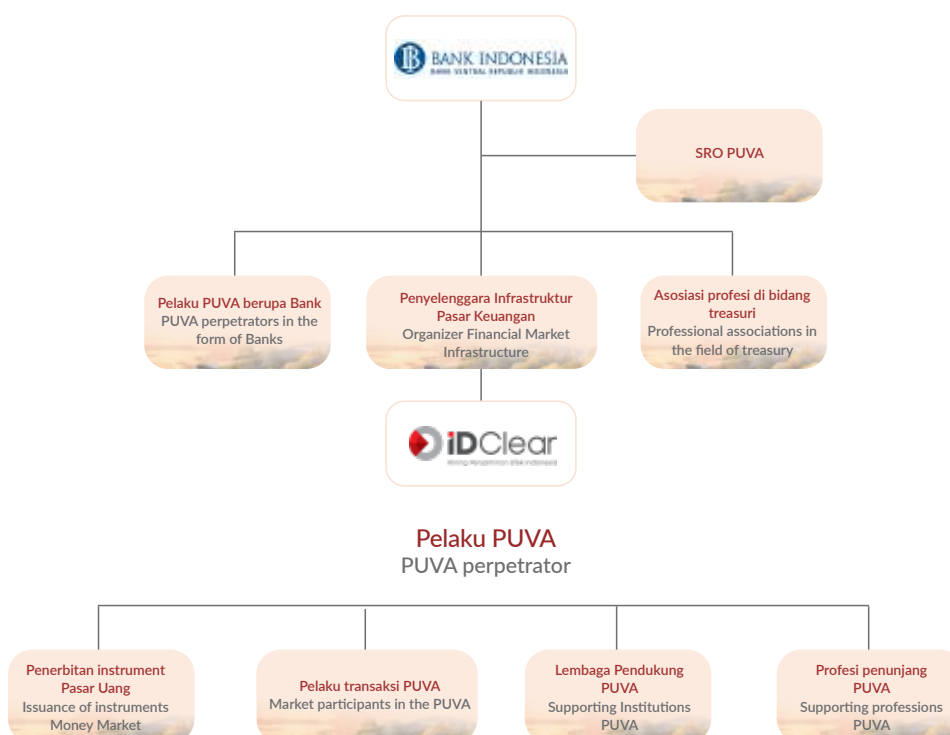
Central Counterparty for the Money Market and Foreign Exchange Market (CCP PUVA)

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) has long served its function as a Clearing and Guarantee Institution (LKP) for securities transactions in the capital market. Since September 30, 2024, IDClear has expanded its scope of services as a Central Counterparty (CCP) for the Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA) sector in Indonesia. CCP PUVA provides clearing and settlement guarantee services, risk management, collateral management, and market surveillance for PUVA transactions. IDClear has also been granted the status of a Qualifying CCP (QCCP) by Bank Indonesia (BI), further strengthening IDClear's position as a CCP for PUVA.

The implementation of CCP PUVA is a tangible manifestation of Indonesia's commitment to modernize and reinforce its financial market infrastructure. It marks a significant transformation in IDClear's journey to strengthen its role as a key pillar in supporting the integration and deepening of the national financial market.

Through CCP PUVA, the financial market is expected to become more stable and secure, creating opportunities for increased domestic and international transactions. IDClear is ready to deliver reliable clearing, guarantee, risk management, and collateral management services to support the implementation of the CCP mechanism and the development of the money market and foreign exchange market sector.

Struktur Pasar Uang & Pasar Valuta Asing Money Market & Foreign Exchange Market Structure



Member Interface

Member Interface (MI) adalah portal yang dapat diakses oleh AK untuk memperoleh informasi seluruh kegiatan pesanan transaksi hingga penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh AK maupun nasabah AK. Selain itu, MI juga menyediakan informasi tentang pengelolaan agunan dan penjaminan risiko.

Mobile Clearing and Guarantee System (m-CLEARs)

Mobile Clearing and Guarantee System (m-CLEARs) merupakan layanan berbasis aplikasi *mobile* untuk mengakses data dan informasi operasional KPEI yang dapat digunakan oleh AK melalui perangkat *smartphone* baik Android maupun iOS. Konsep m-CLEARs ini mulai diluncurkan pada 15 Juli 2020 dan merupakan revitalisasi dari konsep m-CLEARs sebelumnya yang berupa layanan pesan singkat (SMS) untuk ditujukan ke nomor telepon seluler AK pengguna yang telah terdaftar di KPEI.

m-CLEARs memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta sebagai media alternatif bagi AK dalam mengakses data operasional KPEI seperti data *Risk Charge Saham* dan AK, *Trading Limit*, *Collateral*, MKBD, *Lendable Pool Information*, *Borrowing Information*, Nilai Harga Penyelesaian untuk Kontrak Derivatif, dan informasi lainnya, di mana AK biasanya untuk mengakses data tersebut harus melalui beberapa aplikasi atau sistem KPEI yang telah tersedia.

Member Interface

Member Interface (MI) is a portal accessible by CM, which provides information on all transactional orders until settlement phase by CM and its customers. In addition, MI also provides information regarding collateral management and risk guarantee.

Mobile Clearing and Guarantee System (m-CLEARs)

The Mobile Clearing and Guarantee System (m-CLEARs) is a mobile application-based service designed to provide access to IDClear's operational data and information for CM. It can be accessed via smartphone devices running on both Android and iOS platforms. The m-CLEARs concept was launched on 15 July 2020, as an enhancement of the previous concept, which relied on Short Message Service (SMS) sent to the registered mobile phone numbers of CM users at IDClear.

m-CLEARs provides convenience, flexibility, and as an alternative media for CM in accessing IDClear operational data such as Risk Charge of Securities and CM, Trading Limit, Collateral, MKBD, Lendable Pool Information, Borrowing Information, Settlement Price Value for Derivative Contract, and more. Which CM usually has to access the data through several available IDClear applications or systems.

Portal AK dan Partisipan

Portal AK dan Partisipan merupakan sistem pengelolaan data keanggotaan yang dapat diakses oleh masing-masing AK dan Partisipan KPEI untuk mengajukan pendaftaran keanggotaan, melakukan pengkinian data keanggotaan secara mandiri, mengajukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi termasuk menyampaikan dokumen Laporan Keuangannya secara elektronik kepada KPEI.

Customer Care

KPEI menyediakan layanan satu pintu untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya. Layanan *Customer Care* berfungsi menyediakan informasi mengenai produk dan layanan KPEI, sebagai media untuk menjawab pertanyaan dan menerima masukan serta keluhan yang disampaikan oleh pengguna jasa dan pemangku kepentingan. Layanan *Customer Care* dapat diakses melalui media komunikasi sebagai berikut:

Telepon : +62-21 515 5115; 515 5125
WhatsApp : +62-816 115 5000
Hotline : 0800-100-KPEI (5734)5777
E-mail : customer.care@idclear.co.id

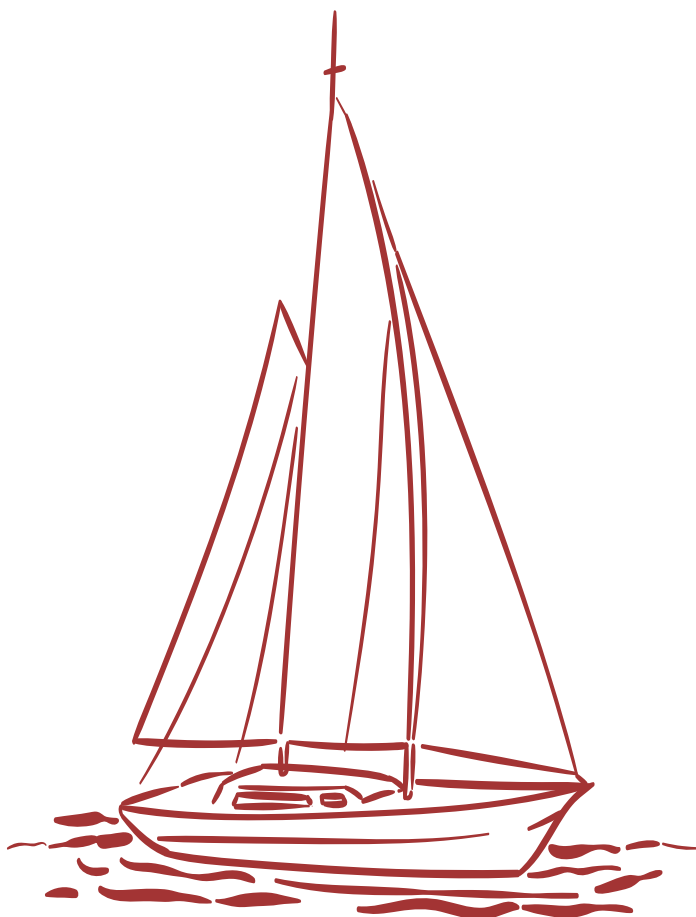
CM and Participant Portal

CM and Participant Portal is a membership data management system that can be accessed by each CM and IDCclear Participant to apply for membership registration, update membership data independently, propose training and socialization activities including submitting their Financial Report documents electronically to IDCclear.

Customer Care

IDCclear provides a one-stop service to respond to the needs of participants and other stakeholders. Customer Care is responsible for providing information regarding IDCclear's products and services, and acting as a medium to handle questions, inputs, and complaints from participants and stakeholders. Customer Care is accessible through these following channels:

Phone : +62-21 515 5115; 515 5125
WhatsApp : +62-816 115 5000
Hotline : 0800-100-KPEI (5734)5777
E-mail : customer.care@idclear.co.id





Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE

VISI DAN PENJELASAN VISI

VISION AND VISION EXPLANATION



Visi

Vision

Menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang andal untuk menyediakan layanan terbaik di pasar modal dan pasar keuangan lainnya di Indonesia.

To become the Clearing and Guarantee Institution reliable of providing the best services in capital markets and other financial markets in Indonesia.



Misi

Mission

Membuat pasar modal dan pasar keuangan Indonesia lebih menarik dengan menyediakan infrastruktur kliring dan penjaminan penyelesaian yang aman dan efisien serta memberikan layanan dengan nilai tambah lainnya.

To make Indonesian capital and financial market more attractive by providing safe and efficient clearing, guarantee and settlement infrastructure and delivering other value-added services.

REVIEW VISI DAN MISI

REVIEW OF VISION AND MISSION

Pernyataan Visi dan Misi KPEI memuat aspirasi Perseroan untuk dapat berkembang secara optimal sebagai perseroan Lembaga Kliring dan Penjaminan yang andal dengan menyediakan infrastruktur kliring dan penjaminan penyelesaian yang aman dan efisien untuk menyediakan layanan terbaik di pasar modal dan pasar keuangan lainnya di Indonesia dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Nasional.

IDClear's Vision and Mission reflect the Company's aspiration to optimally grow as a reliable Clearing and Guarantee Institution by providing secure and efficient clearing and settlement infrastructure, delivering the best services in the capital market and other financial markets in Indonesia, and contributing to the acceleration of national economic growth.

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian dan review terhadap visi dan misi Perseroan tersebut, dan menyatakan bahwa visi dan misi tersebut relevan untuk kondisi saat ini dan sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan ke depan.

In 2024, the Board of Commissioners and the Board of Directors conducted a study and review of the Company's Vision and Mission and concluded that the statements remain relevant to the current conditions and aligned with the challenges and opportunities facing the Company moving forward.



BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Culture

NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values

KPEI menetapkan nilai inti Perusahaan yang terdiri dari *Integrity, Prudence, Customer Focus, Fellowship, and Achievement of Excellence*. Nilai inti Perusahaan ini mendasari budaya kerja dan karakter KPEI sebagai lembaga kliring yang terpercaya, serta memberi arah dalam berperilaku dan pengambilan keputusan bagi manajemen dan seluruh karyawan KPEI.

IDClear has established its core corporate values, consisting of Integrity, Prudence, Customer Focus, Fellowship, and Achievement of Excellence. These core values form the foundation of IDClear's work culture and identity as a trusted clearing institution, providing direction for behavior and decision-making for both management and all employees of IDClear.



Integrity

KPEI senantiasa menjaga konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan, melakukan diskusi secara terbuka, mendukung keputusan yang telah ditetapkan, serta menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi. IDClear is always consistent in thoughts, words as well as deeds. Engages in open discussions, supports the decision that has been taken, and cultivates a high sense of belonging.



Prudence

KPEI mengharuskan semua pihak di lingkungan Perusahaan untuk mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan dan pengambilan keputusan serta menerapkan kaidah pengelolaan risiko yang baik dan benar. IDClear requires everyone in the Company to consider the outcome of every action and decision that they make and adopt the principles of risk management that are in line with best practices.



Customer Focus

KPEI senantiasa mengutamakan kepentingan atau kebutuhan pelanggan dan berupaya memberikan pelayanan dengan mutu terbaik kepada seluruh pelanggan, baik internal maupun eksternal. Fokus terhadap pelanggan merupakan sikap responsif, proaktif, berpandangan luas, dan siap membantu pihak yang membutuhkan. IDClear always places a strong emphasis on the needs and interests of customers, also exerts every effort to provide the best-quality service to all stakeholders, both internal and external. Customer focus reflects our collective conduct that is responsive, proactive, with broad perspectives and ready to lend a hand.



Fellowship

KPEI senantiasa menumbuhkan kerja sama tim yang erat, bersikap saling mendukung dan saling menghargai. IDClear continuously nurtures strong teamwork and is supportive and respectful of one another.



Achievement of Excellence

KPEI senantiasa berupaya memberi kontribusi yang maksimal, menjaga keseimbangan antara tujuan dan proses guna meraih hasil yang terbaik. IDClear constantly strives to contribute optimally, maintaining a balance between aims and means to produce the very best.

Brand KPEI

IDCLEAR BRAND



- 
Warna Merah | Red Color
 Ditempatkan bersusun dalam segitiga menggambarkan dinamika perjalanan KPEI yang stabil.
 Arranged in a stacked triangle, it represents the stable dynamics of IDClear's journey.
- 
Warna Abu-abu | Grey Color
 Menggambarkan profesionalitas, kemutakhiran, kredibilitas yang selalu dijadikan pedoman oleh KPEI dalam menjalankan perannya.
 Symbolizes professionalism, modernity, and credibility, which consistently guide IDClear in carrying out its role.

Makna Logo | Significance of Logo



Logogram IDClear mengambil bentuk lingkaran sebagai simbol proses transaksi yang berkelanjutan dan terpusat. Ini menceritakan bagaimana setiap proses yang berlangsung di dalam KPEI berjalan secara berkelanjutan dan tertata dengan baik, simbol segitiga berwarna merah mengadopsi bentuk sinar yang disebut clarity arrow dan dimaknai sesuai peran KPEI sebagai solusi transaksi.

The IDClear logo adopts a circular design, symbolizing the seamless and centralized transaction process. It represents the continuous and well-coordinated operations within IDClear. The red triangle, resembling a ray, is known as the clarity arrow, signifying IDClear's role as a transaction solution.

Pencantuman IDClear dalam logo KPEI merupakan kombinasi antara Indonesia dan Clear yang dirangkai menjadi satu kata untuk menjembatani kebutuhan nama yang bersifat lebih lugas, lebih global, mudah diingat serta penegasan terhadap peran utama KPEI yang menjalankan fungsi Kliring.

Kata "Clear" yang berdiri sendiri memberi legitimasi bahwa hadirnya IDClear mempunyai peran vital sebagai bagian dari SRO dalam penyelesaian transaksi serta pengelolaan risikonya guna menciptakan keamanan dan efisiensi di Pasar Modal dan Keuangan di Indonesia.



The incorporation of IDClear into IDClear logo merges "Indonesia" and "Clear" into a single word, serving as a bridge for a name that is direct, globally accessible, easy to recall, and underscores IDClear's primary role in clearing functions.

The standalone term "Clear" lends legitimacy, signifying that IDClear plays a crucial role as part of SRO in transaction settlement and risk management, fostering security and efficiency in Indonesia's capital and financial markets.

Ikon KPEI

IDC CLEAR'S ICON



Terinspirasi karapan sapi, sebuah pesta rakyat tradisional yang diadakan setiap tahun oleh suku Madura, penduduk asli Pulau Madura, Jawa Timur, Indonesia. KPEI menjadikan Karapan Pasar Modal sebagai ikon tradisional Perusahaan dengan mengganti kedua ekor sapi yang dikendalikan seorang *jockey* menjadi seekor banteng dan seekor beruang yang menggambarkan kondisi *bullish* dan *bearish* di pasar modal. Karapan Pasar Modal melambangkan peran KPEI sebagai *Central Counterparty* yang menjaga keseimbangan antara kedua kondisi pasar untuk pasar modal dan pasar keuangan Indonesia.

Inspired by Karapan Sapi, a folk festival held annually by the Madurese tribe, native to Madura Island, East Java, Indonesia. IDC Clear features 'Karapan Pasar Modal' as Company's traditional icon by replacing the two oxen controlled by a jockey with a bull and a bear to symbolize bullish and bearish times in capital market. 'Karapan Pasar Modal' symbolizes IDC Clear's role as a Central Counterparty which maintains a balance between the two market conditions for the Indonesia capital and financial markets.

Keanggotaan Pada Asosiasi

ASSOCIATION MEMBERSHIP

Hingga akhir tahun 2024, KPEI tercatat sebagai anggota aktif pada asosiasi/organisasi berikut:

As of the end of 2024, KPEI is registered as an active member of the following associations/organizations:

CCP GLOBAL

The Global Association of Central Counterparties (CCP Global)

ACG
ASIA-PACIFIC CSD GROUP

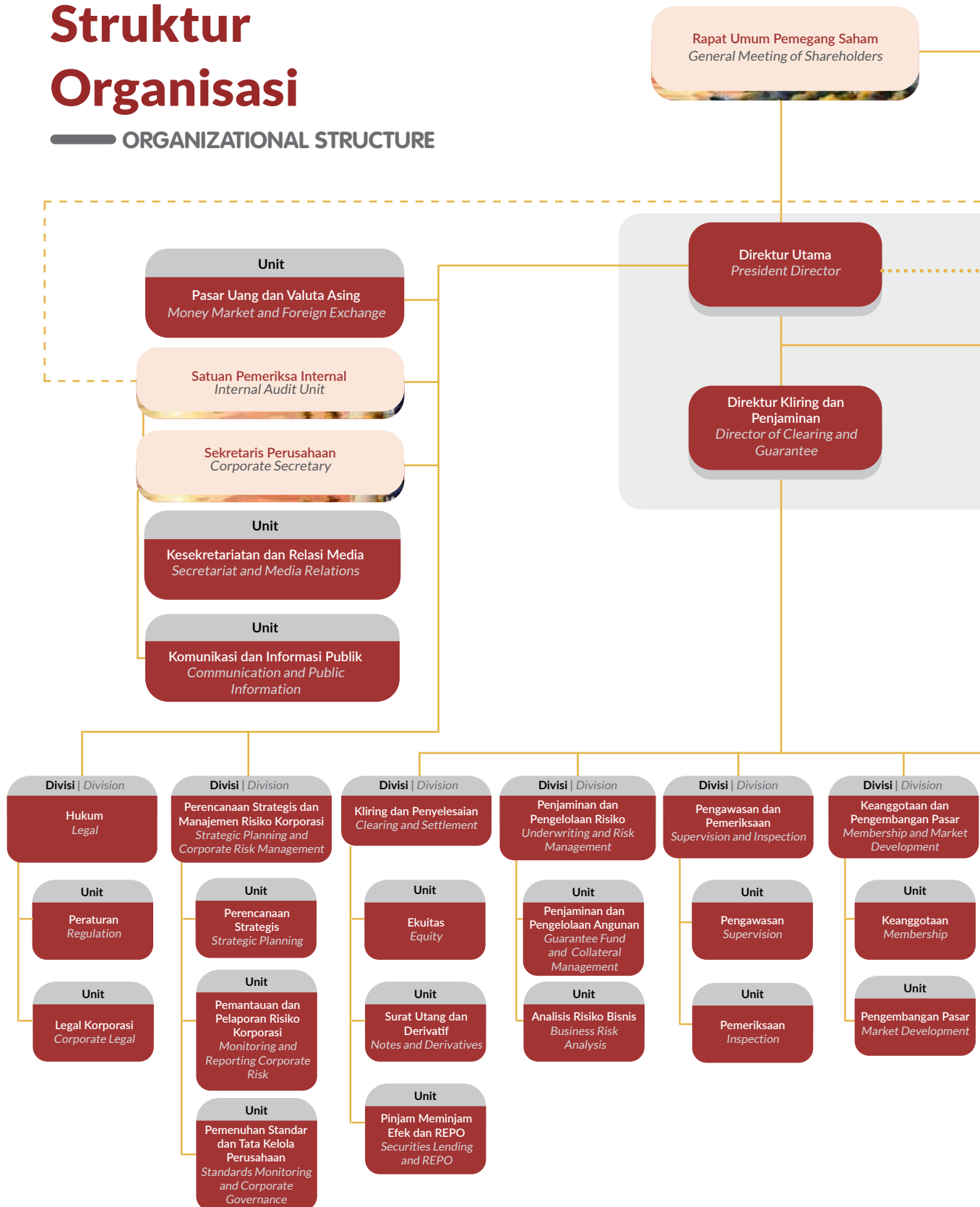
Asia Pacific Central Securities Depository Group (ACG)

PASLA
SUPPORTING GROWTH

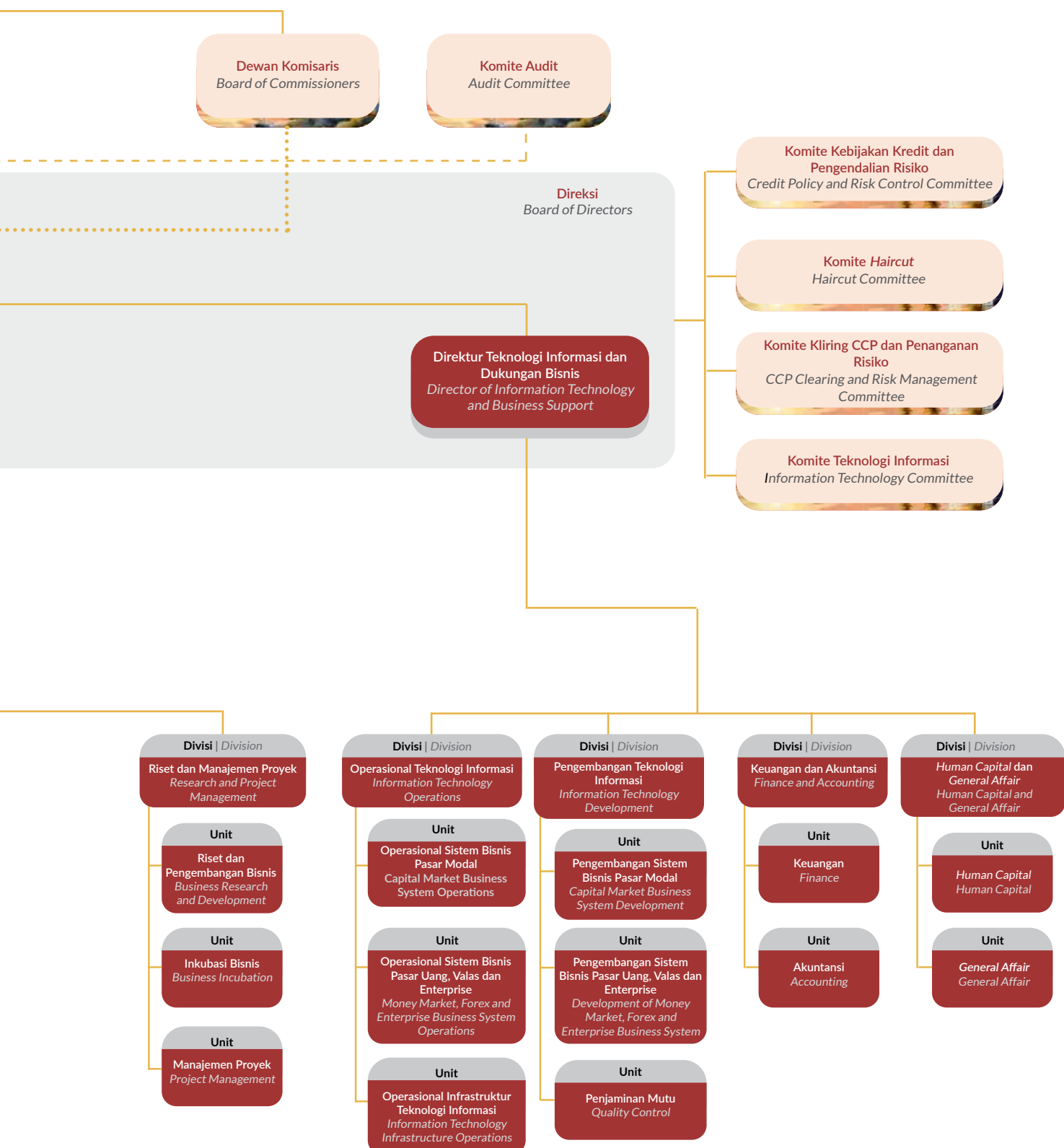
Pan Asia Securities Lending Association (PASLA)

Struktur Organisasi

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



Seiring dengan upaya Perusahaan dalam memperluas peran dan fungsinya, KPEI melakukan perubahan terhadap struktur organisasi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan peran KPEI dalam mendukung fungsi pengawasan terintegrasi di Pasar Modal, memperkuat layanan operasional KPEI di Pasar Modal serta Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), memperkuat aspek teknologi informasi yang mendukung pengembangan bisnis dan layanan KPEI dalam memberikan layanan yang terbaik (*operational excellence*), serta memperkuat pelaksanaan kegiatan pra operasional atau inkubasi bisnis dari produk yang telah dikembangkan melalui proses riset. Dengan mengadopsi struktur yang lebih fleksibel dan responsif, KPEI berkomitmen untuk memberikan layanan kliring, penjaminan, dan manajemen risiko yang lebih efektif dan efisien di Pasar Modal dan PUVA.



In line with the Company's efforts to expand its roles and functions, IDCclear has made changes to its organizational structure. This change aims to enhance IDCclear's role in supporting integrated supervision functions in the Capital Market, strengthen IDCclear's operational services in the Capital Market and the Money Market and Foreign Exchange (PUVA), reinforce the information technology aspect that supports business and service development in delivering the best services (operational excellence), as well as strengthen the implementation of pre-operational or business incubation activities for products developed through research processes. By adopting a more flexible and responsive structure, IDCclear is committed to delivering more effective and efficient clearing, guarantee, and risk management services in the Capital Market and PUVA.

Uriep Budhi Prasetyo

Komisaris
Commissioner

Ronald Waas

Komisaris
Commissioner

Hoesen

Komisaris Utama
President Commissioner



Iding Pardi

Direktur Utama
President Director

Umi Kulsum

Direktur Teknologi Informasi
dan Dukungan Bisnis
*Director of Information Technology
and Business Support*

Antonius Herman Azwar

Direktur Kliring dan Penjaminan
Director of Clearing and Guarantee



Profil Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

Hoesen

Komisaris Utama/President Commissioner

Masa Jabatan/Term of Office:

29 Mei 2023-saat ini/ May 29, 2023-present

Data Pribadi/Personal Data

Warga negara Indonesia/Indonesian citizen

Usia 59 tahun per 31 Desember 2024/ 59 years old as of December 31, 2024

Kelahiran Jakarta, 21 Februari 1966/ Born in Jakarta, February 21, 1966

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan/South Jakarta

Riwayat Pendidikan & Sertifikasi/Educational Background and Certifications

- Magister Manajemen, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2005
- Sarjana Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991
- Master of Management, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2005
- Bachelor of Agriculture, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991

Riwayat Jabatan & Dasar Hukum Pengangkatan/Position History and Legal Basis of Appointment

- Diangkat sebagai Komisaris Utama KPEI untuk periode 2023-2027 berdasarkan pernyataan Keputusan RUPS Tahunan KPEI No. 68 tanggal 29 Mei 2023
- Appointed as President Commissioner of IDCLEAR for the 2023-2027 period based on the Annual GMS Resolution No. 68 dated May 29, 2023

Rangkap Jabatan di tahun 2024/Concurrent Positions in 2024

- Komisaris PT Central Financial X
- Komisaris Independen PT Samudera Indonesia Tbk
- Komisaris Utama dan Independen PT Mandiri Sekuritas
- Komisaris Independen PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
- Commissioner of PT Central Financial X
- Independent Commissioner of PT Samudera Indonesia Tbk
- President Commissioner and Independent Commissioner of PT Mandiri Sekuritas
- Independent Commissioner of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Riwayat Pekerjaan/Professional Background

- Kepala Eksekutif Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK (2017-2022)
- Komisaris PT Danareksa Capital (2015-2017)
- Komisaris PT Danareksa Investment Management (2015-2017)
- Direktur PT Danareksa (Persero) (2015-2017)
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (2012-2015)
- Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2009-2012)
- Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2005-2009)
- Karyawan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (1993-2005)
- Executive Head of Capital Market concurrently Member of the Board of Commissioners of OJK (2017-2022)
- Commissioner of PT Danareksa Capital (2015-2017)
- Commissioner of PT Danareksa Investment Management (2015-2017)
- Director of PT Danareksa (Persero) (2015-2017)
- Director of Corporate Assessment at Indonesia Stock Exchange (2012-2015)
- President Director of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia/IDCclear (2009-2012)
- Director of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia/IDCclear (2005-2009)
- Employee of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia/IDCclear (1993-2005)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung dan tidak langsung dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama.

No affiliation both directly and indirectly with the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Main Shareholders.



Ronald Waas

Komisaris/Commissioner

Masa Jabatan/Term of Office:

29 Mei 2023-saat ini/ May 29, 2023-present

Data Pribadi/Personal Data

Warga negara Indonesia/Indonesian citizen

Usia 69 tahun per 31 Desember 2024/ 69 years old as of December 31, 2024

Kelahiran Tanjung Pinang, 29 November 1955/ Born in Tanjung Pinang, November 29, 1955

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan/South Jakarta

Riwayat Pendidikan & Sertifikasi/Educational Background and Certifications

- Master of International Affairs, School of International Affairs, Program in Economic Policy Management, Columbia University, New York, Amerika Serikat, 1995
- Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1980
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko, Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Lembaga Sertifikasi Profesi-Mitra Kalyana Sejahtera, 2019
- Sertifikasi Strategi Penerapan PSAK 74 tentang kontrak Asuransi (IFRS 17), PT Asuransi Bintang, 2019
- Sertifikasi Technical Accounting & Claims, AON, 2019
- Sertifikasi Comprehensive General Liability Insurance, Agustinus Gunawan, SH., ICAP., ANZIIF, 2019
- Sertifikasi Excellent Service in the New Normal, AAMAI, 2020
- Sertifikasi The New Insurance Landscape, AAUI dan AAMAI, 2020
- Sertifikasi Catastrophe Management in Insurance Industry, AAUI, 2021
- Master of International Affairs, School of International Affairs, Program in Economic Policy Management, Columbia University, New York, United States, 1995
- Bachelor of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering and Planning, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1980
- Risk Management Competency Certification, National Professional Certification Agency; Professional Certification Institute - Mitra Kalyana Sejahtera, 2019
- Certification in Strategy for the Implementation of PSAK 74 on Insurance Contracts (IFRS 17), PT Asuransi Bintang, 2019
- Technical Accounting & Claims Certification, AON, 2019
- Comprehensive General Liability Insurance Certification, Agustinus Gunawan, SH., ICAP., ANZIIF, 2019
- Certification in Excellent Service in the New Normal, AAMAI, 2020
- Certification in The New Insurance Landscape, AAUI and AAMAI, 2020
- Certification in Catastrophe Management in the Insurance Industry, AAUI, 2021

Riwayat Jabatan & Dasar Hukum Pengangkatan/Position History and Legal Basis of Appointment

- Diangkat sebagai Komisaris KPEI untuk periode 2023-2027 berdasarkan pernyataan Keputusan RUPS Tahunan KPEI No. 68 tanggal 29 Mei 2023
- Diangkat sebagai Komisaris Utama KPEI untuk periode 2020-2023 berdasarkan pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa KPEI No. 11 tanggal 10 Maret 2020
- Appointed as Commissioner of IDClear for the 2023-2027 period based on the Resolution of the Annual GMS No. 68 dated May 29, 2023
- Appointed as President Commissioner of IDClear for the 2020-2023 period based on the Resolution of the Annual GMS No. 11 dated March 10, 2020

Rangkap Jabatan di tahun 2024/Concurrent Positions in 2024

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
- Komisaris PT Kredit Biro Indonesia Jaya
- Komisaris PT Solusi Pasti Indonesia
- Komisaris Independen PT Asuransi Bintang Tbk
- Komisaris PT Mastersystem Infotama
- President Commissioner and Independent Commissioner of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
- Commissioner of PT Kredit Biro Indonesia Jaya
- Commissioner of PT Solusi Pasti Indonesia
- Independent Commissioner of PT Asuransi Bintang Tbk
- Commissioner of PT Mastersystem Infotama

Riwayat Pekerjaan/Professional Background

- Komisaris Utama PT Aplikasi Lintasarta (2017-2021)
- Anggota Dewan Komisiner (Ex-Officio), Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2016)
- Deputi Gubernur Bank Indonesia (2011-2016)
- Karyawan Bank Indonesia (1980-2011)
- President Commissioner of PT Aplikasi Lintasarta (2017-2021)
- Member of the Board of Commissioners (Ex-Officio), Indonesia Deposit Insurance Corporation (2013-2016)
- Deputy Governor of Bank Indonesia (2011-2016)
- Employee of Bank Indonesia (1980-2011)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung dan tidak langsung dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama.

No affiliation both directly and indirectly with the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Primary Shareholders.



Uriep Budhi Prasetyo

Komisaris/Commissioner

Masa Jabatan/Term of Office:

29 Mei 2023-saat ini/ May 29, 2023-present

Data Pribadi/Personal Data

Warga negara Indonesia/Indonesian citizen

Usia 63 tahun per 31 Desember 2024/63 years old as of December 31, 2024

Kelahiran Jakarta, 6 September 1961/Born in Jakarta, September 6, 1961

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan/South Jakarta

Riwayat Pendidikan & Sertifikasi/Educational Background and Certifications

- Master Administrasi Bisnis, College of Notre Dame, California, USA, 1992
- Sarjana Teknik Mesin, San Francisco State University, California, USA, 1988
- Master of Business Administration, College of Notre Dame, California, USA, 1992
- Bachelor of Mechanical Engineering, San Francisco State University, California, USA, 1988

Riwayat Jabatan & Dasar Hukum Pengangkatan/Position History and Legal Basis of Appointment

- Diangkat sebagai Komisaris Utama KPEI untuk periode 2023-2027 berdasarkan pernyataan Keputusan RUPS Tahunan KPEI No. 68 tanggal 29 Mei 2023
- Appointed as Commissioner of IDClear for the 2023-2027 period based on the Annual GMS Resolution No. 68 dated May 29, 2023

Rangkap Jabatan di tahun 2024/Concurrent Positions in 2024

- Komisaris Independen PT Mirae Asset Sekuritas
- Komisaris Independen PT Satu Visi Putra Tbk
- Komisaris Independen PT Dana Brata Luhur Tbk
- Independent Commissioner of PT Mirae Asset Sekuritas
- Independent Commissioner of PT Satu Visi Putra Tbk
- Independent Commissioner of PT Dana Brata Luhur Tbk

Riwayat Pekerjaan/Professional Background

- Direktur Utama, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2019-2023)
- Direktur Utama PT Danareksa Capital (2015-2019)
- Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015)
- Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2006-2009)
- Direktur Operasional PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas (2004-2009)
- Direktur PT Megatech Global Mitra Usaha (2002-2004)
- Direktur Bisnis dan Pengembangan PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas (2000-2002)
- Direktur PT Floreta Purwa Artha Sekuritas (1995-2000)
- Direktur PT BPR Cinere Artha (1993-1995)
- Bisnis Analis PT Tata Upadi Pratama, Jakarta (1993)
- Bisnis Analis PT Trikora Lloyd, Jakarta (1992)
- Asisten Manajer Imelco Trading Company, Inc., San Francisco, California, USA (1989-1992)
- President Director at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2019-2023)
- President Director at PT Danareksa Capital (2015-2019)
- Director of Transaction Monitoring and Compliance at Indonesia Stock Exchange (2009-2015)
- Commissioner at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2006-2009)
- Director of Operations at PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas (2004-2009)
- Director at PT Megatech Global Mitra Usaha (2002-2004)
- Director of Business and Development at PT Dhanawibawa Arthacemerlang Sekuritas (2000-2002)
- Director at PT Floreta Purwa Artha Sekuritas (1995-2000)
- Director at PT BPR Cinere Artha (1993-1995)
- Business Analyst at PT Tata Upadi Pratama, Jakarta (1993)
- Business Analyst at PT Trikora Lloyd, Jakarta (1992)
- Assistant Manager at Imelco Trading Company, Inc., San Francisco, California, USA (1989-1992)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung dan tidak langsung dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama.

No affiliation both directly and indirectly with the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Primary Shareholders.



Profil Direksi

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Iding Pardi

Direktur Utama/President Director

Masa Jabatan/Term of Office:

22 Juni 2022-saat ini/June 22, 2022-present

Data Pribadi/Personal Data

Warga negara Indonesia/Indonesian citizen

Usia 50 tahun per 31 Desember 2024/ 50 years old as of December 31, 2024

Kelahiran Majalengka, 25 Februari 1975/Born in Majalengka, February 25, 1975

Domisili/Domicile

Tangerang/Tangerang

Riwayat Pendidikan & Sertifikasi/Educational Background and Certifications

- Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Sarjana Administrasi Niaga, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998
- Sertifikasi sebagai Strategy Execution Professional (CSEP), 2011
- Sertifikasi Project Management Professional (PMP), 2016
- Master of Management, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006
- Bachelor of Commerce Administration, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998
- Certified on Strategy Execution Professional (CSEP), 2011
- Certified on Project Management Professional (PMP) Certification, 2016

Riwayat Jabatan & Dasar Hukum Pengangkatan/Position History and Legal Basis of Appointment

- Diangkat sebagai Direktur Utama KPEI untuk periode 2022-2026 berdasarkan pernyataan Keputusan RUPS Tahunan KPEI No. 39 tanggal 22 Juni 2022
Appointed as President Commissioner of IDCLEAR for the 2023-2027 period based on the Annual GMS Resolution No. 68 dated May 29, 2023
- Diperpanjang sebagai Direktur II KPEI untuk periode 2018-2022 berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPST KPEI No. 36 tanggal 21 Juni 2021
Extended as Director II of IDCLEAR for the period of 2018-2022 based on the Annual GMS Resolution of IDCLEAR No. 36 dated June 21, 2021
- Diangkat sebagai Direktur II KPEI untuk periode 2018-2021 berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPST KPEI No. 29 tanggal 22 Juni 2018
Appointed as Director II of IDCLEAR for the period of 2018-2021 based on the Annual GMS Resolution of IDCLEAR No. 29 dated June 22, 2018

Rangkap Jabatan di tahun 2024/Concurrent Positions in 2024

Tidak memiliki rangkap jabatan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasal 21 (6)
No concurrent positions, in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.04/2016 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Clearing and Guarantee Institutions, Article 21 paragraph (6)

Riwayat Pekerjaan/Professional Background

- Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Bisnis PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2013-2018)
- Kepala Unit Pengkajian dan Pengembangan Bisnis PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2005-2013)
- Staf Pemantauan Risiko PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (1999-2005)
- Head of Business Research and Development Division of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2013-2018)
- Head of Business Research and Development Unit of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2005-2013)
- Risk Monitoring Staff of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (1999-2005)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung dan tidak langsung dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama.
No affiliation both directly and indirectly with the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Primary Shareholders.



Antonius Herman Azwar

Direktur Kliring dan Penjaminan/Director of Clearing and Guarantee

Masa Jabatan/Term of Office:

22 Juni 2022-saat ini/June 22, 2022-present

.....

Data Pribadi/Personal Data

Warga negara Indonesia/Indonesian citizen

Usia 53 tahun per 31 Desember 2024/53 years old as of December 31, 2024

Kelahiran Jakarta, 2 Oktober 1971/Born in Jakarta, October 2, 1971

Domisili/Domicile

Jakarta Timur/East Jakarta

Riwayat Pendidikan & Sertifikasi/Educational Background and Certifications

- Magister Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2007
- Sarjana Ekonomi, STEKPI, Jakarta 1995
- Master of Law, Universitas Indonesia, Jakarta 2007
- Bachelor of Economics, STEKPI, Jakarta 1995

Riwayat Jabatan & Dasar Hukum Pengangkatan/Position History and Legal Basis of Appointment

- Diangkat sebagai Direktur I KPEI untuk periode 2022-2026 berdasarkan pernyataan Keputusan RUPS Tahunan KPEI No. 39 tanggal 22 Juni 2022
- Appointed as Director I of IDClear for the period of 2022-2026 based on the Annual GMS Resolution of IDClear No. 39, dated June 22, 2022

Rangkap Jabatan di tahun 2024/Concurrent Positions in 2024

Tidak memiliki rangkap jabatan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasal 21 (6)

No concurrent positions, in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.04/2016 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Clearing and Guarantee Institutions, Article 21 paragraph (6)

Riwayat Pekerjaan/Professional Background

- Kepala Divisi Hukum dan Keanggotaan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2017-2022)
- Kepala Divisi Kliring Penyelesaian dan Pinjam Meminjam Efek PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2008- 2017)
- Kepala Unit Pinjam Meminjam Efek & Repo PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (1997-2008)
- Senior Officer of Risk Management PT Kliring Depositori Efek Indonesia (1995-1997)
- Credit Analyst PT Bank Central Asia (1995)
- Head of Legal and Membership Division at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia/IDClear (2017-2022)
- Head of Clearing, Settlement, and Securities Borrowing and Lending Division at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia/IDClear (2008-2017)
- Head of Securities Borrowing and Lending & Repo Unit at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia/IDClear (1997-2008)
- Senior Officer of Risk Management at PT Kliring Depositori Efek Indonesia (1995-1997)
- Credit Analyst at PT Bank Central Asia (1995)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung dan tidak langsung dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama.

No affiliation both directly and indirectly with the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Primary Shareholders.



Umi Kulsum

Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis/Director of Information Technology and Business Support

Masa Jabatan/Term of Office:

22 Juni 2022-saat ini/June 22, 2022-present

Data Pribadi/Personal Data

Warga negara Indonesia/Indonesian citizen

Usia 49 tahun per 31 Desember 2024/49 years old as of December 31, 2024

Kelahiran Serang, 5 September 1975/Born in Serang, September 5, 1975

Domisili/Domicile

Jakarta Barat/West Jakarta

Riwayat Pendidikan & Sertifikasi/Educational Background and Certifications

- Magister Manajemen, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2007
- Sarjana Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1997
- Master of Management, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2007
- Bachelor of Chemical Engineering, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1997

Riwayat Jabatan & Dasar Hukum Pengangkatan/Position History and Legal Basis of Appointment

- Diangkat sebagai Direktur II KPEI untuk periode 2022-2026 berdasarkan pernyataan Keputusan RUPS Tahunan KPEI No. 39 tanggal 22 Juni 2022
- Diperpanjang sebagai Direktur I KPEI untuk periode 2018-2022 berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPST KPEI No. 36 tanggal 21 Juni 2021
- Diangkat sebagai Direktur I KPEI untuk periode 2018-2021 berdasarkan Keputusan di Luar RUPS tanggal 16 Agustus 2018, dan pengesahannya berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 6 September 2018
- Appointed as Director II of IDClear for the period of 2022-2026 based on the Annual GMS Resolution of IDClear No. 39 dated June 22, 2022
- Extended as Director I of IDClear for the period of 2018-2022 based on the Annual GMS Resolution of IDClear No. 36 dated June 21, 2021
- Appointed as Director I of IDClear for the period of 2018-2021 based on the GMS Circular Resolution dated August 16, 2018, and ratified based on the Notary Deed No. 16 dated September 6, 2018

Rangkap Jabatan di tahun 2024/Concurrent Positions in 2024

Tidak memiliki rangkap jabatan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasal 21 (6) No concurrent positions, in compliance with Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.04/2016 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Clearing and Guarantee Institutions, Article 21 paragraph (6)

Riwayat Pekerjaan/Professional Background

- Komisaris Utama PT Indonesian Capital Market Electronic Library (2015-2018)
- Kepala Divisi Pengembangan Calon Emiten PT Bursa Efek Indonesia (2015-2018)
- Kepala Divisi Pencatatan/Penilaian Perusahaan Group 2 PT Bursa Efek Indonesia (2014-2015)
- Kepala Divisi Pencatatan/Penilaian Perusahaan Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia (2008-2014)
- Kepala Divisi Pencatatan PT Bursa Efek Surabaya (2001-2007)
- President Commissioner at PT Indonesian Capital Market Electronic Library (2015-2018)
- Head of Potential Issuer Development Division at Indonesia Stock Exchange (2015-2018)
- Head of Listing Division - Group 2 at Indonesia Stock Exchange (2014-2015)
- Head of Listing Division - Sector Service at Indonesia Stock Exchange (2008-2014)
- Head of Listing Division at Surabaya Stock Exchange (2001-2007)

Hubungan Afiliasi/Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung dan tidak langsung dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama. No affiliation both directly and indirectly with the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Primary Shareholders.



Dari kiri ke kanan
From left to right

1. Lisda Rumondang Sitohang

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

2. Rachmadewi Sjahesti

Kepala Satuan Pemeriksa Internal
Head of Internal Audit

3. Abdul Hadie

Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan
Manajemen Risiko Korporasi
Head of Strategic Planning and Corporate Risk
Management Division

4. Reynant Hadi

Kepala Divisi Hukum
Head of Legal Division

5. Ari Trisianto

Kepala Divisi Kliring dan Penyelesaian
Head of Clearing and Settlement Division

6. Natalina Hutapea

Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko
Head of Risk Guarantee and Management Division



7. Listyarini Hikmaningrum

Kepala Divisi Keanggotaan dan Pengembangan Pasar
Head of Membership and Market Development Division

8. Jerri Parulian

Kepala Divisi Riset dan Manajemen Proyek
Head of Research and Project Management
Division

9. Galuh Dian Maulana

Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi
Head of Information Technology Operations
Division

10. Ranti Kusuma Arini

Kepala Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan
Head of Monitoring and Examination Division

11. Khairil Anwar

Kepala Divisi Pengembangan Teknologi Informasi
Head of IT Development Division

12. Kristina Ernawati

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Finance and Accounting Division

13. Yossy Oktoviany

Kepala Divisi Human Capital dan General Affair
Head of Human Capital and General Affair
Division



Komite-Komite

COMMITTEES

Komite Audit Audit Committee

Nama Name	Posisi Role	Jabatan di Perusahaan Position in the Company
Ronald Waas	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner
Uriep Budhi Prasetyo	Anggota Member	Komisaris Commissioner
Arini Imamawati	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party
Arif M. Prawirawinata	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party

Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko Credit Policy and Risk Management Committee

Nama Name	Perusahaan Company
Andre Tjahjauljo	PT UBS Sekuritas Indonesia
Theodora V.N. Manik	PT Mandiri Sekuritas
Suriadharma Ibrahim	PT Samuel Sekuritas Indonesia
Hendra Hermawan	PT BRI Danareksa Sekuritas
Thomas Nugroho	PT RHB Sekuritas Indonesia

Komite Haircut Haircut Committee

Nama Name	Perusahaan Company
Kristian S. Manullang	PT Bursa Efek Indonesia
Irvan Susandy	PT Bursa Efek Indonesia
Antonius Herman Azwar	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Umi Kulsum	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Egy Essiqy	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Betty Goenawan	PT OCBC Sekuritas Indonesia
Philmon Samuel Tanuri	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Alex Widi Kristiono	PT Mandiri Sekuritas
Wientoro Prasetyo	PT Lotus Andalan Sekuritas
Changkun Shin	PT Kiwoom Sekuritas Indonesia
Marsangap P. Tamba	Profesional/Praktisi

Komite Investasi
Investment Committee

Nama Name	Perusahaan Company
Iding Pardi	Direktur Utama President Director
Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee
Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support
Kristina Ernawati	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Head of Finance and Accounting Division
Natalina Hutapea	Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko Head of Risk Guarantee and Management Division

Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko
CCP Clearing and Risk Management Committee

Nama Name	Perusahaan Company
Iding Pardi	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Rayendra Minarsa Goenawan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bily Arkan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Itang Rusdinar	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Daniel Edison Hutapea	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Benny Tresanto	PT Bank Permata Tbk
Satyo Haryo Wibisono	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Irwan Santoso	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Radiman Ali Rohim	PT Bank Central Asia Tbk



Informasi Sumber Daya Manusia

HUMAN RESOURCE INFORMATION

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan Perseroan mencapai 157 orang, mengalami peningkatan sebesar 9,5% jika dibandingkan dengan jumlah karyawan per 31 Desember 2023 yaitu 142 orang.

HUMAN RESOURCES PROFILE

As of December 31, 2024, the number of the Company's employees reached 157, representing an increase of 9.5% compared to the number of employees as of December 31, 2023, which was 142.

Tabel Demografi Karyawan KPEI 2023-2024
Table of IDClear's Employee Demographics 2023-2024

Berdasarkan Categorized by	Keterangan Description	2024			2023		
		Wanita Female	Pria Male	Total	Wanita Female	Pria Male	Total
Pendidikan Education	S2/Master Degree	18	28	46	17	28	45
	S1/Bachelor Degree	52	54	106	48	42	90
	D3/Diploma	-	1	1	2	1	3
	SMA/High School	-	4	4	-	4	4
Tingkatan Position Level	Kepala Divisi dan Setara/ Division Heads and Equivalent	6	6	12	5	8	13
	PIC Kepala Divisi/PIC Division Heads	2	-	22	-	-	-
	Kepala Unit/Unit Heads	8	16	24	11	15	26
	PIC Kepala Unit/PIC Unit Heads	1	5	6	-	-	-
	Spesialis dan Setara/Specialists and Equivalent	1	1	2	1	2	3
	Pemeriksa Senior/Senior Audit	-	1	1	-	1	1
	Staf/Staff	51	56	107	50	46	96
	Staf – General Support/Staff – General Support	-	3	3	-	3	3
Kelompok Usia Age Group	> 50 tahun/years old	7	10	17	6	11	17
	46-50 tahun/years old	2	2	4	5	4	9
	41-45 tahun/years old	5	10	15	4	8	12
	36-40 tahun/years old	5	11	16	4	11	15
	31-35 tahun/years old	25	21	46	24	18	42
	26-30 tahun/years old	18	25	43	19	16	35
	17-25 tahun/years old	8	8	16	5	7	12
Status Tenaga Kerja Employment Status	Karyawan Tetap/Permanent Employee	70	87	157	67	75	142
	Tenaga Outsource/Outsource Employee	7	6	13	6	7	13

KESETARAAN SUMBER DAYA MANUSIA

KPEI menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan KPEI dalam mengembangkan diri dan potensi, maupun mendapatkan promosi, dengan mengacu pada ketentuan dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.

EQUALITY IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

IDClear ensures equal opportunities for all IDClear employees to develop themselves and their potential, as well as to receive promotions, in accordance with the provisions and criteria stipulated in the Company Regulations and applicable laws and regulations

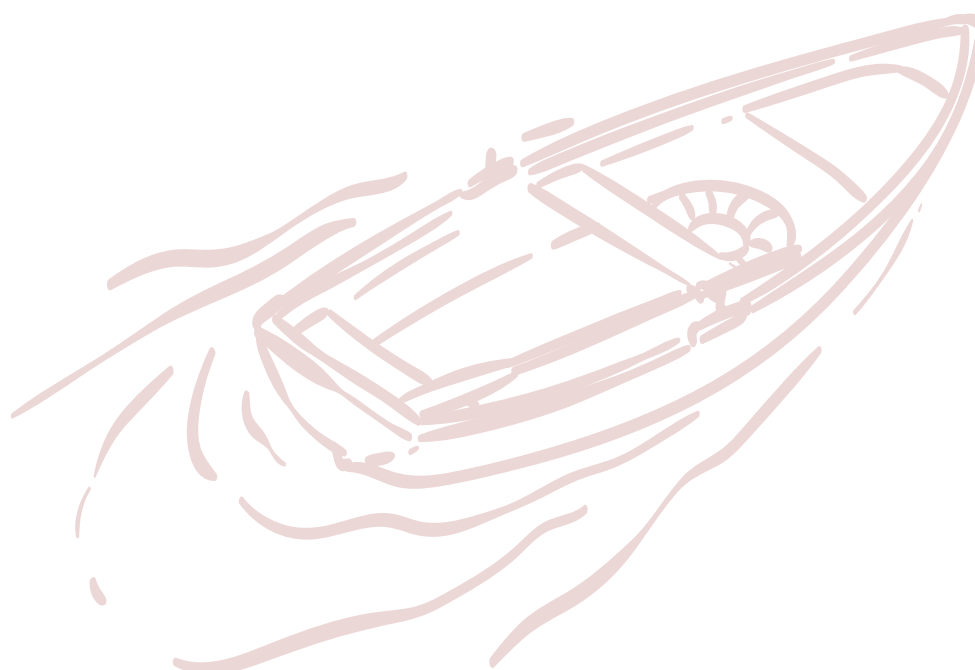
KPEI berkomitmen untuk senantiasa mendukung dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kompetensi karyawan dari seluruh tingkatan/jabatan dalam organisasi, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, Berikut data pelaksanaan program pengembangan SDM di KPEI tahun 2024.

IDClear is committed to always support and facilitate the development and improvement of employee competencies from all levels/positions in the organization, through various education and training programs, following the data on the implementation of HR development programs at IDClear in 2024.

Pengembangan SDM Tahun 2024 HR Development in 2024	Jumlah Seluruh Pelatihan Number of Trainings	Jumlah Peserta (orang) Number of Participants (person)	Jumlah Jam Pelatihan (jam) Number of Training Duration (hours)	Jumlah Pelatihan Terkait RKABN Number of RKABN Trainings
Jenjang Jabatan Positional Rank				
Direksi Board of Directors	-	-	-	-
Kepala Divisi dan Setara Division Heads and Equivalent	14	29	355	2
Kepala Unit Unit Heads	23	77	1011	2
Spesialis dan Setara Specialists and Equivalents	8	15	284	2
Staf Staff	56	291	3942	2
Total	101	412	5592	8

Untuk tahun buku 2024 Perusahaan mengalokasikan anggaran biaya pengembangan dan peningkatan kompetensi organisasi sebesar Rp6.020.000.000 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.888.725.493.

For the 2024 financial year, the Company allocated a budget of Rp6,020,000,000 for organizational development and competency enhancement, with actual spending as of December 31, 2024, amounting to Rp 5,888,725,493.



Informasi Pemegang Saham

SHAREHOLDER INFORMATION

PT Bursa Efek Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas KPEI dengan kepemilikan sebesar 88,89%, diikuti Bank Indonesia sebesar 2,22%, dan 8 (delapan) Bank masing-masing sebesar 1,11% dengan rincian sebagai berikut:

PT Bursa Efek Indonesia/IDX is the majority shareholder of IDClear with an ownership of 88.89%, followed by Bank Indonesia with 2.22%, and 8 (eight) banks each holding 1.11%, with the following breakdown:

Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Total Modal Disetor Total Paid-in Capital	Presentase Percentage
PT Bursa Efek Indonesia	200.000	1.600.000.000.000	88,89%
Bank Indonesia	5.000	40.000.000.000	2,22%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
PT Bank Central Asia Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
PT Bank Permata Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.500	20.000.000.000	1,11%
Total	225.000	1.800.000.000.000	100%

Informasi Persentase Kepemilikan Langsung Maupun Tidak Langsung atas Saham KPEI oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada Awal dan Akhir Tahun Buku

INFORMATION ON DIRECT AND INDIRECT SHAREHOLDING PERCENTAGES IN IDCLEAR SHARES BY THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS AT THE BEGINNING AND END OF THE FINANCIAL YEAR

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat kepemilikan saham KPEI oleh Direksi dan Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung.

As of December 31, 2024, there was no share ownership in the Company by the Board of Directors and the Board of Commissioners, either directly or indirectly.

Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)

Indonesia Central Securities Depository (KSEI)



Alamat dan Kontak Address and Contact	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 5 Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 5th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon/ Phone: +62-21 515 2855 Faksimili/ Facsimile: +62-21 5299 1199 Bebas Pulsa/ Toll Free: 0800-186-5734 E-mail : helpdesk@ksei.co.id Situs Web/ Website : www.ksei.co.id
Kepemilikan Saham Shares Ownership	12,50%
Bidang Usaha Core Business	Self-Regulatory Organization (SRO) yang berperan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia SRO with the role as Securities Depository and Settlement Institution in Indonesia Capital Market
Kegiatan Usaha Business Activity	Menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek Conducting depository and settlement for securities transaction
Status Operasi Operational Status	Telah beroperasi sejak 11 November 1998 Operating since November 11, 1998

PT PENILAI HARGA EFEK INDONESIA (PHEI)

Indonesia Securities Pricing Corporation



Alamat dan Kontak Address and Contact	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai Dasar Indonesia Stock Exchange Building, Tower II Ground Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon/ Phone: +62-21 515 5620 Faksimili/ Facsimile: +62-21 515 5026 E-mail: enquiries@phei.co.id Situs Web/Website: www.phei.co.id
Kepemilikan Saham Shares Ownership	33,33%
Bidang Usaha Core Business	Lembaga Penilaian Harga Efek di pasar modal Indonesia Securities Pricing Agency in the Indonesian capital market
Kegiatan Usaha Business Activity	Melakukan penilaian atas efek, utang, sukuk, dan surat berharga lainnya, dengan cara yang objektif, kredibel, independen, dan transparan Assessment of securities, bonds, sukuk, and other valuable notes in objective, credible, independent, and transparent manner
Status Operasi Operational Status	Telah mendapat izin usaha sejak 10 Agustus 2009 Has obtained business license since August 10, 2009

PT INDONESIA CAPITAL MARKET ELECTRONIC LIBRARY (TICMI)

PT Indonesian Capital Market Electronic Library (TICMI)



Alamat dan Kontak Address and Contact	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 1 Indonesia Stock Exchange Building, Tower II 1st Floor Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/ Phone: +62-21 515 2318 Faksimili/ Facsimile: +62-21 515 2319 Bebas Pulsa/ Toll Free: 0800-100-9000 E-mail: info@ticmi.co.id Situs Web/ Website: www.ticmi.co.id
Kepemilikan Saham Shares Ownership	33,33%
Bidang Usaha Core Business	Pusat Referensi, Edukasi, dan Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia Center for Reference, Education, and Certification of the Indonesian Capital Market Profession
Kegiatan Usaha Business Activity	• Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi profesi • Menyediakan informasi pasar modal Indonesia, referensi pasar modal Indonesia • Memberikan layanan contact center untuk induk perusahaan, serta menyelenggarakan event untuk induk perusahaan dan anak perusahaan SRO • Organizing education and training, professional certification • Providing Indonesian capital market information, Indonesian capital market references • Providing contact center services for the parent company, as well as organizing events for the parent company and SRO subsidiaries
Status Operasi Operational Status	Telah beroperasi sejak 2011 Operating since 2011.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)

Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)



Alamat dan Kontak Address and Contact	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai Dasar Indonesia Stock Exchange Building, Tower II Ground Floor Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/ Phone: +62-21 515 5553 Faksimili/ Facsimile: +62-21 515 5556 E-mail: helpdesk@indonesiasipf.co.id Situs Web/ Website: www.indonesiasipf.co.id
Kepemilikan Saham Shares Ownership	33,33%
Bidang Usaha Core Business	Penyelenggara Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) di pasar modal Indonesia Fund organizer for securities investor protection program in Indonesia capital market
Kegiatan Usaha Business Activity	Mengelola dana proteksi pemodal dalam industri pasar modal Indonesia Managing securities investor protection funds in Indonesia capital market
Status Operasi Operational Status	Telah beroperasi sejak 7 Desember 2012 Operating since December 7, 2012

PT PENDANAAN EFEK INDONESIA (PEI)

Indonesia Securities Fund



Alamat dan Kontak Address and Contact	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lantai 3 Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 3rd Floor Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/ Phone: +6221 515 2277 Faksimili/ Facsimile: +6221 515 2747 E-mail: corsec@pei.co.id Situs Web/ Website: www.pei.co.id
Kepemilikan Saham Shares Ownership	29,97%
Bidang Usaha Core Business	Pendanaan Efek Securities Funding
Kegiatan Usaha Business Activity	Menyelenggarakan pendanaan terkait dengan penerbitan efek, distribusi dan semua transaksi keuangan yang melibatkan efek di pasar modal Indonesia Organizing of funding for issuance and distribution of securities, as well as other securities based financial transactions in Indonesian capital market
Status Operasi Operational Status	Telah mendapatkan izin usaha dari OJK pada 5 April 2019 Obtained a business license from OJK on April 5, 2019

PT IDX SOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI

PT IDX Solusi Teknologi Informasi



Alamat dan Kontak Address and Contact	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 3 Indonesia Stock Exchange Building, Tower II 3rd Floor Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/ Phone: +62-21 515 2266 E-mail: contact@idxsti.co.id Situs Web/ Website: www.idxsti.co.id
Kepemilikan Saham Shares Ownership	33,33%
Bidang Usaha Core Business	Jasa Solusi Teknologi Informasi untuk industri pasar modal dan keuangan Information Technology Solution Service for capital market and financial industry
Kegiatan Usaha Business Activity	Menyediakan barang dan jasa teknologi informasi dalam menunjang kegiatan Bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta pelaku di industri pasar modal dan industri lainnya yang relevan Providing good and service of technology information in supporting stock exchange activity, clearing and guarantee institution, securities depository and settlement institution, and other relevant actors in capital market industry
Status Operasi Operational Status	Telah beroperasi sejak 8 November 2018 Operating since November 8, 2018

PT TIVI BURSA INDONESIA (IDX CHANNEL)

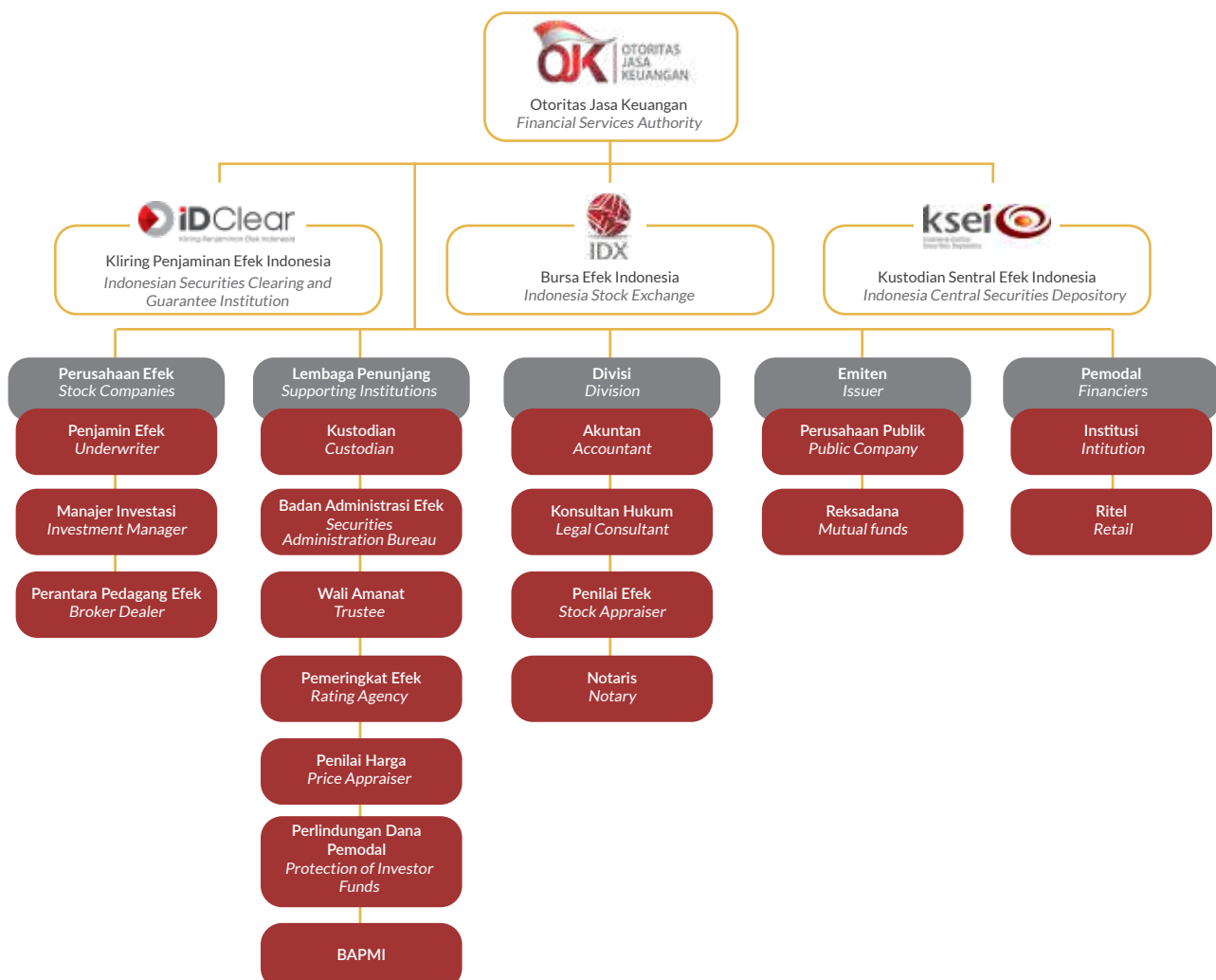
PT Tivi Bursa Indonesia (IDX Channel)



Alamat dan Kontak Address and Contact	Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II Lantai 1 Indonesia Stock Exchange Building, Tower II 1st Floor Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Indonesia Telepon/ Phone: +62-21 515 0515 (ext.7741), +62-21 515 5547 E-mail: redaksi@idxchannel.com Situs Web/ Website: www.idxchannel.com
Kepemilikan Saham Shares Ownership	15,00%
Bidang Usaha Core Business	Penyiaran Televisi Television broadcasting
Kegiatan Usaha Business Activity	Memproduksi materi program siaran saluran televisi yang khusus menyiarkan acara bertemakan pasar modal Indonesia dan Bursa Efek Indonesia Producing television program specifically broadcast program of Indonesia Capital market and IDX activities
Status Operasi Operational Status	Telah beroperasi sejak 8 November 2015 Operating since November 8, 2015

Struktur Pasar Modal Indonesia

INDONESIA CAPITAL MARKET STRUCTURE



Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTING FIRM (KAP)

Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Daniel Setiadi Handaja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008) Daniel Setiadi Handaja, CPA (Public Accountant Registered No. AP.1008)
Nama Kantor Akuntan Publik Name of Public Accounting Firm	Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited Purwantono, Sungkoro & Surja, member firms of Ernst & Young (EY) Global Limited
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
Jasa Audit Audit Services	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan & Laporan Keuangan Dana Jaminan Audit Services for Corporate Financial Statements & Guarantee Fund Financial Statements
Periode Penugasan Assignment Period	1 Juli 2024-25 Maret 2025 July 1, 2024-March 25, 2025
Fee Jasa Audit Audit Service Fee	Biaya jasa audit Laporan Keuangan KPEI sebesar Rp587.092.512 dan biaya jasa audit Laporan Keuangan Dana Jaminan sebesar Rp142.984.332, untuk pemeriksaan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 Audit service fee for IDCclear's Financial Statements was Rp587,092,512 and the audit service fee for the Guarantee Fund's Financial Statements was Rp142,984,332, for the audit of the financial year ending December 31, 2024.

Lembaga dan Profesi Penunjang

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

KONSULTAN HUKUM

Nama Lembaga Institution Name	Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (Konsultan Hukum ABNR) Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR Counsellors at Law)
Alamat Address	Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Graha CIMB Niaga, 24th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
Nama Lembaga Institution Name	Soemarjono Soemarsono & Rekan Soemarjono Soemarsono & Partner
Alamat Address	Jalan Sultan Agung No. 62 Setiabudi Jakarta Selatan 12970 Jalan Sultan Agung No. 62 Setiabudi, South Jakarta 12970

NOTARIS

Nama Lembaga Institution Name	Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Alamat Address	Jl. Suryo No. 54, RT.1/RW.4, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180 Jl. Suryo No. 54, RT.1/RW.4, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, South Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180
Nama Lembaga Institution Name	Notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih S.H., M.Kn Notary Titik Krisna Murti Wikaningsih, S.H., M.Kn
Alamat Address	Jl. Suryo No.54, RT.1/RW.4, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180 Jl. Suryo No.54, RT.1/RW.4, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180

Sertifikasi

CERTIFICATIONS

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2024 Valid Certifications in 2024



Nama Sertifikasi Certification Name	: ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
Ruang Lingkup Sertifikasi Certification Scope	: Sistem Manajemen Mutu Quality Management System
Deskripsi Singkat Brief Description	: Standar sistem manajemen mutu yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dan stakeholder terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan hukum yang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan. A quality management system standard designed to help companies ensure that customer and stakeholder needs are met in accordance with laws and regulations and legal requirements related to the products or services provided.
Lembaga yang memberikan Issuing Institution	: British Standards Institution (BSI) British Standards Institution (BSI)
Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period	: 29 Sep 2024 s.d. 28 Sep 2027(3 Tahun) September 29, 2024 – September 28, 2027 (3 years)

Nama Sertifikasi Certification Name	: ISO 27001:2022 ISO 27001:2022
Ruang Lingkup Sertifikasi Certification Scope	: Sistem Manajemen Keamanan Informasi Information Security Management System
Deskripsi Singkat Brief Description	: Standar internasional untuk pengelolaan risiko keamanan informasi yang efektif serta perlindungan informasi yang dikelola oleh perusahaan. An international standard for the effective management of information security risks and the protection of information managed by the company.
Lembaga yang memberikan Issuing Institution	: British Standards Institution (BSI) British Standards Institution (BSI)
Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period	: 19 Sep 2022 s.d. 18 Sep 2025 (3 Tahun) September 19, 2022 – September 18, 2025 (3 years)



Nama Sertifikasi Certification Name	: ISO 22301:2019 ISO 22301:2019
Ruang Lingkup Sertifikasi Certification Scope	: Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha Business Continuity Management System
Deskripsi Singkat Brief Description	: Standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk penerapan Business Continuity Management System (BCMS) An international standard that sets requirements for the implementation of a Business Continuity Management System (BCMS).
Lembaga yang memberikan Issuing Institution	: British Standards Institution (BSI) British Standards Institution (BSI)
Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period	: 29 Sep 2024 s.d. 28 Sep 2027 (3 Tahun) September 29, 2024 – September 28, 2027 (3 years)

Nama Sertifikasi Certification Name	: ISO 37001:2016 ISO 37001:2016
Ruang Lingkup Sertifikasi Certification Scope	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System
Deskripsi Singkat Brief Description	: Standar yang dirancang untuk mencegah praktik suap dalam suatu organisasi. A standard designed to prevent bribery practices within an organization.
Lembaga yang memberikan Issuing Institution	: British Standards Institution (BSI) British Standards Institution (BSI)
Masa Berlaku Sertifikat Certificate Validity Period	: 27 Des 2024 s.d. 26 Des 2027 (3 Tahun) December 27, 2024 – December 26, 2027 (3 years)



Recognition yang Diperoleh di Tahun 2024 Recognitions Received in 2024

 DEPUTI GUBERNUR SENIOR No. 30 / DGS-07/2024 Jakarta, September 2024 Kepada Yth, Bapak/Ibu Pejabat Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Gedung Kliring Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5 Jln. Jendral Sudirman Kavling 52-53 (KPEI) Perihal: <u>Penetapan Status Qualifying Central Counterparty (QCCP) kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)</u> Menunjuk awal Surat Keputusan Nomor KPEI-1102/2024 tanggal 26 September 2024 perihal "Penunjukan dan Penetapan Penetapan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai QCCP dari Bank Indonesia", apabila telah lengkap telah KPEI selaku Central Counterparty (CCP) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing telah memenuhi persyaratan untuk menjadi QCCP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang "Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing" serta Peraturan Anggaran Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang "Penetapan Status Central Counterparty". Penetapan status QCCP kepada KPEI juga mempertimbangkan peran KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (KLP) di pasar modal yang telah memperoleh status Third Country CCP (TC-CCP Tier 1) pada kategori yang diberikan kepada TC-CCP yang dianggap telah memiliki rekam jejak yang baik dalam kegiatan Kliring dan Penjaminan (Settlement) dan Penjaminan (Guarantee). Penetapan status TC-CCP dari KPEI tersebut diharapkan dapat diberikan kepada CCP PATA, sehingga KPEI agar semakin memudahkan proses penyelesaian transaksi untuk meningkatkan status QCCP. Demikian surat keputusan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai kewenangan Saya.  DEPUTY GUBERNUR SENIOR (DESTEY DAMARANTI) Dokumen ini Diundangkan secara Elektronik Validasi dapat dilihat melalui Scan QR Code	Nama Penghargaan Award Name : Penetapan Status <i>Qualifying Central Counterparty</i> (QCCP) kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) The designation of Qualifying Central Counterparty (QCCP) status to PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) by Bank Indonesia.
Tanggal Perolehan Date Received : 27 September 2024 September 27, 2024	
Lembaga yang memberikan Issuing Institution : Bank Indonesia Bank Indonesia	

Informasi Pada Situs Perusahaan

— INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

<https://www.idclear.co.id/id>



Sebagai SRO pasar modal Indonesia, KPEI berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan pasar modal Indonesia, termasuk dalam hal transparansi dan keterbukaan publik. Dengan merujuk pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, KPEI telah memiliki situs web resmi perusahaan dengan alamat <https://www.idclear.co.id>

Sebagai bentuk dukungan untuk program nasional Keuangan Berkelanjutan, mulai tahun 2020 KPEI juga telah menyediakan Laporan Keberlanjutan yang dirilis secara tahunan bersama Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

As the SRO of the Indonesia capital market, IDClear is committed to adhering to regulations and laws governing the Indonesia capital market, including transparency and public disclosure. In line with Financial Services Authority Regulation No.8/POJK.04/2015 on the Websites of Issuers or Public Companies, IDClear has established an official corporate website at <https://www.idclear.co.id>.

In support of the national Sustainable Finance program, since 2020, IDClear has also provided an annual Sustainability Report released alongside the Annual Report and Financial Statements.

Untuk kemudahan dan pemerataan akses informasi, situs web KPEI menyediakan pilihan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berbagai informasi penting yang tersedia dan dapat diakses publik, di antaranya:

To facilitate and equalize access to information, the IDCLEAR website offers bilingual options, providing content in both Indonesian and English. Various important information is available to the public and accessible, including:

Informasi Information	Link
Sekilas KPEI IDCclear in Brief	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/profil-perusahaan
Visi, Misi, dan Nilai Inti Vision, Mission, and Core Values	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/profil-perusahaan
Tonggak Sejarah KPEI IDCclear Milestones	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/profil-perusahaan
Struktur Organisasi Organizational Structures	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/profil-perusahaan
Pemegang Saham & Entitas Anak Shareholders & Subsidiaries	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/pemegang-saham
Profil Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi Profiles of Board of Commissioners, Board of Directors, and Division Heads	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/profil-manajemen
RUPST dan RUPSLB AGMS and EGMS	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/rups-dan-rupslb
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Annual Report and Financial Statement	https://www.idclear.co.id/publikasi/laporan-perusahaan/laporan-tahunan
Laporan Keberlanjutan Sustainability Report	https://www.idclear.co.id/publikasi/laporan-perusahaan/laporan-keberlanjutan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guideline	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/manual-kebijakan-perusahaan
Pedoman Perilaku (Kode Etik) Code of Conduct	https://assets-website.idclear.co.id/idclear/storage/3674/Pedoman-Perilaku-KPEI-2021.pdf
Piagam Dewan Komisaris Board of Commissioners' Charter	https://assets-website.idclear.co.id/idclear/storage/10461/Piagam-Dewan-Komisaris-SRO---v3-SRO-Tahun-2022.pdf
Piagam Direksi Board of Directors' Charter	https://assets-website.idclear.co.id/idclear/storage/40408/5.Final_Piagam-Direksi_V4_KPEI.pdf
Manajemen Risiko Perusahaan Corporate Risk Management	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/manajemen-risiko-perusahaan
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/sekretaris-perusahaan
Komite Audit Audit Committee	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/komite/komite-audit
Komite Haircut Haircut Committee	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/komite/komite-haircut
Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko Credit Policy and Risk Management Committee	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/komite/komite-kebijakan-kredit-dan-pengendalian-risiko
Komite Investasi Investment Committee	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/komite/komite-investasi
Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko CCP Clearing and Risk Management Committee	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/komite/komite-ccp
Penilaian Praktik Tata Kelola KPEI IDCclear Governance Practice Assessment	https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/penilaian-praktik-tata-kelola-kpei



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Layaknya cahaya yang menjangkau berbagai arah, kinerja keuangan KPEI yang terus tumbuh positif menjadi penunjuk arah yang jelas dalam menghadapi dinamika pasar. Pancaran ini mencerminkan kekuatan fundamental Perusahaan, sekaligus memperkuat kapabilitas dalam mengidentifikasi peluang, merumuskan strategi adaptif, dan menjaga kesinambungan pertumbuhan di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi.

Like a beacon casting light that reaches out in various directions, IDClear's financial performance, which continues to grow positively, provides a clear direction in facing market dynamics. This radiance reflects the Company's fundamental strength, while strengthening its capability to identify opportunities, formulate adaptive strategies, and maintain sustainable growth amidst economic challenges and uncertainties.



04

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights

Tinjauan Makroekonomi 2024

MACROECONOMIC OVERVIEW 2024



Pada tahun 2024, perekonomian global menunjukkan tanda-tanda perlambatan di tengah ketidakpastian yang tinggi. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO) Oktober 2024 yang diterbitkan oleh IMF, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan stabil pada level 3,2% untuk tahun 2024 dan 2025. Namun, tantangan besar tetap membayangi, termasuk potensi eskalasi konflik regional, kebijakan moneter ketat yang berkepanjangan di negara maju, volatilitas pasar keuangan global, dan perlambatan ekonomi di Tiongkok yang turut menekan arus perdagangan internasional.

Secara umum, inflasi global berhasil ditekan dari puncaknya di tahun 2022, dengan proyeksi mencapai 3,5% pada akhir 2025, atau di bawah rata-rata historis periode 2000–2019. Meski demikian, risiko terhadap prospek ekonomi global tetap cenderung mengarah ke bawah, seiring meningkatnya fragmentasi geopolitik dan ketegangan dagang antar kawasan.

In 2024, the global economy showed signs of slowing amid heightened uncertainty. According to the October 2024 *World Economic Outlook* (WEO) report published by the IMF, global economic growth was projected to remain stable at 3.2% for both 2024 and 2025. However, major challenges continue to loom, including the potential escalation of regional conflicts, prolonged tight monetary policies in advanced economies, global financial market volatility, and the economic slowdown in China, which further pressures international trade flows.

Overall, global inflation has been successfully controlled from its peak in 2022, with projections reaching 3.5% by the end of 2025, or below the historical average for the 2000–2019 period. Nevertheless, risks to the global economic outlook remain tilted to the downside, driven by rising geopolitical fragmentation and increasing trade tensions across regions.

Fragmentasi perdagangan dunia dan perubahan struktur rantai pasok global semakin memperumit prospek pertumbuhan jangka menengah. Ketegangan geopolitik, kebijakan proteksionisme, serta pergeseran menuju dekarbonisasi dan digitalisasi secara simultan mengubah lanskap ekonomi global dan memengaruhi dinamika pasar keuangan internasional. Pasar komoditas pun mengalami volatilitas yang signifikan, dipengaruhi oleh perubahan permintaan serta guncangan pasokan, terutama di sektor energi dan logam industri. Negara-negara berkembang menghadapi tekanan tambahan dalam bentuk ketidakstabilan arus modal dan pelemahan nilai tukar yang dapat memicu kerentanan makroekonomi.

Dalam konteks domestik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 5,05% (yoy) pada triwulan III 2024, sedikit melandai dibandingkan proyeksi awal, namun tetap dalam kisaran target pemerintah. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan, didukung oleh inflasi yang terkendali, daya beli yang stabil, serta sistem keuangan nasional yang relatif resilien.

Investasi, khususnya di sektor bangunan dan proyek infrastruktur, menunjukkan perbaikan seiring dengan berlanjutnya proyek strategis nasional. Sementara itu, kinerja ekspor mengalami tekanan akibat pelemahan permintaan global dan penurunan harga komoditas utama, seperti batu bara dan kelapa sawit. Namun demikian, dampaknya relatif teredam oleh pertumbuhan ekspor barang hasil hilirisasi, sejalan dengan agenda industrialisasi nasional.

Inflasi domestik berhasil ditekan dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5%, mencerminkan efektivitas bauran kebijakan moneter dan fiskal. Stabilitas nilai tukar Rupiah juga tetap terjaga, didukung oleh langkah intervensi di pasar valas serta penguatan cadangan devisa. Dalam menghadapi ketidakpastian global, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan makroekonomi yang terukur, termasuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate pada tingkat 6,00% untuk mendukung pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas harga.

Industri nasional mencerminkan dinamika perekonomian ini. Sektor manufaktur, sebagai pilar industri, mengalami pertumbuhan positif meskipun dengan laju yang lebih moderat. Kebijakan hilirisasi mineral tetap menjadi katalisator dalam mendorong nilai tambah ekspor. Di sisi lain, sektor jasa seperti perdagangan, transportasi, dan komunikasi mencatatkan pemulihan yang solid, seiring percepatan digitalisasi dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Sektor keuangan tetap resilien, dengan tingkat permodalan perbankan yang memadai, rasio kredit bermasalah (NPL) yang terkendali, dan pertumbuhan kredit yang konsisten. Inisiatif penguatan ekonomi-keuangan digital turut memperluas inklusi keuangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan sektor ini dalam menghadapi tekanan eksternal.

The fragmentation of global trade and shifts in the structure of global supply chains are further complicating the medium-term growth outlook. Geopolitical tensions, protectionist policies, and the simultaneous transition toward decarbonization and digitalization are collectively transforming the global economic landscape and affecting the dynamics of international financial markets. Commodity markets have also experienced significant volatility, driven by changes in demand and supply shocks, particularly in the energy and industrial metals sectors. Developing countries are facing additional pressures in the form of capital flow instability and currency depreciation, which may trigger macroeconomic vulnerabilities.

In the domestic context, Indonesia's economy continued to demonstrate strong resilience. Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) grew by 5.05% (yoy) in the third quarter of 2024, slightly moderating from earlier projections but still within the government's target range. Household consumption remained the main driver of growth, supported by controlled inflation, stable purchasing power, and a relatively resilient national financial system.

Investment, particularly in the construction sector and infrastructure projects, showed improvement in line with the ongoing implementation of national strategic projects. Meanwhile, export performance came under pressure due to weakening global demand and declining prices of key commodities such as coal and palm oil. Nevertheless, the impact was relatively contained by the growth of downstream product exports, in line with the national industrialization agenda.

Domestic inflation was successfully contained within Bank Indonesia's target range of 2.5%, reflecting the effectiveness of the monetary and fiscal policy mix. Rupiah exchange rate stability was also maintained, supported by interventions in the foreign exchange market and the strengthening of foreign exchange reserves. In navigating global uncertainty, Bank Indonesia implemented a measured macroeconomic policy mix, including maintaining the BI-Rate at 6.00% to support growth without compromising price stability.

The national industry reflects these economic dynamics. The manufacturing sector, as the backbone of industry, recorded positive growth, albeit at a more moderate pace. Mineral downstreaming policies remain a key catalyst in boosting export value-added. On the other hand, service sectors such as trade, transportation, and communication posted a solid recovery, driven by accelerated digitalization and increased public mobility.

The financial sector remained resilient, supported by adequate banking capital levels, well-managed non-performing loan (NPL) ratios, and consistent credit growth. Efforts to strengthen the digital economy and finance also contributed to expanding national financial inclusion while reinforcing the sector's resilience in the face of external pressures.

Dalam konteks pasar keuangan nasional, stabilitas makroekonomi dan likuiditas yang terjaga sepanjang tahun 2024 menciptakan kondisi yang mendukung bagi keberlanjutan aktivitas pasar modal Indonesia. Peran infrastruktur pasar, termasuk lembaga kliring dan penjaminan, menjadi semakin penting dalam menjaga integritas, efisiensi, dan kepercayaan investor di tengah dinamika global yang kompleks. Pembahasan lebih lanjut mengenai perkembangan pasar modal Indonesia dan posisi strategis KPEI dalam ekosistem tersebut disajikan pada bagian berikutnya.

Secara keseluruhan, meskipun perekonomian global menghadapi tantangan berat, prospek perekonomian nasional tetap terjaga. Penguatan fondasi ekonomi domestik, percepatan transformasi ekonomi, serta pengelolaan risiko global yang cermat menjadi kunci dalam mempertahankan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

TINJAUAN PASAR MODAL INDONESIA: STABILITAS DAN KETAHANAN DI TENGAH GEJOLAK GLOBAL

Tahun 2024 menjadi periode yang menantang sekaligus memperkuat ketahanan pasar modal Indonesia. Di tengah tekanan eksternal berupa ketidakpastian geopolitik, divergensi pertumbuhan ekonomi global, serta siklus kebijakan moneter ketat dari negara-negara maju, pasar keuangan Indonesia tetap tangguh dan menunjukkan ketahanan struktural. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi sebesar 2,65% dibandingkan akhir 2023 dan ditutup pada level 7.079,91, aliran dana asing justru mencatatkan *net buy* sebesar Rp16,53 triliun. Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik tetap terjaga, didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang solid, dengan pertumbuhan PDB sekitar 5%, inflasi yang terkendali, dan ekspor yang tetap tangguh.

Di tengah ketidakpastian tersebut, fungsi intermediasi pasar modal tetap berjalan dengan baik. Sepanjang tahun 2024, nilai penghimpunan dana mencapai Rp259,24 triliun, mengindikasikan keberlanjutan momentum positif pasca pandemi. Sebanyak 43 perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar IPO tersibuk di Asia dan masuk dalam 10 besar dunia versi EY Global IPO Trends 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa pasar modal tetap menjadi kanal pendanaan yang strategis, efisien, dan kredibel bagi sektor-sektor utama seperti teknologi, keuangan, dan energi baru.

Perkembangan aktivitas perdagangan turut menunjukkan performa yang positif. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang tahun 2024, total frekuensi perdagangan saham mencapai sekitar 19,72 juta kali transaksi, dengan total nilai transaksi mencapai Rp38,70

In the context of the national financial market, macroeconomic stability and sustained liquidity throughout 2024 created favorable conditions for the continued development of Indonesia's capital market activities. The role of market infrastructure, including clearing and guarantee institutions, has become increasingly vital in upholding integrity, efficiency, and investor confidence amid complex global dynamics. Further discussion on the development of Indonesia's capital market and IDCLEAR's strategic position within this ecosystem is presented in the following section.

Overall, despite the significant challenges facing the global economy, Indonesia's economic outlook remains well-maintained. The strengthening of domestic economic fundamentals, the acceleration of economic transformation, and prudent management of global risks are key to sustaining growth momentum toward the Vision of Indonesia Emas (Golden Indonesia) 2045.

OVERVIEW OF INDONESIA'S CAPITAL MARKET: STABILITY AND RESILIENCE AMID GLOBAL TURBULENCE

The year 2024 proved to be both challenging and reinforcing for the resilience of Indonesia's capital market. Amid external pressures ranging from geopolitical uncertainties and diverging global economic growth, to ongoing monetary tightening cycles in advanced economies, Indonesia's financial market remained robust and demonstrated structural resilience. Although the Jakarta Composite Index (JCI) corrected by 2.65% compared to the end of 2023 and closed at 7,079.91, foreign fund flows recorded a net buy of Rp16.53 trillion. This indicates that global investor confidence in the domestic capital market remains intact, supported by Indonesia's solid economic fundamentals, including GDP growth of around 5%, controlled inflation, and resilient export performance.

Amid these uncertainties, the capital market's intermediation function continued to perform well. Throughout 2024, total funds raised reached Rp259.24 trillion, indicating the sustained positive momentum following the pandemic. A total of 43 companies conducted initial public offerings (IPOs) on the Indonesia Stock Exchange (IDX), making Indonesia one of the busiest IPO markets in Asia and placing it among the world's top 10, according to EY's Global IPO Trends 2024. This underscores the capital market's role as a strategic, efficient, and credible financing channel for key sectors such as technology, finance, and new energy.

The development of trading activity also showed a positive performance. Based on data from the Financial Services Authority, throughout 2024, the total frequency of stock trading reached approximately 19.72 million transactions, with a total transaction value of Rp38.70 trillion. On the

triliun. Di sisi penyelesaian transaksi, KPEI mencatat total frekuensi penyelesaian transaksi di pasar modal mencapai 273,8 juta kali, dengan nilai transaksi yang dibersihkan sebesar Rp3.050 triliun. Data ini menunjukkan skala aktivitas pasar yang tetap tinggi dan efisien, mencerminkan likuiditas dan kepercayaan investor yang kuat. Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami pertumbuhan indeks tertinggi sebesar 25,65%, sementara sektor teknologi terkoreksi hingga 10,00%, mencerminkan normalisasi valuasi pasca lonjakan dua tahun sebelumnya.

Dari sisi inklusi keuangan, tahun 2024 mencatatkan peningkatan signifikan dengan jumlah investor terdaftar yang menembus 15 juta berdasarkan data *Single Investor Identification* (SID). Peningkatan ini ditopang oleh penetrasi platform digital, kampanye literasi keuangan yang agresif, serta pergeseran perilaku masyarakat yang semakin memahami pentingnya investasi jangka panjang. Dominasi investor ritel dari generasi muda turut menciptakan struktur investor yang lebih beragam dan adaptif terhadap fluktuasi jangka pendek.

Pasar pendapatan tetap (*fixed income market*), yang mencakup obligasi dan sukuk, juga mencatatkan perkembangan signifikan. Di tengah volatilitas pasar saham dan tren suku bunga tinggi, investor melakukan diversifikasi ke instrumen yang lebih stabil. Peningkatan aktivitas di pasar EBUS, baik reguler maupun negosiasi, mempertegas peran strategis KPEI sebagai CCP. Layanan seperti Triparty Repo, *Alternate Cash Settlement* (ACS), dan Fasilitas Intraday menjadi instrumen penting dalam menjaga kelancaran penyelesaian transaksi dan pengelolaan risiko sistemik. Sepanjang 2024, total penggunaan Fasilitas Intraday mencapai Rp295,30 triliun, dengan pemanfaatan tertinggi sebesar Rp32,15 triliun pada bulan Oktober. Sementara itu, nilai transaksi Pasar Pinjam Meminjam Efek (PME) tercatat sebesar Rp54,11 miliar.

Secara kelembagaan, pasar modal Indonesia menunjukkan kematangan dari sisi infrastruktur. Dana jaminan yang dikelola KPEI per akhir 2024 tercatat sebesar Rp8.524 triliun, didominasi oleh penempatan pada instrumen likuid dan aman seperti Deposito (Rp7.922 triliun atau 93%) dan Surat Berharga Negara/SBN (Rp602 miliar atau 7%). Komposisi ini mencerminkan kebijakan pengelolaan risiko yang prudent dan responsif terhadap dinamika pasar. Selain itu, efisiensi penyelesaian transaksi juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 55,17% pada 2023 menjadi 57,30% di 2024, seiring penguatan integrasi sistem perdagangan dan penyelesaian serta adopsi teknologi layanan kliring.

Dengan seluruh perkembangan tersebut, posisi pasar modal Indonesia hingga akhir 2024 mencerminkan kesiapan struktural yang kokoh dalam mengantisipasi gejolak global, sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak pembiayaan sektor riil dan pembangunan berkelanjutan.

settlement side, IDCclear recorded a total frequency of transaction settlements in the capital market reaching 273.8 million times, with a cleared transaction value of Rp3,050 trillion. These data show that the scale of market activity remains high and efficient, reflecting strong liquidity and investor confidence. From a sectoral perspective, the energy sector recorded the highest index growth of 25.65%, while the technology sector experienced a correction of up to 10.00%, reflecting valuation normalization following a surge over the previous two years.

From the perspective of financial inclusion, 2024 recorded a significant increase, with the number of registered investors surpassing 15 million based on Single Investor Identification (SID) data. This growth was supported by the penetration of digital platforms, aggressive financial literacy campaigns, and a shift in public behavior toward greater awareness of the importance of long-term investment. The dominance of retail investors from the younger generation also contributed to a more diverse investor structure that is more adaptive to short-term fluctuations.

The fixed income market, which includes bonds and sukuk, also recorded significant developments. Amid stock market volatility and a high-interest rate trend, investors diversified into more stable instruments. The increased activity in the EBUS market, both regular and negotiated, underscored IDCclear's strategic role as a CCP. Services such as Triparty Repo, Alternate Cash Settlement (ACS), and the Intraday Facility have become vital tools in ensuring smooth transaction settlements and managing systemic risk. Throughout 2024, total usage of the Intraday Facility reached Rp295.30 trillion, with the highest utilization recorded at Rp32.15 trillion in October. Meanwhile, the transaction value of the Securities Lending and Borrowing Market (PME) was recorded at Rp54.11 billion.

Institutionally, Indonesia's capital market demonstrated growing maturity in terms of infrastructure. As of the end of 2024, the guarantee fund managed by IDCclear stood at Rp8,524 trillion, dominated by placements in liquid and secure instruments such as deposits (Rp7,922 trillion or 93%) and government securities/SBN (Rp602 billion or 7%). This composition reflects a prudent risk management policy that is responsive to market dynamics. In addition, settlement efficiency showed a positive trend, rising from 55.17% in 2023 to 57.30% in 2024, in line with the strengthening of trading and settlement system integration and the adoption of clearing service technologies.

With all these developments, the position of Indonesia's capital market by the end of 2024 reflects strong structural readiness to navigate global volatility, while reinforcing its role as a key driver of real sector financing and sustainable development.

PERAN STRATEGIS KPEI DALAM EKOSISTEM PASAR MODAL INDONESIA

Sebagai bagian integral dari infrastruktur pasar modal Indonesia, KPEI memegang peran strategis dalam menjaga integritas, efisiensi, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), KPEI membentuk fondasi kelembagaan yang menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam kerangka ini, KPEI menjalankan fungsi vital sebagai lembaga kliring dan penjaminan transaksi bursa, yang menjadi pilar dalam menciptakan kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan pasar modal secara berkelanjutan.

Selama tahun 2024, peran KPEI semakin menguat seiring meningkatnya kompleksitas transaksi, dinamika pasar, serta ekspansi instrumen keuangan. KPEI tidak hanya berfungsi sebagai LKP atau Lembaga Kliring dan Penjaminan atau lembaga yang menjamin penyelesaian transaksi efek di pasar reguler dan negosiasi, melainkan juga telah ditetapkan sebagai Pihak yang Ditunjuk untuk Menjalankan Fungsi CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), khususnya untuk transaksi derivatif yang diselenggarakan oleh Bursa. Penambahan peran ini, yang secara resmi mulai dijalankan sejak 20 September 2024, menjadi tonggak penting dalam penguatan struktur pasar derivatif Indonesia.

Di tengah tren digitalisasi dan globalisasi pasar keuangan, KPEI turut berperan sebagai katalis dalam modernisasi infrastruktur pasar. Kolaborasi erat dengan otoritas dan pelaku industri diwujudkan melalui penguatan sistem penyelesaian transaksi, pengembangan layanan seperti *Triparty Repo* dan *Alternate Cash Settlement* (ACS), serta perluasan fitur pengelolaan risiko yang terintegrasi. Melalui pendekatan berbasis teknologi dan mitigasi risiko sistemik, KPEI membuktikan kapasitasnya untuk beradaptasi terhadap dinamika pasar sekaligus mendukung agenda strategis nasional dalam pendalaman pasar keuangan.

Peran strategis KPEI tidak hanya berdampak pada penyelenggaraan transaksi yang aman dan efisien, tetapi juga memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di kancah regional. Keberadaan KPEI sebagai CCP PUVA berfungsi sebagai jaminan kepercayaan investor terhadap sistem penyelesaian transaksi di Indonesia, yang menjadi prasyarat penting dalam menjaga likuiditas, memperluas partisipasi investor, serta mendorong pertumbuhan pasar yang inklusif dan berdaya tahan.

Perluasan Peran KPEI sebagai Central Counterparty di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa tepat pada 20 September 2024, KPEI resmi memperluas fungsinya sebagai *Central Counterparty* (CCP) di sektor Pasar Uang

STRATEGIC ROLE OF IDCLEAR IN THE INDONESIAN CAPITAL MARKET ECOSYSTEM

As an integral part of Indonesia's capital market infrastructure, IDClear plays a strategic role in maintaining the integrity, efficiency, and stability of the national financial system. Together with Indonesia Stock Exchange (IDX) and Indonesia Central Securities Depository (KSEI), IDClear forms the institutional foundation that ensures the orderly, fair, and efficient execution of securities trading. Within this framework, IDClear performs a vital function as the clearing and guarantee institution for exchange transactions, serving as a pillar in building investor confidence and driving sustainable growth of the capital market.

Throughout 2024, IDClear's role was further strengthened alongside the increasing complexity of transactions, market dynamics, and the expansion of financial instruments. IDClear not only functions as the LKP or Clearing and Guarantee Institution, or an institution that guarantees the settlement of securities transactions in both the regular and negotiated markets but has also been appointed as the Designated Party to Perform the CCP Function in the Money market and foreign exchange market (PUVA), specifically for derivative transactions organized by the Exchange. This additional role that has officially been implemented since September 20, 2024, marks a significant milestone in strengthening the structure of Indonesia's derivatives market.

Amid the trends of digitalization and globalization of financial markets, IDClear also acts as a catalyst in modernizing market infrastructure. Close collaboration with regulators and industry players is realized through the enhancement of transaction settlement systems, development of services such as *Triparty Repo* and *Alternate Cash Settlement* (ACS), and the expansion of integrated risk management features. Through a technology-based approach and systemic risk mitigation, IDClear demonstrates its capacity to adapt to market dynamics while supporting the national strategic agenda for deepening the financial market.

IDClear's strategic role not only ensures the safe and efficient execution of transactions but also strengthens the competitiveness of Indonesia's capital market on the regional stage. As CCP PUVA, IDClear serves as a guarantee of investor confidence in Indonesia's transaction settlement system, which is a crucial prerequisite for maintaining liquidity, expanding investor participation, and driving inclusive and resilient market growth.

Expansion of IDClear's Role as Central Counterparty in the Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA)

As previously mentioned, on September 20, 2024, IDClear officially expanded its function as the Central Counterparty (CCP) in the money market and foreign exchange market

dan Pasar Valuta Asing (PUVA), setelah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang 2025, serta komitmen G20 dalam reformasi pasar derivatif OTC.

Sebagai CCP PUVA, KPEI menyediakan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan pengelolaan agunan untuk transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Pada tahap awal, layanan ini mencakup transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dengan rencana pengembangan ke produk lain seperti Repo Interbank, *Interest Rate Swap* (IRS), dan *Overnight Index Swap* (OIS) di masa mendatang.

Pada tahap awal, layanan PUVA KPEI mencakup transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), yang merupakan instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar. Melalui peran ini, KPEI menyediakan layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan pengelolaan agunan untuk memperkuat integritas transaksi DNDF.

Keberadaan KPEI sebagai CCP PUVA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi, mengurangi risiko sistemik, dan memperkuat kepercayaan pelaku pasar terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan perluasan peran ini, KPEI memperkuat posisinya sebagai pilar penting dalam ekosistem pasar keuangan Indonesia, mendukung integrasi dan pendalaman pasar, serta meningkatkan daya saing di tingkat regional dan global.

(PUVA), following the business license approval from Bank Indonesia. This step is part of implementing the mandate of the Financial Sector Development and Strengthening Law (UU PPSK), the 2025 Money Market Development Blueprint, and the G20 commitment to reforming the OTC derivatives market.

As the PUVA CCP, IDCclear provides clearing, guarantee, risk management, and collateral management services for transactions in the money market and foreign exchange market. In the initial phase, these services cover Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) transactions, with plans to expand to other products such as Interbank Repo, Interest Rate Swap (IRS), and Overnight Index Swap (OIS) in the future.

At this early stage, IDCclear's PUVA services focus on Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) transactions, which serve as hedging instruments against exchange rate fluctuations. Through this role, IDCclear delivers clearing, guarantee, risk management, and collateral management services to strengthen the integrity of DNDF transactions.

IDCclear's presence as the PUVA CCP is expected to enhance transaction settlement efficiency, reduce systemic risk, and strengthen market participants' confidence in the stability of Indonesia's financial system. With this expanded role, IDCclear reinforces its position as a key pillar in Indonesia's financial market ecosystem, supporting market integration and deepening, as well as boosting competitiveness at both regional and global levels.



Strategi dan Kebijakan Strategis KPEI 2024

IDCLEAR STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES FOR 2024

KPEI telah menyusun strategi dan kebijakan tahun 2024 yang ditujukan untuk mewujudkan Visi KPEI, yaitu Menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan yang andal untuk menyediakan layanan terbaik di pasar modal dan pasar keuangan lainnya di Indonesia.

Strategi ini juga sejalan dengan aspirasi jangka panjang KPEI, yaitu menjadi *Central Counterparty* (CCP) terpercaya untuk transaksi bursa, OTC, dan bilateral, dengan menyediakan infrastruktur terbaik di kelasnya untuk layanan kliring, penjaminan, manajemen risiko, dan pengelolaan agunan.

Selain itu, arah strategis KPEI juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya Visi Pasar Modal Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Roadmap* Pasar Modal Indonesia 2023–2027. Untuk menjalankan strategi tersebut, KPEI menetapkan tiga arah strategis utama tahun 2024, yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dan program kerja Perusahaan:

1. **Pengembangan Produk dan Layanan Baru**
Peningkatan kualitas layanan dan inovasi produk secara berkelanjutan dilakukan untuk merespons ekspektasi pelaku pasar dan memperkuat peran KPEI dalam mendukung pertumbuhan pasar modal serta perluasan perannya ke sektor keuangan lainnya.
2. **Penguatan Teknologi Informasi dan Human Capital untuk Mendukung Operational Excellence**
Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas organisasi, evaluasi menyeluruh terhadap proses dan kebijakan operasional, serta penguatan infrastruktur dan kinerja teknologi informasi sebagai tulang punggung layanan yang handal.
3. **Pengawasan Terintegrasi**
KPEI memperkuat sinergi dengan OJK dan SRO lainnya dalam mewujudkan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, melalui inisiatif integrasi data ke platform Big Data serta pertukaran informasi melalui program OSROPASI.

Ketiga arah strategis tersebut dijalankan secara konsisten dalam kerangka Rumah Pilar Pertumbuhan KPEI, yang terdiri atas dua pilar utama dan dua pilar pendukung (*enabler*). Pilar-pilar ini disusun melalui analisis terhadap perkembangan pasar modal dan pasar uang Indonesia, ekspektasi pertumbuhan, tren global, serta acuan strategis dari para pemangku kepentingan.

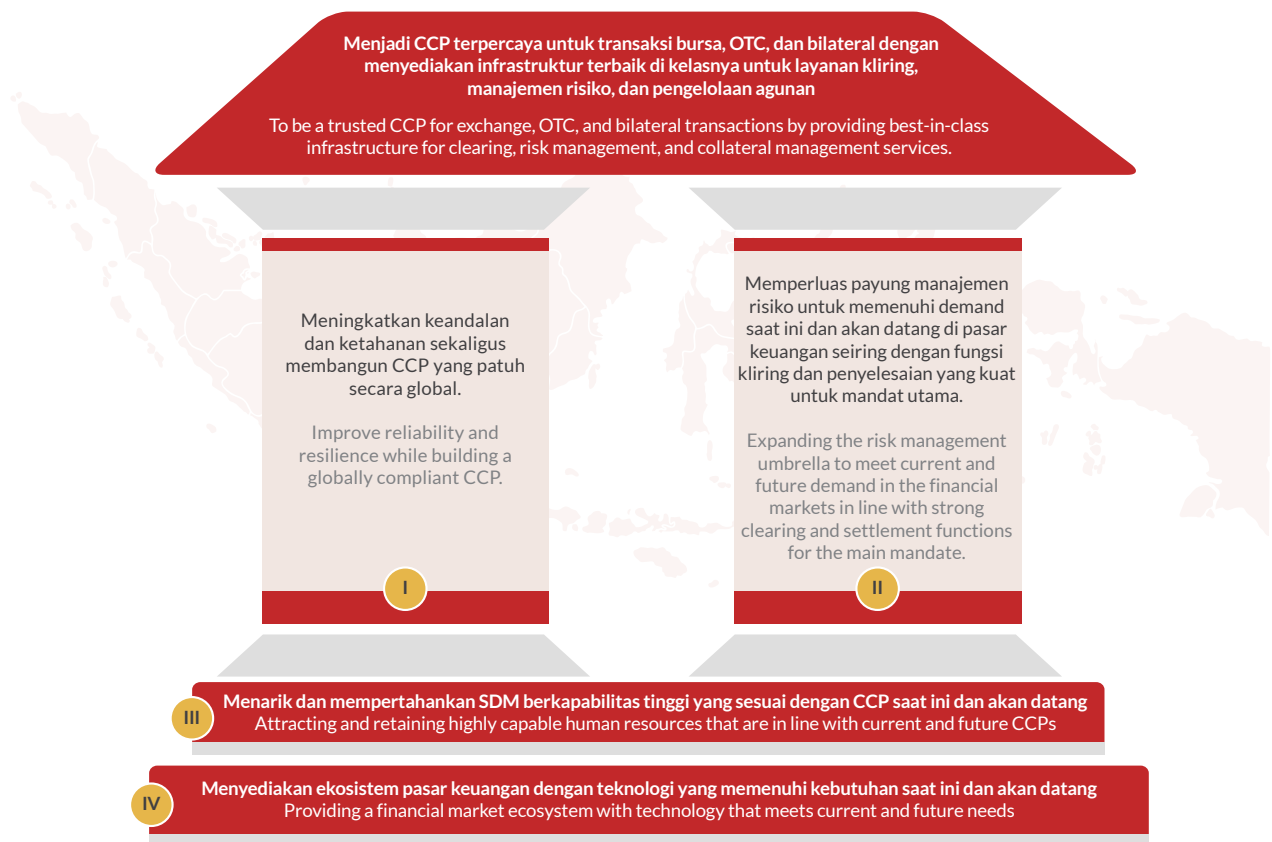
IDClear formulated its 2024 strategy and policies, aiming at realizing IDClear's Vision To become a reliable Clearing and Guarantee Institution that provides the best services in Indonesia's capital market and other financial markets.

This strategy also aligns with IDClear's long-term aspiration to become a trusted central counterparty (CCP) for exchange-traded, OTC, and bilateral transactions, by providing world-class infrastructure for clearing, guarantee, risk management, and collateral management services.

Furthermore, IDClear's strategic direction is designed to support the realization of the Vision of Indonesia's Capital Market as outlined in the Indonesia Capital Market Roadmap 2023–2027. To implement this strategy, IDClear has established three main strategic Directions for 2024, which serve as the foundation for the Company's policies and work programs:

1. **Development of New Products and Services**
Continuous improvement in service quality and product innovation is carried out to respond to market participants' expectations and to strengthen IDClear's role in supporting capital market growth as well as its expansion into other financial sectors.
2. **Strengthening Information Technology and Human Capital to Support Operational Excellence**
This effort includes enhancing human resource competencies and organizational capacity, conducting a comprehensive evaluation of operational processes and policies, and reinforcing IT infrastructure and performance as the backbone of reliable services.
3. **Integrated Supervision**
IDClear strengthens its synergy with the OJK and other Self-Regulatory Organizations (SROs) in creating an orderly, fair, and efficient market through initiatives such as integrating data into the Big Data platform and facilitating information exchange via the OSROPASI program.

These three strategic directions are consistently implemented within the framework of IDClear's Growth Pillars Framework, which consists of two main pillars and two supporting (*enabler*) pillars. These pillars are formulated based on an analysis of developments in Indonesia's capital and money markets, growth expectations, global trends, and strategic guidance from stakeholders.

Rumah Pilar Pertumbuhan KPEI
IDClear's Growth Pillars FrameworkPillar Pertumbuhan Perusahaan
Pillars of Company Growth

Pilar Utama Strategi KPEI

- 1. Meningkatkan Keandalan dan Ketahanan serta Membangun CCP yang Sesuai dengan Standar Global**
Pilar ini mencerminkan komitmen KPEI untuk membangun sistem CCP yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga mampu memberikan layanan manajemen risiko terbaik untuk seluruh pasar yang dilayani. Tujuannya adalah memperkuat kepercayaan pelaku pasar melalui integrasi pengelolaan agunan, peningkatan ketahanan operasional, serta penerapan proses otomatisasi dan efisiensi melalui prinsip *Straight-Through Processing* (STP).
- 2. Memperluas Payung Manajemen Risiko untuk Menjawab Kebutuhan Ekosistem Pasar yang Semakin Kompleks**
Pilar ini difokuskan pada pengembangan layanan kliring untuk produk-produk yang diperdagangkan di bursa serta inisiatif perluasan mandat layanan CCP untuk transaksi OTC dan bilateral. Dengan memperkuat fungsi kliring dan penyelesaian, KPEI membangun kapabilitas yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar dan mendukung pertumbuhan instrumen keuangan baru di masa mendatang.

Pilar Pendukung (Enabler)

- 1. Pengembangan dan Retensi SDM yang Kompeten dan Siap Masa Depan**
KPEI menempatkan pengembangan talenta sebagai pilar penting dalam mendukung eksekusi strategi. Perusahaan berupaya menarik dan mempertahankan SDM yang

Main Strategic Pillars of IDCclear

- 1. Enhancing Reliability and Resilience while Building a CCP Aligned with Global Standards**
This pillar reflects IDCclear's commitment to establishing a CCP system that not only complies with international standards but also delivers best-in-class risk management services for all the markets it serves. The objective is to strengthen market participants' confidence through integrated collateral management, improved operational resilience, and the implementation of automation and efficiency processes based on the Straight-Through Processing (STP) principle.
- 2. Expanding the Risk Management Umbrella to Address the Growing Complexity of the Market Ecosystem**
This pillar focuses on developing clearing services for exchange-traded products as well as initiatives to expand the CCP mandate to cover OTC and bilateral transactions. By strengthening its clearing and settlement functions, IDCclear is building adaptive capabilities that respond to evolving market needs and support the growth of new financial instruments in the future.

Supporting Pillars (Enabler)

- 1. Developing and Retaining Competent, Future-Ready Human Capital**
IDCclear places talent development as a crucial pillar to support the execution of its strategy. The Company strives to attract and retain human capital with the

memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan peran sebagai CCP saat ini dan di masa depan, melalui program pengembangan yang berkelanjutan.

2. Pembangunan Teknologi dan Infrastruktur Ekosistem yang Maju dan Terintegrasi

Pilar ini menekankan pentingnya kesiapan teknologi dalam menunjang produk dan layanan KPEI yang terus berkembang. Teknologi diposisikan sebagai katalis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan memperluas akses pasar, guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penerapan strategi ini dituangkan dalam dokumen *Strategic Business Plan* (SBP) 2021–2025, yang menjadi acuan *roadmap* pengembangan Perseroan. Dalam pelaksanaannya, KPEI menerapkan kerangka kerja *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat pengukuran kinerja strategis, dengan empat perspektif utama: *Stakeholder*, *Financial*, *Internal Business Process*, dan *Learning and Growth*. Melalui pendekatan ini, KPEI memastikan bahwa seluruh langkah strategis tidak hanya relevan secara bisnis, tetapi juga berdampak bagi pemangku kepentingan dan pembangunan sistem keuangan nasional yang lebih tangguh dan inklusif.

RENCANA KERJA UTAMA KPEI TAHUN 2024

Untuk mendukung implementasi arah strategis dan pilar pertumbuhan perusahaan, KPEI menetapkan sejumlah rencana kerja utama tahun 2024 yang bersifat prioritas, inovatif, dan berdampak langsung terhadap penguatan fungsi kelembagaan sebagai *Central Counterparty* (CCP) yang andal dan relevan di tengah transformasi pasar. Agenda kerja ini terbagi ke dalam lima domain strategis sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap Transaksi Bursa

Fokus utama diarahkan pada pengembangan layanan kliring dan penyelesaian yang adaptif terhadap produk-produk bursa, dengan inisiatif meliputi:

- Pengembangan mekanisme penyelesaian transaksi derivatif menggunakan sub rekening efek (SRE) KSEI.
- Pengembangan modul repo.
- Pengembangan sistem kliring dan manajemen risiko derivatif keuangan.
- Integrasi pelaporan Triparty Repo ke sistem PLTE BEI untuk memperkuat konsolidasi antar-SRO.

2. Pengembangan Produk dan Layanan

KPEI mendorong inovasi layanan untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kapabilitas CCP dalam mendukung pertumbuhan pasar, termasuk:

- Pengembangan sistem e-IPO untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) sebagai bagian dari digitalisasi layanan pasar perdana.
- Implementasi dan penyempurnaan layanan kliring derivatif OTC berbasis CCP.
- Pengembangan Sistem *Collateral Management* Terintegrasi (ICMS) untuk mendukung transaksi derivatif OTC SBNT, bilateral, dan Triparty Repo.

competencies required for its current and future roles as a CCP, through continuous development programs.

2. Building Advanced and Integrated Technology and Ecosystem Infrastructure

This pillar highlights the importance of technological readiness in supporting IDClear's expanding products and services. Technology is positioned as a catalyst to enhance transparency, efficiency, and market accessibility to support sustainable growth.

The implementation of this strategy is outlined in the Strategic Business Plan (SBP) 2021–2025, which serves as the Company's development roadmap. In its execution, IDClear applies the Balanced Scorecard (BSC) framework as a tool for measuring strategic performance across four key perspectives: Stakeholder, Financial, Internal Business Process, and Learning and Growth. Through this approach, IDClear ensures that all strategic initiatives are not only business-relevant but also impactful for stakeholders and contribute to building a more resilient and inclusive national financial system.

IDCLEAR'S KEY WORK PLANS FOR 2024

To support the implementation of its strategic directions and growth pillars, IDClear has established a set of key work plans for 2024 that are priority-driven, innovative, and directly impactful in strengthening its institutional role as a reliable and relevant Central Counterparty (CCP) amid ongoing market transformation. These work plans are categorized into five strategic domains as follows:

1. Support for Exchange Transactions

The main focus is on developing clearing and settlement services that are adaptable to exchange-traded products, with initiatives including:

- Developing a derivatives settlement mechanism using KSEI's securities sub-accounts (SRE).
- Developing a repo module.
- Developing a clearing and risk management system for financial derivatives.
- Integrating Triparty Repo reporting into PLTE of IDX system to strengthen inter-SRO consolidation.

2. Product and Service Development

IDClear promotes service innovation to broaden its scope and enhance CCP capabilities in supporting market growth, including:

- Developing an e-IPO system for Debt and Sukuk Securities (EBUS) as part of digitizing primary market services.
- Implementing and refining CCP-based OTC derivatives clearing services.
- Developing an Integrated Collateral Management System (ICMS) to support OTC SBNT derivatives, bilateral transactions, and Triparty Repo.

3. Penyempurnaan Proses Bisnis (*Enhancement Process*)

Upaya peningkatan efisiensi dan keandalan proses dilakukan melalui:

- Pengembangan mekanisme penyelesaian di tingkat Anggota Kliring (AK) untuk transaksi ekuitas.
- Pembaruan sistem kliring dan *risk management* guna meningkatkan stabilitas operasional.
- Kajian dan perhitungan atas *Hypothetical Capital Requirement* sebagai bagian dari kepatuhan terhadap prinsip CCP global.
- Pengembangan skema *alternative arrangement* untuk perlindungan risiko sistemik.
- Penerapan sistem manajemen sumber daya Perusahaan melalui pengembangan *Enterprise Resource Planning* (ERP).

4. Penguatan Teknologi Informasi dan Infrastruktur

Sebagai pilar pendukung strategis, KPEI menaruh perhatian besar terhadap kesiapan dan kapabilitas infrastruktur teknologi melalui:

- Upgrade* Komponen e-CLEARs Tahap II.
- Konsolidasi *Disaster Recovery Center* (DRC) dan *Alternate Site*.
- Penambahan Baremetal Server.
- Penambahan *Storage Area New Data Center* (NDC), *New Data Center* (NDC) 2, dan *Disaster Recovery Center* (DRC) 2.
- Penambahan Server *Hypervisor Data Center* (DC), *New Data Center* (NDC) 2, dan *Disaster Recovery Center* (DRC) 2.
- Monitoring and Operation Center*.
- Review* dan Kajian Strategi *Upgrade* Teknologi Terhadap Sistem Utama KPEI.
- IT Planning and Governance Improvement*.
- IT Operational Assessment*.
- Review* dan Penyempurnaan Implementasi Manajemen Risiko Korporasi.

5. Penguatan Kapasitas SDM dan Organisasi

Dalam mendukung transformasi kelembagaan dan perluasan layanan, KPEI juga menjalankan agenda strategis pada aspek sumber daya manusia dan organisasi, meliputi:

- Program Khusus Peningkatan Kompetensi Karyawan KPEI dalam Rangka Peningkatan *Operational Excellence*.
- Pengembangan *Knowledge Management System*.
- Workload Analysis*.
- Implementasi Perluasan Struktur Organisasi dalam Rangka Mendukung Perluasan Bisnis Perusahaan.

PROGRAM STRATEGIS KPEI

KPEI juga menjalankan sejumlah program strategis yang menjadi bagian integral dari *roadmap* pengembangan pasar modal Indonesia. Program-program ini tidak hanya mendukung pencapaian visi dan misi KPEI, tetapi juga merupakan komitmen langsung terhadap arahan regulator,

3. Business Process Enhancement

Efforts to improve process efficiency and reliability are carried out through:

- Developing clearing member-level settlement mechanisms for equity transactions.
- Upgrading the clearing and risk management systems to enhance operational stability.
- Conducting studies and calculations of the Hypothetical Capital Requirement as part of compliance with global CCP principles.
- Developing alternative arrangement schemes to safeguard against systemic risk.
- Implementing a corporate resource management system through the development of Enterprise Resource Planning (ERP).

4. Strengthening Information Technology and Infrastructure

As a strategic enabling pillar, IDClear places strong emphasis on the readiness and capability of its technology infrastructure through:

- Phase II Upgrade of e-CLEARs Components
- Consolidation of the Disaster Recovery Center (DRC) and Alternate Site
- Addition of Baremetal Servers
- Expansion of Storage Areas at the New Data Center (NDC), New Data Center (NDC) 2, and Disaster Recovery Center (DRC) 2
- Addition of Server Hypervisors at the Data Center (DC), New Data Center (NDC) 2, and Disaster Recovery Center (DRC) 2
- Monitoring and Operation Center
- Review and Strategic Assessment of Technology Upgrades for IDClear's Core Systems
- IT Planning and Governance
- IT Operational Assessment
- Review and Refinement of the Corporate Risk Management Implementation

5. Strengthening Human Resources and Organizational Capacity

To support institutional transformation and service expansion, IDClear also carries out strategic initiatives in human resources and organizational development, including:

- Special Programs to Enhance Employee Competence at IDClear to Improve Operational Excellence
- Enhancement of Knowledge Management System
- Workload Analysis
- Implementation of Organizational Structure Expansion to Support the Company's Business Growth

IDCLEAR'S STRATEGIC PROGRAMS

IDCclear also implements several strategic programs that form an integral part of the Indonesian capital market development roadmap. These programs not only support the achievement of IDCclear's vision and mission but also represent a direct commitment to regulatory directives,

khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memantau progres implementasinya secara berkala.

Sepanjang tahun 2024, KPEI memiliki program strategis pada empat bidang utama berikut:

1. Program Implementasi CCP OTC Derivatif SBNT (Suku Bunga dan Nilai Tukar)
Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan layanan kliring berbasis CCP untuk produk derivatif *Over-The-Counter* (OTC), khususnya pada instrumen suku bunga dan nilai tukar (SBNT). Inisiatif ini mencakup:
 - a. Implementasi dan Penyempurnaan Kliring CCP OTC Derivatif SBNT (Suku Bunga dan Nilai Tukar).
Status selesai.
 - b. Pengembangan Sistem *Collateral Management* Terintegrasi (ICMS) untuk OTC Derivatif SBNT.
Status selesai.
2. Program Pengembangan Infrastruktur Pasar Repo
Sebagai bagian dari dukungan terhadap pendalaman pasar keuangan, KPEI juga menjalankan serangkaian program untuk membangun ekosistem layanan repo yang aman dan terstruktur. Ruang lingkup program meliputi:
 - a. Proposal Pengaturan dan Pengawasan Transaksi Repo oleh KPEI.
Status selesai.
 - b. Pengembangan Layanan CCP Repo – Konsep dan Spesifikasi Bisnis.
Status selesai.
 - c. Pengembangan Modul Repo.
 - d. Pengembangan Sistem *Collateral Management* Terintegrasi (ICMS) untuk Transaksi Bilateral dan *Triparty Repo*.
 - e. Pengembangan Integrasi Pelaporan *Triparty Repo* ke Sistem PTLE BEI dan ORCHID KSEI.
Status selesai.
3. Program Pengembangan Penyelesaian di Tingkat Anggota Kliring (AK) untuk Transaksi Ekuitas
Program ini bertujuan untuk menyempurnakan skema penyelesaian transaksi bursa melalui pendekatan omnibus, yaitu dengan memungkinkan penyelesaian langsung di tingkat anggota kliring. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh pelaku pasar.
4. Pembaruan Sistem Kliring dan Manajemen Risiko
Sebagai pondasi utama layanan KPEI, sistem kliring dan risk management terus diperbarui untuk menjawab tantangan pasar dan menjaga ketahanan operasional.
5. Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi OJK – SRO
Penguatan pengawasan atas transaksi di pasar modal Indonesia dilakukan bersama oleh OJK dan SRO. Aktivitas pengembangan dilakukan untuk lebih meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan SRO.

particularly from the Financial Services Authority (OJK), which regularly monitors their implementation progress.

Throughout 2024, IDCclear had strategic programs in the following four main areas:

1. Implementation Program for CCP OTC Derivatives on Interest Rates and Foreign Exchange (SBNT)
This program aims to develop and enhance CCP-based clearing services for over the counter (OTC) derivative products, particularly for interest rate and foreign exchange instruments (SBNT). The initiatives include:
 - a. Implementation and enhancement of CCP clearing for OTC derivatives on interest rates and foreign exchange.
Status completed.
 - b. Development of an Integrated Collateral Management System (ICMS) for OTC SBNT derivatives.
Status completed.
2. Repo Market Infrastructure Development Program
As part of its support for financial market deepening, IDCclear is also implementing a series of programs to establish a secure and well-structured repo service ecosystem. The scope of the program includes:
 - a. Proposal for Regulation and Supervision of Repo Transactions by IDCclear.
Status completed.
 - b. Development of CCP Repo Services – Business Concept and Specifications.
Status completed.
 - c. Development of the Repo Module.
 - d. Development of an Integrated Collateral Management System (ICMS) for Bilateral and Triparty Repo Transactions.
 - e. Development of Triparty Repo Reporting Integration into the PTLE System of IDX and ORCHID System of KSEI.
Status completed.
3. Equity Transaction Settlement Development Program at Clearing Member (AK) Level
This program aims to enhance the stock exchange transaction settlement scheme through an omnibus approach, which enables direct settlement at the clearing member level. This aligns with the principles of efficiency and flexibility that market participants require.
4. Clearing and Risk Management System Update
As the core foundation of IDCclear's services, the clearing and risk management systems are continuously updated to address market challenges and maintain operational resilience.
5. Development of the Integrated Supervision System between OJK and SRO
The strengthening of supervision over transactions in the Indonesian capital market is carried out jointly by OJK and the SROs. Development activities are undertaken to further enhance the supervision conducted by both the OJK and the SROs.

Seluruh program strategis ini disampaikan progresnya kepada OJK secara berkala setiap bulan, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas strategis. Dengan pendekatan ini, KPEI memastikan bahwa setiap langkah transformasi dan pengembangan layanan dijalankan secara terukur, transparan, dan selaras dengan arah kebijakan regulator serta kebutuhan pelaku pasar.

All these strategic programs are regularly reported to OJK monthly, as part of the supervision and strategic accountability mechanism. Through this approach, IDClear ensures that every step of transformation and service development is implemented measurably and transparently, aligned with regulatory policy directions and the needs of market participants.

CAPAIAN KPI UNGGULAN 2024

Capaian KPI Unggulan Tahun 2024 Key Performance Indicators for 2024

Indeks Kepuasan Anggota Kliring (AK)
Clearing Member Satisfaction Index

101,06%

- Hasil survei yang telah dilaksanakan pada bulan Jul - Aug 2024.
- Partisipan: 89 AK aktif dan PEI

1. Results of a survey conducted in July-August 2024.
2. Participants: 89 active AK and PEI

Realisasi | Realization: **82,87%**
Target | Target: **82%**

Penambahan Jumlah Investor di Pasar Modal
Increase in the Number of Investors in the Capital Market

447,99%

- Penambahan investor baru (Realisasi: 2,2 juta | Target: 2 juta)
- Kegiatan edukasi/sosialisasi (Realisasi: 54 | Target: 50)
- Jumlah peserta kegiatan edukasi/sosialisasi (Realisasi: 11.008 | Target: 1.000)

1. New investor growth (Realization: 2.2 million | Target: 2.2 million)
2. Educational/dissemination activities (Realization: 54 | Target: 50)
3. Number of dissemination participants activities (Realization: 11,008 | Target: 1,000)

Persentase Kepatuhan Atas Standar Internasional untuk Central Counterparty (CCP)
Percentage of Compliance with International Standards for Central Counterparty (CCP)

100,51%

- Pemenuhan PFMI (Realisasi: 96,55% | Target: 96%) - 100,57%
- Pemenuhan 4 ISO (Realisasi: 100% | Target: 100%) - 100%
- Pemenuhan compliance QCCP - (Realisasi: 100% | Target: 100%) - 100%
- Aktivitas publikasi PQD (Realisasi: 100% | Target: 100%) - 100%

1. PFMI Compliance (Realization: 96.55% | Target: 96%) - 100.57%
2. 4 ISO Compliance (Realization: 100% | Target: 100%) - 100%
3. Compliance with QCCP - (Realization: 100% | Target: 100%) - 100%
4. PQD publication activities (Realization: 100% | Target: 100%) - 100%

Realisasi | Realization: **99,51%**
Target | Target: **99%**

Persentase Ketepatan Waktu Proses Penyelesaian Transaksi Bursa
Percentage of Timeliness of Exchange Transaction Settlement Process

99,37%

Terdapat keterlambatan proses settlement pada tanggal 4 Mar 2024, 24 Jun 2024, dan 22 November 2024.
There were delays in the settlement process on March 4, 2024, June 24, 2024, and November 22, 2024.

Realisasi | Realization: **99,37%**
Target | Target: **100%**

Persentase Pemenuhan Kecukupan Agunan
Percentage of Collateral Adequacy Fulfillment

100%

Tidak ada margin call yang dilakukan terhadap AK. Seluruh Anggota Kliring (AK) berhasil memenuhi kecukupan agunan.
No margin calls were made against AK. All Clearing Members (AK) successfully fulfilled collateral adequacy.

Realisasi | Realization: **100%**
Target | Target: **100%**

Persentase Ketepatan Waktu Ketersediaan Parameter Risiko
Percentage of Timeliness of Risk Parameter Availability

100%

Publikasi parameter risiko terkait haircut, Efek Tidak Dijamin (ETD) dan Transaksi Dipisahkan (TD) dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan POJK.
The publication of risk parameters related to haircuts, Unsecured Effects (ETD) and Separate Transactions (TD) is carried out in a timely manner in accordance with POJK provisions.

Realisasi | Realization: **100%**
Target | Target: **100%**

Persentase Ketersediaan (Availability) Sistem - Sistem Utama
System Availability Percentage - Main System

100,24%

Sistem-sistem utama KPEI berjumlah 6 (enam) yaitu Razor, e-CLEARs, Middleware, PDC, SKD, dan MKBD.
IDClear has six main systems, namely Razor, e-CLEARs, Middleware, PDC, SKD, and MKBD.

Realisasi | Realization: **99,64%**
Target | Target: **99,4%**

Penyelesaian Milestones Rencana Kerja dalam Program Strategis
Completion of Milestones in the Strategic Program Work Plan

100%

- Pengembangan Penyelesaian AK dalam Transaksi Ekuiti
- Pembaruan Sistem Kliring dan Risk Management
- Proposal Pengaturan dan Pengawasan Transaksi Repo oleh KPEI
- Pengembangan Layanan CCP Repo - Konsep dan Spesifik
- Pengembangan Integrasi Pelaporan Tripartit Repo ke Sistem PLTE BEI dan ORCHD KSEI
- Pengembangan Penyelesaian Transaksi Derivatif Menggunakan SRE KSEI
- Upgrade Sistem MKBD Realisasi: 7 | Target: 7

1. Development of AK Settlement in Equity Transactions
2. Updating of the Clearing and Risk Management System
3. Proposal for the Regulation and Supervision of Repo Transactions by IDClear
4. Development of CCP Repo Services - Concept and Specifications
5. Development of Tripartite Repo Reporting Integration into the BEI PLTE System and KSEI ORCHD
6. Development of Derivatives Transaction Settlement Using KSEI SRE
7. Upgrade of MKBD System Realization: 7 | Target: 7

Waktu Pemulihan Sistem Utama Setelah Gangguan
Main System Recovery Time After Disruption

100% Frekuensi pelaksanaan simulasi 2 (dua) kali setahun dan target pemulihan 2 (dua) jam per kejadian.
100% Frequency of simulation implementation twice a year and recovery target of two hours per incident.

Realisasi: 2 jam per kejadian (simulasi)
Realization: 2 hours per incident (simulation)
Target: 2 jam per kejadian
Target: 2 hours per incident

RENCANA KERJA UTAMA KPEI 2025

KPEI menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2025, yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor SR-33/FM-1/2024. Rencana kerja disusun untuk mendukung transformasi kelembagaan, memperkuat peran sebagai CCP, serta merespons dinamika kebutuhan pasar modal dan pasar keuangan secara progresif. Setiap rencana kerja dikembangkan secara terintegrasi, dengan fokus pada penguatan kapabilitas sistem, efisiensi proses, tata kelola risiko, digitalisasi, serta pengembangan sumber daya dan organisasi.

Perspektif *Stakeholders* dan Finansial

1. Pengembangan Modul Repo - *Triparty Repo* SBN (*Multiyears*: 2024 - 2025).
2. Pengembangan Sistem Kliring dan *Sistem Risk Management* Derivatif Keuangan (*Multiyears*: 2024 - 2025).
3. Pengembangan Sistem e-IPO untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) (*Multiyears*: 2024 - 2025).
4. Pengembangan Sistem *Collateral Management* Terintegrasi untuk OTC Derivatif SBNT, Transaksi Bilateral dan *Triparty Repo* (*Multiyears*: 2020 - 2025).
5. Pengembangan Sistem *Collateral Management* Terintegrasi untuk Pasar Ekuitas dan SBL serta Konektivitas dengan Bank, KSEI dan PEI (2025).
6. Penyusunan Spesifikasi Bisnis *Collateral Management System* untuk CCP Repo (2025).

Perspektif *Internal Business Process*

1. Integrasi Pelaporan *Triparty Repo* ke Sistem PLTE BEI dan SFT KSEI (*Multiyears*: 2023 - 2025).
2. Pengembangan Penyelesaian Level Anggota Kliring (AK) dalam Transaksi Ekuitas (*Multiyears*: 2023-2025).
3. Pembaruan Sistem Kliring dan *Risk Management* (*Multiyears*: 2023 - 2027).
4. Penyempurnaan Mekanisme Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Bursa (2025).
5. Stratifikasi Partisipan Transaksi Efek (2025).
6. Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi OSROPASI (2025).

Perspektif *Learning and Growth*

1. *Assessment* PFMI dan Pendampingan *Roadmap* (QCCP *Recognition*) (2025).
2. Penyusunan *Master Plan* Perusahaan Periode 2026-2030 (2025).
3. Penyusunan Desain Tata Kelola TI terkait Perencanaan, *Design*, dan Pengembangan TI (2025).
4. *Review* dan Penyempurnaan Implementasi Manajemen Risiko Korporasi (2025).
5. Pengembangan *Alternative Arrangements* (2025).
6. Kajian Konsolidasi *Data Centre* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) dan *Alternate Site* (*Multiyears*: 2024 - 2025).

IDCLEAR'S 2025 KEY WORK PLAN

IDClear has established its 2025 Annual Work Plan and Budget (RKAT), which has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through Letter No. SR-33/FM-1/2024. This work plan is designed to support institutional transformation, strengthen its role as a CCP, and respond progressively to the evolving needs of the capital and financial markets. Each initiative is developed in an integrated manner, focusing on enhancing system capabilities, streamlining processes, strengthening risk governance, accelerating digitalization, and developing human resources and organizational capacity.

Stakeholders and Financial Perspectives

1. Developing the Repo Module - *Triparty Repo* for Government Securities (*Multiyear*: 2024-2025).
2. Developing the Clearing and Risk Management Systems for Financial Derivatives (*Multiyear*: 2024-2025).
3. Developing the e-IPO System for Debt and Sukuk Securities (EBUS) (*Multiyear*: 2024-2025).
4. Developing the Integrated Collateral Management System for OTC SBNT Derivatives, Bilateral Transactions, and *Triparty Repo* (*Multiyear*: 2020-2025).
5. Developing the Integrated Collateral Management System for the Equities and SBL Market, and Connectivity with Banks, KSEI, and PEI (2025).
6. Preparing the Business Specifications for the Collateral Management System for CCP Repo (2025).

Internal Business Process Perspective

1. Integrating *Triparty Repo* Reporting with the PLTE System of IDX and the SFT System of KSEI (*Multiyear*: 2023-2025).
2. Developing Clearing Member (AK)-Level Settlement in Equity Transactions (*Multiyear*: 2023-2025).
3. Upgrading the Clearing and Risk Management System (*Multiyear*: 2023-2027).
4. Enhancing the Guarantee and Settlement Mechanism for Exchange Transactions (2025).
5. Stratification of Securities Transaction Participants (2025).
6. Developing the Integrated Supervision System (OSROPASI) (2025).

Learning and Growth Perspective

1. Conducting PFMI Assessment and Roadmap Assistance for QCCP Recognition (2025).
2. Preparing the Corporate Master Plan for the 2026-2030 Period (2025).
3. Designing an IT Governance Design related to IT Planning, Design, and Development (2025).
4. Reviewing and Enhancing the Implementation of Corporate Risk Management (2025).
5. Developing Alternate Settlement (2025).
6. Studying the Consolidation of *Data Centre* (DC), *Disaster Recovery Centre* (DRC), and *Alternate Site* (*Multiyear*: 2024-2025).

7. Upgrade Komponen e-Clears Tahap III (*Multiyears: 2023 - 2025*).
8. Penambahan Baremetal Server (*Multiyears: 2024-2025*).
9. Penambahan Storage (*Multiyears: 2024 - 2025*).
10. Penambahan Server Hypervisor (*Multiyears: 2024 - 2025*).
11. Peremajaan Database untuk Aplikasi Bisnis (*Multiyears: 2025*).
12. Review dan Kajian Strategi Upgrade Teknologi Terhadap Sistem Utama KPEI (*Multiyears: 2024 - 2025*).
13. Otomasi Operasional Harian dan Penyempurnaan Monitoring Tools Sistem Utama e-Clears (*Multiyears: 2025 - 2026*).
14. Penyusunan Roadmap Cyber Security Management (*Multiyears: 2025 - 2026*).
15. Pengembangan Enterprise Resource Planning (ERP) (*Multiyears: 2025 - 2026*).
16. Program Khusus Peningkatan Kompetensi Karyawan KPEI (2025).
17. Pengembangan Knowledge Management System (*Multiyears: 2024 - 2025*).
18. Kajian dan Implementasi Struktur Organisasi Transisi Kedua dalam Rangka Mendukung Perluasan Bisnis Perusahaan (2025).

7. Upgrading e-Clears Components – Phase III (Multiyear: 2023–2025).
8. Adding Baremetal Servers (Multiyear: 2024–2025).
9. Expanding Storage Capacity (Multiyear: 2024–2025).
10. Adding Hypervisor Servers (Multiyear: 2024–2025).
11. Modernizing Databases for Business Applications (Multiyear: 2025).
12. Reviewing and Assessing Technology Upgrade Strategy for IDClear's Core Systems (Multiyear: 2024–2025).
13. Automating Daily Operations and Enhancing Monitoring Tools for the Core e-Clears System (Multiyear: 2025–2026).
14. Preparing the Cyber Security Management Roadmap (Multiyear: 2025–2026).
15. Developing Enterprise Resource Planning (ERP) (Multiyear: 2025–2026).
16. Special Program for Enhancing IDClear Employee Competency (2025).
17. Developing the Knowledge Management System (Multiyear: 2024–2025).
18. Studying and Implementing the Second Transitional Organizational Structure to Support Business Expansion (2025).

PROGRAM STRATEGIS KPEI TAHUN 2025

Program strategis KPEI tahun 2025 adalah sebagai berikut:

IDCLEAR'S STRATEGIC PROGRAMS FOR 2025

IDCclear's strategic programs for 2025 are as follows:

No.	Program/Rencana Kerja Work Program/Plan	Milestone Tahun 2025 Milestones for 2025
1	Pengembangan Penyelesaian Level Anggota Kliring (AK) dalam Transaksi Ekuitas (Omnibus) Development of Clearing Member (CM)-Level Settlement in Equity Transactions (Omnibus)	Sistem ready System ready
2	Pembaruan Sistem Kliring dan Risk Management Renewal of Clearing and Risk Management System	Analisis dan desain Analysis and design
3	Pengembangan Triparty Repo SBN Development of Government Securities (SBN) Triparty Repo	Sistem ready untuk ruang lingkup: 1. Pengembangan modul repo SBN 2. Pengembangan collateral management terintegrasi (ICMS) untuk transaksi Bilateral dan Triparty repo System ready for the following scope: Development of the Government 1. Securities (SBN) repo module 2. Development of integrated collateral management system (ICMS) for Bilateral and Triparty repo transactions
4	Pengembangan Central Counterparty (CCP) Repo Development of Central Counterparty (CCP) for Repo	Dokumen spesifikasi bisnis. Business specification document.
5	Penyempurnaan Mekanisme Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi Bursa Enhancement of Exchange Transaction Guarantee and Settlement Mechanism	Usulan mekanisme dan pengaturan penjaminan dan penyelesaian transaksi Bursa. Proposed mechanism and arrangements for exchange transaction guarantee and settlement.
6	Stratifikasi partisipan transaksi efek Stratification of Securities Transaction Participants	Usulan mekanisme dan pengaturan OJK - SRO Proposed mechanism and arrangements between OJK and SRO
7	Pengembangan e-IPO EBUS Development of e-IPO for EBUS	Pengembangan sistem System development
8	Pengembangan alternative arrangements Development of Alternative Arrangements	Sistem ready System ready
9	Pengembangan pengawasan terintegrasi OSROPASI Development of Integrated Supervision for OSROPASI	Ketersediaan alert, analisa transaksi, parameter transaksi dipisahkan, dan prosedur. Availability of alerts, transaction analysis, separated transaction parameters, and procedures.

*Program/rencana kerja ini diusulkan sebagai program strategis tahun 2025
*This program/work plan is proposed as a strategic program for 2025.

Kinerja Operasional

OPERATIONAL PERFORMANCE

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA

Sepanjang tahun 2024, rata-rata Nilai Penyelesaian Transaksi Harian tercatat sebesar Rp4,24 triliun. Dengan Total Nilai Penyelesaian Transaksi di Bursa mencapai Rp1.004,16 triliun, meningkat sebesar Rp Rp34,93 triliun atau setara 3,60% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat Rp969,23 triliun.

Volume Perdagangan Total tercatat sebanyak 1.604,42 miliar saham, dengan rata-rata 6,77 miliar saham diperdagangkan setiap hari. Tingkat efisiensi rata-rata penyelesaian transaksi harian di bursa mengalami peningkatan dari 55,17% pada 2023 menjadi 57,30% pada 2024.

SECURITIES EXCHANGE TRANSACTION SETTLEMENT

Throughout 2024, average Daily Transaction Settlement Value recorded by Rp4.24 trillion. The Total Securities Exchange Transaction Settlement Value amounted to Rp1,004.16 trillion, marking an increase of Rp34.93 trillion or 3.60% compared to 2023, which recorded Rp969.23 trillion.

The Total Trading Volume was recorded at 1,604.42 billion shares, with a daily average of 6.77 billion shares traded. The average efficiency rate of daily exchange transaction settlements increased from 55.17% in 2023 to 57.30% in 2024.

Metrik Metric	Penyelesaian Transaksi Bursa Securities Exchange Transaction Settlement		Efisiensi Efficiency	
	Volume (lembar) Volume (shares)	Nilai (Rp) Value (RP)	Volume (%) Volume (%)	Nilai (%) Value (%)
2024				
Total Total	1.604.422.648.400	1.004.159.048.071.900	61,25	57,36
Rata-rata harian Daily average	6.769.715.816	4.236.958.008.742	60,83	57,30
2023				
Total Total	1.735.244.661.200	969.226.943.658.300	61,75	55,21
Rata-rata harian Daily average	7.260.437.913	4.055.342.860.495	61,41	55,17
2022				
Total Total	1.971.028.354.801	1.294.445.333.732.000	64,13	57,32
Rata-rata harian Daily average	8.012.310.385	5.261.972.901.350	63,70	57,19

ALTERNATE CASH SETTLEMENT

Sepanjang tahun 2024, KPEI mencatat mencatat volume penyelesaian efek melalui mekanisme *Alternate Cash Settlement* (ACS) sebesar 7,59 juta lembar saham atau Rp18,98 miliar, naik 33,09% dari 80,14 juta saham atau Rp14,26 miliar di tahun 2023. Sementara, rata-rata harian untuk mekanisme ACS mencapai 0,38 juta lembar saham atau Rp0,95 miliar, dibandingkan tahun 2023 sebanyak 3,64 juta lembar saham atau Rp0,65 miliar.

Selama tahun 2024, Frekuensi transaksi bursa yang dilakukan oleh AK melalui mekanisme ACS adalah 20 kali serah dan 68 kali terima.

ALTERNATE CASH SETTLEMENT

Throughout 2024, IDClear recorded the volume of securities settlement through the Alternate Cash Settlement (ACS) mechanism of 7.59 million shares or Rp18.98 billion, an increase of 33.09% from 80.14 million shares or Rp14.26 billion in 2023. Meanwhile, the average daily volume for the ACS mechanism reached 0.38 million shares or Rp0.95 billion, compared to 3.64 million shares or Rp0.65 billion in 2023.

During 2024, the frequency of exchange transactions conducted by CM through the ACS mechanism totaled 20 delivery transactions and 68 receipt transactions.

Metrik Metric	Alternate Cash Settlement		Efisiensi Efficiency	
	Volume (Iembar) Volume (shares)	Nilai (Rp) Value (Rp)	Serah Handovers	Terima Receipts
2024				
Total Total	7.591.200	18.977.986.875	20	68
Rata-rata harian Daily average	379.560	948.899.344	1	3
2023				
Total Total	80.144.100	14.259.464.250	24	76
Rata-rata harian Daily average	3.642.914	648.157.466	1	3
2022				
Total Total	228.332.200	146.198.804.000	52	202
Rata-rata harian Daily average	4.858.132	3.110.612.851	1	4

FASILITAS INTRADAY

Dalam rangka menyediakan fasilitas pembiayaan (*intraday facility*) kepada KPEI. Perusahaan berkolaborasi dengan enam bank pembayaran yaitu, Bank Permata, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan Bank CIMB Niaga. Dengan fasilitas intraday, KPEI dapat memenuhi hak terima dana AK secara seketika, setelah kewajiban serah efek kepada KPEI dilaksanakan oleh AK tersebut. Secara agregat, nilai pagu kredit dari fasilitas ini mencapai Rp6 triliun per hari.

Di tahun 2024, fasilitas *intraday* yang dimanfaatkan oleh KPEI berjumlah Rp295,30 triliun, turun sebesar Rp25,69 triliun atau setara dengan 8,00% jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah Rp320,99 triliun. Sementara itu, total biaya yang dikeluarkan untuk fasilitas tersebut mencapai Rp3,93 miliar di tahun 2024, sementara di tahun 2023 nilainya mencapai sebesar Rp4,33 miliar.

INTRADAY FACILITY

To provide financing facilities (*intraday facility*) to IDCclear. The Company collaborates with six payment banks—Bank Permata, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, and Bank CIMB Niaga. With the intraday facility, IDCclear can fulfill the CM's right to receive funds immediately, after the obligation to hand over securities to IDCclear is carried out by the CM. In aggregate, the credit limit value of this facility reaches Rp6 trillion per day.

In 2024, IDCclear utilized a total of Rp295.30 trillion in intraday facilities, a decrease of Rp25.69 trillion or 8.00% compared to 2023, which recorded Rp320.99 trillion. Meanwhile, the total cost spent on the facility reached Rp3.93 billion in 2024, while in 2023 the value reached Rp4.33 billion.

Metrik Metric	Fasilitas Intraday Intraday Facility	
	Penggunaan (Rp) Usage (Rp)	Biaya (Rp) Cost (Rp)
2024		
Total Total	295.300.107.427.713	3.927.757.784
Rata-rata harian Daily average	1.245.992.014.462	16.572.817
2023		
Total Total	320.991.224.041.064	4.333.097.276
Rata-rata harian Daily average	1.331.913.792.702	17.979.657
2022		
Total Total	483.913.838.922.498	7.637.934.682
Rata-rata harian Daily average	1.967.129.426.514	31.048.515

PINJAM MEMINJAM EFEK

KPEI menyediakan layanan Pinjam Meminjam Efek (PME) bagi Anggota Kliring, yang pemanfaatannya mencapai Rp54,11 miliar pada tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 25,91% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat total nilai transaksi sebesar Rp73,03 miliar.

Sementara itu, volume PME juga mengalami penurunan dari 22,15 juta lembar di tahun 2023 menjadi 11,75 juta lembar di tahun 2024, atau turun sebesar 46,97%.

Adapun rata-rata harian untuk nilai transaksi PME di tahun 2024 adalah sebesar Rp147,84 juta, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp200,07 juta.

SECURITIES BORROWING AND LENDING

IDClear provides Securities Borrowing and Lending (SBL) services for Clearing Members, with utilization reaching Rp54.11 billion in 2024, reflecting a decline of 25.91% compared to 2023, which recorded a total transaction value of Rp73.03 billion.

Meanwhile, the SBL volume also decreased from 22.15 million shares in 2023 to 11.75 million shares in 2024, representing a drop of 46.97%.

The average daily transaction value for SBL in 2024 was Rp147.84 million, compared to Rp200.07 million in the previous year.

Metrik Metric	Pinjam Meminjam Efek Securities Borrowing and Lending			
	Total Total			
	Nilai (Rp) Value (Rp)	Volume (lembar) Volume (shares)	Frekuensi (kali) Frequency (times)	Jumlah Hari Total Days
2024				
Total Total	54.108.093.700	11.745.700	165	366
Rata-rata harian Daily average	147.836.321	32.092		
2023				
Total Total	73.026.236.300	22.149.800	103	365
Rata-rata harian Daily average	200.071.880	60.684		
2022				
Total Total	60.694.898.500	116.100.200	195	365
Rata-rata harian Daily average	1.990.749.484	3.771.435		

PENGELOLAAN AGUNAN

Per 31 Desember 2024, KPEI mengelola dana senilai Rp33,13 triliun dalam bentuk agunan dari Anggota Kliring dan para nasabahnya. Jumlah ini meningkat sebesar Rp1,29 triliun atau 4,05% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp31,83 triliun.

Dari total agunan tersebut, sebesar Rp26,20 triliun atau setara 79,11% disimpan dalam bentuk *online*, sementara sisanya sebesar Rp6,92 triliun atau 20,89% dalam bentuk *offline*.

Komposisi agunan *online* per 31 Desember 2024 terdiri atas:

1. 94,89% Saham
2. 2,86% Obligasi
3. 2,25% Uang Tunai

COLLATERAL MANAGEMENT

As of December 31, 2024, IDClear managed funds amounting to Rp33.13 trillion in the form of collateral from Clearing Members and their customers. This represents an increase of Rp1.29 trillion or 4.05% compared to 2023, which recorded Rp31.83 trillion.

Of the total collateral, Rp26.20 trillion, or 79.11%, was held in online form, while the remaining Rp6.92 trillion, or 20.89%, was held offline.

As of December 31, 2024, the composition of online collateral was as follows:

1. 94.89% In Stocks
2. 2.86% In Bonds
3. 2.25% In Cash

Sedangkan agunan *offline* terdiri atas:

1. 45,23% Deposito Berjangka
2. 35,40% Bank Garansi
3. 17,86% Agunan Minimum Kas
4. 1,51% Seat BEI

Pada tahun 2024, KPEI juga telah menambahkan reksa dana sebagai salah satu opsi agunan *offline*. Selain itu, nilai maksimum bank garansi kini telah ditetapkan sesuai dengan kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI), guna memperkuat tata kelola dan manajemen risiko dalam sistem pengelolaan agunan.

Meanwhile, the composition of offline collateral was as follows:

1. 45.23% In Time Deposits
2. 35.40% In Bank Guarantees
3. 17.86% In Minimum Cash Collateral
4. 1.51% in IDX seats

In 2024, IDCclear also added mutual funds as an option for offline collateral. Additionally, the maximum value of bank guarantees is now determined based on Banking Classification by Core Capital (KBMI) category, to strengthen governance and risk management in the collateral management system.

Pengelolaan Agunan Collateral Management			
Jenis Instrumen Type of Collateral	Nilai Agunan (Rp) Collateral Value (Rp)		
	2024	2023	2022
ONLINE			
Saham Stocks	24.865.442.833.036	23.240.766.278.554	22.788.097.992.429
Obligasi Bonds	748.447.762.475	700.095.253.726	358.375.921.476
Uang Cash	590.443.847.906	544.417.244.719	924.578.015.903
Total Online Total Online	26.204.334.443.418	24.485.278.776.999	24.071.051.929.808
OFFLINE			
Bank Garansi Bank Guarantees	2.450.257.280.000	2.485.209.490.000	2.004.853.550.000
Deposito Berjangka Time Deposits	3.129.980.455.289	3.692.040.949.864	4.345.966.608.861
Agunan Minimum Kas Minimum Cash Collateral	1.235.900.972.686	1.163.105.350.293	1.225.467.645.038
Seat BEI IDX Seats	104.625.000.000	9.100.000.000	9.400.000.000
Total Offline Total Offline	6.920.763.707.976	7.349.455.790.157	7.585.687.803.899
Total Agunan Total Collateral	33.125.098.151.394	31.834.734.567.156	31.656.739.733.708

DANA JAMINAN

Fungsi utama KPEI adalah melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian, KPEI perlu memanfaatkan berbagai sumber keuangan salah satunya adalah Dana Jaminan. Dana ini dikumpulkan dari pungutan pada nilai persentase tertentu yang diberlakukan kepada AK atas nilai transaksi bursa yang mereka lakukan. Selain itu, AK yang baru bergabung juga dikenakan pungutan kontribusi awal. Adapun Kontribusi Dana Jaminan untuk setiap produk KPEI berbeda-beda, diatur oleh Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi. Dana Jaminan untuk transaksi efek bersifat ekuitas adalah 0,01% dari nilai transaksi, untuk transaksi KBIE 0,0006%, untuk transaksi efek bersifat surat utang dan sukuk 0,00125%, dan untuk transaksi kontrak opsi bersifat ekuitas 0,01%.

GUARANTEE FUND

IDCclear's primary function is to provide a guarantee for the settlement of exchange transactions. To fulfill this role, IDCclear utilizes various financial sources, one of which is the Guarantee Fund. This fund is collected through levies imposed on Clearing Members (AK) at a certain percentage of their exchange transaction value. In addition, newly joining Clearing Members are subject to an initial contribution fee. The contribution to the Guarantee Fund varies depending on the IDCclear product and is regulated under OJK Circular Letter No. 8/SEOJK.04/2020 on Guarantee Fund Contributions Based on Transaction Value. The Guarantee Fund for equity securities transactions is 0.01% of the transaction value, for KBIE transactions 0.0006%, for debt securities and sukuk transactions 0.00125%, and for equity option contract transactions 0.01%.

KPEI menginvestasikan Dana Jaminan tersebut dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito berjangka, sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Untuk menentukan porsi investasi Dana Jaminan tersebut, serta memastikan tata kelola dan kesesuaiannya dengan profil risiko KPEI, telah dibentuk Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko (KKPR).

Per 31 Desember 2024, Dana Jaminan yang dikelola KPEI mencapai Rp8,52 triliun, meningkat sebesar Rp0,78 triliun atau 10,09% dibandingkan dengan tahun 2023.

Dana Jaminan per 31 Desember 2024 terdiri atas Rp7.932,33 miliar dari Deposito Berjangka, Rp592,33 miliar dari SBN, dan Rp68,90 juta dari Giro.

Penempatan dana jaminan KPEI di tahun 2024 adalah 93,05% dalam bentuk deposito berjangka, 6,95% SBN, dan kurang dari 0,01% dalam giro.

IDClear invests the Guarantee Fund in the form of Government Securities (SBN) and time deposits, in accordance with OJK Regulation No. 26/POJK.04/2014 on the Guarantee of Exchange Transaction Settlement. To determine the investment allocation of the Guarantee Fund and ensure proper governance and alignment with IDClear's risk profile, a Credit Policy and Risk Management Committee (KKPR) has been established.

As of December 31, 2024, the Guarantee Fund managed by IDClear reached Rp8.52 trillion, an increase of Rp0.78 trillion or 10.09% compared to 2023.

Consisted of Rp7,932.33 billion in Time Deposits, Rp592,33 billion in Government Securities (SBN), and Rp68,90 million in Current Accounts.

IDClear's Guarantee Fund placement in 2024 was 93.05% in time deposits, 6.95% in SBN, and less than 0.01% in current accounts.

Investasi Dana Jaminan Guarantee Funds Investment			
Jenis Instrumen Type of Collateral	Nilai (Rp)		
	2024	2023	2022
Deposito Berjangka Time Deposits	7.932.331.177.901	7.372.770.243.867	6.930.114.380.565
Surat Berharga Negara Government Securities	592.329.588.200	370.328.325.000	76.750.800.000
Giro Current Account	68.903.390	21.902.658	88.364.766
Total Total	8.524.729.669.492	7.743.120.471.525	7.006.953.545.331
Proporsi (%) Proportion (%)			
Deposito Berjangka Time Deposits	93,05	95.22	98.90
Surat Berharga Negara Government Securities	6,95	4,78	1,10
Giro Current Account	0,00	0,00	0,00
Total Total	100,00	100,00	100,00

TRIPARTY REPO

KPEI telah menawarkan layanan *Triparty Repo* sejak diluncurkannya layanan tersebut pada tahun 2022. Per 31 Desember 2024, terdapat belasan peserta institusional yang menggunakan layanan ini.

TRIPARTY REPO

IDClear has offered Triparty Repo services since the launch of the service in 2022. As of December 31, 2024, there were over a dozen institutional participants utilizing this service.

Transaksi Triparty Repo pada tahun 2024 mencapai total sebesar Rp531,32 miliar, meningkat 5,47% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp503,78 miliar.

Volume saham yang terlibat dalam transaksi Triparty Repo juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari 19,81 miliar lembar pada 2023 menjadi 65,34 miliar lembar pada 2024, atau meningkat sebesar 229,75%.

Triparty Repo transactions in 2024 reached a total of Rp531.32 billion, marking a 5.47% increase compared to Rp503.78 billion in 2023.

The volume of shares involved in Triparty Repo transactions also experienced significant growth, from 19.81 billion shares in 2023 to 65.34 billion shares in 2024, an increase of 229.75%.

Tahun Year	Triparty Repo	
	Total	
	Nilai (Rp) Value (Rp)	Volume (lembar) Volume (shares)
2024	531.321.223.425	65.338.001.800
2023	503.781.817.000	19.814.437.100
2022	623.100.350.000	2.696.137.300

PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Layanan kliring dan penjaminan produk *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) oleh KPEI secara resmi mulai beroperasi pada 30 September 2024, yang menjadi penanda inisiatif terbaru perluasan peran KPEI sebagai CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Mengingat implementasi CCP PUVA dilakukan pada akhir kuartal III, nilai transaksi DNDF, yang dikliringkan hingga akhir periode 2024 masih relatif terbatas, yaitu sebesar USD382 juta dengan anggota kliring sebanyak 8 (delapan) *pilot bank*, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Transaksi bilateral yang telah didaftarkan untuk dikliringkan melalui CCP memiliki tingkat efisiensi *netting* posisi yang tercapai berdasarkan jumlah transaksi dibandingkan posisi yang terbentuk sebesar 13%. Di samping itu, efisiensi *netting* juga terbentuk sebesar 16% berdasarkan nilai transaksi dalam USD dibandingkan posisi transaksi setelah proses *netting*. Selain itu, proses penyelesaian setelah dana yang dilakukan secara *netting* dapat memberikan dampak positif bagi Anggota CCP yang memiliki transaksi DNDF cukup besar. Hal ini disebabkan, karena proses penyelesaian transaksi yang sebelumnya dilakukan secara bilateral, kini dilakukan secara *netting* dimana Anggota CCP hanya memiliki satu nilai hak/kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi yang dikliringkan melalui CCP dapat menghitung eksposur secara *netting* dan diharapkan meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan mengurangi risiko sistemik.

MONEY MARKET AND FOREIGN EXCHANGE MARKET

IDCclear's Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) clearing and guarantee services officially began operating on September 30, 2024, marking the latest initiative to expand IDCclear's role as a CCP in the Money and Foreign Exchange Markets (PUVA). Given that the implementation of CCP PUVA will take place at the end of the third quarter, the value of DNDF transactions is expected to increase to expand IDCclear's role as a CCP in the money and foreign exchange markets (PUVA). Given that the implementation of CCP PUVA was carried out at the end of the third quarter, the value of Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) transactions, which were cleared until the end of the 2024, remains relatively limited, amounting to USD382 million with 8 (eight) pilot banks participating in the clearing process, namely PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Bilateral transactions registered for clearing through the CCP achieved a netting efficiency rate of 13% based on the number of transactions compared to the positions formed. Additionally that, netting efficiency also amounts to 16% based on the transaction value in USD compared to the transaction position after the netting process. In addition, the settlement process of funds settlement carried out on a netting basis can have a positive impact on CCP Members who have large DNDF transactions. This is because the settlement process of transactions that were previously carried out bilaterally, is now carried out on a netting basis where CCP Members only have one right / obligation value. This shows that transactions cleared through the CCP can calculate exposure on a netting basis and hopefully increase efficiency in transactions and reduce systemic risk.

DATA STATISTIK CCP PUVA

CCP PUVA STATISTICAL DATA

Total Transaksi CCP PUVA

Total CCP PUVA Transactions

(30 September 2024 – 31 Desember 2024)
(September 30, 2024 – December 31, 2024)

Jenis Instrumen Types of Instruments	Jumlah Transaksi Number of Transactions	Jumlah Nett Posisi Net Position Amount	Nosional Transaksi – USD Notional Transactions – USD	Nosional Nett Posisi – USD Notional Net Position – USD	Efisiensi Netting Netting Efficiency
DNDF	220	192	382,000,000.00	322,000,000.00	13%

Sumber Keuangan

Financial Resources

(Rp Miliar/Rp Billion)

Default Fund Contribution	SITG	Collateral CM
40.257.036.971,12	200.000.000.000,00	99.786.954.929,48

(Rp Juta/Rp Million)

Realisasi Bunga Default Fund (Periode Okt – Des 2024) Realization of Default Fund Interest (October – December 2024 period)	Realisasi Bunga Initial Margin Cash (Periode Nov – Des 2024) Realization of Initial Margin Cash Interest (Dec 2024 Period)
468.861.246,00	106.440.931,00

Anggota CCP PUVA

Member of CCP PUVA

No	Institusi Institutions
1	PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk
2	PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk
3	PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk
4	PT Bank Central Asia Tbk
5	PT Bank Permata Tbk
6	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
7	PT Bank CIMB Niaga Tbk
8	PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Tinjauan Keuangan

FINANCIAL OVERVIEW

Pembahasan dan analisis kinerja keuangan berikut mengacu pada Laporan Keuangan KPEI per 31 Desember 2024 serta laporan auditor independen yang disertakan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja.

Menurut opini KAP, Laporan Keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, mencerminkan posisi keuangan KPEI per 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun setiap interpretasi terhadap analisis berikut perlu mempertimbangkan informasi yang tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan ini.

The following discussion and analysis of financial performance refer to IDClear's Financial Statements as of December 31, 2024, along with the independent auditor's report included in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja.

In the opinion of KAP, the Financial Statements have been fairly presented in all material respects, reflecting the financial position of IDClear as of December 31, 2024, as well as its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Any interpretation of the following analysis should consider the information presented in the Notes to the Financial Statements, which form an integral part of this Annual Report.

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan

Di tengah berbagai tantangan yang muncul akibat gejolak perekonomian global, perkembangan pasar modal Indonesia yang sejalan dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2024 turut memengaruhi pencapaian kinerja finansial KPEI.

Pendapatan Revenues

Pendapatan 2023-2024
Revenues 2023-2024

Deskripsi Description	Tahun (Rp) Year (Rp)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	
Pendapatan Revenues			
Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Efek Clearing and settlement guarantee services for securities transactions	537.355.251.406	459.891.868.714	16,84%
Jasa Pengelolaan Dana Jaminan dan Agunan Guarantee and Collateral Management Services	46.805.265.380	33.426.789.423	40,02%
Jasa Kliring Transaksi Derivatif Derivatives Clearing Services	1.408.062.677	-	N/A
Jasa Lainnya Others	1.015.664.180	877.167.075	15,79%
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi Share of Net Profit of Associates	-	3.440.139.818	(100,0%)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

Revenues

Amid various challenges stemming from global economic turbulence, the development of the Indonesian capital market, aligned with the stability of national economic growth throughout 2024, has influenced IDClear's financial performance achievements.

Pendapatan 2023-2024

Revenues 2023-2024

Deskripsi Description	Tahun (Rp) Year (Rp)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	
Pendapatan Investasi Investment Income	107.217.540.201	84.938.753.293	26,23%
Keuntungan Selisih Kurs - Neto Exchange Rate Gain - Net	1.460.870.801	1.051.473.800	38,94%
Pendapatan Dividen Dividend Income	379.564.383	254.721.735	49,01%
Pendapatan Denda Penalty Income	1.968.724	1.723.165.066	(99,89%)
Pendapatan Lainnya Other Income	1.476.090.279	2.576.309.594	(42,71%)
Pendapatan Revenue	697.120.278.031	588.180.388.518	18,52%

Tahun 2024, KPEI mencatatkan Pendapatan sebesar Rp697,12 miliar, naik sebesar Rp108,94 miliar atau 18,52% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp588,18 miliar. Pendapatan dari Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Efek tercatat sebesar Rp537,36 miliar, mengalami kenaikan 16,84% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp459,89 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh Rata-rata Nilai Transaksi Harian Bursa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp12,87 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp10,75 triliun.

Pendapatan dari Jasa Pengelolaan Dana Jaminan dan Agunan tahun 2024 sebesar Rp46,80 miliar, mengalami kenaikan 40,02% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp33,43 miliar. Sehubungan implementasi *Central Counterparty* (CCP) Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di tahun 2024, terdapat jenis pendapatan baru yaitu Jasa Kliring Transaksi Derivatif yang tercatat sebesar Rp1,41 miliar.

Pendapatan dari Jasa Lainnya sebesar Rp1,02 miliar, 15,79% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp877 juta. Hal ini terutama berkontribusi oleh pendapatan atas layanan jasa Pinjam Meminjam Efek dan *Triparty Repo*.

Selain itu, pada tahun 2024 tidak terdapat bagian laba bersih dari entitas asosiasi. Pendapatan investasi tercatat sebesar Rp107,22 miliar, mengalami kenaikan 26,23% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut berasal dari kenaikan penghasilan bunga jasa giro dan deposito berjangka serta penghasilan bunga instrumen obligasi. Selain itu terdapat pendapatan dividen sebesar Rp379,56 juta yang diperoleh dari PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI).

In 2024, IDCclear recorded revenues of Rp697.12 billion, an increase of Rp108.94 billion or 18.52% compared to 2023, which was recorded at Rp588.18 billion. Revenue from clearing and settlement guarantee services for securities transactions was recorded at Rp537.36 billion, an increase of 16.84% compared to 2023, which was recorded at Rp459.89 billion. This increase was due to the average daily transaction value of the Exchange in 2024, which was realized at Rp12.87 trillion compared to Rp10.75 trillion in 2023.

Revenue from Guarantee and Collateral Fund Management Services in 2024 amounted to Rp46.80 billion, an increase of 40.02% compared to 2023, which recorded Rp33.43 billion. In connection with the implementation of the Central Counterparty (CCP) for the Money and Foreign Exchange Market (PUVA) in 2024, there is a new type of revenue, namely Derivative Transaction Clearing Services, which amounted to Rp1.41 billion.

Revenue from Other Services amounted to Rp1.02 billion, an increase of 15.79% compared to 2023, which was recorded at Rp877 million. This was mainly contributed by revenue from Securities Lending and Triparty Repo services.

In addition, in 2024 there was no share of net profit from associated entities. Investment income was recorded at Rp107.22 billion, an increase of 26.23% from the previous year. This was due to an increase in interest income from current accounts and time deposits as well as interest income from bond instruments. In addition, there was dividend income of Rp379.56 million obtained from PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI).

Beban Expenses

Beban Tahun 2023-2024
Expenses for 2023-2024

Deskripsi Description	Tahun (Rp) Year (Rp)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	
Beban Expenses			
Gaji, Honor, dan Tunjangan Salaries, honorarium, and allowances	147.584.883.517	146.969.559.915	0,42%
Beban Kontribusi Tahunan ke OJK Annual fees to Indonesia OJK	87.987.636.546	74.129.373.782	18,69%
Beban Penyusutan Aset Tetap Depreciation expense of fixed asset	78.323.027.534	68.118.418.879	14,98%
Beban Pemeliharaan Teknologi Informasi Information technology maintenance expenses	71.760.267.972	66.342.548.775	8,17%
Beban Pengembangan Usaha Business development expenses	44.219.935.271	40.941.981.880	8,01%
Beban Administrasi Administrative expenses	44.781.842.761	39.251.151.034	14,09%
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi Share in loss of Associates	12.419.632.969	-	N/A
Amortisasi Aset Hak Guna Amortization rights of use asset	15.231.096.200	15.751.505.128	(3,30%)
Beban Konsultan Consultant fees	7.477.738.881	3.116.124.164	139,97%
Beban Lainnya Others expenses	2.645.728.181	4.978.499.963	(46,86%)
Total Beban Total expenses	512.431.789.832	459.599.163.520	11,50%

Terdapat peningkatan beban KPEI sebesar 11.50% dari Rp459,59 miliar di tahun 2023 menjadi Rp512,43 miliar di tahun 2024. Peningkatan beban di antaranya berasal dari beban konsultan, yang meningkat 139,97% menjadi Rp7,48 miliar, karena pada tahun 2024 terdapat kegiatan konsultasi terkait tata Kelola IT, kajian strategi sistem utama dan keamanan infrastruktur PUVa. Beban kontribusi tahunan ke OJK mengalami kenaikan sebesar 18,69% menjadi Rp87,99 miliar sejalan dengan kenaikan pendapatan KPEI. Selain itu, peningkatan pada beban penyusutan aset tetap sebesar 14,98% menjadi Rp78,32 miliar sehubungan dengan kapitalisasi aset tetap atas sistem TI yang digunakan dalam lingkup bisnis.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2024, KPEI berhasil mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp149,17 miliar, naik Rp43,19 miliar atau 40,75% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp105,98 miliar.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Di tahun 2024, KPEI mencatat penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar minus Rp9,05 miliar sedangkan pada tahun 2023 mencatatkan sebesar Rp2,10 miliar. Penghasilan ini berasal dari penurunan nilai wajar

There was an increase in IDCclear expenses of 11.50% from IDR 459.59 billion in 2023 to Rp512.43 billion in 2024. The increase in expenses came from consulting fees, which rose by 139.97% to Rp7.48 billion, due to consulting activities related to IT governance, main system strategy reviews, and PUVa infrastructure security in 2024. Annual contribution expenses to the OJK increased by 18.69% to Rp87.99 billion in line with the increase in IDCclear's revenue. Additionally, there was a 14.98% increase in depreciation expenses for fixed assets to Rp78.32 billion, related to the capitalization of fixed assets for IT systems used within the business scope.

Profit for the Year

As of December 31, 2024, IDCclear recorded a net profit for the year of Rp149.17 billion, an increase of Rp43.19 billion or 40.75% compared to 2023, which amounted to Rp105.98 billion.

Comprehensive Income for the Year

In 2024, IDCclear's recorded other comprehensive income for the current year after tax of minus Rp9.05 billion, while in 2023 it recorded Rp2.10 billion. This income stems from a decrease in the fair value of financial assets measured at

atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta penurunan nilai atas pengukuran kembali pada liabilitas imbalan kerja setelah pajak. Dengan demikian, total penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2024 mencapai Rp140,13 miliar.

fair value through other comprehensive income, as well as a decrease in the remeasurement of post-tax employee benefit liabilities. As a result, the total comprehensive income for the year in 2024 reached Rp140.13 billion.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Aset Asset

Tabel Laporan Aset Tahun 2023-2024
Table of Asset Report 2023-2024

Deskripsi Description	Tahun (Rp) Year (Rp)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	
Aset Assets			
Aset Lancar Current Assets			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash equivalents	796.154.636.149	908.470.295.469	(12,36%)
Investasi Investment	707.550.293.477	443.214.756.260	59,64%
Piutang Penyelesaian Transaksi Efek Securities transactions settlement receivables	1.671.150.505.200	1.982.087.120.800	(15,69%)
Piutang Usaha Trade receivables	98.475.264.542	85.536.887.212	15,13%
Piutang Lain-Lain Other receivables	12.372.444.292	9.503.587.799	30,19%
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka - Bagian Lancar Advances and prepaid expenses - current portion	32.403.122.591	36.766.969.162	(11,87%)
Uang Muka pada Entitas Asosiasi Advance Payment for Associated Entity	1.300.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	3.319.406.266.251	3.465.579.616.702	(4,22%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets			
Dana Pengaman Security funds	1.876.449.594	1.171.140.632	60,22%
Dana Disisihkan Sebagai Cadangan Reserved funds for Fund	399.437.509.117	194.137.716.957	105,75%
Investasi di Saham Investment in Shares	348.444.288.458	362.173.673.056	(3,79%)
Aset Tetap Fixed Assets	263.018.255.499	274.075.874.264	(4,03%)
Aset Hak Guna Right to Use Assets	43.450.060.873	31.288.162.346	38,87%
Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net	12.928.396.513	11.937.900.505	8,30%
Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka - Bagian Tidak Lancar Advances and Prepaid Expenses - Non-Current Portion	350.000.000	9.949.241.944	(96,48%)
Piutang Lain-Lain Other Receivables	3.036.433.837	2.851.928.269	6,47%
Aset Lain-Lain Other Assets	8.370.932.095	7.262.155.078	15,27%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.080.912.325.986	894.847.793.051	20,79%
Total Aset Total Assets	4.400.318.592.237	4.360.427.409.753	0,92%

Di tahun 2024, total aset KPEI mencapai Rp4,40 triliun. Komposisi aset per akhir tahun 2024 adalah 75,44% aset lancar, sementara sisanya merupakan aset tidak lancar.

Aset Lancar

Per 31 Desember 2024, jumlah aset lancar KPEI tercatat sebesar Rp3,32 triliun, dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3,47 triliun. Hal ini disebabkan oleh piutang penyelesaian transaksi efek yang turun dari posisi akhir tahun 2023 sebesar Rp1,98 triliun menjadi Rp1,67 triliun per akhir tahun 2024.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar KPEI di tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 20,79% yang disebabkan terutama berasal dari kenaikan Dana Disisihkan sebagai Cadangan Jaminan. Sehubungan dengan implementasi CCP PUVA terdapat Dana Disisihkan sebagai Cadangan Jaminan *Skin In The Game* (SITG) dalam rangka penalangan gagal bayar Anggota CCP PUVA apabila mengalami kondisi wanprestasi.

Liabilitas Liabilities

Laporan Liabilitas Tahun 2023-2024 Liabilities Report for 2023-2024

Deskripsi Description	Tahun (Rp) Year (Rp)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	
Liabilitas Liabilities			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities			
Utang Penyelesaian Transaksi Efek Securities Transactions Settlements Payable	1.671.150.505.200	1.982.087.120.800	(15,69%)
Utang Pajak Taxes Payable	17.922.766.159	17.981.506.973	(0,33%)
Utang Lain-Lain Other Payables	46.449.089.501	48.122.316.028	(3,48%)
Beban Akrua Accrued Expenses	93.800.719.150	87.499.482.164	7,20%
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Pendek Current lease liabilities	11.459.572.831	18.305.485.103	(37,40%)
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.840.782.652.841	2.153.995.911.068	(14,54%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities			
Dana Pengaman Security Funds	1.876.449.594	1.171.140.632	60,22%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Obligation	13.084.077.000	14.431.554.000	(9,34%)
Liabilitas Sewa - Bagian Jangka Panjang Non-Current Lease Liabilities	33.391.672.226	19.773.328.826	68,87%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	48.352.198.820	35.376.023.458	36,68%
Total Liabilitas Total Liabilities	1.889.134.851.661	2.189.371.934.526	(13,71%)

In 2024, IDCclear's total assets reached Rp4.40 trillion. The composition of assets at the end of 2024 was 75.44% current assets, while the rest were non-current assets.

Current Assets

As of December 31, 2024, IDCclear's current assets were recorded at Rp3.32 trillion, compared to Rp3.47 trillion as of December 31, 2023. This was due to receivables from securities transaction settlements, which descend from Rp1.98 trillion at the end of 2023 to Rp1.67 trillion at the end of 2024.

Non-Current Assets

IDCclear's non-current assets in 2024 increased by 20.79%, mainly due to an increase in funds set aside as collateral reserves. In connection with the implementation of CCP PUVA, funds are set aside as *Skin In The Game* (SITG) collateral reserves in order to cover defaults by CCP PUVA members in the event of default.

Total liabilitas KPEI per akhir tahun 2024 mencapai Rp1,89 triliun atau 13,71% lebih rendah dibandingkan posisi per akhir tahun 2023. Hal ini didorong oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp313,21 miliar pada posisi akhir tahun 2024.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek per akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,84 triliun, dibandingkan per akhir tahun 2023 sebesar Rp2,15 triliun. Hal ini salah satunya berasal dari berkurangnya liabilitas sewa-bagian jangka pendek sebesar Rp6,85 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang per akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp48,35 miliar, dibandingkan per akhir tahun 2023 tahun sebesar Rp35,38 miliar. Hal ini salah satunya karena adanya kenaikan liabilitas sewa bagian jangka panjang sebesar Rp12,98 miliar.

Ekuitas Equity

Laporan Ekuitas Tahun 2023-2024 Equity Report 2023-2024

Deskripsi Description	Tahun (Rp) Year (Rp)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	
Ekuitas Equity			
Modal Saham - Nilai Nominal Masing-Masing Sebesar Rp8 Juta per Saham Ditempatkan (500.000 lembar saham) dan Disetor (200.000 lembar saham) Share capital – nominal value Rp8 million per share issued (500.000 shares) and paid-up capital (200,000 shares)	1.800.000.000.000	1.600.000.000.000	12,50%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	(5.075.636.230)	3.684.036.661	(237,77%)
Saldo Laba Retained Earnings			
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	284.249.924.974	204.950.849.467	38,69%
Tidak Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	432.009.451.832	362.420.589.099	19,20%
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.511.183.740.576	2.171.055.475.227	15,67%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	4.400.318.592.237	4.360.427.409.753	0,91%

Jumlah ekuitas KPEI meningkat Rp340,13 miliar atau 15,67% menjadi Rp2,51 triliun di tahun 2024. Peningkatan ini berasal dari kenaikan modal disetor atas pemegang saham baru KPEI sehubungan dengan implementasi CCP PUVA. Selain itu kenaikan juga berasal dari dibukukannya laba bersih tahun berjalan sebesar Rp149,17 miliar sehingga meningkatkan saldo laba.

IDClear's total liabilities at the end of 2024 reached Rp1.89 trillion, which is 13.71% lower than the position at the end of 2023. This was driven by a decrease in short-term liabilities of Rp313.21 billion at the end of 2024.

Current Liabilities

Current liabilities at the end of 2024 were recorded at Rp1.84 trillion, compared to Rp2.15 trillion at the end of 2023. This was partly due to a decrease in short-term lease liabilities of Rp6.85 billion.

Non-Current Liabilities

Long-term liabilities at the end of 2024 were recorded at Rp48.35 billion, compared to Rp35.38 billion at the end of 2023. This was partly due to an increase in long-term lease liabilities of Rp12.98 billion.

IDClear's equity increased by Rp340.13 billion or 15.67% to Rp2.51 trillion in 2024. This increase came from an increase in paid-up capital from new IDClear's shareholders in connection with the implementation of CCP PUVA. In addition, the increase also came from the recording of a net profit of Rp149.17 billion, which increased the profit balance.

LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS

Laporan Arus Kas Tahun 2023-2024
Cash Flow Report 2023-2024

Deskripsi Description	Tahun (Rp) Year (Rp)		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
	2024	2023	
Arus Kas Cash Flows			
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net cash provided by operating activities	140.383.028.003	84.950.857.979	65,25%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net cash used in investing activities	(429.453.452.342)	(189.791.714.967)	126,28%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net cash used in financing activities	176.754.765.019	(16.450.494.388)	(1.174,46%)
(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net (decrease) in cash and cash equivalents	(112.315.659.320)	(121.291.351.376)	(7,40%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and cash equivalents at beginning of the year	908.470.295.469	1.029.761.646.845	(11,78%)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and cash equivalents at end of the year	796.154.636.149	908.470.295.469	(12,36%)

Per 31 Desember 2024, KPEI mencatat posisi kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp796,15 miliar. Pergerakan pada arus kas tersebut berasal dari tiga kategori aktivitas. Kas Neto dari aktivitas operasi di tahun 2024 mencapai Rp140,38 miliar. Sementara arus kas keluar bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp429,45 miliar, terutama untuk pembelian investasi, penempatan Cadangan Jaminan dan *Skin In The Game* (SITG) dan perolehan aset tetap. Selain itu, arus kas masuk bersih dari aktivitas pendanaan, senilai Rp176,75 miliar yang merupakan penerimaan modal disetor pemegang saham baru dan pembayaran liabilitas sewa.

As of December 31, 2024, IDCclear's recorded a year-end cash and cash equivalent position of Rp796.15 billion. The movement in cash flow originated from three categories of activities. Net cash from operating activities in 2024 reached Rp140.38 billion. Meanwhile, net cash outflow for investment activities totaled Rp429.45 billion, primarily for investment purchases, the placement of Collateral Reserves and *Skin In The Game* (SITG), and the acquisition of fixed assets. Additionally, net cash inflow from financing activities amounted to Rp176.75 billion, consisting of capital contributions from new shareholders and lease liability payments.



Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

DEBT SERVICES ABILITY AND COLLECTABILITY TURNOVER RATIO

Kemampuan KPEI dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

LIKUIDITAS

Rasio likuiditas merupakan kemampuan Perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi (liabilitas jangka pendek). KPEI mengukur kemampuannya untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yaitu dengan menghitung rasio lancar, yakni perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio lancar KPEI meningkat dari 1,61 kali per akhir tahun 2023 menjadi 1,80 kali per akhir tahun 2024.

SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas merupakan perbandingan jumlah liabilitas terhadap jumlah aset, hal ini menunjukkan nilai yang lebih baik. Dari 0,50 kali per akhir tahun 2023 menjadi 0,43 kali per akhir tahun 2024. KPEI telah memperbaiki postur permodalannya, dengan proporsi ekuitas yang mencapai 1,33 kali liabilitasnya per akhir tahun 2024, dibandingkan 0,99 kali per akhir tahun 2023.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Sepanjang tahun 2024, KPEI terus berkomitmen untuk menyelesaikan utang dan piutang penyelesaian transaksi bursa berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni maksimal dua hari setelah tanggal transaksi bursa.

IDClear's ability to fulfill all its obligations, both short-term and long-term, is measured through liquidity and solvency ratios.

LIQUIDITY

The liquidity ratio represents the Company's ability to settle all obligations that must be fulfilled immediately (current liabilities). IDClear measures its ability to meet current liabilities by calculating the current ratio, which compares current assets to current liabilities. IDClear's current ratio increased from 1.61 times at the end of 2023 to 1.80 times at the end of 2024.

SOLVENCY

The solvency ratio is the ratio of liabilities to assets, which indicates a better value. It decreased from 0.50 times at the end of 2023 to 0.43 times at the end of 2024. IDClear has improved its capital posture, with a proportion of equity reaching 1.33 times its liabilities at the end of 2024, compared to 0.99 times at the end of 2023.

RECEIVABLES COLLECTABILITY

Throughout 2024, IDClear upheld its commitment to settling its payables and receivables of securities transactions settlements in accordance with applicable regulations, namely a maximum of two days after the date of the exchange transaction.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON THE CAPITAL STRUCTURE

Dalam rangka memastikan keberlangsungan usahanya, KPEI terus mengelola modalnya. Struktur permodalan KPEI terdiri dari kas dan setara kas, serta ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan dan saldo laba. Direksi dan Dewan Komisaris KPEI secara berkala mengkaji kinerja keuangannya, dan dalam kajiannya turut mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

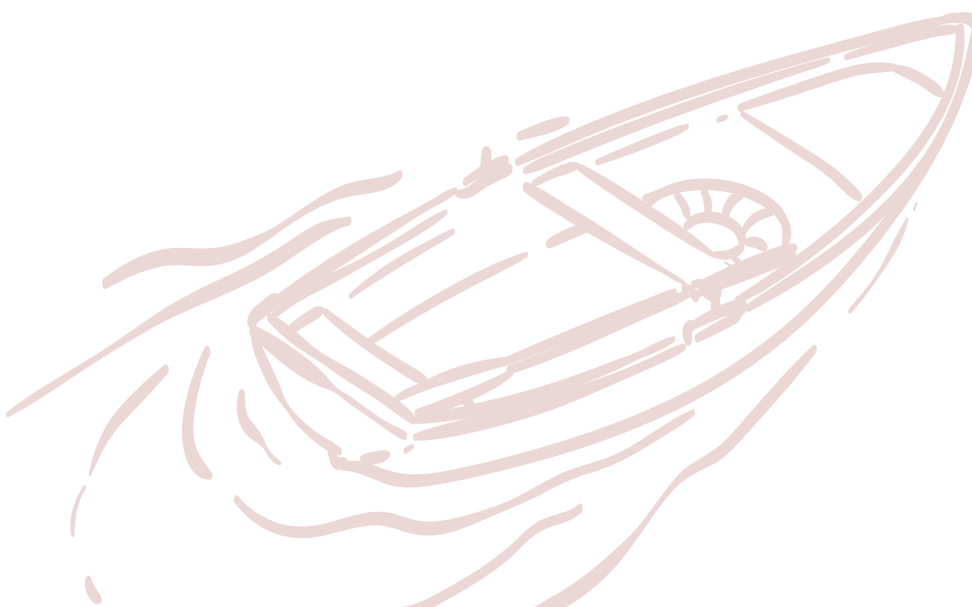
Seiring dengan penurunan liabilitas sebesar 13,71% dan peningkatan ekuitas sebesar 15,67% di tahun 2024, maka komposisi permodalan KPEI di tahun 2024 adalah 57,07% berupa ekuitas, dan sisanya 42,93% berupa liabilitas. Proporsi ekuitas yang lebih tinggi dalam struktur permodalan di tahun 2024 membuat KPEI berkeyakinan dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya terkait penyelesaian transaksi bursa dengan memadai dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu dua hari.

KPEI mengelola risiko modal untuk memastikan kemampuannya melanjutkan keberlangsungan usahanya. Struktur permodalan KPEI terdiri dari kas dan setara kas, serta ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan dan saldo laba. Direksi dan Dewan Komisaris KPEI secara berkala mengkaji kinerja keuangannya, dan dalam kajiannya turut mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

To ensure business continuity, IDClear continues to manage its capital. IDClear's capital structure consists of cash and cash equivalents, as well as shareholders' equity, which comprises issued capital and retained earnings. The Board of Directors and Board of Commissioners of IDClear regularly review its financial performance, considering financial risk exposure in their assessments.

With a 13.71% decrease in liabilities and a 15.67% increase in equity in 2024, IDClear's capital composition in 2024 will consist of 57.07% equity and 42.93% liabilities. The higher proportion of equity in the capital structure in 2024 makes IDClear confident that it can settle all of its liabilities related to the settlement of exchange transactions adequately within the specified time, which is two days.

IDCclear manages capital risk to ensure its ability to continue its business. IDCclear's capital structure consists of cash and cash equivalents, as well as shareholder equity, which consists of issued capital and retained earnings. IDCclear's Board of Directors and Board of Commissioners periodically review its financial performance, and in their review, they also consider financial risk exposure.



Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENTS

Sepanjang tahun 2024, KPEI tidak melakukan perikatan khusus dengan pihak manapun terkait investasi barang modal. Prosedur pengadaan barang modal yang berlaku di KPEI dijalankan secara ketat sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Throughout 2024, IDClear did not enter any specific commitments with any parties related to capital goods investments. The procurement procedures for capital goods in IDClear were strictly implemented in accordance with the prevailing policies.

Realisasi Investasi Barang Modal

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

JENIS DAN TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

TYPE AND PURPOSE OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Investasi Barang Modal Capital Goods Investment	Tujuan Purpose	Nilai Value (Rp)
Peralatan dan sistem komputer Computer hardware and system	Investasi barang modal yang dilakukan oleh KPEI bertujuan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan keandalan operasional, serta mendukung pengembangan layanan kliring dan penjaminan di pasar keuangan. IDClear's capital goods investment is aimed at strengthening its technological infrastructure, enhancing operational reliability, and supporting the development of clearing and settlement guarantee services in the financial market.	1.201.917.432
Peralatan dan perabotan kantor Furniture and fixtures	Investasi barang modal yang dilakukan oleh KPEI bertujuan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan keandalan operasional, serta mendukung pengembangan layanan kliring dan penjaminan di pasar keuangan. IDClear's capital goods investment is aimed at strengthening its technological infrastructure, enhancing operational reliability, and supporting the development of clearing and settlement guarantee services in the financial market.	38.000.000
Aset tetap dalam penyelesaian Construction in progress	Investasi barang modal yang dilakukan oleh KPEI bertujuan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan keandalan operasional, serta mendukung pengembangan layanan kliring dan penjaminan di pasar keuangan. IDClear's capital goods investment is aimed at strengthening its technological infrastructure, enhancing operational reliability, and supporting the development of clearing and settlement guarantee services in the financial market.	67.772.216.377
Jumlah Total		69.012.133.769

Deskripsi Description	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference (Rp)	(%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	69.012.133.769	95.376.149.850	(26.364.016.081)	(27,64) ↓

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen

EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM

Sepanjang tahun 2024, KPEI tidak menjalankan program kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau manajemen.

Throughout 2024, IDClear did not implement any employee and/or management stock ownership program.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

Per 31 Desember 2024, KPEI tidak melakukan Penawaran Umum Saham, atau Initial Public Offering (IPO) di bursa efek manapun. Dengan demikian, KPEI tidak memiliki kewajiban menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

As of December 31, 2024, IDClear did not conduct any Public Offering or Initial Public Offering (IPO) on any stock exchange. Therefore, IDClear has no obligation to disclose information regarding the realization of proceeds from a public offering.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

— INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED/ RELATED PARTIES

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan. Dengan demikian, tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan KPEI dan kegiatan operasional berlandaskan pada ketentuan internal yang berlaku serta bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan KPEI.

Uraian lengkap mengenai transaksi material dengan pihak berelasi dapat dilihat pada Catatan 30 atas Laporan Keuangan, halaman 75.

Throughout 2024, there were no transactions involving conflicts of interest. Accordingly, there were no losses or disadvantages incurred by IDClear, and all operational activities were conducted based on prevailing internal policies, free from interference by owners, related parties, or any other parties that could give rise to conflicts of interest detrimental to IDClear's profit or operations.

A detailed description of material transactions with related parties can be found in Note 30 of the Financial Statements, page 75.

Komitmen dan Kontingensi

— COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Penjelasan mengenai perjanjian, komitmen, dan kontingensi yang material selama periode pelaporan dapat ditemukan pada Catatan 33 atas Laporan Keuangan, halaman 89.

Explanations regarding material agreements, commitments, and contingencies during the reporting period can be found in Note 33 of the Financial Statements, page 89.

Penerbitan dan/atau Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

ISSUANCE OF AND/OR AMENDMENT TO LAWS AND REGULATIONS AFFECTING THE COMPANY IN THE LAST FINANCIAL YEAR

Penerbitan dan/atau Perubahan Peraturan Issuance of and/or Amendment to Regulation	Penjelasan Description	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
Penerbitan Peraturan Issuance of Regulation		
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi <i>Short Selling</i> oleh Perusahaan Efek Financial Services Authority Regulation No. 6 of 2024 on Securities Transaction Financing by Securities Companies for Clients and Short Selling Transactions by Securities Companies	Penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi <i>Short Selling</i> oleh Perusahaan Efek, khususnya untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan melalui pembiayaan transaksi margin dan/atau transaksi short selling serta memperkuat manajemen risiko bagi Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan transaksi Efek kepada nasabah ataupun Perusahaan efek yang melakukan transaksi <i>short selling</i> . Refinement of several provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2020 on Securities Transaction Financing by Securities Companies for Clients and Short Selling Transactions by Securities Companies, specifically aimed at increasing liquidity and deepening the financial market through margin transaction financing and/or short selling transactions, as well as strengthening risk management for Securities Companies that provide securities transaction financing to clients or conduct short selling transactions.	Payung hukum penyusunan kontrak standar Pinjam Meminjam Efek oleh KPEI dalam fungsinya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan sehubungan dengan penyelesaian transaksi bursa dan untuk Transaksi Pinjam Meminjam Bilateral. The legal basis for the preparation of standard securities borrowing and lending contracts by IDClear in its function as the a Clearing and Guarantee Institution in relation to the settlement of exchange transactions and for Bilateral Securities Borrowing and Lending Transactions.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek Financial Services Authority Regulation No. 32 of 2024 on the Development and Strengthening of Securities Transactions and Institutions	Peraturan pelaksanaan dari Bab V Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) mengenai pengembangan dan penguatan substansi pengaturan Transaksi dan Lembaga Efek di Pasar Modal. This regulation serves as the implementing regulation of Chapter V Article 22 of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUP2SK), specifically regarding the development and strengthening of regulatory substance related to Securities Transactions and Institutions in the Capital Market.	Payung hukum penyelenggaraan jasa lain oleh KPEI sebagai <i>Self-Regulatory Organizations</i> berdasarkan ketetapan atau persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, pelaksanaan penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek oleh KPEI, perluasan penggunaan Dana Jaminan, dan penetapan kondisi kesulitan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bagi penyelenggara pasar di Pasar Modal, dan tindakan penyelesaiannya. The legal basis for the provision of other services by IDClear as a Self-Regulatory Organization, based on the stipulation or approval of the Financial Services Authority; the implementation of Trade Transaction Settlement Guarantees by IDClear; the expansion of the use of the Guarantee Fund; and the determination of distress conditions that endanger the business continuity of market organizers in the Capital Market, along with the corresponding resolution measures.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Bank Indonesia Regulation No. 6 of 2024 on the Money Market and Foreign Exchange Market	Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (<i>end-to-end</i>) terhadap: produk (<i>product</i>), Harga Acuan (<i>Pricing</i>) Pelaku PUVa, dan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan. Implementation regulation of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector regarding the regulation, development, and supervision of the Money Market and Foreign Exchange Market in a comprehensive (<i>end-to-end</i>) manner on: products, Reference Prices (<i>Pricing</i>) of Money Market and Foreign Exchange Market participants, and the organization of Financial Market Infrastructure.	Payung hukum penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan dalam Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh KPEI sebagai <i>Central Counterparty</i> (CCP). The legal basis for the administration of Financial Market Infrastructure in the Money Market and Foreign Exchange Market by IDClear as the Central Counterparty (CCP).

Penerbitan dan/atau Perubahan Peraturan Issuance of and/or Amendment to Regulation	Penjelasan Description	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> Regulation of the Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 9 of 2024 on the Implementation of Central Counterparty	Peraturan pelaksana atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, khususnya terkait <i>Central Counterparty</i>. Implementation regulation of Bank Indonesia Regulation No. 6 of 2024 on the Money Market and Foreign Exchange Market, specifically related to Central Counterparty.	Payung hukum penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan dalam Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing oleh KPEI sebagai <i>Central Counterparty</i> (CCP) dan <i>Tri-Party Agent</i> (TPA). Adapun salah satu Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia adalah CCP. Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 9/2024, penyelenggaraan CCP sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan Sistemik wajib memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya, serta selaras dengan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku (<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>). Hal ini sejalan dengan peran KPEI sebagai CCP untuk menurunkan risiko kredit (<i>counterparty risk</i>) melalui pengambilalihan risiko kredit yang dihadapi penjual maupun pembeli, mengurangi segmentasi pasar, mengurangi keterhubungan dan ketergantungan antar pihak (<i>interconnectedness</i>), meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Legal framework for the implementation of Financial Market Infrastructure in the Money Market and Foreign Exchange Market by IDClear as Central Counterparty (CCP) and Tri-Party Agent (TPA). One of the Financial Market Infrastructures that can be operated by parties other than Bank Indonesia is the CCP. In PADG No. 9/2024, the operation of CCP as a Systemic Financial Market Infrastructure must consider aspects of interconnection, interoperability, and integration with other Financial Market Infrastructures, as well as align with applicable international principles and/or standards (principles for financial market infrastructures). This aligns with IDClear's role as CCP to reduce credit risk (counterparty risk) by assuming the credit risk faced by both sellers and buyers, reducing market segmentation, lowering interconnectedness and dependency among parties, increasing transparency, and improving financial transaction efficiency.
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Regulation of the Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 13 of 2024 on Money Market Transactions	Peraturan pelaksana atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang mencakup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap produk, Harga Acuan (<i>Pricing</i>), Pelaku Pasar Uang, dan Transaksi Pasar Uang. Implementing Bank Indonesia Regulation No. 6 of 2024 on the Money Market and Foreign Exchange Market, which includes the regulation, development, and supervision of products, Reference Pricing, Money Market Participants, and Money Market Transactions.	Payung hukum penyelenggaraan CCP dan TPA oleh KPEI dalam Transaksi Pasar Uang. The legal framework for the administration of CCP and TPA by IDClear in Money Market Transactions.
Perubahan Peraturan Perundang-undangan Amendment to Laws and Regulations Pada tahun 2024, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan baru yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha ataupun kondisi keuangan KPEI. In 2024, there were no amendments to nor new laws and regulations that had a significant impact on IDClear's business activities or financial condition.		

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY THE COMPANY IN THE MOST RECENT FINANCIAL YEAR

KPEI telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 sebagai berikut:

IDCclear has implemented several amendments and adjustments to accounting standards relevant to financial reporting, effective for the annual period beginning on or after January 1, 2024, as follows:

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Penjelasan Description	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Company
Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (dahulu PSAK 1) Amendment to PSAK 201: Long-Term Liabilities with Covenants (formerly PSAK 1)	Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan: - Hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan, - Hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan, - Klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan - Hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya. Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan. This amendment specifies the requirements for classifying a liability as current or non-current and clarifies: - What is meant by the right to defer settlement, - The right to defer settlement must exist at the end of the reporting period, - The classification is not affected by the likelihood that the entity will exercise its right to defer the liability, and - Only if a derivative embedded in the convertible liability is an equity instrument, the terms and conditions of the convertible liability will not affect its classification. Furthermore, requirements have been introduced to mandate disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current, and the entity's right to defer settlement depends on compliance with future conditions within twelve months.	Amandemen ini tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan Perusahaan. This amendment has no significant impact on the Company's financial statements.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	Penjelasan Description	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Company
Amandemen PSAK 116 Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik (dahulu PSAK 73) Amendment to PSAK 116: Lease Liabilities in Sale and Leaseback Transactions (formerly PSAK 73)	Amandemen PSAK 116 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan. The amendment to PSAK 116 Leases sets out the requirements for sellers-lessees in measuring lease liabilities arising from sale and leaseback transactions, to ensure that sellers-lessees do not recognize any amount of gain or loss related to the retained right of use.	Amandemen ini tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan Perusahaan. This amendment has no significant impact on the Company's financial statements

Informasi Keuangan Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Di tahun 2024, KPEI tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

In 2024, IDClear did not have financial information containing events that are extraordinary and rare in nature.







Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview



KPEI berperan sebagai kapal besar yang dikendalikan oleh sumber daya manusia profesional yang menjalankan fungsi vital sebagai penggerak kemudi dan mesin operasional. Dengan keahlian dan kolaborasi tim yang kuat, didukung oleh inovasi berkelanjutan, KPEI mampu memperluas cakupan layanan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Kapal ini terus melaju mantap menembus berbagai tantangan pasar dengan keyakinan, mengarahkan Perusahaan menuju visi dan tujuan strategis secara konsisten.

IDClear acts as a large ship controlled by professional human resources who perform vital functions as the steering wheel and operational engine. With expertise and strong team collaboration, supported by continuous innovation, IDClear is able to expand its service coverage while maintaining growth momentum. The ship continues to sail steadily through various market challenges with confidence, steering the Company towards its vision and strategic goals consistently.



05

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights

Hukum

LEGAL



Divisi Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan tata kelola KPEI sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO). Beberapa tanggung jawab utamanya adalah memberikan pendapat hukum berupa analisis atau kajian atas pelaksanaan pengembangan bisnis perusahaan, implementasi bisnis perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyusun dan menerbitkan peraturan serta *Rule Book* (ketentuan dan prosedur) yang mengatur mengenai ketentuan dan prosedur pelaksanaan bisnis operasional yang diselenggarakan oleh KPEI sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada Anggota Kliring (AK), Anggota *Central Counterparty* (CCP), dan/atau Partisipan di Pasar Modal maupun Pasar Uang. Peraturan dan *Rule Book* ini diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan pemberian layanan oleh KPEI kepada Anggota

Legal Division plays a strategic role in supporting the operations and governance of IDClear as a Self-Regulatory Organization (SRO). Its main responsibilities include providing legal opinions in the form of analyses or studies on the implementation of the Company's business development, and the implementation of business operations in accordance with prevailing laws and regulations, and drafting and issuing regulations and the Rule Book (provisions and procedures), which regulates the provisions and procedures of conducting IDClear's operational business in delivering services to Clearing Members, Central Counterparty Members, and/or Participants of both the Capital Market and Money Market. These regulations and Rule Books are issued with the aim of ensuring the continuity of services provided by IDClear to Clearing Members, Central Counterparty Members, and/or Participants, as a Clearing and

Kliring, Anggota CCP, dan/atau Partisipan, baik sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam penyelesaian Transaksi Bursa di pasar modal maupun sebagai CCP dalam penyelesaian Transaksi Derivatif di pasar uang. Selain tugas regulasi, Divisi Hukum juga menyediakan berbagai layanan hukum untuk mendukung kebutuhan internal KPEI, seperti layanan advokasi, pendampingan hukum dan administrasi dokumen hukum. Divisi Hukum KPEI terdiri dari 2 (dua) unit, yaitu Unit Peraturan dan Unit Legal Korporasi, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung operasional dan tata kelola perusahaan.

Unit Peraturan berperan secara strategis dalam melakukan analisis serta konsultasi hukum atas pelaksanaan inisiatif bisnis Perusahaan, baik dalam tahapan pengembangan (produk baru) maupun ketika bisnis sudah diimplementasikan, termasuk yang melibatkan interaksi dengan SRO, pemangku kepentingan dan otoritas. Peran lainnya adalah bertanggung jawab atas penyusunan serta penerbitan peraturan/*rule book* yang berlaku bagi AK Anggota CCP, dan/atau Partisipan. Unit ini memastikan bahwa setiap peraturan dan *Rule book* yang diterbitkan selaras dengan proses bisnis yang dijalankan oleh KPEI dalam melaksanakan kegiatan kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa maupun fasilitas layanan lainnya dalam pelaksanaan transaksi efek di pasar modal serta kliring penjaminan penyelesaian atas transaksi derivatif di pasar uang.

Lebih lanjut, Unit Peraturan juga melakukan audit terhadap pemenuhan kepatuhan hukum (*compliance*) KPEI dalam menjalankan seluruh proses bisnis operasional perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit ini juga memastikan bahwa informasi terkait peraturan yang diterbitkan oleh KPEI disebarluaskan secara efektif kepada pemangku kepentingan, termasuk AK, Partisipan, dan otoritas terkait sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) selaku CCP. Terakhir, Unit Peraturan juga menjalankan peran advokasi dengan memberikan pendampingan hukum kepada KPEI selaku narasumber dalam kasus litigasi dan dalam konsultasi hukum atas rencana bisnis atau tantangan bisnis baru.

Unit Legal Korporasi memiliki peran strategis dalam memastikan KPEI memenuhi seluruh tanggung jawabnya sebagai badan usaha yang beroperasi di bawah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Unit ini memiliki tugas utama memberikan layanan advokasi yang mencakup pemberian pendapat legal, melakukan pemetaan konsep bisnis untuk memastikan keselarasan dengan regulasi korporasi yang berlaku, serta menyusun dan melakukan kajian mendalam terhadap dokumen hukum yang dibutuhkan oleh KPEI. Selain itu, Unit Legal Korporasi bertugas memberikan pendampingan hukum kepada KPEI dalam setiap interaksi dengan pihak otoritas terkait. Unit ini juga bertindak sebagai perwakilan KPEI dalam mengurus berbagai persyaratan administratif, seperti pendaftaran, perizinan, atau pengelolaan kewajiban hukum lainnya yang menjadi kebutuhan, serta memastikan bahwa setiap penyertaan KPEI kepada anak perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Guarantee Institution for the settlement of Exchange Transactions in the capital market and as a CCP for the settlement of Derivative Transactions in the money market. In addition to its regulatory duties, the Legal Division also provides various legal services to support IDClear's internal needs, such as advocacy services, legal assistance, and legal document administration. The Legal Division of IDClear consists of two (2) units: the Regulatory Unit and the Corporate Legal Unit, each playing a strategic role in supporting the Company's operations and governance.

The Regulatory Unit plays a strategic role in conducting legal analysis and consultations on the implementation of the Company's business initiatives, both during the development phase (new products) and once the business has been implemented, including those involving interactions with SRO, stakeholders, and authorities. Another key role of this unit is its responsibility for drafting and issuing regulations/*Rule Books* applicable to Clearing Members (CM), Central Counterparty Members (CCP Members), and/or Participants. This unit ensures that every regulation and Rule Book issued is aligned with the business processes carried out by IDClear in performing clearing activities as well as guaranteeing the settlement of exchange transactions and other service facilities related to securities transactions in the capital market, as well as clearing and settlement guarantees for derivative transactions in the money market.

Furthermore, the Regulatory Unit conducts audits on IDClear's legal compliance fulfillment in executing all its operational business processes based on applicable laws and regulations. It also ensures that information related to regulations issued by IDClear is effectively disseminated to stakeholders, including Clearing Members, Participants, and relevant authorities as the implementation of information disclosure principle as CCP. Finally, the Regulatory Unit also carries out an advocacy role by providing legal assistance to IDClear as a resource person in litigation cases and in legal consultations on business plans or new business challenges.

The Corporate Legal Unit plays a strategic role in ensuring that IDClear fulfills all its responsibilities as a business entity operating under the applicable legal framework in Indonesia. This unit's main duties include providing advocacy services such as issuing legal opinions, mapping business concepts to ensure alignment with applicable corporate regulations and drafting as well as conducting thorough reviews of legal documents required by IDClear. In addition, the Corporate Legal Unit is responsible for providing legal assistance to IDClear in its interactions with relevant authorities. The unit also acts as IDClear's representative in managing various administrative requirements such as registrations, licensing, or the fulfillment of other legal obligations as needed, and ensures that any investment made by IDClear in its subsidiaries complies with prevailing legal provisions.

Pada tahun 2024, KPEI telah memperoleh Izin Usaha sebagai *Central Counterparty* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Divisi Hukum memiliki peran untuk memberikan pendampingan hukum terkait hal-hal yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan usaha KPEI sebagai CCP. Dalam hal ini, Unit Peraturan berperan untuk menyusun ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP PUVA, melakukan pembahasan, koordinasi, dan konsultasi bersama dengan Anggota CCP PUVA, Dewan Komisaris KPEI, Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia sehubungan dengan penyusunan dan penetapan *rule book*, penyusunan perjanjian keanggotaan dan kontrak novasi Anggota CCP PUVA, serta kegiatan lainnya sehubungan dengan pemenuhan persyaratan KPEI dalam rangka mendapatkan rekomendasi Bank Indonesia. Sementara itu, Unit LKO berperan untuk melakukan penyusunan Nota Kesepahaman, penyusunan Kajian Hukum terkait Penyertaan Saham Bank Indonesia dan Perbankan, penyusunan Perjanjian Antar Pemegang Saham, penyusunan Perubahan Anggaran Dasar KPEI, serta kegiatan korporasi lainnya sehubungan dengan Penyertaan Saham Bank Indonesia dan Perbankan pada KPEI.

PERUBAHAN KONDISI BISNIS DI TAHUN 2024

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, KPEI dan pasar modal Indonesia secara keseluruhan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh penerbitan berbagai peraturan baru oleh pemerintah. Pada tahun 2024, terdapat enam (6) peraturan perundang-undangan yang secara spesifik memberikan dampak signifikan terhadap operasional bisnis KPEI, yakni:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*; dan
6. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang.

PENERBITAN PERATURAN BARU

Sepanjang tahun 2024, KPEI telah menerbitkan 4 (empat) peraturan baru yang dirancang untuk mengatur penggunaan berbagai layanan yang disediakan. Setiap peraturan baru ini memiliki tujuan yang spesifik, yakni seperti terlampir dalam tabel berikut:

In 2024, IDClear obtained a Business License as a Central Counterparty in the Money Market and Foreign Exchange Market (CCP PUVA) issued by Bank Indonesia. In relation to this, the Legal Division plays a role in providing legal assistance regarding matters related to the preparation and implementation of IDClear's business activities as a CCP. In this context, the Regulatory Unit is responsible for drafting the provisions and procedures (*rule book*) for the operation of CCP PUVA, as well as conducting discussions, coordination, and consultations with CCP PUVA Members, the Board of Commissioners of IDClear, the Financial Services Authority (OJK), and Bank Indonesia regarding the drafting and establishment of the *rule book*, the preparation of membership agreements and novation contracts for CCP PUVA Members, and other activities related to fulfilling IDClear's requirements to obtain Bank Indonesia's recommendation. Meanwhile, the Corporate Legal Unit (LKO) is responsible for preparing Memorandums of Understanding (MoUs), drafting Legal Reviews related to Bank Indonesia and Banking Shareholding, preparing Shareholders' Agreements, drafting Amendments to IDClear's Articles of Association, and other corporate activities related to the Shareholding of Bank Indonesia and Banks in IDClear.

CHANGES IN BUSINESS CONDITIONS IN 2024

In carrying out its business operations, IDClear and the Indonesian capital market have been affected by the issuance of various new regulations by the government. In 2024, 6 (six) regulations had a significant impact on IDClear's business operations, as follows:

1. Financial Services Authority Regulation No. 6 of 2024 on Securities Transaction Financing by Securities Companies for Clients and Short Selling Transactions by Securities Companies;
2. Financial Services Authority Regulation No. 32 of 2024 on the Development and Strengthening of Securities Transactions and Institutions;
3. Financial Services Authority Regulation No. 33 of 2024 on the Development and Strengthening of Investment Management in the Capital Market;
4. Bank Indonesia Regulation No. 6 of 2024 on the Money Market and Foreign Exchange Market;
5. Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 9 of 2024 on the Implementation of Central Counterparty; and
6. Regulation of Members of the Board of Governors of Bank Indonesia No. 13 of 2024 on Money Market Transactions.

ISSUANCE OF NEW REGULATIONS

Throughout 2024, IDClear issued 4 (four) new regulations designed to govern the use of various services provided. Each of these new regulations serves a specific purpose, as outlined in the following table:

Peraturan Baru di KPEI di 2024

New Regulations at IDClear in 2024

No	Peraturan	Tujuan Penerbitan
1	Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek IDClear Regulation No. III-1 on Clearing Members Receiving Clearing and Settlement Guarantee Services for Securities Derivative Contract Transactions	Perubahan peraturan ini dalam rangka mendukung implementasi penggunaan Rekening Efek Utama Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI dan Sub Rekening Efek Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI di KSEI sehingga diperlukan penyesuaian atas persyaratan, prosedur serta hak dan kewajiban Anggota Kliring yang mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek. This regulatory amendment aims to support the utilization of IDClear's Main Securities Account for Securities Derivative Contract Transactions and IDClear's Sub-Securities Account for Securities Derivative Contract Transactions at KSEI. Therefore, adjustments were necessary regarding the requirements, procedures, as well as the rights and obligations of Clearing Members receiving Clearing and Settlement Guarantee Services for Securities Derivative Contract Transactions.
2	Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka IDClear Regulation No. III-2 on Clearing and Settlement Guarantee of Futures Contract Transactions	Perubahan peraturan ini dalam rangka mendukung implementasi penerbitan Kontrak Berjangka dengan <i>Underlying Saham (Single Stock Future)</i> dan penyesuaian mekanisme penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek untuk menyediakan sarana baru dengan menggunakan Rekening Efek Utama Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI dan Sub Rekening Efek Transaksi Kontrak Derivatif Efek KPEI di KSEI yang sebelumnya masih menggunakan rekening di Bank Pembayaran. This regulatory amendment aims to support the implementation of the issuance of Futures Contracts with Stock as Underlying (Single Stock Future), and to settle Equity Derivative Contract transactions by providing a new facility using IDClear's Main Securities Account for Equity Derivative Contract Transactions and Sub Securities Account for Equity Derivative Contract Transactions at KSEI, which were previously conducted through accounts at Payment Banks.
3	Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) IDClear Regulation No. VI on Clearing and/or Settlement Guarantee of Asset-Backed Securities (EBA) and Asset-Backed Securities in the Form of Participation Letters (EBA-SP)	Peraturan ini merupakan perubahan peraturan sehubungan dengan adanya penghentian operasional <i>Fixed Income Trading System (FITS)</i> yang memfasilitasi perdagangan atas Efek Bersifat Utang, Sukuk, dan Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap di Bursa dan penyesuaian atas tata cara kliring Efek Beragun Aset Arus Kas Tetap dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Arus Kas Tetap sehubungan dengan dihentikannya operasional <i>Fixed Income Trading System (FITS)</i> . This regulation is an amendment due to the cessation of operations of the Fixed Income Trading System (FITS), which facilitated the trading of Debt Securities, Sukuk, and Fixed Cash Flow Asset-Backed Securities on the Exchange, and adjustments to the clearing procedures of Fixed Cash Flow Asset-Backed Securities and Asset-Backed Securities in the Form of Fixed Cash Flow Participation Letters in connection with the termination of Fixed Income Trading System (FITS) operations.
4	Peraturan KPEI Nomor VIII tentang Sanksi Bagi Anggota Kliring IDClear Regulation No. VIII on Sanctions for Clearing Members	Perubahan Peraturan ini dalam rangka penambahan ketentuan mengenai besaran pengenaan sanksi berupa biaya administrasi bagi Anggota Kliring yang dinyatakan Gagal Bayar dalam transaksi Kontrak Berjangka. This regulatory amendment aims to add provisions on the amount of sanctions in the form of administrative fees for Clearing Members declared in Default in Futures Contract transactions.

Rule Book Tahun 2024

2024 Rule Book

No	Peraturan Regulation	Tujuan Penerbitan Purpose of Issuance
1	Rule Book Ketentuan Umum Rule Book on General Provisions	Peraturan ini merupakan implementasi penyelenggaraan KPEI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> . These regulations are part of the implementation by IDClear in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 6 of 2024 on the Money Market and Foreign Exchange Market, and the Member of the Board of Governors Regulation No. 9 of 2024 on the Central Counterparty Operations.
2	Rule Book Ketentuan Keanggotaan CCP Rule Book on CCP Membership Provisions	
3	Rule Book Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko Rule Book on CCP Clearing Committee and Risk Management Provisions	
4	Rule Book Ketentuan Pengenaan Biaya Rule Book on Cost Imposition Provisions	
5	Rule Book Ketentuan Rekening Rule Book on Account Provisions	
6	Rule Book Ketentuan Penatausahaan <i>Initial Margin, Variation Margin, dan Default Fund Contribution</i> Rule Book on Initial Margin, Variation Margin, and Default Fund Contribution Provisions	

PENERBITAN SURAT EDARAN BARU

Di tahun 2024, KPEI menerbitkan 7 (tujuh) surat edaran baru yang mengatur berbagai aspek penggunaan layanan. Berikut penjelasan surat edaran baru tersebut beserta tujuan penerbitannya.

ISSUANCE OF NEW CIRCULAR LETTER

In 2024, IDClear issued 7 (seven) new circular letter regulating various aspects of the use of services. Below is the explanation of these new circular letter and their purpose of issuance.

Surat Edaran Baru di KPEI di 2024
New Circular Letter at IDClear in 2024

No	Surat Edaran Circular Letter	Tujuan Penerbitan Purpose of Issuance
1	Surat Edaran No. SE-001/DIR/KPEI/0124 tanggal 2 Januari 2024 perihal Normalisasi Fee Pinjam Meminjam Efek Reguler Circular No. SE-001/DIR/KPEI/0124 dated January 2, 2024, on Normalization of Regular Securities Lending Fees.	Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka mendukung Transaksi Bursa dan mengikuti perkembangan pasar modal Indonesia sebagai dasar hukum pemberian normalisasi atas fee Pinjam Meminjam Efek Reguler untuk mendukung Transaksi Bursa. This Circular is issued to support Exchange Transactions and follow the developments in Indonesia's capital market as a legal basis for the normalization of regular securities lending fees to support Exchange Transactions.
2	Surat Edaran No. SE-004/DIR/KPEI/0424 tanggal 3 April 2024 perihal Penempatan Dana Pengaman untuk Memperoleh Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek. Circular No. SE-004/DIR/KPEI/0424 dated April 3, 2024, on Placement of Safeguard Funds to Obtain Clearing and Settlement Services for Derivative Securities Transactions.	Surat Edaran ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan II.9. Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek untuk memberikan dasar hukum terkait dengan penyesuaian atas penempatan Dana Pengaman yang wajib dipenuhi oleh Anggota Kliring untuk memperoleh layanan jasa Kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek. This Circular is issued to follow up on Provision II.9 of IDClear Regulation No. III-1 concerning Clearing Members Receiving Clearing and Settlement Guarantee Services for Derivative Securities Transactions, to provide a legal basis for adjustments related to the placement of Guarantee Funds that must be fulfilled by Clearing Members to obtain clearing services and settlement guarantee for Derivative Securities Transactions.
3	Surat Edaran No. SE-006/DIR/KPEI/0524 tanggal 3 Mei 2024 perihal Mekanisme dan Tata Cara Penyelesaian atas Tindakan Korporasi Perusahaan Tercatat terhadap Kontrak Berjangka Saham (Single Stock Future). Circular No. SE-006/DIR/KPEI/0524 dated May 3, 2024, on Mechanism and Procedures for Settlement of Corporate Actions by Listed Companies on Stock Futures (Single Stock Future).	Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pelaksana atas Ketentuan V.10 Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian apabila terdapat tindakan korporasi Perusahaan Tercatat terhadap produk Kontrak Berjangka Saham (Single Stock Future). This Circular is issued as the implementation of Provision V.10 of IDClear Regulation No. III-2 concerning Clearing and Settlement of Futures Transactions regarding the mechanism and procedures for settlement in the event of corporate actions by Listed Companies concerning Single Stock Futures contracts.
4	Surat Edaran No. SE-007/DIR/KPEI/0724 tanggal 12 Juli 2024 perihal Parameter Risiko. Circular No. SE-007/DIR/KPEI/0724 dated July 12, 2024, on Risk Parameters.	Surat Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas implementasi Kontrak Berjangka Saham (Single Stock Future) melalui Peraturan KPEI No. III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka dan perubahan Anggaran Dasar PT Bursa Efek Indonesia terkait peningkatan nilai nominal Saham PT Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terdapat pembaharuan atas parameter risiko dengan penambahan parameter risiko terkait Risk Charge atas Kontrak Berjangka Saham (Single Stock Future) dan Peningkatan Nilai Saham BEI sebagai Agunan offline. This Circular is issued as a follow-up to the implementation of Single Stock Futures through IDClear Regulation No. III-2 concerning Clearing and Settlement of Futures Transactions and the amendment to the Articles of Association of PT Bursa Efek Indonesia/IDX regarding the increase in the nominal value of PT Bursa Efek Indonesia/ IDX's shares. Based on this, there has been an update to the risk parameters with the addition of a risk charge parameter for Single Stock Futures and the increase in IDX's shares as offline collateral.
5	Surat Edaran No. SE-008/DIR/KPEI/0924 tanggal 24 September 2024 perihal Penyesuaian Fee Pinjam Meminjam Efek Reguler. Circular No. SE-008/DIR/KPEI/0924 dated September 24, 2024, on Adjustment of Regular Securities Lending Fees.	Surat Edaran ini diterbitkan sebagai upaya optimalisasi layanan Pinjam Meminjam Efek Reguler kepada Anggota Pinjam Meminjam Efek melalui penyesuaian fee Pinjam Meminjam Efek Reguler. This Circular is issued as an effort to optimize the Regular Securities Lending services to Securities Lending Members by adjusting the Regular Securities Lending fee.
6	Surat Edaran No. SE-009/DIR/KPEI/1224 tanggal 16 Desember 2024 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Circular No. SE-009/DIR/KPEI/1224 dated December 16, 2024, on Procedures for Submitting Net Adjusted Working Capital (NAWC) Report.	Diterbitkan dalam rangka memudahkan Perusahaan Efek untuk menyampaikan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan sehubungan adanya pembaruan terkait tata cara penyampaian laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang harus dilakukan Perusahaan Efek. Issued in order to facilitate Securities Companies to submit the Net Adjusted Working Capital (NAWC) report in connection with the updates regarding the procedures for submitting the Net Adjusted Working Capital report that must be carried out by Securities Companies.
7	Surat Edaran Bersama KPEI-KSEI Nomor: SE-003/DIR/KPEI/0324 tanggal 22 Maret 2024 perihal Prosedur Penggunaan Rekening Efek atas Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek. Joint Circular KPEI-KSEI No. SE-003/DIR/KPEI/0324 dated March 22, 2024, regarding Procedures for Using Securities Accounts for Settlement of Derivative Securities Transactions.	Surat Edaran Bersama ini diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek dengan menggunakan Rekening Efek dalam mekanisme penyelesaian transaksi Kontrak Derivatif Efek. This Joint Circular is issued as an effort to improve the efficiency and effectiveness of the settlement of Derivative Securities Transactions by using Securities Accounts in the settlement mechanism of Derivative Securities Transactions.

PENERBITAN PERJANJIAN DENGAN AK

ISSUANCE OF AGREEMENTS WITH CM

Sepanjang tahun 2024, KPEI menerbitkan 18 (delapan belas) perjanjian dengan dengan AK.

Throughout 2024, IDClear issued 18 (eighteen) agreements with Clearing Members (CM).

Perjanjian Baru dengan AK di 2024
New Agreements with CM in 2024

No	Perjanjian Agreement	Pihak yang Terlibat Party/Parties involved
1	Perjanjian Pemberian Layanan Fasilitas Triparty Repo Agreement on the Provision of Triparty Repo Facility Services	PT Indo Harvest Sekuritas
2	Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral Agreement on the Use of Bilateral Securities Borrowing and Lending Facility	1. PT OCBC Sekuritas Indonesia 2. PT Lotus Andalan Sekuritas 3. PT NH Korindo 4. PT Stockbit Sekuritas Digital 5. PT Mandiri Sekuritas 6. PT Harita Kencana Sekuritas 7. PT Trust Sekuritas 8. PT Erdikha Elit Sekuritas 9. PT Phintraco Sekuritas
3	Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek Agreement on the Provision of Clearing and Settlement Guarantee Services for Derivative Securities Transactions	1. PT Binaartha Sekuritas 2. PT Ajaib Sekuritas Indonesia 3. PT Phintraco Sekuritas
4	Perjanjian Partisipan KPEI dalam Electronic Indonesia <i>Public Offering</i> sebagai Agen Penjual IDClear Participant Agreement in the Electronic Indonesia Public Offering as Selling Agent	1. PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia 2. PT OSO Sekuritas Indonesia 3. PT Tuntun Sekuritas Indonesia
5	Perjanjian Partisipan KPEI dalam Electronic Indonesia <i>Public Offering</i> sebagai Partisipan Admin IDClear Participant Agreement in the Electronic Indonesia Public Offering as Admin Participant	1. PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia 2. PT OSO Sekuritas Indonesia

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI UNTUK INTERNAL KPEI

ISSUANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS' DECISION LETTER FOR IDCLEAR'S INTERNAL

Sepanjang 2024, KPEI menerbitkan 8 (delapan) surat keputusan baru yang mengatur tentang kebutuhan internal KPEI, yakni:

Throughout 2024, IDClear issued 8 (eight) new decision letters regulating IDClear's internal needs, as follows:

Penerbitan Surat Keputusan KPEI di 2024
Issuance of IDClear Decision Letter in 2024

No	Perjanjian Agreement
1	KEP-005/DIR/KPEI/0124 Penunjukan Tim <i>Task Force</i> Keuangan Berkelanjutan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Appointment of the Sustainable Finance Task Force Team of IDClear
2	KEP-008/DIR/KPEI/0224 Penetapan Tim <i>Business Continuity Management</i> (BCM) dan Tim <i>Business Continuity</i> (BC) Officer PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Establishment of the Business Continuity Management (BCM) Team and Business Continuity (BC) Officer Team of IDClear
3	KEP-009/DIR/KPEI/0224 Penunjukan <i>Risk Officer</i> PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Appointment of Risk Officer of IDClear
4	KEP-010/DIR/KPEI/0324 Penunjukan KPI Officer PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2024 Appointment of KPI Officer of IDClear for 2024
5	KEP-022/DIR/KPEI/0524 Pembentukan Tim Pengembangan Modul REPO PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Establishment of the REPO Module Development Team of IDClear
6	KEP-023/DIR/KPEI/0524 Pembentukan Tim Pengembangan Penyelesaian Level Anggota Kliring Dalam Transaksi Ekuiti PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Establishment of the Development Team for Clearing Member Level Settlement in Equity Transactions of IDClear
7	KEP-079/DIR/KPEI/1024 Pengangkatan Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko Periode 2024-2026 Appointment of Members of the CCP Clearing Committee and Risk Management Committee for the 2024-2026 Period
8	KEP-086/DIR/KPEI/1124 Pembentukan Tim <i>Task Force</i> Perlindungan Data Pribadi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Establishment of the Personal Data Protection Task Force Team of IDClear

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI KEBIJAKAN UNTUK STAKEHOLDERS

ISSUANCE OF BOARD OF DIRECTORS' DECISION LETTER - POLICIES FOR STAKEHOLDERS

Sepanjang 2024, KPEI menerbitkan 18 (delapan belas) Surat Keputusan Direksi bagi AK, Anggota CCP, dan/atau Pelaku Pasar Modal dan Pasar Uang.

Throughout 2024, IDClear issued 18 (eighteen) Director's Decision Letters for Clearing Members, CCP Members, and/or Capital Market and Money Market Participants.

Penerbitan Surat Keputusan Direksi di 2024 Issuance of Board of Director's Decision Letters in 2024

No	No. Surat Keputusan Direksi Board of Director's Decision Letter Number	Topik dalam Surat Keputusan Direksi Subject of the Board of Director's Decision Letter
1	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-001/DIR/KPEI/0124 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-001/DIR/KPEI/0124	Kebijakan Keringanan Biaya Penggunaan Fasilitas <i>Triparty Repo</i> Policy on Fee Relief for the Use of Triparty Repo Facility
2	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-002/DIR/KPEI/0124 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-002/DIR/KPEI/0124	Kebijakan Keringanan Biaya Penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral Policy on Fee Relief for the Use of Bilateral Securities Borrowing and Lending Facility
3	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-003/DIR/KPEI/0124 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-003/DIR/KPEI/0124	Kebijakan Pemberlakuan Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Policy on the Implementation of Service Fees for Clearing and Settlement Guarantee Services for Futures Contracts
4	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-004/DIR/KPEI/0124 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-004/DIR/KPEI/0124	Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan/atau Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA) dan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) IDClear Regulation No. VI on Clearing and/or Settlement Guarantee of Asset-Backed Securities (ABS) and Asset-Backed Securities in the Form of Participation Certificates (ABS-PC)
5	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-011/DIR/KPEI/0324 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-011/DIR/KPEI/0324	Peraturan KPEI Nomor III-1 tentang Anggota Kliring yang Mendapatkan Jasa Layanan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Derivatif Efek IDClear Regulation No. III-1 on Clearing Members Receiving Clearing and Settlement Guarantee Services for Equity Derivatives Contracts
6	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-012/DIR/KPEI/0324 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-012/DIR/KPEI/0324	Peraturan KPEI Nomor III-2 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka IDClear Regulation No. III-2 on Clearing and Settlement Guarantee of Futures Contracts
7	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-013/DIR/KPEI/0324 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-013/DIR/KPEI/0324	Peraturan KPEI Nomor VIII tentang Sanksi Bagi Anggota Kliring IDClear Regulation Number VIII on Sanctions for Clearing Members
8	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-030/DIR/KPEI/0624 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-030/DIR/KPEI/0624	Kebijakan Pemberian Insentif atas Pemberlakuan Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Policy on the Provision of Incentives for Service Fees on Clearing and Settlement Guarantee Services for Futures Contracts
9	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-031/DIR/KPEI/0624 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-031/DIR/KPEI/0624	Perpanjangan Pemberian Insentif melalui Pembebasan Biaya Pemeliharaan (<i>Maintenance Fee</i>) atas Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (<i>Structured Warrant</i>) Extension of Incentives through Waiver of Maintenance Fees for Clearing and Settlement of Exchange Transactions on Structured Warrants
10	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-032/DIR/KPEI/0624 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-032/DIR/KPEI/0624	Perpanjangan Kebijakan Keringanan Biaya Penggunaan Fasilitas <i>Triparty Repo</i> Extension of Policy on Fee Relief for the Use of Triparty Repo Facility
11	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-033/DIR/KPEI/0624 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-033/DIR/KPEI/0624	Perpanjangan Kebijakan Keringanan Biaya Penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral Extension of Policy on Fee Relief for the Use of Bilateral Securities Borrowing and Lending Facility
12	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-037/DIR/KPEI/0724 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-037/DIR/KPEI/0724	Implementasi Penggunaan Fasilitas <i>Triparty Repo</i> atas Transaksi Repo dengan Instrumen Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas <i>Triparty Repo</i> Implementation of the Use of Triparty Repo Facility for Repo Transactions with Bond Instruments as Regulated in IDClear Regulation No. X-2 on Triparty Repo Facility
13	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-042/DIR/KPEI/0924 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-042/DIR/KPEI/0924	Ketentuan dan Prosedur (<i>Rule Book</i>) Penyelenggaraan <i>Central Counterparty</i> <i>Terms and Procedures (Rule Book) for Central Counterparty Operation</i>
14	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-079/DIR/KPEI/1024 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-079/DIR/KPEI/1024	Pengangkatan Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko Periode 2024-2026 Appointment of Members of the Clearing Committee for CCP and Risk Handling for the 2024-2026 Period
15	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-088/DIR/KPEI/1224 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-088/DIR/KPEI/1224	Kebijakan Pemberlakuan Biaya Penggunaan Fasilitas <i>Triparty Repo</i> Policy on Service Fee for the Use of Triparty Repo Facility

Penerbitan Surat Keputusan Direksi di 2024

Issuance of Board of Director's Decision Letters in 2024

No	No. Surat Keputusan Direksi Board of Director's Decision Letter Number	Topik dalam Surat Keputusan Direksi Subject of the Board of Director's Decision Letter
16	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-089/DIR/KPEI/1224 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-089/DIR/KPEI/1224	Perpanjangan Pemberian Insentif melalui Pembebasan Biaya Pemeliharaan (<i>Maintenance Fee</i>) untuk Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (<i>Structured Warrant</i>) Extension of Incentives through Waiver of Maintenance Fees for Clearing and Settlement of Exchange Transactions on Structured Warrants
17	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-090/DIR/KPEI/1224 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-090/DIR/KPEI/1224	Perpanjangan Kebijakan Biaya Penggunaan Fasilitas Pinjam Meminjam Efek Bilateral Extension of Policy on Fees for the Use of Bilateral Securities Borrowing and Lending Facility
18	Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-091/DIR/KPEI/1224 Board of Directors' Decision Letter No: Kep-091/DIR/KPEI/1224	Kebijakan Pemberian Insentif atas Pemberlakuan Biaya Layanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Policy on the Provision of Incentives for Service Fees on Clearing and Settlement Guarantee Services for Futures Contracts

KAJIAN HUKUM

Di tahun 2024, Divisi Hukum melaksanakan kajian hukum dengan topik berikut:

Kajian Hukum di 2024

Legal Review in 2024

No	Topik Kajian Review Topic
1	Prosedur Permohonan Persetujuan Pemegang Saham atas RKAT KPEI Procedure for Shareholders' Approval of IDClear's RKAT
2	Penyertaan Saham Bank Indonesia dan/atau Perbankan di KPEI Equity Participation of Bank Indonesia and/or Banking Sector in IDClear
3	Pengikatan Kembali Surat Saham Bursa Rebinding of Stock Certificates of the Exchange
4	Kajian Hukum terkait Kepatuhan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam Memenuhi Kewajiban Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Legal Review on IDClear's Compliance with Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection
5	Ruang Lingkup Surat Kuasa Pelaporan Transaksi Repo pada Sistem ORCHiD melalui Fasilitas Triparty Repo KPEI dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Scope of Power of Attorney for Reporting Repo Transactions on ORCHiD System through IDClear's Triparty Repo Facility and Financial Services Authority Letter
6	Penggunaan Tanda Tangan Elektronik terkait Penandatanganan Dokumen Perjanjian Use of Electronic Signatures related to the Signing of Agreement Documents
7	<i>Alignment Global Master Securities Lending Agreement (GMSLA)</i> dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek Alignment of the Global Master Securities Lending Agreement (GMSLA) with Financial Services Authority Regulation No. 6 of 2024 on Securities Transaction Financing by Securities Companies for Customers and Short Selling Transactions by Securities Companies
8	Pinjam Meminjam Efek Menggunakan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur (<i>Structure Warrant</i>), <i>Exchange-Traded Fund</i> (ETF) dan Efek Bersifat Ekuitas Lending and Borrowing Securities Using Structured Underlying Warrants (Structure Warrant), Exchange-Traded Funds (ETFs), and Equity Securities
9	Rencana Penambahan Instrumen Surat Utang Negara sebagai Objek Triparty Repo Plan to Add Government Debt Instruments as Triparty Repo Objects

KASUS HUKUM

Selama tahun 2024, tidak terdapat kasus hukum yang berdampak signifikan ataupun berpotensi berdampak signifikan terhadap kondisi operasional dan finansial KPEI.

LEGAL REVIEW

In 2024, the Legal Division conducted legal reviews on the following topics:

LEGAL CASES

Throughout 2024, there were no legal cases that had a significant impact or had the potential to significantly affect the operational and financial conditions of IDClear.

Keanggotaan dan Pengembangan Pasar

MEMBERSHIP AND MARKET DEVELOPMENT



Divisi Keanggotaan dan Pengembangan Pasar merupakan pilar strategis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis KPEI. Divisi ini terdiri atas Unit Keanggotaan dan Unit Pengembangan Pasar.

Tanggung jawab utama Divisi Keanggotaan dan Pengembangan Pasar mencakup pengelolaan seluruh aspek keanggotaan, mulai dari proses pendaftaran dan pencabutan keanggotaan hingga pemeliharaan hubungan kelembagaan dengan anggota. Divisi ini juga bertugas memantau kepatuhan anggota dan pengguna jasa KPEI terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan KPEI, SRO, serta regulasi yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Dalam rangka menjaga integritas dan efektivitas layanan, divisi ini turut melaksanakan pemeriksaan terhadap pengguna jasa KPEI secara berkala dan terukur.

The Membership and Market Development Division is a strategic pillar in supporting KPEI's business growth and sustainability. This division consists of Membership Unit and Market Development Unit.

The main responsibilities of the Membership and Market Development Division include managing all aspects of membership, from the process of registering and revoking membership to maintaining institutional relationships with members. This division is also in charge of monitoring the compliance of IDCclear members and service users with the fulfillment of obligations as stipulated in the provisions of IDCclear, SRO, and regulations set by the competent authority. In order to maintain the integrity and effectiveness of services, this division also conducts periodic and measurable checks on IDCclear service users.

Selain aspek kepatuhan dan layanan, Divisi Keanggotaan dan Pengembangan Pasar berperan dalam merumuskan dan menjalankan strategi pemasaran produk serta layanan KPEI secara terpadu. Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong akselerasi pengembangan bisnis, memperluas basis pengguna, serta meningkatkan utilisasi layanan secara optimal dan berkelanjutan.

Seiring dengan perluasan peran KPEI dalam pengembangan pasar uang, KPEI terus memperkuat struktur organisasi guna memastikan efektivitas dan fokus dalam menjalankan fungsinya. Sebagai bagian dari inisiatif strategis Perusahaan, per 1 November 2024, fungsi Pemeriksaan resmi dijalankan oleh unit baru sebagai unit yang terpisah dari Unit Keanggotaan, dimana sebelumnya fungsi Pemeriksaan berada dalam ruang lingkup Unit Keanggotaan.

KEANGGOTAAN

Tanggung jawab utama unit ini adalah mengelola layanan keanggotaan, memantau kepatuhan dan melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya, yang terdiri dari Anggota Kliring (AK) dan Partisipan. Tugas dan wewenang unit diantaranya meliputi pemberian persetujuan atau penolakan atas pendaftaran dan pencabutan keanggotaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen keanggotaan serta penyelenggaraan pelatihan dan kegiatan sosialisasi/ *workshop* terkait layanan jasa dan produk KPEI. Selain itu, Unit Keanggotaan juga memastikan terkait pelaksanaan kepatuhan AK dan Partisipan terhadap peraturan dan ketentuan KPEI, serta melakukan pemeriksaan terhadap AK (sampai dengan periode Oktober 2024). Dengan demikian, seluruh AK dan Partisipan KPEI dipastikan telah memenuhi kewajibannya sesuai peraturan KPEI maupun ketentuan lainnya berkaitan dengan penyediaan kegiatan layanan jasa dan/atau produk oleh KPEI.

Unit Keanggotaan mencatat sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 92 AK dan 202 Partisipan Partisipan yang berstatus aktif dan terdaftar di KPEI, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis AK Type of CM	Jumlah Total
Anggota Kliring Umum (AKU) General Clearing Member (GCM)	-
Anggota Kliring Individual (AKI) Aktif Active Individual Clearing Member (ICM)	92
Anggota Kliring Individual (AKI) Suspensi Suspended Individual Clearing Member (ICM)	1
Jenis Partisipan Type of Participants	Jumlah
e-IPO sebagai Agen Penjual e-IPO as Selling Agent	92
e-IPO sebagai Admin dan Partisipan Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek e-IPO as Admin and Participant of Securities Public Offering Underwriter	70
Account Operator Account Operator	4
Kliring EBUS EBUS Clearing	3

In addition to compliance and service aspects, the Membership and Market Development Division plays a role in formulating and implementing an integrated marketing strategy for IDCclear products and services. This initiative is directed to encourage accelerated business development, expand the user base, and increase optimal and sustainable service utilization.

As IDCclear expands its role in the development of the money market, IDCclear also strengthens its organizational structure to ensure effectiveness and focus in performing its functions. As part of the Company's strategic initiatives, as of November 1, 2024, the official Examination function is assigned to a new unit, as a separate unit from the Membership Unit, which previously oversaw the Examination function

MEMBERSHIP

The main responsibility of this unit is to manage membership services, monitor compliance, and conduct inspections on its members, which consist of Clearing Members (CM) and Participants. The unit's duties and authorities include approving or rejecting membership registration and revocation in accordance with applicable procedures, managing membership documents, and organizing training and outreach/workshops related to IDCclear's services and products. Additionally, the Membership Unit also ensures the compliance of CM and Participants with IDCclear regulations and provisions and conducts inspections on CM (until the period of October 2024). As such, all CM and Participants of IDCclear are ensured to have fulfilled their obligations in accordance with IDCclear regulations and other relevant provisions related to the provision of services and/or products by IDCclear.

As of December 31, 2024, the Membership Unit recorded 92 CMs and 202 active and registered Participants with KPEI, with the following details:

Jenis Partisipan Type of Participants	Jumlah
Perusahaan Efek Daerah Regional Securities Company	1
Institutional Delivery/Settlement Agent Institutional Delivery/Settlement Agent	3
Triparty Repo Triparty Repo	17
PME Bilateral Bilateral SBL	12

Jumlah AK KPEI berstatus aktif di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,37% dibanding tahun 2023, yang hanya berjumlah 89 AK. Peningkatan ini dilatarbelakangi adanya pendaftaran dari Anggota Kliring Individual baru. Sementara itu, jumlah Partisipan di tahun 2024 meningkat 4,12%, dari tahun sebelumnya sebanyak 194 Partisipan, yang disebabkan adanya peminatan atas layanan PME Bilateral, sehingga pendaftaran menjadi partisipan untuk layanan PME Bilateral bertambah.

Pada September 2024, KPEI telah menerapkan konsep *Central Counterparty* (CCP) untuk Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Layanan ini memberikan akses yang lebih besar kepada pelaku pasar untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh KPEI. KPEI melakukan perluasan keanggotaan untuk layanan PUVA kepada pihak perbankan. Perluasan keanggotaan CCP PUVA penting dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan di pasar keuangan, yang nantinya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Sejalan dengan hal tersebut, Unit Keanggotaan telah melaksanakan inisiatif dan mengimplementasikan sistem untuk mendukung pengelolaan keanggotaan CCP PUVA yaitu Sistem Portal Anggota CCP. Hal ini bertujuan untuk mempermudah bagi Calon Anggota CCP dalam melakukan pendaftaran keanggotaan ke KPEI dan juga mempermudah bagi Anggota CCP untuk melakukan pelaporan dan pengkinian data Perusahaan serta laporan keuangan, termasuk melakukan pendaftaran untuk mengikuti kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan/atau *workshop*.

Adapun penyelenggaraan kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, dan *Workshop* selama tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

Pelatihan, Sosialisasi/Workshop bagi AK dan Partisipan
Training, Dissemination/Workshops for CMs and Participants

Kategori Category	Topik Topic	Jumlah Peserta Number of Attendees
Sosialisasi Dissemination	Penyampaian Pengembangan dan Implementasi Mekanisme Penyelesaian Transaksi Bursa Level Anggota Kliring untuk Transaksi Ekuiti Presentation of the Development and Implementation of Exchange Transaction Settlement Mechanism at Clearing Member Level for Equity Transactions	70 orang 70 people
Sosialisasi Dissemination	Pemaparan Simulasi Transaksi, <i>Risk Management</i> , dan Pencatatan Produk Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar <i>Over-the-Counter</i> Melalui <i>Central Counterparty</i> Explanation of Transaction Simulation, Risk Management, and Recording of Interest Rate and Foreign Exchange Derivative Products Over the Counter Through Central Counterparty	67 orang 67 people

The number of IDClear Clearing Members (CMs) with active status in 2024 increased by 3.37% compared to 2023, which only amounted to 89 CMs. This increase was due to the registration of new Individual Clearing Members. Meanwhile, the number of Participants in 2024 increased by 4.12% from the previous year's total of 194 Participants, driven by the interest in the Bilateral SBL service, resulting in an increase in participant registrations for the Bilateral SBL service.

In September 2024, IDClear implemented the Central Counterparty (CCP) concept for Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA) transactions. This service provides broader access for market participants to benefit from IDClear's available facilities. IDClear expanded its membership for PUVA services to include banking institutions. The expansion of CCP PUVA membership is essential to building a more inclusive and sustainable financial market ecosystem, which can, in turn, support broader economic growth.

The number of IDClear Clearing Members (CMs) with active status in 2024 increased by 3.37% compared to 2023, which only amounted to 89 CMs. This increase was due to the registration of new Individual Clearing Members. Meanwhile, the number of Participants in 2024 increased by 4.12% from the previous year's total of 194 Participants, driven by the interest in the Bilateral SBL service, resulting in an increase in participant registrations for the Bilateral SBL service.

The Training, Dissemination, and Workshop activities conducted throughout 2024 included the following:

Pelatihan, Sosialisasi/Workshop bagi AK dan Partisipan
Training, Dissemination/Workshops for CMs and Participants

Kategori Category	Topik Topic	Jumlah Peserta Number of Attendees
Pelatihan - <i>Hands-on system</i> Training – Hands-on system	Hands-on Sistem KPEI terkait Proses Kliring, Penyelesaian, dan Manajemen Risiko Transaksi Derivatif SBNT OTC IDClear Hands-on System Training on Clearing, Settlement, and Risk Management Processes for OTC SBNT Derivative Transactions	66 orang 66 people
Pelatihan - <i>Industrial testing</i> Training – Industrial testing	Industrial Testing Sistem KPEI terkait Proses Kliring, Penyelesaian, dan Manajemen Risiko Transaksi Derivatif SBNT OTC serta Sistem BI terkait Proses Pemindahbukuan Dana/Efek di BI-RTGS dan BI-SSSS IDClear Industrial Testing on Clearing, Settlement, and Risk Management Processes for OTC SBNT Derivative Transactions and BI System Related to Fund/Securities Transfer Process in BI-RTGS and BI-SSSS	70 Orang 70 people
Sosialisasi Dissemination	<i>Refreshment</i> Praktik ESG di Industri Pasar Modal Indonesia ESG Practice Refreshment in the Indonesian Capital Market Industry	129 Orang 129 people
Sosialisasi Dissemination	Fasilitas Pinjam Meminjam Efek (PME) dan <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) serta Reksadana sebagai Agunan <i>Offline</i> Securities Lending and Borrowing (SBL) and Repurchase Agreement (Repo) Facilities as well as Mutual Funds as Offline Collateral	223 Orang 223 people
Sosialisasi dan Pelatihan Dissemination and Training	Sosialisasi dan Kegiatan Pengujian Pembaharuan Sistem Pusat Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (SPP-MKBD) Dissemination and Testing Activities for the Updated Net Adjusted Working Capital Reporting System (SPP-MKBD)	395 Orang 395 people
Sosialisasi Dissemination	<i>Central Counterparty</i> Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Central Counterparty for Money Market and Foreign Exchange Market	254 Orang 254 people
Sosialisasi Dissemination	<i>Compliance</i> Anggota Kliring terhadap Peraturan dan Ketentuan KPEI Clearing Members' Compliance with IDClear's Rules and Regulations	139 Orang 139 people

KPEI juga secara aktif melaksanakan berbagai jenis pelatihan, sosialisasi, dan *workshop* yang dirancang khusus berdasarkan permintaan AK dan Partisipan.

IDClear also actively conducts various types of training, dissemination, and workshops specifically designed based on requests from Clearing Members (CMs) and Participants.

Pelatihan Khusus Sesuai Permintaan AK dan Partisipan
Specific Training Requested by CM and Participants

Materi Topic	Nama AK/Partisipan Name of CMs/Participants	Jumlah Peserta Total Attendees
Pinjam Meminjam Efek Securities Lending and Borrowing	PT FAC Sekuritas	12 orang 12 people
Trading Limit Trading Limit	PT Maybank Sekuritas Indonesia	18 orang 18 people
	PT Phintraco Sekuritas	18 orang 18 people
	PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	12 orang 12 people
	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	10 orang 10 people
	PT Kiwoom Sekuritas Indonesia	15 orang 15 people
	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	14 orang 14 people
	PT Kiwoom Sekuritas Indonesia	15 orang 15 people
	PT Mandiri Sekuritas	15 orang 15 people
	PT Bahana Sekuritas	36 orang
	PT Erdikha Elit Sekuritas	18 orang 18 people
	PT Indo Harvest Sekuritas	15 orang 15 people
Pinjam Meminjam Efek Bilateral Bilateral Securities Lending and Borrowing	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	78 orang 78 people
	PT Erdikha Elit Sekuritas	13 orang 13 people
Triparty Repo Triparty Repo	PT Indo Harvest Sekuritas	7 orang 7 people

Aktivitas pemantauan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban AK dan Partisipan dilakukan secara berkala oleh Unit Keanggotaan. KPEI memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berupa tindakan pembinaan atau pengenaan sanksi kepada AK dan Partisipan, apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya ketidakpatuhan atau pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, Unit Keanggotaan juga berkolaborasi dan berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan tim dari SRO lain, serta mengadakan pertemuan rutin untuk mendukung kegiatan pengawasan bersama OJK, sebagai regulator pasar modal.

Sepanjang tahun 2024, KPEI melakukan pemeriksaan kepada 2 AK, yang sifatnya rutin. KPEI juga memberikan tindakan pembinaan berupa penerbitan 25 Surat *Reminder*, 4 Surat Kehati-hatian, dan pengenaan sanksi berupa 1 Teguran Tertulis atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh AK.

Setiap tahunnya, Unit Keanggotaan juga melakukan pengukuran terhadap kualitas layanan operasional yang diberikan oleh KPEI kepada AK melalui kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan. Di tahun 2024, survei ini melibatkan 89 responden yang merupakan AK berstatus aktif per Mei 2024. Adapun tingkat kepuasan responden terhadap kualitas beberapa layanan KPEI diperoleh kisaran nilai 79,40% hingga 83,88% untuk layanan kliring dan penyelesaian, teknologi informasi, hukum, keanggotaan dan pengembangan pasar, informasi dan media komunikasi, kualitas *customer care*, serta penagihan. Sementara itu, untuk tingkat kepuasan terhadap layanan KPEI secara umum diperoleh nilai 82,87%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 82,34%. Pada survei tersebut, KPEI juga menerima berbagai masukan dari responden untuk perbaikan layanan di masa mendatang, yang meliputi stabilitas sistem operasional hingga perubahan fitur-fiturnya.

PENGEMBANGAN PASAR

Kegiatan Pengembangan Pasar KPEI bertujuan untuk mendukung *Market Deepening* dan *Market Development* di area Pasar Modal dan Pasar Keuangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan kepada pelaku pasar untuk meningkatkan *awareness* atas produk, peningkatan penggunaan layanan atas *own product* KPEI, peningkatan jumlah investor pasar modal dan implementasi CCP Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di Pasar Keuangan Indonesia. Rangkaian aktivitas ini dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Strategi pengembangan pasar untuk masing-masing produk dan layanan KPEI disesuaikan berdasarkan karakteristiknya meliputi segmentasi target market dan penyelarasan pesan komunikasi. Fokus dalam strategi pengembangan pasar adalah penetrasi pasar berupa penambahan jumlah partisipan PME dan *Triparty Repo*, serta penambahan Anggota Kliring CCP PUVA. Dalam melaksanakan peran

Compliance monitoring activities related to the obligations of Clearing Members (CMs) and Participants are carried out regularly by the Membership Unit. IDClear has the authority to enforce regulations through corrective actions or the imposition of sanctions on CMs and Participants if non-compliance or violations are identified during monitoring. In addition, the Membership Unit collaborates and coordinates closely with representatives from other SRO teams and conducts regular meetings to support joint supervision activities with the Financial Services Authority (OJK), as the capital market regulator.

Throughout 2024, IDClear conducted routine inspections of 2 CMs. IDClear also issued corrective actions in the form of 25 Reminder Letters, 4 Caution Letters, and imposed 1 Warning Letter for various violations committed by CMs.

Each year, the Membership Unit also measures the quality of operational services provided by IDClear to Clearing Members (CMs) through a Customer Satisfaction Survey. In 2024, the survey involved 89 respondents, consisting of active CMs as of May 2024. The satisfaction level of respondents regarding the quality of several IDClear services ranged from 79.40% to 83.88%, covering clearing and settlement, information technology, legal, membership and market development, information and media communication, customer care quality, and billing services. Meanwhile, the overall satisfaction level toward IDClear's services reached 82.87%, higher than in 2023, which was 82.34%. Through this survey, IDClear also received various suggestions from respondents for future service improvements, including the stability of operational systems and enhancements to system features.

MARKET DEVELOPMENT

The Market Development activities of IDClear aim to support Market Deepening and Market Development in the Capital Market and Financial Market sectors. These activities are carried out through outreach to market participants to increase awareness of products, boost the use of IDClear's own services, increase the number of capital market investors, and implement the CCP for Money Market and Foreign Exchange Market (PUVA) in Indonesia's financial market. These activities are conducted in an integrated and sustainable manner.

The market development strategy for each IDClear product and service is tailored based on its characteristics, including target market segmentation and alignment of communication messages. The focus of the market development strategy is on market penetration, such as increasing the number of SBL and Triparty Repo participants, as well as adding CCP PUVA Clearing

ini, kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan pertemuan dengan asosiasi pelaku pasar modal, asosiasi pelaku perbankan, pertemuan 1-on-1 dengan Perusahaan Efek dan Perbankan, pelaksanaan FGD, dan sosialisasi kepada Perusahaan Efek, Perbankan dan Partisipan lainnya.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan PME, KPEI senantiasa berkoordinasi dengan BEI untuk menciptakan *demand creation* melalui pengembangan produk baru bursa (produk derivatif dan *Structure Warrant*) serta program revitalisasi *short selling*. KPEI juga berupaya untuk melakukan peningkatan sisi *supply* dengan melaksanakan kegiatan FGD dengan Perusahaan efek, Bank Kustodian, Asosiasi Pelaku Reksadana (APRDI, AMII) untuk mendapat masukan guna perluasan peran reksadana menjadi *lender* PME.

Adapun Pengembangan untuk produk pasar keuangan, KPEI melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia, OJK Perbankan dan juga perbankan dalam implementasi CCP PUVA yang diluncurkan pada tanggal 30 September 2024 dengan anggota yang terdiri dari 8 Bank. Untuk memberikan pemahaman tentang peran CCP PUVA kepada seluruh pelaku perbankan, KPEI melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* dan menggali minat pelaku perbankan untuk menjadi anggota CCP PUVA.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) di Pasar Modal serta *Central Counterparty* (CCP) di Pasar Keuangan, KPEI melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. KPEI melakukan fungsi pengawasan terhadap transaksi di Pasar Modal dan Pasar Keuangan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam proses pengawasan, KPEI menerapkan kriteria dan parameter tertentu guna memastikan terciptanya pasar yang wajar, teratur, efisien, adil, dan transparan. Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan data internal KPEI serta sumber data lainnya dari otoritas terkait. Dalam melakukan pengawasan, KPEI juga menerapkan pengawasan terintegrasi bersama dengan OJK dan *Self-Regulatory Organization* (SRO) lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di sektor Pasar Modal.

Selain itu, dalam rangka mendukung terselenggaranya Pasar Modal dan Pasar Keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, KPEI juga melakukan fungsi Pemeriksaan. Fungsi Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan kepatuhan Anggota Kliring maupun Partisipan di Pasar Modal dan Anggota CCP PUVA di Pasar Keuangan terhadap peraturan-peraturan OJK, BEI, KPEI, KSEI, dan serta peraturan dan regulasi yang berlaku lainnya.

Pemeriksaan yang dilakukan KPEI meliputi pemeriksaan rutin dan pemeriksaan insidental. Pemeriksaan rutin maupun insidental dapat dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak eksternal seperti OJK, BEI

Members. In executing this role, activities include meetings with capital market associations, banking associations, one-on-one meetings with Securities Companies and Banks, conducting Focus Group Discussions (FGDs), seminars, and dissemination activities for Securities Companies, Banks, and other Participants.

To optimize the use of SBL services, IDCclear consistently coordinates with IDX to create demand through the development of new exchange products (derivatives and Structure Warrants) as well as the revitalization program for short selling. IDCclear also works to increase supply by conducting Focus Group Discussions (FGDs) with Securities Companies, Custodian Banks, and the Mutual Fund Industry Association (APRDI, AMII) to gather input for expanding the role of mutual funds as SBL lenders.

As for the development of financial market products, IDCclear has partnered with Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) for banking, and banks in the implementation of the CCP PUVA, which was launched on September 30, 2024, with 8 participating banks. To raise awareness of the role of CCP PUVA among banking participants, IDCclear conducted dissemination activities to enhance understanding and gauge the interest of banking players in becoming CCP PUVA members.

SUPERVISION AND INSPECTION

In carrying out its role as a Clearing and Guarantee Institution (LKP) in the Capital Market and as a Central Counterparty (CCP) in the Financial Market, IDCclear performs supervision and inspection functions. IDCclear supervises transactions in the Capital Market and Financial Market in accordance with the provisions set by IDCclear, Bank Indonesia (BI), and the Financial Services Authority (OJK). In the supervision process, IDCclear applies specific criteria and parameters to ensure the creation of a fair, orderly, efficient, equitable, and transparent market. Supervision is conducted effectively and efficiently by utilizing IDCclear's internal data, as well as other data sources from relevant authorities. In performing supervision, IDCclear also applies integrated oversight together with OJK and other Self-Regulatory Organizations (SRO) to enhance the effectiveness of supervision in the Capital Market sector.

Furthermore, to support the implementation of a Capital Market and Financial Market that is orderly, fair, transparent, and accountable, IDCclear also performs inspection functions. The inspection function is carried out to ensure compliance with the obligations and regulations by Clearing Members, Participants in the Capital Market, and CCP PUVA Members in the Financial Market, in accordance with the regulations of OJK, IDX, KSEI, IDCclear, and other applicable laws and regulations.

The inspections conducted by IDCclear include routine inspections and incidental inspections. Both routine and incidental inspections can be conducted independently or jointly with external parties such as OJK, IDX, or other

maupun SRO lain (*joint audit*). Seluruh proses dan kegiatan pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari kegiatan pemeriksaan rutin, KPEI menyusun rencana pemeriksaan (*audit plan*) tahunan. Audit plan disusun berdasarkan *risk based* dengan menggunakan *risk factors* (parameter risiko) tertentu seperti profil risiko AK, kecukupan nilai MKBD, hasil audit terdahulu, dan parameter lainnya. Dokumen audit plan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Dalam pelaksanaan rencana audit tahunan, KPEI juga berkoordinasi dengan OJK dan SRO lain terkait target dan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan selama periode satu tahun. Sedangkan untuk pemeriksaan yang bersifat insidental, KPEI melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu apabila terdapat indikasi pelanggaran atas peraturan KPEI dan pelanggaran kepatuhan dari Anggota Kliring maupun Partisipan.

Selain melakukan pemeriksaan rutin dan insidental, KPEI juga melakukan pemeriksaan kesiapan operasional beserta kesiapan infrastruktur terhadap Calon Anggota Kliring atau Calon Partisipan di Pasar Modal maupun Calon Anggota CCP di Pasar Keuangan yang mengajukan permohonan atas layanan atau jasa dari KPEI.

Sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan, KPEI menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi tentang temuan pemeriksaan beserta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh *auditee*. KPEI akan memonitor secara berkala atas status pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh *auditee* hingga statusnya *closed*.

RENCANA UNIT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN UNTUK TAHUN 2025

Guna meningkatkan peran pengawasan KPEI, khususnya terhadap transaksi di Pasar Modal, pada tahun 2025 Unit Pengawasan berencana meningkatkan pengawasan di internal KPEI melalui pembuatan sistem *monitoring* dan alert pengawasan, serta melakukan *review* parameter, prosedur, dan melakukan simulasi yang berkaitan dengan Transaksi Dipisahkan. Melalui inisiatif tersebut, diharapkan dapat meningkatkan KPEI dalam pengawasan di Pasar Modal dan dapat meminimalisasi dan mencegah terjadinya kegagalan transaksi Bursa, serta untuk meningkatkan kontribusi KPEI dalam Pengawasan Terintegrasi.

Dalam lingkup Pasar Keuangan, akan dilakukan penyusunan *framework* Pengawasan Transaksi di Pasar Uang sesuai dengan produk yang di implemantasikan oleh KPEI dimana pada tahap awal adalah DNDF dan ke depannya TPA Repo dan juga produk lainnya mengikuti *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

SRO (*joint audits*). All inspection processes and activities are carried out based on established internal policies and procedures.

As part of the routine inspection activities, IDClear prepares an annual audit plan. The audit plan is developed based on a risk-based approach using specific risk factors, such as the risk profile of CMs, the adequacy of MKBD, previous audit results, and other parameters. The audit plan document must be approved by the Board of Directors before being implemented. In carrying out the annual audit plan, IDClear also coordinates with OJK and other SRO regarding the targets and scope of inspections to be conducted during the one-year period. For incidental inspections, IDClear conducts inspections as needed when there are indications of violations of IDClear's regulations and compliance breaches by Clearing Members or Participants.

In addition to routine and incidental inspections, IDClear also conducts operational readiness inspections and infrastructure readiness checks for prospective Clearing Members or prospective Participants in the Capital Market and prospective CCP Members in the Financial Market who have applied for IDClear's services or products.

As a result of the inspections conducted, IDClear prepares an Inspection Report (LHP) that includes the findings of the inspection along with recommendations that must be followed up by the auditee. IDClear will monitor the status of the implementation of the follow-up actions from the routine inspections conducted by the auditee on a regular basis until the status is marked as closed.

SUPERVISION AND INSPECTION UNIT PLAN FOR 2025

To strengthen IDClear's supervisory role, particularly over transactions in the Capital Market, in 2025 the Supervision Unit plans to enhance internal supervision within IDClear by developing a monitoring and alert system, reviewing parameters and procedures, and conducting simulations related to Separated Transactions. Through these initiatives, it is expected that IDClear's oversight in the Capital Market will improve, transaction failures on the Exchange can be minimized and prevented, and IDClear's contribution to Integrated Supervision can be enhanced.

Within the scope of the Financial Market, a framework for Transaction Supervision in the Money Market will be developed in accordance with the products implemented by IDClear, beginning with DNDF and subsequently including TPA Repo and other products aligned with the Blueprint for Money Market and Foreign Exchange Market Deepening.

Dalam Audit Plan 2025, KPEI memiliki target pemeriksaan rutin terhadap 4 (empat) Anggota Kliring di Pasar Modal. Ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan di tahun 2025 mencakup Proses Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa, Pelaksanaan Pengelolaan Agunan, Pelaksanaan Manajemen Risiko Anggota Kliring, serta Pelaksanaan Transaksi Repo, Reverse Repo dan Operasional *Triparty Repo*.

Seiring dengan akan diimplementasikannya *Triparty Repo Agent* untuk instrument SBN di Pasar Keuangan di tahun 2025, KPEI juga akan melakukan pemeriksaan kesiapan operasional dan infrastruktur terhadap pilot bank *Triparty Repo Agent*.

Selain itu, di tahun 2025 KPEI juga akan melakukan pemeriksaan terhadap calon Anggota Kliring, Calon Partisipan maupun Calon Anggota CCP PUVA serta melakukan pemeriksaan yang sifatnya insidental jika ada.

In the 2025 Audit Plan, IDClear targets routine examinations of 4 (four) Clearing Members in the Capital Market. The scope of examination to be conducted in 2025 includes the Clearing and Settlement Process of Exchange Transactions, Collateral Management Implementation, Clearing Member Risk Management Implementation, as well as the Execution of Repo, Reverse Repo Transactions, and *Triparty Repo* Operations.

In line with the upcoming implementation of the *Triparty Repo Agent* for government securities (SBN) instruments in the Financial Market in 2025, IDClear will also assess operational and infrastructure readiness for the pilot bank acting as the *Triparty Repo Agent*.

In addition, in 2025, IDClear will also conduct examinations of prospective Clearing Members, prospective Participants, and prospective CCP PUVA Members, as well as incidental examinations if required.



Teknologi Informasi

INFORMATION TECHNOLOGY



KPEI berkomitmen untuk terus memperkuat dan mengembangkan sistem serta layanan Teknologi Informasi (TI) dengan mengintegrasikan berbagai inovasi terbaru yang dapat meningkatkan kinerja operasional, keamanan, ketersediaan, serta keandalan sistem secara menyeluruh. KPEI juga memastikan bahwa TI berperan sebagai pendorong utama dalam pengembangan berbagai layanan bisnis baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. KPEI terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memastikan penerapan teknologi di lingkup pasar modal dan pasar keuangan Indonesia.

Tanggung jawab atas penerapan dan pengembangan sistem serta infrastruktur TI di KPEI terbagi dalam dua divisi yang saling bersinergi, yaitu

IDClear is committed to continuously strengthening and developing its Information Technology (IT) systems and services by integrating the latest innovations that can enhance operational performance, security, availability, and overall system reliability. IDClear also ensures that IT serves as a key driver in the development of new business services that add value for stakeholders. IDClear continues to innovate and adapt to technological advancements while ensuring the effective application of technology within Indonesia's capital and financial markets.

The responsibility for the implementation and development of IT systems and infrastructure at IDClear is shared between two synergistic divisions:

Divisi Operasional Teknologi Informasi (OTI) dan Divisi Pengembangan Teknologi Informasi (PTI). Divisi OTI memiliki peran utama dalam menjaga kelancaran operasional sistem informasi yang mendukung seluruh proses bisnis inti perusahaan serta layanan yang diberikan. Sementara itu, Divisi PTI memiliki tanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem bisnis baru yang inovatif yang mampu memenuhi harapan pengguna.

Per 1 November 2024, KPEI telah melakukan perubahan struktur organisasi sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap perluasan peran Perusahaan di Pasar Keuangan. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawab KPEI di ekosistem keuangan yang semakin dinamis. Salah satu dampak dari perubahan ini adalah adanya perluasan dan peleburan pada divisi yang berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI).

KPEI menyusun kebijakan TI secara komprehensif untuk mendukung tugas dan tanggung jawab kedua divisi tersebut. Kebijakan ini dirancang secara teliti dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional yang semakin kompleks dan dinamis. TI KPEI didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi dan keterampilan teknis yang mumpuni. Para profesional TI yang ada di KPEI memiliki peranan vital dalam mengimplementasikan inovasi dan solusi TI yang berkelanjutan. Keberadaan SDM yang terampil dan berkompeten ini juga menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia, memastikan bahwa KPEI tidak hanya mampu menunjukkan ketahanan, tetapi juga dapat terus berkembang, beradaptasi, dan berinovasi.

STRATEGI DIVISI OTI

Dengan mengacu pada IT *Strategic Plan* (ITSP) untuk periode 2022–2026 rencana kerja Divisi Operasional Teknologi Informasi (OTI) KPEI disusun secara terstruktur dan berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam ITSP telah dirumuskan *roadmap* yang jelas dan terperinci, mencakup berbagai tahapan pengembangan dan implementasi teknologi yang selaras dengan tujuan bisnis KPEI. ITSP juga didukung oleh prinsip tata kelola TI yang mencakup tiga aspek penting, yaitu *People, Process & Governance*, dan *Technology*.

Selama tahun 2024, Divisi OTI memfokuskan upayanya untuk mewujudkan 4 (empat) sasaran utama, yaitu *System Stability*, *Business Continuity*, *IT Service Excellence* dan *IT Environment*. Sasaran-sasaran tersebut diwujudkan melalui sejumlah inisiatif yang dijelaskan pada tabel berikut, dengan nilai investasi di 2024 sebesar Rp32.045.991.920,00.

the Information Technology Operations Division (OTI) and the Information Technology Development Division (PTI). The OTI Division plays a key role in maintaining the smooth operation of information systems that support the Company's core business processes and services. Meanwhile, the PTI Division is responsible for designing, developing, and implementing new and innovative business systems that meet user expectations.

As of November 1, 2024, IDClear has implemented an organizational restructuring as part of its efforts to adapt to the Company's expanded role in the financial market. This change aims to enhance effectiveness in carrying out IDClear's functions and responsibilities within an increasingly dynamic financial ecosystem. One of the impacts of this restructuring is the expansion and integration of divisions related to Information Technology (TI).

IDCclear has developed a comprehensive IT policy to support the duties and responsibilities of these two divisions. This policy is carefully designed to address increasingly complex and dynamic operational needs. IDCclear's IT operations are supported by highly competent human resources with strong technical expertise. The IT professionals at IDCclear play a vital role in implementing sustainable IT innovations and solutions. These skilled and capable professionals serve as one of the main pillars in strengthening Indonesia's financial services sector, ensuring that IDCclear not only maintains resilience but also continues to grow, adapt, and innovate.

OTI DIVISION'S STRATEGY

Referring to the IT Strategic Plan (ITSP) for the 2022–2026 period, the work plan of the Information Technology Operations Division (OTI) of IDCclear is structured and oriented toward achieving long-term goals. The ITSP outlines a clear and detailed roadmap that includes various stages of technology development and implementation aligned with IDCclear's business objectives. The ITSP is also supported by IT governance principles encompassing three key aspects: *People, Process & Governance*, and *Technology*.

Throughout 2024, OTI Division focused its efforts on achieving 4 (four) main objectives: *System Stability*, *Business Continuity*, *IT Service Excellence*, and a *Secure IT Environment*. These objectives were realized through a series of initiatives described in the following table, with a total investment value of Rp32,045,991,920.00 in 2024.

Proyek Prioritas Strategis 2024

2024 Strategic Priority Projects

Sasaran Strategis Strategic Target	Inisiatif Initiative	Status (per akhir 2024) Status (by the end of 2024)
System Stability	Implementasi ERP modul SDM Implementation of ERP for HR Module	Sedang Berlangsung In Progress
	Pengembangan <i>Billing System</i> Untuk <i>Streamline Baru</i> pada ERP Development of Billing System for New Streamline on ERP	Sedang Berlangsung In Progress
	<i>Development Environment</i> Aplikasi Mobile Mobile Application Development Environment	Selesai Completed
	Peremajaan Laptop dan AIO 2024 Laptop and AIO Refresh 2024	Selesai Completed
	Pemenuhan Lisensi Komponen Aplikasi Bisnis Fulfillment of Business Application Component Licenses	Selesai Completed
	Penambahan <i>Baremetal Server</i> Addition of Baremetal Server	Selesai Completed
	Penambahan <i>Storage area</i> NDC, NDC2, dan DRC2 Addition of Storage Area at NDC, NDC2, and DRC2	Selesai Completed
	Penambahan <i>Server Hypervisor</i> DC, NDC2, dan DRC2 Addition of Hypervisor Servers at DC, NDC2, and DRC2	Selesai Completed
Business Continuity	Kajian Konsolidasi DC dan DRC Study on DC and DRC Consolidation	Sedang Berlangsung In Progress
	Pembangunan Ruang PDC di DC dan DRC Bursa Construction of PDC Room at DC and DRC Exchange	Selesai Completed
	Pembangunan Sistem <i>Backup</i> untuk VMWare Development of Backup System for VMware	Selesai Completed
Secure IT Environment	<i>Workshop Secure Development Life Cycle</i> (SDLC) Secure Development Life Cycle (SDLC) Workshop	Selesai Completed
	Implementasi Perlindungan Kebocoran Data Tahap 1 Implementation of Data Leakage Protection Phase 1	Selesai Completed
	Implementasi Antivirus di <i>Openshift</i> Antivirus Implementation on OpenShift	Selesai Completed
	<i>Security Audit</i> Infrastruktur CCP SBNT dan Kliring SBN Security Audit of CCP SBNT and Government Bonds Clearing Infrastructure	Selesai Completed
	Asuransi <i>Cyber</i> Cyber Insurance	Sedang Berlangsung In Progress
	<i>Media Disposai</i> Media Disposai	Selesai Completed
IT Service Excellence	<i>Monitoring and Operation Center</i>	Selesai Completed

PELAKSANAAN FUNGSI DIVISI OTI TAHUN 2024

Tantangan dalam mewujudkan strategi OTI pada tahun 2024 adalah:

1. Terjadinya beberapa insiden yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian transaksi bursa.
Cara menanggulangi:
 - Bekerja sama dengan tim internal KPEI dan vendor terkait untuk menemukan cara yang paling efektif agar insiden segera dapat di atasi.
 - Melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencegah insiden terulang kembali, meliputi perbaikan di area teknologi, proses, dan SDM.

IMPLEMENTATION OF THE DIVISION'S FUNCTIONS IN 2024

The challenges in implementing the OTI strategy in 2024 include:

1. The occurrence of several incidents that caused delays in stock exchange transaction settlements.
Mitigation efforts:
 - Collaborating with internal IDCclear teams and relevant vendors to identify the most effective ways to resolve the incidents promptly.
 - Implementing improvements to prevent recurrence of such incidents, including enhancements in technology, processes, and human resources.

2. Menjaga semangat dan komitmen dari seluruh tim OTI untuk senantiasa konsisten dalam mencapai target yang telah direncanakan, mempertimbangkan dinamika perubahan yang tinggi.

Cara menanggulangi:

- Melakukan pemantauan proyek lebih ketat dan memastikan semua isu proyek dapat diidentifikasi lebih awal untuk segera dirumuskan alternatif solusinya.
- Melakukan pelaporan dan pertemuan secara *offline* dan *daring* secara rutin agar segala potensi permasalahan dapat dideteksi lebih dini sehingga proses mitigasinya dapat lebih efektif dan target terpenuhi sesuai rencana.

3. Adanya aplikasi, komponen aplikasi, *operating system/firmware*, maupun *hardware* yang sudah *end of support* (EOS) namun belum dapat dilakukan penggantian dengan segera.

Cara menanggulangi:

- Melakukan *penetration test*, *vulnerability assessment*, dan asesmen risiko terkait dengan aset-aset TI yang sudah EOS secara rutin. Berkoordinasi dengan Unit PRK dan unit terkait untuk memantau pelaksanaan mitigasinya.
- Menyusun rencana *upgrade*/penggantian aset yang sudah EOS jika aset tersebut berada dalam wewenang Divisi OTI.
- Melakukan koordinasi dengan Divisi PTI untuk komponen aplikasi yang sudah EOS.
- Melakukan migrasi (*physical server to virtual*) (P2V) untuk server-server yang sudah EOS, khususnya jika aplikasinya belum bisa di-*upgrade*.
- Meningkatkan pemantauan keamanan TI untuk memastikan aset-aset yang EOS tersebut tidak dieksploitasi.

4. Biaya pemeliharaan dan komunikasi TI tinggi.

Cara menanggulangnya:

- Menyesuaikan kembali ruang lingkup pemeliharaan berdasarkan fungsi dan risiko aset TI tersebut.
- Melakukan kajian konsolidasi *data center* sebagai tahap awal pelaksanaan konsolidasi *data center* yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi beban pemeliharaan, komunikasi, dan sewa layanan dan infrastruktur TI.
- Melakukan negosiasi ulang dengan vendor terkait jika memungkinkan.

5. Perubahan struktur organisasi, keterbatasan SDM khususnya di area operasional, dan *go live*-nya CCP PUA menghendaki semua tim OTI untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru dengan tetap menjaga fokus dalam menyelesaikan semua inisiatif yang telah direncanakan.

Cara menanggulangi:

- Konsolidasi internal OTI, *coaching*, *conseling*, dan *mentoring* kepada semua personil OTI yang terdampak perubahan tersebut.

2. Maintaining the enthusiasm and commitment of OTI team to consistently achieve the planned targets, while considering the high dynamics of change.

Mitigation efforts:

- Conducting more rigorous project monitoring and ensuring that all project issues are identified early so that alternative solutions can be formulated promptly.
- Carrying out regular reporting and meetings, both *offline* and *online*, to detect potential problems at an early stage, enabling more effective mitigation and ensuring that targets are met as planned.

3. The presence of applications, application components, operating systems/firmware, or hardware that have reached end of support (EOS) but cannot be immediately replaced.

Mitigation efforts:

- Conducting penetration tests, vulnerability assessments, and risk assessments related to EOSIT assets routinely. Coordinating with the PRK Unit and other relevant units to monitor the implementation of mitigation measures.
- Developing upgrade/replacement plans for EOS assets under the authority of the OTI Division.
- Coordinating with the PTI Division for EOS-ready application components.
- Performing P2V (physical server to virtual) migration for EOS servers, especially when the associated applications cannot yet be upgraded.
- Enhancing IT security monitoring to ensure that EOS assets are not exploited.

4. High IT maintenance and communication costs.

Mitigation efforts:

- Adjusting the scope of maintenance based on the function and risk level of the IT assets.
- Conducting a feasibility study on data center consolidation as an initial step toward implementation, which is expected to eventually reduce IT-related maintenance, communication, services rental and infrastructure costs.
- Renegotiating with relevant vendors where possible.

5. Organizational restructuring, limited human resources, particularly in operational areas, and the *go-live* of CCP PUA require all OTI teams to adapt to new conditions while maintaining focus on completing all planned initiatives.

Mitigation efforts:

- Conducting internal consolidation within OTI, as well as providing coaching, counseling, and mentoring for all OTI personnel affected by the changes.

- Mengelola dan menyusun perencanaan kembali semua inisiatif OTI yang sedang berjalan, menunda pelaksanaan inisiatif yang tidak dapat dilaksanakan, dan membuat penyesuaian pelaksanaan piket operasional sehingga semua aspek operasional dapat dilakukan dengan baik meskipun dengan SDM yang terbatas.
- Memastikan semua target kinerja dapat dipenuhi dengan penambahan *jobdesc* sementara kepada personil OTI yang kompeten.

6. Sebagian besar *weekend* digunakan untuk mock sehingga menyebabkan waktu implementasi untuk inisiatif dan perubahan teknis yang menjadi domain Divisi OTI menjadi sangat terbatas dan *work life balance* personil OTI terganggu.

Cara menanggulangi:

- Melakukan *preconfig* perangkat, migrasi perangkat satu per satu, menyediakan koneksi VPN dari DRC, atau strategi lainnya agar implementasi inisiatif yang bersinggungan dengan waktu *mock* dapat dikerjakan dengan baik.
- Mengatur jadwal piket staf baik untuk dalam operasional harian dan dukungan pelaksanaan *mock*.
- Berkoordinasi dengan Divisi PTI agar pelaksanaan *mock* lebih efektif.

7. Beragamnya ekspektasi pengguna atas sistem yang sedang dikembangkan di tengah sumber daya yang terbatas.

Cara menanggulangi:

- Melakukan diskusi intensif dan inklusif bersama seluruh *stakeholder* atas kebutuhan dan fungsi-fungsi yang diharapkan tersedia dari sebuah solusi sistem informasi.
- Melakukan negosiasi dengan rekanan untuk mendapatkan solusi terbaik dalam koridor anggaran yang direncanakan.
- Menyusun rencana, mengendalikan dan mengawasi eksekusi kegiatan pengembangan agar dicapai hasil yang optimal sesuai target yang diharapkan.
- Menjaga komitmen bersama ditengah himpitan skala prioritas yang ketat melalui komunikasi yang asertif.

Personil OTI terdiri dari:

- 1 orang Kepala Divisi
- 3 orang Kepala Unit
- 1 orang ITSS
- 3 orang staf Unit OPU
- 5 orang staf Unit OIT
- 8 orang staf Unit OPM

Pembagian fungsi dan kompetensi personil OTI adalah sebagai berikut:

- Managing and rescheduling all ongoing OTI initiatives, postponing those that cannot be implemented, and adjusting the implementation of operational shifts to ensure all operational aspects continue to run effectively despite limited human resources.

- Ensuring all performance targets are met by temporarily assigning additional responsibilities to competent OTI personnel.

6. The majority of weekends are used for mock sessions, significantly limiting the time available for implementing initiatives and technical changes under the OTI Division's responsibility, thereby disrupting the work-life balance of OTI personnel.

Mitigation efforts:

- Preconfiguring devices, migrating devices one by one, providing VPN connections from the DRC, or employing other strategies to ensure initiatives overlapping with mock sessions can be effectively executed.
- Organizing staff schedules for both daily operations and mock support duties.
- Coordinating with the PTI Division to ensure more effective mock execution.

7. The diversity of user expectations for systems under development amidst limited resources.

Mitigation efforts:

- Conducting intensive and inclusive discussions with all stakeholders to clarify the needs and expected functions of the information system solution.
- Negotiating with partners to obtain the best solutions within the planned budget framework.
- Planning, controlling, and monitoring the execution of development activities to ensure optimal results aligned with expected targets.
- Maintaining a shared commitment despite tight prioritization pressures through assertive communication.

OTI personnel consist of:

- 1 Division Head
- 3 Unit Heads
- 1 ITSS
- 3 staff members of OPU Unit
- 5 staff members of OIT Unit
- 8 staff members of OPM Unit

The division of functions and competencies among OTI personnel is as follows:

No	Peran dan Fungsi Role and Function	Unit Unit	Jumlah Personil Number of Personnel	Kompetensi Competence
1	Network Admin	OIT	3	• Network Design • Network Operation, Management, and Maintenance • IT Security • Operating System • Programming • Enterprise Architecture • Incident and Problem Management • IT Change Management • IT Project Management • IT Asset Management • IT Risk Management • IT Governance
2	Infrastructure Admin	OIT	2	• Software Infrastructure Operation, Management, and Maintenance • Desktop Management • Helpdesk Management • IT Security • Operating System • Enterprise Architecture • Incident and Problem Management • IT Change Management • IT Project Management • IT Asset Management • IT Risk Management • IT Governance
3	Data Center Admin	OIT	1	• Datacenter Operation, Management, and Maintenance • Desktop Management • Helpdesk Management • IT Security • Operating System • Enterprise Architecture • Incident and Problem Management • IT Change Management • IT Project Management • IT Asset Management • IT Risk Management • IT Governance
4	Application Admin	OPM dan OPU OPM and OPU	4	• Business Application Operation, Management, and Maintenance • IT Security • Operating System • Programming • Enterprise Architecture • Incident and Problem Management • IT Change Management • IT Project Management • IT Asset Management • IT Risk Management • IT Governance
5	Database Admin	OPM dan OPU OPM and OPU	3	• Database Operation, Management, and Maintenance • Application Operation • IT Security • Operating System • Programming • Enterprise Architecture • Incident and Problem Management • IT Change Management • IT Project Management • IT Asset Management • IT Risk Management • IT Governance
6	System Admin	OPM	3	• Hardware Operation, Management, and Maintenance • Application Operation • IT Security • Network • Operating System • Programming • Enterprise Architecture • Incident and Problem Management • IT Change Management • IT Project Management • IT Asset Management • IT Risk Management • IT Governance

No	Peran dan Fungsi Role and Function	Unit Unit	Jumlah Personil Number of Personnel	Kompetensi Competence
7	ITSS	ITSS	1	- Information Security Management System - IT Security Standard - IT Operation, Monitoring, and Maintenance - Application - Database Management - Operating System - Hardware - Network and Security Device - Programming - Enterprise Architecture - Incident and Problem Management - IT Change Management - IT Project Management - IT Asset Management - IT Risk Management - IT Governance - Leadership

No	Fungsi Function	Pelatihan/Sharing Training/Sharing
1	Network Admin	- Application Centric Infrastructure - CCNA - IHT Secure SDLC - JPS LinkNet - Workshop SoC Blueprint - JPS HPE - Cisco Security Summit - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - IHT Building a Strong Corporate Culture - Sharing session: Teams app introduction - Sharing session: Kewajiban UU PDP
2	Infrastructure Admin	- Office 365 Fundamental - Windows Autopilot - Sharing session: Teams app introduction - Sharing session: Indonesia AI - Sharing session: Redhat on Azure - Sharing session: MS Purview - Sharing session: DLP dan MS Intune
3	Data Center Admin	- Office 365 Fundamental - Business Continuity Management - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - Sharing session: Teams app introduction - Sharing session: Kewajiban UU PDP - Sharing session: Technology Update BMC Helix - Sharing session: CCP SBNT - Sharing session: Transaksi Repo dan SPPA - Sharing session: AI in Capital Market
4	Kanit OIT	- IHT Secure SDLC - NetApp Anti Ransomware - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - IHT Transformational Leadership - JPS LinkNet - HPE Discover More AI - Sharing session: Teams app introduction - Sharing session: Kewajiban UU PDP
5	System Admin	- IT Project Management - Infrastructure Monitoring Tools - Singapore Fintech Festival 2024 - Pengembangan Arsitektur IT dengan TOGAF 10 - Red Hat Openshift Administration - KPI Openshift Starter Workshop - IHT Secure SDLC - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - Sharing e-CLEARs dari Sigma - TOEIC Test
6	Database Admin	- Red Hat Summit Connect 2024 - ERM Fundamentals (with ERMAP, ERMCP, QRMO, and QRMA Certifications) - Sharing Bisnis REPO dan SKD Derivatif dari Sigma - Sharing e-CLEARs dari Sigma - Oracle 21ai - SQL Query Fundamental - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - IHT Secure SDLC

No	Fungsi Function	Pelatihan/Sharing Training/Sharing
7	Application Admin	- Enterprise Integration using Apache Camel 4 - Sharing product UiPath Automatic Testing Tools - Sharing Bisnis REPO dan SKD Derivatif dari Sigma - ERM Fundamental - System Architecture - IHT Secure SDLC
8	Kanit OPM	- Operasional Calon Peserta Sistem BI-RTGS dan BISSSS - POC PSKR - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - IHT Secure SDLC - Sharing e-CLEARs dari Sigma - Sharing Operasional dari IDX
9	Kanit OPU	- COBIT 2019 Foundation - Devops - IHT Secure SDLC - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan
10	ITSS	- Sharing Cyber Security dari BSSN - IHT Secure SDLC - Framework ISO 27001:2022 - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - Magang ke IDX
11	Kadiv OTI	- Data Centric Security - NetApp anti-ransomware - IHT Secure SDLC - Sosialisasi Sistem Pembayaran Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment system Industry - Sosialisasi Remote Trading - Sharing Session MKBD oleh BEI - Mastering IDX Statistics Essential Information - One Day Training, Basic Personal Data Protection and Implementation - Governance, Risk, Compliance, dan UU PDP - Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan - Bincang KPEI Omnibus

RENCANA DIVISI OTI UNTUK 2025

Sasaran strategis OTI pada tahun 2025 adalah:

- System stability
- Business continuity
- IT service excellence
- Secure IT environment

KPI OTI 2025:

OTI DIVISION PLAN FOR 2025

The strategic objectives of the OTI Division in 2025 are:

- System stability
- Business continuity
- IT service excellence
- Secure IT environment

OTI 2025 Key Performance Indicators (KPIs):

No	KPI	Sub KPI	Target
1	Customer Satisfaction Index	External Customer Satisfaction	3.2 of 4
		Internal Customer Satisfaction	3 of 4
2	% Capital Market Core System Availability		99,5%
3	% Capital Market Supporting System Availability		99,5%
4	% Enterprise Systems Availability		99,6%
5	Budget Initiative Realization Deviation		85%<=%Realisasi<=100% 85%<=%Realization<=100%
6	% Network and Infrastructure Availability		99,8%
7	% Software Infrastructure Availability		99,6%
8	% Hardware Availability		99,7%
9	Number of IT Infrastructure Incident Cause Delay in Clearing & Settlement Process		0
10	Number of IT Based Capital Market Service Incident Cause Delay in Clearing & Settlement Process		0
11	% Database Availability		0
12	% PUVA Systems Availability		99,5%
13	Number of IT Based PUVA Service Incident Cause Delay in Clearing & Settlement Process		0
14	% PUVA & Enterprise Database Availability		99,6%
15	Number of recordable IT security incident		0

No	KPI	Sub KPI	Target
16	% Timely IT Security Incident Solved		100% Target 0% bila di bulan tersebut tidak terdapat incident. Target 0% if no incidents occur in that month.
17	% IT Security System Availability		99,6%
18	Number of Major Audit Finding: ISO, SPI, External Auditor, and legal incompilance	Number of Major Audit Finding: ISO, SPI, External Auditor	0
		Number of Legal Incompilance and Accuracy	0
19	% Corrective and preventive action	% Audit recommendation implemented	100%
		% Risk mitigation implemented	
		% Corrective action plan implemented	
		% Feedback of Clearing Member's survey (CSS) followed-up	
20	Number of unregistered risk event		3/tahun/years
21	%SLA Fulfillment		100%
22	% Talent Development Program Implemented	% PDP Fulfillment	Q1: 10% Q2: 50% Q3: 80% Q4: 100%
		Number of Learning Hours	Q1: 0 Q2: 40 Q3: 0 Q4: 40
		% of feedback session conducted	Q1: 0 Q2: 100% Q3: 0 Q4: 0
23	% Strategic Initiative Implemented		Target rencana kerja bulanan Target for monthly work plan
24	% of KM Program participation		Q1: 0% Q2: 50% Q3: 50% Q4: 100%

Target Divisi OTI pada tahun 2025 tercermin pada RKAT 2025, yang meliputi:

The OTI Division's Targets for 2025 are reflected in the RKAT 2025, which includes:

No	Sasaran Strategis Strategic Objective	Inisiatif Initiative	PIC	Penjelasan Explanation	Status Inisiatif Initiative Status	
1	Secure Environment	IT	Implementasi Perlindungan Kebocoran Data di Endpoint dan Cloud Implementation of Data Leak Protection on Endpoints and Cloud	ITSS	Pengadaan software data loss prevention (DLP). Procurement of Data Loss Prevention (DLP) Software	Lanjut dari 2024 - selesai Carry over 2024 - done
2	Secure Environment	IT	Penambahan Lisensi dan Pengembangan Custom Plugin Privilege Access Management Addition of Licenses and Development of Custom Plugin for Privilege Access Management	ITSS	Penambahan lisensi PAM dan pembuatan custom plugin Addition of PAM Licenses and Creation of Custom Plugin	Baru New
3	Secure Environment	IT	Penyusunan Roadmap Cyber Security Management Development of Cyber Security Management Roadmap	ITSS	Konsultasi terkait dengan asesmen tingkat maturitas dan roadmap cyber security, penyusunan cyber security management meliputi kebijakan, prosedur, standar, organisasi, pencegahan, teknologi, termasuk pembuatan play book penanganan insiden cyber, dan konsultasi terkait persiapan UU PDP dalam lingkup operasional TI. Consultation on Maturity Level Assessment and Cyber Security Roadmap, including the development of cyber security management policies, procedures, standards, organization, prevention, technology, incident handling playbooks, and consultation on preparing for the Personal Data Protection Law (UU PDP) within the scope of IT operations.	Baru New

No	Sasaran Strategis Strategic Objective	Inisiatif Initiative	PIC	Penjelasan Explanation	Status Inisiatif Initiative Status
4	IT Service Excellence	Perluasan Automation Tools untuk Operasional e-CLEARs Expansion of Automation Tools for e-CLEARs Operations	OPM	Penambahan lisensi automation tools dan penambahan flow operasional pagi dan sore e-CLEARs Addition of Automation Tools Licenses and Expansion of e-CLEARs Morning and Evening Operational Flows	Baru New
5	IT Service Excellence	Penyempurnaan Dashboard Monitoring Tools Refinement of Monitoring Tools Dashboard	OPM	Pengadaan dan implementasi dashboard monitoring tools dan konsolidasi dengan Solarwinds Procurement and Implementation of Monitoring Tools Dashboard and Integration with SolarWinds	Baru New
6	Business Continuity	Implementasi Backup untuk File Server Implementation of Backup for File Server	OPM	Penambahan lisensi software backup dan implementasi backup untuk file server Addition of Backup Software Licenses and Implementation of Backup for File Server	Baru New
7	Secure Environment	Implementasi Immutable Backup untuk Data Production Implementation of Immutable Backup for Production Data	OPM	Pengadaan solusi immutable backup dan implementasinya untuk membackup data production Procurement of Immutable Backup Solution and Implementation for Backing Up Production Data	Baru New
8	System Stability	Pemenuhan Lisensi Komponen Aplikasi Bisnis Fulfillment of Business Application Components Licenses	OPM	Penambahan lisensi komponen-komponen pendukung business application seperti lisensi OS, database, platform, dan lain-lain. Addition of Licenses for Supporting Business Application Components such as OS, database, platform, and others.	Rutin Routine
9	System Stability	Peremajaan Database untuk Aplikasi Bisnis Server rejuvenation and database software upgrade used for business applications in DC and DRC	OPM	Peremajaan server dan upgrade database software yang digunakan untuk aplikasi bisnis di DC dan DRC Server rejuvenation and database software upgrade used for business applications in DC and DRC	Baru New
10	System Stability	Penambahan Baremetal Server Addition of Baremetal Servers	OIT	Penambahan server baremetal untuk aplikasi Big Data Development, Razor Staging, PDC Development, Repo Interbank baik aplikasi maupun databasenya. Addition of Baremetal Servers for Big Data Development Applications, Razor Staging, PDC Development, and Interbank Repo, including both applications and databases	Lanjut dari 2024 - selesai Carry over 2024 - done
11	System Stability	Penambahan Storage area NDC, NDC2, dan DRC2 Expansion of Storage Area in NDC, NDC2, and DRC2	OIT	Penambahan storage untuk NDC1, NDC2, dan DRC2. Addition of Storage for NDC1, NDC2, and DRC2	Lanjut dari 2024 - selesai Carry over 2024 - done
12	System Stability	Penambahan Server Hypervisor DC, NDC2, dan DRC2 Addition of Hypervisor Servers for DC, NDC2, and DRC2	OIT	Penambahan kebutuhan server hypervisor di DC, NDC2, dan DRC2. Addition of Hypervisor Server Requirements in DC, NDC2, and DRC2	Lanjut dari 2024 - selesai Carry over 2024 - done
13	System Stability	Kajian Konsolidasi Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) dan Alternate Site Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) and Alternate Site Consolidation Study	OIT	Konsultasi terkait konsolidasi data center, baik DC maupun DRC, dan penyusunan strategi konsolidasinya. Consultation on Data Center Consolidation, both DC and DRC, and Development of Consolidation Strategy	Lanjut dari 2024 - sedang proses Carry over 2024 - in progress
14	System Stability	Pembangunan Ruang PTR di DC dan DRC Baru Bursa Construction of PTR Room in New DC and DRC of the Exchange	OIT	Pembangunan ruang server yang akan digunakan untuk aplikasi PTR di DC dan DRC bursa yang baru, pengadaan server, dan perangkat jaringannya Construction of server room for PTR applications in the new DC and DRC of the exchange, procurement of servers, and networking equipment	Lanjut dari 2024 - selesai Carry over 2024 - done
15	Secure Environment	Pembangunan Sistem Backup untuk VMWare Development of Backup System for VMware	OIT	Pengadaan dan implementasi storage backup dan lisensi backup software yang akan digunakan untuk membackup VMWare. Procurement and implementation of storage backup and backup software licenses to be used for backing up VMware	Lanjut dari 2024 - selesai Carry over 2024 - done
16	System Stability	Penambahan Kapasitas Server Hypervisor di DC Addition of Hypervisor Server Capacity in DC	OIT	Penambahan kebutuhan server hypervisor di DC Addition of hypervisor server requirements in DC	Baru New
17	System Stability	Pembelian Lisensi Office Software Purchase of Office Software Licenses	OIT	Penambahan lisensi yang digunakan untuk menunjang produktivitas karyawan dalam menjalankan tugasnya Addition of licenses to support employee productivity in performing their tasks	Rutin Routine
18	System Stability	Peremajaan Perangkat Jaringan Refresh of Network Devices	OIT	Penggantian perangkat jaringan yang akan memasuki masa end of life Replacement of networking devices approaching end of life.	Baru New
19	System Stability	Peremajaan Laptop dan AIO 2024 Refresh of Laptops and AIOs (All-in-One PCs) in 2024	OIT	Penyediaan perangkat kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan. Provision of work devices according to employee needs.	Rutin Routine

STRATEGI DIVISI PTI

Divisi PTI memiliki peran yang strategis dan vital dalam pelaksanaan operasional layanan bisnis KPEI. Oleh karena itu, Divisi PTI secara konsisten mendukung KPEI melalui penyediaan sistem layanan TI yang efisien, andal, serta aman. Selain itu, TI juga berperan penting sebagai enabler dalam pengembangan layanan-layanan bisnis baru yang diperlukan demi mendukung keberlanjutan Perusahaan. Divisi PTI melaksanakan visi, misi, dan strategi umum TI dalam mendukung bisnis KPEI, sebagaimana tercantum pada rencana strategis TI periode 2022–2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan stabilitas sistem yang berjalan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan saat ini dan masa depan;
2. Peningkatan pengelolaan data untuk meningkatkan akurasi data yang dapat mendukung pengambilan keputusan;
3. Peningkatan pengelolaan IT *Governance, Risk, & Compliance* (GRC) untuk memastikan kepatuhan KPEI terhadap standar global dan kerangka kerja tata kelola TI yang telah diadopsi;
4. Peningkatan pengelolaan keamanan TI untuk memastikan integritas, ketersediaan, dan keamanan informasi;
5. Membangun SDM TI untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas SDM TI dapat mendukung peran TI yang optimal.

Dalam rangka mewujudkan strategi tersebut, Divisi PTI melaksanakan sejumlah inisiatif strategis untuk memenuhi sasaran strategis TI KPEI pada tahun 2024 yakni:

- Mengembangkan Sistem Layanan Bisnis, seperti penyempurnaan sistem e-CLEARs untuk Pengembangan Penyelesaian Level AK dalam Transaksi Ekuiti, penyempurnaan sistem PDC untuk mendukung Pembaruan Sistem Perdagangan Bursa, penyempurnaan sistem kliring derivative (SKD) untuk mendukung pengembangan layanan kliring derivatif untuk produk *Single Stock Futures* (SSF) dan *Foreign Index Futures*, penyempurnaan CCP OTC *Derivative*, Pengembangan *Triparty Repo Interbank*, serta Pengembangan *Integrated Collateral Management System* untuk Transaksi Bilateral dan *Triparty Repo*.
- Meningkatkan sistem inti, melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas dan kinerja sistem-sistem utama seperti *upgrade* komponen e-CLEARs tahap I dan II, Implementasi Lanjutan HA dan peningkatan kinerja sistem e-CLEARs, interkoneksi e-CLEARs & C-BEST, implementasi JMS AMQ, pembaruan sistem pelaporan MKBD, dan pembaruan sistem kliring *derivative* (SKD).
- Meningkatkan *Business Intelligence* melalui inisiatif *Big Data* yang meliputi penyediaan lisensi *Big Data* dan migrasi gudang data (DW) tahap II, yang merupakan lanjutan dari adopsi serta implementasi teknologi *Big Data* pada tahun sebelumnya;

PTI DIVISION STRATEGY

The PTI Division plays a strategic and vital role in the operational execution of business services at IDClear. Therefore, the PTI Division consistently supports IDClear through the provision of efficient, reliable, and secure IT service systems. Additionally, IT plays an essential role as an enabler in the development of new business services required to support the sustainability of the Company. The PTI Division implements the vision, mission, and general IT strategies in support of IDClear's business, as outlined in the IT strategic plan for the 2022–2026 period, as follows:

1. Improvement of system stability to ensure the fulfillment of current and future needs;
2. Improvement of data management to enhance data accuracy, which supports decision-making processes;
3. Improvement of IT Governance, Risk, & Compliance (GRC) management to ensure IDClear's compliance with global standards and IT governance frameworks that have been adopted;
4. Improvement of IT Security Management to ensure the integrity, availability, and security of information;
5. Building IT Human Resources to ensure that the capacity and capabilities of IT personnel can support the optimal role of IT.

To realize these strategies, the PTI Division is implementing several strategic initiatives to achieve IDClear's IT strategic objectives for 2024, including:

- Developing Business Service Systems, such as enhancing the e-CLEARs system for the development of CM-level settlement in Equity Transactions, improving the PDC system to support the Update of the Stock Exchange Trading System, refining the Derivative Clearing System (SKD) to support the development of Derivative Clearing Services for Single Stock Futures (SSF) and Foreign Index Futures products, enhancing the CCP OTC *Derivative*, developing the *Triparty Repo Interbank*, and developing the *Integrated Collateral Management System* for Bilateral and *Triparty Repo* transactions.
- Improving core systems through various initiatives to enhance the capacity and performance of key systems, such as upgrading e-CLEARs components in phases I and II, advanced implementation of HA, performance improvements to the e-CLEARs system, interconnecting e-CLEARs & C-BEST, implementing JMS AMQ, updating MKBD reporting systems, and updating the Derivative Clearing System (SKD).
- Enhancing Business Intelligence through Big Data initiatives, including the provision of Big Data licenses and the migration of Data Warehouse (DW) phase II, continuing the adoption and implementation of Big Data technology from the previous year;

- Merencanakan kapasitas sistem inti melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pengujian kapasitas sistem utama e-CLEARs;
- Meninjau *Application Post Implementation*, melalui pelaksanaan *post implementation review* dan kajian terhadap Strategi Upgrade Teknologi Aplikasi Utama; dan
- Mengimplementasikan *Automated Testing Tools* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses *quality assurance* dalam kegiatan pengembangan sistem.

PELAKSANAAN FUNGSI DIVISI PTI TAHUN 2024

Seiring dengan berkembangnya bisnis KPEI baik dari segi skala maupun kompleksitasnya setiap tahunnya, Divisi PTI perlu terus memastikan bahwa ekosistem TI yang dimiliki oleh KPEI tetap memadai. Tantangan yang cukup signifikan dalam melakukan pengembangan infrastruktur dan sistem di 2024, antara lain:

1. Pemenuhan target kapasitas untuk mengantisipasi kenaikan volume transaksi yang pesat;
2. Penambahan layanan bisnis baru dan penyesuaian layanan bisnis *existing* yang memerlukan banyak pengembangan sistem bersamaan dengan perumusan proses bisnis yang mempengaruhi perencanaan; dan
3. Pengendalian kegiatan pengembangan sistem, terlebih melibatkan cukup banyak entitas eksternal.

Divisi PTI mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui serangkaian inisiatif yang terencana dengan baik, serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya untuk memastikan tercapainya kebutuhan yang diperlukan. Divisi PTI juga secara melakukan proses pengendalian efektivitas perencanaan secara rutin dan berjenjang. Selanjutnya, Divisi PTI juga secara konsisten berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pengembangan sistem, termasuk kualitas koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan seluruh sasaran terpenuhi dan risiko-risiko terdeteksi lebih dini dan tindak lanjutnya efektif.

RENCANA DIVISI PTI TAHUN 2025

Divisi PTI berkomitmen melanjutkan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan terhadap sistem dan infrastruktur TI yang terus berkembang di KPEI. Aspek pengembangan TI yang diprioritaskan di tahun 2025 sesuai dengan rencana strategis TI antara lain:

- Meningkatkan berbagai inisiatif seputar sistem inti, berupa peningkatan kapasitas serta kinerja sistem utama, pembaruan teknologi, serta peningkatan stabilitas serta keandalan sistem baik melalui peningkatan proses *quality assurance* pengembangan sistem maupun penguatan *problem management* untuk meminimalkan isu-isu yang belum terselesaikan pada operasi sistem;
- Mendukung dan melanjutkan pengembangan Sistem Layanan Bisnis, seperti penyempurnaan sistem e-CLEARs untuk Pengembangan Penyelesaian Level AK dalam Transaksi Ekuiti, penyempurnaan

- Planning core system capacity through the implementation of various system capacity testing activities for the main e-CLEARs system;
- Reviewing Application Post Implementation through post-implementation reviews and studies on the Strategy for Upgrading Core Application Technologies; and
- Implementing Automated Testing Tools to improve the effectiveness and efficiency of the quality assurance process in system development activities.

IMPLEMENTATION OF PTI DIVISION FUNCTIONS IN 2024

As IDCclear's business continues to grow in both scale and complexity each year, the PTI Division must continually ensure that IDCclear's IT ecosystem remains adequate. Some significant challenges in developing infrastructure and systems in 2024 include:

1. Meeting capacity targets to anticipate the rapid increase in transaction volumes;
2. Addition of new business services and adjustments to existing business services, which require extensive system development alongside the formulation of business processes that impact planning; and
3. Controlling system development activities, particularly when involving a significant number of external entities.

The PTI Division addresses these challenges through a series of well-planned initiatives, as well as enhancing resource capacity to ensure that necessary needs are met. The PTI Division also routinely and systematically controls the effectiveness of planning processes. Furthermore, the PTI Division consistently strives to improve the effectiveness of system development management, including the quality of coordination and communication with all stakeholders, both internal and external, to ensure that all objectives are achieved, and risks are detected early with effective follow-up actions.

PTI DIVISION PLAN FOR 2025

The PTI Division is committed to continuing its role in meeting the evolving needs of IT systems and infrastructure at IDCclear. The IT development aspects prioritized in 2025, according to the IT strategic plan, include:

- Enhancing various initiatives around core systems, such as increasing capacity and performance of key systems, updating technologies, and improving system stability and reliability, either through enhancing the system development quality assurance process or strengthening problem management to minimize unresolved issues in system operations;
- Supporting and continuing the development of Business Service Systems, such as enhancing the e-CLEARs system for the Development of Settlement Level AK in Equity Transactions, improving the PDC system to

sistem PDC untuk mendukung Pembaruan Sistem Perdagangan Bursa, penyempurnaan sistem kliring derivative (SKD) untuk mendukung pengembangan layanan kliring derivatif untuk produk *Foreign Index Futures*, Pengembangan *Triparty Repo Interbank*, serta Pengembangan *Integrated Collateral Management System* untuk Transaksi Bilateral dan *Triparty Repo* dan Transaksi Ekuiti dan Derivatif untuk Pasar Modal.

- Melanjutkan inisiatif kajian Strategi Upgrade Teknologi Aplikasi Utama melalui penyusunan *Blueprint* (rancangan) TI dan *roadmap* (peta jalan) yang komprehensif untuk memastikan pembaruan sistem-sistem utama dan layanan TI di KPEI berlangsung secara berkelanjutan. Upaya ini akan dirancang berdasarkan *best practice* dan mengintegrasikan adopsi teknologi terkini untuk mendukung efisiensi dan relevansi jangka panjang.
- Memperkuat proses IT *Planning & Governance*, melalui peningkatan kemampuan dalam pengelolaan perencanaan dan tata kelola proses TI; dan
- Membentuk Komite Teknologi Informasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi.
- Melanjutkan implementasi *Automated Testing Tools* untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengujian sistem maupun peningkatan proses *quality assurance* secara umum.
- Melanjutkan implementasi ERP *modul Billing* dan HCM untuk peningkatan fasilitas kebutuhan pengelolaan data keuangan dan SDM KPEI.

support the Update of the Exchange Trading System, enhancing the derivative clearing system (SKD) to support the development of derivative clearing services for Foreign Index Futures products, developing the Triparty Repo Interbank, and developing the Integrated Collateral Management System for Bilateral and Triparty Repo Transactions, as well as for Equity and Derivative Transactions in the Capital Market.

- Continuing the initiative to study the Strategy for Upgrading Core Application Technologies through the preparation of a comprehensive IT Blueprint and roadmap to ensure the continuous updating of key systems and IT services at IDCclear. This effort will be designed based on best practices and will integrate the adoption of the latest technologies to support long-term efficiency and relevance.
- Strengthening IT Planning & Governance processes through enhancing capabilities in managing IT planning and governance processes; and
- Establishing an Information Technology Committee as a strategic step to improve the governance and management of information technology.
- Continuing the implementation of Automated Testing Tools to improve the effectiveness and efficiency of system testing activities and to enhance the overall quality assurance processes.
- Continuing the implementation of the ERP Billing and HCM modules to improve the facilities for managing IDCclear's financial data and human resources.

Human Capital

HUMAN CAPITAL

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Manajemen Lingkungan
Environmental Management



Melalui upaya yang terintegrasi, yang menggabungkan komitmen yang kuat, pemanfaatan peluang yang terbuka lebar, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang mendukung, KPEI diharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan karyawan yang berkualitas tinggi, bekerja dengan cara yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Aspek-aspek ketenagakerjaan, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana, dibahas lebih lanjut dalam Laporan Keberlanjutan 2024 KPEI.

REKRUTMEN

Dalam menjalankan proses rekrutmen karyawan baru, KPEI berpedoman kepada prinsip, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di KPEI, yang mengacu kepada Peraturan Perundangan, Peraturan Perusahaan, dan Pedoman SDM yang berlaku dan

Through integrated efforts that combine strong commitment, the utilization of open opportunities, and the provision of supporting facilities and infrastructure, IDCclear is expected to create and develop high-quality employees who work effectively, efficiently, and results oriented. Employment aspects, including the management of facilities and infrastructure, are discussed further in IDCclear's 2024 Sustainability Report.

RECRUITMENT

In carrying out the process of recruiting new employees, IDCclear adheres to the principles, regulations, and policies that apply within the organization, in accordance with prevailing laws, company regulations, and relevant HR guidelines.

relevan. KPEI terus menjalin kerja sama dengan beberapa pihak ketiga dalam melakukan rekrutmen. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan talenta organisasi serta menggantikan karyawan pensiun dan mengundurkan diri. Sampai akhir Desember 2024, KPEI merekrut sebanyak total 27 karyawan, yang ditempatkan pada 13 divisi berbeda.

IDClear continues to collaborate with several third-party partners in its recruitment process. This is done to meet the organization's talent needs, as well as to replace employees who retire or resign. By the end of December 2024, IDClear had recruited a total of 27 employees, who were assigned to 13 different divisions.

Rekrutmen Berdasarkan Level Jabatan

Recruitment Based on Job Level

Level Jabatan Job Level	2024	2023	2022
Kepala Divisi Head of Division	-	-	-
Kepala Unit Head of Unit	-	-	-
Spesialis Specialist	-	-	-
Staf Staff	27	11	16
Jumlah Total	27	11	16

Pada tahun 2024 terdapat perubahan nama divisi oleh karena itu jumlah rekrutmen berdasarkan divisi sebagai berikut:

In 2024, there were changes in division names, and therefore, the number of recruitments by division is as follows:

Rekrutmen Berdasarkan Divisi

Recruitment Based on Division

Divisi Division	2024
Hukum Legal	2
Keanggotaan dan Pengembangan Pasar Membership and Market Development	-
Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting	-
Kliring dan Penyelesaian Clearing and Settlement	4
Penjaminan dan Pengelolaan Risiko Guarantee and Risk Management	6
Pengawasan dan Pemeriksaan Surveillance and Inspection	-
Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Korporasi Strategic Planning and Enterprise Risk Management	1
Riset dan Manajemen Proyek Research and Project Management	1
Pengembangan Teknologi Informasi Information Technology Development	5
Operasional Teknologi Informasi Operations of Information Technology	3
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	2
Satuan Pemeriksa Internal Internal Audit	1
Human Capital dan General Affair Human Capital and General Affairs	2
Unit Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Foreign Exchange and Money Market	-
Jumlah Total	27

REMUNERASI

Kebijakan remunerasi di KPEI dirancang dengan mengacu pada prinsip harmonisasi yang diterapkan bersama dengan seluruh SRO lainnya di pasar modal Indonesia sejak tahun 2013. Harmonisasi remunerasi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam struktur pembayaran yang berlaku di seluruh SRO. Dengan adanya struktur remunerasi yang terintegrasi ini, setiap SRO memiliki acuan yang jelas dan konsisten dalam menetapkan kebijakan remunerasi.

KPEI menetapkan kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mencakup aspek kompetensi, kinerja, dan posisi jabatan karyawan, serta tingkat biaya hidup secara umum. Dengan pendekatan ini, KPEI berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem remunerasi yang diterapkan dapat berjalan secara adil, memberikan insentif yang memadai, dan tetap kompetitif, tanpa mengorbankan kemampuan finansial Perusahaan.

Setiap tahunnya KPEI bersama dengan SRO lainnya mengikuti kegiatan *salary survey* dengan menunjuk konsultan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi di industri. *Key Performance Indicators* (KPI) dan kompetensi karyawan menjadi faktor kunci dalam penentuan atau perubahan remunerasi karyawan berdasarkan struktur skala upah (*salary structure*). Dalam struktur skala upah, dijelaskan berbagai fasilitas dan tunjangan bagi karyawan yang bergantung pada kategori dan status ketenagakerjaan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

Fasilitas dan Tunjangan Karyawan Employees' Facilities and Benefits

Fasilitas Facility	Komisaris Commissioner	Direktur Director	Karyawan Tetap Permanent Employee	Karyawan Tidak Tetap Outsourced Employee
Upah Salary	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Transportasi/Jabatan Transportation/Position Allowances	X	X	✓	X
Upah Kerja Lembur Overtime Fees	X	X	✓	✓
Tunjangan Cuti Leave Allowance	X	✓	✓	X
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowance	✓	✓	✓	✓
Tunjangan Pendidikan Education Allowance	X	✓	✓	X
Tunjangan Kesejahteraan Welfare Benefit	X	✓	✓	X
Tunjangan Pensiun/Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Pension Benefits/Financial Institution Pension Funds (DPLK)	X	X	✓	X

REMUNERATION

The remuneration policy at IDClear is designed based on the principle of harmonization, which has been jointly implemented with all other Self-Regulatory Organizations (SRO) in the Indonesian capital market since 2013. This harmonized remuneration framework aims to create alignment in the payment structure across all SRO. With this integrated remuneration structure, each SRO has a clear and consistent reference in establishing its remuneration policy.

IDCclear establishes its remuneration policy by considering various factors, including employee competence, performance, job position, and the general cost of living. Through this approach, IDCclear is committed to ensuring that its remuneration system operates fairly, provides adequate incentives, and remains competitive without compromising the Company's financial capability.

Each year, IDCclear, along with other SRO, participates in a salary survey by appointing a consultant to obtain accurate data related to remuneration and compensation policies in the industry. Key Performance Indicators (KPIs) and employee competencies serve as key factors in determining or adjusting employee remuneration, based on the established salary structure. The salary structure outlines various facilities and benefits provided to employees, which depend on their employment category and status, as detailed in the following table.

Fasilitas Facility	Komisaris Commissioner	Direktur Director	Karyawan Tetap Permanent Employee	Karyawan Tidak Tetap Outsourced Employee
Asuransi Jiwa Life Insurance	✓	✓	✓	X
Asuransi Kesehatan Health Insurance	✓	✓	✓	✓
Fasilitas Rawat Jalan Outpatient Facilities	✓	✓	✓	✓
BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM)) BPJS for Employment (Old Age Security (JHT), Pension Benefit (JP), Work Accident Benefit (JKK), Death Benefit (JKM))	X	✓	✓	✓
BPJS Kesehatan BPJS for Health	X	✓	✓	✓
Cuti Melahirkan Maternity Leave	X	X	✓	✓
Cuti Ibadah Haji Haji Leave	X	X	✓	X
Cuti Tahunan Annual Leave	✓	✓	✓	✓
Program Masa Persiapan Pensiun (MPP) Retirement Preparation Program	X	X	✓	X

✓: Tersedia | Available
X: Tidak Tersedia | Not Available

PENILAIAN KINERJA

Sistem penilaian kinerja karyawan meliputi perencanaan kinerja (*Planning*), pengelolaan kinerja (*Managing*), dan evaluasi kinerja (*Evaluating*).

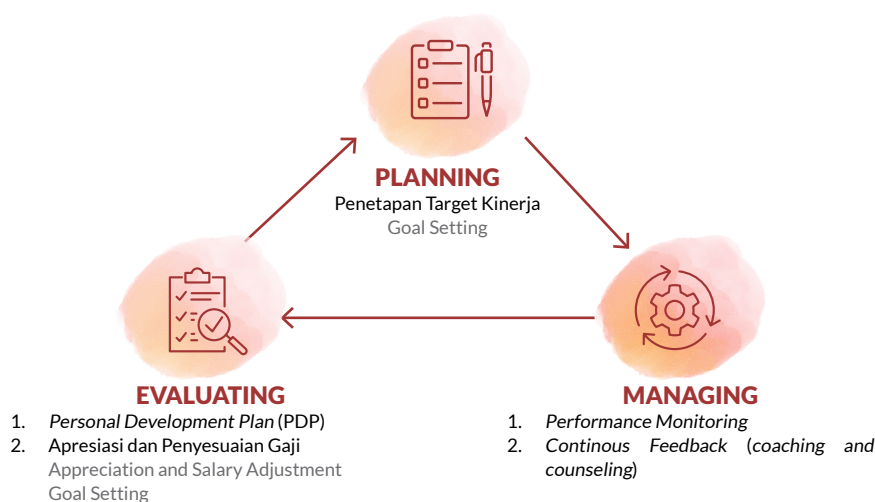
Planning: Penilaian kinerja karyawan dimulai dari tahap ini, dengan mewajibkan karyawan membuat target kinerja yang selaras dengan target dari unit, divisi yang menaungi unit tersebut, dan Perusahaan. **Managing:** Pemantauan atas pencapaian target dilakukan bersama-sama dengan atasan, sehingga karyawan mendapatkan kesempatan *coaching* dan *counselling* untuk tumbuh dalam proses pembelajaran; **Evaluating:** Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan KPI menjadi dasar penyusunan *Personal Development Plan* setiap karyawan, untuk menentukan metode, arah, dan tujuan pengembangan yang tepat bagi karyawan tersebut demi kemajuan karier mereka. Hasil penilaian kinerja juga menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk penyesuaian gaji, tingkat jabatan (*grading*), kenaikan pangkat, rotasi, pemberian bonus, atau penyampaian apresiasi lainnya.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The employee performance assessment system consists of performance planning (*Planning*), performance management (*Managing*), and performance evaluation (*Evaluating*).

Planning: The assessment process begins with this stage, where employees are required to set performance targets aligned with the targets of their unit, the division overseeing the unit, and the Company as a whole. **Managing:** Progress toward the targets is monitored jointly with the supervisor, allowing employees to receive coaching and counseling as part of their learning and growth process. **Evaluating:** Performance achievement is measured using Key Performance Indicators (KPIs), which then serve as the basis for developing each employee's *Personal Development Plan*, and it is used to determine the appropriate methods, direction, and goals for individual development to support their career advancement. Performance evaluation results also serve as a key consideration for salary adjustments, job grading, promotions, rotations, bonus allocations, and other forms of recognition.

Siklus Pengelolaan SDM di KPEI IDClear's HR Management Cycle



KPEI melakukan penilaian kinerja karyawan setidaknya sekali dalam setahun. Komponen penilaian terdiri dari:

1. Perilaku Kerja (kualitatif)
2. Hasil Kerja (kuantitatif)

Masing-masing diberi bobot yang berbeda dalam penentuan kenaikan gaji dan apresiasi. Pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan secara berjenjang, diawali dengan *self-assessment* dan divalidasi oleh atasan sampai dengan level Direksi, sebagaimana dijelaskan pada bagan berikut:

IDClear conducts employee performance appraisals at least once a year. The appraisal consists of two main components:

1. Work Behavior (Qualitative)
2. Work Results (Quantitative)

Each component carries a different weight in determining salary adjustments and performance-based recognition. The appraisal process is conducted in a tiered manner, beginning with *self-assessment* and validated by the immediate supervisor, up to the Board of Directors level, as illustrated in the diagram below:

Proses Penilaian Kinerja di KPEI

IDClear's HR Management Cycle

Melakukan validasi akhir untuk menciptakan keadilan (*fairness*) dan keseimbangan hasil penilaian kinerja di seluruh jenjang Perusahaan.

Final validation to ensure fairness and balance of performance assesment result at all levels of the company.

Melakukan validasi untuk memastikan akurasi dan objektivitas hasil penilaian.

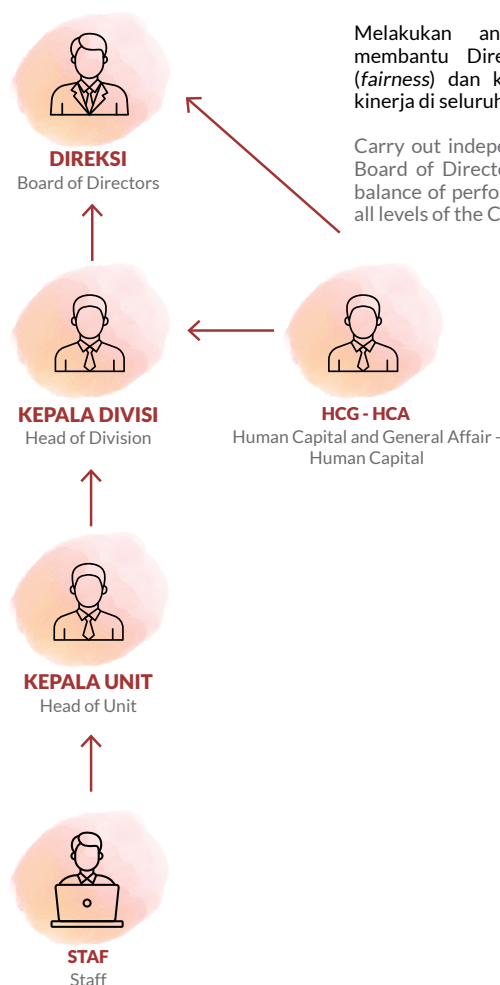
Validation to ensure accuracy and objectivity of performance assessment result.

Melakukan penilaian atas hasil *self-assessment* bawahan.

Evaluate the self-assessment result of their subordinates.

Melakukan *self-assessment* atas kinerja pribadinya.

Carry out self-assessment of their personal performance



Melakukan analisis independen untuk membantu Direksi menciptakan keadilan (*fairness*) dan keseimbangan hasil penilaian kinerja di seluruh jenjang perusahaan

Carry out independent analysis to assist the Board of Directors in ensuring fairness and balance of performance assesment result at all levels of the Company.

Sebanyak 153 karyawan menjalani proses penilaian kinerja di 2024. Dalam proses tersebut, turut dilakukan penilaian atas potensi untuk peningkatan karier (promosi) dan pengembangan karir lintas unit/divisi (rotasi), yang memungkinkan karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam area atau bidang pekerjaan yang berbeda. Pengembangan karier lintas unit/divisi juga membantu karyawan memperluas jejaring dan pemahaman tentang berbagai aspek lintas unit/divisinya.

A total of 153 employees underwent the performance evaluation process in 2024. As part of the process, an assessment was also conducted to evaluate the potential for career advancement (promotion) and cross-unit/division career development (rotation), which allows employees to develop their skills and competencies in different areas or fields of work. Cross-unit/division career development also helps employees expand their networks and understanding of various aspects across units/divisions.

Rotasi Karyawan

Employee Job Rotation

Uraian Description	2024
Rotasi untuk tingkatan Staf Job rotation at Staff level	20
Rotasi untuk tingkatan Kanit/Spesialis Senior Job rotation at Unit Head/Senior Specialist level	5
Rotasi untuk tingkatan Kepala Divisi Job rotation at Division Head level	2

Promosi Karyawan
Employee Job Promotion

Uraian Description	2024
Promosi untuk tingkatan Kanit/Spesialis Senior Job Promotion at Unit Head/Senior Specialist level	8
Promosi untuk tingkatan Kepala Divisi Job Promotion at Division Head level	3

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

KPEI memiliki komitmen penuh terhadap peningkatan dan pengembangan kapasitas karyawan sebagai salah satu upaya utama dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan organisasi. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, KPEI telah mengimplementasikan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan strategis KPEI seiring dengan dinamika industri yang terus berkembang.

KPEI mendorong budaya berbagi pengetahuan yang kuat melalui kegiatan *Knowledge Management*, di mana karyawan dapat saling bertukar informasi, wawasan, dan pengalaman untuk memperkaya pemahaman mereka dan meningkatkan kualitas serta produktivitas kerja. Hal ini diimplementasikan melalui program mentoring dan *coaching*, yang dilakukan oleh atasan atau senior yang memiliki pengalaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Bentuk peningkatan kompetensi juga dilakukan dengan mendukung karyawan untuk mengikuti program pendidikan tingkat lanjut, seperti program magister atau doktoral.

Sebagai bagian dari inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, KPEI membuka berbagai peluang bagi karyawan untuk mengembangkan diri melalui berbagai program pelatihan, pengembangan profesional, dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu serta kebutuhan strategis organisasi. Program-program ini dirancang untuk memberikan karyawan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pekerjaan mereka, serta mendukung pertumbuhan karir dalam jangka panjang.

KPEI juga berupaya membuka kesempatan bagi karyawan untuk terlibat dalam proyek strategis Perusahaan. Keterlibatan dalam proyek akan memungkinkan Karyawan untuk memiliki pengalaman dan mengembangkan kemampuan serta keterampilannya dalam menyelesaikan tugas yang kompleks dan menantang. Sementara itu, melanjutkan proses transformasi organisasi secara komprehensif yang dirampungkan oleh KPEI di tahun 2022, program utama Divisi SDM & Umum di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas setiap fungsi karyawan dalam kerangka organisasi yang baru.

COMPETENCE TRAINING AND DEVELOPMENT

IDCclear is fully committed to enhancing and developing employee capacity as one of the key efforts to strengthen the organization's competitiveness and sustainability. As a tangible manifestation of this commitment, IDCclear has implemented a comprehensive human resource (HR) development program designed to meet IDCclear's strategic needs in line with the continuously evolving industry landscape.

IDCclear fosters a strong knowledge-sharing culture through Knowledge Management activities, where employees exchange information, insights, and experiences to enrich their understanding and improve the quality and productivity of their work. This is implemented through mentoring and coaching programs conducted by supervisors or senior staff with higher levels of experience and expertise. Competency development is also supported by encouraging employees to pursue advanced education programs, such as master's or doctoral degrees.

As part of its ongoing human resource development initiatives, IDCclear offers various opportunities for employees to grow through tailored training programs, professional development, and certifications that align with both individual needs and the organization's strategic goals. These programs are designed to equip employees with the skills and knowledge relevant to their job requirements and support long-term career growth.

IDCclear also strives to provide opportunities for employees to participate in the Company's strategic projects. Such involvement allows employees to gain valuable experience and develop their abilities and skills in handling complex and challenging tasks. Meanwhile, following the comprehensive organizational transformation completed by IDCclear in 2022, the main programs of the Human Capital & General Affairs Division in 2024 were focused on enhancing the competencies and productivity of each employee function within the new organizational framework.

KPEI menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, secara daring, luring, dan juga *hybrid*, dengan topik pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan KPEI. Sepanjang tahun 2024, KPEI berhasil melaksanakan 69 sesi pelatihan dan *knowledge management*, yang diikuti oleh 412 karyawan, dan mencatatkan akumulasi 5.592 jam pelatihan. Artinya, rata-rata karyawan menerima lebih dari 35,6 jam pelatihan selama satu tahun, menunjukkan investasi berkelanjutan KPEI dalam pengembangan SDM sebagai fondasi utama dari keberhasilan dan inovasi Organisasi.

Pelatihan di tahun 2024 mencakup 9 bidang kerja, dengan biaya pelatihan mencapai Rp5.888.725.493.

Biaya Pengembangan SDM HR Development Expenditures

Uraian Description	2024	2023	2022
Biaya Pengembangan SDM HR Development Expenditures	Rp5.888.725.493	Rp3.994.766.056	Rp4.835.758.765

Pelatihan Berdasarkan Bidang Kerja Training Based on Field of Work

Bidang Kerja Work Area	Jumlah Pelatihan Number of Training	Proporsi terhadap Total Proportion to Total
Bisnis Business	47	11,69%
Keuangan Finance	5	1,24%
Teknologi Informasi Information Technology	49	12,19%
Audit Audit	10	2,49%
Hukum Legal	39	9,70%
Sumber Daya Manusia Human Resources	103	25,62%
Manajerial dan Kerja Sama Tim Managerial and Teamwork	53	13,18%
Bahasa Language	1	0,25%
Lainnya Others	49	12,19%
Jumlah Total	402	100%

Program Unggulan untuk Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan Key Programs for Employee Training and Competence Development

No	Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development Program
1	Workshop Secure SDLC
2	Expert Briefing IT Disaster Recovery Plan
3	ISDA Advanced Equity Derivatives
4	The WFE Clearing & Derivatives Conference
5	Benchmarking Financial Derivatives Regulations and Licensing Japan

IDClear organized various training and competency development programs throughout 2024, delivered in online, offline, and hybrid formats, with training topics tailored to the Company's needs. During 2024, IDClear successfully conducted 69 training and knowledge management sessions, attended by 412 employees, with a total of 5,592 training hours recorded. This means that, on average, each employee received more than 35.6 hours of training throughout the year, reflecting IDClear's continued investment in human capital development as a fundamental pillar of the Organization's success and innovation.

The training programs in 2024 covered 9 work areas, with total training expenditures amounting to Rp5,888,725,493.

PROFIL KETENAGAKERJAAN

Per 31 Desember 2024, terdapat 157 karyawan, 10,5% lebih banyak dibandingkan pada posisi satu tahun sebelumnya. Tingkat perputaran karyawan di tahun 2024 adalah sebesar 4,19%, turun dari 5% di tahun 2023. Rincian demografi karyawan KPEI disajikan pada tabel-tabel berikut.

Profil Karyawan Berdasarkan Pendidikan Workforce Profile by Education

Pendidikan Education	2024	2023
S2 Master's Degree	46	45
S1 Bachelor's Degree	106	90
D3 Diploma	1	3
SMA High School	4	4
Jumlah Total	157	142

Profil Karyawan Berdasarkan Usia Workforce Profile by Age

Usia Age	2024	2023
17-25	16	12
26-30	43	35
31-35	46	42
36-40	16	15
41-45	15	12
46-50	4	9
>50	17	17
Jumlah Total	157	142

Profil Karyawan Berdasarkan Jabatan Workforce Profile by Position

Jabatan Position	2023
Kepala Divisi (Jabatan Setingkat) Division Head (Equivalent)	13
Kepala Unit (Jabatan Setingkat) Unit Head (Equivalent)	30
Staf Staff	99
Jumlah Total	142

EMPLOYMENT PROFILE

As of December 31, 2024, there were 157 employees, representing a 10.5% increase compared to the position one year earlier. The employee turnover rate in 2024 was 4.19%, down from 5% in 2023. The demographic breakdown of IDClear employees is presented in the following tables.

Seiring dengan dilakukannya penyesuaian, maka Profil Karyawan Berdasarkan Jabatan tahun 2024 sebagai berikut

In line with the adjustments made, the Employee Profile by Job Level for 2024 is as follows:

Jabatan Position	2024
Kepala Divisi (Jabatan Setingkat) Head of Division (Equivalent Position)	12
PIC Kepala Divisi Division Head PIC	2
Kepala Unit (Jabatan Setingkat) Head of Unit (Equivalent Position)	27
PIC Kepala Unit Unit Head PIC	6
Staf Staff	110
Jumlah Total	157

Profil Karyawan Berdasarkan Gender Workforce Profile by Gender

Gender	2024	2023
Laki-laki Male	87	75
Perempuan Female	70	67
Jumlah Total	157	142

Profil Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian Workforce Profile by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2024	2023
Karyawan Employee	157	142
Tenaga Outsource Outsourced	13	13
Tenaga Honorer Contract Employee	6	9
Magang Internship	1	-
Jumlah Total	177	164

WORKING CLIMATE SURVEY & INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kepuasan karyawan KPEI secara rutin melaksanakan *Working Climate Survey* (WCS) dan *Internal Customer Satisfaction Survey* (ICSS). Survei ini berfungsi sebagai alat untuk menggali umpan balik langsung dari karyawan mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap kebijakan perusahaan, layanan internal, dan proses kerja yang berjalan di dalam organisasi.

Pada tahun 2024, kedua survei tersebut dilakukan pada 26 November sampai dengan 10 Desember 2024 dan diikuti oleh 152 karyawan, dengan tingkat partisipasi 98,70%. Hasil dari WCS dikompilasi untuk menentukan nilai *Working Climate Index* (WCI) di KPEI. Skor WCI pada tahun 2024 mencapai 3,07 tidak mengalami penurunan dari WCI tahun 2023 sebesar 3,08.

WORKING CLIMATE SURVEY & INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

As part of the Company's commitment to creating a conducive work environment and supporting employee satisfaction, IDClear routinely conducts the *Working Climate Survey* (WCS) and *Internal Customer Satisfaction Survey* (ICSS). These surveys serve as tools to gather direct feedback from employees regarding their satisfaction with company policies, internal services, and operational processes within the organization.

In 2024, both surveys were conducted from November 26 to December 10, 2024, and were participated in by 152 employees, achieving a participation rate of 98.70%. The results of the WCS were compiled to determine the *Working Climate Index* (WCI) at IDClear. The WCI score in 2024 reached 3.07, showing no decrease from the 2023 WCI score of 3.08.

Survei Suasana Kerja Working Climate Survey

Tanggal Survei Survey Date	Fokus Penilaian Assessment Focus	Responden Respondent	Skor Score	Skala Scale
26 November 2024 November 26, 2024	Kerja sama Tim Teamwork	152	3,21	1-4
	Komunikasi Karyawan Employee Communication		3,13	
	Komitmen Organisasi Organizational Commitment		3,10	
	Performance Management System (PMS) Performance Management System (PMS)		3,05	
	Pelatihan dan Pengembangan Training and Development		3,01	
	Keseimbangan Kehidupan Kerja Work/Life Balance		3,00	
	Kompensasi dan <i>Benefit</i> Compensation and Benefits		2,98	

ICSS mengukur kepuasan karyawan terhadap layanan di dalam cakupan organisasi KPEI. Survei dilaksanakan dengan setiap karyawan menilai silang layanan dari seluruh divisi di dalam struktur organisasi KPEI. Hasilnya dikompilasi untuk menentukan skor *Internal Customer Satisfaction Index* (ICSI). Di tahun 2024, ICSI tercatat sebesar 3,05, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,11.

The ICSS measures employee satisfaction with the services provided within the organizational scope of IDClear. The survey was conducted by having each employee cross-evaluate the services of all divisions within IDClear's organizational structure. The results were compiled to determine the Internal Customer Satisfaction Index (ICSI) score. In 2024, the ICSI was recorded at 3.05, indicating a decline compared to the 2023 score of 3.11.

Survei Kepuasan Konsumen Internal Internal Customer Satisfaction Survey

Tanggal Survei Survey Date	Fokus Penilaian Assessment Focus	Responden Respondents
26 November 2024 November 26, 2024	Divisi KAK Finance and Accounting Division (KAK)	151
	Divisi HUK Legal Division (HUK)	
	SPE Corporate Secretary (SPE)	
	Divisi OIT Operations of Information Technology Division (OIT)	
	Divisi HCG Human Capital and General Affairs Division (HCG)	
	Divisi KEP Membership and Market Development Division (KEP)	
	Divisi PPR Guarantee and Risk Management Division (PPR)	
	Divisi PSM Strategic Planning and Enterprise Risk Management Division (PSM)	
	Divisi RMP Research and Project Management Division (RMP)	
	SPI Internal Audit (SPI)	
	Divisi KPE Clearing and Settlement Division (KPE)	
	Divisi PTI Information Technology Development Division (PTI)	

RENCANA KERJA & STRATEGI SDM 2025

Pada tahun 2025, Unit *Human Capital* memiliki beberapa rencana kerja di antaranya adalah:

1. Kajian dan Implementasi Struktur Organisasi Transisi Kedua dalam Rangka Mendukung Perluasan Bisnis Perusahaan

Melanjutkan Pengembangan Kapasitas Organisasi (PKO) tahun 2024 atau fase pertama yang telah efektif per 1 November 2024, pada tahun 2025, Unit HCA melanjutkan PKO tahun 2025 atau fase kedua sesuai kajian PKO yang telah dilakukan bersama dengan konsultan SDM pada 2023. Adapun fokus PKO pada tahun 2025 adalah pengembangan organisasi di area Teknologi Informasi (TI) dan *Human Capital*.

Aspek penguatan fungsi TI yang pertama yaitu terkait fungsi Perencanaan, Tata Kelola dan Arsitektur Teknologi Informasi. Proses Tata Kelola TI di KPEI berpedoman kepada *Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) 2019*. COBIT 2019 merupakan kerangka kerja manajemen TI yang dapat membantu organisasi untuk mampu mencapai tujuan dan menghadapi tantangan dalam transformasi digital dan juga mampu membantu organisasi memahami bagaimana TI dapat mendukung tujuan bisnis dan mengidentifikasi bagaimana pengambilan keputusan terkait TI dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya, penguatan fungsi TI berikutnya yang dibutuhkan seiring dengan berkembangnya layanan KPEI adalah fungsi dukungan layanan TI. Fungsi ini akan bertanggung jawab sebagai IT *Helpdesk* yang berperan sebagai *Single Point of Contact (SPOC)* di area TI untuk menangani seluruh pelaporan terkait insiden dan permintaan layanan TI dari seluruh komponen di perusahaan.

Dengan semakin berkembangnya organisasi, layanan dan pengembangan human capital akan semakin banyak dan kompleks. Hal ini mencakup jumlah rekrutmen yang lebih banyak, pengelolaan data dan *services* yang meningkat, penyelenggaraan pelatihan yang signifikan dan lebih beragam, serta penyiapan kompetensi dan suksesi yang semakin kompleks, sehingga SDM di area *human capital* harus memiliki kompetensi yang cakap dan struktur organisasi yang kuat. Penguatan Unit *Human Capital* direncanakan akan fokus pada pemisahan fungsi menjadi Unit Operasional *Human Capital* dan Unit Strategi *Human Capital*.

2. Program Khusus Peningkatan Kompetensi Karyawan KPEI

Dalam mendukung peningkatan kompetensi karyawan, Unit *Human Capital* perlu merencanakan dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi secara rutin kepada karyawan secara rutin dan terstruktur agar sasaran dan tujuan dari pengembangan kompetensi karyawan dapat tercapai. Adapun cakupan program pengembangan kompetensi

WORK PLAN & HR STRATEGY 2025

In 2025, the Human Capital Unit has several work plans, including:

1. Study and Implementation of the Second Transition Organizational Structure to Support the Company's Business Expansion

Continuing the 2024 Organizational Capacity Development (PKO) or the first phase that became effective on 1 November 2024, in 2025, the HCA Unit will proceed with the 2025 PKO or the second phase in accordance with the PKO study conducted in collaboration with the HR consultant in 2023. The focus of the 2025 PKO is organizational development in the areas of Information Technology (IT) and Human Capital.

The first aspect of strengthening the IT function relates to the function of Information Technology Planning, Governance, and Architecture. The IT Governance process at IDClear refers to COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) 2019. COBIT 2019 is an IT management framework that can help organizations achieve goals and address challenges in digital transformation, as well as assist organizations in understanding how IT can support business objectives and identify how IT-related decision-making can affect overall organizational performance.

Next, the strengthening of the IT function that is needed in line with the development of IDClear's services is the IT service support function. This function will be responsible as the IT *Helpdesk*, serving as the single point of contact (SPOC) in the IT area to handle all reports related to IT incidents and service requests from all components within the Company.

As the organization grows, human capital services and development will become increasingly extensive and complex. This includes a larger number of recruitments, increased data and service management, more significant and diverse training programs, as well as the preparation of more complex competencies and succession planning, so that the human capital personnel must possess strong competencies and a solid organizational structure. The strengthening of the Human Capital Unit is planned to focus on the functional separation into the Operational Human Capital Unit and the Strategic Human Capital Unit.

2. Special Program for Enhancing the Competency of IDClear Employees

In support of enhancing employee competency, the Human Capital Unit needs to plan and implement a structured and routine competency development program for employees so that the targets and objectives of employee competency development can be achieved. The scope of the competency development program includes both non-technical competency

meliputi pengembangan kompetensi non teknis (*soft skills*) dan pengembangan kompetensi teknis. Program ini akan dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya: *in house training*, *public training*, *sharing session*, dan *leaders talk*. Program ini dimulai sejak Januari sampai dengan Desember 2025 dengan target peserta seluruh karyawan KPEI.

Pengembangan kompetensi teknis difokuskan pada area bisnis baru KPEI yaitu pada area Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta area repo *interbank*. Sedangkan pengembangan kompetensi non teknis difokuskan pada area pengembangan kualitas kepemimpinan karyawan KPEI.

3. Pengembangan New Knowledge Management System (New KMS)

Knowledge Management (KM) Portal dikembangkan pada tahun 2011 dengan teknologi Microsoft Sharepoint 2010 yang bertujuan untuk merealisasikan komitmen KPEI untuk membangun Perusahaan sebagai Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*). Fitur dan teknologi dari KM Portal yang digunakan saat ini dinilai sudah memerlukan penyesuaian baik dari sisi fitur, teknologi, kapabilitas *storage*, metode *approval*, dan *report* yang ada di *dashboard* KM Portal.

4. Pembaruan Peraturan Perusahaan, Pedoman, dan Kebijakan SDM 2025

Peraturan Perusahaan (PP) perlu diperbarui setiap 2 (dua) tahun sekali. PP yang berlaku saat ini berlaku sejak tahun 2022 dan perlu diperbarui. Selain PP, Pedoman dan Kebijakan SDM yang mendukung PP perlu disesuaikan sejalan dengan perubahan atau penyesuaian PP.

5. Kajian Remunerasi SRO 2025

Merupakan inisiatif bersama KPEI dengan SRO lain untuk melakukan kajian remunerasi dengan menggunakan *Target Market Group* (TMG) yang lebih luas. Adapun tujuan rencana kerja ini adalah untuk melihat kembali posisi dan sebaran *salary* karyawan SRO berdasarkan *Annual Base Salary* (ABS), *Total Guranteed Compensation* (TGC), dan *Total Compensation* (TC) sehingga penerapan remunerasi SRO tetap kompetitif terhadap Perusahaan yang dijadikan sebagai acuan dalam TMG.

(soft skills) development and technical competency development. This program will be carried out through several methods, including in-house training, public training, sharing sessions, and leaders talk. The program will run from January to December 2025, targeting all IDClear employees.

Technical competency development is focused on IDClear's new business areas, namely, the money market and foreign exchange market, as well as the interbank repo area. Meanwhile, non-technical competency development is focused on enhancing the leadership qualities of IDClear employees.

3. Development of the New Knowledge Management System (New KMS)

The Knowledge Management (KM) Portal was developed in 2011 using Microsoft SharePoint 2010 technology with the aim of realizing IDClear's commitment to establishing the Company as a Learning Organization. The current KM Portal's features and technology are considered to require adjustments in terms of features, technology, storage capacity, approval methods, and reporting on the KM Portal dashboard.

4. Update of Company Regulations, Guidelines, and HR Policies for 2025

Company Regulations (CR) must be updated every 2 (two) years. The current CR has been in effect since 2022 and therefore needs to be revised. In addition to the CR, HR Guidelines and Policies that support the CR must also be adjusted in line with the changes or revisions made to the CR.

5. SRO Remuneration Review 2025

This is a joint initiative between IDClear and other SRO to conduct a remuneration review using a broader Target Market Group (TMG). The objective of this work plan is to reassess the positioning and distribution of SRO employee salaries based on Annual Base Salary (ABS), Total Guaranteed Compensation (TGC), and Total Compensation (TC), ensuring that the implementation of SRO remuneration remains competitive with the companies used as benchmarks within the TMG.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Sebagai dermaga yang menjaga keseimbangan di tengah dinamika pasar, KPEI menyediakan infrastruktur andal dan tepercaya. Dengan tata kelola kuat, manajemen risiko terintegrasi, serta fungsi pengawasan ketat, KPEI memastikan kelancaran transaksi dan menegakkan integritas pasar secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

As a dock that maintains balance amid market dynamics, IDClear provides reliable and trusted infrastructure. With strong governance, integrated risk management, and strict supervisory functions, IDClear ensures smooth transactions and upholds market integrity in a transparent, accountable, and prudent manner.



06

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

PENCAPAIAN GCG 2024

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KPEI terus berupaya menjaga keselarasan dengan dinamika perubahan yang cepat, pesatnya perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi pelaku pasar modal. Keselarasan ini, meski menjadi tantangan bagi inovasi dan integritas serta berpotensi memunculkan risiko baru, dapat dikelola melalui penerapan ekosistem tata kelola yang baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan usaha, baik di masa kini maupun mendatang.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang komprehensif dan berkelanjutan telah membuktikan semakin kokohnya kepercayaan dunia usaha terhadap KPEI. Implementasi GCG ini menjadi salah satu kunci utama pengakuan KPEI sebagai *Third Country Central Counterparty* (TC-CCP) oleh European Securities & Market Authority (ESMA), regulator pasar keuangan Uni Eropa. ESMA yang telah menjalin nota kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberikan pengakuan yang memungkinkan KPEI untuk menyediakan layanan kliring bagi anggota kliring dan bursa yang berbasis di Uni Eropa.

Selain itu, KPEI juga telah memperoleh izin prinsip dari Bank Indonesia (BI) untuk beroperasi sebagai *Central Counterparty* (CCP) dalam menangani transaksi derivatif di pasar suku bunga dan nilai tukar *Over-the-Counter* (OTC SBNT). Saat ini, KPEI berada dalam tahap akhir untuk mendapatkan izin usaha resmi dari BI agar dapat memulai operasinya sebagai CCP OTC SBNT.

Penguatan tata kelola dan penegakan integritas menjadi elemen penting dalam penerapan praktik GCG secara berkelanjutan. Komitmen ini juga diwujudkan melalui usaha berkelanjutan untuk menjadikan GCG sebagai budaya kerja yang tertanam di seluruh level organisasi KPEI guna meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

LANDASAN PENERAPAN GCG

Sejalan dengan perkembangan usaha dan peran KPEI sebagai CCP, Perusahaan terus memastikan bahwa penerapan serta pengembangan GCG dilakukan berdasarkan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, KPEI juga mengacu pada berbagai rekomendasi serta praktik terbaik (*best practices*) yang diterapkan di industri pasar modal dan pasar keuangan, baik dari lembaga atau institusi berskala nasional maupun internasional yang memiliki kredibilitas tinggi. Beberapa di antaranya yaitu:

GCG ACHIEVEMENT IN 2024

In carrying out its business activities, IDClear consistently strives to stay aligned with the rapidly changing dynamics, the fast-paced technological advancements, and the growing expectations of capital market participants. While this alignment presents challenges to innovation and integrity and may potentially introduce new risks, it can be managed through the implementation of a sound governance ecosystem. This aims to create a conducive environment for investment and business growth, both now and in the future.

The comprehensive and sustainable implementation of GCG (Good Corporate Governance) principles has proven to further strengthen the business community's trust in IDClear. This GCG implementation has been one of the key factors in IDClear's recognition as a Third Country Central Counterparty (TC-CCP) by the European Securities and Markets Authority (ESMA), the financial markets regulator of the European Union. ESMA, which has established a memorandum of understanding with Indonesia's Financial Services Authority (OJK), granted this recognition, enabling IDClear to provide clearing services for clearing members and exchanges based in the European Union.

Furthermore, IDClear has also obtained a principle license from Bank Indonesia (BI) to operate as a Central Counterparty (CCP) for handling derivative transactions in the Over-the-Counter (OTC) interest rate and foreign exchange markets (OTC SBNT). IDClear is currently in the final stages of securing a full operating license from BI to commence its operations as an OTC SBNT CCP.

The strengthening of governance and the enforcement of integrity are essential elements in the sustainable implementation of GCG practices. This commitment is also demonstrated through continuous efforts to embed GCG as a work culture across all levels of IDClear's organization, with the aim of enhancing service quality and building stakeholder trust.

FUNDAMENTALS OF GCG IMPLEMENTATION

In line with IDClear's business growth and its role as a CCP, the Company continues to ensure that the implementation and development of GCG are grounded in applicable legal frameworks and regulations. Furthermore, IDClear also refers to various recommendations and best practices adopted in the capital market and financial industry, both from nationally and internationally recognized institutions with high credibility. These include:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK);
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3617 Tahun 1995);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2016 tentang Laporan Kliring dan Penjaminan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70/POJK.04/2017 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
9. Anggaran Dasar PT KPEI;
10. OECD *Principles of Corporate Governance*, diterbitkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), 2015;
11. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) - Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2021;
12. *Principles for Financial Market Infrastructure*, diterbitkan oleh the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 2012; dan
13. Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing PADG 9/2024: Penyelenggaraan *Central Counterparty*.

KPEI secara konsisten dan berkesinambungan terus memperkuat penerapan 5 (lima) Asas GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran ke dalam lingkungan bisnis serta operasionalnya.

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (PT);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 on Capital Markets;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK);
4. Government Regulation No. 45 of 1995 on the Implementation of Activities in the Capital Market Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia No. 86 of 1995, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3617 of 1995);
5. Financial Services Authority Regulation No. 26/POJK.04/2014 on Exchange Transaction Settlement Guarantees;
6. Financial Services Authority Regulation No. 43/POJK.04/2016 on Clearing and Guarantee Reports;
7. Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.04/2016 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Clearing and Guarantee Institutions;
8. Financial Services Authority Regulation No. 70/POJK.04/2017 on Document Maintenance by Clearing and Guarantee Institutions;
9. Articles of Association of IDCclear;
10. OECD *Principles of Corporate Governance*, published by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2015;
11. Indonesia's General Guidelines for Corporate Governance (PUGKI) – National Committee on Governance Policy, 2021;
12. *Principles for Financial Market Infrastructures*, published by the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 2012; and
13. Bank Indonesia Regulation No. 6 of 2024 on Money Market and Foreign Exchange Market, PADG 9/2024: Implementation of *Central Counterparty*.

IDCclear consistently and continuously strengthens the implementation of the five GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, within its business and operational environment.



Kelima asas ini kemudian diintegrasikan ke dalam 6 (enam) prinsip GCG KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) di pasar modal, mencakup:

These five principles are then integrated into IDCclear's six core GCG principles as a Clearing and Guarantee Institution (LKP) in the capital market, which include:

Peran Perusahaan di Pasar Modal The Company's Role in the Capital Market	Perlindungan terhadap Pemegang Saham Protection of Shareholders	Perlindungan terhadap Pengguna Jasa Protection of Service Users
Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Lain Protection of Other Stakeholders	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	Peran Dewan Komisaris dan Direksi The Role of the Board of Commissioners and the Board of Directors

TUJUAN DAN SASARAN PENERAPAN GCG

Berbagai upaya terus dilakukan secara konsisten untuk memperkuat governansi sebagai budaya yang tertanam dalam setiap aktivitas individu maupun organisasi dengan tujuan serta sasaran implementasi yang jelas, efektif, dan dipahami serta didukung oleh seluruh insan KPEI.

Tujuan penerapan GCG KPEI adalah:

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemajuan Perusahaan, serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan pemangku kepentingan lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
4. Mengembangkan sumber daya secara lebih bertanggung jawab;
5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban Perusahaan kepada pemangku kepentingan;
6. Membudayakan GCG pada budaya kerja Perusahaan;
7. Meningkatkan nilai tambah Perusahaan untuk peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan Perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh insan KPEI;
8. Meningkatkan standar-standar dan praktik-praktik tata kelola korporasi dari Perusahaan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peningkatan penerapan GCG di KPEI menyasar kepada, antara lain:

1. Pelaksanaan sistem manajemen yang andal, sehingga mampu merumuskan misi, visi, tujuan dan sasaran yang sejalan dengan rencana strategis Perusahaan;
2. Adanya keterbukaan serta komunikasi dua arah baik dengan regulator, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Berfungsinya dengan baik organ-organ penunjang kegiatan pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan, antara lain Komite Audit, Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko (KKPR), Komite Investasi, Komite *Haircut*, Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko serta Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
4. Komitmen dan standar dari praktik penyelenggaraan bisnis yang beretika;
5. SDM yang andal, unggul, profesional dan bebas dari benturan kepentingan;
6. Setiap insan Perusahaan mengetahui dan mampu menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku serta mengetahui sanksi dan imbalan masing-masing;
7. Kepedulian pada masyarakat sekitar.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES AND GOALS

Various efforts are consistently undertaken to strengthen governance as an ingrained culture in every individual and organizational activity, with clear, effective implementation goals and objectives that are well understood and supported by all members of IDClear.

The objectives of IDClear's GCG implementation are:

1. Achieving optimal growth and returns to advance the Company's progress and realize long-term shareholder value without neglecting other stakeholders;
2. Managing and fostering sound relationships among Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Company stakeholders;
3. Supporting internal control activities and the Company's development;
4. Developing resources in a more responsible manner;
5. Enhancing the quality of the Company's accountability to stakeholders;
6. Embedding GCG within the Company's work culture;
7. Increasing the Company's added value to enhance benefits for stakeholders and improve the well-being of all IDClear personnel;
8. Raising the standards and practices of the Company's corporate governance.

To achieve these objectives, the enhancement of GCG implementation at IDClear focuses on, among others:

1. Implementing a reliable management system capable of formulating a mission, vision, objectives, and goals aligned with the Company's strategic plans;
2. Ensuring transparency and two-way communication with regulators, service users, and other stakeholders;
3. Ensuring the effective functioning of supporting bodies for internal control and company development, such as the Audit Committee, Credit Policy and Risk Control Committee (KKPR), Investment Committee, Haircut Committee, CCP Clearing and Risk Management Committee and Internal Audit (SPI);
4. Upholding a strong commitment to ethical business practices and standards;
5. Building a reliable, excellent, professional human capital base that is free from conflicts of interest;
6. Ensuring that every individual in the Company understands and is able to carry out their duties, obligations, and responsibilities in accordance with applicable regulations, as well as understands the respective sanctions and rewards;
7. Demonstrating care and concern for the surrounding community.

STRUKTUR PENERAPAN GCG

Struktur Tata Kelola Perusahaan KPEI disusun berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan susunan organ GCG beserta peran dan fungsinya dalam tata kelola perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG KPEI. RUPS berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi untuk hal-hal yang berdampak signifikan pada kebijakan operasional perusahaan. Sebagai organ utama, RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat dialihkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berhak membuat keputusan, meminta penjelasan, dan menuntut pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris serta Direksi.

Organ utama GCG berikutnya adalah Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertugas menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Direksi dalam mengelola perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menjaga independensinya dari konflik kepentingan, baik yang bersifat individu maupun kelompok, yang berpotensi memengaruhi pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris diwajibkan membentuk Komite Audit sebagai organ pendukung, dan diperbolehkan membentuk komite lain sesuai kebutuhan.

Direksi, sebagai organ utama GCG lainnya, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan. Selain itu, Direksi juga mewakili perusahaan dalam urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite pendukung berdasarkan pembagian tugas atau kebutuhan perusahaan. Selain komite, Direksi juga didukung oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) yang menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Struktur Implementasi GCG digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

GCG IMPLEMENTATION STRUCTURE

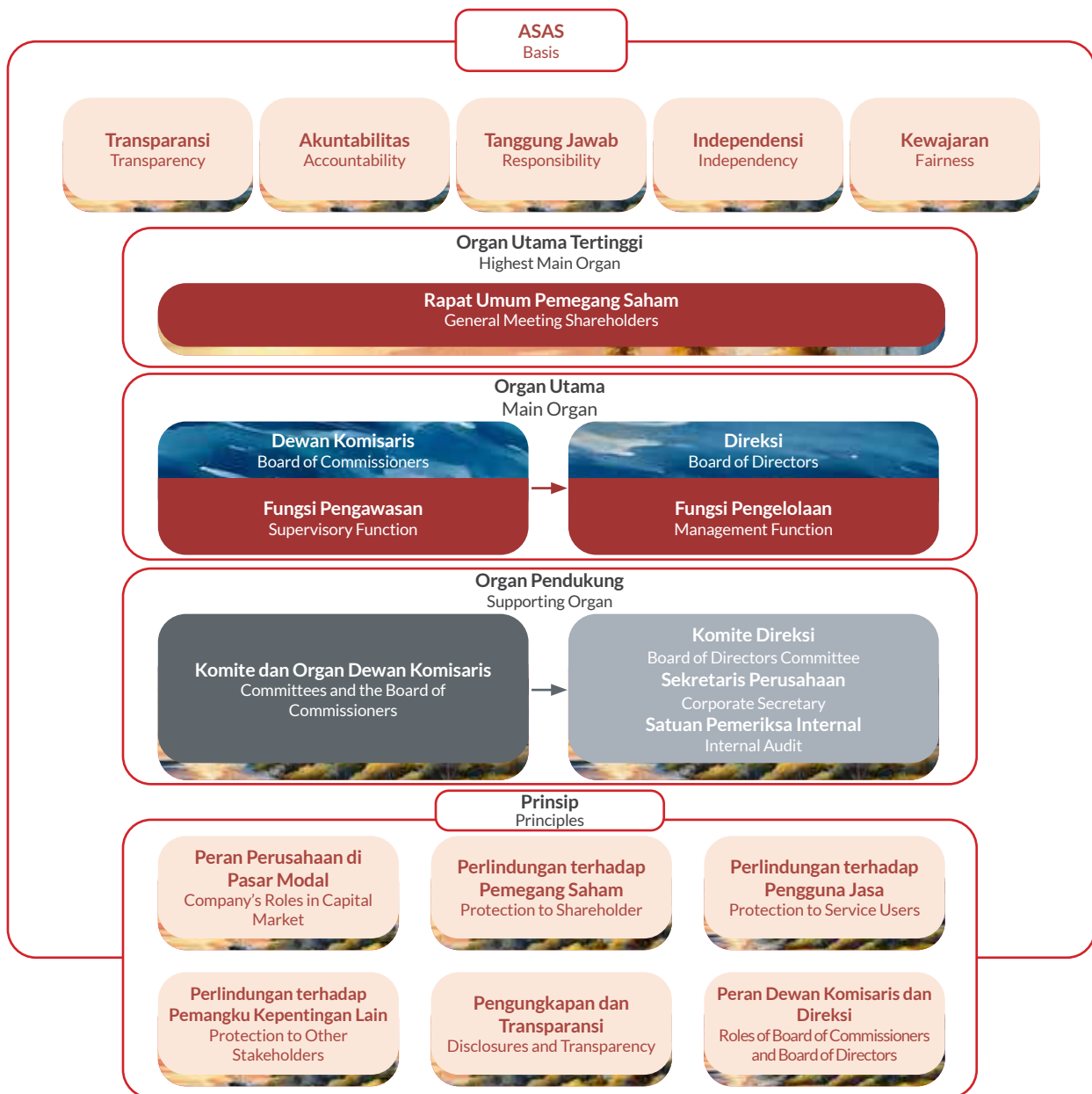
The Corporate Governance Structure of IDClear was established based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which outlines the composition of GCG organs along with their roles and functions in corporate governance.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in IDClear's GCG structure. The GMS serves as the highest decision-making forum for matters that significantly impact the Company's operational policies. As the main organ, the GMS holds exclusive authority that cannot be delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners. The GMS has the right to make decisions, request explanations, and demand accountability from the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The next main organs of GCG are the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners is tasked with carrying out the supervisory function while also providing recommendations or advice to the Board of Directors in managing the Company. In performing its duties, the Board of Commissioners must maintain its independence from conflicts of interest, whether individual or group-based, which could potentially affect the Company's management. The Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee as a supporting body and is allowed to form other committees as needed.

The Board of Directors, as another main organ of GCG, holds full responsibility for managing the Company. Additionally, the Board of Directors represents the Company in legal matters, both inside and outside the court. In carrying out its duties, the Board of Directors may establish supporting committees based on task division or company needs. In addition to the committees, the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit (SPI), each performing its respective functions and responsibilities.

The structure of GCG implementation is illustrated in the following diagram:



Seluruh organ GCG wajib menerapkan 6 (enam) Prinsip Penerapan GCG KPEI ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Pembahasan lebih lengkap mengenai setiap organ GCG dijelaskan di dalam Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

KERANGKA PENERAPAN GCG

Penerapan Tata Kelola Perusahaan KPEI didukung oleh 4 (empat) pilar utama yang menjadi fondasi kerangka implementasi GCG di perusahaan. Kerangka ini memberikan panduan menyeluruh mengenai pengelolaan bisnis perusahaan yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Kerangka tersebut mencakup 3 (tiga) elemen utama, yaitu:

1. Piagam/Pedoman Kerja;
2. Pedoman Perilaku (Kode Etik); dan
3. Kebijakan Perusahaan (terdiri dari SOP, Pedoman Mutu, Peraturan Perusahaan dan lainnya).

All GCG organs are required to apply the six GCG Implementation Principles of IDClear in carrying out their duties and responsibilities. A more detailed discussion of each GCG organ is provided in this Corporate Governance chapter.

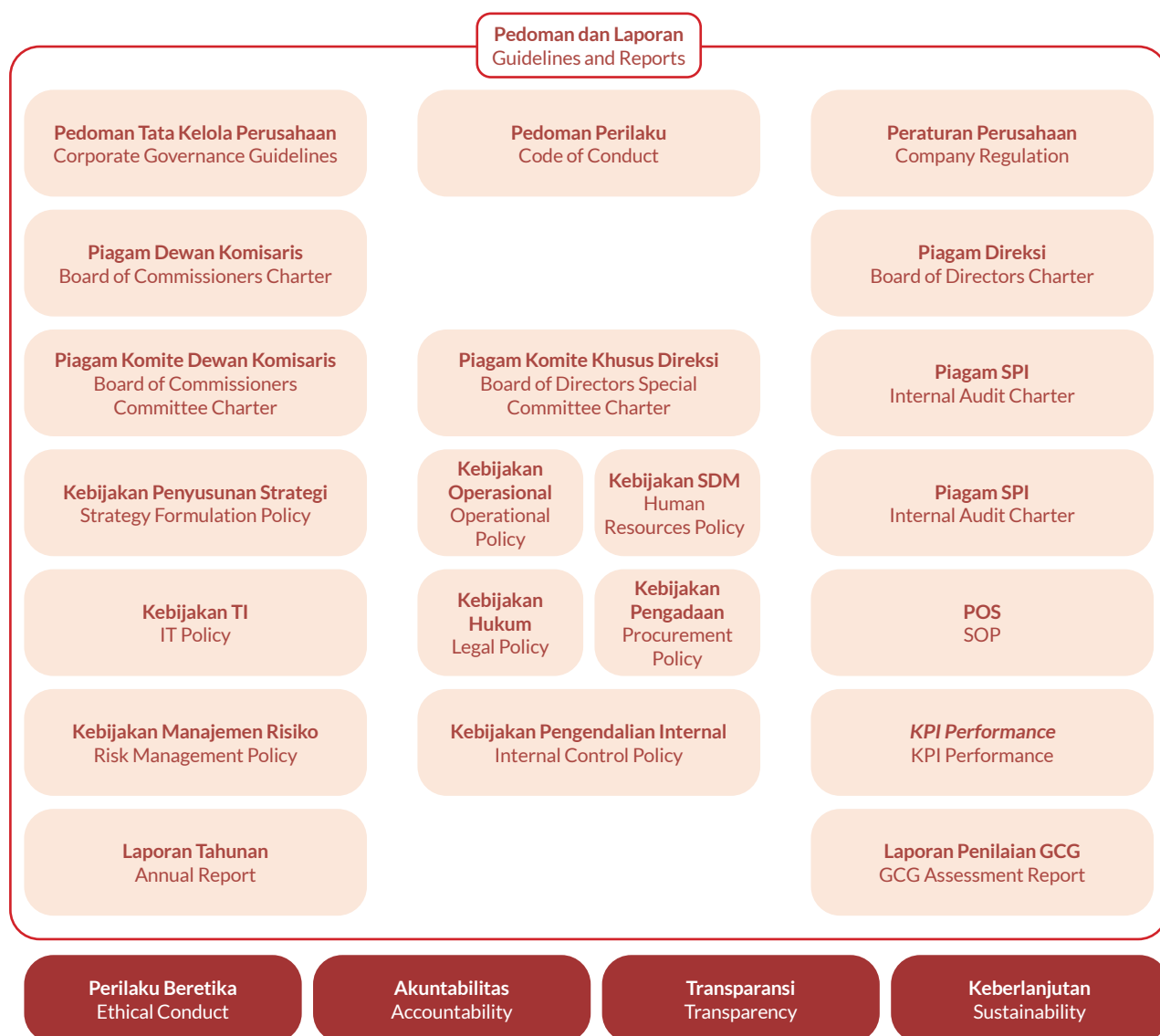
GCG IMPLEMENTATION FRAMEWORK

The implementation of Corporate Governance at IDClear is supported by four main pillars that serve as the foundation of the Company's GCG implementation framework. This framework provides comprehensive guidance on business management, as outlined in the Corporate Governance Guidelines. It consists of three key elements:

1. Charters/Working Guidelines;
2. Code of Conduct (Ethical Guidelines); and
3. Company Policies (including SOPs, Quality Manuals, Company Regulations, and others).

Pedoman Tata Kelola Perusahaan terus diperbarui secara berkala untuk memastikan kerangka tata kelola yang efektif dan relevan. Hingga 31 Desember 2024, KPEI telah memiliki 5 pedoman, 7 piagam kerja, dan 44 kebijakan perusahaan. Gambaran Bagan Kerangka Implementasi GCG disajikan sebagai berikut:

The Corporate Governance Guidelines are regularly updated to ensure an effective and relevant governance framework. As of December 31, 2024, IDClear has established 5 guidelines, 7 working charters, and 44 company policies. A diagram illustrating the GCG Implementation Framework is presented as follows:



PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2024

Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip-prinsip GCG, KPEI telah melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk merujuk pada referensi yang relevan sebagai dasar dalam merancang strategi efektif guna meningkatkan kinerja praktik GCG di masa mendatang. Salah satu referensi yang digunakan oleh KPEI adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)* yang berbasis pada parameter governansi internasional.

ACGS merupakan inisiatif dari *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)* yang bertujuan mendukung integrasi pasar modal di negara-negara anggota ASEAN. ACGS berfungsi sebagai alat kuantitatif untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan-perusahaan terbuka di kawasan ASEAN terhadap pedoman

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION FOR THE YEAR 2024

To strengthen the implementation of GCG principles, IDClear has undertaken various improvement initiatives, including referring to relevant benchmarks as the basis for designing effective strategies to enhance future GCG practices. One such reference adopted by IDClear is the *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*, which is based on international governance parameters.

ACGS is an initiative of the *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)* aimed at supporting the integration of capital markets among ASEAN member states. It serves as a quantitative tool for assessing the compliance of publicly listed companies in the ASEAN region with GCG guidelines,

GCG berdasarkan praktik-praktik terbaik berbasis standar internasional. Standar ini merujuk pada 5 (lima) prinsip utama GCG yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu:

1. Hak-hak para Pemegang Saham
2. Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang Saham
3. Peran Para Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan

Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip dalam praktik GCG, KPEI melaksanakan penilaian tahunan secara rutin. Pada tahun 2024, penilaian dilakukan menggunakan parameter yang dikembangkan oleh konsultan dari Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD). Proses penilaian dilaksanakan secara mandiri oleh tim internal perusahaan melalui Sekretaris Perusahaan (SPE).

Hasil dari penilaian rutin berbasis ACGS diharapkan dapat memberikan gambaran kepada KPEI mengenai kinerja governansi yang telah dicapai, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan di masa mendatang.

METODE DAN KRITERIA PENILAIAN

Prinsip ACGS menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Oleh karena itu, proses penilaian menggunakan sumber informasi atau dokumen Perusahaan yang tersedia dan dapat diakses oleh pemegang saham maupun publik. Sumber-sumber tersebut meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku, Pedoman Kerja Dewan dan Komite-komitennya, *Website* Perusahaan, serta berbagai informasi publik relevan lainnya.

Instrumen penilaian dirancang berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang diterbitkan oleh OECD dan *International Corporate Governance Network* (ICGN). Instrumen ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tingkat pertanyaan yang secara keseluruhan akan menentukan skor ACGS Perusahaan. Setiap pertanyaan diberikan opsi jawaban “Ya” (Yes) atau “Tidak” (No). Apabila terdapat pertanyaan yang tidak relevan dengan praktik GCG yang diterapkan, maka jawaban “N/A” (*not applicable*) akan digunakan.

Penilaian Tingkat I

Penilaian tingkat 1 ACGS mempunyai 146 pertanyaan. Namun mengingat KPEI adalah SRO dan bukan merupakan perusahaan publik (Tbk) atau *listed company*, maka beberapa pertanyaan menjadi tidak relevan atau tidak dapat diaplikasikan. Karena itu, dilakukan beberapa penyesuaian (*adjustment*) pada jumlah pertanyaan atau indikator, serta bobot penilaian dalam mengevaluasi pelaksanaan praktik governansi di KPEI.

based on international best practice standards. These standards refer to the five key GCG principles issued by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), namely:

1. The Rights of Shareholders
2. The Equitable Treatment of Shareholders
3. The Role of Stakeholders
4. Disclosure and Transparency
5. The Responsibilities of the Board

As part of its application of GCG principles in practice, IDClear conducts regular annual assessments. In 2024, the assessment was carried out using parameters developed by consultants from the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). The assessment process was conducted internally by the Company’s team through the Corporate Secretary (SPE).

The results of these routine ACGS-based assessments are expected to provide IDClear with an overview of its current governance performance, while also identifying areas requiring improvement to support future enhancements.

METHOD AND ASSESSMENT CRITERIA

The ACGS principles emphasize the importance of information transparency to the public. Therefore, the assessment process uses information sources or company documents that are available and accessible to shareholders and the general public. These sources include the Annual Report, Audited Financial Statements for the Financial year, the Board and Committees’ Charters, the Company’s Website, and other relevant public information.

The assessment instrument is designed based on GCG principles issued by the OECD and the International Corporate Governance Network (ICGN). The instrument is organized into 2 (two) levels of questions that collectively determine the Company’s ACGS score. Each question provides the answer options “Yes” or “No.” If a question is not relevant to the Company’s GCG practices, the answer “N/A” (*not applicable*) is used.

Level I Assessment

Level 1 assessment of the ACGS consists of 146 questions. However, considering that IDClear is a Self-Regulatory Organization (SRO) and not a publicly listed company (Tbk or listed company), several questions are deemed irrelevant or inapplicable. Therefore, adjustments were made to the number of questions or indicators, as well as to the scoring weights, in order to appropriately evaluate the implementation of governance practices at IDClear.

Penilaian Tingkat II

Level II Assessment

Prinsip Principle	OECD Principles (Prinsip Utama dalam Penilaian) (Core Assessment Principles)	Bobot Penilaian Assessment Weights	Jumlah Pertanyaan Number of Questions
A	Hak-Hak Para Pemegang Saham Rights of Shareholders	3%	6
B	Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang Saham The Equitable Treatment of Shareholders	6%	6
C	Peran para Pemangku Kepentingan The Role of Stakeholders	17%	13
D	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	28%	28
E	Tanggung Jawab Dewan The Responsibilities of the Board	46%	55
Jumlah Total		100%	108

Penilaian tingkat 2 ACGS terdiri dari pertanyaan bonus dan pertanyaan penalti dengan jumlah 38 pertanyaan, yang kemudian mendapatkan penyesuaian (*adjustment*) karena beberapa pertanyaan menjadi tidak relevan atau tidak dapat diaplikasikan pada status KPEI sebagai perusahaan non-publik dan SRO pasar modal.

Level 2 assessment of the ACGS consists of bonus and penalty questions, totaling 38 questions. However, adjustments were made to accommodate the specific status of IDClear as a non-public company and a Self-Regulatory Organization (SRO) in the capital market.

Jenis Pertanyaan Type of Questions	Jumlah Item Pertanyaan Number of Questions
Bonus Bonus	1
Penalti Penalty	-
Jumlah Total	1

HASIL PENILAIAN

ASSESSMENT RESULT

Berikut ini adalah hasil evaluasi praktik governansi di KPEI yang berdasarkan prinsip-prinsip ACGS, yaitu:

The following are the results of IDClear's governance practice evaluation based on the ACGS principles:

Hasil Penilaian Tingkat I

Level I Assessment Result

Prinsip Principle	Bobot Penilaian Assessment Weight	Jumlah Item Pertanyaan Number of Questions	Item yang Telah Terpenuhi Fulfilled Items	Skor Score
A	3%	6	6	3,00
B	6%	6	4	4,00
C	13%	13	12	15,69
D	28%	28	23	23,00
E	55%	55	45	37,64
Jumlah Total		108	90	83,33

Hasil Penilaian Tingkat II

Level II Assessment Result

Jenis Pertanyaan Type of Questions	Jumlah Pertanyaan Number of Questions	Poin yang Memenuhi Bonus & Penalti Points Meeting Bonus & Penalty Criteria	Skor Score
Bonus Bonus	13	1	2,00
Penalti Penalty	16	-	0,00
Jumlah Total	28	1	2,00

Total skor ACGS untuk implementasi governansi di KPEI pada periode tahun 2024 mencapai 85,53, mencerminkan komitmen kuat Perusahaan dalam mengadopsi standar Internasional.

REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK TAHUN 2025

Penilaian mandiri terhadap praktik governansi di KPEI menggunakan parameter ACGS pada tahun 2024 menghasilkan temuan serta rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti untuk mendukung perkembangan GCG yang dapat memperkuat kinerja usaha KPEI.

The total ACGS score for IDClear's governance implementation in the 2024 period reached 85.53, reflecting the Company's strong commitment to adopting international standards.

RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT IN 2025

The self-assessment of governance practices at IDClear using ACGS parameters in 2024 resulted in key findings and improvement recommendations that need to be followed up. These are intended to support the ongoing development of Good Corporate Governance (GCG) and to further strengthen IDClear's business performance.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDClear	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
A KPEI telah <i>comply</i> sepenuhnya terhadap PRINSIP A IDClear has fully complied with PRINCIPLE A				
B.4.4	Apakah Perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pinjaman kepada Direksi dan Komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa hal tersebut dilakukan secara wajar dan dengan harga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	- Meminta pernyataan kebijakan secara eksplisit mengenai larangan pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau adanya kebijakan yang memastikan pemberian pinjaman tersebut dilakukan secara wajar dan pada tingkat bunga normal. - Berdasarkan hasil asesmen, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi yang menunjukkan bahwa KPEI (Perusahaan) telah memenuhi atau patuh terhadap indikator penilaian untuk praktik ini.	Piagam agar di-review dan memasukkan ketentuan yang mengatur mengenai larangan pinjaman atau memastikan bahwa pemberian pinjaman yang diperbolehkan bagi Komisaris dan Direksi Perusahaan dilakukan dalam suatu transaksi yang wajar dan pada tingkat suku bunga yang wajar/suku bunga pasar. The Charter should be reviewed to include provisions regulating the prohibition of loans or ensuring that any loans permitted to the Board of Commissioners and Board of Directors are conducted on fair terms and at reasonable market interest rates.	- Mengusulkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menambahkan di Piagam, mengenai ketentuan yang mengatur larangan pinjaman. - Rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A.
		- Requesting an explicit policy statement prohibiting loans to Board of Directors and the Board of Commissioners, or having a policy that ensures any such loans are granted on fair terms and at normal interest rates. - Based on the assessment results, there was no disclosure found indicating that IDClear (the Company) has met or complied with the evaluation indicator for this particular practice.		- Proposing to the Board of Commissioners and the Board of Directors the inclusion of provisions in the Charter that regulate the prohibition of loans or ensure that any permissible loans are granted on fair terms and at reasonable market interest rates. - Recommending the harmonization of GCG practices for SRO to be considered by the regulator or treated as N/A if deemed irrelevant.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDCLEAR	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa RPT tersebut adil dan wajar? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	- Meminta agar Perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dalam suatu transaksi yang wajar, dalam arti berlaku sama dengan transaksi-transaksi pihak ketiga atau <i>arms' length</i>. - Hasil penilaian menunjukkan tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Perusahaan mematuhi pertanyaan ini.	Perusahaan seharusnya mempunyai kebijakan tentang transaksi-transaksi terafiliasi yang bersifat wajar sebagaimana transaksi transaksi dengan pihak ketiga atau memenuhi prinsip transaksi <i>arms' length</i> . The Company should have a policy on affiliated transactions that are fair in nature, similar to transactions with third parties or in accordance with the arm's length principle.	- Diberi nilai "not comply" dengan harapan bahwa Perusahaan dapat memenuhi parameter ini, sesuai dengan aturan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, bagian III, 15f, yaitu: Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan informasi pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms' length principle</i>). - Hal ini tidak dapat dipenuhi, karena tidak relevan pada KPEI yang merupakan LKP dan bukan emiten atau perusahaan publik. - Rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A.
C.3.3	Apakah Perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	- Meminta pengungkapan adanya kebijakan atau program pemberian kompensasi/remunerasi berbasis kinerja Perusahaan yang bersifat jangka panjang, yaitu kompensasi ESOP/MSOP atau opsi saham bagi para karyawannya. - Program pemberian kompensasi/remunerasi berbasis kinerja yang bersifat jangka Panjang tersebut juga mensyaratkan adanya pengungkapan informasi yang menjelaskan mengenai <i>lock out period</i> (waktu dimana program tersebut baru dapat di-exercise dalam 2 tahun atau lebih atau disebutkan bahwa reward saham di-LOCK-OUT selama 2 tahun atau 3 tahun).	- Perusahaan perlu memiliki kebijakan, mengadakan program atau kebijakan kompensasi yang lebih bersifat jangka panjang bagi karyawannya. - Reward dimaksud berupa pemberian ESOP/MSOP atau opsi saham, serta harus juga disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan lebih lanjut mengenai <i>lock out period</i> dari program-program kompensasi jangka panjang tersebut.	- Parameter ini memuat harapan bahwa Perusahaan dapat memenuhi parameter ini, sesuai dengan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 yaitu rekomendasi 7.6: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. - Hal ini tidak dapat dipenuhi, karena tidak relevan pada KPEI yang merupakan LKP dan bukan perusahaan terbuka. - Rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDClear	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
D.2.7	Jumlah remunerasi masing-masing anggota Direksi/ Komisaris Total remuneration of each member of the board of directors/ commissioners	1. Perusahaan belum <i>comply</i> pada penilaian D.2.7 ini, yang meminta pengungkapan detail untuk jumlah dan struktur remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pengungkapan dapat dilakukan di Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>). 2. Pengungkapan ini tidak terdapat pada <i>Annual Report</i> Perusahaan tahun 2023. Informasi yang ada hanya pengungkapan secara agregat jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 1. The Company has not complied with assessment D.2.7, which requires detailed disclosure of the amount and structure of remuneration received by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This disclosure can be made in the Annual Report. 2. This disclosure is not found in the Company's 2023 Annual Report. The available information only discloses the aggregate amount of remuneration received by the Board of Commissioners and the Board of Directors.	1. Untuk meningkatkan kualitas <i>Annual Report</i>, Perusahaan disarankan untuk melakukan pengungkapan di <i>Annual Report</i> mengenai nilai detail remunerasi yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Pengungkapan yang diminta harus sampai meliputi nama yang bersangkutan beserta detail/jenis remunerasi yang diterimanya. 2. Pengungkapan posisi pada struktur jabatan Dewan Komisaris/Direksi atau penyampaian jumlah remunerasi yang dilakukan secara agregat nilai saja. 1. To improve the quality of the Annual Report, the Company is advised to disclose in the Annual Report the detailed value of remuneration received by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The required disclosure should include the individual's name along with the details/ types of remuneration received. 2. Disclosure of positions within the structure of the Board of Commissioners/Board of Directors or the presentation of remuneration amounts in aggregate value alone.	1. Pemberian status atas nilai ini dengan harapan agar Perusahaan dapat memenuhi parameter ini, sesuai dengan aturan SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III, terkait Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik, yang paling sedikit memuat uraian mengenai remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Hal ini tidak dapat dipenuhi, karena tidak relevan pada KPEI yang merupakan LKP dan bukan emiten atau perusahaan publik. 3. Rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. 1. Granting a status on this value with the expectation that the Company can meet this parameter, in accordance with SEOJK Number 30/SEOJK.04/2016, Section III, on the Corporate Governance of Issuers or Public Companies, which at the very least includes a description of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors. 2. This cannot be fulfilled, as it is not relevant to IDClear which is a Clearing and Guarantee Institution (LKP) and not a public company. 3. Recommendation for SRO GCG harmonization to consider its practice at the regulator level or classify it as N/A.
D.3.1	Apakah Perusahaan mengungkapkan kebijakannya yang mencakup peninjauan dan persetujuan RPT yang material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/ significant RPTs?	Mensyaratkan adanya kebijakan bahwa untuk setiap transaksi dengan pihak berelasi yang jumlahnya signifikan/materiil harus dikaji dan disetujui terlebih dulu oleh komite independen seperti Komite Audit. Berdasarkan hasil penilaian, Perusahaan dinilai belum <i>comply</i> karena tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi ini, baik pada <i>website</i> ataupun <i>Annual Report</i> Perusahaan. Requiring the policy that any transactions with related parties of significant/material value must be reviewed and approved first by an independent committee, such as the Audit Committee. Based on the assessment results, the Company is assessed as not compliant because no disclosure of this information was found, either on the website or in the Company's Annual Report.	Perusahaan disarankan untuk memiliki dan mengungkapkan kebijakan bahwa transaksi pihak berelasi yang material atau signifikan terlebih dahulu harus direview dan memperoleh persetujuan, misal oleh Komite Audit. The Company is advised to have and disclose a policy that related party transactions that are material or significant must first be reviewed and approved, for example, by the Audit Committee.	1. Mengusulkan kepada Komite Audit atas ketentuan ini untuk ditambahkan pada Piagam Komite Audit. Namun Komite Audit perlu berkoordinasi antar SRO, mengingat Piagam Komite Audit saat ini merupakan hasil harmonisasi bersama SRO. 2. Rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. 1. Proposing to the Audit Committee that this provision be added to the Audit Committee Charter. However, the Audit Committee needs to coordinate with other SRO, as the current Audit Committee Charter is a result of harmonization among the SRO. 2. Recommendation for SRO GCG harmonization to consider its practice at the regulator level or classify it as N/A.
D.6.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	Mensyaratkan adanya pengungkapan informasi mengenai Laporan Triwulanan. Perusahaan dinilai belum <i>comply</i> karena saat periode penilaian di tahun 2023, tidak ditemukan adanya pengungkapan pada <i>website</i> Perusahaan mengenai hal ini. Requiring the disclosure of information on Quarterly Reports. The Company is assessed as not complying because during the evaluation period in 2023, no disclosure was found on the Company's website regarding this matter.	Perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi atas laporan keuangan triwulan secara jelas dan mudah diakses atau diketahui oleh publik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan lewat <i>website</i> Perusahaan. The Company is expected to provide information on quarterly financial reports in a clear and easily accessible manner for the public. This can be done through disclosure on the Company's website.	1. Akan berkoordinasi dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi (KAK) untuk dapat mengungkapkan laporan keuangan triwulan Perusahaan melalui <i>website</i> Perusahaan. 2. Menjadi satu poin rekomendasi dalam pemenuhan gap GCG 2025 dan rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO. 1. Will coordinate with the Finance and Accounting Division (KAK) to disclose the company's quarterly financial report through the Company's website. 2. Will be one of the recommendations for fulfilling the GCG 2025 gap and recommendations for the harmonization of SRO's GCG.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDClear	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
D.8.1	Laporan/laporan keuangan (triwulanan terbaru) Financial statements/reports (latest quarterly)	- Meminta adanya informasi laporan keuangan pada <i>website</i> Perusahaan yang setidaknya menyajikan posisi laporan keuangan Perusahaan kuartal terakhir selama 2 periode tahun buku sebagai perbandingan. - Laporan keuangan yakni berupa laporan kuartal terakhir untuk tahun buku pada periode penilaian dan kuartal terakhir pada tahun buku sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran, Perusahaan dinilai belum <i>comply</i> karena pada <i>website</i> Perusahaan tidak ditemukan adanya informasi laporan keuangan tersebut.	Perusahaan disarankan agar melengkapi <i>website</i> Perusahaan dengan informasi laporan keuangan perusahaan yang setidaknya menyajikan posisi laporan keuangan kuartal terakhir selama 2 periode tahun buku sebagai perbandingan, yakni laporan kuartal terakhir untuk tahun buku pada periode penilaian dan kuartal terakhir pada tahun buku sebelumnya. The Company is advised to complete the website with financial information that at least presents the financial position of the last quarter over two fiscal periods for comparison, including the last quarter of the financial year during the assessment period and the last quarter of the previous financial year.	- Akan berkoordinasi dengan Divisi KAK untuk dapat mengungkapkan laporan keuangan Perusahaan kuartal terakhir selama 2 periode tahun buku sebagai perbandingan, pada <i>website</i> Perusahaan. - Menjadi satu poin rekomendasi dalam pemenuhan <i>gap</i> GCG 2025 dan rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO. - Will coordinate with the KAK Division to disclose the Company's last quarter financial report over two fiscal periods for comparison on the Company's website. - Will become one of the recommendations for fulfilling the GCG 2025 gap and for the harmonization of SRO's GCG.
D.8.6	Anggaran Dasar Perusahaan (Anggaran Rumah Tangga Perusahaan, nota kesepahaman dan Anggaran Dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	- Meminta adanya materi mengenai Anggaran Dasar Perusahaan pada <i>website</i>. Materi ini dapat berupa dokumen pdf yang dapat diunduh oleh publik. - Berdasarkan hasil penelusuran pada <i>website</i> Perusahaan, tidak ditemukan adanya dokumen Anggaran Dasar dimaksud.	Perusahaan disarankan untuk melengkapi <i>website</i>-nya dengan dokumen Anggaran Dasar Perusahaan. The Company is advised to complete its website with the Company's Articles of Association document.	- Perusahaan tidak mengungkapkan Anggaran Dasar karena menurut UU PT tidak ada aturan bahwa Perusahaan harus mengungkapkannya. Hal ini tidak dapat dipenuhi karena tidak relevan dengan KPEI yang merupakan LKP dan bukan emiten atau perusahaan publik. - Pemberian nilai "<i>not comply</i>" ini dengan harapan bahwa KPEI perlu memenuhi parameter ini dengan dasar hukum yaitu POJK No. 8/POJK.04/2015 Pasal 7h, yaitu: Informasi umum yang diungkapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang memuat dokumen Anggaran Dasar. - Rekomendasi pada Harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. - The Company does not disclose the Articles of Association because, according to the Company Law (UU PT), there is no regulation requiring the Company to disclose it. This cannot be fulfilled as it is not relevant to IDClear, which is a CCP and not an issuer or public company. - The "not comply" rating is given with the expectation that IDClear should fulfill this parameter based on the legal basis stated in OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 Article 7(h), which requires that the general information disclosed by issuers or public companies shall at least include the Articles of Association document. - Recommendation for SRO GCG harmonization to consider its practice at the regulator level or classify it as N/A.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDClear	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
E.2.4	Apakah jumlah Direksi/Dewan Komisaris independen setidaknya minimal 50% dari Direksi/Dewan Komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/commissioners?	- Parameter mensyaratkan jumlah Komisaris Independen dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan setidaknya minimal 50% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. - Namun hanya terdapat 1 anggota komisaris yang independen dalam susunan keanggotaan Dewan Komisaris KPEI yang seluruhnya berjumlah 3 orang, atau jumlah ini masih kurang dari syarat minimal yaitu 50%.	Untuk meningkatkan Pengawasan Dewan Komisaris, perlu dipertimbangkan jumlah anggota Komisaris Independen dalam komposisi keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan, yakni setidaknya berjumlah setengah atau 50% dari total anggota Dewan Komisaris To strengthen the oversight function of the Board of Commissioners, it is necessary to consider increasing the number of Independent Commissioners to at least half or 50% of the total members of the Board.	- Pengangkatan dan jumlah/komposisi Dewan Komisaris LKP adalah mengikuti dasar hukum yaitu sebagai berikut: POJK No. 3/POJK.04/2021, POJK No. 59 / POJK.04/2016, dan PBI 21/2019. - Hal ini tidak dapat dipenuhi karena tidak relevan dengan KPEI sebagai LKP yang tunduk pada ketiga peraturan tersebut, dimana peraturan-peraturan dimaksud tidak mengatur keharusan komposisi Komisaris Independen LKP berjumlah setengah (50%) dari anggota Dewan Komisaris. - Jika ingin mengadopsi ketentuan ini, maka perlu ada dasar hukum yang kuat. Hal ini akan menjadi rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A.
E.2.8	Apakah Perusahaan mempunyai Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee (NC)?	- Parameter E.2.8 dan E.2.1 mensyaratkan Perusahaan memiliki Komite Nominasi dan Komite Remunerasi. - Berdasarkan hasil asesmen, Perusahaan belum memiliki Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.	- Perlu dipertimbangkan mengenai keberadaan Komite Nominasi/Remunerasi di dalam Perusahaan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. - Komite-komite ini bertanggung jawab melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, yakni memantau proses pencalonan kandidat anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat di perusahaan yang di bawah Direksi, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dasar tinjauan RUPS dalam menentukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.	- Dalam POJK No. 59 /POJK.04/2016, dinyatakan bahwa LKP dapat memiliki Komite Remunerasi, sehingga atas realisasi pembentukan komite Remunerasi, diserahkan kepada Dewan Komisaris. - Dalam rangka perluasan perannya sebagai CCPSBNT, KPEI akan melakukan analisa awal terkait pembentukan Komite Remunerasi. - Untuk Komite Nominasi (yang memiliki fungsi dalam mengidentifikasi dan memfasilitasi pemilihan Direksi Perusahaan), tidak sesuai dengan kondisi KPEI, dimana seluruh proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham.
E.2.13	Apakah Perusahaan mempunyai Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	- Parameters E.2.8 and E.2.1 require the company to have a Nomination Committee and a Remuneration Committee. - Based on the assessment results, the company does not yet have a Nomination Committee and a Remuneration Committee.	- It is necessary to consider the establishment of a Nomination/Remuneration Committee within the company as a supporting organ of the Board of Commissioners. - These committees are responsible for carrying out nomination and remuneration functions, namely monitoring the nomination process for candidates of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and company officers under the Board of Directors, as well as evaluating the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors as a basis for the GMS's review in determining their remuneration.	- Hal ini akan menjadi rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. - POJK No. 59/POJK.04/2016 states that a CCP may have a Remuneration Committee; therefore, the establishment of such a committee is left to the discretion of the Board of Commissioners. - In line with its expanded role as a CCP for Government Securities (SBNT), IDClear will conduct a preliminary analysis regarding the establishment of a Remuneration Committee. - As for the Nomination Committee, which functions to identify and facilitate the selection of the Company's Directors, it does not align with IDClear's circumstances, where the entire process of appointing Board of Directors is conducted by the Shareholders. - This will be included as a recommendation in the harmonization of SRO GCG to be considered for regulatory implementation or categorized as N/A.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDClear	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari Direksi/Dewan Komisaris non-eksekutif dengan mayoritas Direksi/Komisaris Independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive Directors/Commissioners with a majority of Independent Directors/Commissioners?	- Poin ini mensyaratkan jumlah Komisaris Independen atau pihak independen dalam komposisi keanggotaan Komite Audit Perusahaan lebih dari 50% atau berjumlah mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. - Namun hanya terdapat 2 anggota Komite Audit yang independen dalam susunan keanggotaan Komite Audit KPEI yang seluruhnya berjumlah 4 orang, atau jumlah ini masih belum memenuhi syarat mayoritas yang diminta karena jumlahnya masih sebesar 50% saja. - This point requires that the number of Independent Commissioners or independent parties in the composition of the Company's Audit Committee must exceed 50% or constitute a majority of the total members of the Board of Commissioners. - However, there are only 2 independent members in the composition of IDClear's Audit Committee out of a total of 4 members, which does not yet meet the required majority as it still stands at only 50%.	Perusahaan agar dapat mempertimbangkan jumlah anggota Komisaris Independen atau pihak independen dalam komposisi keanggotaan Komite Audit, hingga berjumlah mayoritas atau lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris. The Company is advised to consider increasing the number of Independent Commissioners or independent parties in the Audit Committee to form a majority or more than 50% of the total members of the Board of Commissioners.	- Saat ini, komposisi Komite Audit KPEI periode 2023-2027 sudah terdiri dari 2 Komisaris dan 2 pihak independen. Salah satu Komisaris yang merupakan Komisaris Independen dan juga anggota Komite Audit, akan meningkatkan majority jumlah anggota independen pada susunan Komite Audit. - Namun untuk pengungkapannya, perlu menyebutkan jabatannya secara eksplisit sebagai anggota Komite Audit Independen pada pengungkapan susunannya di Piagam Komite Audit, Laporan Tahunan dan <i>website</i> Perusahaan. - Hal ini akan menjadi rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. - Currently, the composition of IDClear's Audit Committee for the 2023-2027 period consists of 2 commissioners and 2 independent parties. One of the commissioners, who is an independent commissioner and also a member of the Audit Committee, will increase the majority of independent members within the Audit Committee. - However, for disclosure purposes, the position must be explicitly stated as an Independent Audit Committee Member in the composition presented in the Audit Committee Charter, the Annual Report, and the company's website. - This will be included as a recommendation in the harmonization of SRO GCG to be considered for regulatory implementation or categorized as N/A.
E.3.4	Apakah Perusahaan mensyaratkan kuorum minimum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan Dewan Komisaris? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board of Commissioner decisions?	Pada poin ini mensyaratkan kuorum 2/3 untuk pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris. Informasi yang ada (di dalam Piagam Dewan Komisaris KPEI) menyebutkan bahwa untuk kuorum rapat Dewan Komisaris hanya mensyaratkan minimal lebih dari 1/2 jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. This point requires a quorum of 2/3 for decision-making in Board of Commissioners meetings. The available information (as stated in IDClear's Board of Commissioners Charter) mentions that the quorum for such meetings only requires more than 1/2 of the Board of Commissioners members to be present.	Mengajukan usulan untuk mengubah ketentuan mengenai syarat kuorum dalam rapat pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, dari sebelumnya yang hanya mensyaratkan lebih dari 1/2 anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat menjadi minimal 2/3. A proposal is submitted to amend the provision on the quorum requirement for decision-making in Board of Commissioners meetings, changing it from the current requirement of more than 1/2 of the members present to a minimum of 2/3.	- Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk merubah ketentuan pada Piagam terkait kuorum pengambilan Keputusan menjadi 2/3. - Namun, Dewan Komisaris perlu berkoordinasi antar SRO, mengingat Piagam Dewan Komisaris saat ini merupakan hasil harmonisasi bersama SRO. - Menjadi satu poin rekomendasi dalam pemenuhan gap GCG 2025 dan rekomendasi pada harmonisasi GCG SRO. - Proposing to the Board of Commissioners to amend the provision in the Charter regarding the decision-making quorum to 2/3. - However, the Board of Commissioners needs to coordinate with other SRO, considering that the current Board of Commissioners' Charter is the result of a joint harmonization among the SRO. - This will be one of the recommendations for fulfilling the GCG 2025 gap and for the harmonization of SRO GCG.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDClear	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
E.3.12	Apakah Perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan, dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif dan ukuran kinerja jangka pendek dan jangka panjang) untuk direktur eksekutif dan CEO? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long-term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	1. Poin ini mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi yang mencakup tiga hal, yaitu insentif jangka pendek, insentif jangka Panjang, dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja Perusahaan. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Perusahaan hanya mengungkapkan kebijakan terkait dengan insentif jangka pendek saja, sementara untuk kebijakan remunerasi yang terkait dengan pemberian insentif jangka panjang dan insentif yang didasarkan pada ukuran kinerja Perusahaan belum dipenuhi. 1. This point requires the Company to disclose the remuneration policy for members of the Board of Directors, which must cover three aspects: short-term incentives, long-term incentives, and incentives based on the Company's performance metrics. 2. The assessment results indicate that the Company only discloses the policy related to short-term incentives, while the policies on long-term incentives and performance-based incentives have not yet been fulfilled.	1. Perusahaan disarankan mengungkapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi, yang mencakup semua jenis tunjangan dan natura, tidak terbatas hanya pemberian insentif jangka pendek saja, namun juga mencakup pemberian insentif jangka panjang maupun insentif yang didasarkan pada kinerja Perusahaan. 2. Kebijakan/praktik remunerasi setiap anggota Direksi setidaknya merinci terkait gaji pokok, insentif atau bonus yang diberikan dalam jangka pendek (<i>annual bonus</i>) dan jangka panjang (contoh: dalam bentuk <i>deferred stock</i>). 3. Kinerja pengukuran sebagai basis penetapan bonus (jangka pendek dan jangka panjang), seperti <i>operating margin</i>, <i>free cash flow</i>, atau ROE, dsb., seharusnya diungkapkan. 1. The Company is advised to disclose its remuneration policy for the Board of Directors, covering all forms of allowances and benefits, not limited to short-term incentives, but also including long-term incentives and those based on company performance. 2. The remuneration policy/practice for each member of the Board of Directors should at least detail the basic salary, incentives or bonuses paid in the short term (e.g., annual bonus) and long term (e.g., deferred stock). 3. The performance metrics used as the basis for determining bonuses (both short-term and long-term), such as operating margin, free cash flow, or ROE, etc., should be disclosed.	1. Nilai "<i>not comply</i>" dengan harapan bahwa Perusahaan dapat memenuhi parameter ini, sesuai dengan aturan SEOJK Nomor 30/SEOJK.04/2016, Bagian III 2g (1c), yaitu: Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian mengenai Direksi, yang mencakup antara lain prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Hal ini tidak dapat dipenuhi, karena tidak relevan pada KPEI yang merupakan LKP dan bukan emiten atau perusahaan publik. 3. Rekomendasi untuk Harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. 1. A "not comply" rating is given with the expectation that the Company will fulfill this parameter, in accordance with SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016, Section III 2g (1c), which states: Corporate Governance of Issuers or Public Companies must at least include a description of the Board of Directors, covering, among others, the procedures, basis for determination, structure, and amount of remuneration for each member of the Board of Directors, as well as the relationship between remuneration and the performance of the Issuer or Public Company. 2. This requirement cannot be fulfilled, as it is not relevant to IDClear, which is a CCP and not an issuer or a public company. 3. This is proposed as a recommendation in the harmonization of SRO GCG to be considered for regulatory implementation or categorized as N/A.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDCLEAR	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
E.3.15	Apakah Perusahaan mempunyai standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi Direktur Eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan, seperti penarikan kembali kembali bonus yang sudah diberikan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	Poin ini mensyaratkan Perusahaan seharusnya memiliki standar pengukuran yang menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja para Direksi dan manajer senior lainnya dengan kepentingan jangka panjang perusahaan (<i>company long-term performance</i>), termasuk provisi <i>clawback</i> (pengembalian sebagian atau seluruh bonus yang sudah diterima) dan pembayaran bonus yang ditangguhkan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Perusahaan tidak memiliki standar pengukuran kinerja dan provisi dimaksud. This point requires the Company to have performance measurement standards that align the remuneration of the Board of Directors and other senior managers with the Company's long-term interests (<i>company long-term performance</i>), including a clawback provision (the return of some or all bonuses already received) and deferred bonus payments. The assessment results indicate that the Company does not have performance measurement standards or the mentioned provisions.	Merumuskan kebijakan remunerasi dengan menetapkan standar yang terukur yang mengkaitkan antara kinerja Direksi dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Hal tersebut di antaranya yaitu adanya <i>claw back provision</i>, <i>reward</i> atau <i>deferred bonuses</i> yang menggunakan pengukuran-pengukuran, seperti ROE, <i>cummulative free cash flow</i>, <i>operating profit</i> atau lainnya. The Company should formulate a remuneration policy by establishing measurable standards that link the performance of the Board of Directors with the long-term interests of the company. This includes, among other things, having a clawback provision, rewards, or deferred bonuses that use performance metrics such as ROE, cumulative free cash flow, operating profit, or other similar measures.	1. Pemberian nilai "<i>not comply</i>" dengan harapan bahwa Perusahaan dapat memenuhi parameter ini, sesuai dengan aturan POJK No. 34/POJK.04/2014, tentang Komite Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 8, terkait "penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi". 2. Hal ini tidak dapat dipenuhi, karena tidak relevan pada KPEI yang merupakan LKP dan bukan emiten atau perusahaan publik. 3. Rekomendasi untuk Harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. 1. A "not comply" rating is given with the expectation that the Company will fulfill this parameter, in accordance with POJK No. 34/POJK.04/2014, on the Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, Article 8, which relates to "performance assessments aligned with the remuneration received by each member of the Board of Directors." 2. This requirement cannot be fulfilled, as it is not relevant to IDCLEAR, which is a CCP and not an issuer or a public company. 3. This is proposed as a recommendation in the harmonization of SRO GCG to be considered for regulatory implementation or categorized as N/A.
E.5.3	Apakah Perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/ Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ Direktur Utama/ Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose how the Board of Directors/ Commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/ President and key management?	Poin ini meminta pengungkapan informasi mengenai adanya rencana suksesi dari Dewan Komisaris Perusahaan yang diperuntukkan bagi Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. Berdasarkan hasil asesmen, tidak ditemukan adanya pengungkapan informasi mengenai hal ini oleh Perusahaan. This point requests the disclosure of information regarding the succession plan for the Board of Commissioners, specifically for the President Director and other members of the Board of Directors. Based on the assessment results, no disclosure of such information was found by the Company.	Dewan Komisaris perlu menyusun dan mengungkapkan mengenai rencana suksesi yang diperuntukkan untuk posisi Direktur Utama. Rencana suksesi ini berupa kebijakan yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan diajukan ke Dewan Komisaris. The Board of Commissioners needs to develop and disclose a succession plan for the position of the President Director. This succession plan should be a policy proposed by the Nomination Committee and submitted to the Board of Commissioners.	1. Pemberian nilai "<i>not comply</i>" dengan harapan bahwa Perusahaan dapat memenuhi parameter ini, sesuai dengan aturan SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016, tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 2 (9b), yaitu: menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 2. Hal ini tidak dapat dipenuhi, karena tidak relevan pada KPEI yang merupakan LKP dan bukan emiten atau perusahaan publik. Penentuan atau rencana suksesi untuk Dirut di Perusahaan merupakan tanggung jawab pemegang saham Perusahaan. 3. Rekomendasi untuk Harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. 1. A "not comply" rating is given with the expectation that the Company will fulfill this parameter, in accordance with SEOJK No.30/SEOJK.04/2016, on the Form and Content of the Annual Report for Issuers or Public Companies, Article 2 (9b), which requires the development of policies and criteria needed in the nomination process for candidates to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. 2. This requirement cannot be fulfilled, as it is not relevant to IDCLEAR, which is a CCP and not an issuer or public company. The determination or succession plan for the President Director at the Company is the responsibility of the Company's shareholders. 3. This is proposed as a recommendation in the harmonization of SRO GCG to be considered for regulatory implementation or categorized as N/A.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDCLEAR	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
E.5.6	Apakah Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/ Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang dilakukan untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/ commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	1. Poin ini meminta pengungkapan adanya kebijakan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris secara individual, pengungkapan proses penilaiannya, dan pengungkapan kriteria yang digunakan. 2. Berdasarkan hasil penilaian, tidak ditemukan adanya pengungkapan kebijakan terkait ketiga praktik yang dimaksud. 3. This point requests the disclosure of a policy for the individual performance evaluation of members of the Board of Commissioners, the disclosure of the evaluation process, and the disclosure of the criteria used. 4. Based on the assessment results, no disclosure of a policy related to the three practices mentioned was found.	Perusahaan perlu memiliki kebijakan atas penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris secara individual, proses penilaiannya, dan kriteria yang digunakan. Kebijakan ini perlu diungkapkan pada <i>Annual Report</i> Perusahaan. The Company needs to establish a policy for the individual performance evaluation of members of the Board of Commissioners, including the evaluation process and the criteria used. This policy should be disclosed in the Company's Annual Report.	1. Pemberian "<i>not comply</i>" dengan harapan bahwa Perusahaan dapat memenuhi parameter ini, sesuai dengan aturan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, bagian III, yaitu: Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai Dewan Komisaris, yang mencakup Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi: prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian. 2. Hal ini tidak dapat dipenuhi, karena tidak relevan pada KPEI yang merupakan LKP dan bukan emiten atau perusahaan publik. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan oleh pemegang saham, yaitu BEI, dalam bentuk persetujuan pemegang saham atas Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan. 3. Rekomendasi untuk Harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A. 1. A "not comply" rating is given with the expectation that the Company will fulfill this parameter, in accordance with SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, on the Form and Content of the Annual Report for Issuers or Public Companies, Section III, which requires that Issuers or Public Companies include, at a minimum, a brief description of the Board of Commissioners, covering the Company's policies on the performance evaluation of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, including: the procedure for conducting the evaluation, the criteria used, and the party responsible for the evaluation. 2. This requirement cannot be fulfilled, as it is not relevant to IDCLEAR, which is a CCP and not an issuer or public company. The performance evaluation of the Company's Board of Commissioners is conducted by the shareholders, specifically the Indonesia Stock Exchange (IDX), in the form of shareholder approval of the Board of Commissioners' Annual Supervision Report at the Annual GMS. 3. This is proposed as a recommendation in the harmonization of SRO GCG to be considered for regulatory implementation or categorized as N/A.

Prinsip Principle	Pertanyaan Question	Temuan yang Relevan dengan KPEI Findings Relevant to IDClear	Rekomendasi Recommendation	Penjelasan Explanation
E.5.7	Apakah Perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Komite Dewan dan mengungkapkan kriteria serta proses yang diikuti untuk penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	1. Poin ini meminta pengungkapan informasi mengenai adanya praktik penilaian terhadap kinerja dari seluruh komite (di bawah Dewan Komisaris) yang ada di perusahaan, proses penilaian, serta kriteria yang digunakan dalam penilaian tersebut. 2. Berdasarkan hasil penilaian, meskipun telah terdapat praktik penilaian kinerja yang dilakukan perusahaan terhadap organ organ di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit) serta informasi terkait proses penilaiannya, namun karena tidak terdapat pengungkapan informasi terkait kriteria penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja komite, maka Perusahaan dinilai masih belum <i>comply</i> terhadap indikator penilaian ini.	Perusahaan disarankan agar kriteria penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite atau organ pendukung di bawah Dewan Komisaris dapat diungkapkan ke publik, atau mengungkapkan ke publik jika praktik ini sudah diterapkan Perusahaan. Pengungkapan ini dapat dilakukan pada <i>Annual Report</i>, melalui Piagam Komite Audit The Company is advised to disclose the criteria for the annual performance evaluation of the committees or supporting organs under the Board of Commissioners to the public, or disclose to the public if this practice has already been implemented by the Company. This disclosure can be made in the Annual Report, through the Audit Committee Charter.	1. Terkait kriteria penilaian Komite Audit ini, akan dibahas lebih lanjut dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris karena keterkaitannya dengan harmonisasi di SRO. 2. Rekomendasi untuk Harmonisasi GCG SRO untuk dipertimbangkan praktiknya di regulator atau sebagai N/A 1. Regarding the performance evaluation criteria for the Audit Committee, this will be further discussed with the Audit Committee and the Board of Commissioners due to its relevance to the harmonization in the SRO. 2. This is proposed as a recommendation in the harmonization of SRO GCG to be considered for regulatory implementation or categorized as N/A.

RENCANA PELAKSANAAN GCG 2025

Sebagai bagian dari *Roadmap* Pengembangan Implementasi GCG, KPEI akan memfokuskan upayanya pada tahun 2025 untuk mengatasi gap dan melaksanakan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian GCG tahun 2024 yang telah disampaikan sebelumnya. Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain:

1. Penyesuaian dokumen pedoman/kebijakan sesuai standar ACGS.
2. Pengungkapan dan Transparansi.
3. Koordinasi dengan SRO untuk harmonisasi implementasi GCG di tahun 2025.
4. Penilaian dan Penyampaian Laporan GCG 2024.

GCG IMPLEMENTATION PLAN FOR 2025

As part of the GCG Implementation Development Roadmap, IDClear will focus its efforts in 2025 on addressing gaps and implementing recommendations based on the results of the 2024 GCG assessment that were previously submitted. Some of the planned activities include:

1. Adjusting guideline/policy documents in accordance with ACGS standards.
2. Disclosure and Transparency.
3. Coordination with SRO for harmonizing GCG implementation in 2025.
4. Evaluation and Submission of the 2024 GCG Report.

Rapat Umum Pemegang Saham

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dan utama dalam perusahaan yang memiliki seluruh kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan batasan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui RUPS, Pemegang Saham dapat memanfaatkan haknya untuk memperoleh informasi terkait kegiatan Perusahaan dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi, serta mengambil keputusan dan kebijakan strategis yang mendukung kepentingan Perusahaan. Selain itu, RUPS juga menjadi forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban mengenai hasil tugas dan kinerja selama satu tahun buku, guna mendapatkan penilaian dan persetujuan dari Pemegang Saham.

KPEI menyelenggarakan 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan atau RUPST

RUPST KPEI diselenggarakan satu kali dalam setahun dan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Beberapa agenda yang dibahas dan disahkan dalam RUPST KPEI antara lain; persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan Kantor Akuntan Publik, persetujuan penyisihan laba bersih Perusahaan untuk Cadangan Jaminan, serta tindakan korporasi yang membawa dampak signifikan bagi Perusahaan.

2. RUPS Luar Biasa atau RUPSLB

RUPSLB KPEI diselenggarakan satu kali atau lebih dalam setahun, sesuai kebutuhan terkait dengan kepentingan Perusahaan. Agenda yang diputuskan dalam RUPSLB KPEI antara lain: persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk tahun berikutnya, perubahan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar dan agenda lainnya yang memerlukan persetujuan dari RUPS.

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest and most important organ in a company, holding all the authority not delegated to the Board of Commissioners or Board of Directors, in accordance with the limitations set forth in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Through the GMS, Shareholders can exercise their rights to obtain information related to the Company's activities from the Board of Commissioners and/or Board of Directors, as well as make decisions and strategic policies that support the Company's interests. Additionally, the GMS serves as a forum for the Board of Commissioners and Board of Directors to present their reports and accountability regarding the results of their tasks and performance during the financial year, in order to receive evaluations and approval from the Shareholders.

IDClear holds two types of General Meetings of Shareholders (GMS), namely:

1. Annual GMS or AGMS

The AGMS of IDClear is held once a year and must be conducted no later than six months after the end of the financial year. Some of the agendas discussed and approved in the IDClear's AGMS include: approval of the Annual Report and the ratification of the Financial Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, determination of the Public Accountant Firm, approval of the allocation of the Company's net income for the Guarantee Reserve, and corporate actions that have significant impacts on the company.

2. Extraordinary GMS or EGMS

The EGMS of IDClear is held once or more within a year, as needed in relation to the interests of the Company. The agendas decided in the IDClear's EGMS include: approval of the Work Plan and Annual Budget for the following year, changes to the members of the Board of Directors or Board of Commissioners, amendments to the Articles of Association, and other agendas that require approval from the GMS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN 2024

Pada tahun buku 2024, KPEI menyelenggarakan 1 (satu) RUPS Tahunan dan 2 (dua) RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan RUPS yang berlaku.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

In the 2024 financial year, IDClear held 1 (one) Annual GMS and 2 (two) Extraordinary GMS in accordance with the prevailing GMS regulations.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024

RUPST 2024 dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2024 bertempat di Ruang Meeting 5A, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190. Rapat dilaksanakan secara tatap muka penuh, dipimpin oleh Komisaris Utama KPEI.

Sesuai dengan peraturan penyelenggaraan RUPS dan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya RUPST telah disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat No. KPEI-0587/DIR/0524 tertanggal 22 Mei 2024 perihal Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KPEI Tahun 2024.

Sesuai dengan peraturan penyelenggaraan RUPS dan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, KPEI kemudian menyampaikan Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham melalui surat No. KPEI-0632/DIR/0624 tertanggal 7 Juni 2024 perihal Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan KPEI Tahun 2024.

RUPST 2024 dihadiri oleh BEI selaku Pemegang Saham, Dewan Komisaris beserta Direksi KPEI, dan tamu undangan dengan daftar hadir sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan/Perusahaan Position/Company
1	Iman Rachman	Direktur Utama BEI sebagai Perwakilan Pemegang Saham President Director of IDX as the Shareholders' Representative
2	Sunandar	Direktur BEI sebagai Perwakilan Pemegang Saham Director of IDX as Shareholders' Representative
3	Hoesen	Komisaris Utama KPEI President Commissioner of IDClear
4	Ronald Waas	Komisaris KPEI Commissioner of IDClear
5	Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris KPEI Commissioner of IDClear
6	Iding Pardi	Direktur Utama KPEI President Director of IDClear
7	Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of a Clearing and Guarantee
8	Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2024

Keputusan RUPST 2024 telah dicatat dalam Akta Notaris No. 124 tanggal 24 Juni 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta. RUPST 2024 membahas 4 (empat) agenda dengan keputusan dan hasil realisasinya sebagai berikut.

Annual GMS Implementation in 2024

The 2024 AGMS was held on Monday, June 24, 2024, at Meeting Room 5A, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1, 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. The meeting was conducted fully in person and chaired by the President Commissioner of IDClear.

In compliance with the applicable GMS regulations and Article 9 of the Company's Articles of Association, the Notice of the AGMS was submitted to the Shareholder via letter No. KPEI-0587/DIR/0524 dated May 22, 2024, on the Announcement of the 2024 AGMS of IDClear.

In accordance with the regulations governing the GMS and Article 9 of the Company's Articles of Association, IDClear subsequently delivered the Meeting Invitation to the Shareholder through letter No. KPEI-0632/DIR/0624 dated June 7, 2024, on the Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of IDClear.

The 2024 AGMS was attended by the Indonesia Stock Exchange (IDX) as the Shareholder, the Board of Commissioners and Board of Directors of IDClear, and invited guests. The list of attendees is as follows:

Resolution and Realizations of the Annual GMS in 2024

The resolutions of the 2024 AGMS were recorded in Notarial Deed No. 124 dated June 24, 2024 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., domiciled in Jakarta. The 2024 AGMS discussed four (4) agenda items, with the following resolutions and implementation outcomes.

Agenda RUPST 2024 AGMS Agenda 2024	Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2024 Realization in 2024
Agenda Pertama First Agenda Item		
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Approval of the Company Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for Financial Year 2023	1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, member firm dari Ernst & Young (EY) dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material" sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 25 Maret 2024, No. 00300/2.1032/AU.1/09/1008-2/1/III/2024. 3. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan atau tindak pidana lainnya. 1. Approved and accepted the Annual Report of the Company's Board of Directors regarding the running of the Company including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for Financial Year 2023. 2. Ratified the Company's Financial Statements for Financial Year 2022, which has been audited by the Public Accounting Firm ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja, member firm of Ernst & Young (EY) with the opinion "Fair in all material respects" as stated in the in the Report dated March 25, 2024, No. 00300/2.1032/AU.1/09/1008-2/1/III/2024. 3. The Meeting gave full discharge and discharge of responsibility (<i>volledig acquit et decharge</i>) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they had carried out during the 2023 Financial year, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements, except for fraud, embezzlement and or other criminal acts.	Telah terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2023 Fully realized as of December 31, 2023
Agenda Kedua Second Agenda Item		
Persetujuan Penyisihan Cadangan Jaminan untuk Tahun Buku 2023 Approval of the Allocation of Reserve for Guarantee Fund for Financial year 2023	Menyetujui besarnya penyisihan dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang dialokasikan ke Cadangan Jaminan sebesar 5% (lima persen) atau senilai Rp5.299.075.507 (lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah). Approved the allocation of reserves from the Company's net profit to the Reserve for Guarantee Fund for the Financial year 2023 of 5% (five percent) of the Company's net profit or in the amount of Rp5,299,075,507 (five billion two hundred ninety-nine million seventy-five thousand five hundred seven rupiah).	Telah terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2024 Fully realized as of December 31, 2024
Agenda Ketiga Third Agenda Item		
Persetujuan Penyisihan Cadangan Wajib Perseroan untuk Tahun Buku 2023 Approval of the Allocation of Company's Mandatory Reserve for the Financial year 2023	Menyetujui besarnya penyisihan dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 yang dialokasikan ke Cadangan Wajib sebesar 69,82% (enam puluh sembilan koma delapan puluh dua per seratus) atau senilai Rp74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar rupiah). Approved the allocation of the Company's net profit for the 2023 financial year to the Mandatory Reserve in the amount of 69.82% (sixty-nine point eighty-two percent) or Rp74,000,000,000 (seventy-four billion rupiah).	Telah terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2024 Fully realized as of December 31, 2024

Agenda RUPST 2024 AGMS Agenda 2024	Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2024 Realization in 2024
Agenda Keempat Fourth Agenda Item		
Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit Buku-Buku Perseroan Tahun Buku 2024 Appointment of Public Accountant to audit the Company's Books for the Financial year 2023	Menyetujui: 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja member firm of Ernst & Young Global Limited; atau 2. KAP lain yang sama dengan KAP yang ditunjuk oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangannya Untuk mengaudit buku Perseroan dan Dana Jaminan untuk Tahun Buku 2024 dan selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain bagi penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Dalam hal KAP sebagaimana dalam butir a dan b tersebut mengalami perubahan nama, maka penugasan ini akan dilanjutkan oleh KAP yang meneruskan hak dan kewajiban KAP yang ditunjuk semula. Approved: 1. The appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja, a member firm of Ernst & Young Global Limited; or 2. Another Public Accounting Firm that is the same as the one appointed by IDX to audit its Financial Statements To audit the Company's books and the Guarantee Fund for the 2024 Financial Year, and further authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other terms for the appointment of the said Public Accounting Firm. In the event that the Public Accounting Firm referred to in points a and b undergoes a name change, the assignment shall continue with the Public Accounting Firm that assumes the rights and obligations of the originally appointed Public Accounting Firm.	Telah terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2024 Fully realized as of December 31, 2024

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2024

Pada tahun 2024, KPEI menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 17 September 2024 di Ruang Meeting 5A KPEI pukul 14.00 dengan agenda sebagai berikut:

Extraordinary GMS Implementation in 2024

In 2024, IDCclear held 2 (two) Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS). The first EGMS was held on Tuesday, September 17, 2024, at 2:00 PM in Meeting Room 5A, IDCclear, with the following agenda:

Agenda RUPSLB 17 September 2024 EGMS Agenda Items September 17, 2024	Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2024 Realization in 2024
Perubahan Struktur Permodalan Perseroan: 1. Penambahan Modal; 2. Pembentukan Seri Saham; 3. Perubahan Seri Saham BEI (Melalui Konversi) Menjadi Saham Seri A2; dan 4. Pengambilan Bagian Saham Baru oleh Calon Pemegang Saham atas Saham Seri B. Change in the Company's Capital Structure: 1. Increase in Capital; 2. Establishment of Share Series; 3. Conversion of IDX Shares into Series A2 Shares; and 4. Subscription of New Shares by Prospective Shareholders for Series B Shares.	Menyetujui: 1. Penambahan modal disetor Perseroan sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah); 2. Pembentukan seri saham baru Perseroan sesuai dengan masing-masing kegiatan usaha sebagai LKP dan CCP, sehingga seri saham baru Perseroan menjadi Saham Seri A1, A2, dan B; 3. Perubahan seri saham BEI melalui konversi saham yang dimiliki BEI saat ini di Perseroan ke dalam Saham Seri A2 sebesar Rp208.160.000.000 (dua ratus delapan miliar seratus enam puluh juta rupiah) atau sebanyak 26.020 (dua puluh enam ribu dua puluh) lembar saham untuk lini usaha CCP; 4. Pengambilan bagian oleh Bank Indonesia dan delapan Bank untuk Saham Seri B sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang terdiri dari 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham. Approved: 1. The increase in the Company's paid-up capital by Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah); 2. The establishment of new share series according to the Company's business activities as a Clearing and Guarantee Institution (LKP) and Central Counterparty (CCP), resulting in the Company's new share series being Series A1, A2, and B; 3. The conversion of IDX's current shareholding in the Company into Series A2 Shares totaling Rp 208,160,000,000 (two hundred eight billion one hundred sixty million rupiah) or 26,020 (twenty-six thousand twenty) shares for the CCP business line; 4. The subscription of Series B Shares by Bank Indonesia and eight commercial banks amounting to Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah), consisting of 25,000 (twenty-five thousand) shares.	Telah terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2024 Fully realized as of December 31, 2024

Agenda RUPSLB 17 September 2024 EGMS Agenda Items September 17, 2024	Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2024 Realization in 2024
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Amendment to the Company's Articles of Association	Menyetujui: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi: • Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha; • Pasal 4 tentang Modal; • Pasal 5 tentang Saham; • Pasal 7 tentang Pemindahan Hak atas Saham; • Pasal 8 tentang Rapat Umum Pemegang Saham; • Pasal 10 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS; • Pasal 11 tentang Perubahan Anggaran Dasar; • Pasal 12 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran; • Pasal 13 tentang Direksi; • Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang Direksi; • Pasal 16 tentang Dewan Komisaris; • Pasal 19 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan; dan • Pasal 20 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen Approved To approve the amendment to the Company's Articles of Association, which includes revisions to the following articles:: • Article 3 on Purpose and Objectives as well as Business Activities; • Article 4 on Capital; • Article 5 on Shares; • Article 7 on Transfer of Share Rights; • Article 8 on General Meeting of Shareholders; • Article 10 on Quorum, Voting Rights, and GMS Resolutions; • Article 11 on Amendments to the Articles of Association; • Article 12 on Merger, Consolidation, Acquisition, Separation, and Dissolution; • Article 13 on Board of Directors; • Article 14 on Duties and Authorities of the Board of Directors; • Article 16 on Board of Commissioners; • Article 19 on Work Plan, Financial year, and Annual Report; and • Article 20 on Profit Utilization and Dividend Distribution	Telah terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2024 Fully realized as of December 31, 2024

KPEI menyelenggarakan RUPSLB 2024 yang kedua pada hari Senin, 21 Oktober 2024, bertempat di Nusantara Ballroom Hotel The Dharmawangsa Jakarta, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rapat dilaksanakan secara tatap muka penuh, dipimpin oleh Komisaris Utama KPEI.

IDClear convened its second EGMS for the year 2024 on Monday, October 21, 2024, held at Nusantara Ballroom The Dharmawangsa Jakarta, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru, South Jakarta. The meeting was conducted fully in person and chaired by the President Commissioner of IDClear.

Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPSLB disampaikan kepada Pemegang Saham melalui surat No. KPEI-1203/DIR/0924, tanggal 20 September 2024 perihal Pengumuman Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KPEI Tahun 2024. Dilanjutkan dengan Panggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan melalui surat No. KPEI-1315/DIR/0924, tanggal 30 September 2024 perihal Pengumuman Kembali Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KPEI Tahun 2024. RUPSLB 2024 dihadiri oleh BEI, Bank Indonesia dan 8 (delapan) Bank selaku Pemegang Saham, Dewan Komisaris beserta Direksi KPEI, dan para undangan dengan daftar hadir sebagai berikut.

The notification regarding the plan to convene the EGMS was delivered to the Shareholders through letter No. KPEI-1203/DIR/0924, dated September 20, 2024, on the Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of IDClear for 2024. This was followed by the official invitation to the Shareholders of the Company through letter No. KPEI-1315/DIR/0924, dated September 30, 2024, on the Re-Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of IDClear for 2024. The 2024 EGMS was attended by IDX, Bank Indonesia, and 8 (eight) Banks as the Shareholders, as well as the Board of Commissioners and Board of Directors of IDClear, and invited guests with the attendance list as follows.

No.	Nama Name	Jabatan/Perusahaan Position/Company
1	Iman Rachman	Direktur Utama BEI sebagai Perwakilan Pemegang Saham President Director of IDX as the Shareholders' Representative
2	Sunandar	Direktur BEI sebagai Perwakilan Pemegang Saham Director of IDX as Shareholders' Representative
3	Agustina Dharmayanti	Bank Indonesia
4	Salomo Silaban	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
5	M. Erio Ritsani	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6	Farid Oktovani	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7	Sehat Pangabahan Pangaribuan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

No.	Nama Name	Jabatan/Perusahaan Position/Company
8	Andhi Anggoro	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
9	Atika Detty Kurniawati	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10	Yeni Marlina Laurence	PT Bank Central Asia Tbk
11	Suryadi	PT Bank Permata Tbk
12	I Made Budi P. Artha	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
13	Daniel Edison Hutapea	PT Bank CIMB Niaga Tbk
14	Herman	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
15	Hoesen	Komisaris Utama KPEI President Commissioner of IDCLEAR
16	Ronald Waas	Komisaris KPEI Commissioner of IDCLEAR
17	Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris KPEI Commissioner of IDCLEAR
18	Iding Pardi	Direktur Utama KPEI President Director of IDCLEAR
19	Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee
20	Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 2024

Keputusan RUPSLB 2024 telah dicatat dalam Akta Notaris No. 234 tanggal 21 Oktober 2024 oleh Notaris Ashoya Ratam, SH. Mkn., yang berkedudukan di Jakarta Selatan. RUPSLB 2024 membahas 1 (satu) agenda dengan keputusan dan realisasi keputusan sebagai berikut:

Resolution and Realizations of the Extraordinary GMS in 2024

The resolution of the 2024 EGMS was documented in Notarial Deed No. 234 dated October 21, 2024, prepared by Notary Ashoya Ratam, SH, MKn, domiciled in South Jakarta. The EGMS discussed one (1) agenda item, with the resolution and its implementation as follows:

Agenda RUPSLB 2024 EGMS Agenda Item 2024	Keputusan Resolution	Realisasi di Tahun 2024 Realization in 2024
Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI Tahun 2025 Approval of the Work Plan and Annual Budget (RKAT) of IDCLEAR for 2025	Menyetujui: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) KPEI Tahun 2025 yang telah dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendapat persetujuan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengubah RKAT KPEI Tahun 2025 jika hal tersebut disyaratkan oleh OJK guna mendapat persetujuan. Approved: The 2025 Work Plan and Annual Budget (RKAT) of IDCLEAR which has been prepared by the Company's Board of Directors and approved by the Company's Board of Commissioners to be submitted to the Financial Services Authority (OJK) for approval, and to grant authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to amend the 2025 RKAT of IDCLEAR if such amendment is required by OJK in order to obtain approval.	Telah terealisasi sepenuhnya per 31 Desember 2024 Fully realized as of December 31, 2024

Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris KPEI adalah organ Perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat yang obyektif dan seimbang kepada Direksi dalam pengelolaan usaha, baik secara umum maupun khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolektif di hadapan RUPS atas kinerja keseluruhan.

Dewan Komisaris berhak meminta informasi dan keterangan dari Direksi dan jajarannya mengenai pengelolaan Perusahaan serta kesesuaian dengan rencana kerja yang telah disusun, termasuk keputusan-keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan usaha. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memantau dan memastikan penerapan GCG yang baik dan efektif, serta terus melakukan perbaikan dan pengembangan praktik GCG secara berkelanjutan.

Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.04/2016 yang mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk memenuhi persyaratan umum, kriteria independensi, serta kompetensi, dan lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Sejak tahun 2014, Dewan Komisaris KPEI telah memiliki Piagam yang berfungsi sebagai pedoman tata tertib kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini secara berkala, atau sesuai kebutuhan, ditinjau dan diperbarui untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan Perusahaan, standar industri, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Dewan Komisaris KPEI disusun dan diperbarui secara bersama dengan BEI dan KSEI untuk menjaga harmonisasi antara SRO. Pembaruan terakhir Piagam dilakukan pada 30 Agustus 2022 dan versi terbaru telah diunggah di situs resmi Perusahaan di alamat <https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/manual-kebijakan-perusahaan> yang dapat diakses oleh publik.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, susunan dan komposisi Dewan Komisaris KPEI pada tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) anggota. Terdapat 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris/Anggota. Setelah memperoleh izin usaha sebagai CCP Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dari Bank Indonesia

The Board of Commissioners of IDClear is a corporate body responsible for supervising and providing objective and balanced advice to the Board of Directors in managing the Company, both generally and specifically, in accordance with the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners is collectively accountable to the GMS for the overall performance.

The Board of Commissioners has the right to request information and clarification from the Board of Directors and its staff regarding the Company's management and its alignment with the established work plan, including decisions made to achieve business objectives. In addition, the Board of Commissioners is tasked with monitoring and ensuring the good and effective implementation of GCG, as well as continuously improving and developing GCG practices.

The requirements for becoming a member of the Board of Commissioners of a Clearing and Guarantee Institution are governed by the Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.04/2016, which mandates that members of the Board of Commissioners must meet general requirements, independence criteria, and competency standards, and pass a fit and proper test conducted by the relevant authority.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

Since 2014, the Board of Commissioners of IDClear has had a Charter that serves as a work guideline for the code of conduct in carrying out its duties and responsibilities. This Charter is reviewed and updated periodically, or as needed, to ensure its alignment with the Company's developments, industry standards, and changes in applicable laws and regulations.

The IDClear's Board of Commissioners Charter is prepared and updated jointly with IDX and KSEI to maintain harmonization among the Self-Regulatory Organizations (SRO). The most recent update to the Charter was made on August 30, 2022, and the latest version has been uploaded to the Company's official website at <https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/manual-kebijakan-perusahaan>, which is accessible to the public.

STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 59/POJK.04/2016 on the Board of Directors and Board of Commissioners of the Clearing and Guarantee Institution, the structure and composition of the IDClear's Board of Commissioners in 2024 consists of 3 (three) members. Comprising 1 (one) President Commissioner and 2 (two) Commissioners/Members. Following the granting of a

(BI), Bapak Hoesen selaku Komisaris Utama mulai efektif menjalankan rangkap jabatan sebagai Komisaris Independen. KPEI wajib memiliki Komisaris Independen guna mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagai CCP PUVA atas kegiatan yang telah memperoleh persetujuan OJK dan/atau BI selaku otoritas. Jabatan Komisaris Independen dapat dirangkap oleh Komisaris Utama.

Tidak ada perubahan dalam susunan dan komposisi Dewan Komisaris selama tahun buku 2024. Adapun susunan dan komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Hoesen	Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	2023-2027, Ke-1 First Term	Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 69 tanggal 29 Mei 2023, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Deed of EGMS Resolution No. 69 dated May 29, 2023, drawn up by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn
Ronald Waas	Komisaris Commissioner	2023-2027, Ke-2 Second Term	Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 69 tanggal 29 Mei 2023, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Deed of EGMS Resolution No. 69 dated May 29, 2023, drawn up by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn
Uriep Prasetyo	Budhi Komisaris Commissioner	2023-2027, Ke-1 First Term	Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 69 tanggal 29 Mei 2023, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn Deed of EGMS Resolution No. 69 dated May 29, 2023, drawn up by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam mendukung pelaksanaan tugas yang lebih optimal, efektif, dan efisien, Dewan Komisaris dapat membagi tugas di antara anggotanya. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berhak membentuk komite sesuai kebutuhan, dan apabila diperlukan, dapat memanfaatkan tenaga ahli untuk tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dengan mengacu pada Piagam Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Tugas Umum Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi secara independen dan obyektif.
2. Melakukan pemantauan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berakhir kepada RUPS.
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya satu bulan sekali.
5. Menelaah Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan sebelum dibahas di RUPS.
6. Mengawasi pelaksanaan RKAT serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.

business license as a CCP for the Money Market and Foreign Exchange Market by Bank Indonesia (BI), Mr. Hoesen, as the President Commissioner, officially assumed a dual role as an Independent Commissioner. IDCclear is required to have an Independent Commissioner to support the Company's business activities as a CCP PUVA, for activities that have been approved by OJK and/or BI as the relevant authority. The position of Independent Commissioner may be held concurrently by the President Commissioner.

There were no changes in the structure and composition of the Board of Commissioners during the 2024 financial year. As of December 31, 2024, the composition of the Board of Commissioners is as follows:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To support the optimal, effective, and efficient execution of its duties, the Board of Commissioners may distribute responsibilities among its members. In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is entitled to establish committees as needed and, if necessary, may engage experts for specific tasks within a defined period, in accordance with the Board of Commissioners Charter and the Company's Articles of Association.

General Duties of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners supervises management policies, the running of the management in general, both for the Company and its business, as well as provides advisory to the Board of Directors independently and objectively.
2. Monitoring the Company's compliance with its Articles of Association, and applicable laws and regulations.
3. Providing a supervisory report on duties carried out during the recently ended financial year to the GMS.
4. Holding a meeting of the Board of Commissioners at least once in a month.
5. Reviewing the Company's Long Term Work Plan, Annual Work Plan and Annual Budget (RKAT) prior to the discussion at the GMS.
6. Supervising the implementation of RKAT and submitting the assessment results and opinions to the GMS.

7. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan segera melaporkan kepada RUPS apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
8. Memantau efektivitas praktik GCG, manajemen risiko dan pengendalian internal serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan Perseroan.
9. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
10. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi.
11. Mengawasi dan memberi masukan terhadap sistem evaluasi kinerja dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi.
12. Menyiapkan Piagam Dewan Komisaris serta meninjau dan memperbarui piagam tersebut secara berkala.
13. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham yang dimilikinya dan atau keluarganya di perusahaan terbuka.
14. Memberikan persetujuan dan bantuan hukum kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, dan
15. Dewan Komisaris memastikan bahwa keputusan Direksi telah sejalan dengan sasaran strategis jangka panjang.

Tugas-tugas secara spesifik Dewan Komisaris tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris, yang terbagi dalam:

1. Tugas terkait Kebijakan Strategis Perseroan;
2. Tugas terkait Pengurusan Perseroan oleh Direksi;
3. Tugas terkait Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Tugas terkait Organ Dewan Komisaris; dan
5. Tugas Pemberian Nasihat.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tanggung jawab Dewan Komisaris KPEI telah ditetapkan dalam Piagam dan Anggaran Dasar Perusahaan, meliputi:

1. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, tanggung jawab serta mengutamakan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas keandalan informasi dalam laporan keuangan Perusahaan.
5. Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian/kepailitan Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

7. Following the development of the Company's activities and immediately reporting to the GMS if the Company shows significant signs of setbacks with suggestions regarding corrective steps that must be taken.
8. Monitoring the effectiveness of the implementation of GCG, risk management, internal control, and Corporate Social Responsibility (CSR) by the Company.
9. Proposing the appointment of a Public Accountant/ Public Accounting Firm based on the recommendation of the Audit Committee to conduct an audit of the Company's financial statements to obtain approval from the GMS.
10. Evaluating the Board of Directors' performances.
11. Supervising and providing input on the performance evaluation and remuneration system for the Board of Commissioners, Board of Directors and senior management after considering the results of the Remuneration Committee review.
12. Preparing the Board of Commissioners Charter, and reviewing and updating the Charter regularly.
13. Reporting to the Company regarding the shares ownership owned by them and or their families in a public company.
14. Providing approval and legal assistance to the Board of Directors in carrying out specific legal actions, and
15. The Board of Commissioners ensures that the decisions of the Board of Directors are in line with long-term strategic goals.

The specific duties of the Board of Commissioners are outlined in the Board of Commissioners Charter, which are categorized into:

1. Duties regarding the Company's Strategic Policy;
2. Duties regarding the Management of the Company by the Board of Directors;
3. Duties regarding the General Meeting of Shareholders;
4. Duties regarding the organs of the Board of Commissioners; and
5. Duties as Advisors.

Responsibilities of the Board of Commissioners

The responsibilities of the Board of Commissioners of IDCLEAR have been established in the Charter and Articles of Association of the Company, include:

1. In carrying out supervisory duties and providing advisory to the Board of Directors, each member of the Board of Commissioners is obliged to do so in good faith, prudence, responsibility and for the sake of the Company's interest in accordance with the aims and objectives of the Company.
2. Members of the Board of Commissioners provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities effectively.
3. Members of the Board of Commissioners shall improve their competence through education and training.
4. Members of the Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the reliability of the information in the Company's financial statements.
5. Members of the Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the loss/bankruptcy of the Company if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties.

6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian/kepailitan Perusahaan apabila dapat membuktikan;
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian/kepailitan;
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kerugian/kepailitan tersebut; dan
 - d. Kerugian/kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut:
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
 - b. Tanggung jawab pada huruf a. berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
 8. Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan dan Perusahaan melakukan perbuatan hukum yang tidak dalam rangka menyelesaikan semua urusan terkait likuidasi, anggota Dewan Komisaris, bersama-sama anggota Direksi dan Perusahaan, bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
 9. Anggota Dewan Komisaris wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perusahaan yang ditetapkan oleh keputusan ketua pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Anggota Dewan Komisaris mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
 11. Setiap anggota Dewan Komisaris memberitahukan kepada Direksi secara tertulis alamat surat menyurat dan perubahannya.
6. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for the loss/bankruptcy of the Company if they can prove;
 - a. Has carried out supervision in good faith and prudence for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company;
 - b. Does not have a personal interest, either directly or indirectly, in the actions of the management of the Board of Directors that result in loss/bankruptcy;
 - c. Has provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence of such loss/bankruptcy; and
 - d. Loss/bankruptcy is not due to fault or negligence.
 7. In the event of bankruptcy due to an error or negligence of the Board of Commissioners in supervising the management carried out by the Board of Directors and the Company's assets are not sufficient to pay all of the Company's obligations as a result of the bankruptcy:
 - a. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally responsible with members of the Board of Directors for outstanding obligations.
 - b. The responsibilities in point (a) also apply to members of the Board of Commissioners who have served as members of the Board of Commissioners for a period of five years prior to the declaration of bankruptcy.
 8. In the event of the dissolution of the Company and the Company taking legal actions that are not in the context of resolving all matters related to liquidation, the members of the Board of Commissioners, together with members of the Board of Directors and the Company are jointly and severally responsible for the legal action.
 9. Members of the Board of Commissioners are required to provide all necessary information for the conduct of the examination of the Company as determined by the decision of the chairman of the court in accordance with the prevailing laws and regulations.
 10. Members of the Board of Commissioners announce the cancellation of the appointment of other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in accordance with the prevailing laws and regulations through newspapers and notify the Minister to be recorded in the Company's registry.
 11. Each member of the Board of Commissioners shall notify the Board of Directors in writing of the correspondence address and changes thereto.

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

KPEI mempunyai kebijakan dan komitmen untuk mendukung pengembangan kompetensi dan pengetahuan Dewan Komisaris, serta memfasilitasi pelatihan maupun pendidikan yang dibutuhkan. Dewan Komisaris didorong untuk terus memperluas wawasan, pengetahuan dan keahlian terkait industri pasar modal, keuangan, bidang ekonomi secara umum, ataupun yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan, termasuk dengan topik berkelanjutan di tahun 2024, meliputi:

TRAININGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

IDClear has policies and commitments to support the development of competencies and knowledge of the Board of Commissioners, as well as to facilitate the training and education needed. The Board of Commissioners is encouraged to continually broaden their insights, knowledge, and expertise related to the capital market industry, finance, economics in general, or any areas pertinent to their roles and responsibilities.

The Board of Commissioners has participated in various training and development programs, including those focusing on sustainability topics in 2024. These programs encompassed:

No	Nama Name	Jabatan Position	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Lokasi & Tanggal Location & Date	Penyelenggara Organizer
1	Hoesen	Komisaris Utama President Commissioner	Sosialisasi Omnibus Level AK Omnibus Dissemination for CM Level	Sentul-Bogor & 19 Januari 2024 Sentul-Bogor & January 19, 2024	KPEI IDClear
			Indonesia Capital Market Executive (ICME)	Tokyo & 17 Mei 2024 Tokyo & May 17, 2024	SRO
			Global Annual General Meeting	Yunani & 27-31 Mei 2024 Greece & May 27-31, 2024	CCP Global
			CEO Networking	Jakarta & 26 November 2024 Jakarta & November 26, 2024	SRO
			Strategic Cyber Resilience in Indonesia's Capital Market	Bali & 12-15 Desember 2024 Bali & December 12-15, 2024	KSEI
2	Ronald Waas	Komisaris Commissioner	Sosialisasi Omnibus Level AK Omnibus Dissemination for CM Level	Sentul-Bogor & 19 Januari 2024 Sentul-Bogor & January 19, 2024	KPEI
			ASEAN Global Leadership Programme 2024 at LSE	London & 2-6 September 2024 London & September 2-6, 2024	AGLP
			CEO Networking	Jakarta & 26 November 2024 Jakarta & November 26, 2024	SRO
			Strategic Cyber Resilience in Indonesia's Capital Market	Bali & 12-15 Desember 2024 Bali & December 12-15, 2024	KSEI
3	Uriep Prasetyo	Budhi Komisaris Commissioner	Sosialisasi Omnibus Level AK Omnibus Dissemination for CM Level	Sentul-Bogor & 19 Januari 2024 Sentul-Bogor & January 19, 2024	KPEI
			BCA Capital Market Community Business Trip 2024	New Zealand & 25 Oktober-1 November 2024 New Zealand & October 25-November 1, 2024	BCA
			CEO Networking	Jakarta & 26 November 2024 Jakarta & November 26, 2024	SRO
			Strategic Cyber Resilience in Indonesia's Capital Market	Bali & 12-15 Desember 2024 Bali & December 12-15, 2024	KSEI

Program Pengenalan Dewan Komisaris Baru

Perusahaan mempunyai kebijakan Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas yang wajib diikuti oleh anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dan khususnya berasal dari eksternal. Program ini bertujuan memberikan informasi terkini tentang profil dan aktivitas bisnis Perusahaan, serta pengetahuan-pengetahuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pada tahun 2024, KPEI tidak menyelenggarakan program orientasi atau pengenalan Perusahaan karena tidak ada anggota Dewan Komisaris baru yang dilantik.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris sebanyak 14 (empat belas) kali;
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 16 (enam belas) kali;
3. Penerbitan 12 (sembilan) surat Persetujuan, 1 (satu) surat Tanggapan serta 1 (satu) surat Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi;
4. Penerbitan 1 (satu) surat hasil evaluasi pelaksanaan jasa audit eksternal tahun buku 2023;
5. Penerbitan 1 (satu) surat keputusan tentang usulan penunjukan kantor akuntan publik tahun buku 2024, dan
6. Penyampaian 4 (empat) surat kepada OJK tentang Laporan Keuangan Triwulanan.

New Board of Commissioners' Introduction Program

The Company has a policy of an Orientation and Capability Enhancement Program, which is mandatory for newly appointed members of the Board of Commissioners, especially those from external sources. This program aims to provide up-to-date information about the Company's profile and business activities, as well as other knowledge relevant to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

In 2024, IDCclear did not conduct any orientation or company introduction program, as there were no newly appointed members of the Board of Commissioners.

Implementation of the Board of Commissioners' Duties in 2024

In relation to the implementation of duties throughout 2024, the Board of Commissioners carried out the following activities:

1. Held 14 (fourteen) Board of Commissioners meetings;
2. Held 16 (sixteen) Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Issued 12 (twelve) Approval Letters, 1 (one) Response Letter, and 1 (one) Directive Letter from the Board of Commissioners to the Board of Directors;
4. Issued 1 (one) Evaluation Letter on the implementation of the external audit services for the 2023 financial year;
5. Issued 1 (one) Resolution Letter concerning the proposal for the appointment of a public accounting firm for the 2024 financial year; and
6. Submitted 4 (four) letters to OJK on the Quarterly Financial Reports.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris KPEI membentuk organ Dewan Komisaris. Saat ini organ Dewan Komisaris KPEI terdiri dari Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris. Hingga akhir tahun buku 2024, KPEI belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, karena fungsi Nominasi dan Remunerasi masih dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan mengikuti prosedur serta melakukan koordinasi dengan pemegang saham dan regulator.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Pelaksanaan Penilaian

1. Komite Audit melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menjelang setiap akhir tahun.
2. Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Komite Audit sekurang-kurangnya menjelang masa kerja Komite berakhir, baik secara kolektif maupun individu.
3. Hasil penilaian kinerja Komite Audit dapat menjadi salah satu dasar masukan dalam pemilihan anggota-anggota Komite Audit di periode berikutnya.

Kriteria Penilaian

Dewan Komisaris mengembangkan kriteria penilaian kinerja, baik secara kolektif maupun individual dengan merujuk pada tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang tercantum dalam Piagam Komite. Kriteria tersebut meliputi penyelesaian tugas yang diberikan, kemampuan memberikan dukungan yang efektif dan signifikan terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris, sikap independensi, serta kehadiran dan partisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja tahun buku 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris didasarkan pada beberapa aspek, antara lain penyelesaian tugas yang diberikan, kemampuan memberikan dukungan yang efektif dan signifikan terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris, sikap independensi, serta kehadiran dan partisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.

Tahun buku 2024, Dewan Komisaris menilai bahwa Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEES

In assisting in the implementation of its duties and responsibilities, the IDClear's Board of Commissioners has formed a Board of Commissioners organ. Currently, the IDClear's Board of Commissioners organ consists of the Audit Committee and the Secretary of the Board of Commissioners. Until the end of the 2024 financial year, IDClear does not have a Nomination and Remuneration Committee, because the Nomination and Remuneration function is still carried out by the Board of Commissioners by following procedures and coordinating with shareholders and regulators..

Performance Assessment of the Audit Committee

Assessment Implementation

1. The Audit Committee conducts a self-assessment of the implementation of its duties and responsibilities towards the end of each year.
2. The Board of Commissioners assesses the performance of the Audit Committee at least prior to the end of the Committee's term, both collectively and individually.
3. The results of the Audit Committee performance assessment can be one of the basis of input in the selection of Audit Committee members in the next period.

Assesment Criteria

The Board of Commissioners develops performance assessment criteria, both collectively and individually, with reference to the duties and responsibilities of the Audit Committee as set out in the Committee Charter, among other things, on the completion of assigned tasks, the ability to provide effective and significant support to the oversight functions of the Board of Commissioners, independence, as well as attendance and participation in Board of Commissioners meetings.

For the performance assessment of the financial year 2024, the Board of Commissioners evaluated that the Audit Committee has effectively fulfilled their duties and functions in line with the set targets.

Performance Assessment of the Secretary of the Board of Commissioners

The performance asessment of the Secretary to the Board of Commissioners is based on several aspects, including the completion of assigned tasks, the ability to provide effective and significant support to the supervisory function of the Board of Commissioners, independence, as well as attendance and participation in Board of Commissioners meetings.

For the 2024 financial year, the Board of Commissioners concluded that the Secretary to the Board of Commissioners had performed their duties and functions well and in accordance with the established targets.

Direksi

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha demi kepentingan, visi, misi, dan tujuan Perusahaan, serta bertugas mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan Anggaran Dasar.

Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait strategi dan inisiatif dalam aktivitas operasional sehari-hari, serta keputusan untuk kepentingan jangka panjang, asalkan tetap sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi juga berhak untuk menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan keahlian atau bidang masing-masing anggota, namun tanggung jawab atas hasil atau kinerja adalah tanggung jawab bersama secara kolektif.

Persyaratan untuk menjadi anggota Direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan diatur dalam Peraturan OJK No. 59/POJK.04/2016. Peraturan ini menetapkan bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan umum, kriteria independensi, dan persyaratan kompetensi, serta harus lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh otoritas yang berwenang. Ketentuan ini termuat dalam Piagam Direksi.

PIAGAM DIREKSI

Sejak tahun 2015, Direksi KPEI telah memiliki Piagam yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar. Guna memastikan kesesuaian dengan perkembangan usaha dan perubahan regulasi yang berlaku, Piagam Direksi ditinjau dan diperbarui secara berkala. Piagam Direksi yang berlaku saat ini merupakan hasil pembaruan yang dilakukan pada tahun 2025.

SUSUNAN DIREKSI

Susunan Direksi KPEI terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kliring dan Penjaminan, dan Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis yang masing-masing memiliki tanggung jawab baik secara individu maupun kolektif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hingga akhir tahun buku 2024, tidak terdapat perubahan pada struktur atau susunan Direksi KPEI. Oleh karena itu, formasi Direksi KPEI masih seperti sebelumnya, yaitu:

The Board of Directors is a corporate organ fully responsible for managing the Company's business in the interest of its vision, mission, and objectives, and is tasked with representing the Company both in and out of court in accordance with legal provisions and the Articles of Association.

The Board of Directors holds the authority to make decisions related to strategies and initiatives in day-to-day operations, as well as decisions for long-term interests, provided they remain in accordance with the Company's Articles of Association. The Board of Directors is also entitled to determine the division of duties and responsibilities based on each member's expertise or area of focus; however, accountability for outcomes or performance remains a collective responsibility.

The requirements to become a member of the Board of Directors of a Clearing and Guarantee Institution are regulated under OJK Regulation No. 59/POJK.04/2016. This regulation stipulates that members of the Board of Directors must meet general requirements, independence criteria, and competency requirements, and must pass the fit and proper test conducted by the relevant authority. These provisions are outlined in the Board of Directors Charter.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

Since 2015, IDCclear's Board of Directors has maintained a Charter that serves as a guideline for carrying out its duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association. To ensure alignment with business developments and applicable regulatory changes, the Board of Directors Charter is reviewed and updated periodically. The current version of the Charter is the result of the latest update made in 2025.

STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition of IDCclear's Board of Directors consists of the President Director, Director of Clearing and Guarantee, and Director of Information Technology and Business Support, each of whom has individual and collective responsibilities, as explained previously. Until the end of the 2024 financial year, there will be no changes to the structure or composition of IDCclear's Board of Directors. Therefore, the composition of IDCclear's Board of Directors remains as before, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Hukum PengangkatanX Legal Basis of Appointment
Iding Pardi	Direktur Utama President Director	2022-2026	Akta Pernyataan Keputusan RUPST No. 39 tanggal 22 Juni 2022 Deed of AGMS Resolution No. 39 dated June 22, 2022
Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	2022-2026	Akta Pernyataan Keputusan RUPST No. 39 tanggal 22 Juni 2022 Deed of AGMS Resolution No. 39 dated June 22, 2022
Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	2022-2026	Akta Pernyataan Keputusan RUPST No. 39 tanggal 22 Juni 2022 Deed of AGMS Resolution No. 39 dated June 22, 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi KPEI memiliki tugas kolektif maupun individual yang diberikan berdasarkan keahlian atau bidang masing-masing anggota dengan tanggung jawab bersama atas pencapaian hasil kinerja. Pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPST No. 39 tanggal 22 Juni 2022.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

KPEI menetapkan pembagian ruang lingkup tugas dan tanggung jawab untuk setiap anggota Direksi. Berikut adalah pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi untuk tahun buku 2024, yaitu:

No	Lingkup dan Area Tanggung Jawab Scope and Area of Responsibilities	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
1	Direktur Utama President Director	
	Koordinasi Lembaga Kliring dan Penjaminan, Hubungan Masyarakat, Pemeriksaan Internal, Hukum serta Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Korporasi. Selain itu Direktur Utama juga bertanggung jawab atas mekanisme dan operasional Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Coordination over Clearing and Guarantee Institution, Public Relations, Internal Control, Legal, as well as Strategic Plan and Enterprise Risk Management. In addition, the President Director is responsible for the mechanisms and operations of the Money Market and Foreign Exchange Market.	- Direktur Utama memiliki tugas utama antara lain mengambil keputusan yang bersifat final jika rapat Direksi tidak dapat mengambil keputusan, melakukan koordinasi kegiatan Perusahaan, kegiatan hubungan masyarakat, dan kegiatan pemeriksaan internal; The President Director has primary duties that include making final decisions when the Board of Directors meeting is unable to do so, conducting coordination of the Company's activities, conducting public relations activity, as well as internal control activity; - Direktur Utama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perusahaan; The President Director is entitled and authorized to represent and act for and on behalf of the Board of Directors and the Company; - Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga sebagaimana dimaksud pada <i>point</i> Nomor 2, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, dan perusahaan hanya memiliki seorang Direktur, maka Direktur yang bersangkutan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan; If the President Director is absent or unavailable for any reason as mentioned in point Number 2, which does not need to be proven to other parties, and the Company only has one Director, then the Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors, as well as representing the Company; - Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga sebagaimana dimaksud pada <i>point</i> Nomor 2, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain dan perusahaan memiliki dua orang Direktur atau lebih, maka dua orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan; If the President Director is absent or unavailable for any reason as mentioned in point Number 2, which does not need to be proven to other parties, and the Company has two or more Directors, these said Directors are collectively entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors, as well as representing the Company; - Direktur Utama berwenang untuk memimpin RUPS terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Jika Direktur utama berhalangan hadir dapat digantikan oleh salah satu anggota Direksi yang lain; dan The President Director is authorized to lead the GMS related to the appointment of members of the Board of Commissioners. If the President Director is unavailable, the duty can be carried out by another member of the Board of Directors; and - Direktur Utama menandatangani Daftar Pemegang Saham, Catatan dalam Daftar Pemegang Saham, Surat Saham dan Surat Kolektif. The President Director signs the Shareholder List, Notes in Shareholder List, Shares, and Collective Papers.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of IDClear carries out both collective and individual duties assigned based on each member's expertise or area of responsibility, while sharing joint accountability for performance outcomes. The division of duties and responsibilities among the Board of Directors was established under the AGMS Resolution No. 39 dated June 22, 2022.

Distribution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

IDCclear sets out the scope of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors. The following are the respective duties and responsibilities of the members of the Board of Directors for the 2024 financial year:

No	Lingkup dan Area Tanggung Jawab Scope and Area of Responsibilities	Tugas dan Wewenang Duties and Authorities
2	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	Direktur Kliring dan Penjaminan bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perusahaan. Director of Clearing and Guarantee is responsible for the operational activities of the Company.
3	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perusahaan. Director of Information Technology and Business Support is responsible for the operational activities of the Company.

Tugas Direksi Secara Kolektif

Tugas Direksi secara kolektif dengan pertanggungjawaban bersama terdiri dari:

1. Tugas terkait Kepengurusan;
2. Tugas terkait Manajemen Risiko;
3. Tugas terkait Pengendalian Internal;
4. Tugas terkait Komunikasi; dan
5. Tugas terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tugas Terkait Kepengurusan

1. Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Direksi menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Direksi menyusun dan menyampaikan RKAT yang berlandaskan pada visi, misi, dan nilai-nilai yang telah ditentukan pada nomor 2 dan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat tanggal 5 November.
4. Direksi menjalankan kepengurusan Perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang telah ditentukan pada nomor 2.
5. Direksi melakukan pengelolaan Perusahaan dengan memegang prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
6. Direksi harus dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan secara efektif dan efisien untuk dapat mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
7. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
8. Direksi harus mematuhi tata tertib dan piagam agar pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
9. Direksi harus menjaga keharmonisan suasana kerja di Perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar karyawan dapat bekerja dengan baik bagi tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.

Collective Duties of the Board of Directors

The collective duties of the Board of Directors with joint responsibility consist of:

1. Duties related to Management;
2. Duties related to Risk Management;
3. Duties related to Internal Control;
4. Duties related to Communication; and
5. Duties related to Social and Environmental Responsibility

Duties related to Management

1. The Board of Directors carries out management for the benefit of the Company in accordance with policies deemed appropriate, within the limits specified in the legislation and/or Articles of Association, and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. The Board of Directors prepares the vision, mission, and values as well as the draft of the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Annual Work Plan and Budget (RKAT) to be approved by the Board of Commissioners and the GMS.
3. The Board of Directors prepares and submits the RKAT based on the vision, mission, and values specified in number 2 and submitted to OJK no later than November 5 of the financial year.
4. The Board of Directors carries out the management of the Company in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit of the Company in accordance with the vision, mission, and values specified in number 2.
5. The Board of Directors manages the Company by adhering to the principles of Good Corporate Governance.
6. The Board of Directors must be able to control the resources owned by the Company effectively and efficiently to achieve the purposes and objectives of the Company.
7. The Board of Directors must take into account the reasonable interests of stakeholders.
8. The Board of Directors must comply with the rules and charters so that the implementation of their duties can be directed and effective and can be used as a performance appraisal tool.
9. The Board of Directors must maintain a harmonious working atmosphere in the Company by creating a conducive work environment so that employees can work well for the achievement of the Company's goals and objectives.

10. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal mengenai Perusahaan yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 11. Direksi menyelenggarakan RUPS jika diperlukan.
 12. Direksi melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 13. Direksi menyerahkan laporan keuangan Perusahaan kepada akuntan publik untuk diaudit dan menyerahkan laporan hasil audit akuntan publik secara tertulis kepada RUPS untuk disahkan.
 14. Direksi membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
 15. Membuat laporan Direksi sebagai salah satu bagian dari laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kinerja perusahaan yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan dan kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan;
 - b. Gambaran tentang prospek usaha;
 - c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan
 - d. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).
 16. Direksi melaksanakan keputusan yang diambil RUPS selama tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Direksi melakukan diskusi dengan akuntan publik terkait pelaksanaan audit laporan keuangan dan memastikan penyelesaian tindak lanjut atas hasil audit.
 18. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan prosedur operasional baku untuk proses bisnis inti (*core business*) Perusahaan.
 19. Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAT dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub-unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.
 20. Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.
 21. Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi
 22. Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra.
 23. Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara objektif dan transparan.
10. The Board of Directors is obliged to provide an explanation of matters regarding the Company that are asked by the Board of Commissioners.
 11. The Board of Directors holds a GMS if necessary.
 12. The Board of Directors shall convene the GMS within a period of no later than 14 (fourteen) days prior to the date the GMS is held without taking into account the date of the invitation and the date of the GMS.
 13. The Board of Directors submits the Company's financial statements to a public accountant for audit and submits a written public accountant audit report to the GMS for approval.
 14. The Board of Directors prepares and submits an annual report to the GMS after being reviewed by the Board of Commissioners, within a period of no later than 6 (six) months after the end of the Company's financial year.
 15. Preparing the Directors' Report as part of the annual report, which at minimum includes:
 - a. Company performance covering strategic policies, a comparison between the achieved results and the targets set, and the challenges faced by the Company;
 - b. An overview of business prospects;
 - c. Implementation of Good Corporate Governance; and
 - d. Changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for such changes (if any).
 16. The Board of Directors conducts discussions with public accountants regarding the implementation of financial statement audits and ensures the completion of followup actions on the audit results.
 17. The Board of Directors conducts discussions with public accountants regarding the implementation of financial statement audits and ensures the completion of followup actions on the audit results.
 18. The Board of Directors establishes operational policies and standard operating procedures for the Company's core business processes.
 19. The Board of Directors sets performance targets based on the RKAT, which are cascaded down through the unit, sub-unit, and position levels within the organization (structural).
 20. The Board of Directors responds to proposed business opportunities that have the potential to increase company revenue, achieve cost savings/efficiency, optimize asset utilization, and provide other benefits.
 21. The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that fosters innovation and incorporates it into the corporate strategy, operational development planning, and operational oversight.
 22. The Board of Directors promotes innovation that enhances long-term value creation for the business in a changing environment. Such innovation may include designing innovative business models, products, and services; promoting research; improving production and operational processes; and collaborating with partners.
 23. The Board of Directors maintains a performance measurement and evaluation system/guideline for organizational units and positions (structural), implemented objectively and transparently.

24. Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan.
25. Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
26. Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.
27. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
28. Direksi memiliki prosedur tertulis untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan pemangku kepentingan dan menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di Perusahaan.
29. Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang efektif.
30. Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data.

Tugas Terkait Manajemen Risiko

1. Direksi menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko Perusahaan terpadu yang mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan.
2. Direksi mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan.
3. Direksi mengungkapkan;
 - a. Risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan
 - b. Apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut.
4. Direksi dibantu oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengelolaan Risiko dan Komite Haircut dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan risiko.
5. Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan cyber, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris
6. Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI

Tugas Terkait Pengendalian Internal

1. Direksi menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang andal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja Perusahaan untuk memberikan jasa kliring dan penjaminan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
2. Direksi dibantu oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI) dalam menjalankan tugas terkait pengendalian internal.
3. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, SPI, auditor eksternal, OJK, dan/atau pengawas otoritas lain.
4. Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.

24. The Board of Directors conducts analysis and evaluation of performance achievements for positions/units under the Board of Directors and at the company level.
25. The Board of Directors implements information technology systems in accordance with established policies.
26. The Board of Directors implements a system for improving product and service quality.
27. The Board of Directors carries out procurement of goods and services that are beneficial to the company, both in terms of price and quality of the goods and services.
28. The Board of Directors has written procedures to accommodate and follow up on stakeholder complaints and has established provisions that regulate the reporting mechanism for alleged violations within the Company.
29. The Board of Directors develops effective governance, risk management, and internal control systems.
30. The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures in place, including the protection of data security and confidentiality.

Duties related to Risk Management

1. The Board of Directors prepares and implements an integrated Company risk management system covering all aspects of the Company's activities.
2. The Board of Directors considers business risk in every decision making.
3. The Board of Directors discloses:
 - a. The key risks faced by the corporation and their management; and
 - b. Whether there is any material exposure to environmental or social risks and, if so, how these risks are managed or the intention to manage them.
4. The Board of Directors is assisted by the Credit Policy and Risk Management Committee and the Haircut Committee in carrying out duties related to risk management.
5. The Board of Directors ensures that the risk governance process in Information Technology, including disruptions, cybersecurity, and disaster recovery, is in place to ensure that all key risks are identified, managed, and reported to the Board of Commissioners.
6. The Board of Directors ensures that the corporation's risk management includes IT risk management.

Duties related to Internal Control

1. The Board of Directors develops and implements a reliable internal control system to maintain the Company's assets and performance to provide clearing and guarantee services as well as comply with laws and regulations.
2. The Board of Directors is assisted by the Internal Audit (SPI) in carrying out duties related to internal control.
3. The Board of Directors follows up on audit findings and recommendations from the Board of Commissioners, external auditor, OJK, and/or other supervisory authorities.
4. The Board of Directors conducts periodic reviews of the adequacy of the design and the operational effectiveness of the Company's governance system, risk management, internal control, and compliance, and reports the implementation and results of the review to the shareholders through the Company's annual report.

Tugas Terkait Komunikasi

1. Direksi memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan.
2. Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham secara teratur, komprehensif, relevan, akurat dan tepat waktu.
3. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai atas kebijakan Perusahaan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
4. Direksi memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan melalui penerbitan laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan termasuk laporan keuangan Dana Jaminan.
5. Direksi memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai laporan tahunan serta keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
6. Direksi membuat dan menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan kepada OJK:
 - a. Laporan harian mengenai kegiatan kliring dan penjaminan;
 - b. Laporan bulanan yang memuat:
 - Rekapitulasi kegiatan selama periode tersebut dilengkapi dengan statistik perkembangan volume kliring dan penjaminan;
 - Laporan mengenai Anggota Bursa Efek yang menjadi Anggota Kliring; dan
 - Kegiatan pemakai jasa Perusahaan.
 - c. Laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disertai pendapat dari akuntan publik tersebut;
 - d. Laporan realisasi anggaran dan penggunaan laba;
 - e. Laporan triwulanan realisasi rencana kerja dan anggaran rencana kerja, serta pencapaian indikator kinerja utama (KPI) Perusahaan;
 - f. Laporan penyelenggaraan RUPS;
 - g. Laporan mengenai perubahan status pemakai jasa Perusahaan;
 - h. Laporan mengenai pengenaan sanksi oleh Perusahaan terhadap pemakai jasa; dan
 - i. Laporan mengenai peristiwa khusus seperti kesulitan keuangan pemakai jasa Perusahaan.

Tugas Terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi.

1. Direksi memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Duties related to Communication

1. The Board of Directors ensures efficient communication between the Company and stakeholders.
2. The Board of Directors ensures that the Company carries out information and communication disclosure in accordance with the applicable laws and regulations and the delivery of information to the Board of Commissioners and shareholders in a timely manner.
3. The Board of Directors is obligated to disclose to employees any strategic Company policies in the area of employment.
4. The Board of Directors provides accountability to stakeholders through the issuance of an Annual Report which encompasses Financial Statement including the Guarantee Fund Financial Statement.
5. The Board of Directors provides an explanation to the GMS regarding the Annual Report and information related to the Company as long as it is related to the meeting agenda and does not conflict with the interests of the Company.
6. The Board of Directors prepares and submits reports related to the Company's operational activities to the OJK, including:
 - a. Daily reports on clearing and guarantee activities;
 - b. Monthly reports containing:
 - A summary of activities during the period, including statistics on the development of clearing and guarantee volumes;
 - A report on Exchange Members who are also Clearing Members; and
 - Activities of the Company's service users;
 - c. Semi-annual financial statements and audited annual financial statements by a public accountant registered with the OJK, accompanied by the accountant's opinion;
 - d. Reports on budget realization and profit utilization;
 - e. Quarterly reports on the realization of the work plan and budget, and the achievement of the Company's Key Performance Indicators (KPIs);
 - f. Reports on the organization of the GMS;
 - g. Reports on changes in the status of the Company's service users;
 - h. Reports on sanctions imposed by the Company on service users; and
 - i. Reports on special events such as financial difficulties experienced by the Company's service users.

Duties related to Social and Environmental Responsibility

The Board of Directors ensures the fulfillment of the Company's social and environmental responsibilities. The Board of Directors has a clear strategic plan for implementing the Company's social and environmental responsibilities.

1. The Board of Directors ensures that the assets and business locations as well as other Company facilities comply with the laws and regulations regarding occupational health and safety as well as environmental conservation.

2. Direksi mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Direksi menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.
4. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Perusahaan, Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
5. Direksi mempunyai perencanaan tertulis dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.
6. Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.

Tanggung Jawab Direksi Secara Kolektif

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha, Direksi juga mempunyai tanggung jawab bersifat kolektif yang terdiri dari:

1. Tanggung Jawab Umum;
2. Tanggung Jawab terkait Kerugian/Kepailitan;
3. Tanggung Jawab terkait Daftar Pemegang Saham;
4. Tanggung Jawab terkait Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Tanggung Jawab terkait Penggabungan/Peleburan/ Pengambilalihan/Pemisahan/Pembubaran;
6. Tanggung Jawab terkait Pengurangan Modal;
7. Tanggung Jawab terkait Pemindahan Hak atas Saham; dan
8. Tanggung Jawab terkait Penggantian Surat Saham.

Tanggung Jawab Umum

Tanggung jawab umum Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi menandatangani laporan tahunan sesuai dengan tahun buku ketika anggota Direksi tersebut menjabat. Anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilampirkan dalam laporan tahunan atau dianggap menyetujui isi laporan tahunan.
2. Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keandalan informasi dalam laporan keuangan Perusahaan.
3. Direksi menyusun dan menyimpan risalah RUPS.
4. Direksi memastikan ketaatan pelaksanaan ketentuan peraturan mengenai pemakai jasa.
5. Anggota Direksi memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perusahaan yang ditetapkan oleh keputusan Ketua Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. The Board of Directors employs, determines the amount of salary, provides training, sets career paths, and determines other work requirements, without regard to ethnic background, religion, gender, age, a person's disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.
3. The Board of Directors provides a work environment that is free from all forms of pressure (harassment) that may arise as a result of differences in one's character, personal circumstances, and cultural background.
4. To maintain the sustainability of the Company's business, the Board of Directors ensures that the Company's social and environmental responsibilities are fulfilled.
5. The Board of Directors has a written plan in implementing the Company's social and environmental responsibilities.
6. The Board of Directors ensures that the sustainability report has been properly prepared.

Collective Responsibilities of the Board of Directors

In overseeing the management of the business, the Board of Directors also carries collective responsibilities, which include:

1. General Liabilities;
2. Responsibilities related to loss/bankruptcy;
3. Responsibilities related to the Register of Shareholders;
4. Responsibilities related to members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Responsibilities related to Merger/ Consolidation/ Acquisition/ Separation/ Dissolution;
6. Responsibilities related to Capital Reduction;
7. Responsibilities related to Transfer of Share Rights; and
8. Responsibilities related to the Replacement of Share Certificates.

General Responsibilities

The general responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. All members of the Board of Directors sign the annual report in accordance with the financial year when the member of the Board of Directors serves. Members of the Board of Directors who do not sign the annual report shall state the reasons in writing in a separate letter attached to the annual report or are deemed to have approved the contents of the annual report.
2. Members of the Board of Directors are jointly and severally responsible for the reliability of the information in the Company's Financial Statements.
3. The Board of Directors prepares and keeps the minutes of the GMS.
4. The Board of Directors ensures compliance with the implementation of regulatory provisions regarding service users.
5. Members of the Board of Directors provide all necessary information for the execution of inspections of the Company as mandated by the decision of the Head of the Court in accordance with the prevailing laws and regulations.

6. Anggota Direksi memberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis alamat surat-menyurat dan perubahannya.
7. Direksi menyiapkan Piagam Direksi serta meninjau dan memperbarui piagam tersebut secara berkala. Selain itu, Direksi juga memiliki tanggung jawab terkait kerugian/kepaillitan, daftar pemegang saham, keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi, penggabungan/peleburan/pengambilalihan/pemisahan/pembubaran, pengurangan modal, serta pemindahan hak atas saham, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Terkait Kerugian/Kepailitan

1. Anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian/kepaillitan Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham yang batal karena hukum, sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Terkait Daftar Pemegang Saham

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh (jika ada).
3. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2 dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perusahaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Tanggung Jawab Terkait Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Anggota Direksi mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perusahaan.
2. Direksi melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diketahui oleh Direksi, dalam hal terdapat jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lowong.

6. Members of the Board of Directors notify the Company in writing of the mailing address and changes thereto.
7. The Board of Directors prepares the Board of Directors Charter and reviews and updates the charter periodically. In addition, the Board of Directors also has responsibilities related to losses/bankruptcy, shareholder lists, membership of the Board of Commissioners and Board of Directors, mergers/consolidations/takeovers/separations/dissolutions, capital reductions, and transfers of share rights, in accordance with applicable laws and regulations.

Responsibilities related to Loss/Bankruptcy

1. Members of the Board of Directors are jointly and severally responsible for the loss/bankruptcy of the Company if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties in accordance with the applicable laws and regulations.
2. Members of the Board of Directors are jointly and severally responsible for the losses suffered by shareholders who have good intentions, which arise as a result of the repurchase of shares which is canceled by law, as referred to in accordance with the applicable laws and regulations.

Responsibilities related to the Register of Shareholders

1. The Board of Directors organizes and maintains a Register of Shareholders in accordance with the prevailing laws and regulations.
2. In addition to the Register of Shareholders as referred to in number 1, the Board of Directors shall organize and maintain a Special Register which contains information regarding the shares of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their families in the Company and/or in other companies and the date the shares were acquired (if any).
3. The Board of Directors records the transfer of rights to shares, the date and day of the transfer of rights in the Register of Shareholders or Special Register as referred to in number 1 and 2 and notifies the change in the composition of shareholders to the Minister to be recorded in the Company register, no later than 30 (thirty) days from the date of recording the transfer of rights.

Responsibilities regarding the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors announce the cancellation of the appointment of other members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations through newspapers and notify the Minister to be recorded in the Company register.
2. The Board of Directors reports to the OJK no later than 5 (five) working days from the date it is known by the Board of Directors, in the event that there are positions of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who are vacant.

Tanggung Jawab Terkait Penggabungan/Peleburan/ Pengambilalihan/Pemisahan/Pembubaran

1. Direksi menyusun rancangan penggabungan dalam hal Perusahaan akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan. Ketentuan ini berlaku juga bagi Perusahaan yang akan meleburkan diri. Rancangan penggabungan/ peleburan memuat sekurang-kurangnya informasi yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perusahaan, maka perbuatan hukum pengambilalihan yang dilakukan oleh Direksi harus berdasarkan pada keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.
3. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi perusahaan yang akan diambil alih. Direksi perusahaan yang akan diambil alih dan perusahaan yang akan mengambil alih, dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya informasi yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut juga memberitahukan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan di kantor perusahaan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
5. Direksi Perusahaan yang menerima penggabungan atau Direksi Perusahaan hasil peleburan mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan. Ketentuan ini berlaku juga terhadap Direksi dari Perusahaan yang sahamnya diambil alih.
6. Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan, dan Perusahaan melakukan perbuatan hukum yang tidak dalam rangka menyelesaikan semua urusan terkait likuidasi, anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Tanggung Jawab Terkait Pengurangan Modal

Direksi bertanggung jawab untuk memberitahukan keputusan mengenai pengurangan modal Perusahaan kepada semua kreditur dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Responsibilities related to Merger/Consolidation/ Takeover/Separation/Dissolution

1. The Board of Directors prepares a merger plan in the event that the Company intends to merge and accept the merger. This provision also applies to companies that will be consolidating themselves. The merger/consolidation plan contains at least the required information in accordance with the applicable laws and regulations.
2. In the event that the takeover is carried out by a legal entity in the form of a company, the legal action of the takeover carried out by the Board of Directors must be based on the decision of the GMS that meets the quorum of attendance and the provisions regarding the requirements for the decision-making of the GMS.
3. In the event that the takeover is carried out through the Board of Directors, the party who intends to take over conveys his intention to carry out the takeover to the Board of Directors of the Company to be taken over. The Board of Directors of the Company that will be taken over and the Company that will take over, with the approval of their respective Board of Commissioners, prepare a takeover plan that contains at least the required information in accordance with the applicable laws and regulations.
4. The Board of Directors of the Company that will carry out the merger, consolidation, acquisition, or separation, announces the draft summary in at least one newspaper and announces in writing to the employees of the Company that will carry out the merger, consolidation, acquisition, or separation within a period of no later than 30 days prior to the summons for the GMS. The announcement also informs that interested parties may obtain a plan for a merger, consolidation, acquisition, or separation at the company office as of the announcement date until the date the GMS is held.
5. The Board of Directors of the company that accepts the merger or the Board of Directors of the company resulting from the consolidation announce the results of the merger or consolidation in one or more newspapers within a period of no later than 30 days from the effective date of the merger or consolidation. This provision also applies to the Board of Directors of the Company whose shares were taken over.
6. In the event of the dissolution of the Company, and the Company taking legal actions that are not in the context of resolving all matters related to liquidation, the members of the Board of Directors are jointly and severally responsible for the legal action.

Responsibilities related to Capital Reduction

The Board of Directors notifies the decision regarding the reduction of the Company's capital to all creditors by announcing it in 1 (one) or more newspapers within a period of no later than 7 (seven) days from the date of the GMS resolution.

Tanggung Jawab Terkait Pemindahan Hak atas Saham

Jika Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya permintaan untuk melakukan pencatatan oleh Direksi, Direksi bertanggung jawab mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Tanggung Jawab Terkait Penggantian Surat Saham

Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang segera diumumkan oleh Direksi dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia; satu diantaranya harus surat kabar harian yang terbit/beredar di tempat kedudukan Perusahaan dan yang lain yang berperedaran nasional.

PELATIHAN DIREKSI

KPEI berkomitmen untuk mendorong dan mendukung pengembangan kompetensi Direksi melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Inisiatif ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keahlian Direksi, sekaligus memberikan informasi terkini terkait bisnis utama Perusahaan yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.

Selama tahun buku 2024, Direksi KPEI telah mengikuti program pengembangan sebagai berikut:

Responsibilities of the Board of Directors regarding the Transfer of Rights to Shares

If the Board of Directors refuses to register the transfer of rights to shares, then within 30 (thirty) days after the date of receipt of the request for registration by the Board of Directors, the Board of Directors will send a notification of refusal to the party who will transfer the rights.

Responsibilities of the Board of Directors regarding Replacement of Share Certificates

Announcement and issuance of replacement for lost share certificates shall be announced immediately by the Board of Directors with advertisements in at least 2 (two) Indonesian daily newspapers; one of which must be a daily newspaper which is published/circulated at the domicile of the Company and others that have national circulation.

TRAININGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

IDCclear is committed to promoting and supporting the competency development of its Board of Directors through various training and educational programs. This initiative aims to broaden the Board of Directors' perspectives and enhance their expertise, while also providing up-to-date information on the Company's core business, ultimately contributing to improved performance in achieving the Company's objectives.

During the 2024 financial year, the Board of Directors of IDCclear participated in the following development programs:

No	Nama Name	Jabatan Position	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Lokasi & Tanggal Location & Date	Penyelenggara Organizer
1	Iding Pardi	Direktur Utama President Director	Kick Off KPI dan Rencana Kerja Tahun 2024 (Team Building & Sharing Session)	Astro Highland Ciater, Bandung, 16 Januari 2024	KPEI
			Kick-Off of KPI and Work Plan for 2024 (Team Building & Sharing Session)	Bandung, January 16, 2024	
			[Undangan] IDX Corporate Sharing Session - Cultivating Hope and Optimism for 2024	Online, 30 Januari 2024	BEI
			[Invitation] IDX Corporate Sharing Session - Cultivating Hope and Optimism for 2024	Online, January 30, 2024	
			The AFSF & ISTF Joint Workshop 2024 KSEI	Hilton Bali Resort, 20-24 Februari 2024 Hilton Bali Resort, February 20- 24, 2024	KSEI
			Sharing Session PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) Bersama Japan Securities Finance Co. Ltd (JSF) dengan Tema "Repo Transaction in JSF"	Ruang Rapat Utama, 27 Februari 2025 Main Meeting Room, February 27, 2024	BEI
			Sharing Session of PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) with Japan Securities Finance Co., Ltd. (JSF) with the theme "Repo Transaction in JSF"		
			Sharing Session Mental Health Awareness Bersama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia	Online, 14 Maret 2024	KPEI
			Sharing Session Mental Health Awareness with the Indonesian Association of Clinical Psychologists	Online, March 14, 2024	
			IDX Sharing Session Product Knowledge Series - Intraday Short Selling & Liquidity Provider for Stocks	Online, 20 Maret 2024	BEI
			IDX Sharing Session Mastering IDX Statistics: Essential Information	Online, 22 Maret 2024	BEI
				Online, March 22, 2024	

No	Nama Name	Jabatan Position	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Lokasi & Tanggal Location & Date	Penyelenggara Organizer
			OJKI <i>Sharing Session Idea Talks Volume 5 - Tantangan Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga</i> [OJKI Sharing Session] Idea Talks Volume 5 – Challenges of the Capital Market and Sharia Finance in the Context of Social Dynamics and Interest Rates	Online, 26 Maret 2024 Online, March 26, 2024	OJK Institute
			<i>Sharing Session</i> bersama Ibu Enny Hartati Sampurno – Direktur Customer Operation PT Unilever Sharing Session with Ms. Enny Hartati Sampurno – Director of Customer Operation, PT Unilever	Ruang Seminar BEI, 28 Maret 2024 Seminar Room of IDX, March 28, 2024	KPEI
			Kunjungan ke Nasdaq New York dalam rangka <i>Ceremony dan Signing Design Study</i> Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan (PSPP) Visit to Nasdaq New York – in the context of the Ceremony and Signing of the Design Study for the Trading and Surveillance System Modernization (PSPP)	New York, 21-28 April 2024 New York, April 21-28, 2024	BEI
			<i>Leaders Talk</i> KPEI 2024 bersama Bapak Muhammad Wahid Sutopo – Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia IDClear's Leaders Talk 2024 with Mr. Muhammad Wahid Sutopo – President Director of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Ritz Carlton, 30 April 2024 Ritz Carlton, April 30, 2024	KPEI
			<i>Indonesia Capital Market Executives' 2024</i>	Tokyo, Jepang, 14-19 Mei 2024 Tokyo, Japan, May 14-19, 2024	BEI
			Undangan <i>Sharing Session Sharing Session Operational Excellence (CCP)</i> Invitation to Sharing Session Operational Excellence Sharing Session (CCP)	Online, 31 Mei 2024 Online, May 31, 2024	KPEI
			IDX <i>Sharing Session ESG Risk Rating Webinar</i> IDX Sharing Session ESG Risk Rating Webinar	Online, 12 Juni 2024 Online, June 12, 2024	BEI
			<i>Team Building</i> KPEI 2024 IDClear's Team Building 2024	Bandung, 5-7 Juli 2024 Bandung, July 5-7, 2024	KPEI
			Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2024 2024 Integrated Capital Market Education and Dissemination Program	Makassar, 8-10 Agustus 2024 Makassar, August 8-10, 2024	OJK
			Webinar " <i>How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing</i> "	Online, 5 September 2024 Online, September 5, 2024	OJK Institute
			Kongres ISEI XXII & Seminar Nasional 2024 22nd ISEI Congress & 2024 National Seminar	Aston Solo, 18-21 September 2024 Aston Solo, September 18-21, 2024	ISEI
			<i>Market Update</i> Q4 Tahun 2024 Bersama Infovesta Q4 2024 Market Update with Infovesta	Online, 21 Oktober 2024 Online, October 21, 2024	KPEI
			<i>Capacity Building</i> Anak Perusahaan SRO 2024 2024 Capacity Building for SRO Subsidiaries	Cirebon, 4-6 Oktober 2024 Cirebon, October 4-6, 2024	BEI
			<i>The 10th Indonesian Finance Association International Conference</i>	Main Hall BEI, 9 Oktober 2024 IDX Main Hall, October 9, 2024	BEI
			Webinar "Carbon Trading and Its Effect on Indonesia's Economy"	Online, 17 Oktober 2024 Online, October 17, 2024	OJK Institute
			Undangan Simposium OECD/INFE-OJK Invitation OECD/INFE-OJK Symposium	Westin Nusa Dua, 7-9 November 2024 Westin Nusa Dua, November 7-9, 2024	OJK
			<i>Capacity Building</i> Anggota Kliring dan Partisipan KPEI 2024 2024 Capacity Building for IDCLEAR Clearing Members and Participants	Palembang, 15-17 November 2024 Palembang, November 15-17, 2024	KPEI
			CEO Networking 2024	Raffles Jakarta, 26 November 2024 Raffles Jakarta, November 26, 2024	BEI

No	Nama Name	Jabatan Position	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Lokasi & Tanggal Location & Date	Penyelenggara Organizer
2	Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	Seminar Pemangku Kepentingan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2024 2024 Stakeholder Seminar of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Bali, 12-14 Desember 2024 Bali, December 12-14, 2024	KSEI
			2024 CCP Global CIDS Meeting	Singapore, 2-6 Desember 2024 Singapore, December 2-6, 2024	CCP Global
			KSEI Stakeholders' Seminar 2024	Sofitel Bali, 12-15 Desember 2024 Sofitel Bali, December 12-15, 2024	KSEI
			Undangan BI: Dialog Tokoh Spiritual [Invitation] Bank Indonesia: Spiritual Leadership Dialogue	BI, 20 Desember 2024 BI, December 20, 2024	BI
			Kick Off KPI dan Rencana Kerja Tahun 2024 (Team Building & Sharing Session) Kick-Off of KPI and Work Plan for 2024 (Team Building & Sharing Session)	Astro Highland Ciater Bandung, 14-16 Januari 2024 Astro Highland Ciater Bandung, January 14-16, 2024	KPEI
			Undangan IDX Corporate Sharing Session - Cultivating Hope and Optimism for 2024 Invitation IDX Corporate Sharing Session - Cultivating Hope and Optimism for 2024	Online, 30 Januari 2024 Online, January 30, 2024	BEI
			Bond Market Update Q1 Tahun 2024 Bersama PHEI Bond Market Update Q1 2024 with PHEI	Online, 23 Februari 2024 Online, February 23, 2024	KPEI
			Sharing Session Mental Health Awareness Bersama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Sharing Session - Mental Health Awareness with the Indonesian Association of Clinical Psychologists	Online, 14 Maret 2024 Online, March 14, 2024	KPEI
			Ring The Bell for Gender Equality - Invest in Women: Accelerate Progress	Main Hall BEI, 14 Maret 2024 IDX Main Hall, March 14, 2024	BEI
			IDX Sharing Session Product Knowledge Series Intraday Short Selling & Liquidity Provider for Stocks	Online, 20 Maret 2024 Online, March 20, 2024	BEI
			IDX Sharing Session Mastering IDX Statistics: Essential Information	Online, 22 Maret 2024 Online, March 22, 2024	BEI
			OJKI Sharing Session Idea Talks Volume 5 Tantangan Pasar Modal dan Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial dan Suku Bunga [OJKI Sharing Session] Idea Talks Volume 5 - Challenges of the Capital Market and Sharia Finance in the Context of Social Dynamics and Interest Rates	Online, 26 Maret 2024 Online, March 26, 2024	OJK Institute
			Sharing Session bersama Ibu Enny Hartati Sampurno - Direktur Customer Operation PT Unilever Sharing Session with Ms. Enny Hartati Sampurno - Director of Customer Operation, PT Unilever	Ruang Seminar BEI, 28 Maret 2024 Seminar Room of IDX, March 28, 2024	KPEI
			Leaders Talk KPEI 2024 bersama Bapak Muhammad Wahid Sutopo - Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia IDClear's Leaders Talk 2024 with Mr. Muhammad Wahid Sutopo - President Director of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Ritz Carlton, 30 April 2024 Ritz Carlton, April 30, 2024	KPEI
			Indonesia Capital Market Executives' 2024	Tokyo Jepang, 14-19 Mei 2024 Tokyo, Japan, May 14-19, 2024	BEI
			The 2024 CCP Global Annual General Meeting (AGM)	Athens Yunani, 23 Mei - 1 Juni 2024 Athens Greece, May 23 - June 1, 2024	CCP Global
			49th Annual IOSCO Meeting, The Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Public Conference	Athens Yunani, 23 Mei - 1 Juni 2024 Athens Greece, May 23 - June 1, 2024	IOSCO
			IDX Sharing Session ESG Risk Rating Webinar	Online, 12 Juni 2024 Online, June 12, 2024	BEI
			NASDAQ Post-Trade Transformation Workshop	Ruang Seminar BEI, 2-4 Juli 2024 Seminar Room of IDX, July 2-4, 2024	BEI

No	Nama Name	Jabatan Position	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Lokasi & Tanggal Location & Date	Penyelenggara Organizer
			<i>Team Building</i> KPEI 2024 IDClear's Team Building 2024	Bandung, 5-7 Juli 2024 Bandung, July 507, 2024	KPEI
			Webinar " <i>How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing</i> "	Online, 5 September 2024 Online, September 5, 2024	OJK Institute
			<i>Market Update</i> Q4 Tahun 2024 Bersama Infovesta Q4 2024 Market Update with Infovesta	Online, 21 Oktober 2024 Online, October 21, 2024	KPEI
			<i>Capital Market Journalist Workshop dan Media Gathering</i> 2024 Capital Market Journalist Workshop and Media Gathering 2024	Labuan Bajo, 31 Oktober - 2 November 2024 Labuan Bajo, October 31 - November 2, 2024	SRO
			<i>Capacity Building</i> Anak Perusahaan SRO 2024 2024 Capacity Building for SRO Subsidiaries	Cirebon, 4-6 Oktober 2024 Cirebon, October 4-6 2024	BEI
			Webinar " <i>Carbon Trading and Its Effect on Indonesia's Economy</i> "	Online, 17 Oktober 2024 Online, October 17, 2024	OJK Institute
			<i>Capital Market Summit & Expo</i> 2024 (CMSE 2024)	Main Hall BEI, 7-9 November 2024 IDX Main Hall, November 7-9, 2024	BEI
			<i>Capacity Building</i> Anggota Kliring dan Partisipan KPEI 2024 2024 Capacity Building for IDClear Clearing Members and Participants	Palembang, 15-17 Oktober 2024 Palembang, October 15-17, 2024	KPEI
			Seminar Pemangku Kepentingan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahun 2024 2024 Stakeholder Seminar of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Bali, 12-14 November 2024 Bali, November 12-14, 2024	KSEI
			Undangan OJK: Dialog Akhir Tahun antara Anggota Dewan Komisiner dan Industri Jasa Keuangan [Invitation] OJK: Year-End Dialogue between the Board of Commissioners and the Financial Services Industry	Ballroom 1-2, Intercontinental Pondok Indah, 3 Desember 2024 Ballroom 1-2, Intercontinental Pondok Indah, December 3, 2024	OJK
3	Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	Mandiri Investment Forum 2024 " <i>Thriving Through Transition</i> "	Online - 05 Maret 2024 Online, March 05, 2024	Mandiri
			<i>Sharing Session Mental Health Awareness</i> Bersama Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Sharing Session Mental Health Awareness with the Indonesian Association of Clinical Psychologists	Online - 14 Maret 2024 Online - March 14, 2024	KPEI
			<i>Investor Gathering & Corporate Forum</i> 2024	Online - 27 Maret 2024 Online, March 27, 2024	MNC Sekuritas
			<i>Sharing Session</i> bersama Ibu Enny Hartati Sampurno - Direktur Customer Operation PT Unilever Sharing Session with Ms. Enny Hartati Sampurno - Director of Customer Operation, PT Unilever	Ruang Seminar BEI - 28 Maret 2024 Seminar Room of IDX, March 28, 2024	KPEI
			<i>Leaders Talk</i> KPEI 2024 bersama Bapak Muhammad Wahid Sutopo - Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia IDClear's Leaders Talk 2024 with Mr. Muhammad Wahid Sutopo - President Director of PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Ritz Carlton - 30 April 2024 Ritz Carlton - April 30, 2024	KPEI
			IGNITE 2024 - <i>Advancing Women Leaders for Indonesia Emas</i>	Main Hall BEI- 30 Mei 2024 IDX Main Hall, May 30, 2024	BEI
			NASDAQ <i>Post-Trade Transformation Workshop</i>	Ruang Seminar BEI - 2 Juli 2024 Seminar Room of IDX - July 2, 2024	BEI
			<i>Women's Inspiring & Networking Group (WING) Networking Event - Thriving Career in the C-Suite by Being You!</i>	Main Hall BEI- 31 Juli 2024 IDX Main Hall, July 31, 2024	BEI
			<i>Enhancing Fraud Detection Systems to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry</i>	Hotel Bidakara - 26 Agustus 2024 Hotel Bidakara - August 26, 2024	Bank Indonesia
			Webinar " <i>How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing</i> "	Online - 5 September 2024 Online - September 5, 2024	OJK Institute
			Webinar " <i>Carbon Trading and Its Effect on Indonesia's Economy</i> "	Online - 17 Oktober 2024 Online - October 17, 2024	OJK Institute

No	Nama Name	Jabatan Position	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Lokasi & Tanggal Location & Date	Penyelenggara Organizer
			<i>Economic & Capital Market Outlook 2025</i>	Online - 28 November 2024 Online - November 28, 2024	AAEI
			<i>Women's Inspiring & Networking Group (WING) II - Overcoming Challenges of Leadership and Care Responsibilities</i>	Main Hall BEI- 2 Desember 2024 IDX Main Hall, December 2, 2024	BEI
			<i>Corporate Sharing Session - Introduction to Artificial Intelligence (AI)</i>	Online - 18 Desember 2024 Online - December 18, 2024	KPEI

Program Pengenalan Direksi Baru

Perusahaan mempunyai kebijakan Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas yang wajib diikuti oleh anggota Direksi yang baru diangkat dan khususnya berasal dari eksternal. Program ini bertujuan memberikan informasi terkini tentang profil dan aktivitas bisnis Perusahaan, serta pengetahuan-pengetahuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pada tahun 2024, KPEI tidak menyelenggarakan program orientasi atau pengenalan Perusahaan karena tidak ada anggota Direksi baru yang dilantik.

New Board of Directors Introduction Program

The Company has an Orientation and Capability Enhancement Program policy that must be attended by newly appointed members of the Board of Directors, particularly those from outside the organization. This program is intended to provide up-to-date information on the Company's profile and business activities, as well as other knowledge relevant to the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities.

In 2024, IDClear did not conduct any orientation or onboarding programs as there were no new appointments to the Board of Directors.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENDUKUNG DIREKSI

Direksi KPEI memiliki 4 (empat) Komite yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas Direksi sesuai dengan bidangnya, yaitu Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko, Komite *Haircut*, Komite Investasi, dan Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko. Komite-komite ini memberikan rekomendasi, solusi, dan kebijakan yang membantu Direksi dalam membuat keputusan atau kebijakan yang sesuai dengan tujuan Perusahaan.

Komite Kebijakan Kredit & Pengendalian Risiko
Credit Policy and Risk Management Committee

Komite Haircut
Haircut Committee

Komite Investasi
Investment Committee

Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko
CCP Clearing and Risk Management Committee

Setiap akhir tahun buku, Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja komite-komite ini dalam mendukung pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun 2024, berdasarkan kriteria dan parameter yang telah disepakati bersama. Penilaian kinerja masing-masing komite untuk tahun buku 2024 dijelaskan di bawah ini.

Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko

Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko dilakukan melalui metode *self-assessment* yang mengevaluasi penyelesaian tugas dan tanggung jawab komite dengan mempertimbangkan kriteria dan parameter kinerja, baik secara individu anggota komite maupun secara kolektif.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS' COMMITTEES

The Board of Directors of IDClear has 4 (four) committees that support the implementation of the Board's duties in accordance with their respective fields, namely the Credit Policy and Risk Control Committee, the Haircut Committee, the Investment Committee, and the CCP Clearing and Risk Management Committee. These committees provide recommendations, solutions, and policies that assist the Board of Directors in making decisions or policies in line with the Company's objectives.

At the end of each financial year, the Board of Directors evaluates the performance of these committees in supporting the Company's management throughout the year, based on mutually agreed criteria and parameters. The performance assessments of each committee for the 2024 financial year are outlined below.

Performance Assessment of the Credit Policy and Risk Management Committees

The performance assessment of the Credit Policy and Risk Management Committee was conducted through a self-assessment method, which evaluated the completion of the committee's duties and responsibilities by considering performance criteria and parameters, both individually for each committee member and collectively as a whole.

Hasil Penilaian Kinerja Komite KKPR

Performance Assessment Result of of the Credit Policy and Risk Management Committee

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Aktivitas KKPR yang Dinilai Assessed Activities of KKPR	Skor Individu Individual Score	Skor Kolektif Collective Score
1	Tugas dan Tanggung Jawab terkait Manajemen Risiko Duties and Responsibilities related to Risk Management	Kontribusi dalam merekomendasikan dan memantau kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Direksi. Contribution in recommending and monitoring the Exchange Transaction Settlement Guarantee risk management policy to the Board of Directors.	4,8	5
		Kontribusi dalam memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait penanganan gagal bayar pada Anggota Kliring jika diminta oleh Perusahaan Contribution in providing advisory and or recommendations regarding the handling of defaults on Clearing Members if requested by the Company.	4,2	4,4
2	Tugas dan Tanggung Jawab terkait Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan Duties and Responsibilities regarding Guarantee Fund and Reserve for Guarantee Fund	Kontribusi dalam menetapkan kebijakan penggunaan dan investasi Dana Jaminan. Contribution in determining the policy on the use and investment of the Guarantee Fund.	5	5
		Kontribusi dalam merekomendasikan persentase laba bersih Perusahaan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan kepada Direksi. Contribution in recommending the percentage of the Company's net profit that must be set aside to form Reserve for Guarantee Fund to the Board of Directors.	4,4	4,6
		Memberikan persetujuan atas besarnya biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan. Providing approval for the amount of the accounting and audit service fees on Guarantee Fund's financial statements.	4,6	4,4
		Memberikan persetujuan penggunaan Dana Jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank. Providing approval for the use of Guarantee Fund to obtain credit facilities from the Bank.	4,4	4,4
3	Tugas dan Tanggung Jawab terkait Ketaatan pada Peraturan Duties and Responsibilities related to Compliance with Regulations	Kontribusi dalam memastikan bahwa Direksi, dan Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) melakukan pengelolaan Dana Jaminan dan proses manajemen pengelolaan risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Contribution in ensuring that the Board of Directors, and the Guarantee and Risk Management Division (PPR) managed the Guarantee Fund and the risk management process in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market sector.	5	5
		Kontribusi dalam melakukan review terhadap kebijakan pengadministrasian dan pengelolaan Dana Jaminan serta review terhadap parameter-parameter manajemen risiko dalam hal terdapat indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Contribution in reviewing the administration and management policies of the Guarantee Fund as well as reviewing risk management parameters in the event that there is an indication that there has been a violation of the prevailing laws and regulations in the capital market sector.	4,8	5
4	Lain-lain Others	Kerja sama dan komunikasi antar anggota Komite KKPR. Collaboration and communication between members of the KKPR Committee.	5	5
		Tingkat kehadiran dalam rapat rutin Komite KKPR. Attendance in a routine meeting of the KKPR Committee.	4,6	4,8
		Berkomunikasi dan berinteraksi dengan Direksi secara langsung untuk melaporkan dan meminta petunjuk atau masukan terkait permasalahan-permasalahan operasional yang berisiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan. Communicating and interacting with the Board of Directors directly to report and request guidance or input regarding operational issues that are high risk and important to be communicated.	4,8	5
Total Skor Penilaian Komite KKPR Total Score of KKPR Committee Assessment			4,7	4,8

Keterangan

5 = Sangat Baik | 4 = Baik | 3 = Cukup Baik | 2 = Kurang Baik | 1 = Tidak Baik

Description:

5 = Excellent | 4 = Very Good | 3 = Good | 2 = Fair | 1 = Poor

Berdasarkan skor penilaian kinerja dalam tabel di atas, Direksi menilai bahwa untuk tahun buku 2024 Komite KKPR telah bekerja dengan baik, efektif dan efisien, serta mendorong Komite KKPR untuk terus meningkatkan kinerja.

Based on the performance assessment scores in the table above, the Board of Directors concluded that KKPR Committee performed well, effectively, and efficiently during the 2024 fiscal year and encouraged the KKPR Committee to continue improving its performance.

Penilaian Kinerja Komite Haircut

Penilaian kinerja Komite *Haircut* dilakukan dengan metode *self-assessment* yang mengevaluasi penyelesaian tugas dan tanggung jawab komite dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Penilaian berdasarkan pada kriteria dan parameter kinerja, baik secara individu untuk setiap anggota komite maupun secara kolektif.

Performance Assessment of the Haircut Committee

The performance assessment of the Haircut Committee was conducted using a self-assessment method that assessed the completion of the committee's duties and responsibilities in supporting the implementation of the Board of Directors' functions. The assessment was based on performance criteria and parameters, both individually for each committee member and collectively as a whole.

Hasil Penilaian Kinerja Komite *Haircut*

Performance Assessment Results of the Haircut Committee

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Aktivitas Komite <i>Haircut</i> yang Dinilai Assessed Activities of the Haircut Committee	Skor Individu Individual Score	Skor Kolektif Collective Score
1	Kriteria Keanggotaan Komite <i>Haircut</i> Criteria for Haircut Committee Membership	Menjalankan tugas dengan independen, objektif dan profesional Performing duties independently, objectively, and professionally	4.55	4.55
2	Pemberhentian dan Pengunduran diri anggota Komite Dismissal and Resignation of Committee Members	Tingkat kehadiran dalam rapat bulanan Komite <i>Haircut</i> Attendance Rate in Monthly Haircut Committee Meetings	4.55	4.36
3	Tugas dan Tanggung Jawab terkait Perhitungan Nilai <i>Haircut</i> Duties and Responsibilities Related to Haircut Calculation	Kontribusi atas usulan penyusunan kriteria dan model (formula) penentuan dan penetapan besaran <i>haircut</i> efek Contribution to the proposal for the formulation and establishment of criteria and models (formulas) for determining and setting the size of securities haircuts.	4.55	4.64
		Kontribusi dan komitmen dalam memberikan informasi material yang dapat menjadi pertimbangan penilaian <i>haircut</i> efek Contribution and commitment to providing material information that may be considered in evaluating securities haircuts.	4.45	4.73
		Kontribusi dalam hal review atas parameter dan perhitungan <i>haircut</i> , apabila terdapat indikasi pelanggaran di bidang pasar modal Contribution to reviewing haircut parameters and calculations, in case there are indications of violations in the capital market sector.	4.64	4.64
		Kontribusi dalam memastikan Divisi PPR dan Direksi KPEI menyediakan data yang benar sesuai peraturan di bidang pasar modal Contribution to ensuring that the PPR Division and the IDCclear's Board of Directors provide accurate data in accordance with regulations in the capital market sector.	4.64	4.64
		Kontribusi dalam memastikan Divisi PPR dan Direksi KPEI tidak melakukan pelanggaran di bidang pasar modal Contribution to ensuring that the PPR Division and the IDCclear's Board of Directors do not commit violations in the capital market sector.	4.73	4.73
4	Tugas dan Tanggung Jawab terkait Pengaduan Responsibilities and Duties related to Complaints	Melakukan penelaahan atas pengaduan dari pihak ketiga terkait parameter perhitungan <i>haircut</i> saham dan bekerja sama dengan Divisi PPR dalam melakukan penelaahan yang dimaksud. Conducting review of third-party complaints regarding stock haircut calculation parameters and collaborating with the PPR Division to conduct the necessary review.	4.45	4.64
5	Pengambilan Keputusan Decision Making	Memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak Providing contributions to decision-making, either through consensus or majority voting mechanisms	4.64	4.55

Hasil Penilaian Kinerja Komite Haircut

Performance Assessment Results of the Haircut Committee

No	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Aktivitas Komite Haircut yang Dinilai Assessed Activities of the Haircut Committee	Skor Individu Individual Score	Skor Kolektif Collective Score
6	Lain-lain Others	Kontribusi atas pemantauan atas kebijakan manajemen risiko terkait dengan perhitungan haircut Contribution to monitoring risk management policies related to haircut calculations	4.36	4.55
		Bekerja sama antar anggota Komite Collaboration among committee members	4.73	4.73
		Komunikasi antar anggota Komite Communication among committee members	4.73	4.73
		Kepatuhan terhadap Peraturan dan Charter Komite Haircut Compliance with Regulations and Charter of the Haircut Committee	4.73	4.64
Total Skor Penilaian Komite Haircut Total Score of Haircut Committee Assessment			4.59	4.62
Keterangan 5 = Sangat Baik 4 = Baik 3 = Cukup Baik 2 = Kurang Baik 1 = Tidak Baik Description: 5 = Excellent 4 = Very Good 3 = Good 2 = Fair 1 = Poor				

Berdasarkan skor penilaian kinerja dalam tabel di atas, Direksi menilai bahwa untuk tahun buku 2024 Komite Haircut telah bekerja dengan baik, efektif dan efisien, serta mendorong Komite Haircut untuk terus meningkatkan kinerja.

Based on the performance assessment scores in the table above, the Board of Directors concluded that the Haircut Committee performed well, effectively, and efficiently during the 2024 financial year. The Board encourages the Haircut Committee to continue improving its performance.

Penilaian Kinerja Komite Investasi

Penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan rekomendasi strategi investasi kepada Direksi. Adapun penilaian kinerja Komite Investasi mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan oleh Direksi.
2. Kinerja Komite Investasi dinilai baik secara kolektif maupun individual.
3. Pelaksanaan penilaian Komite Investasi dilakukan setiap tahun.

Direksi mengembangkan kriteria penilaian kinerja yang mengacu pada tugas dan tanggung jawab Komite Investasi yang tercantum dalam Piagam Komite.

Performance Assessment of the Investment Committee

The performance assessment of the Investment Committee was based on the implementation of its duties and responsibilities in providing investment strategy recommendations to the Board of Directors. The evaluation followed these provisions:

1. The Investment Committee's performance is evaluated by the Board of Directors.
2. The performance is assessed both collectively and individually.
3. The evaluation is conducted annually.

The Board of Directors developed performance assessment criteria that refer to the duties and responsibilities of the Investment Committee as stipulated in the Committee Charter.

Tahun buku 2024, Direksi menilai Komite Investasi telah berkinerja dengan baik dengan indikator utama berupa penyediaan rekomendasi, informasi, dan usulan yang akurat serta memadai yang membantu Direksi dalam mengambil keputusan investasi yang tepat dan mencapai hasil investasi yang optimal bagi Perusahaan.

For the 2024 financial year, the Board of Directors assessed that the Investment Committee performed well. This assessment was based primarily on the Committee's ability to provide accurate and adequate recommendations, information, and proposals that supported the Board of Directors in making sound investment decisions and achieving optimal investment results for the Company.

Transparansi Informasi Tentang Dewan Komisaris dan Direksi

INFORMATION TRANSPARENCY ON THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

PENILAIAN KINERJA KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi melalui laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan sepanjang tahun buku 2024 yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPST pada 24 Juni 2024. Proses pelaporan pertanggungjawaban atas tugas pengawasan Dewan Komisaris KPEI diatur dalam Piagam Kerja Dewan Komisaris.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

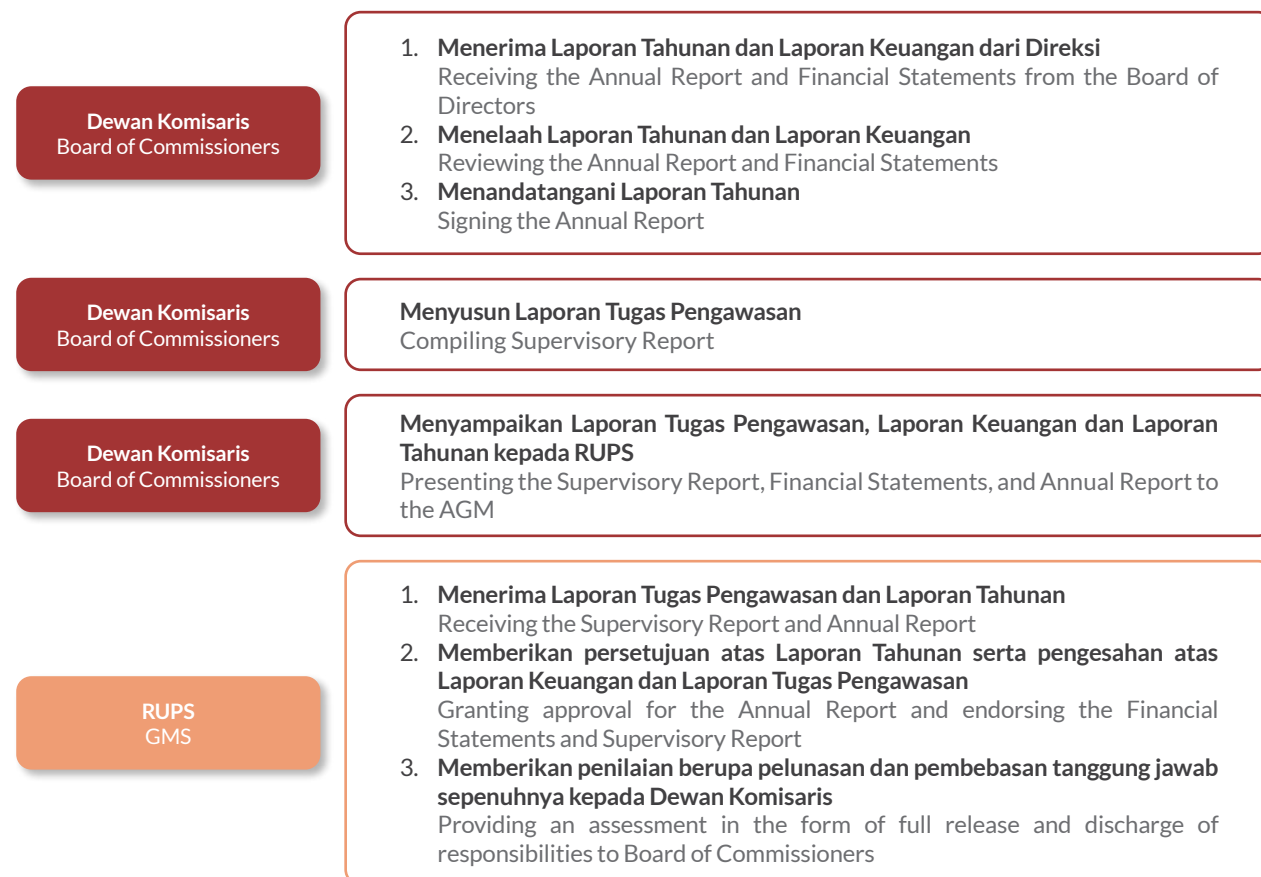
The performance of the Board of Commissioners is evaluated through a report on the implementation of its supervisory duties throughout the 2024 financial year, which is submitted to the Shareholders at the AGMS on June 24, 2024. The reporting and accountability process for the supervisory duties of the IDClear's Board of Commissioners is regulated in the Charter of the Board of Commissioners.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris KPEI dijelaskan melalui bagan berikut dengan rincian sebagai berikut:

Procedure of the Board of Commissioners' Performance Assessment

The procedure for assessing the performance of IDClear's Board of Commissioners is illustrated in the following diagram, with details as follows:



1. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Dewan Komisaris menelaah Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi, untuk kemudian bersama dengan Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
3. Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan, yakni semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan hingga Laporan Tahunan diterbitkan. Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan atau dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
4. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang juga merupakan penilaian atas kinerja pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan Dewan Komisaris tersebut terungkap dalam Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.
5. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas Tata Kelola Perusahaan (GCG).

1. The Board of Commissioners as supervisory function, submits a supervisory accountability report on the management of the Company by the Board of Directors. The Board of Commissioners' supervisory report is part of the Annual Report submitted to the GMS for approval.
2. The Board of Commissioners reviewed the Annual Report submitted by the Board of Directors together with the Board of Directors submitting the Annual Report to the GMS within a period of no later than 6 (six) months after the end of the Company's financial year.
3. The Board of Commissioners signed the Annual Report, comprising all members of the Board of Commissioners who served during the relevant financial year and until the Annual Report is issued. Members of the Board of Commissioners who did not sign the Annual Report must state their reasons in writing in a separate letter attached to the Annual Report or are deemed to have approved the contents of the Annual Report.
4. Approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements as well as the Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners is carried out by the GMS, in which that the GMS has granted full release and discharged of responsibilities to each member of the Board of Commissioners for the supervision carried out during the past financial year, to the extent that the actions of the Board of Commissioner is disclosed in the Annual Report, without prejudice to the responsibility of each member of the Board of Commissioners in the event of a criminal act or mistake and/or negligence that causes loss to third parties.
5. The responsibility of the Board of Commissioners to the GMS is accountability for supervision over the management of the Company in the context of implementing the principles of Corporate Governance (CGG).

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Terdapat 2 (dua) metode yang berisi kriteria untuk digunakan dalam melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris, yaitu:

Indikator Kinerja Utama (KPI) Key Performance Indicators	Laporan Tugas Pengawasan Supervisory Report
Kinerja Dewan Komisaris juga dievaluasi berdasarkan pencapaian KPI unggulan KPEI yang dilaporkan kepada pemegang saham pada RUPS Tahunan dan kepada OJK. Rincian mengenai pencapaian KPI unggulan KPEI untuk tahun buku 2024 disampaikan dalam penjelasan bagian Direksi.	The performance of the Board of Commissioners is also assessed through the achievement of IDCclear's key performance indicators (KPIs), which are presented to shareholders at the AGMS and reported to the OJK. The elaboration on the achievement of IDCclear's key performance indicators for the 2024 financial year is provided in the Board of Director's explanation section.

Criteria of the Board of Commissioners' Performance Assessment

There are two methods containing criteria used to carry out the performance assessment of the Board of Commissioners, namely:

Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan melalui laporan tugas pengawasan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dinyatakan melalui persetujuan RUPST dan pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku.

Selain itu, peran Dewan Komisaris juga menjadi bagian yang dinilai dalam *self-assessment* penerapan GCG setiap tahunnya.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi KPEI didasarkan pada pencapaian kinerja Perusahaan dan mengacu pada beberapa hal, yaitu:

1. Penilaian terhadap kinerja Direksi dan setiap anggota Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara rutin setiap tahun dan disampaikan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dalam RUPS;
2. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang disepakati, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan terkait serta penetapan Indikator Kinerja Utama oleh OJK;
3. Hasil penilaian kinerja merupakan sarana untuk menilai dan meningkatkan efektivitas kerja Direksi; dan
4. Kebijakan Perusahaan mengenai penilaian kinerja kepada anggota Direksi dicantumkan dalam Laporan Tahunan sebagai bagian dari pengungkapan praktik tata kelola Perusahaan yang dilakukan.

Prosedur Penilaian Direksi

Setiap akhir tahun, Direksi akan menyusun usulan KPI Unggulan tingkat korporasi untuk dibahas bersama Dewan Komisaris dan mendapatkan rekomendasi guna disetujui oleh RUPS sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk tahun buku berikutnya. KPI tersebut akan menjadi acuan dalam menilai kinerja Perusahaan serta kinerja Direksi atas pencapaian yang diperoleh kemudian akan disampaikan kepada pemegang saham pada RUPST dan dilaporkan kepada OJK.

The performance evaluation of the Board of Commissioners, conducted through the supervisory duties report as previously described, is expressed through the approval of the AGMS and the full discharge granted to the Board of Commissioners for the execution of their supervisory duties during the financial year.

In addition, the role of the Board of Commissioners is also assessed as part of the annual self-assessment of Good Corporate Governance (GCG) implementation.

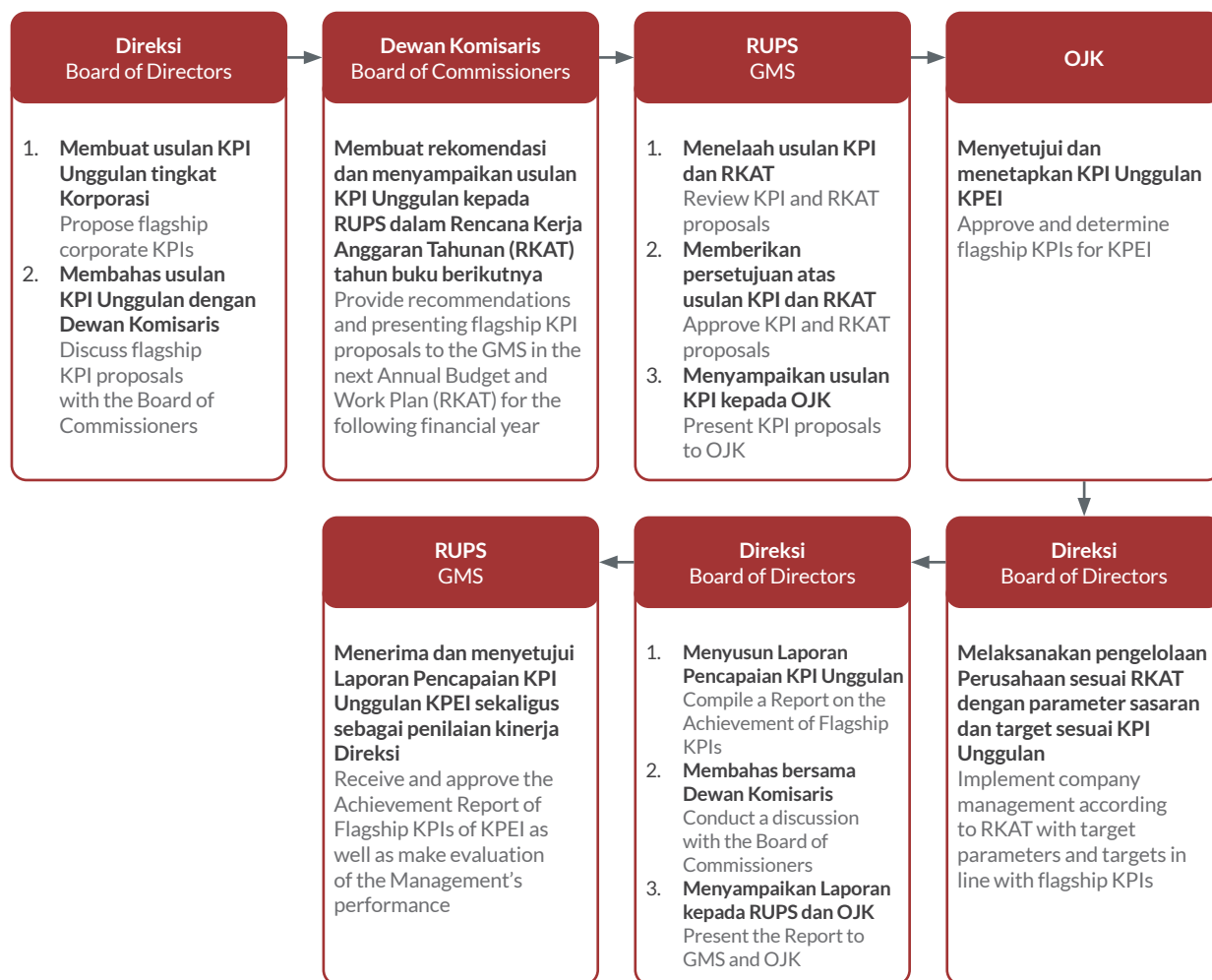
Performance Assessment of the Board of Directors

The performance assessment of IDClear's Board of Directors is based on the Company's performance achievements and refers to several aspects, namely:

1. Assessment of the performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors is conducted by the Board of Commissioners regularly every year and presented in the Board of Commissioners' Supervision Report at the GMS;
2. In general, the performance of the Board of Directors is assessed based on predetermined duties and responsibilities, the Company's Articles of Association, relevant laws and regulations, as well as Key Performance Indicators (KPI) set by OJK;
3. Assessment result served as a mean to appraise and improve performance effectiveness of the Board of Directors; and
4. The Company policy regarding assessment to the Board of Directors is stated in the Annual Report as part of disclosure on GCG practices in the Company.

Board of Directors Performance Assessment Procedure

At the end of each year, the Board of Directors prepares a proposal for the Company's Key Performance Indicators (KPIs) to be discussed with the Board of Commissioners and recommended for approval by the GMS as part of the Annual Work and Budget Plan (RKAT) for the following financial year. These KPIs serve as a reference for evaluating both the Company's performance and the performance of the Board of Directors. The results of this assessment are then presented to the shareholders at the AGMS and reported to OJK.



Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

1. Keberhasilan dalam mencapai target KPI yang ditetapkan OJK;
2. Kerja sama antar anggota Direksi;
3. Efektivitas pelaksanaan tugas;
4. Komunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Tingkat kehadiran dalam rapat internal Direksi dan rapat eksternal Direksi;
6. Kontribusi terhadap proses pengelolaan Perusahaan;
7. Keterlibatan dalam tugas tertentu;
8. Komitmen terhadap kemajuan Perusahaan; dan
9. Kepatuhan terhadap hukum serta peraturan dan kebijakan Perusahaan.

Metode dan Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2024

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pengukuran berdasarkan parameter KPI Unggulan 2024 Perusahaan.

KPEI telah menetapkan 9 (sembilan) *Key Performance Indicator* (KPI) Unggulan untuk tahun 2024 dan pencapaiannya disetujui OJK melalui surat SK-13/PM.1/2025 tanggal 5 Maret 2025, terkait pencapaian atas capaian 9 (sembilan) *Key Performance Indicators* (KPI) Unggulan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Tahun 2024.

Criteria of the Board of Directors' Performance Assessment

1. Accomplishment in achieving KPI target set by OJK;
2. Coordination amongst member of the Board of Directors;
3. Effectiveness in duties implementation;
4. Communication with shareholders and other stakeholders;
5. Attendance rate in internal and external Board of Directors' meeting;
6. Contribution to process the Company management;
7. Engagement in certain duties;
8. Commitment to Company improvement; and
9. Compliance to laws and regulations, as well as Company's policies.

Methods and Assessment Results of the Board of Directors' Performance in 2024

The performance evaluation of the Board of Directors is carried out through measurement based on the Company's 2024 Key Performance Indicators (KPI) parameters.

IDClear has established 9 (nine) Featured Key Performance Indicators (KPI) for 2024 through letter no. SK-13/PM.1/2025 issued on March 5, 2025, on the achievement of the 9 (nine) Key Performance Indicators (KPI) of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (IDClear) for the year 2024.

Berikut ini adalah pencapaian KPI Unggulan KPEI 2024.

Below are the achievements of IDClear's 2024 Key Performance Indicators.

No.	Nama KPI Name of the KPI	Periode Perhitungan Calculation Period	Target Target (a)	Aktual Actual (b)
1	Indeks Kepuasan Anggota Kliring Clearing Members Satisfaction Index	Tahunan Annual	82,00%	82,87%
2	Penambahan Jumlah Investor di Pasar Modal Increase in the Number of Capital Market Investors	Tahunan Annual	100,00%	447,99%
3	Persentase Pemenuhan atas Standar Internasional untuk Central Counterparty (CCP) Percentage of Compliance with International Standards for Central Counterparty (CCP)	Tahunan Annual	99,00%	99,51%
4	Persentase Ketepatan Waktu Proses Penyelesaian Transaksi Bursa Percentage of Timeliness in Exchange Transaction Settlement Process	Harian Daily	100,00%	99,37%
5	Persentase Pemenuhan Kecukupan Agunan Percentage of Collateral Sufficiency Fulfillment	Harian Daily	100,00%	100,00%
6	Persentase Ketepatan Waktu Ketersediaan Parameter Risiko Percentage of Timeliness in Risk Parameter Availability	Bulanan Monthly	100,00%	100,00%
7	Persentase Ketersediaan (Availability) Sistem-sistem Utama Availability Percentage of Core Systems	Tahunan Annual	99,40%	99,64%
8	Penyelesaian Milestones Rencana Kerja dalam Program Strategis Completion of Work Plan Milestones in Strategic Programs	Tahunan Annual	7 program strategis selesai 7 strategic programs completed	7 program strategis selesai 7 strategic programs completed
9	Waktu Pemulihan Sistem Utama Setelah Gangguan Recovery Time of Core Systems After Disruption	Tahunan Annual	2 jam per kejadian 2 hours per event	70 menit dan 114 menit 70 minutes and 114 minutes

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 59/POJK.04/2016 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi KPEI melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari seleksi, pengajuan, pengujian, hingga penetapan calon kepada RUPS yang seluruhnya dilaksanakan di bawah koordinasi OJK.

Jika diperlukan, OJK dapat menambah jumlah anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan perkembangan kegiatan dan kebutuhan operasional KPEI dan dapat memasukkan anggota baru ke dalam jajaran yang sedang menjabat.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur pencalonan hingga pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi KPEI dapat dilihat lebih jelas melalui bagan berikut :

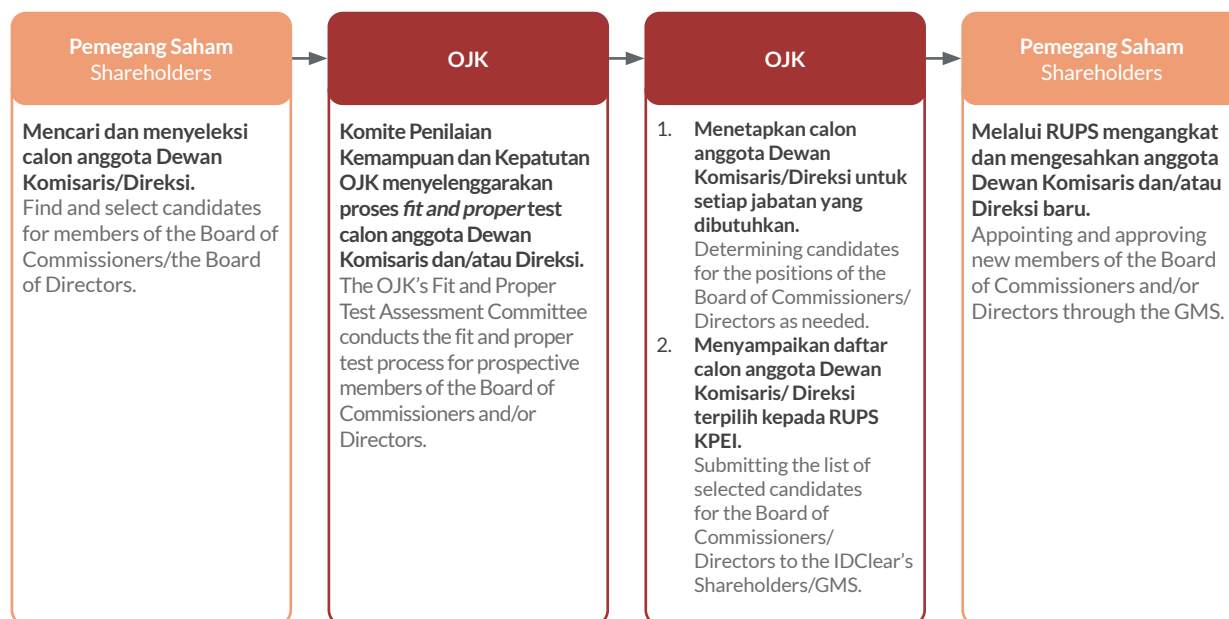
NOMINATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Based on OJK Regulation No. 59/POJK.04/2016 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Clearing and Guarantee Institutions, the nomination process for members of IDClear's Board of Commissioners and Board of Directors involves a series of stages, starting from selection, submission, assessment, and appointment of candidates to the GMS, all of which are carried out under the coordination of OJK.

If necessary, OJK may increase the number of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors in accordance with the development of IDClear's activities and operational needs, and may appoint new members to the existing board.

Nomination Procedure of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The nomination and appointment procedure for members of IDClear's Board of Commissioners and/or Board of Directors can be seen more clearly in the following diagram:



REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan/atau Direksi KPEI ditetapkan selama proses nominasi, bersamaan dengan pencalonan dan pengajuan calon oleh pemegang saham kepada OJK. Berdasarkan kinerja Perusahaan dan standar industri, remunerasi tersebut dapat ditinjau dan diajukan penyesuaian sesuai dengan kelayakan yang berlaku secara umum untuk anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab setiap jabatan.

Prosedur Penetapan Remunerasi

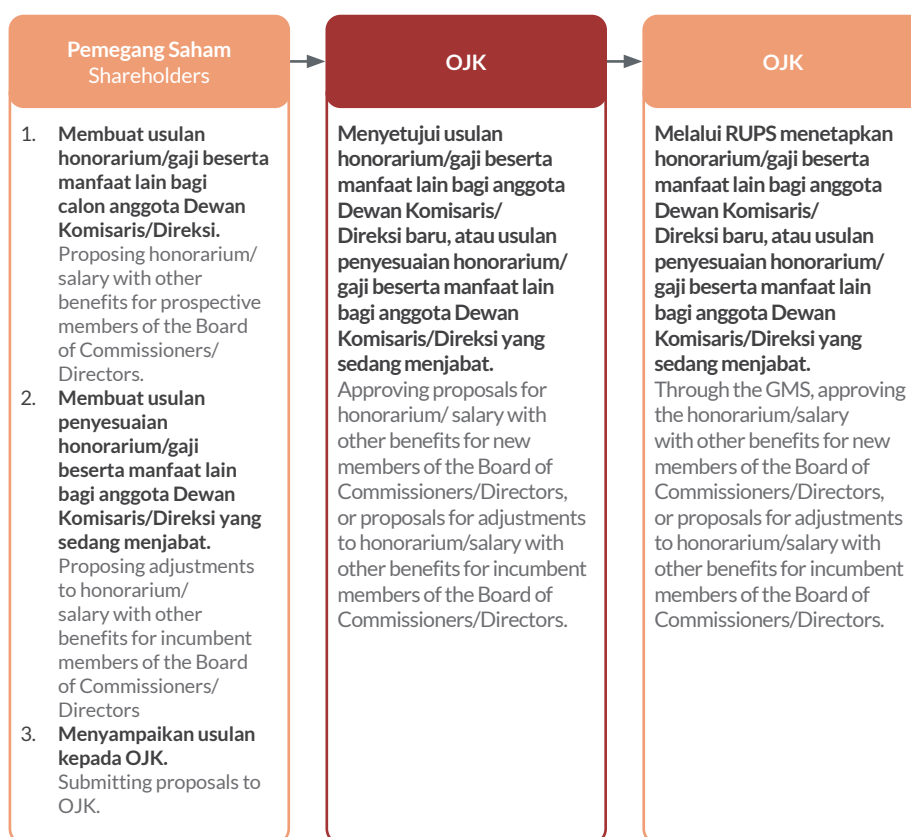
Prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi KPEI, mulai dari pengajuan usulan hingga pengesahan digambarkan dalam bagan berikut:

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration for IDCclear's Board of Commissioners and/ or Board of Directors is determined during the nomination process, alongside the shareholders' nomination and submission of candidates to OJK. Based on the Company's performance and prevailing industry standards, this remuneration may be reviewed and proposed for adjustment in line with generally accepted appropriateness for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors, taking into account the duties and responsibilities attached to each position.

Procedures for Remuneration Determination

The procedure for determining remuneration for IDCclear's Board of Commissioners and/or Board of Directors, from proposal submission through final approval is illustrated in the following diagram:



Pelaksanaan Remunerasi

RUPST telah menetapkan total nominal remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp40,28 miliar. Total nominal remunerasi berlaku untuk periode sejak berakhirnya RUPST 2024 hingga pelaksanaan RUPST 2025, atau hingga ada keputusan lain melalui RUPS. Penetapan jumlah tersebut mempertimbangkan kinerja keuangan Perusahaan, kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, kelayakan umum, serta standar industri.

Remuneration Implementation

The AGMS has determined the total nominal remuneration for the following all members of the Board of Commissioners and Board of Directors amounted to Rp40.28 billion Total nominal of remuneration applies for the period starting from the conclusion of the 2024 AGMS until the convening of the 2025 AGMS, or until any other decision is made through a GMS. The determination of this amount takes into account the Company's financial performance, the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors, general appropriateness, and industry standards.

Struktur Remunerasi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi KPEI untuk tahun buku 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Remuneration Structure

The remuneration structure for IDClear's Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2024 is outlined in the following table:

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dasar Ketentuan Basis Provision	Jenis Penghasilan Type of Income	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Kompensasi Bulanan Monthly Compensation	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	Honorarium Honorarium	Gaji Pokok Basic Salary
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	Tunjangan Pajak Penghasilan 100% ditanggung Perusahaan Tax/Income Benefits, 100% borne by the Company	Tunjangan Pajak Penghasilan 100% ditanggung Perusahaan Tax/Income Benefits, 100% borne by the Company
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	-	Tunjangan Perumahan Residential Allowance

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dasar Ketentuan Basis Provision	Jenis Penghasilan Type of Income	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Kompensasi Tahunan Yearly Compensation	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	Tunjangan Hari Raya dengan besaran 1,5x honorarium Holiday Allowance, at scale of 1.5x honorarium	Tunjangan Hari Raya dengan besaran 1,5x honorarium Holiday Allowance, at scale of 1.5x honorarium
	Berdasarkan RKAT Based on RKAT	Apresiasi Kinerja Performance Appraisal	-
	Berdasarkan Persetujuan OJK Based on OJK Approval	-	Apresiasi Kinerja Performance Appraisal
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	-	Tunjangan Pendidikan dengan besaran 1,5x gaji Education Allowance, at scale 1.5x salary
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	-	Tunjangan Cuti dengan besaran 1x gaji Leave allowance, at scale of 1x salary
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	-	Tunjangan Kesejahteraan dengan besaran 1x gaji Welfare allowance, at scale 1x salary
Kompensasi per Periode Compensation per Period	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	Penghargaan Masa Kerja Tenure Appreciation	Penghargaan Masa Kerja Tenure Appreciation
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	-	Tunjangan Kendaraan Vehicle Compensation
Manfaat Lain-lain	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	Asuransi Jiwa Life Insurance	Asuransi Jiwa Life Insurance
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	Asuransi Kesehatan Health Insurance	Asuransi Kesehatan Health Insurance
	Berdasarkan RUPS Based on the GMS	Asuransi Penyakit Kritis Critical Illness Insurance	Asuransi Penyakit Kritis Critical Illness Insurance
	Berdasarkan SK Direksi Based on the Board of Directors' Decision	Fasilitas Perjalanan Dinas Business Trip Facility	Fasilitas Perjalanan Dinas Business Trip Facility
	Berdasarkan RKAT Based on RKAT	-	BPJS Ketenagakerjaan BPJS for Employment
	Berdasarkan RKAT Based on RKAT	-	BPJS Kesehatan BPJS for Health
	Berdasarkan RKAT Based on RKAT	-	Parkir, Bahan Bakar dan Tol Parking, Fuel and Toll Fee
	Berdasarkan RKAT Based on RKAT	-	Fasilitas Keanggotaan Profesi, Olahraga dan lainnya Professional membership, Sports facility and others
	Berdasarkan RKAT Based on RKAT	-	Pemeriksaan Kesehatan Medical Check-up
Jumlah Anggota Number of Members		3 Orang 3 People	3 Orang 3 People
Jumlah Remunerasi Tahun 2024 Total Remuneration in 2024		Rp40,28 Miliar	

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Piagam Dewan Komisaris KPEI tahun 2022, Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan diwajibkan untuk mengadakan rapat setidaknya 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama, atau oleh salah satu anggota Dewan Komisaris jika Komisaris Utama berhalangan hadir.

Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan baik secara *daring* maupun tatap muka. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris KPEI terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Dewan Komisaris;
2. Rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi; dan

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the 2022 Charter of IDCclear's Board of Commissioners, the Board of Commissioners of the Clearing and Guarantee Institution is required to hold meetings at least once a month. These meetings are chaired by the President Commissioner or, in their absence, by another member of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners meetings may be conducted either online or in person. The meetings held by IDCclear's Board of Commissioners consist of three (3) types:

1. Board of Commissioners Meetings;
2. Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors; and

3. Rapat khusus Dewan Komisaris dengan Direksi , Rapat Dekom dengan Organ Dekom.

Seluruh agenda dan keputusan yang diambil dalam rapat didokumentasikan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris yang disusun oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun buku 2024, Dewan Komisaris mengadakan 17 kali Rapat Dewan Komisaris dengan frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris
Frequency and Attendance Level at the Board of Commissioners's Meetings

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Rapat Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Hoesen	Komisaris Utama President Commissioner	17	17	100%
2	Ronald Waas	Komisaris Commissioner	17	17	100%
3	Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Commissioner	17	17	100%

Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Anggota Dewan Komisaris
Meeting Agendas and Schedule of the Board of Commissioners Members

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
1	26 Januari 2024 January 26, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting)
2	17 Februari 2024 February 17, 2024	Paparan singkat oleh masing-masing Direktur Utama SRO tentang Capaian Utama Tahun 2023 dan Arah/Program Strategis Tahun 2024 Brief presentations by each President Director of the Self-Regulatory Organizations (SRO) on Key Achievements in 2023 and the Strategic Directions/Programs for 2024
3	27 Februari 2024 February 27, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting)
4	22 Maret 2024 March 22, 2024	Follow up dari Rakor BOC BOD sebelumnya Follow-up from the previous BOC-BOD Coordination Meeting
5	26 Maret 2024 March 26, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) - Evaluasi KAP 2023 Evaluation of Public Accounting Firm (KAP) for 2023

3. Special Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, or between the Board of Commissioners and its supporting organs.

All agendas and decisions made during the meetings are documented in the Minutes of the Board of Commissioners' Meetings, prepared by the Secretary to the Board of Commissioners.

Meetings of the Board of Commissioners

During the 2024 financial year, the Board of Commissioners held 17 Board of Commissioners Meetings, with the frequency and attendance rate of each member of the Board of Commissioners detailed as follows:

Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Anggota Dewan Komisaris

Meeting Agendas and Schedule of the Board of Commissioners Members

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
6	26 April 2024 April 26, 2024	1. Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris-Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDClear divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings 2. Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) 3. Evaluasi KAP 2023 Evaluation of Public Accounting Firm (KAP) for 2023
7	20 Mei 2024 May 20, 2024	1. Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDClear divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings 2. Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) 3. Lain-lain Other matters
8	28 Juni 2024 June 28, 2024	1. <i>Update</i> kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities 2. Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
9	15 Juli 2024 July 15, 2024	Arahan Bapak Komisaris Utama Directives from the President Commissioner
10	24 Juli 2024 July 24, 2024	1. <i>Update</i> kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities 2. Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
11	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Pembahasan RKAT 2024 Revisi Discussion on the Revised 2024 Corporate Work and Budget Plan (RKAT)
12	19 Agustus 2024 August 19, 2024	1. <i>Update</i> kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities 2. Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
13	24 September 2024 September 24, 2024	1. <i>Update</i> kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities 2. Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
14	23 Oktober 2024 October 23, 2024	1. <i>Update</i> kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities 2. Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
15	25 November 2024 November 25, 2024	1. <i>Update</i> kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities 2. Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
16	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. <i>Update</i> kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities 2. Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
17	19 Desember 2024 December 19, 2024	Pembahasan Bersifat Strategis Strategic Discussion

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Di tahun 2024, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sebanyak 17 kali. Informasi frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan dengan Direksi sebagai berikut:

Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2024, a total of 17 Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors were held. The following table presents the frequency and attendance rate of the Board of Commissioners members in these Joint Meetings with the Board of Directors:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Gabungan dengan Direksi

Frequency and Attendance Rate in Joint Meetings with the Board of Directors

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Rapat Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Hoesen	Komisaris Utama President Commissioner	17	17	100%
2	Ronald Waas	Komisaris Commissioner	17	17	100%
3	Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Commissioner	17	17	100%

Waktu Pelaksanaan dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting Agendas and Schedule of the Board of Commissioners Members

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
1	26 Januari 2024 January 26, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting)
2	17 Februari 2024 February 17, 2024	Paparan singkat oleh masing-masing Direktur Utama SRO tentang Capaian Utama Tahun 2023 dan Arah/Program Strategis Tahun 2024 Brief presentations by each President Director of the Self-Regulatory Organizations (SRO) on Key Achievements in 2023 and the Strategic Directions/Programs for 2024
3	27 Februari 2024 February 27, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting)
4	22 Maret 2024 March 22, 2024	Follow up dari Rakor BOC BOD sebelumnya Follow-up from the previous BOC-BOD Coordination Meeting
5	26 Maret 2024 March 26, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) - Evaluasi KAP 2023 Evaluation of Public Accounting Firm (KAP) for 2023
6	26 April 2024 April 26, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) - Evaluasi KAP 2023 Evaluation of Public Accounting Firm (KAP) for 2023

Waktu Pelaksanaan dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting Agendas and Schedule of the Board of Commissioners Members

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
7	20 Mei 2024 May 20, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDCLEAR divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) - Lain-lain Other matters
8	28 Juni 2024 June 28, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
9	15 Juli 2024 July 15, 2024	Arahan Bapak Komisaris Utama Directives from the Board of Commissioners
10	24 Juli 2024 July 24, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
11	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Pembahasan RKAT 2024 Revisi Discussion of the Revised 2024 RKAT
12	19 Agustus 2024 August 19, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
13	24 September 2024 September 24, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
14	23 Oktober 2024 October 23, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
15	25 November 2024 November 25, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
16	19 Desember 2024 December 19, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Update on Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters / Directives from the Board of Commissioners
17	19 Desember 2024 December 19, 2024	Pembahasan Bersifat Strategis Strategic Discussion

Selain rapat dengan pengurus Perusahaan, Dewan Komisaris menghadiri RUPS Perusahaan tahun 2024 dengan informasi sebagai berikut:

In addition to meetings with the Company's management, the Board of Commissioners attended the Company's 2024 GMS with the following details:

No.	Tanggal Date	RUPS Tahun 2024 2024 GMS	Kehadiran Attendance		
			Hoesein	Ronald Waas	Uriep Budhi Prasetyo
1	24 Juni 2024 June 24, 2024	RUPST 2024 2024 AGMS	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present
2	17 September 2024 September 17, 2024	RUPSLB CCP PUVA 2024 EGMS CCP PUVA 2024	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present
3	21 Oktober 2024 October 21, 2024	RUPSLB 2024 2024 EGMS	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present
Jumlah Kehadiran Number of Attendance			3	3	3
Tingkat Kehadiran Attendance Level			100%	100%	100%

RAPAT DIREKSI

Direksi KPEI diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat setidaknya 1 (satu) kali setiap bulan atau diadakan sewaktu-waktu jika diminta oleh minimal 1 (satu) anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham melalui permintaan tertulis. Rapat Direksi juga dapat melibatkan komite pendukung Direksi atau diadakan dalam bentuk Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris.

Pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara langsung, daring, atau melalui mekanisme sirkuler. Keputusan yang diambil dalam rapat sirkuler dianggap sah apabila seluruh anggota Direksi telah menerima pemberitahuan secara tertulis dan menyatakan persetujuan mereka dengan menandatangani risalah rapat tersebut.

Rapat Direksi

Selama tahun buku 2024, Direksi KPEI telah mengadakan 21 kali Rapat Direksi dengan rincian agenda rapat, tingkat kehadiran, dan frekuensinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran pada Rapat Direksi

Frequency and Attendance Level of the Board of Directors Members at Board Meetings

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Rapat Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Iding Pardi	Direktur Utama President Director	21	21	100%
2	Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	21	21	100%
3	Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	21	21	100%

Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Direksi

Agenda and Schedule of Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	17 Januari 2025 January 17, 2025	- Pembahasan Kandidat Manajemen Anak Usaha - Update Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat - Lainnya - Discussion of Subsidiary Management Candidates - Updates on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate - Others
2	29 Januari 2025 January 29, 2025	- Pembahasan perihal Anak Usaha - Persiapan Rapat BoD SRO - Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI - Update Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat - Lainnya - Discussion on Subsidiaries - Preparation of SRO's BoD Meeting - Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives - Updates on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate - Others
3	12 Februari 2025 February 12, 2025	- Persiapan Rapat BoC BoD SRO - Update Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat - Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI - Lainnya - Preparation of SRO's BoC BoD Meeting - Updates on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate - Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives - Others

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of IDClear is required to hold meetings at least once a month or as needed upon request by at least one (1) member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or a shareholder through a written request. Board of Directors meetings may also involve supporting committees or be held in the form of Joint Meetings with the Board of Commissioners.

Meetings may be conducted in person, virtually, or through a circular mechanism. Decisions made through circular meetings are considered valid if all members of the Board of Directors have been notified in writing and have expressed their agreement by signing the minutes of the meeting.

Meetings of the Board of Directors

During the 2024 financial year, the IDClear Board of Directors held 21 Board of Directors Meetings with details of the meeting agenda, attendance rate, and frequency as shown in the table below.

Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Direksi

Agenda and Schedule of Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4	27 Februari 2025 February 27, 2025	1. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 2. Pembahasan Hasil Rapat Masing-masing Direksi dengan Pihak Eksternal 3. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 4. Pembahasan perihal Anak Usaha 5. <i>Update</i> mengenai Laporan Keuangan Lainnya 1. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 2. Discussion of Meeting Results of Each Director with External Parties 3. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 4. Discussion of Subsidiaries 5. Update on Other Financial Statements
5	15 Maret 2025 March 15, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. Pembahasan Hasil Rapat Masing-masing Direksi dengan Pihak Eksternal 3. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 4. Pembahasan perihal Anak Usaha 5. Lainnya 1. Progress Update on Company's Strategic Projects 2. Discussion of Meeting Results of Each Director with External Parties 3. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 4. Discussion of Subsidiaries 5. Others
6	26 Maret 2025 March 26, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 4. Persiapan RUPS Tahunan 5. Pembahasan perihal Anak Usaha 6. <i>Update</i> mengenai Laporan Keuangan 7. Lainnya 1. Progress Update on Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 4. Preparation of Annual GMS 5. Discussion of Subsidiaries 6. Update on Financial Statements 7. Others
7	19 April 2025 April 19, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Tindak lanjut Rapat Direksi sebelumnya 4. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 5. Pembahasan perihal Anak Usaha 6. Pembahasan Agenda RUPS Tahunan Lainnya 1. Progress Update on Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Follow-up to the previous Board of Directors' Meeting 4. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 5. Discussion on Subsidiaries 6. Discussion on Other Annual GMS Agenda Items
8	07 Mei 2025 May 07, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Tindak Lanjut Rapat Direksi sebelumnya 4. Pembahasan Agenda RUPS Tahunan 5. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 6. Pembahasan perihal Anak Usaha Lainnya 1. Progress Update on Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Follow-up to the previous Board of Directors' Meeting 4. Discussion on Annual GMS Agenda 5. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 6. Discussion on Other Subsidiaries
9	20 Mei 2025 May 20, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Pembahasan Hasil Rapat masing-masing Direksi dengan Pihak Eksternal 4. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 5. Pembahasan Hasil Rapat masing-masing Direksi dengan Pihak Eksternal 6. Pembahasan perihal Anak Usaha 7. Lainnya 1. Progress Update on Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Discussion on Meeting Results of Each Board of Directors' Member with External Parties 4. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 5. Discussion on Meeting Results of Each Board of Directors' Member with External Parties 6. Discussion of Subsidiaries 7. Others

Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Direksi

Agenda and Schedule of Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
10	13 Juni 2025 June 13, 2025	1. Pembahasan Materi Pra RUPS Tahunan 2025 2. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 3. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 4. Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 5. Pembahasan Agenda RUPS Tahunan 6. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 7. Pembahasan Hasil Rapat Masing-masing Direksi dengan Pihak Eksternal 8. Pembahasan perihal Anak Usaha 9. Lainnya 1. Discussion of Pre-AGMS Material 2025 2. Progress Update on the Company's Strategic Projects 3. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 4. Follow-up to the Previous Board of Directors' Meeting 5. Discussion of the Annual GMS Agenda Items 6. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 7. Discussion of the Meeting Results of Each Board of Directors's Member with External Parties 8. Discussion of Subsidiaries 9. Others
11	18 Juli 2025 July 18, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 4. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 5. Pembahasan perihal Anak Usaha 6. Lainnya 1. Progress Update on the Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Follow-up to the Previous Board of Directors' Meeting 4. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 5. Discussion of Subsidiaries 6. Others
12	24 Juli 2025 July 24, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 4. Pembahasan Hasil Rapat Masing-masing Direksi dengan Pihak Eksternal 5. Pembahasan perihal Anak Usaha 6. Lainnya 1. Progress Update on the Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 4. Discussion of Meeting Results of Each Board of Directors' Member with External Parties 5. Discussion on Subsidiaries 6. Others
13	07 Agustus 2025 August 07, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 4. Pembahasan Rencana Rapat BOD BOC SRO 5. Pembahasan perihal Anak Usaha 6. Lainnya 1. Progress Update on the Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 4. Discussion of SRO's BOD BOC Meeting Plan 5. Discussion on Subsidiaries 6. Others
14	20 Agustus 2025 August 20, 2025	1. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 2. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 3. Lainnya 1. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 2. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 3. Others
15	02 September 2025 September 02, 2025	1. Pembahasan Hasil Rapat Masing-masing Direksi dengan Pihak Eksternal 2. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 3. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 4. Lainnya 1. Discussion of Meeting Results of Each Board of Directors' Member with External Parties 2. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 3. Progress Update on the Company's Strategic Projects 4. Others

Laporan Keuangan
Consolidated FinancialTanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social ResponsibilityTata Kelola Perusahaan
Good Corporate GovernanceTinjauan Pendukung Bisnis
Business Support OverviewAnalisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and AnalysisProfil Perusahaan
Company ProfileLaporan Manajemen
Management ReportsIkhtisar Utama
Highlights

Agenda dan Waktu Pelaksanaan Rapat Direksi

Agenda and Schedule of Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
16	27 September 2025 September 27, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 4. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 5. <i>Update</i> mengenai Laporan Keuangan 6. Lainnya 1. Progress Update on Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Follow-up to the Previous Board of Directors' Meeting 4. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 5. Update on Financial Statements 6. Others
17	07 Oktober 2025 October 07, 2025	1. <i>Progress Update</i> atas Proyek Strategis Perusahaan 2. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 3. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 4. Pembahasan <i>Induction</i> Program Pemegang Saham Baru 5. Pembahasan perihal Anak Usaha 6. Lainnya 1. Progress Update on Company's Strategic Projects 2. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 3. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 4. Discussion on New Shareholder's Induction Program 5. Discussion on Subsidiaries 6. Others
18	22 Oktober 2025 October 22, 2025	1. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan non-Operasional masing-masing Direktorat 2. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 3. Tindak lanjut Rapat Direksi sebelumnya 4. Pembahasan perihal Anak Usaha 5. Lainnya 1. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 2. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 3. Follow-up to the Previous Board of Directors' Meeting 4. Discussion on Subsidiaries 5. Others
19	06 November 2025 November 06, 2025	1. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 2. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 3. Tindak lanjut Rapat Direksi sebelumnya 4. Pembahasan perihal Anak Usaha Lainnya 1. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 2. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 3. Follow-up to the previous Board of Directors' Meeting 4. Discussion on Other Subsidiaries
20	19 November 2025 November 19, 2025	1. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 2. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Rapat BOD BOC KPEI 3. Tindak Lanjut Rapat Direksi Sebelumnya 4. Lainnya 1. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 2. Discussion on Follow-up to IDClear's BOD BOC Meeting Directives 3. Follow-up to the previous Board of Directors' Meeting 4. Others
21	18 Desember 2025 December 18, 2025	1. <i>Update</i> Mengenai Kegiatan Operasional dan Non-Operasional masing-masing Direktorat 2. Tindak lanjut Rapat Direksi sebelumnya 3. Lainnya 1. Update on Operational and Non-Operational Activities of Each Directorate 2. Follow-up to the previous Board of Directors' Meeting 3. Others

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Di tahun 2024, Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 17 kali. Informasi frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2024, a total of 17 Joint Meetings with the Board of Commissioners were held. The frequency and attendance rate of the Board of Directors in these Joint Meetings with the Board of Commissioners are as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi pada Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors in Joint Meetings with the Board of Commissioners

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Rapat Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Iding Pardi	Direktur Utama President Director	17	17	100%
2	Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	17	17	100%
3	Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	17	17	100%

Selain rapat dengan pengurus Perusahaan, Direksi menghadiri RUPS Perusahaan tahun 2024 dengan informasi sebagai berikut:

In addition to meetings with the Company's management, the Board of Directors attended the Company's 2024 GMS with the following details

No.	Tanggal Date	RUPS Tahun 2024X 2024 GMS	Kehadiran Attendance		
			Iding Pardi	Antonius Herman Azwar	Umi Kulsum
1	24 Juni 2024 June 24, 2024	RUPS Tahunan Annual GMS	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present
2	17 September 2024 September 17, 2024	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present
3	21 Oktober 2024 October 21, 2024	RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS	Hadir Present	Hadir Present	Hadir Present
Jumlah Kehadiran Number of Attendance			3	3	3
Tingkat Kehadiran Attendance Level			3	3	3

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATED RELATIONSHIPS BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND THE COMPANY'S MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

The affiliated relationships among members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and the Company's Major and/or Controlling Shareholders are detailed as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners													
Hoesen	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ronald Waas	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Direksi Board of Directors													
Iding Pardi	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support		✓		✓		✓		✓		✓		✓

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi lengkap mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel berikut:

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS HELD BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Comprehensive information on concurrent positions held by the Board of Commissioners and the Board of Directors as of December 31, 2024, is presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	
		Posisi Position	Nama Perusahaan/Instansi Company/Institution Name
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Hoesen	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris 2024 – sekarang Commissioner 2024 – present	PT Central Financial X
		Komisaris Independen (Komite Audit) 2023 – sekarang Independent Commissioner (Audit Committee) 2023 – present	PT Samudera Indonesia (SMDR) Tbk
		Komisaris Utama dan Independen (Komite Audit) 2023 – sekarang President Commissioner and Independent Commissioner (Audit Committee) 2023 – present	PT Mandiri Sekuritas
		Komisaris Independen (Komite Audit) 2022 – sekarang Independent Commissioner (Audit Committee) 2022 – present	PT Sawit Sumbermas Sarana (SMSS) Tbk
Ronald Waas	Komisaris Commissioner	Komisaris Independen 2020 – sekarang Independent Commissioner 2020 – present	PT Mastersystems Infotama
		Komisaris Independen 2018 – sekarang Independent Commissioner 2018 – present	PT Asuransi Bintang Tbk
		Komisaris, 2017 – sekarang Commissioner, 2017 – present	PT Solusi Pasti Indonesia
		Komisaris 2017 – sekarang Commissioner 2017 – present	PT Kredit Biro Indonesia Jaya
		Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen 2017 – sekarang President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner 2017 – present	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk

Nama Name	Jabatan Position	Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	
		Posisi Position	Nama Perusahaan/Instansi Company/Institution Name
Uriep Budhi Prasetyo	Komisaris Commissioner	Komisaris Independen 2023 – sekarang Independent Commissioner 2023 – present	PT Mirae Asset Sekuritas
		Komisaris Independen 2023 – sekarang Independent Commissioner 2023 – present	PT Satu Visi Putra Tbk
		Komisaris Independen 2023 – sekarang Independent Commissioner 2023 – present	PT Dana Brata Luhur Tbk
Direksi Board of Directors			
Iding Pardi	Direktur Utama President Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	Tidak ada None	Tidak ada None
Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	Tidak ada None	Tidak ada None

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

KPEI merupakan SRO pasar modal Indonesia yang 100% sahamnya dimiliki oleh BEI dan tidak diperdagangkan untuk publik, sehingga tidak ada kepemilikan saham KPEI oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan praktik kepemilikan saham emiten oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi KPEI tidak diperbolehkan oleh peraturan regulator dan Perusahaan masih menyiapkan kebijakan pendukung untuk mengatur hal tersebut.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

KPEI menerapkan kebijakan keberagaman anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui komitmen dan praktik yang mengutamakan kualifikasi berdasarkan kompetensi dan latar belakang profesional, dalam proses nominasi anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Sebagai wujud kebijakan keberagaman dan kesetaraan kesempatan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris KPEI yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang, mempunyai beragam latar belakang pendidikan dan profesional, terdapat beragam keyakinan agama, dan satu di antaranya adalah wanita.

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP INFORMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

IDCclear is a Self-Regulatory Organization (SRO) in the Indonesian capital market, with 100% of its shares owned by IDX and not publicly traded. Therefore, there is no share ownership in IDCclear by members of the Board of Directors or Board of Commissioners. Furthermore, ownership of listed company shares by members of IDCclear's Board of Commissioners and Board of Directors is prohibited under regulatory provisions. The Company is currently in the process of developing supporting policies to regulate this matter.

POLICY ON DIVERSITY OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

IDCclear implements a diversity policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a commitment to qualifications based on competence and professional background in its nomination process. As a reflection of this diversity and equal opportunity policy, the 6 (six) members of IDCclear's Board of Directors and Board of Commissioners come from diverse educational and professional backgrounds, represent different religious beliefs, and include one female member.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris KPEI memiliki kewenangan untuk membentuk organ pendukung guna membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hingga akhir tahun 2024, Dewan Komisaris KPEI telah membentuk dua organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

In accordance with prevailing regulations, IDClear's Board of Commissioners holds the authority to establish supporting bodies to assist in carrying out its duties and responsibilities, and to ensure compliance with laws and regulations. As of the end of 2024, the Board of Commissioners of IDClear has established two supporting bodies: the Secretary to the Board of Commissioners and the Audit Committee.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam mendukung kelancaran aspek administrasi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris menunjuk seorang Sekretaris. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan rekomendasi dan/atau usulan dari Dewan Komisaris.

To support the smooth administration of all activities related to the Board of Commissioners in fulfilling its duties and responsibilities, the Board of Commissioners appoints a Secretary. The Secretary to the Board of Commissioners is appointed by the Board of Directors based on the recommendation and/or proposal of the Board of Commissioners.

Dasar Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris

Basis of Appointment for the Secretary to the Board of Commissioners

1. Sekretaris Dewan Komisaris dibentuk dan diangkat oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan (SK). Dengan demikian Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai hubungan langsung dengan, dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya.
2. Dewan Komisaris meminta Sekretaris Dewan Komisaris mengelola tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai Dewan Komisaris.

1. The Secretary to the Board of Commissioners is established and appointed by the Board of Commissioners through an official Decision Letter. As such, the Secretary of the Board of Commissioners reports directly to and is accountable to the Board of Commissioners in carrying out its functions.
2. The Board of Commissioners assigns the Secretary of the Board of Commissioners to manage administrative and secretarial duties related to all activities of the Board of Commissioners in executing its functions and roles.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary Profile of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun buku 2024, posisi Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Budiono. Adapun profil lengkapnya sebagai berikut:

Throughout the 2024 financial year, the position of Secretary to the Board of Commissioners was held by Budiono. The complete profile is as follows:

Budiono
Periode dan Masa Jabatan: 2023 – 2025
Period and Term of Office: 2023-2025

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 61 tahun

Personal Data
Indonesian Citizen
61 years old

Domisili
Bogor

Domicile
Bogor

Dasar Hukum Pengangkatan
Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-001/DEKOM/XI/2018 tanggal 1 November 2018.

Legal Basis of Appointment
Appointed Secretary to the Board of Commissioners by Board of Commissioners Decision No. SK-001/DEKOM/XI/2018 dated November 1, 2018.

Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi
Sarjana Strata 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Educational Background and Certifications
Bachelor's Degree, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Kerja
• Kepala Unit Dokumen Kliring KPEI (1997 – 2006)
• Kepala Unit Urusan Umum KPEI (2006 – 2014)
• Pemeriksa Senior Audit Internal KPEI (2014 – 2018)

Professional Background
• Head of Clearing Documents Unit at IDCclear (1997 – 2006)
• Head of General Affairs Unit at IDCclear (2006 – 2014)
• Senior Internal Audit Examiner at IDCclear (2014 – 2018)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik langsung dan tidak langsung dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama

Affiliation
No affiliation both directly and indirectly with the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and main shareholders

Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan memiliki peran serta tanggung jawab utama sebagai berikut:

1. Membuat dan mendistribusikan risalah rapat Dewan Komisaris kepada pihak terkait.
2. Mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan pemanggilan dan bahan rapat Dewan Komisaris kepada para peserta rapat.
3. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan administrasi untuk kepentingan Dewan Komisaris.

Evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah berakhirnya tahun buku.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2024

Pada tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Membuat dan mendistribusikan risalah rapat Dewan Komisaris kepada pihak terkait.
2. Mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan pemanggilan dan bahan rapat Dewan Komisaris kepada para peserta rapat.
3. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan dan administrasi untuk kepentingan Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Pembentukan Komite Audit KPEI berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite ini bertugas mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi dan jajaran terkait. Tugas utamanya meliputi memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, menjaga kualitas serta keandalan laporan keuangan, memastikan audit internal maupun

Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners is responsible to and reports to the Board of Commissioners, and has the following duties and responsibilities:

1. Recording and distributing the minutes of the Board of Commissioners' meeting to related parties.
2. Representing the Board of Commissioners in conveying invitations and materials for the Board of Commissioners meeting to the meeting participants.
3. Performing secretarial and administrative activities for the benefit of the Board of Commissioners.

The performance of the Secretary to the Board of Commissioners is evaluated by the Board of Commissioners at the end of each financial year.

Implementation of Duties by the Secretary to the Board of Commissioners in 2024

In 2024, the Secretary to the Board of Commissioners carried out various activities related to the duties and responsibilities, including:

1. Preparing and distributing the minutes of the Board of Commissioners' meetings to relevant parties.
2. Representing the Board of Commissioners in delivering meeting invitations and materials to the meeting participants.
3. Organizing secretarial and administrative activities for the benefit of the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE

The establishment of IDCclear's Audit Committee is based on OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 on the Establishment and Work Guidelines of Audit Committees. The committee is tasked with supporting the Board of Commissioners in supervising the management of the Company by the Board of Directors and related executives. Its main duties include ensuring the effectiveness of the internal-control system, maintaining the quality and

eksternal dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit memiliki wewenang untuk memberikan pendapat yang objektif, profesional, dan independen kepada Dewan Komisaris terkait laporan atau isu yang disampaikan oleh Direksi. Selain itu, komite ini juga bertugas mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian segera dari Dewan Komisaris, serta melaksanakan tugas lain yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit KPEI telah memiliki Piagam yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini secara rutin ditinjau dan diperbarui oleh Komite Audit KPEI bersama dengan Komite Audit SRO lainnya, guna memastikan keselarasan dengan perkembangan pasar modal dan regulasi terkait. Piagam Komite Audit yang berlaku saat ini telah diperbarui dan disahkan pada tanggal Desember 2023.

Kriteria Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Integritas

- Memiliki akhlak, moral yang baik, tanggung jawab profesi yang tinggi, memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab secara optimal.

2. Persyaratan Independensi

- Bukan merupakan pihak internal Kantor Akuntan Publik yang menjadi Auditor Eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak Lain yang memberi Jasa Audit, Jasa Non Audit, Jasa Hukum dan/ atau Jasa Konsultasi lain pada Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris;
- Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

3. Persyaratan Kompetensi

- Paling sedikit satu orang dari anggota Komite harus memiliki Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman dalam Bidang Keuangan dan Akuntansi;

reliability of financial statements, making sure internal and external audits are conducted in accordance with applicable procedures and provisions, and ensuring the Company's compliance with prevailing laws and regulations.

The Audit Committee has the authority to provide objective, professional, and independent opinions to the Board of Commissioners regarding reports or issues submitted by the Board of Directors. In addition, the committee is responsible for identifying matters that require the Board of Commissioners' immediate attention and undertaking other tasks that support the Board of Commissioners' supervisory function.

Audit Committee Charter

IDClear's Audit Committee has a Charter that serves as the guiding framework for carrying out its duties and responsibilities. The Charter is regularly reviewed and updated by IDClear's Audit Committee together with the other SRO Audit Committees to ensure alignment with capital-market developments and related regulations. The current Audit Committee Charter was revised and approved in December 2023.

Audit Committee Criteria

The membership requirements of the Audit Committee are as follows:

1. Integrity Requirements

- Possessing good character and morals, a high sense of professional responsibility, and a strong commitment of time and effort to perform duties and responsibilities optimally.

2. Independence Requirements

- Not being an internal party of a Public Accounting Firm that serves as the Company's External Auditor, a Law Firm, or any other party providing Audit, Non-Audit, Legal, and/or other Consulting services to the Company within the last 6 (six) months before appointment by the Board of Commissioners;
- Not being a person who had the authority and responsibility to plan, lead, and control the Company's activities within the last 6 (six) months before appointment by the Board of Commissioners;
- Not having any direct or indirect business relationship related to the Company's business activities, unless otherwise determined by the Board of Commissioners; and
- Not having any family relationship by marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

3. Competency Requirements

- Having at least one committee member with an educational background and experience in finance and accounting;

- b. Pernah memiliki Pengalaman Kerja dibidang Pengawasan atau Pemeriksaan dan atau Pengalaman Praktis pada tingkat Manajerial di entitas usaha yang memungkinkan fungsinya sebagai Komite Audit dilaksanakan dengan optimal;
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami dan menginterpretasikan Laporan Keuangan;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan;
- e. Memiliki pengetahuan mengenai; proses bisnis, Standar Akuntansi, Konsep Audit, Konsep Manajemen Risiko dan Pengendalian, terkait Perseroan;
- f. Memiliki pemahaman terhadap tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit;
- g. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- h. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasi.

- b. Having prior work experience in supervision or auditing and/or practical managerial experience within a business entity that enables the Audit Committee's role to be performed optimally;
- c. Possessing sufficient knowledge to understand and interpret financial statements;
- d. Possessing adequate knowledge of the laws and regulations in the capital-market sector and other regulations relevant to the Company's operations;
- e. Understanding the Company's business processes, accounting standards, audit concepts, and risk-management and control concepts;
- f. Understanding the duties, responsibilities, and authority of the Audit Committee;
- g. Possessing adequate understanding of good corporate governance; and
- h. Having strong communication skills to convey opinions and recommendations effectively.

Komposisi Komite Audit

Komite Audit terdiri dari setidaknya 3 (tiga) anggota yang dipimpin oleh seorang Komisaris Perusahaan. Anggota lainnya berasal dari Komisaris Perusahaan serta pihak eksternal independen yang tidak terafiliasi sebagai karyawan dalam satu tahun terakhir. Setidaknya 1 (satu) anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan.

Pada tahun 2024, terjadi perubahan dalam susunan Dewan Komisaris, menyusul berakhirnya masa jabatan 2 (dua) orang Komisaris yang juga berperan sebagai Ketua dan anggota Komite Audit. Selain itu, terdapat penggantian anggota Komite Audit yang berasal dari pihak eksternal independen. Dengan demikian, struktur dan komposisi Komite Audit juga mengalami perubahan yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Audit Committee Composition

The Audit Committee comprises at least three (3) members and is chaired by one of the Company's Board of Commissioners. The other members consist of another Commissioner and an independent external party who has not been employed by the Company within the past year. At least 1 (one) Audit Committee member must have an educational background and expertise in accounting or finance.

In 2024, the composition of the Board of Commissioners changed following the end of the term of office of two Commissioners who also served as the Chair and a member of the Audit Committee. In addition, the independent external member of the Audit Committee was replaced. Accordingly, the Audit Committee's structure and composition were adjusted, as detailed below.

No	Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jabatan di KPEI Position in IDCLEAR	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Hukum Pengangkatan sebagai Komite Audit Legal Basis of Appointment as Audit Committee
1	Ronald Waas	Ketua (merangkap Komisaris) Chair (concurrently serving as Commissioner)	Komisaris Commissioner	2023-2027, Periode Ke-1 First Period	SK-003/DEKOM/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023 SK-003/DEKOM/VII/2023 dated July 30, 2023
2	Uriep Budhi Prasetyo	Anggota (merangkap Komisaris) Member (concurrently serving as Commissioner)	Komisaris Commissioner	2023-2027, Periode Ke-1 First Period	SK-003/DEKOM/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023 SK-003/DEKOM/VII/2023 dated July 30, 2023
3	Arini Imamawati	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	2023-2027, Periode ke-1 First Period	SK-003/DEKOM/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023 SK-003/DEKOM/VII/2023 dated July 30, 2023
4	Arif M. Prawirawinata	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	2023-2027, Periode ke-1 First Period	SK-003/DEKOM/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023 SK-003/DEKOM/VII/2023 dated July 30, 2023

Profil Komite Audit

Informasi mengenai profil anggota Komite Audit KPEI yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dapat ditemukan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam laporan ini. Adapun profil anggota Komite Audit lainnya disajikan sebagai berikut:

Profile of Audit Committee

Information regarding the profiles of IDClear's Audit Committee members who also serve as members of the Board of Commissioners can be found in the Board of Commissioners Profile section of this report. Meanwhile, the profiles of the other Audit Committee members are presented as follows:

Arini Imamawati
Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Periode Dan Masa Jabatan: 2023 – 2027
 Member of Audit Committee/Independent Party
 Period and Term of Office: 2023 – 2027

Data Pribadi Warga Negara Indonesia Usia 47 tahun	Personal Data Indonesian Citizen 47 years old
Domisili Tangerang Selatan	Domicile South Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Dekom PT KPEI No. SK-003/DEKOM/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 perihal Pembaruan Struktur dan Anggota Komite Audit PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Legal Basis of Appointment Decision Letter of the Board of Commissioners of IDClear No. SK-003/DEKOM/VII/2023 dated July 30, 2023, on the Renewal of the Structure and Members of the Audit Committee of IDClear
Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi Profesi - Magister Manajemen jurusan Business Management dari Prasetya Mulya Business School (2012) - Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti - Certification in Audit Committee Practices (CACP)	Educational Background and Professional Certifications - Master of Management in Business Management from Prasetya Mulya Business School (2012) - Bachelor of Economics from Universitas Trisakti - Certification in Audit Committee Practices (CACP)
Pengalaman Kerja - Audit Committee Member, PT Bank ICBC Indonesia (2021 – 2023) - Financial Controller, PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance)- A Member of TMT Group (2021) - Head of Finance, PT Danareksa (Persero) (2018 – 2021) - Head of Internal Audit, PT Danareksa (Persero) (2014 – 2018) - Audit Committee Member, PT Dahana (Persero) (2014) - Audit Committee Member, PT Danareksa (Persero) (2009 – 2014) - Audit Committee Member, PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010 – 2013) - Audit Manager, KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja - Member of Ernst & Young Global Assurance and Advisory Business Service (2007 – 2009) - Accounting & Administration Manager, PT Flowserve (Indonesia) – A Subsidiary of Flowserve Corporation, USA (2005 – 2006) - Senior Auditor, KAP Haryanto Sahari & Rekan- Member of PricewaterhouseCoopers, Registered Public Accountants – Assurance and Business Advisory Service (2000 – 2005)	Professional Background - Audit Committee Member at PT Bank ICBC Indonesia (2021 – 2023) - Financial Controller at PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) – A Member of TMT Group (2021) - Head of Finance at PT Danareksa (Persero) (2018 – 2021) - Head of Internal Audit at PT Danareksa (Persero) (2014 – 2018) - Audit Committee Member at PT Dahana (Persero) (2014) - Audit Committee Member at PT Danareksa (Persero) (2009 – 2014) - Audit Committee Member at PT Bank ICB Bumiputera Tbk (2010 – 2013) - Audit Manager at KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja – Member of Ernst & Young Global Assurance and Advisory Business Service (2007 – 2009) - Accounting & Administration Manager at PT Flowserve (Indonesia) – A Subsidiary of Flowserve Corporation, USA (2005 – 2006) - Senior Auditor at KAP Haryanto Sahari & Rekan – Member of PricewaterhouseCoopers, Registered Public Accountants – Assurance and Business Advisory Service (2000 – 2005)
Rangkap Jabatan - Independent Commissioner & Chairwoman of Nomination and Remuneration Committee, PT Wicaksana Overseas International Tbk (2023 – sekarang) - Audit Committee Member & Risk and Governance Committee Member, PT Mandiri Sekuritas (2023 – sekarang) - Audit Committee Member, PT ITSEC Asia (2023 – sekarang) - Audit Committee Member, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (2022 – sekarang)	Concurrent Position - Independent Commissioner & Chairwoman of Nomination and Remuneration Committee at PT Wicaksana Overseas International Tbk (2023 – present) - Audit Committee Member & Risk and Governance Committee Member at PT Mandiri Sekuritas (2023 – present) - Audit Committee Member at PT ITSEC Asia (2023 – present) - Audit Committee Member at PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (2022 – present)

Arif M. Prawirawinata
Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Periode dan Masa Jabatan: 2023 – 2027
 Member of Audit Committee/ Independent Party
 Period and Term of Office: 2023 – 2027

Data Pribadi Warga Negara Indonesia Usia 58 tahun	Personal Data Indonesian Citizen 58 years old
Domisili Bekasi	Domicile Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Dekom PT KPEI No. SK-003/DEKOM/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 perihal Pembaharuan Struktur dan Anggota Komite Audit PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Legal Basis of Appointment Decision Letter of the Board of Commissioners of IDClear No. SK-003/DEKOM/VII/2023 dated July 30, 2023, on the Renewal of the Structure and Members of the Audit Committee of IDClear
Riwayat Pendidikan dan Sertifikasi Profesi - Magister Manajemen jurusan Finance dari Universitas Trisakti (2005) - Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (1992) - Register Negara Akuntan No. RNA 13185 - Chartered Accountant, CA Indonesia, No. 11.D11027 - Qualified Internal Auditor (QIA), ID No.: 5925/QIA/2020	Educational Background and Professional Certification - Master of Management in Finance from Universitas Trisakti (2005) - Bachelor of Economics in Accounting, Universitas Indonesia (1992) - Registered Public Accountant No. RNA 13185 - Chartered Accountant, CA Indonesia, No. 11.D11027 - Qualified Internal Auditor (QIA), ID No.: 5925/QIA/2020
Pengalaman Kerja - Executive Advisor - Risk Management Specialist, PT Bursa Efek Indonesia (2019 – 2022) - Head of Internal Audit, PT Bursa Efek Indonesia (2017 – 2019) - Head of Accounting Division, PT Bursa Efek Indonesia (2015 – 2017) - Head of Non-group Listing Division, PT Bursa Efek Indonesia (2014 – 2015) - Head of Evaluation and Monitoring Unit, PT Bursa Efek Indonesia (2006 – 2014) - Head of Trade Monitoring Unit, PT Bursa Efek Jakarta (2000 – 2006) - Staff of Surveillance Division, PT Bursa Efek Jakarta (1997 – 2000) - Assistant of Business Development Director, PT Prizaco Prakarsa (1995 – 1997) - Audit Manager, KAP Drs. Gatot Permadi Joewono (1993 – 1995) - Auditor/Consultant, KAP Drs. Gatot Permadi Joewono (1990 – 1993)	Professional Background - Executive Advisor - Risk Management Specialist at IDX (2019 – 2022) - Head of Internal Audit at IDX (2017 – 2019) - Head of Accounting Division at IDX (2015 – 2017) - Head of Non-group Listing Division at IDX (2014 – 2015) - Head of Evaluation and Monitoring Unit at IDX (2006 – 2014) - Head of Trade Monitoring Unit at IDX (2000 – 2006) - Staff of Surveillance Division at IDX (1997 – 2000) - Assistant of Business Development Director at PT Prizaco Prakarsa (1995 – 1997) - Audit Manager at KAP Drs. Gatot Permadi Joewono (1993 – 1995) - Auditor/Consultant at KAP Drs. Gatot Permadi Joewono (1990 – 1993)
Riwayat Organisasi Anggota Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022 – 2027)	Organizational Background Member of the Council for Assembly on Economy, Business, and Tourism, Central Leadership of Muhammadiyah (2022 – 2027)
Rangkap Jabatan - Audit Committee Member, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (2023 – sekarang) - Audit Committee Member, PT Satu Visi Putra Tbk (2023 – sekarang) - Audit Committee Member, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (2023 – sekarang) - Part-Time Lecturer, PT Indonesia Capital Market Institute (2022 – sekarang)	Concurrent Position - Audit Committee Member at PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (2023 – present) - Audit Committee Member at PT Satu Visi Putra Tbk (2023 – present) - Audit Committee Member at PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (2023 – present) - Part-Time Lecturer at PT Indonesia Capital Market Institute (2022 – present)

Independensi Komite Audit

Semua anggota Komite Audit telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional dan independen, tanpa adanya pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Komitmen terhadap independensi ini tercermin melalui pengangkatan anggota komite yang berasal dari pihak independen di luar Perusahaan. Pemenuhan kriteria independensi oleh anggota Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut.

Independence of the Audit Committee

All Audit Committee members have committed to performing their duties professionally and independently, without any influence or interference from any party, always prioritizing the Company's interests above personal or group interests. This commitment to independence is reflected in the appointment of committee members from independent external parties outside the Company. The fulfillment of independence criteria by the Audit Committee members is presented in the following table.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Ronald Waas	Uriep B. Prasetyo	Arini Imamawati	Arif M. Prawirawinata
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi KPEI Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors of IDClear	✓	✓	✓	✓

Kriteria Independensi Independence Criteria	Ronald Waas	Uriep B. Prasetyo	Arini Imamawati	Arif M. Prawirawinata
Tidak memiliki hubungan kepengurusan (rangkap jabatan) di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi Has no management relationship (concurrent positions) in the Company, Subsidiaries or Affiliated Companies	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Has no share ownership relationship in the Company	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau anggota Komite Audit Has no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or other members of the Audit Committee	✓	✓	✓	✓
Tidak menjadi pimpinan maupun karyawan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit Laporan Keuangan KPEI, dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris Has not been a leader or employee of a Public Accountant Firm that has audited IDCLEAR Financial Statements, within the last six months before being appointed by the Board of Commissioners.	✓	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sebagai pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit KPEI mempunyai cakupan tugas dan tanggung jawab yang komprehensif dalam memastikan pengelolaan usaha dijalankan sesuai peraturan hukum dan perundangan, dan sesuai dengan arah dan tujuan Perusahaan dalam Anggaran Dasar.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit tercantum dalam Piagam komite. Dan untuk lebih mengoptimalkan kinerja, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dibagi menjadi beberapa fokus kerja, yaitu:

1. Tugas dan tanggung jawab terkait Kegiatan Operasional dan Pelaporan Informasi Keuangan
2. Tugas dan tanggung jawab terkait Audit Internal
3. Tugas dan tanggung jawab terkait Manajemen Risiko
4. Tugas dan tanggung jawab terkait Pengendalian Internal
5. Tugas dan tanggung jawab terkait Audit Eksternal
6. Tugas dan tanggung jawab terkait kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan
7. Tugas dan tanggung jawab terkait Benturan Kepentingan dan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)
8. Tugas menjaga praktik Tata Kelola Perusahaan
9. Tugas khusus

Tugas dan tanggung jawab terkait Kegiatan Operasional dan Pelaporan Informasi Keuangan terdiri dari:

1. Melakukan diskusi dengan manajemen mengenai:
 - a. Pengendalian internal (*internal control*) terkait penyusunan laporan keuangan;
 - b. Kesesuaian kebijakan akuntansi Perusahaan dengan standar akuntansi yang berlaku umum;
 - c. Menelaah transaksi yang besarnya signifikan/material yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau yang terafiliasi dengan Perusahaan (jika ada); dan
 - d. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

To support the supervisory function of the Board of Commissioners, the IDCLEAR Audit Committee has a comprehensive scope of duties and responsibilities to ensure that business management is conducted following legal regulations and provisions, as well as in line with the direction and objectives of the Company's Articles of Association.

The duties and responsibilities of the Audit Committee are outlined in the Charter of the Committee. To further optimize its performance, the duties and responsibilities of the Audit Committee are divided into several areas of focus, namely:

1. Duties and Responsibilities related to Operational Activities and Reporting of Financial Information
2. Duties and Responsibilities related to Internal Audit
3. Duties and Responsibilities related to Risk Management
4. Duties and Responsibilities related to Internal Control
5. Duties and Responsibilities related to External Audit
6. Duties and Responsibilities related to Compliance with Laws and Regulations
7. Duties and Responsibilities related to Conflict of Interest and Fraud Reporting (*Whistleblowing System*)
8. Duties to Maintain Corporate Governance Practices
9. Specific Duties

The duties and responsibilities related to Operational Activities and Reporting of Financial Information consist of:

1. Conducting discussions with the management regarding:
 - a. Internal control related to the preparation of financial statements;
 - b. Conformity with the Company's accounting policies with generally accepted accounting standards;
 - c. Reviewing significant/material transactions conducted by the Company with parties with special relationships or are affiliated with the Company (if any); and
 - d. Improving the quality of disclosure of financial and/or non-financial reporting.

2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti:
 - a. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAT).
 - b. Laporan keuangan: Tengah Tahunan dan Tahunan.
 - c. Laporan Triwulanan Realisasi Anggaran dan Penggunaan Laba.
 - d. Informasi keuangan lainnya.
3. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
4. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non-keuangan.

Tugas dan tanggung jawab terkait Audit Internal terdiri dari:

1. Melakukan diskusi dengan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) mengenai temuan-temuan dan isu-isu pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan maupun hasil kajian mereka terhadap laporan keuangan Perseroan.
2. Mengawasi proses audit untuk memastikan bahwa tidak terjadi pembatasan terhadap lingkup audit.
3. Menelaah temuan audit dan tanggapan manajemen terhadap temuan tersebut, dan mengawasi proses tindak lanjut atas hasil temuan tersebut.
4. Dalam hal temuan audit tidak ditindaklanjuti, Komite Audit harus menanyakan alasan keputusan tersebut dan menilai risiko atas tidak ditindaklanjutinya temuan tersebut untuk dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.
5. Melakukan evaluasi kualitas dan kecukupan sumber daya audit internal.
6. Melakukan penilaian kinerja dan efektivitas audit internal, antara lain melalui diskusi dengan manajemen dan SPI mengenai temuan-temuan dan isu-isu pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan, maupun hasil kajian Komite Audit terhadap Laporan Keuangan.
7. Mengkaji dan menyetujui rencana, fungsi internal audit, termasuk memberikan rekomendasi perubahan terhadap rencana audit jika memang diperlukan.
8. Menelaah isi Piagam SPI dan Pedoman GCG.

Tugas dan tanggung jawab terkait Manajemen Risiko, terdiri dari:

1. Memahami seluruh risiko utama Perusahaan, khususnya risiko proses pelaporan keuangan.
2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh manajemen
3. Dalam pelaksanaan proses evaluasi tersebut, Komite Audit:
 - a. Berhak memperoleh laporan manajemen risiko Perseroan secara berkala; dan
 - b. Melakukan diskusi dalam bentuk rapat berkala terkait: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian untuk memitigasi risiko, pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian risiko.

2. Reviewing the financial information to be issued by the Company, such as:
 - a. Reviewing and providing recommendations on the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAT).
 - b. Financial Statements: Semi-Annual and Annual.
 - c. Quarterly Report on Budget Realization and Use of Profit.
 - d. Other financial information.
3. Reviewing the complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes.
4. Improving the quality of disclosure of financial and/or non-financial reporting.

The duties and responsibilities related to Internal Audit include:

1. Conducting discussions with Internal Audit (SPI) regarding the findings and issues of internal control in the process of preparing financial statements as well as the results of their study of the Company's financial statements.
2. Supervising the audit process to ensure that there are no restrictions on the scope of the audit.
3. Reviewing the audit findings and management's response to these findings, and oversee the follow-up process on the findings.
4. In the event that the audit findings are not followed up, the Audit Committee must ask the reasons for the decision and assess the risk of not following up on the findings to be communicated to the Board of Commissioners.
5. Evaluating the quality and adequacy of internal audit resources.
6. Assessing the performance and effectiveness of the internal audit, among others through discussions with management and SPI regarding the findings and issues of internal control in the process of preparing financial statements, as well as the results of the Audit Committee's review of the Financial Statements.
7. Reviewing and approving plans, internal audit functions, including providing recommendations for changes to the audit plan if necessary.
8. Reviewing the contents of the SPI Charter and the GCG Guidelines.

The duties and responsibilities related to Risk Management include:

1. Understanding all the Company's main risks, in particular the risks of the financial reporting process.
2. Evaluating the effectiveness of risk management policies and implementations that have been determined and implemented by management.
3. In carrying out the evaluation process, the Audit Committee:
 - a. Entitled to obtain the Company's risk management reports on a regular basis; and
 - b. Conducts discussions in the form of regular meetings related to: risk identification, risk measurement, control to mitigate risk, monitoring of the implementation of risk control.

4. Memastikan kepada Unit Pemantauan dan Pelaporan Risiko Korporasi (PRK) apakah Prosedur Operasional Standar (POS) dan kebijakan Perseroan telah mengacu pada pedoman manajemen risiko.

Tugas dan tanggung jawab terkait Pengendalian Internal, terdiri dari:

1. Mengevaluasi kecukupan usaha manajemen dalam menjaga efektivitas pengendalian internal agar informasi keuangan dan operasional dapat diandalkan, proses operasi dapat dilakukan secara efisien dan sesuai tujuan, aset Perseroan dapat dilindungi, dan memastikan tindakan dan keputusan Perseroan telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam pelaksanaan proses evaluasi tersebut, Komite Audit:
 - a. Berhak memperoleh laporan audit internal secara berkala dari SPI untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal; dan
 - b. Melakukan diskusi dengan SPI terkait temuan-temuan audit yang berhubungan dengan pengendalian internal Perseroan, termasuk indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi Perseroan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melakukan tanggung jawab evaluasi pengendalian internal, Komite Audit terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hal-hal berikut:
 - a. Pedoman dan arahan yang telah disetujui oleh Direksi mengenai bagaimana aktivitas pengendalian internal di Perseroan harus dilakukan; dan
 - b. Perencanaan audit SPI telah menggunakan pendekatan *risk-based* audit.

Tugas dan tanggung jawab terkait Audit Eksternal, terdiri dari:

1. Melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi/usulan calon Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.
2. Dalam melakukan seleksi guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Auditor Eksternal, Komite Audit menelaah kompetensi, integritas dan independensi calon Auditor Eksternal.
3. Memberikan usulan mengenai harga jasa Auditor Eksternal.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Auditor Eksternal yang akan diusulkan pada RUPS.
Dalam hal penunjukan akuntan publik mengikuti BEI, Komite Audit turut melakukan seleksi dan berkoordinasi dengan BEI. Dalam hal penunjukan akuntan publik tidak mengikuti BEI, maka Komite Audit menyeleksi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan calon akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan mengenai ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, kompetensi, integritas, dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.

4. Ensuring the Enterprise Risk Monitoring and Reporting Unit (PRK) whether Standard Operating Procedures (SOP) and Company policies have referred to risk management guidelines.

The duties and responsibilities related to Internal Control include:

1. Evaluating the adequacy of management's efforts in maintaining the effectiveness of internal control so that financial and operational information is reliable, the operation process can be carried out efficiently and fits the objectives, the Company's assets can be protected, and ensuring that the Company's actions and decisions are following applicable laws and regulations. In carrying out the evaluation process, the Audit Committee:
 - a. Entitled to obtain periodic internal audit reports from SPI to identify possible internal control weaknesses; and
 - b. Conducting discussions with SPI regarding audit findings related to the Company's internal control, including indications of weaknesses in internal control, inefficiency of the Company's operations, and violations of applicable laws and regulations.
2. In carrying out the responsibility for evaluating internal control, the Audit Committee first evaluates the following:
 - a. guidelines and directions that have been approved by the Board of Directors regarding how the internal control activities in the Company should be implemented; and
 - b. SPI audit planning has used a risk-based audit approach.

The duties and responsibilities related to External Audit include:

1. Selecting and providing recommendations/proposals for prospective Public Accounting Firms (KAP) as External Auditors to audit the Company's financial statements.
2. In conducting the selection to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the External Auditor, the Audit Committee reviews the competence, integrity and independence of the candidate for the External Auditor.
3. Providing proposals regarding External Auditor's services fee.
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the External Auditor to be proposed at the GMS.
In terms of appointing a public accountant referring to the IDX, the Audit Committee also makes selection and coordinates with the IDX. In the event that the appointment of a public accountant does not refer to IDX, the Audit Committee selects and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a prospective public accountant who will audit the Company's financial statements, which is based on the provisions regarding the scope of assignment, service fees, competence, integrity, and the independence of public accountants prevailing in Indonesia.

5. Melakukan pertemuan dengan Auditor Eksternal untuk membahas;
 - a. Perencanaan dan lingkup audit.
 - b. Kejadian-kejadian yang memengaruhi laporan keuangan secara signifikan (*significant events*) yang terjadi selama periode audit, termasuk tuntutan hukum apabila ada.
 - c. Perubahan penggunaan standar akuntansi yang sifatnya kritis (berdampak material) yang diterapkan Perseroan.
 - d. Salah saji yang tidak dikoreksi manajemen dalam laporan keuangan dengan alasan tidak material.
 - e. Dugaan kecurangan dan penyimpangan peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan.
 - f. Hambatan dalam pelaksanaan audit.
 - g. Koreksi audit yang signifikan.
 - h. Temuan-temuan audit yang terangkum dalam *management letter*.
6. Memastikan akuntan publik Perusahaan menerapkan standar audit sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
8. Menelaah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal sebelum laporan keuangan.
9. Memfasilitasi keterbukaan komunikasi antara Auditor Eksternal, Manajemen, SPI dan Direksi.
10. Melakukan kajian (bersama dengan Auditor Eksternal) terhadap permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan audit. Termasuk juga memfasilitasi pemecahan masalah antara Auditor Eksternal dengan Manajemen jika terjadi perbedaan pendapat selama pelaksanaan audit. Perbedaan pendapat yang terjadi bisa berupa: penerapan standar akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan redaksi yang digunakan auditor dalam laporan audit.
11. Memastikan bahwa temuan-temuan audit ditindaklanjuti dan terdapat mekanisme yang efektif dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
12. Dalam hal temuan audit tidak ditindaklanjuti, Komite Audit harus meminta alasan keputusan tersebut dan menilai risiko atas tidak ditindaklanjutinya temuan tersebut untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
13. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor eksternal dan melaporkan kepada Dewan Komisaris.
14. Memberikan masukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas penggunaan jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Eksternal.
15. Memberikan usulan terkait dengan pemberhentian Auditor Eksternal apabila Auditor Eksternal tersebut dalam pelaksanaan tugasnya tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan, terdiri dari:

1. Melakukan pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berhubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan.

5. Conducting meeting with the External Auditor to discuss:
 - a. Audit planning and scope.
 - b. Events that significantly affect the financial statements that occurred during the audit period, including lawsuits if any.
 - c. Changes in the use of accounting standards that are critical (material impact) applied by the Company.
 - d. Misstatements that are not corrected by management in the financial statements for immaterial reasons.
 - e. Allegations of fraud and irregularities in laws and regulations by management or employees that result in material misstatements in the financial statements.
 - f. Obstacles in the implementation of the audit.
 - g. Significant audit corrections.
 - h. The audit findings summarized in the management letter.
6. Ensuring that the Company's public accountants apply audit standards following applicable regulations.
7. Analysing the adequacy of audits carried out by public accountants to ensure that all significant risks have been considered.
8. Reviewing the financial statements that have been audited by the External Auditor prior to the financial statements.
9. Facilitating open communication between the External Auditor, Management, SPI and the Board of Directors.
10. Conducting a study (together with the External Auditor) on problems that occurred during the audit. This includes facilitating problem-solving between the External Auditor and Management if there is a difference of opinion during the audit. Differences of opinion that occur can be in the form of: the application of accounting standards, the scope of the audit, disclosures in the financial statements and the editorial used by the auditor in the audit report.
11. Ensuring that audit findings are followed up and that there is an effective mechanism to follow up on these findings.
12. In the event that the audit findings are not followed up, the Audit Committee must ask for the reasons for the decision and assess the risk of not following up on the findings to be submitted to the Board of Commissioners.
13. Evaluating the performance of the external auditor and reporting to the Board of Commissioners.
14. Providing input to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the use of non-audit services that will be assigned to the External Auditor.
15. Providing proposals related to the dismissal of the External Auditor if the External Auditor in carrying out his duties does not meet the applicable standards and provisions.

The duties and responsibilities related to Compliance with Regulatory Laws include:

1. Conducting compliance supervision with laws and regulations related to the submission of Financial Statements.

2. Melakukan penelaahan atas pengaduan mengenai pelaporan keuangan.

Tugas dan tanggung jawab terkait Benturan Kepentingan dan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

1. Melakukan penelaahan pengaduan mengenai pelaporan keuangan.
2. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
3. Jika diminta oleh Dewan Komisaris, melakukan investigasi lanjutan terkait dengan pengaduan dan keluhan yang ditujukan ke Perusahaan.

Tugas menjaga praktik Tata Kelola Perusahaan, terdiri dari:

1. Berkoordinasi dengan SPI untuk mengetahui bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berkoordinasi dengan SPI untuk mengetahui terlaksananya budaya kepatuhan (*compliance culture*) pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha.
3. Berkoordinasi dengan SPI untuk mengetahui praktik-praktik tata kelola yang telah berjalan di Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan GCG *Implementation Roadmap*, serta memantau kemajuan pencapaiannya.

Tugas khusus dan tugas lainnya, meliputi;

1. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain:
 - a. Melakukan penelaahan terhadap semua pencatatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan, termasuk risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat tanya jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait.
 - c. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan SPI dan atau dengan akuntan publik.

Ketua dan Anggota Komite Audit adalah pihak yang independen terhadap manajemen perusahaan, tidak memiliki ikatan finansial, jabatan, afiliasi maupun hubungan usaha dengan perusahaan, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan obyektif.

Komite Audit memiliki wewenang dan tanggung jawab secara penuh untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka:

1. Menjaga kualitas pelaporan keuangan agar dapat diandalkan.
2. Memastikan efektivitas pengendalian internal.
3. Memastikan proses audit internal dan eksternal telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

2. Reviewing complaints regarding financial reporting.

Duties and Responsibilities related to Conflict of Interest and Fraud Reporting (*Whistleblowing System*).

1. Reviewing complaints regarding financial reporting.
2. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest.
3. If requested by the Board of Commissioners, carry out further investigations related to grievances and complaints addressed to the Company.

The duties to Maintain Corporate Governance Practices include:

1. Coordinating with SPI to find out that the policies, provisions, systems, and procedures as well as the business activities carried out are in accordance with the applicable laws and regulations.
2. Coordinating with SPI to determine the implementation of a compliance culture at all levels of the organization and business activities.
3. Coordinating with SPI to find out the governance practices that have been running in the Company based on the Corporate Governance Guidelines and GCG *Implementation Roadmap*, as well as monitor the progress of their achievements.

Specific duties and other duties include;

1. Carrying out specific duties assigned by the Board of Commissioners based on the applicable laws and regulations.
2. The implementation of Audit Committee-specific duties, among others:
 - a. Reviewing all necessary records, documents, and other information, including the minutes of meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 - b. Conveying questions to the Board of Directors and their staff, the results of which are stated in the minutes of the question-and-answer meeting signed by the relevant parties.
 - c. If deemed necessary, conducting an investigative audit carried out in collaboration with SPI and/or with a public accountant.

The Chair and members of the Audit Committee are independent of the Company's management: they hold no financial, positional, affiliate, or business ties with the Company and have no interests that could impair their ability to act autonomously and objectively.

The Audit Committee has full authority and responsibility to assist the Board of Commissioners in performing its oversight function by:

1. Maintaining the reliability of financial reporting;
2. Ensuring the effectiveness of internal controls;
3. Verifying that internal and external audit processes are conducted in accordance with established procedures and provisions; and

4. Menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan dokumen perusahaan,
2. Melakukan serangkaian pertemuan dan pembahasan berkala dengan beberapa pihak terkait, seperti Direksi, Dewan Komisaris, Kepala Divisi Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Korporasi (PSM), Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (KAK), dan Akuntan Publik atau eksternal auditor dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Kewenangan Komite Audit

Guna meningkatkan kualitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit, antara lain:

1. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan atau informasi mengenai karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memperoleh data, laporan, rangkuman laporan, dokumen, dan informasi keuangan serta informasi operasional Perusahaan lainnya atas nama Dewan Komisaris secara berkala yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian internal dan manajemen risiko, bekerja sama dengan fungsi internal audit dan manajemen risiko.
3. Dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian internal dan manajemen risiko, Komite Audit bekerja sama dengan fungsi internal audit dan manajemen risiko.
4. Komite Audit atas nama Dewan Komisaris menerima rangkuman laporan yang diterbitkan oleh SPI.
5. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
6. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc*. Kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.
7. Menelaah dan mengusulkan revisi isi Piagam Komite Audit untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.
8. Memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non audit laporan keuangan yang akan ditugaskan kepada kantor akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan sepanjang tidak memengaruhi independensi kantor akuntan publik tersebut.
9. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
10. Jika diperlukan, dapat mengundang pihak lain sebagai narasumber dalam rapat Komite Audit.
11. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. Safeguarding the Company's compliance with applicable laws and regulations.

In broad terms, in carrying out its duties and responsibilities throughout 2024, the Audit Committee has conducted the following activities as follows:

1. Receiving the Company's reports and documents; and
2. Holding a series of regular meetings and discussions with various relevant parties, including the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Head of the Internal Audit Unit (SPI), the Head of Strategic Planning and Corporate Risk Management Division (PSM), the Head of Finance and Accounting Division (KAK), and the public accountants or external auditors from KAP Purwantono, Sungkoro & Surja.

Authority of the Audit Committee

In order to enhance the quality of performance in carrying out the duties and responsibilities of the committee, the Board of Commissioners grants authority to the Audit Committee to:

1. Obtain full, free and unrestricted access to records or information regarding employees, funds, assets and other Company resources related to the implementation of their duties.
2. Obtain data, reports, summary reports, documents, and financial information as well as other Company operational information on behalf of the Board of Commissioners on a regular basis relating to internal control and risk management, in collaboration with the internal audit and risk management functions.
3. In carrying out its duties related to the supervision of internal control and risk management, the Audit Committee cooperates with the internal audit and risk management functions.
4. The Audit Committee on behalf of the Board of Commissioners receives a summary report issued by SPI.
5. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who carry out the functions of internal audit, risk management, and public accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
6. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may form an *ad hoc* team. The criteria and the assignment period are adjusted to the type of work.
7. Review and propose revisions to the contents of the Audit Committee Charter to be approved by the Board of Commissioners.
8. Provide pre-approval for non-audit services of financial statements to be assigned to the public accounting firm that audits the Company's Financial Statements as long as it does not affect the independence of the public accounting firm.
9. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may employ experts and/or consultants to assist the Audit Committee.
10. If necessary, other parties may be invited as resource persons to the Audit Committee meeting.
11. Perform other authorities given by the Board of Commissioners.

Rapat Komite Audit

Komite Audit diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat setidaknya sekali setiap 3 (tiga) bulan dengan tambahan rapat lain dapat diadakan jika diperlukan. Penyelenggaraan rapat ini diatur sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite dan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara detail selama tahun 2024, Komite Audit telah melakukan kinerja dan fungsi sebagai berikut:

Dalam tahun 2024 Komite Audit telah menyelenggarakan rapat berkala sebanyak 30 kali, serta 20 kali rapat teknis anggota Komite Audit yang terdiri 9 kali rapat teknis berkala dan 11 kali rapat teknis *ad-hoc*.

Untuk rapat berkala Komite Audit dilaksanakan dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama Name	Jabatan di Komite Position in Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Ronald Waas	Ketua dan Komisaris Chair and Commissioner	30	30	100%
2	Uriep Budhi Prasetyo	Anggota dan Komisaris Member and Commissioner	30	29	97%
3	Arini Imamawati	Anggota Member	30	28	93%
4	Arif M. Prawirawinata	Anggota Member	30	30	100%

Meetings of the Audit Committee

The Audit Committee is required to hold meetings at least once every 3 (three) months, with additional meetings convened when necessary. The conduct of these meetings is governed by the provisions of the Committee Charter and applicable laws and regulations.

In detail, throughout 2024, the Audit Committee has performed its duties and functions as follows:

During 2024, the Audit Committee has holding 30 regular meetings and holding 20 technical meetings among Audit Committee members, comprising 9 scheduled technical meetings and 11 ad-hoc technical meetings.

Attendance at the regular Audit Committee meetings was as follows:

Agenda dan Waktu Rapat Kerja Komite Audit di Tahun 2024

Agenda and Schedule of Audit Committee's Meeting in 2024

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tempat Place
1	9 Januari 2024 January 9, 2024	Laporan Realisasi Anggaran dan Penggunaan Laba TW 4 - 2023 Budget-Realization Report and Profit Utilization for Q4 2023	Rapat Online Online Meeting
2	16 Januari 2024 January 16, 2024	Update status kegiatan/inisiatif s/d Desember 2023 (SPI) Updating activity/initiative status through December 2023 (Internal Audit Unit - SPI)	Rapat Online Online Meeting
3	18 Januari 2024 January 18, 2024	Update status kegiatan/inisiatif s/d Desember 2023 (PSM) Updating activity/initiative status through December 2023 (Strategic Planning & Risk Management - PSM)	Rapat Online Online Meeting
4	26 Januari 2024 January 26, 2024	1. Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDClear divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings 2. Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting)	Rapat Online Online Meeting
5	16 Februari 2024 February 16, 2024	Diskusi Terkait Rencana Program Kerja (Harmonisasi) KA SRO 2024 Discussing the Work-Program Plan (Harmonization) of the SRO Audit Committees for 2024	Rapat Online Online Meeting
6	27 Februari 2024 February 27, 2024	1. Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDClear divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners-Audit Committee meetings 2. Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) 3. Hasil Evaluasi KAP 2023 Evaluation Results of the Public Accounting Firm for 2023	
7	18 Maret 2024 March 18, 2024	Closing Audit Laporan Keuangan KPEI dan Dana Jaminan periode 31 Desember 2023 Closing Audit of IDClear's Financial Statements and Guarantee Fund for the period ended December 31, 2023	Rapat Online Online Meeting

Agenda dan Waktu Rapat Kerja Komite Audit di Tahun 2024

Agenda and Schedule of Audit Committee's Meeting in 2024

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tempat Place
8	26 Maret 2024 March 26, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDClear divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners–Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) - Hasil Closing Audit 2023 dan Evaluasi KAP 2023 Closing–Audit Results 2023 and Evaluation of the Public Accounting Firm 2023	Rapat Online Online Meeting
9	3 April 2024 April 3, 2024	Laporan Realisasi Anggaran dan Penggunaan Laba TW 1 - 2024 Budget-Realization Report and Profit Utilization for Q1 2024	Rapat Online Online Meeting
10	23 April 2024 April 23, 2024	Update status kegiatan/inisiatif Januari s/d Maret 2024 (SPI) Updating activity/initiative status for January–March 2024 (Internal Audit Unit – SPI)	Rapat Online Online Meeting
11	25 April 2024 April 25, 2024	Update status kegiatan/inisiatif Januari s/d Maret 2024 (PSM) Updating activity/initiative status for January–March 2024 (Strategic Planning & Risk Management – PSM)	Rapat Online Online Meeting
12	26 April 2024 April 26, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDClear divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners–Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) - Hasil Pemantauan Risk Events TW I 2024 Results of Risk-Event Monitoring for Q1 2024	Rapat Online Online Meeting
13	20 Mei 2024 May 20, 2024	- Laporan hasil pembahasan rapat-rapat Komite Audit dengan divisi di KPEI sebelumnya dan tindak lanjut atas hasil rapat Dewan Komisaris bersama Komite Audit sebelumnya Report on the outcomes of previous Audit Committee meetings with IDClear divisions and follow-up actions from prior Board of Commissioners–Audit Committee meetings - Masukan Komite Audit kepada Dewan Komisaris atas hal-hal penting yang perlu dibahas di Radirkom (bahan Radirkom) Audit Committee inputs to the Board of Commissioners on key issues to be discussed at the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (materials for Board of Directors and Board of Commissioners Meeting) - Lain-lain Other matters	Rapat Online Online Meeting
14	21 Juni 2024 June 21, 2024	Hasil Pemantauan Risk Event Triwulan I 2024 dan Tindak Lanjutnya oleh Divisi PSM Risk-Event Monitoring Results for Q1 2024 and Follow-Up Actions by the PSM Division	Rapat Online Online Meeting
15	28 Juni 2024 June 28, 2024	Hasil Evaluasi KA atas Laporan Risk Events TW I 2024 PSM Audit Committee's Evaluation Results on the Q1 2024 Risk-Event Report (PSM)	Rapat Online Online Meeting
16	10 Juli 2024 July 10, 2024	Laporan Realisasi Anggaran dan Penggunaan Laba TW 2 - 2024 Budget-Realization Report and Profit Utilization for Q2 2024	Rapat Online Online Meeting
17	16 Juli 2024 July 16, 2024	Laporan status kegiatan/inisiatif April s/d Juni 2024 (SPI) Activity/Initiative Status Report for April–June 2024 (SPI)	Rapat Online Online Meeting
18	18 Juli 2024 July 18, 2024	Laporan status kegiatan/inisiatif April s/d Juni 2024 (PSM) Activity/Initiative Status Report for April–June 2024 (PSM)	Rapat Online Online Meeting
19	24 Juli 2024 July 24, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Updating Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters/directives from the Board of Commissioners	Rapat Online Online Meeting
20	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Pembahasan RKAT 2024 Revisi Discussion of the Revised 2024 RKAT	Rapat Online Online Meeting
21	19 Agustus 2024 August 19, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Updating Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters/directives from the Board of Commissioners	Rapat Online Online Meeting
22	23 Agustus 2024 August 23, 2024	Closing Meeting Audit LKTT KPEI dan DJ periode 30 Juni 2024 Closing Meeting for the Audit of the Interim Financial Statements of IDClear and the Guarantee Fund for the period ended June 30, 2024	Rapat Online Online Meeting
23	24 September 2024 September 24, 2024	- Update kegiatan Komite Audit Updating Audit Committee activities - Lain-lain/arahan Dewan Komisaris Other matters/directives from the Board of Commissioners	Rapat Online Online Meeting
24	10 Oktober 2024 October 10, 2024	Laporan Realisasi Anggaran dan Penggunaan Laba TW 3 - 2024 Budget-Realization Report and Profit Utilization for Q3 2024	Rapat Online Online Meeting
25	17 Oktober 2024 October 17, 2024	Laporan status kegiatan/inisiatif Juli s/d September 2024 (SPI) Activity/Initiative Status Report for July–September 2024 (SPI)	Rapat Online Online Meeting

Agenda dan Waktu Rapat Kerja Komite Audit di Tahun 2024

Agenda and Schedule of Audit Committee's Meeting in 2024

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Tempat Place
26	23 Oktober 2024 October 23, 2024	1. <i>Update kegiatan Komite Audit</i> Updating Audit Committee activities 2. <i>Lain-lain/arahan Komisaris Utama</i> Other matters/directives from the President Commissioner	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
27	5 November 2024 November 5, 2024	Laporan status kegiatan/inisiatif Juli s/d September 2024 (PSM) Activity/Initiative Status Report for July-September 2024 (PSM)	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
28	11 November 2024 November 11, 2024	Pembahasan Surat Persetujuan Dewan Komisaris atas Rancangan Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-11 tentang Komite <i>Haircut</i> dan Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas <i>Triparty Report</i> Discussion of the Board of Commissioners' Approval Letter on the Draft Amendment to IDClear Regulation Number II-11 on the Haircut Committee and IDClear Regulation Number X-2 on Triparty Report Facilities	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
29	25 November 2024 November 25, 2024	1. <i>Update kegiatan Komite Audit</i> Updating Audit Committee activities 2. <i>Lain-lain/arahan Komisaris Utama</i> Other matters/directives from the President Commissioner	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
30	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. <i>Update kegiatan Komite Audit</i> Updating Audit Committee activities 2. <i>Lain-lain/arahan Komisaris Utama</i> Other matters/directives from the President Commissioner	Rapat <i>Online</i> Online Meeting

Selain rapat berkala di atas, Komite Audit juga mengadakan rapat yang bersifat teknis, terdiri atas rapat teknis berkala dan rapat *ad-hoc* yang dilaksanakan di tahun 2024, yang merupakan rapat khusus yang dihadiri oleh anggota teknis Komite Audit dalam rangka kebutuhan khusus yang bersifat teknis sesuai arahan Dewan Komisaris dan/atau atas persetujuan Ketua Komite Audit. Rapat teknis dimaksud, yaitu:

Apart from the regular meetings above, the Audit Committee also held technical meetings, comprising periodical technical meetings and *ad-hoc* meetings, conducted in 2024. These are special meetings attended by the Audit Committee's technical members to address specific technical needs in accordance with directives from the Board of Commissioners and/or with the approval of the Chair of the Audit Committee. The technical meetings in question are:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Jenis Rapat Type of Meeting	Tempat Place
1	26 Januari 2024 January 26, 2024	Pembahasan terkait PEI dan IDX Chanel Discussing PEI and IDX Channel	ad-hoc	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
2	20 Maret 2024 March 20, 2024	Pembahasan Evaluasi KAP EY 2023 Evaluating the EY Public Accounting Firm (2023)	Berkala scheduled	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
3	2 April 2024 April 2, 2024	Pembahasan Draft Laporan Keuangan Triwulanan I 2024 Discussing the Draft Q1 2024 Quarterly Financial Statements	Berkala scheduled	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
4	6 Mei 2024 May 6, 2024	Pembahasan format dan konten penyajian pelaporan berkala Divisi PSM Discussing the format and content of PSM Division's periodic reports	ad-hoc	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
5	8 Mei 2024 May 8, 2024	Pembahasan Teknis Rancangan Perubahan Struktur Organisasi KPEI dan <i>Job Description</i> bersama SDM Discussing the technical aspects of the Draft Changes to IDClear's Organizational Structure and Job Descriptions with HR	ad-hoc	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
6	28 Mei 2024 May 28, 2024	Pembahasan <i>Risk Events</i> Triwulan I – 2024 bersama Divisi PSM Discussing Q1 2024 Risk Events with the PSM Division	ad-hoc	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
7	28 Mei 2024 May 28, 2024	Pembahasan penawaran jasa audit KAP Tahun 2024 Discussing the 2024 audit-service proposals from Public Accounting Firms	Berkala scheduled	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
8	9 Juli 2024 July 9, 2024	Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Keuangan Triwulanan II 2024 Discussing the Draft Q2 2024 Quarterly Financial Statements	Berkala scheduled	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
9	22 Juli 2024 July 22, 2024	Pembahasan Teknis Hasil Kajian Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan KPEI Discussing the technical findings of IDClear's Supervision and Inspection Division	ad-hoc	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
10	25 Juli 2024 July 25, 2024	<i>Kick Off Opening Meeting Audit</i> Tengah Tahunan Laporan Keuangan KPEI dan Dana Jaminan periode 30 Juni 2024 Kicking off the Opening Meeting for the Mid-Year Audit of IDClear's Financial Statements and Guarantee Fund for the period ended June 30, 2024	Berkala scheduled	Rapat <i>Online</i> Online Meeting
11	25 Juli 2024 July 25, 2024	Persiapan Teknis <i>Sharing Session Risk Management</i> bersama PSM dan para Kepala Divisi terkait Preparing the technical aspects of the Risk-Management Sharing Session with PSM and relevant Division Heads	ad-hoc	Rapat <i>Online</i> Online Meeting

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Jenis Rapat Type of Meeting	Tempat Place
12	13 Agustus 2024 August 13, 2024	Pembahasan Teknis <i>Risk Events</i> Semester I 2024 Discussing the technical aspects of H1 2024 Risk Events	ad-hoc	Rapat Online Online Meeting
13	27 September 2024 September 27, 2024	Pembahasan Teknis RKAT 2025 Discussing the technical aspects of the 2025 RKAT	Berkala scheduled	Rapat Online Online Meeting
14	2 Oktober 2024 October 2, 2024	Pembahasan Teknis <i>Unclaimed Assets</i> Terkait Kasus Pasar Modal Discussing the technical aspects of Unclaimed Assets related to Capital-Market cases	ad-hoc	Rapat Online Online Meeting
15	9 Oktober 2024 October 9, 2024	Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Keuangan Triwulanan III 2024 Discussing the Draft Q3 2024 Quarterly Financial Statements	berkala	Rapat Online Online Meeting
16	18 Oktober 2024 October 18, 2024	Sharing Teknis Transaksi dan Potensi Bisnis CCP PUVA Sharing technical insights on CCP PUVA transactions and business potential	ad-hoc	Rapat Online Online Meeting
17	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Pembahasan Teknis <i>Unclaimed Assets</i> Terkait Kasus Pasar Modal (lanjutan) Continuing the discussion on the technical aspects of Unclaimed Assets related to Capital-Market cases	ad-hoc	Rapat Online Online Meeting
18	11 November 2024 November 11, 2024	Pembahasan Teknis Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan KPEI No. II-11 tentang Komite <i>Haircut</i> dan Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas <i>Triparty Repo</i> , bersama Tim Legal dan Divisi User. Discussing the technical aspects of the Board of Commissioners' approval of the Draft Amendments to IDClear Regulation No. II-11 on the Haircut Committee and Regulation No. X-2 on the Triparty Repo Facility with the Legal Team and User Divisions	ad-hoc	Rapat Online Online Meeting
19	12 Desember 2024 December 12, 2024	<i>Kick Off Opening Meeting</i> Audit Tengah Tahunan Laporan Keuangan KPEI dan Dana Jaminan periode 30 desember 2024 Kicking off the Opening Meeting for the Mid-Year Audit of IDClear's Financial Statements and Guarantee Fund for the period ended December 30, 2024	Berkala scheduled	Rapat Online Online Meeting
20	24 Desember 2024 December 24, 2024	Pembahasan Teknis Audit Program SPI 2025 Discussing the technical aspects of the 2025 SPI Audit Program	Berkala scheduled	Rapat Online Online Meeting

Pelatihan Komite Audit

Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendukung pengembangan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, termasuk anggota Komite Audit, guna mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan Perusahaan. Oleh karena itu, KPEI memfasilitasi pelatihan dan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja komite, baik secara individu maupun kolektif.

Selain itu, Perusahaan juga menyediakan Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas bagi anggota Komite Audit yang baru pertama kali menjabat dan berasal dari eksternal. Program ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang KPEI sehingga anggota baru dapat dengan cepat beradaptasi serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran perusahaan.

Berikut ini rincian kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit sepanjang tahun 2024.

Trainings of the Audit Committee

The Company has a policy to support the development of human resource competencies and capacities, including those of the Audit Committee members, in order to optimize performance and achieve the Company's objectives. Therefore, IDClear facilitates training and education programs designed to enhance the performance of the committee, both individually and collectively.

In addition, the Company also provides an Orientation and Capability Development Program for newly appointed Audit Committee members from external parties. This program aims to provide a comprehensive understanding of IDClear, enabling new members to quickly adapt and contribute to the achievement of the Company's goals.

Below is a summary of the competency development activities attended by the Audit Committee members throughout 2024.

No	Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Tempat & Tanggal Pelatihan Training Location & Date	Penyelenggara Organizer
1	Arif M. Prawirawinata	Anggota Member	Komite Audit yang Kompeten & Profesional A Competent and Professional Audit Committee	Aryaduta Hotel & 26-27 Juni 2024 Aryaduta Hotel & June 26-27, 2024	Intipesan
			Training Komite Audit SRO dan KAP EY Audit Committee Training by SRO and EY Public Accounting Firm	Rumah Singgah BEI & 20 November 2024 IDX Shelter House & November 20, 2024	EY

No	Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Tempat & Tanggal Pelatihan Training Location & Date	Penyelenggara Organizer
2	Arini Imamawati	Anggota Member	"Navigating The Half-Year: Roadmap to Success",	Zoom Webinar - 20 Juni 2024 Zoom Webinar - June 20, 2024	OJK Institute
			"Carbon Trading and It's Effect on Indonesia Economy"	Zoom Webinar - 17 Oktober 2024 Zoom Webinar - October 17, 2024	OJK Institute
			Komite Audit yang Kompeten & Profesional A Competent and Professional Audit Committee	Aryaduta Hotel & 26-27 Juni 2024 Aryaduta Hotel & June 26-27, 2024	Intipesan
			Training Komite Audit SRO dan KAPEY Audit Committee Training by SRO and EY Public Accounting Firm	Rumah Singgah BEI & 20 November 2024 IDX Shelter House & November 20, 2024	EY

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Selain menyelenggarakan rapat komite dan menghadiri undangan rapat lain, Komite Audit telah menyelesaikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab komite, antara lain mengenai;

- 1. Pengawasan terhadap Informasi/Pelaporan Keuangan**
Dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Informasi/Pelaporan Keuangan, Komite Audit melakukan pembahasan informasi/pelaporan keuangan dan memberikan masukan, antara lain:
 - a. RKAT Revisi 2024: untuk memperhatikan skala prioritas, kemampuan penyerapan anggaran hingga akhir tahun yang optimal dan realistis, mengingat sisa waktu tersedia dan keadaan ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
 - b. Komite Audit telah berdiskusi dengan manajemen serta auditor eksternal terkait laporan keuangan yang telah diaudit, yakni Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2024. Kedua Laporan Keuangan tersebut mendapatkan opini tanpa modifikasi atau opini wajar dalam semua hal yang material. Selama tahun buku 2023, serta tahun buku untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 PT KPEI telah menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan kepada para pihak terkait sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 2. Pengawasan terhadap Audit Internal**
Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Audit Internal melalui pembahasan berkala dengan Kepala Divisi SPI dan para staf auditor terkait. Selama tahun 2024, Komite Audit melakukan review dan rekomendasi-rekomendasi kepada SPI yang mencakup antara lain:
 - a. Audit Program 2024 dan Revisi Interim atas Audit Program 2024:
 - Memastikan Audit Program yang disusun telah sesuai Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal, *International Professional Practices Framework* (IPPF) yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Audit (IIA).
 - Memastikan ketersediaan personel auditor yang cukup dan pengalokasian penugasan sesuai kompetensi dan keahlian yang dimiliki dalam tahap perencanaan untuk pelaksanaan Audit Program;

Implementation of the Audit Committee's Duties in 2024

In addition to organizing committee meetings and attending other meeting invitations, the Audit Committee has carried out various activities related to its duties and responsibilities, including;

- 1. Supervision of Financial Information/Reporting**
In performing its oversight duties related to Financial Reporting/Information, the Audit Committee reviewed financial information and reports and provided input, including the following:
 - a. Revised 2024 Work Plan and Budget (RKAT): to pay attention to the priority scale, the capacity for optimal and realistic budget absorption by the end of the year, considering the remaining available time and the economy that has not fully recovered.
 - b. The Audit Committee has held discussions with management and the external auditor regarding the audited financial statements, namely the Financial Statements for the period ended December 31, 2023, and the Financial Statements for the period ended June 30, 2024. Both Financial Statements received unmodified opinions or fair opinions in all material respects. Throughout the financial year 2023 and the fiscal period ended June 30, 2024, IDClear has prepared and submitted its financial statements to relevant parties in accordance with applicable laws and regulations.
- 2. Supervision of Internal Audit**
The Audit Committee oversees Internal Audit through regular discussions with the Head of the SPI Division and the relevant audit staff. Throughout 2024, the Audit Committee conducted reviews and provided recommendations to SPI, which include, among others:
 - a. The 2024 Audit Program and Interim Revisions to the 2024 Audit Program:
 - Ensuring that the Audit Program prepared complies with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, the International Professional Practices Framework (IPPF) issued by the Institute of Internal Auditors (IIA).
 - Ensuring the availability of sufficient audit personnel and the allocation of assignments according to the competencies and expertise possessed during the planning stage for the implementation of the Audit Program;

- Memastikan SPI memiliki rencana pengembangan SDM yang terstruktur, agar memiliki personel dengan *background* dan *expertise* di bidang IT, operasional dan bisnis KPEI, termasuk kemungkinan dari internal yang berpengalaman di Divisi-divisi *core* melalui program mutasi/rotasi yang terstruktur.
 - Memastikan perencanaan untuk pelaksanaan Audit Program telah disusun berdasarkan *Risk Based Audit* (RBA) secara realistis dalam rangka audit yang efektif dan efisien, serta skedul penyelesaian yang tepat waktu;
 - Memastikan revisi interim atas Audit Program dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat urgensi atau adanya suatu *incidental-event* yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal, atau juga adanya perubahan strategis dalam struktur organisasi.
- b. Kesiapan Infrastruktur, Sistem dan SDM untuk menunjang pelaksanaan audit:
- Memberikan rekomendasi kepada SPI untuk memastikan *Audit Management System* (AMS) yang akan digunakan telah memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan baik oleh tim internal audit maupun Manajemen, dengan juga melakukan peninjauan kembali atas kontrak kerja sama dengan vendor terkait yang menjamin pemeliharaan dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien.
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaporan Hasil Audit
- Pelaporan hasil audit dengan *executive summary* yang memudahkan pengambilan keputusan oleh Top Manajemen untuk menentukan prioritas tindak lanjut atas rekomendasi audit berdasarkan tingkat risiko dan urgensi dengan mempertimbangkan faktor akar penyebab (*root cause*) dan dampaknya.
 - Penetapan jadwal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit yang disepakati yang dirumuskan secara realistis dengan mempertimbangkan kesiapan biaya (jika diperlukan), personel serta *load* dan skedul pekerjaan dari *auditee*.
3. **Pengawasan terhadap Manajemen Risiko**
- Komite Audit melakukan pengawasan terhadap Manajemen Risiko melalui pembahasan berkala dengan Kepala Divisi PSM dan para staf terkait, Selama tahun 2024, Komite Audit melakukan *review* dan rekomendasi-rekomendasi kepada PSM yang mencakup antara lain:
- a. Peningkatan efektifitas *root-cause analysis* dan monitoring tindak lanjut atas *Risk Events* signifikan dan dalam lingkup Sistem Utama;
 - b. *Re-assessment* atas *Risk Register* terhadap risiko-risiko yang terkait dengan *Risk Events* yang muncul;
 - c. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Divisi PSM dengan SPI terkait *Risk Events* signifikan dan strategi tindak lanjut yang efektif;
 - d. Mendorong untuk dilakukannya *lessons-learned* dari *risk events* yang pernah dihadapi dan ditangani, baik untuk internal tim sendiri maupun lintas tim yang saling berkaitan melalui program seperti: *sharing session*, *database* pembelajaran, sesi umpan balik.
- Ensuring that SPI has a structured human resource development plan to have personnel with backgrounds and expertise in IT, operations, and IDClear's business, including the possibility of experienced internal staff from core divisions through a structured transfer/rotation program.
 - Ensuring that the planning for the implementation of the Audit Program is prepared based on a realistic Risk-Based Audit (RBA) approach to achieve an effective and efficient audit, as well as timely completion schedules;
 - Ensuring that interim revisions to the Audit Program are carried out in accordance with applicable procedures, taking into account urgent needs or incidental events that require follow-up through internal audits, as well as any strategic changes in the organizational structure.
- b. Readiness of Infrastructure, Systems, and Human Resources to Support Audit Implementation:
- Providing recommendations to SPI to ensure that the Audit Management System (AMS) to be used has the necessary features required by both the internal audit team and management, including reviewing the contract with the relevant vendor to guarantee effective and efficient maintenance and development of features according to needs.
- c. Enhancing the Effectiveness of Audit Reporting
- Reporting audit results with an executive summary that facilitates decision-making by Top Management to determine the priority of follow-up actions on audit recommendations based on risk level and urgency, considering root causes and their impacts.
 - Establishing a mutually agreed realistic schedule for completing follow-up actions on audit recommendations, taking into account the availability of funds (if required), personnel, as well as the workload and schedules of the auditees.
3. **Supervision of Risk Management**
- The Audit Committee oversees Risk Management through regular discussions with the Head of the PSM Division and related staff. Throughout 2024, the Audit Committee conducted reviews and provided recommendations to PSM, which include:
- a. Enhancing the effectiveness of root-cause analysis and monitoring follow-up actions on significant Risk Events within the scope of the Core System;
 - b. Re-assessing the Risk Register concerning risks associated with emerging Risk Events;
 - c. Enhancing coordination and communication between the PSM Division and SPI regarding significant Risk Events and effective follow-up strategies;
 - d. Encouraging the conduct of lessons learned from previously encountered and handled risk events, both within the internal team and across related teams, through programs such as sharing sessions, learning databases, and feedback sessions.

4. Pengawasan terhadap Pengendalian Internal

Pengawasan Komite Audit atas pengendalian internal perusahaan dilakukan melalui laporan-laporan dan diskusi dengan manajemen, Kepala Divisi Manajemen Risiko Korporasi, Kepala SPI dan auditor eksternal. Efektifitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko KPEI dapat diketahui dari *Risk Control Self Assessment* (RCSA) yang dilakukan manajemen setiap tahun, pengujian SPI yang dilakukan secara periodik, *Management Letter* dari auditor eksternal dan tindak lanjut oleh manajemen, sertifikasi dan hasil audit ISO yang diterapkan, yakni antara lain telah dilakukannya *Combined Audit* 3 ISO: ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 22301:2019 (Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), serta pelaksanaan Transisi Audit dari ISO 27001:2013 ke ISO 27001:2022 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi). KPEI juga menerapkan *The Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) dengan nilai pemenuhan sampai dengan akhir tahun sebanyak 96,55% meningkat 0,66% dari tahun 2023 atau 0,55% di atas target yang ditetapkan 96,00%. Selain itu, sehubungan dengan di Q4-2024 telah efektif berjalan lini bisnis baru yaitu CCP PUVA maka telah dilakukan juga PMFI PUVA dengan pencapaian Q4-2024 sebanyak 96,04%.

Berdasarkan tinjauan atas data, laporan dan diskusi yang dilakukan oleh Komite Audit dalam melakukan evaluasi efektifitas pengendalian internal perusahaan yang mempengaruhi pelaporan keuangan, Komite Audit melihat usaha manajemen yang konsisten dan baik. Penerapan standar ISO dilakukan, diperluas dan terus ditingkatkan di seluruh fungsi perusahaan baik dalam hal perangkat, kebijakan, prosedur maupun edukasi dan *awareness* kepada pegawai Perusahaan.

Catatan atas hasil audit tahun 2023 dan audit tengah tahun 2024 yang dilakukan oleh auditor KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (anggota Ernst and Young Global Limited) tidak terdapat temuan signifikan.

5. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Audit Eksternal

Pada tahun 2024 Komite Audit telah melakukan evaluasi pelaksanaan jasa audit tahun buku 2023 dan melakukan seleksi bersama Komite Audit PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk usulan auditor eksternal tahun buku 2024, serta menyampaikan rekomendasi penunjukan jasa audit tersebut kepada Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Keuangan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Auditor eksternal terpilih dan disetujui RUPS untuk audit laporan keuangan KPEI tahun 2024 adalah Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja, sama dengan auditor eksternal untuk laporan keuangan tahun 2023.

4. Supervision of Internal Control

The Audit Committee's oversight of the Company's internal control is carried out through reports and discussions with management, the Head of the Corporate Risk Management Division, the Head of SPI, and the external auditor. The effectiveness of internal controls in mitigating IDCLEAR's risks can be assessed through the annual Risk Control Self-Assessment (RCSA) conducted by management, periodic testing by SPI, the Management Letter issued by the external auditor and its follow-up by management, as well as certifications and ISO audit results, namely, among others, the implementation of a Combined Audit of 3 ISO standards: ISO 9001:2015 (Quality Management System), ISO 22301:2019 (Business Continuity Management System), and ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System), as well as the execution of the Transition Audit from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022 (Information Security Management System). IDCLEAR also implements The Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI), with a compliance score as of year-end of 96.55%, an increase of 0.66% from 2023 or 0.55% above the set target of 96.00%. In addition, in relation to the effective operation of a new business line in Q4-2024, namely CCP PUVA, a PFMI PUVA assessment was also conducted, achieving a score of 96.04% in Q4-2024.

Based on the review of data, reports, and discussions conducted by the Audit Committee in evaluating the effectiveness of the Company's internal control that impacts financial reporting, the Audit Committee observed consistent and commendable efforts by management. The implementation of ISO standards has been carried out, expanded, and continuously improved across all company functions, including systems, policies, procedures, as well as employee education and awareness.

The audit findings for the 2023 financial year and the mid-year 2024 audit conducted by KAP Purwanto, Sungkoro and Surja (a member of Ernst and Young Global Limited) did not reveal any significant findings.

5. Supervision of the Implementation of External Audit

In 2024, the Audit Committee evaluated the implementation of audit services for the 2023 financial year and, together with the Audit Committees of IDX and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), conducted the selection process for the proposed external auditor for the 2024 financial year. The Audit Committee submitted its recommendation for the appointment of the audit service to the Board of Commissioners, in accordance with OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 dated March 27, 2017, on the Use of Public Accountant and/or Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities. The external auditor selected and approved by the GMS to audit IDCLEAR's 2024 financial statements is the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro and Surja, which is the same external auditor that audited the 2023 financial statements.

Komite Audit telah melakukan komunikasi dengan auditor eksternal membahas beberapa hal penting : perencanaan audit - memastikan auditor eksternal menerapkan standar audit sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan audit - membahas isu-isu pelaporan keuangan dan masalah yang terjadi selama pelaksanaan audit, kecukupan pemeriksaan, pelaporan hasil audit - menelaah laporan keuangan yang telah diaudit, masalah kelemahan pengendalian yang ditemukan dan efektivitas tindaklanjut temuan, serta masalah penting lainnya yang terjadi selama proses audit laporan keuangan akhir tahun 2023 dan audit tengah tahun 2024.

Manajemen telah memberikan semua informasi, data dan dokumen yang diminta oleh auditor eksternal. Perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal telah didiskusikan dan diselesaikan dengan baik.

6. Pengawasan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

Berdasarkan pengawasan Komite Audit pada tahun 2024 atas kewajiban penyampaian Laporan Keuangan KPEI kepada pihak berwenang telah dipenuhi, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Proses kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan tertanam dalam proses bisnis perusahaan, melalui prosedur, struktur organisasi, mekanisme pelaporan dan komunikasi.

7. Pengawasan terkait Benturan Kepentingan dan Pelaporan Pelanggar Penilaian Kinerja Komite Audit (Whistleblowing System)

Pada tahun 2024 tidak terdapat pengaduan dan laporan pelanggaran, serta potensi benturan kepentingan atas Laporan Keuangan.

8. Tugas Menjaga Praktik Tata Kelola Perusahaan

Praktik-praktik tata kelola telah berjalan di Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan GCG *Implementation Roadmap*, serta memantau kemajuan pencapaiannya. Mulai tahun 2023, Penilaian KPEI diubah dengan pendekatan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), untuk tahun 2024 berdasarkan penilaian mandiri dengan menggunakan parameter yang sebelumnya disusun oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) diperoleh hasil penilaian sebesar 85,33% (Predikat "Good") yaitu meningkat 8,36% dari tahun 2023 dengan hasil 76,97% (Predikat "Fair").

9. Pengembangan Kompetensi dan Kemampuan Teknis

Tahun 2024 anggota Komite Audit telah mengikuti program *workshop/pelatihan* yang difasilitasi oleh Perseroan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi sebagai berikut.

The Audit Committee has communicated with the external auditor to discuss several key matters: audit planning – ensuring that the external auditor applies auditing standards in accordance with applicable regulations; audit execution – discussing financial reporting issues and problems encountered during the audit process, as well as the adequacy of the audit procedures; audit reporting – reviewing the audited financial statements, identifying control weaknesses, assessing the effectiveness of follow-up actions, and addressing other significant matters arising during the year-end 2023 financial audit and the mid-year 2024 audit.

Management has provided all information, data, and documents requested by the external auditor. Any differences of opinion between management and the external auditor have been discussed and resolved appropriately.

6. Supervision of Compliance to Laws and Regulations

Based on the Audit Committee's oversight in 2024, the obligation to submit IDClear's Financial Reports to the relevant authorities has been fulfilled in accordance with the applicable laws and regulations. The process of compliance with laws and regulations is embedded within the Company's business processes through procedures, organizational structure, reporting mechanisms, and communication.

7. Supervision related to Conflict of Interest and Violations Reporting (Whistleblowing System)

In 2024, there were no complaints, reports of violations, or potential conflicts of interest related to the Financial Reports.

8. Duties to Uphold Corporate Governance Practices

Governance practices have been implemented in the Company based on the Corporate Governance Guidelines and the GCG *Implementation Roadmap*, with ongoing monitoring of progress. Starting in 2023, IDClear's assessment approach was revised to adopt the *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS). For 2024, based on a self-assessment using parameters previously developed by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), the Company achieved a score of 85.33% (Rated "Good"), an increase of 8.36% from the 2023 score of 76.97% (Rated "Fair").

9. Development of Competencies and Technical Skill

In 2024, members of the Audit Committee participated in workshops/trainings facilitated by the Company as part of their competency development, as follows

Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Competency Development Activity	Waktu Time
Ronald Waas	ASEAN Global Leadership Programme 2024 at LSE	2 - 6 September 2024 September 2 - 6, 2024
Uriep Budhi Prasetyo	BCA Capital Market Community Business Trip 2024	25 Oktober - 1 November 2024 October 25 - November 1, 2024

Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Competency Development Activity	Waktu Time
Ronald Waas Uriep Budhi Prasetyo	Sosialisasi Omnibus Level AK Dissemination of Omnibus for Clearing Member	19 Januari 2024 January 19, 2024
	CEO Networking	26 November 2024 November 26, 2024
	Strategic Cyber Resilience in Indonesia's Capital Market	12 - 15 Desember 2024 December 12-15, 2024
Arini Imamawati Arif M. Prawirawinata	Workshop Komite Audit yang Kompeten & Profesional Workshop on Competent & Professional Audit Committee	26-27 Juni 2024 June 26-27, 2024
	In-house Training Komite Audit SRO oleh KAP EY In-house Training for SRO Audit Committee by Public Accounting Firm EY	20 November 2024 November 20, 2024

10. Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Komite Audit SRO

Di tahun 2024, dilakukan 2 (dua) kali pertemuan koordinasi Komite Audit SRO yaitu sebagai berikut:

Tanggal Date	Agenda Agenda
16 Februari 2024 February 16, 2024	- Mekanisme pengawasan terintegrasi di level KA-SRO; - Penggunaan jasa audit KAP PSS untuk tahun buku 2024 - Integrated oversight mechanism at the KA-SRO level; - Use of audit services from Public Accounting Firm PSS for the 2024 financial year
22 November 2024	- Evaluasi jasa audit KAP di 2024 - Program KA-SRO di 2025 antara lain reviu atas: Piagam Komite Audit, Piagam Dewan Komisaris dan Pedoman Evaluasi KAP. - Evaluation of Public Accounting Firm services in 2024; - KA-SRO program in 2025, including reviews of: the Audit Committee Charter, the Board of Commissioners Charter, and the Public Accounting Firm Evaluation Guidelines.

10. Implementation of Coordination Meetings of SRO Audit Committees

In 2024, 2 (two) coordination meetings of the SRO Audit Committee were held, as follows:

11. Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan Komite Audit

Komite Audit telah menyusun rencana kerja dan jadwal rapat untuk tahun 2025 berdasarkan Piagam Komite Audit.

11. Development of Audit Committee Work Plan and Annual Report

The Audit Committee has prepared a work plan and meeting schedule for 2025 based on the Audit Committee Charter.

12. Penilaian Kinerja Komite Audit

Komite Audit telah melakukan penilaian kinerja secara mandiri dan kolektif tahun 2024, dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Piagam Komite Audit.

12. Performance Assessment of the Audit Committee

The Audit Committee conducted both individual and collective performance evaluations for 2024, referring to the duties and responsibilities stipulated in the Audit Committee Charter.

Untuk tahun buku 2024, Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah berkinerja dengan baik, dengan tolak ukur penyediaan laporan kinerja Komite Audit yang menyampaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dengan baik, termasuk dalam hal pelaksanaan pemantauan audit internal dan manajemen risiko Perusahaan.

For the 2024 financial year, the Board of Commissioners assessed that the Audit Committee has performed well, with the benchmark being the provision of the Audit Committee's performance report that outlines the execution of the Audit Committee's duties and responsibilities properly, including the implementation of internal audit monitoring and the Company's risk management.

FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 59/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, proses nominasi dan penetapan remunerasi dijalankan oleh OJK dengan berkoordinasi bersama Dewan Komisaris dan Pemegang Saham KPEI. Untuk itu, hingga laporan ini diterbitkan KPEI tidak mempunyai Komite Nominasi dan Remunerasi. Prosedur nominasi dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi KPEI telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dalam laporan ini.

NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

Based on OJK Regulation No. 59/POJK.04/2016 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Clearing and Guarantee Institutions, the nomination and remuneration determination process is carried out by the OJK in coordination with the Board of Commissioners and Shareholders of IDCLEAR. Therefore, as of the issuance of this report, IDCLEAR does not have a Nomination and Remuneration Committee. The procedure for the nomination and determination of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of IDCLEAR has been explained in the previous discussion in this report.



Komite dan Organ Pendukung Direksi

COMMITTEES AND SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Direksi dapat membentuk komite atau organ lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi KPEI didukung oleh 4 (empat) komite utama, yaitu Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko (KKPR), Komite Haircut, Komite Investasi, dan Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko. Selain itu, terdapat juga Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pemeriksa Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

The Board of Directors may establish committees or other bodies in accordance with applicable laws and regulations. The KPEI Board of Directors is supported by 4 (four) main committees, namely the Credit Policy and Risk Control Committee (KKPR), the Haircut Committee, the Investment Committee, and the CCP Clearing and Risk Management Committee. In addition, there is also a Corporate Secretary and Internal Audit Unit that reports directly to the Board of Directors.

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT DAN PENGENDALIAN RISIKO

Berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko (KKPR). Komite ini bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan kredit, pengendalian risiko, serta kebijakan terkait investasi dana jaminan dan cadangan jaminan.

CREDIT POLICY AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE (KKPR)

Based on the provisions of OJK Regulation No. 26/POJK.04/2014 on the Guarantee of Exchange Transactions Settlement, IDCLEAR established the Credit Policy and Risk Management Committee (KKPR). This committee is tasked with assisting the Board of Directors in formulating credit policies, risk control, as well as policies related to the investment of guarantee and reserve funds.

Piagam Komite KKPR

Komite KKPR memiliki Piagam yang menjadi pedoman pelaksanaan tugasnya. Piagam ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna memastikan keselarasan dengan dinamika bisnis dan perubahan regulasi, Piagam Komite KKPR ditinjau dan diperbarui secara berkala. Piagam yang berlaku untuk tahun buku 2024 adalah versi terbaru yang telah diperbarui dan disahkan oleh Direksi pada 22 Desember 2023.

KKPR Committee Charter

The KKPR Committee has a Charter that serves as the guideline for carrying out its duties. This Charter is prepared based on the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. To ensure alignment with business dynamics and regulatory changes, the Charter of KKPR Committee is reviewed and updated periodically. The applicable Charter for the 2024 financial year is the latest version, which was updated and ratified by the Board of Directors on December 22, 2023.

Komposisi Komite KKPR

Anggota Komite KKPR terdiri dari direktur atau pejabat eksekutif Anggota Kliring dengan latar belakang kompetensi dan pengalaman yang sesuai untuk mendukung tugas-tugas Komite. Komite KKPR memiliki 5 (lima) anggota. Salah satu di antaranya ditunjuk sebagai koordinator. Susunan anggota Komite KKPR untuk tahun 2024, yaitu:

Composition of KKPR Committee

Members of KKPR Committee consist of directors or executive officers of Clearing Members with the appropriate competence and experience to support the Committee's duties. The KKPR Committee comprises 5 (five) members, one of whom is appointed as the coordinator. The composition of KKPR Committee for the 2024 financial year is as follows:

No	Nama Name	Perusahaan Company	Periode Period	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	Andre Tjahjajumuljo	PT UBS Sekuritas Indonesia	16 Maret 2023 – 15 Maret 2025 March 16, 2023 – March 15, 2025	Peraturan KPEI No. IX dan Surat Keputusan Direksi KPEI No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 tanggal 10 Maret 2023 IDCclear Regulation No. IX and IDCclear Board of Directors Decision Letter No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 dated March 10, 2023.
2	Theodora V. N. Manik	PT Mandiri Sekuritas	16 Maret 2023 – 15 Maret 2025 March 16, 2023 – March 15, 2025	Peraturan KPEI No. IX dan Surat Keputusan Direksi KPEI No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 tanggal 10 Maret 2023 IDCclear Regulation No. IX and IDCclear Board of Directors Decision Letter No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 dated March 10, 2023.
3	Suriadharma Ibrahim	PT Samuel Sekuritas Indonesia	16 Maret 2023 – 15 Maret 2025 March 16, 2023 – March 15, 2025	Peraturan KPEI No. IX dan Surat Keputusan Direksi KPEI No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 tanggal 10 Maret 2023 IDCclear Regulation No. IX and IDCclear Board of Directors Decision Letter No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 dated March 10, 2023.

No	Nama Name	Perusahaan Company	Periode Period	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
4	Hendra Hermawan	PT BRI Danareksa Sekuritas	16 Maret 2023 – 15 Maret 2025 March 16, 2023 – March 15, 2025	Peraturan KPEI No. IX dan Surat Keputusan Direksi KPEI No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 tanggal 10 Maret 2023 IDClear Regulation No. IX and IDClear Board of Directors Decision Letter No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 dated March 10, 2023.
5	Thomas Nugroho	PT RHB Sekuritas Indonesia	16 Maret 2023 – 15 Maret 2025 March 16, 2023 – March 15, 2025	Peraturan KPEI No. IX dan Surat Keputusan Direksi KPEI No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 tanggal 10 Maret 2023 IDClear Regulation No. IX and IDClear Board of Directors Decision Letter No. Kep-022/DIR/KPEI/0323 dated March 10, 2023.

Independensi Komite KKPR

Sebagai komite yang anggotanya berasal dari Anggota Kliring, Komite KKPR diwajibkan untuk menjaga independensi serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan pada salah satu atau beberapa anggota komite saat membahas kebijakan terkait pengelolaan risiko penjaminan penyelesaian transaksi bursa maupun penggunaan dan investasi Dana Jaminan, anggota yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk terlibat dalam diskusi, memberikan saran, atau memberikan rekomendasi terkait. Selain itu, anggota Komite KKPR tidak diperbolehkan memiliki afiliasi dalam bentuk apa pun dengan anggota lainnya dalam komite tersebut.

Rapat Komite KKPR

Komite KKPR memiliki kewajiban untuk mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Selain itu, rapat tambahan dapat diselenggarakan apabila diperlukan. Selama tahun buku 2024, Komite KKPR telah mengadakan 12 kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Andre Tjahjauljo	PT UBS Sekuritas Indonesia	12	11	92%
2	Theodora V. N. Manik	PT Mandiri Sekuritas	12	12	100%
3	Suriadharma Ibrahim	PT Samuel Sekuritas Indonesia	12	12	100%
4	Hendra Hermawan	PT BRI Danareksa Sekuritas	12	6	50%
5	Thomas Nugroho	PT RHB Sekuritas Indonesia	12	6	50%

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite KKPR dibagi menjadi beberapa aspek berikut:

1. Terkait Manajemen Risiko
 - a. Merekomendasikan kebijakan pengelolaan risiko atas penjaminan penyelesaian transaksi bursa, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
 - b. Memantau kebijakan pengelolaan risiko penjaminan penyelesaian transaksi bursa
 - c. Memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait penanganan gagal bayar AK jika diminta oleh Perusahaan; dan
 - d. Memberikan rekomendasi kebijakan manajemen risiko Perusahaan.

Independence of KKPR Committee

As a committee composed of members from the Clearing Members, KKPR Committee is required to maintain independence and professionalism in carrying out its duties. In the event of a potential conflict of interest involving one or more committee members during discussions on policies related to clearing and settlement risk management or the use and investment of the Guarantee Fund, the concerned member(s) shall not be permitted to participate in the discussion, provide advice, or offer recommendations on the matter. Furthermore, KKPR Committee members are prohibited from having any form of affiliation with other members of the committee.

Meetings of KKPR Committee

The KKPR Committee is obligated to hold meetings at least once every 2 (two) months. Additionally, ad-hoc meetings may be held when necessary. During the 2024 financial year, KKPR Committee held 12 meetings. The frequency and attendance rate of each committee member are as follows:

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of KKPR Committee are categorized into several aspects, including:

1. Related to Risk Management
 - a. Providing recommendations of risk management policy on securities exchange transaction settlement guarantee to the Board of Directors and the Board of Commissioners;
 - b. Monitoring risk management policy on securities exchange transaction settlement guarantee;
 - c. Providing advisory and/or recommendations related to default management to CM upon request from the Company; and
 - d. Providing recommendations of the Company's risk management policy.

2. Terkait Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan

- Menetapkan kebijakan penggunaan dan investasi Dana Jaminan;
- Merekomendasikan persentase laba bersih Perusahaan yang wajib disisihkan sebagai Cadangan Jaminan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham;
- Memberikan persetujuan atas besarnya biaya yang berkaitan dengan jasa akuntan publik dan audit Laporan Keuangan Dana Jaminan;
- Memberikan persetujuan penggunaan Dana Jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank; dan
- Memberikan persetujuan atas penempatan Dana Jaminan pada bank untuk investasi dalam bentuk deposito, dan rekening efek pada kustodian untuk investasi pada surat berharga negara.

3. Terkait Ketaatan dan Peraturan

- Melakukan pemantauan pelaksanaan operasional harian terkait dengan administrasi pengelolaan Dana Jaminan serta memastikan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- Memastikan bahwa Direksi, Manajemen, dan Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) KPEI melakukan pengelolaan Dana Jaminan dan proses manajemen pengelolaan risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
- Dalam hal terdapat indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka Komite KKPR dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan administrasi pengelolaan Dana Jaminan serta evaluasi terhadap parameter-parameter manajemen risiko.

4. Terkait Pengaduan

Melakukan penelaahan atas pengaduan dari pihak ketiga, seperti AK dan OJK, mengenai indikasi penyimpangan terkait dengan manajemen risiko Perusahaan serta pengelolaan dan pengadministrasian Dana Jaminan.

2. Related to Guarantee Fund and Reserve for Guarantee Fund

- Determining policy of utilization and investment of Guarantee Fund;
- Providing recommendations on percentage from the Company's net profit must be set aside as Reserve for Guarantee Fund to the Board of Directors, the Board of Commissioners and Company Shareholders;
- Providing approval on expenses related to accountant and audit fee of Guarantee Fund Financial Statement;
- Providing approval on utilization of Guarantee Fund to obtain bank credit facility; and
- Providing approval on the placement of Guarantee Fund in the bank for investment in time deposit and in securities custody account for investment in government securities.

3. Related to Compliance and Regulation

- Monitoring daily operations related to the administration of Guarantee Fund management, and ensuring the implementation of the Company's risk management is conformed to prevailing provisions and policies;
- Ensuring that the Board of Directors, Management and Guarantee and Risk Management Division of IDCclear conduct Guarantee Fund management and risk management according to prevailing laws and regulations of capital market; and
- In case of an indication of violation of prevailing laws and regulations of the capital market, KKPR Committee may conduct a review of policy of the Guarantee Fund administration and management, as well as a review on risk management's parameters.

4. Related to Complaints

Conducting review on complaints from third party such as CM and OJK, regarding indication of fraud related to the Company's risk management also the administration and management of the Guarantee Fund.

Program Pelatihan Komite KKPR

KPEI memberikan dukungan kepada anggota Komite KKPR untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mereka guna meningkatkan keterampilan serta kemampuan dalam menjalankan tugas. Dalam mendukung hal tersebut, KPEI menyediakan fasilitas pengembangan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, *workshop* dan bentuk pengembangan lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan Komite KKPR Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite KKPR telah menyelesaikan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi dan hasil *monitoring* kebijakan pengelolaan risiko Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada Direksi.

Training Programs for KKPR Committee

IDCclear provides support to the members of KKPR Committee to broaden their knowledge and insights in order to enhance their skills and capabilities in carrying out their duties. To support this, IDCclear offers competency development facilities through various activities such as trainings, seminars, workshops, and other forms of development.

Implementation of KKPR Committee's activities in 2024

In 2024, KKPR Committee completed the following activities:

- Provided recommendations and monitoring results on the risk management policies of Exchange Transaction Settlement Guarantee to the Board of Directors.

- Memberikan saran dan/atau rekomendasi terkait penanganan gagal bayar pada AK (jika diminta oleh Direksi).
- Menetapkan kebijakan penggunaan dan investasi Dana Jaminan.
- Merekomendasikan persentase laba bersih Perusahaan yang wajib disisihkan untuk membentuk Cadangan Jaminan kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas besarnya biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan.
- Memastikan bahwa Direksi, dan Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) melakukan pengelolaan Dana Jaminan dan proses manajemen pengelolaan risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Melakukan review terhadap kebijakan pengadministrasian dan pengelolaan Dana Jaminan serta review terhadap parameter-parameter manajemen risiko dalam hal terdapat indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Menghadiri rapat Komite dan Rapat dengan Direksi.
- Melaporkan dan meminta petunjuk atau masukan terkait permasalahan - permasalahan operasional yang berisiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan.

KOMITE HAIRCUT

Komite *Haircut* dibentuk untuk mendukung Direksi dalam mengelola berbagai aspek terkait penetapan nilai *haircut* oleh Perusahaan. Nilai *haircut* adalah persentase tertentu yang ditetapkan KPEI sebagai pengurang nilai pasar produk investasi yang wajar. Nilai ini harus dihitung dalam Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) serta agunan milik Anggota Bursa. Pembentukan Komite *Haircut* merujuk pada Peraturan OJK No. 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, serta Peraturan KPEI No. II-11 tentang Komite *Haircut*.

Piagam Komite *Haircut*

Komite *Haircut* KPEI telah memiliki Piagam komite sejak tahun 2014 yang mengatur mengenai tata tertib organisasi dan pedoman kerja komite. Piagam Komite *Haircut* ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menjaga keselarasan dengan dinamisme usaha, industri pasar modal dan perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Piagam Komite *Haircut* yang berlaku pada tahun buku 2024 adalah yang diperbarui dan ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 15 Desember 2023.

Komposisi Komite *Haircut*

Anggota Komite *Haircut* diwajibkan memiliki pemahaman mendalam dan keahlian di bidang pasar modal serta pengetahuan yang memadai mengenai peraturan di sektor tersebut, terutama terkait MKBD. Kriteria pendukung lainnya meliputi kemampuan berkomunikasi secara efektif, sikap independen, objektif, serta profesional dalam menjalankan tugas.

- Offered advice and/or recommendations related to handling payment defaults by Clearing Members (if requested by the Board of Directors).
- Established policies regarding the use and investment of the Guarantee Fund.
- Recommended the percentage of the Company's net profit to be allocated for the establishment of the Guarantee Reserve to the Board of Directors.
- Approved the amount of fees related to accounting and audit services for the Guarantee Fund's financial statements.
- Ensured that the Board of Directors and the Guarantee and Risk Management Division (PPR) manage the Guarantee Fund and implement the risk management process in accordance with the prevailing capital market regulations.
- Conducted a review of the policies on administration and management of the Guarantee Fund, as well as a review of risk management parameters in cases where there were indications of violations of the prevailing capital market regulations.
- Attended Committee meetings and meetings with the Board of Directors.
- Reported and sought guidance or input on high-risk and significant operational issues that needed to be communicated.

HAIRCUT COMMITTEE

The Haircut Committee was established to support the Board of Directors in managing various aspects related to the determination of haircut values by the Company. A haircut value is a certain percentage set by IDCclear as a deduction from the fair market value of an investment product. This value must be calculated in the Adjusted Net Working Capital (MKBD) as well as in the collateral owned by Exchange Members. The formation of the Haircut Committee refers to OJK Regulation No. 52/POJK.04/2020 on the Maintenance and Reporting of Adjusted Net Working Capital, as well as IDCclear Regulation No. II-11 on the Haircut Committee.

Haircut Committee Charter

IDCclear's Haircut Committee has had a Committee Charter since 2014, which governs the organizational rules and working guidelines of the committee. The Haircut Committee Charter is reviewed and updated regularly to ensure alignment with business dynamics, the capital market industry, and changes in applicable laws and regulations. The Haircut Committee Charter applicable for the 2024 financial year is the revised version ratified by the Board of Directors on December 15, 2023.

Haircut Committee's Composition

Members of the Haircut Committee are required to possess in-depth understanding and expertise in the capital market sector, as well as sufficient knowledge of the relevant regulations, particularly those related to Adjusted Net Working Capital (MKBD). Other supporting criteria include the ability to communicate effectively, an independent and objective attitude, and professionalism in carrying out their duties.

Komite *Haircut* KPEI terdiri dari 11 anggota dengan 1 (satu) orang bertindak sebagai koordinator. Struktur keanggotaan Komite *Haircut*, yaitu:

1. Dua orang anggota merupakan Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan yang membawahi fungsi Kliring dan Penjaminan.
2. Dua orang anggota merupakan Direktur Bursa Efek yang membawahi fungsi Pengawasan dan fungsi Keanggotaan atau Pencatatan.
3. Satu orang anggota merupakan Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membawahi fungsi Jasa Kustodian.
4. Lima orang anggota merupakan Direktur Anggota Kliring yang tidak saling terafiliasi dan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan pengalaman yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Satu orang anggota merupakan profesional ataupun praktisi yang memenuhi persyaratan integritas, memahami peraturan di bidang pasar modal, dan memiliki kompetensi di bidang penilaian efek.

Susunan anggota Komite *Haircut* KPEI untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

IDClear's Haircut Committee consists of 11 members, with 1 (one) individual serving as the coordinator. The structure of the Haircut Committee membership is as follows:

1. Two members are the Director of the Clearing Guarantee Institution in charge of the Clearing and Guarantee function.
2. Two members are the Director of the Stock Exchange in charge of the Supervision and Membership or Listing functions.
3. One member is the Director of the Depository and Settlement Institution in charge of the Custodian Services function.
4. Five members are Directors of Clearing Members who are not mutually affiliated and meet the integrity, competence and experience requirements set by the Company.
5. One member is a professional or practitioner who meets the integrity requirements, understands the regulations in the capital market, and has competence in the field of securities valuation.

The composition of the Haircut Committee of IDCclear for the financial year 2024 is as follows:

No	Nama Name	Perusahaan Company	Periode Period	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	Kristian Sihar Manullang	PT Bursa Efek Indonesia	Sesuai Masa Jabatan Direktur di PT Bursa Efek Indonesia According to the Term of Office of the Director at IDX	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
2	Irvan Susandy	PT Bursa Efek Indonesia	Sesuai Masa Jabatan Direktur di PT Bursa Efek Indonesia According to the Term of Office of the Director at IDX	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
3	Antonius Herman Azwar	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Sesuai Masa Jabatan Direktur di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia According to the Term of Office of the Director at IDCclear	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
4	Umi Kulsum	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Sesuai Masa Jabatan Direktur di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia According to the Term of Office of the Director at IDCclear	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
5	Eqy Essiqy	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Sesuai Masa Jabatan Direktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia According to the Term of Office of the Director at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
6	Betty Goenawan	PT OCBC Sekuritas Indonesia	04 Oktober 2023 - 04 Oktober 2025 October 04, 2023 - October 04, 2025	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
7	Philmon Samuel Tanuri	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	04 Oktober 2023 - 04 Oktober 2025 October 04, 2023 - October 04, 2025	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
8	Alex Widi Kristiono	PT Mandiri Sekuritas	04 Oktober 2023 - 04 Oktober 2025 October 04, 2023 - October 04, 2025	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
9	Wientoro Prasetyo	PT Lotus Andalan Sekuritas	04 Oktober 2023 - 04 Oktober 2025 October 04, 2023 - October 04, 2025	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
10	Changkun Shin	PT Kiwoom Sekuritas Indonesia	04 Oktober 2023 - 04 Oktober 2025 October 04, 2023 - October 04, 2025	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023
11	Marsangap P. Tamba	Profesional/ Praktisi Professional/ Practitioner	04 Oktober 2023 - 04 Oktober 2025 October 04, 2023 - October 04, 2025	SK Direksi Nomor Kep-050/DIR/KPEI/1023 Board of Directors Decision Letter No. Kep-050/DIR/KPEI/1023

Independensi Komite Haircut

Setiap anggota Komite *Haircut* diwajibkan menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Apabila ditemukan adanya potensi benturan kepentingan pada salah satu atau beberapa anggota terkait pembahasan mengenai penetapan nilai *haircut*, anggota tersebut tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam diskusi, memberikan saran, maupun rekomendasi terkait topik tersebut. Selain itu, setiap anggota Komite *Haircut* harus bebas dari keterkaitan atau afiliasi dengan anggota lain dalam komite.

Rapat Komite Haircut

Komite *Haircut* diwajibkan mengadakan rapat setidaknya 1 (satu) kali setiap bulan dengan kemungkinan rapat tambahan jika diperlukan. Sepanjang tahun buku 2024, Komite *Haircut* telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite *Haircut* di Tahun 2024
Frequency and Attendance Level of Haircut Committee Meeting in 2024

No	Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Kristian Sihar Manullang	PT Bursa Efek Indonesia	12	11	91.7%
2	Irvan Susandy	PT Bursa Efek Indonesia	12	9	75.0%
3	Antonius Herman Azwar	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	12	11	91.7%
4	Umi Kulsum	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	12	10	83.3%
5	Eqy Essiqy	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	12	9	75.0%
6	Betty Goenawan	PT OCBC Sekuritas Indonesia	12	10	83.3%
7	Philmon Samuel Tanuri	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	12	10	83.3%
8	Alex Widi Kristiono	PT Mandiri Sekuritas	12	9	75.0%
9	Wientoro Prasetyo	PT Lotus Andalan Sekuritas	12	10	83.3%
10	Changkun Shin	PT Kiwoom Sekuritas Indonesia	12	10	83.3%
11	Marsangap P. Tamba	Profesional/Praktisi	12	10	83.3%

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam rangka menjalankan tugas secara lebih efektif dan mencapai kinerja yang optimal, tanggung jawab Komite *Haircut* terbagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

1. Terkait Perhitungan Nilai *Haircut*
 - a. Menetapkan penyusunan kriteria dan model (formula) penentuan *haircut* efek bersifat Ekuitas atau Efek Beragun Aset Arus Kas Tidak Tetap yang tercatat dan akan tercatat (*listing*) di BEI;
 - b. Menetapkan besarnya *haircut* efek;
 - c. Mengumumkan besarnya *haircut* atas efek sebagaimana poin (b) di atas pada laman Perusahaan paling lambat satu hari Bursa sebelum dicatatkan (*listing*) di BEI;
 - d. Mengumumkan besarnya *haircut* efek yang akan tercatat (*listing*) di BEI pada laman Perusahaan paling lambat satu hari Bursa sebelum dicatatkan (*listing*) di BEI;
 - e. Memastikan bahwa Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) dan Direksi Perusahaan menyediakan data yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta *best practice* yang berkaitan dengan perhitungan *haircut* efek;

Independence of the Haircut Committee

Each member of the Haircut Committee is required to maintain independence and professionalism in carrying out their duties. If a potential conflict of interest is identified involving one or more members in relation to the discussion on the determination of haircut values, the concerned member(s) shall not be permitted to participate in discussions, provide advice, or offer recommendations on the topic. Additionally, each member of the Haircut Committee must be free from any affiliation or connection with other members within the committee..

Meetings of the Haircut Committee

The Haircut Committee is required to hold meetings at least once a month, with additional meetings convened as necessary. Throughout the 2024 financial year, the Haircut Committee held a total of 12 meetings with the following attendance rate by members:

Duties and Responsibilities

In order to perform its duties more effectively and achieve optimal performance, the responsibilities of the Haircut Committee are divided into 2 (two) main groups, namely:

1. Related to Haircut Value Calculation
 - a. Defining criteria and formulas in determining haircut for Equity Securities or Asset Backed Securities with varying cash flow, which are listed and to be listed on IDX;
 - b. Defining the value of Securities Haircut;
 - c. Announcing haircut value for securities mentioned in point b on the Company's website no later than one trading day before the securities are listed on the IDX;
 - d. Announcing haircut value for securities to be listed on the IDX on the Company's website no later than one trading day before the listing on the IDX;
 - e. Ensuring the Guarantee and Risk Management Division (PPR) and the Company's Board of Directors provide accurate data in accordance with capital market regulations, other applicable legislation, and best practices related to securities haircut calculations;

- f. Memastikan bahwa Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko dan Direksi Perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan *best practice* yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perhitungan *haircut* efek;
 - g. Jika ada indikasi bahwa terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan *best practice* yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perhitungan *haircut* efek, maka Komite Haircut dapat melakukan *review* terhadap parameter dan perhitungan *haircut* efek;
 - h. Dalam hal terjadi kondisi material, antara lain penghentian transaksi sementara dan aksi korporasi dan terkait dengan pengendalian risiko penyelesaian transaksi bursa, Komite Haircut dapat mengubah besaran *haircut* yang telah ditetapkan; dan
 - i. Menetapkan kriteria kondisi material yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan besaran *haircut* sebagaimana poin (h) di atas dan tata cara pengumuman dan pemberlakuan pengubahan *haircut*, serta mendelegasikan pelaksanaannya kepada Perusahaan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Terkait Pengaduan
 - a. Melakukan penelaahan atas pengaduan dari pihak ketiga, antara lain Anggota Kliring dan Emiten mengenai parameter perhitungan *haircut* efek yang dapat memberikan penilaian yang tidak objektif terhadap perhitungan Haircut Efek.
 - b. Syarat pengaduan:
 - Pengaduan disampaikan secara tertulis
 - Menyebutkan identitas pelapor
 - Memberikan penjelasan mengenai alasan pengaduan yang antara lain dapat menyebabkan penilaian Haircut Efek menjadi tidak objektif
 - c. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pelapor:
 - Komite Haircut dapat berkoordinasi dengan Divisi PPR untuk melakukan penelaahan atas pengaduan yang diterima;
 - Jika pengaduan benar adanya dan dapat dibuktikan, maka Komite Haircut akan melakukan terhadap parameter perhitungan Haircut Efek.
 3. Tugas dan Tanggung Jawab Terkait Pengumuman Nilai Haircut
 - a. Pihak yang berwenang menetapkan pengumuman nilai *haircut* adalah Komite Haircut.
 - b. Pengumuman Nilai Haircut ditandatangani oleh dua orang Komite Haircut
 - c. Tanda tangan pada pengumuman nilai *haircut* dapat berupa tanda tangan basah/asli maupun tanda tangan elektronik/e-sign.
 - d. Penomoran pengumuman nilai *haircut* menggunakan penomoran Komite Haircut.
 - e. Komite Haircut mengumumkan besarnya nilai *haircut* pada laman website KPEI.
- f. Ensuring the Guarantee and Risk Management Division and the Company's Board of Directors do not violate regulations and best practices in the capital market and other relevant legislation related to securities haircut calculations;
 - g. In case of indication of violation against capital market regulations and best practices, as other regulations related to securities haircut calculation, the Haircut Committee may conduct a review on haircut parameters and calculation;
 - h. In case of material condition, such as temporary suspension and corporate action, and related to risk management on securities exchange transaction settlement, the Haircut Committee may revise the haircut value; and
 - i. Defining criteria of material condition that may require adjustment on haircut value as mentioned in point h above, and procedure of announcement and enactment of haircut adjustment, as well as delegation of its implementation to the Company.
2. Duties and Responsibilities related to Complaints
 - a. Reviewing complaints from third parties, including Clearing Members and Issuers regarding the parameters for calculating securities haircuts that may provide non-objective assessments of Securities Haircut calculations.
 - b. Conditions for filing a complaint:
 - Complaints submitted in writing
 - Stating the identity of the reporter
 - Providing an explanation regarding the reasons for the complaint which among other things can cause the Securities Haircut assessment to be non-objective
 - c. In handling complaints submitted by the complainant:
 - The Haircut Committee can coordinate with the PPR Division to review the complaints received;
 - If the complaint is true and can be proven, the Haircut Committee will review the parameters for calculating the Securities Haircut.
 3. Duties and Responsibilities related to Announcement of Haircut Value.
 - a. The party authorized to determine the announcement of the haircut value is the Haircut Committee.
 - b. The announcement of the haircut value is signed by two Haircut Committee members.
 - c. The signature on the announcement of the haircut value can be in the form of a wet/manual signature or an electronic signature/e-sign.
 - d. The numbering of the announcement of the haircut value uses the Haircut Committee numbering.
 - e. The Haircut Committee announced the amount of the haircut on the IDCclear website.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Komite *Haircut*
 - a. Koordinator Komite *Haircut* memimpin rapat Komite *Haircut*, baik secara *offline* ataupun melalui media *online*.
 - b. Koordinator Komite *Haircut* memimpin rapat dalam hal dilakukan pemungutan suara melalui musyawarah mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Koordinator mengawasi pemenuhan tindak lanjut sesuai Berita Acara rapat.

Kewenangan Komite *Haircut*

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite *Haircut* memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap data fundamental dan data transaksi emiten yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana angka 1 di atas, Komite *Haircut* wajib bekerja sama dengan Divisi PPR.
3. Jika diperlukan, dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite *Haircut*.
4. Memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite *Haircut*.

Program Pelatihan Komite *Haircut*

KPEI mendorong dan memfasilitasi pengembangan kompetensi anggota Komite *Haircut* melalui pelatihan, seminar, workshop dan model pengembangan lainnya, guna menambah pengetahuan dan wawasan dalam melaksanakan tugas komite.

Pelaksanaan Kegiatan Komite *Haircut* Tahun 2024

Di tahun 2024, Komite *Haircut* telah menyelesaikan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat bulanan Komite *Haircut*
2. Memberikan usulan penyusunan kriteria dan model (formula) penentuan dan penetapan besaran *haircut* efek
3. Memberikan informasi material yang dapat menjadi pertimbangan penilaian *haircut* efek
4. Melakukan *review* atas parameter dan perhitungan *haircut*, apabila terdapat indikasi pelanggaran di bidang pasar modal
5. Memastikan Divisi PPR dan Direksi KPEI menyediakan data yang benar sesuai peraturan di bidang pasar modal
6. Memastikan Divisi PPR dan Direksi KPEI tidak melakukan pelanggaran di bidang pasar modal
7. Melakukan penelaahan atas pengaduan dari pihak ketiga terkait parameter perhitungan *haircut* efek dan bekerja sama dengan Divisi PPR dalam melakukan penelaahan yang dimaksud
8. Memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak

4. Duties and Responsibilities of Haircut Committee Coordinator
 - a. The Haircut Committee Coordinator leads Haircut Committee meetings, both offline and through online media.
 - b. The Haircut Committee Coordinator leads the meeting in the event that voting is carried out through deliberation and consensus. If a decision based on deliberation and consensus is not reached, the decision will be taken based on a majority vote.
 - c. The coordinator supervises the fulfillment of follow-up actions according to the Minutes of the meeting results.

Authorities of the Haircut Committee

To support the implementation of its duties and responsibilities, the Haircut Committee has the following authorities:

1. The committee can access full, unrestricted access to fundamental data and issuer transaction data relevant to its duties.
2. In exercising the authority as stated in point 1 above, the Haircut Committee must collaborate with the PPR Division.
3. The committee may hire experts or consultants to assist whenever needed.
4. The committee may obtain information related to the execution of the Haircut Committee's duties and responsibilities.

Training Programs for the Haircut Committee

IDCclear encourages and facilitates the competency development of Haircut Committee members through trainings, seminars, workshops, and other development models to broaden their knowledge and insights in carrying out the committee's duties.

Implementation of the Haircut Committee's Activities in 2024

In 2024, the Haircut Committee has completed the following activities, among others:

1. Holding monthly Haircut Committee meetings
2. Proposing the development of criteria and models (formulas) for determining and setting securities haircut values
3. Providing material information that may be considered in assessing securities haircuts
4. Reviewing haircut parameters and calculations in case of indications of capital market violations
5. Ensuring the Guarantee and Risk Management (PPR) Division and IDCclear's Board of Directors provide accurate data in accordance with capital market regulations
6. Ensuring the PPR Division and IDCclear's Board of Directors do not commit violations in the capital market sector
7. Reviewing complaints from third parties regarding haircut calculation parameters and collaborating with the PPR Division in conducting the review
8. Contributing to decision-making either through consensus or majority voting

9. Melakukan pemantauan atas kebijakan manajemen risiko terkait dengan perhitungan *haircut*

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi KPEI dibentuk oleh Direksi dengan tujuan memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terkait pengambilan keputusan dan strategi investasi keuangan. Selain itu, Komite Investasi bertugas memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dapat menghasilkan kinerja investasi keuangan yang optimal.

Piagam Komite Investasi

Komite Investasi telah memiliki Piagam sejak tahun 2014 yang secara berkala ditinjau dan diperbarui agar tetap relevan serta selaras dengan perkembangan Perusahaan, industri pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam tersebut mencakup ketentuan mengenai organisasi komite, tata tertib, serta pedoman kerja komite. Revisi terbaru Piagam Komite Investasi dilakukan pada 6 Maret 2023

Komposisi Komite Investasi

No	Nama Name	Jabatan dalam Perusahaan Position in the Company	Periode Period	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	Iding Pardi	Direktur Utama President Director	2022 – 2026	SK Direksi No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 tanggal 20 Maret 2023 Board of Directors' Decision Letter No. No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 dated March 20, 2023
2	Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	2022 – 2026	SK Direksi No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 tanggal 20 Maret 2023 Board of Directors' Decision Letter No. No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 dated March 20, 2023
3	Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	2022 – 2026	SK Direksi No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 tanggal 20 Maret 2023 Board of Directors' Decision Letter No. No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 dated March 20, 2023
4	Kristina Ernawati	Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi Head of Finance and Accounting Division	2019 – sekarang 2019 - present	SK Direksi No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 tanggal 20 Maret 2023 Board of Directors' Decision Letter No. No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 dated March 20, 2023
5	Natalina I.A. Hutapea	Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko Head of Guarantee and Risk Management Division	Nov 2024 – Sekarang November 2024 - Present	SK Direksi No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 tanggal 20 Maret 2023 Board of Directors' Decision Letter No. No. Kep-026/DIR/KPEI/0323 dated March 20, 2023

Independensi Komite Investasi

Anggota Komite Investasi terdiri dari Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan langsung dengan aktivitas investasi Perusahaan. Oleh karena itu, aspek independensi komite menitikberatkan pada integritas serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan Perusahaan tanpa dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain. Sebagai bagian dari insan KPEI, seluruh anggota Komite wajib mematuhi peraturan internal Perusahaan dan hukum yang berlaku.

9. Monitoring risk management policies related to haircut calculations

INVESTMENT COMMITTEE

The IDClear Investment Committee was established by the Board of Directors with the purpose of providing input, advice, and recommendations related to financial investment decision-making and strategy. In addition, the Investment Committee is responsible for ensuring that the formulated strategies can deliver optimal financial investment performance.

Investment Committee Charter

The Investment Committee has had a Charter since 2014, which is reviewed and updated periodically to remain relevant and aligned with developments in the Company, the capital market industry, and applicable laws and regulations. The Charter includes provisions regarding the committee's organization, rules of conduct, and working guidelines. The most recent revision of the Investment Committee Charter was made on March 6, 2023.

Investment Committee's Composition

Independence of the Investment Committee

Members of the Investment Committee consist of Board of Directors and Division Heads directly related to the Company's investment activities. Therefore, the committee's independence focuses on integrity and a commitment to prioritize the Company's interests without influence or pressure from external parties. As part of IDClear personnel, all committee members are required to comply with the Company's internal regulations and applicable laws.

Rapat Komite Investasi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Piagam Komite, Komite Investasi diwajibkan mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) kali untuk pemaparan evaluasi dan perencanaan investasi oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi, dan
- 3 (tiga) kali untuk membahas market update dan/atau *market outlook* oleh Manajer Investasi, Bank, atau pihak eksternal lain yang ditunjuk oleh KPEI.

Jika diperlukan, Komite Investasi dapat mengadakan rapat tambahan. Ketentuan lengkap mengenai tata cara pelaksanaan rapat Komite telah diatur secara rinci dalam Piagam Komite. Pada tahun 2024, Komite Investasi melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite sebagai berikut:

No	Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
1	Iding Pardi	Direktur Utama President Director	4	3	75%
2	Antonius Herman Azwar	Direktur Kliring dan Penjaminan Director of Clearing and Guarantee	4	3	75%
3	Umi Kulsum	Direktur Teknologi Informasi dan Dukungan Bisnis Director of Information Technology and Business Support	4	4	100%
4	Kristina Ernawati	Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi Head of Finance and Accounting Division	4	4	100%
5	Natalina I.A Hutapea	Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko Head of Guarantee and Risk Management Division	2	1	100%

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi mendukung kinerja Direksi melalui tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam komite, mencakup:

1. Meninjau serta memberikan saran dan masukan kepada Direksi baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan rekomendasi strategi investasi keuangan yang disusun dan diajukan oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi, guna memastikan bahwa rekomendasi strategi investasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. Mengambil keputusan investasi untuk mencapai hasil investasi yang optimal dengan pengelolaan yang *prudent*.

Rekomendasi ataupun saran yang diberikan oleh Komite Investasi kepada Direksi sehubungan dengan keputusan strategi investasi keuangan, tidak bersifat mengikat. Pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi tersebut tetap berada di Direksi sepenuhnya.

Meetings of the Investment Committee

According to the provisions set out in the Committee Charter, the Investment Committee is required to hold at least 4 (four) meetings per year, with the following breakdown:

- 1 (one) meeting for the presentation of investment evaluation and planning by the Finance and Accounting Division; and
- 3 (three) meetings to discuss market updates and/or market outlooks by Investment Managers, Banks, or other external parties appointed by IDClear.

If necessary, the Investment Committee may hold additional meetings. Detailed provisions regarding the procedures for conducting committee meetings are fully regulated in the Committee Charter. In 2024, the Investment Committee held 4 (four) meetings with the following details of meeting frequency and attendance rates of committee members:

Duties and Responsibilities

The Investment Committee supports the performance of the Board of Directors through duties and responsibilities as outlined in the Committee Charter, including:

1. Reviewing and providing advice and input, whether requested or unsolicited, to the Board of Directors regarding the financial investment strategy recommendations prepared and submitted by the Finance and Accounting Division, to ensure that such recommendations comply with applicable regulations and procedures.
2. Making investment decisions to achieve optimal investment returns through prudent management.

Any recommendations or advice provided by the Investment Committee to the Board of Directors regarding financial investment strategy decisions are non-binding. The decision-making authority and responsibility for implementing such recommendations remain fully with the Board of Directors.

Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Investasi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Berkomunikasi dan berinteraksi dengan Direksi secara langsung untuk melaporkan dan meminta arahan atau masukan terkait keputusan investasi Perusahaan yang berisiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan.
2. Memperoleh informasi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi, khususnya informasi tentang evaluasi dan perencanaan (strategi) investasi keuangan dari Divisi Akuntansi dan Keuangan.

Program Pelatihan Komite Investasi

KPEI terus mendukung pengembangan kompetensi SDM, termasuk anggota Komite Investasi. Berbagai fasilitas seperti pelatihan, seminar, *workshop*, dan metode pengembangan lainnya disediakan untuk memperluas pengetahuan serta wawasan yang mendukung pelaksanaan tugas komite.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Investasi Tahun 2024

Berdasarkan ruang lingkup kerja, aktivitas Komite Investasi berfokus pada dinamika investasi dan interaksi dengan pelaku pasar modal. Pada tahun 2024, sejumlah kegiatan Komite Investasi yang direncanakan meliputi:

No	Pelaksanaan Implementation	Kegiatan Activity
1	Februari 2024 February 2024	Rapat Komite Investasi Evaluasi Portofolio Tahun 2023 dan Rencana Investasi Semester 1 Tahun 2024 Investment Committee Meeting on 2023 Portfolio Evaluation and Investment Plan for the First Semester of 2024
2	Februari 2024 February 2024	<i>Bond Market Update</i> Q1 Tahun 2024 Bersama PHEI Q1 2024 Bond Market Update with PHEI
3	Oktober 2024 October 2024	<i>Market Update & Outlook</i> Pasca Pelantikan Presiden Tahun 2024 Bersama Infovesta Market Update & Outlook Post-2024 Presidential Inauguration with Infovesta
4	Desember 2024 December 2024	<i>Market Outlook</i> Tahun 2025 Bersama Infovesta 2025 Market Outlook with Infovesta

Authority

In carrying out its duties and responsibilities, the Investment Committee is authorized to:

1. Communicate and interact directly with the Board of Directors to report and request direction or input regarding high-risk and strategically significant Company investment decisions.
2. Obtain information related to the execution of the Investment Committee's duties and responsibilities, particularly information concerning the evaluation and planning (strategy) of financial investments from the Finance and Accounting Division.

Training Programs for the Investment Committee

IDClear continuously supports the development of human resource competencies, including those of the Investment Committee members. Various facilities such as training, seminars, workshops, and other development methods are provided to broaden knowledge and insights that support the committee's duties.

Implementation of Investment Committee's Activities in 2024

Based on its scope of work, the activities of the Investment Committee focus on investment dynamics and interaction with capital market participants. In 2024, the planned activities of the Investment Committee include:

KOMITE KLIRING CCP DAN PENANGANAN RISIKO

Berdasarkan ketentuan dalam PADG BI No.9/2014 tentang Penyelenggaraan CCP yang tercantum pada pasal 17 poin C yaitu Pembentukan Komite dalam Mendukung Penyelenggaraan CCP.

Komite dibentuk dengan tujuan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan operasional dalam mendukung pelaksanaan kliring dan penjaminan Penyelesaian transaksi PUVA, serta memberikan rekomendasi atas penanganan gagal bayar pada Anggota CCP.

CCP CLEARING COMMITTEE AND RISK MANAGEMENT

Based on the provisions in PADG BI No.9/2014 concerning the Implementation of CCP as stated in Article 17 point C, namely the Establishment of a Committee to Support the Implementation of CCP.

The Committee is established with the purpose of providing input, advice, and recommendations to the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding operational policies in support of the implementation of clearing and settlement of PUVA transactions, as well as providing recommendations on the handling of defaults by CCP members.

Piagam Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

Dalam rangka mendukung kinerja komite, maka disusun Piagam Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko untuk dapat menjadi pedoman bagi komite dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara profesional. Dengan adanya piagam ini diharapkan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam melaksanakan tugasnya akan bertindak dan bersikap berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, peraturan yang berlaku di Perusahaan, kode etik, dan *best practices* GCG.

Segala hal yang tertuang dalam Piagam Komite mengacu pada referensi berikut ini:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.
3. *Rule Book* CCP Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
4. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024.
5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Guidelines*) PT KPEI.
6. Pedoman Perilaku PT KPEI.
7. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) – Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2021.
8. *Best practices*.

Guna memastikan keselarasan dengan dinamika bisnis dan perubahan regulasi, Piagam Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko ditinjau dan diperbarui secara berkala. Piagam yang berlaku untuk tahun buku 2025 adalah versi terbaru yang telah diperbarui dan disahkan oleh Direksi pada bulan Februari 2025.

Komposisi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

Anggota Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko terdiri dari 8 Anggota pilot Bank dengan latar belakang kompetensi dan pengalaman yang sesuai untuk mendukung tugas-tugas Komite. Salah satu di antaranya ditunjuk sebagai koordinator. Susunan anggota Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko untuk tahun 2024, yaitu:

No.	Nama* Name*	Perusahaan Company	Periode Period	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
1	Radiman Ali Rohim	PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024
2	Daniel Edison Hutapea	PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024
3	Satyo Haryo Wibisono	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024

CCP Clearing Committee and Risk Management Charter

In order to support the performance of the committee, the CCP Clearing and Risk Management Committee Charter has been drafted to serve as a guideline for the committee in carrying out its duties, responsibilities, and authorities in a professional manner. With this charter, it is hoped that the CCP Clearing and Risk Management Committee will act and behave in accordance with applicable laws and regulations, company regulations, codes of conduct, and GCG best practices in carrying out its duties.

All matters contained in the Committee Charter refer to the following references:

1. Bank Indonesia Regulation Number 6 of 2024 concerning the Money Market and Foreign Exchange Market.
2. Board of Governors Regulation Number 9 of 2024 concerning the Implementation of Central Counterparty.
3. CCP Rule Book for the Money Market and Foreign Exchange Market.
4. Decision of the Board of Directors of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Number: KEP-079/DIR/IDClear/1024.
5. Corporate Governance Guidelines of PT KPEI.
6. Code of Conduct of PT KPEI.
7. General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia (PUG-KI) – National Committee on Governance Policy (KNKG) 2021.
8. Best practices.

To ensure alignment with business dynamics and regulatory changes, the Charter of the CCP Clearing and Risk Management Committee is reviewed and updated periodically. The Charter applicable for the 2025 financial year is the latest version that has been updated and approved by the Board of Directors in February 2025.

Composition of the CCP Clearing and Risk Management Committee

The CCP Clearing and Risk Management Committee consists of eight pilot bank members with the appropriate competencies and experience to support the Committee's tasks. One of them is appointed as coordinator. The composition of the CCP Clearing and Risk Management Committee for 2024 is as follows:

No.	Nama* Name*	Perusahaan Company	Periode Period	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment
4	Bily Arkan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024
5	Irwan Santoso	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024
6	Rayendra Minarsa Goenawan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024
7	Benny Tresanto	PT Bank Permata Tbk (Permata)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024
8	Itang Rusdinar	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	9 Oktober 2024 – 8 Oktober 2026 October 9, 2024 – October 8, 2026	Surat Keputusan Direksi nomor: KEP-079/DIR/KPEI/1024 tanggal 9 Oktober 2024 Board of Directors Decision Letter No. KEP-079/DIR/KPEI/1024 dated October 9, 2024

*) Jabatan per Tahun 2024

*) Position as of 2024

Independensi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

Keanggotaan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko harus memenuhi ketentuan yaitu:

1. Seluruh anggota merupakan perwakilan dari Anggota Kliring yang tidak terafiliasi satu dengan lainnya;
2. Memenuhi kualifikasi sebagai diatur dalam *Rulebook* CCP PUVA;
3. Anggota Komite tidak memiliki konflik kepentingan dengan KPEI;
4. Menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen;
5. Bersikap independen, objektif dan profesional.

Rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

Pelaksanaan Rapat Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Rapat rutin diselenggarakan paling sedikit sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atau lebih cepat;
2. Dalam hal dianggap perlu, Anggota Komite dapat mengusulkan dan mengadakan pertemuan apabila terdapat kondisi tertentu yang harus didiskusikan dan diputuskan oleh Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
3. Rapat diselenggarakan di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau tempat lainnya yang disepakati bersama;
4. Setiap rapat dikoordinir oleh koordinator atau anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang ditunjuk oleh koordinator atau dapat diwakilkan kepada Perusahaan;
5. Rapat dapat diselenggarakan atau dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference*, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Independence of the CCP Clearing Committee and Risk Management

Membership of the CCP Clearing Committee and Risk Management must meet the following requirements:

1. All members are representatives of Clearing Members who are not affiliated with one another;
2. Meet the qualifications as stipulated in the CCP PUVA Rulebook;
3. Committee members have no conflict of interest with IDCclear;
4. Maintain the confidentiality and security of documents;
5. Be independent, objective and professional.

CCP Clearing and Risk Management Committee Meeting

The implementation of the CCP Clearing and Risk Management Committee Meeting is as follows:

1. Regular meetings shall be held at least once every 3 (three) months or sooner;
2. In cases deemed necessary, Committee Members may propose and hold meetings if there are specific conditions that must be discussed and decided by the CCP Clearing Committee and Risk Management;
3. Meetings are held at the Company's place of business or another location agreed upon by all parties;
4. Each meeting is coordinated by the coordinator or a member of the CCP Clearing and Risk Management Committee designated by the coordinator or may be delegated to the Company;
5. Meetings may be held or conducted via teleconference, video conference, or other electronic media that allow all meeting participants to see and/or hear each other directly and participate in the meeting.

Selama tahun buku 2024, Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko telah mengadakan satu kali rapat pada bulan November. Frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite sebagai berikut:

During the 2024 financial year, the CCP Clearing and Risk Management Committee held one meeting in November. The frequency and attendance rate of each committee member are as follows:

No	Nama Name	Jabatan di Komite Position on the Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
1	Benny Tresanto	Anggota Member	1	1	100%
2	Bily Arkan	Anggota Member	1	1	100%
3	Daniel Edison H.	Anggota Member	1	1	100%
4	Irwan Santoso	Anggota Member	1	-	0%
5	Itang Rusdinar	Anggota Member	1	1	100%
6	Radiman Ali R.	Anggota Member	1	1	100%
7	Rayendra Minarsa	Anggota Member	1	-	0%
8	Satyo Haryo W	Koordinator merangkap Anggota Coordinator and Member	1	1	100%

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kegiatan operasional, meliputi:

1. Kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko transaksi PUVA;
2. Kebijakan pengelolaan dan investasi *Initial Margin* (IM) dan *Default Fund Contribution* (DFC);
3. Penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.

Tugas dan tanggung jawab dalam menjaga profesionalitas, meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen;
2. Bersikap independen, objektif dan profesional.

Tugas dan tanggung jawab terkait ketaatan pada peraturan meliputi:

1. Melakukan pemantauan untuk mendorong agar pelaksanaan operasional harian terkait dengan pengadministrasian dan pengelolaan Dana Jaminan serta pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan agar tidak menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Memastikan bahwa Direksi dan Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) melakukan pengelolaan Dana Jaminan dan proses manajemen pengelolaan risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar uang dan valuta asing dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Jaminan dan manajemen risiko Perusahaan;
3. Memastikan bahwa Direksi, Divisi PPR dan Unit Pasar Uang dan Valuta Asing (Unit PUV) tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana jaminan dan manajemen risiko Perusahaan;

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities in providing recommendations for operational activities include:

1. PUVA transaction risk management and control policies;
2. Initial Margin (IM) and Default Fund Contribution (DFC) management and investment policies;
3. Handling of CCP Member Default Conditions.

Duties and responsibilities in maintaining professionalism include:

1. Maintaining the confidentiality and security of documents;
2. Acting independently, objectively, and professionally.

Duties and responsibilities related to compliance with regulations include:

1. Conducting monitoring to ensure that daily operational activities related to the administration and management of Guarantee Funds and the implementation of the Company's risk management do not deviate from established regulations and policies;
2. Ensuring that the Board of Directors and the Guarantee and Risk Management Division (PPR) manage the Guarantee Fund and the risk management process in accordance with the laws and regulations applicable in the money and foreign exchange markets and other laws and regulations related to the management of the Guarantee Fund and the Company's risk management;
3. Ensuring that the Board of Directors, the PPR Division, and the Money Market and Foreign Exchange Unit (PUV Unit) do not violate laws and regulations in the field of money markets and foreign exchange, other laws and regulations related to the management of guarantee funds and the Company's risk management;

4. Dalam hal terdapat indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, maka Komite Kliring dan Penanganan Risiko dapat melakukan reviu terhadap kebijakan pengadministrasian dan pengelolaan dana jaminan serta reviu terhadap parameter-parameter manajemen risiko.

Program Pelatihan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

KPEI memberikan dukungan kepada anggota Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mereka guna meningkatkan keterampilan serta kemampuan dalam menjalankan tugas. Dalam mendukung hal tersebut, KPEI menyediakan fasilitas pengembangan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, *workshop* dan bentuk pengembangan lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko Tahun 2024

Di tahun 2024-2025, Komite CCP Kliring dan Penanganan Risiko telah menyelesaikan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Komite pada tanggal 12 November 2024.
2. *Workshop* Penguatan Implementasi CCP PUVA dengan Bank Indonesia tanggal 6-7 Februari 2025.

KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI

Sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), telah ditetapkan pembentukan Komite Teknologi Informasi sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola Perusahaan, khususnya dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis di bidang teknologi informasi. Pembentukan Komite ini sejalan dengan kebutuhan Perusahaan dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan pengelolaan risiko teknologi informasi yang kian kompleks.

Struktur organisasi yang memuat keberadaan Komite Teknologi Informasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No. S-133/D.04/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Tahun 2024.

Namun, hingga akhir tahun 2024, Komite ini belum memiliki susunan keanggotaan atau kepengurusan yang definitif karena proses pengangkatan anggota masih dalam tahap persiapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, informasi atau data terkait aktivitas dan fungsi Komite Teknologi Informasi belum dapat disampaikan pada periode pelaporan ini. Pengangkatan anggota Komite direncanakan akan dilakukan pada tahun 2025 melalui SK terpisah, sehingga pelaporan dan pelaksanaan fungsi Komite tersebut baru dapat dilaporkan secara komprehensif lebih lengkap pada periode berikutnya.

4. In the event there are indications of violations of applicable laws and regulations in the field of money markets and foreign exchange, the Clearing and Risk Management Committee may review the administration and management policies of guarantee funds as well as review risk management parameters.

CCP Clearing Committee and Risk Management Training Program

IDClear provides support to members of the CCP Clearing Committee and Risk Management Committee to expand their knowledge and insights in order to improve their skills and abilities in carrying out their duties. In support of this, IDClear provides competency development facilities through various activities such as training, seminars, workshops, and other forms of development.

Implementation of CCP Clearing and Risk Management Committee Activities in 2024

In 2024-2025, the CCP Clearing and Risk Management Committee has completed the following activities:

1. Committee meeting on November 12, 2024.
2. Workshop on Strengthening the Implementation of CCP PUVA with Bank Indonesia on February 6-7, 2025.

INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE

In accordance with the applicable organizational structure at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, the establishment of the Information Technology Committee has been established as part of efforts to strengthen corporate governance, especially in monitoring and making strategic decisions in the field of technology. The establishment of this committee is in line with the company's needs in facing the challenges of digital transformation and managing increasingly complex information technology risks.

The organizational structure containing the Information Technology Committee has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through Letter No. S-133/D.04/2024 dated 28 September 2024 concerning Approval of Changes in the Organizational Structure of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Year 2024.

However, until the end of 2024, this committee does not yet have a definitive membership or management structure because the process of appointing members is still in the preparation stage.

In this regard, information or data related to the activities and functions of the Information Technology Committee cannot be submitted in this reporting period. The appointment of committee members is planned to be made in 2025 through a separate decree, so that the reporting and implementation of the committee's functions can only be reported more fully in the following period.

Sekretaris Perusahaan

CORPORATE SECRETARY

Direksi KPEI telah membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan dan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan dengan tugas utama untuk membangun dan menjaga komunikasi yang efektif guna mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dengan pihak internal maupun eksternal. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan informasi disampaikan secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Setiap informasi yang disampaikan kepada publik oleh Sekretaris Perusahaan merupakan informasi resmi dari Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk memantau perkembangan peraturan dan perundang-undangan, khususnya di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang, seiring dengan perluasan peran KPEI dalam kedua sektor tersebut serta memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas setiap perubahan regulasi yang berpotensi memengaruhi kegiatan usaha, peran strategis, maupun penerapan tata kelola Perusahaan secara keseluruhan. Dalam rangka menyempurnakan dan menyelaraskan praktik tata kelola, Sekretaris Perusahaan bertugas mengelola dan memperbarui piagam kerja, pedoman tata kelola, serta melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan oleh Anggaran Dasar.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi, dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Profil Sekretaris Perusahaan KPEI untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Lisda Rumondang Sitohang Periode dan Masa Jabatan: 1 November 2024 – Saat ini Period and Term of Office: November 1, 2024 – Present	
Data Pribadi Warga Negara Indonesia Usia 52 tahun	Personal Data Indonesian Citizen 52 years old
Domisili Jakarta Timur	Domicile East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP-012/DIR/KPEI/0225 tanggal 3 Februari 2025	Legal Basis of Appointment Serving as the Corporate Secretary based on the Board of Directors Decision No. KEP-012/DIR/KPEI/0225 dated February 3, 2025.
Riwayat Pendidikan Sarjana Strata 1, Manajemen Keuangan dan Perbankan, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia (1995)	Educational Background Bachelor's Degree, Financial Management and Banking, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia (1995)
Pelatihan dan Sertifikasi - Corporate Governance Program, Indonesia Institute for Corporate Directorship - Corporate Governance, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI - C-Level, Prasetya Mulya - The 7 Habits for Managers, Dunamis Organization Services - Corporate Governance Workshop, Indonesia Corporate Secretary Association - Corporate Secretary Training, Indonesia Corporate Secretary Association - Corporate Communication Summit, Intipesan Consulting	Training and Certifications - Corporate Governance Program, Indonesia Institute for Corporate Directorship - Corporate Governance, Center for Accounting Development (PPA) FEB UI - C-Level, Prasetya Mulya - The 7 Habits for Managers, Dunamis Organization Services - Corporate Governance Workshop, Indonesia Corporate Secretary Association - Corporate Secretary Training, Indonesia Corporate Secretary Association - Corporate Communication Summit, Intipesan consulting

The Board of Directors of IDClear has established the function of Corporate Secretary and appointed a Corporate Secretary with the main task of establishing and maintaining effective communication to support the creation of harmonious and constructive relationships between the Company and all stakeholders, both internal and external. The Corporate Secretary is responsible for ensuring that information is communicated in a timely and accurate manner to all stakeholders. Any information communicated to the public by the Corporate Secretary is official information from the Company.

The Corporate Secretary is also tasked with monitoring developments in regulations and legislation, particularly in the Capital Market and Money Market, in line with the expansion of IDClear's role in both sectors, as well as providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners on any regulatory changes that could potentially affect business activities, strategic roles, and the implementation of corporate governance as a whole. In order to improve and harmonize governance practices, the Company Secretary is responsible for managing and updating the charter, governance guidelines, and performing other duties as determined by the Articles of Association.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi, dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Profil Sekretaris Perusahaan KPEI untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Pengalaman Kerja

- Sekretaris Direktur Utama (Juli 2003 – Mei 2017)
- Staf Komunikasi dan Informasi Publik (Juni 2017 – September 2019)
- Kepala Unit Kesekretariatan dan Relasi Media (1 Desember 2019 – 31 Oktober 2024).
- Sekretaris Perusahaan (November 2024 – saat ini)

Rangkap jabatan
Tidak ada

Professional Background

- Secretary to the President Director (July 2003 – May 2017)
- Public Communication and Information Staff (June 2017 – September 2019)
- Head of Secretariat and Media Relations Unit (December 1, 2019 – October 31, 2024)
- Corporate Secretary (November 2024 – present)

Concurrent positions
None

TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Menjadi penghubung antara Perusahaan dengan Pemerintah, Regulator, Pemegang Saham, SRO, Lembaga lainnya, dan masyarakat;
2. Memastikan dan memberi masukan kepada Direksi agar Perusahaan selalu mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berpegang terhadap standar etika Perusahaan;
3. Menyiapkan dan mengomunikasikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kinerja Perusahaan kepada pemegang saham, masyarakat Pasar Modal, Pasar Uang serta pemangku kepentingan lainnya, sejalan dengan perluasan peran KPEI sebagai *Central Counterparty* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA);
4. Bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan tata kelola Perusahaan, termasuk melakukan penelaahan periodik terhadap piagam kerja dan pedoman tata kelola;
5. Membantu Direksi dalam:
 - a. Menyiapkan informasi yang dibutuhkan Direksi terkait permintaan dokumen dari Dewan Komisaris, OJK, SRO serta Lembaga lainnya;
 - b. Persiapan pelaksanaan RUPS dan memastikan pelaksanaan RUPS Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. Memastikan bahwa Perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi secara tepat waktu dan akurat.
6. Mendokumentasikan berbagai kegiatan dan informasi terkait Perusahaan serta mempublikasikannya secara tepat waktu sesuai kebijakan Perusahaan;
7. Mengikuti perkembangan industri pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal serta praktik-praktik GCG sehingga dapat memberikan informasi dan masukan bagi Dewan Komisaris, Direksi serta internal Perusahaan;
8. Mempertahankan serta meningkatkan citra Perusahaan yang positif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

CORPORATE SECRETARIES DUTIES

1. Acting as a liaison between the Company and the Government, Regulators, Shareholders, SRO, other institutions, and the public;
2. Ensuring and providing input to the Board of Directors so that the Company consistently complies with and performs applicable laws and regulations, and adheres to the Company's ethical standards;
3. Preparing and communicating accurate and complete information regarding the Company's performance to shareholders, the Capital Market community, the Money Market, and other stakeholders, in line with the expansion of IDCLEAR's role as the Central Counterparty for the Money and Foreign Exchange Market (PUVA);
4. Being responsible for coordinating the implementation of corporate governance, including conducting periodic reviews of work charters and governance guidelines;
5. Assisting the Board of Directors in:
 - a. Preparing information needed by the Board of Directors regarding requests for documents from the Board of Commissioners, OJK, SRO and other institutions;
 - b. Preparing the GMS implementation and ensuring that the implementation of the Company's GMS is following applicable regulations; and
 - c. Ensuring that the Company has fulfilled its reporting obligations and information disclosure in a timely and accurate manner.
6. Making documentation of various activities and information related to the Company and publish them promptly according to Company policy;
7. Keeping abreast of developments in the capital market industry, especially the regulations that apply to the capital market and GCG practices hence able to provide information and input to the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Company's internal organs;
8. Maintaining and enhancing a positive corporate image, both nationally and internationally

PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TAHUN 2024

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT IN 2024

No	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
1	13 Oktober - 15 November 2022, Hotel Fairfield Bali October 13 - November 15, 2022, Fairfield Bali Hotel	Corporate Governance Program	Indonesia Institute for Corporate Directorship
2	(23-24 Oktober 2020, Media Telekonferens) (October 23-24, 2020, Media Teleconference)	Corporate Governance	Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI Center for Accounting Development (PPA) FEB UI
3	13-14 Desember 2024, Pullman Ciawi December 13-14, 2024, Pullman Ciawi	C-Level	Prasetya Mulya
4	23-26 November 2021, Webinar Online November 23-26, 2021, Online Webinar	The 7 Habits for Managers	Dunamis Organization Services

No	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
5	21-23 Februari 2023, Zoom Meeting February 21-23, 2023, Zoom Meeting	Corporate Governance Workshop	Indonesia Corporate Secretary Association
6	9 September 2021, Zoom Webinar September 9, 2021, Zoom Webinar	Corporate Secretary Training	Indonesia Corporate Secretary Association
7	24-25 April 2024, Hotel Borobudur Jakarta April 24-25, 2024, Borobudur Hotel Jakarta	Corporate Communication Summit	Intipesan Consulting

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab yang mencakup sejumlah aktivitas utama sebagai berikut:

1. Membuat, menyimpan dan mendokumentasikan risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris KPEI maupun rapat Direksi SRO;
2. Terkait RUPS:
 - a. Menyelenggarakan RUPST yang diselenggarakan pada 24 Juni 2024, dan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2024;
 - b. Mendokumentasikan risalah rapat dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPS;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan RUPS kepada OJK dan mempublikasikannya di situs resmi Perusahaan.
3. Terkait kegiatan implementasi GCG:
 - a. Mengelola dan melakukan review terhadap dokumen GCG;
 - b. Melaksanakan penilaian dan melakukan publikasi atas implementasi GCG KPEI tahun 2024.
4. Terkait Kegiatan *public relation*:
 - a. Menjadi perwakilan KPEI dalam perannya sebagai panitia bersama OJK dan SRO terkait kegiatan peringatan “Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia ke-47 Tahun” yang bertemakan Terpercaya, Inklusif, Menuju Indonesia Emas.
 - b. Divisi Sekretaris Perusahaan terlibat dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan yang diikuti oleh OJK, SRO dan Anak Perusahaannya, Anggota Bursa, Emiten, Asosiasi Pasar Modal, Investor, Komunitas Investor Pasar Modal serta Media. Rangkaian kegiatannya antara lain sebagai berikut:
 - Pembukaan Perdagangan Bursa, Konferensi Pers, *Capital Market Fun Day*, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu, Public Expo Live, Kompetisi Tiktok dan Instagram, Turnamen e-sport, *Capital Market Summit & Expo*, *CEO Networking*,
 - *Media Gathering*, Kompetisi Penulisan dan Fotografi Jurnalistik, dan
 - Berbagai kegiatan CSR Perusahaan dan SRO.
 - c. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran pasar modal, *Capital Market Summit Expo* pada 7-9 November 2024 bersama dengan OJK dan SRO;
 - d. Melakukan pengembangan dan optimalisasi website Perusahaan sebagai upaya meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada publik;

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY'S DUTIES IN 2024

Throughout 2024, the Corporate Secretary carried out a wide range of duties and responsibilities, including:

1. Prepare, store, and document the minutes of IDClear Board of Directors and Board of Commissioners meetings as well as SRO Board of Directors meetings;
2. Regarding the General Meeting of Shareholders (GMS):
 - a. Organizing the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 24, 2024, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on October 21, 2024;
 - b. Documenting meeting minutes and other matters related to the implementation of the GMS;
 - c. Reporting the results of the GMS to the OJK and publishing them on the Company's official website.
3. Related to GCG implementation activities:
 - a. Managing and reviewing GCG documents;
 - b. Conducting assessments and publishing the implementation of IDClear's GCG in 2024.
4. Related to public relations activities:
 - a. Becoming IDClear's representative in its role as a joint committee with OJK and SRO related to the commemoration of the “47th Reactivation of the Indonesian Capital Market” with the theme Trustworthy, Inclusive, Towards a Golden Indonesia.
 - b. The Corporate Secretary Division is involved in organizing several activities attended by OJK, SRO and its subsidiaries, Exchange Members, Issuers, Capital Market Associations, Investors, Capital Market Investor Communities, and the Media. The series of activities includes the following:
 - Stock Exchange Trading Opening, Press Conference, Capital Market Fun Day, Integrated Capital Market Socialization and Education, Public Expo Live, TikTok and Instagram Competition, e-Sports Tournament, Capital Market Summit & Expo, CEO Networking,
 - Media Gathering, Journalism Writing and Photography Competition, and
 - Various CSR activities by the Company and SRO.
 - c. Participate in the Capital Market Summit Expo on November 7-9, 2024, together with OJK and SRO;
 - d. Develop and optimize the Company's website as an effort to increase transparency and ease of access to information for the public;

- e. Melakukan pengkinian informasi dan pengelolaan media komunikasi Perusahaan, seperti situs resmi, email publikasi, dan media sosial Perusahaan;
 - f. Membuat, Menyusun, dan Mendistribusikan berbagai materi publikasi KPEI kepada pemangku kepentingan, sebagai berikut:
 - Laporan Tahunan
 - Laporan Keberlanjutan
 - Buletin
 - Video Layanan
 - g. Mengelola partisipasi KPEI dalam kegiatan publik, termasuk sponsorship dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait peran dan fungsi KPEI kepada pemangku kepentingan, serta turut berperan aktif dalam program sosialisasi dan edukasi bersama *Self-Regulatory Organization* (SRO).
5. Terkait kegiatan relasi media:
- a. Menyelenggarakan konferensi pers tentang:
 - Peringatan Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia yang ke-47 tahun di Ruang Seminar BEI Jakarta, tanggal 10 Agustus 2024
 - Media *Gathering* SRO, Labuan Bajo, tanggal 1 November 2024
 - Penutupan Perdagangan Tahun 2024 di *Mainhall* BEI Jakarta, tanggal 30 Desember 2024
 - b. Menyampaikan informasi dan kebijakan Perusahaan dan pasar modal dalam bentuk siaran pers di antaranya:
 - Siaran Pers PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Menggelar RUPS Tahunan 2024
 - Siaran Pers Kegiatan KPEI dan VERMEG Jalin Kerjasama untuk Pengembangan Sistem *Collateral Management*
 - Siaran Pers Penandatanganan PAPS: KPEI Memperluas Perannya di Pasar Keuangan
 - Siaran Pers HUT PM ke 47: Membangun Pasar Modal yang Terpercaya dan Inklusif Menuju Indonesia Emas
 - Siaran Pers CSR HUT PM 47: Pasar Modal Indonesia Berikan Bantuan Sarana Pendidikan dan Dukungan Untuk UMKM di Kabupaten Kuningan
 - Siaran Pers Peluncuran *Central Counterparty* (CCP): Tonggak Baru Peran KPEI di Pasar Keuangan Indonesia
 - Siaran Pers KPEI Kegiatan Sosialisasi CCP PUVA untuk ajak Perbankan Menjadi Anggota CCP PUVA KPEI
 - Siaran Pers Penutupan Perdagangan 2024: Sukses Tutup Tahun 2024, Pertumbuhan Positif Mendorong Kepercayaan Pasar Modal Indonesia
 - Siaran Pers CSR HUT pm 47: Pasar Modal Salurkan Bantuan untuk Lingkungan dan Dukung Program Pemerintah pada Sektor Pendidikan
- e. Update information and manage the Company's communication media, such as the official website, publication emails, and the Company's social media;
 - f. Creating, compiling, and distributing various IDClear publication materials to stakeholders, as follows:
 - Annual Report
 - Sustainability Report
 - Bulletin
 - Service Video
 - g. Managing IDClear's participation in public activities, including sponsorship and Corporate Social Responsibility (CSR) programs;
 - h. Conducting outreach and education activities related to IDClear's role and functions to stakeholders, as well as playing an active role in outreach and education programs with the Self-Regulatory Organization (SRO).
5. Related to media relations activities:
- a. Holding press conferences on:
 - The 47th anniversary of the reactivation of the Indonesian Capital Market at the IDX Seminar Room in Jakarta, on August 10, 2024
 - SRO Media Gathering, Labuan Bajo, on November 1, 2024
 - Closing of Trading for 2024 at the Main Hall of the Indonesia Stock Exchange (BEI) in Jakarta, on December 30, 2024
 - b. Communicating company and capital market information and policies in the form of press releases, including:
 - Press Release: PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Holds its 2024 Annual General Meeting of Shareholders
 - Press Release on IDClear and VERMEG Cooperation for Collateral Management System Development
 - Press Release on PAPS Signing: IDClear Expands Its Role in the Financial Market
 - Press Release on the 47th Anniversary of PM: Building a Trusted and Inclusive Capital Market Towards a Golden Indonesia
 - Press Release CSR PM 47th Anniversary: Indonesian Capital Market Provides Educational Assistance and Support for MSMEs in Kuningan Regency
 - Press Release Launch of Central Counterparty (CCP): A New Milestone for IDClear's Role in the Indonesian Financial Market
 - Press Release IDClear PUVA CCP Socialization Activities to Encourage Banks to Become Members of IDClear PUVA CCP
 - Press Release on the Closure of Trading in 2024: Successful Closure of 2024, Positive Growth Boosts Confidence in the Indonesian Capital Market
 - Press Release on CSR for the 47th Anniversary of the Capital Market: The Capital Market Channels Assistance for the Environment and Supports Government Programs in the Education Sector

6. Terkait Kesekretariatan:
 - a. Melakukan pengelolaan persuratan dan kearsipan surat Perusahaan;
 - b. Pengelolaan penyimpanan dokumen tata kelola Perusahaan.
7. Terkait Hubungan Internasional, KPEI menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga internasional dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan internasional, di antaranya:
 - a. KPEI Menghadiri Konferensi Tahunan ASIFMA 2024 di Hong Kong, 29 Februari – 1 Maret 2024
 - b. *Courtesy Meeting* SRO dengan NASDAQ dan US *Securites Exchange Commission*, New York, U.S.A – 26 April 2024
 - c. KPEI Menghadiri *Junior Central of Student Development (CSD) Workshop 202*, Yogyakarta (24-25 April 2024)
 - d. KPEI Menghadiri Kegiatan *The 40th Annual Clearing and Derivatives Conference WFEClear* – Madrid, Spanyol (21 Maret 2025)
 - e. KPEI menghadiri *18th Annual PASLA (RMA) Conference on Asian Securites Lending 2024* – Singapore (5 Maret 2024)
 - f. KPEI Menghadiri *CCP Global Annual General Meeting 2024*, Yunani – 27 Mei 2024
 - g. Penandatanganan MoU KPEI dan VERMEG, - 30 July 2024
 - h. KPEI Menghadiri *24th Cross Training Seminar Asia-Pacific Central Securities Depository Group* – 29 July 2024
 - i. KPEI dan OJK Melaksanakan Kunjungan ke Pasar Modal dan Keuangan India, India – 21 Oktober 2024
 - j. KPEI Menghadiri *The 26th Annual General Meeting of the ACG*, Kazakhstan – 12 September 2024
 - k. KPEI menghadiri *Kick Off CCP Global International Default Simulation (CIDS 2025)*, Singapore – 3 -5 Desember 2024
 - l. Kunjungan SRO ke *Korea Securities Finance Corporation (KSFC)*, Korea Selatan – 20 November 2024
6. Secretarial matters:
 - a. Managing the Company's correspondence and archives;
 - b. Managing the storage of Company governance documents.
7. In terms of international relations, IDClear has established cooperation with several international institutions and actively participates in international activities, including:
 - a. IDClear attended the ASIFMA 2024 Annual Conference in Hong Kong, February 29 – March 1, 2024
 - b. *Courtesy Meeting* SRO with NASDAQ and US Securities Exchange Commission, New York, U.S.A – April 26, 2024
 - c. IDClear Attends *Junior Central of Student Development (CSD) Workshop 202*, Yogyakarta (April 24-25, 2024)
 - d. IDClear Attends *The 40th Annual Clearing and Derivatives Conference WFEClear* – Madrid, Spain (March 21, 2025)
 - e. IDClear attended the 18th Annual PASLA (RMA) Conference on Asian Securities Lending 2024 – Singapore (March 5, 2024)
 - f. IDClear attended the CCP Global Annual General Meeting 2024, Greece – May 27, 2024
 - g. Signing of MoU between IDClear and VERMEG, - July 30, 2024
 - h. IDClear Attends 24th Cross Training Seminar Asia-Pacific Central Securities Depository Group – July 29, 2024
 - i. IDClear and OJK Conduct Visit to Indian Capital and Financial Markets, India – October 21, 2024
 - j. IDClear Attends the 26th Annual General Meeting of the ACG, Kazakhstan – September 12, 2024
 - k. IDClear Attends Kick Off CCP Global International Default Simulation (CIDS 2025), Singapore – December 3-5, 2024
 - l. SRO Visit to Korea Securities Finance Corporation (KSFC), South Korea – November 20, 2024

Satuan Pemeriksa Internal

INTERNAL AUDIT

KPEI memiliki Satuan Pemeriksa Internal (SPI) sebagai organ pendukung Perusahaan yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa audit (*assurance*) dan konsultansi (*advisory*) yang bersifat objektif dan independen, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC).

PIAGAM SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Peran dan tanggung jawab SPI diatur dalam Piagam Satuan Pemeriksa Internal. Piagam SPI menjelaskan misi, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab SPI dalam menjalankan tugasnya secara independen dan objektif. Adapun Piagam SPI ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan *Global Internal Audit Standards* (GIAS), perkembangan dan pertumbuhan bisnis, serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Piagam SPI telah diperbarui dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada 24 September 2024.

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Struktur dan kedudukan SPI berada langsung di bawah Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Secara fungsional, SPI melapor kepada Dewan Komisaris dengan koordinasi melalui Komite Audit.

Hubungan SPI dengan Direksi:

1. Kepala SPI diangkat dan/atau diberhentikan oleh Direktur Utama, yang selanjutnya memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
2. SPI menyampaikan Piagam SPI dan perubahannya kepada Direksi untuk diperiksa dan disetujui.
3. SPI menyampaikan Kebijakan Pemeriksaan Internal dan perubahannya kepada Direksi untuk disetujui.
4. Direksi memberikan arahan dan masukan kepada SPI berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan khusus yang perlu mendapatkan perhatian, sebagai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh SPI dalam menyusun Audit Program.
5. SPI menyampaikan Audit Program dan perubahannya kepada Direksi untuk diperiksa dan disetujui dengan penandatanganan Direksi.
6. Direksi dapat meminta SPI untuk melaksanakan investigasi atau pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
7. SPI melakukan komunikasi hasil pemeriksaan dalam bentuk penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

IDClear has an Internal Audit (SPI) as a supporting organ of the Company, responsible for providing objective and independent audit (*assurance*) and consultancy (*advisory*) services, with the aim of increasing value and improving the Company's operations through a systematic approach by evaluating and enhancing the effectiveness and efficiency of the implementation of *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC).

INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER

The role and responsibilities of the Internal Audit Unit (SPI) are governed by the Internal Audit Charter. The SPI Charter outlines the mission, objectives, authority, and responsibilities of the SPI in carrying out its duties independently and objectively. The SPI Charter is reviewed periodically to ensure its relevance with the *Global Internal Audit Standards* (GIAS), business developments and growth, as well as changes in applicable laws and regulations. The latest version of the SPI Charter was updated and signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners on September 24, 2024.

STRUCTURE AND POSITION OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The structure and position of the SPI are directly under the Board of Directors and accountable to the President Director. Functionally, the SPI reports to the Board of Commissioners with coordination through the Audit Committee.

Relationship between SPI and the Board of Directors:

1. The Head of SPI is appointed and/or dismissed by the President Director, with the approval of the Board of Commissioners.
2. SPI submits the SPI Charter and its amendments to the Board of Directors for review and approval.
3. SPI submits the Internal Audit Policy and its amendments to the Board of Directors for approval.
4. The Board of Directors provides guidance and input to SPI regarding specific issues and concerns that require attention, which should be considered by SPI in preparing the Audit Program.
5. SPI submits the Audit Program and its amendments to the Board of Directors for review and approval through the Board of Directors' endorsement.
6. The Board of Directors may request SPI to conduct investigations or special audits when necessary.
7. SPI communicates audit results through the submission of the Audit Report.

8. SPI menyampaikan pelanggaran atau indikasi pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian internal Perusahaan.
9. SPI melakukan komunikasi hasil pendampingan dalam bentuk penyampaian Laporan Pendampingan.
10. SPI menyampaikan Laporan Audit dari auditor eksternal dan Badan Otoritas.
11. SPI menyampaikan hasil dari program Internal Audit – *Quality Assurance and Improvement Program (IA-QAIP)* kepada Direksi.

Hubungan SPI dengan Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris menyetujui pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala SPI.
2. SPI melakukan komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, baik secara berkala maupun insidental.
3. SPI menyampaikan Piagam SPI dan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk dikaji dan disetujui.
4. SPI menyampaikan laporan evaluasi pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan pada rapat koordinasi SPI bersama Komite Audit.
5. SPI menyampaikan LHP, Laporan Pendampingan, dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris dapat meminta SPI untuk melaksanakan investigasi atau pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
7. SPI menyampaikan Laporan Audit dari auditor eksternal dan Badan Otoritas.
8. SPI menyampaikan pelanggaran atau indikasi pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian internal Perusahaan.
9. SPI menyampaikan hasil dari program Internal Audit – *Quality Assurance and Improvement Program (IA-QAIP)* kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Hubungan SPI dengan Komite Audit:

1. SPI menyampaikan informasi perihal pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala SPI kepada Komite Audit.
2. SPI dan Komite Audit melakukan rapat koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas kinerja SPI, LHP, dan Laporan Pendampingan.
3. SPI menyampaikan Piagam SPI dan perubahannya sebagai bentuk informasi.
4. SPI menyampaikan Kebijakan Pemeriksaan Internal dan perubahannya sebagai bentuk informasi.
5. SPI menyampaikan Audit Program dan perubahannya kepada Komite Audit untuk disetujui melalui Rapat Komite Audit.
6. SPI menyampaikan informasi tentang status kasus yang sedang diinvestigasi dan pelanggaran atau indikasi pelanggaran yang material atas sistem operasional dan pengendalian internal Perusahaan.
7. SPI menyampaikan hasil dari program Internal Audit – *Quality Assurance and Improvement Program (IA-QAIP)* kepada Komite Audit.

8. SPI reports any material violations or indications of violations related to the Company's operational systems and internal controls.
9. SPI communicates the results of its advisory engagements through the submission of Accompanying Reports.
10. SPI submits Audit Reports from external auditors and Regulatory Authorities.
11. SPI submits the results of the Internal Audit – *Quality Assurance and Improvement Program (IA-QAIP)* to the Board of Directors.

Relationship between SPI and the Board of Commissioners:

1. The Board of Commissioners approves the appointment and/or dismissal of the Head of SPI.
2. SPI communicates with the Board of Commissioners through the Audit Committee, either periodically or on an ad hoc basis.
3. SPI submits the SPI Charter and its amendments to the Board of Commissioners for review and approval.
4. SPI presents reports on the evaluation of internal control, risk management systems, and corporate governance at coordination meetings with the Audit Committee.
5. SPI submits Audit Reports (LHP), Advisory Reports, and/or other matters deemed necessary by the Board of Commissioners.
6. The Board of Commissioners may request SPI to conduct investigations or special audits when necessary.
7. SPI submits Audit Reports from external auditors and Regulatory Authorities.
8. SPI reports any material violations or indications of violations related to the Company's operational systems and internal controls.
9. SPI submits the results of the Internal Audit – *Quality Assurance and Improvement Program (IA-QAIP)* to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Relationship between SPI and the Audit Committee:

1. SPI conveys information regarding the appointment and/or dismissal of the Head of SPI to the Audit Committee.
2. SPI and the Audit Committee hold coordination meetings at least once every 3 (three) months to discuss SPI's performance, Audit Reports (LHP), and Accompanying Reports.
3. SPI submits the SPI Charter and its amendments as information.
4. SPI submits the Internal Audit Policy and its amendments as information.
5. SPI submits the Audit Program and its amendments to the Audit Committee for approval through the Audit Committee Meeting.
6. SPI provides information about the status of ongoing investigations and material violations or indications of violations related to the Company's operational systems and internal controls.
7. SPI submits the results of the Internal Audit – *Quality Assurance and Improvement Program (IA-QAIP)* to the Audit Committee.

KOMPOSISI INTERNAL

SATUAN

PEMERIKSA

Pada 31 Desember 2024, Satuan Pemeriksa Internal (SPI) terdiri dari 1 (satu) Kepala SPI dan 5 (lima) Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) Pemeriksa Senior dan 4 (empat) Pemeriksa Junior.

PROFIL KEPALA SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Berdasarkan ketentuan dalam Piagam, Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala SPI wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan serta pengalaman kerja yang memadai sebelum menjabat di SPI. Berikut ini profil Kepala SPI per 31 Desember 2024:

COMPOSITION OF THE INTERNAL AUDIT

As of December 31, 2024, the Internal Audit (SPI) consists of 1 (one) Head of SPI and 5 (five) Auditors, including 1 (one) Senior Auditor and 4 (four) Junior Auditors.

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT

According to the provisions in the Charter, the Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The Head of SPI is required to have relevant qualifications and competencies as well as sufficient work experience before serving in SPI. The profile of the Head of SPI as of December 31, 2024, is as follows:

Rachmadewi Sjahesti Periode dan Masa Jabatan: Desember 2023 – Saat ini Period and Term of Office: December 2024 – Present	
Data Pribadi Warga Negara Indonesia Usia 51 tahun per 31 Desember 2024	Personal Data Indonesian Citizen 51 years old as of December 31, 2024
Domisili Tangerang	Domicile Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep-028 mengenai Penunjukan Kepala SPI	Legal Basis of Appointment Board of Directors Decision Letter No. Kep-028 on the Appointment of the Head of SPI
Riwayat Pendidikan - Magister <i>Management</i>, Islamic Business & Finance, Paramadina Graduate School (2016) - S1 Matematika Statistika, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada (1996)	Educational Background - Master of Management in Islamic Business & Finance at Paramadina Graduate School (2016) - Bachelor's degree in Mathematics Statistics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Gadjah Mada (1996)
Pelatihan, Seminar dan Sertifikasi - The 25th ACG General Meeting (2023) - Risk Hub International Webinar; The Future of Risk Culture: Navigating the Unknown (2023) - Governance, Risk and Compliance Workshop (2022) - Introduction to ISO 2230:2019 Business Continuity Management System (2022) - ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamentals (2022) - The 6th Asia/Oceania Central Counterparty (CCP) Meeting (2019) - Information Security Management System (2017) - Workshop on Securities Financing (2014) - Workshop on Korean Depository Receipt & Securities Lending Borrowing (2012) 16th Annual PASLA/RMA-Conference on Asian Securities Lending (2009) - Collateral Management Course (2007) - The 7th Cross Training Program on Asia Pacific Central Securities Depository (CSD) Group (2005)	Trainings, Seminars and Certifications - The 25th ACG General Meeting (2023) - Risk Hub International Webinar; The Future of Risk Culture: Navigating the Unknown (2023) - Governance, Risk and Compliance Workshop (2022) - Introduction to ISO 2230:2019 Business Continuity Management System (2022) - ISO 31000 International Risk Management Standard ERM Fundamentals (2022) - The 6th Asia/Oceania Central Counterparty (CCP) Meeting (2019) - Information Security Management System (2017) - Workshop on Securities Financing (2014) - Workshop on Korean Depository Receipt & Securities Lending Borrowing (2012) 16th Annual PASLA/RMA-Conference on Asian Securities Lending (2009) - Collateral Management Course (2007) - The 7th Cross Training Program on Asia Pacific Central Securities Depository (CSD) Group (2005)
Pengalaman Kerja - Kepala Unit Enterprise Risk Management (2022-2023) - Kepala Unit Securities Lending Borrowing (2009-2022) - Staf Risk Management (2007-2009) - Staf Securities Lending Borrowing (1998-2007)	Professional Background - Head of Enterprise Risk Management Unit (2022-2023) - Head of Securities Lending Borrowing Unit (2009-2022) - Risk Management Staff (2007-2009) - Securities Lending Borrowing Staff (1998-2007)
Rangkap jabatan Tidak ada	Concurrent Position None

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI PROFESI

KPEI memberikan dukungan terhadap pengembangan kompetensi, kapasitas, dan keahlian SDM di SPI untuk memastikan kinerja pemeriksaan yang komprehensif dan optimal. KPEI juga mendorong personel SPI untuk memperoleh sertifikasi profesi auditor internal guna meningkatkan kinerja SPI. Berikut adalah kualifikasi dan sertifikasi profesi bagi personel SPI selain Kepala SPI antara lain:

Sertifikasi Certifications	Jumlah Auditor Tersertifikasi Number of Certified Auditors
Qualified Internal Auditor (QIA)	1
Certified Lead Auditor ISO 27001 (Information Security Management System)	3
Certified Internal Audit Officer (CIAO)	1
Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)	2
Internal Auditor ISO 9001 (Quality Management System)	1
Internal Auditor ISO 37001 (Anti-Bribery Management System)	6
Internal Auditor ISO 22301 (Business Continuity Management System)	2
Certified Information Technology Infrastructure Library (ITIL)	1
Certified Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT)	1

KEBIJAKAN DAN FREKUENSI RAPAT SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Di tahun 2024, Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan rapat rutin dan non rutin sebagaimana terlampir berikut ini:

Pelaksanaan, Agenda, dan Peserta Rapat Satuan Pemeriksa Internal Tahun 2024 Implementation, Agenda, and Participants of Internal Audit Meetings in 2024

No	Agenda Agenda	Peserta Participant
1	Rapat triwulan bersama Komite Audit Quarterly meeting with the Audit Committee	Triwulan Quarterly
2	Rapat koordinasi bersama Direksi Coordination meeting with the Board of Directors	Bulanan Monthly
3	Rapat koordinasi internal SPI Internal SPI coordination meeting	Bulanan Monthly
4	Rapat pembahasan hasil <i>Risk Assessment</i> Perusahaan bersama Divisi PSM – Unit PRK Meeting to discuss the Company's Risk Assessment results with the PSM Division – PRK Unit	Tahunan Year
5	Rapat pembahasan penerapan dan pelaksanaan LHPK BI-SSSS bersama KSEI Meeting to discuss the implementation and execution of BI-SSSS LHPK with KSEI	Insidental Incidental
6	Rapat pembahasan tindak lanjut arahan Direksi dan/atau Komite Audit Meeting to discuss follow-up on directives from the Board of Directors and/or Audit Committee	Insidental Incidental

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND CERTIFICATIONS

IDClear supports the development of competencies, capacity, and expertise of SPI personnel to ensure comprehensive and optimal audit performance. IDClear also encourages SPI personnel to obtain internal auditor professional certifications to enhance SPI's performance. The qualifications and professional certifications for SPI personnel, other than the Head of SPI, include:

MEETING POLICY AND FREQUENCY OF INTERNAL AUDIT

In 2024, the Internal Audit (SPI) conducted regular and ad hoc meetings as detailed below:

PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, SPI berencana untuk melibatkan personelnnya dalam berbagai program pelatihan dan sertifikasi profesi, meliputi:

DEVELOPMENT AND TRAINING IN 2024

In 2024, SPI planned to involve its personnel in various training programs and professional certifications, including:

No	Tanggal Date	Jumlah Peserta Number of Participants	Judul/Tema Pelatihan Training Theme	Penyelenggara Organizer	Tempat Location
1	1-2 Februari 2024 February 1-2, 2024	1	Training: COSO 2013 Internal Control Framework	YPIA	Jakarta, Indonesia
2	5-6 Februari 2024 February 5-6, 2024	1	Workshop: Standard & Code of Ethics for Professional Internal Auditor	YPIA	Jakarta, Indonesia
3	4 Maret 2024 March 4, 2024	1	Certified Internal Audit Officer (CIAO)	BNSP	Jakarta, Indonesia
4	5 - 7 Maret 2024 March 5-7, 2024	1	PASLA/RMA 18th Annual Conference on Asian Securities Lending Conference	Risk Management Association	Singapore
5	18 Maret - 1 April 2024 March 18 - April 1, 2024	2	Qualified Internal Auditor Level 2	YPIA	Jakarta, Indonesia
6	2 - 3 Mei 2024 May 2 - 3, 2024	5	Internal Auditor ISO 27001:2022	BSI	Jakarta, Indonesia
7	14 Juni 2024 June 14, 2024	2	Sharing Session: CCP SBNT	KPEI	Jakarta, Indonesia
8	24 Juni - 3 Juli 2024 June 24 - July 3, 2024	1	Qualified Internal Auditor Level 3	YPIA	Jakarta, Indonesia

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

SPI memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan jasa audit melalui pendekatan audit berbasis risiko dengan:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola untuk memastikan pengelolaan operasional Perusahaan telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Mengevaluasi proses manajemen risiko untuk memastikan risiko-risiko utama dalam proses pencapaian sasaran Perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan;
3. Mengevaluasi kepatuhan Perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaksanaan operasional Perusahaan telah sesuai dengan peraturan, perundangan, dan kebijakan yang berlaku, termasuk kesesuaian dengan persyaratan standar-standar internasional yang telah diterapkan oleh Perusahaan seperti ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001, dan standar internasional lainnya yang relevan;
4. Mengevaluasi penerapan proses bisnis Perusahaan untuk memastikan proses bisnis pada setiap lini operasional telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan fungsi konsultasi, SPI menjalankan peran sebagai penasihat bagi pihak yang membutuhkan jasa konsultasi, dalam hal ini klien, dengan sifat dan ruang lingkup penugasan yang disepakati bersama. Penugasan konsultasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan Perusahaan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

SPI has duties and responsibilities in providing audit services through a risk-based audit approach by:

1. Evaluating the implementation of governance to ensure the Company's operational management complies with good corporate governance principles;
2. Evaluating the risk management process to ensure the key risks in achieving the Company's objectives are well managed in accordance with the Company's Risk Management Policy;
3. Evaluating the Company's compliance aimed at ensuring that every aspect of the Company's operational implementation adheres to applicable regulations, laws, and policies, including conformity with international standards applied by the Company such as ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001, and other relevant international standards;
4. Evaluating the implementation of the Company's business processes to ensure that business processes across all operational lines are carried out effectively and efficiently.

In carrying out its consultancy function, SPI acts as an advisor to clients requiring consultancy services, with the nature and scope of assignments mutually agreed upon. These consultancy assignments are intended to add value and enhance the Company's corporate governance, risk management, and compliance.

Sebagai lini ketiga dalam konsep *three lines model*, SPI mengemban peran yang lebih besar dalam pelaksanaan jasa audit melalui pendekatan audit berbasis risiko. SPI berperan dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko pada aktivitas operasional perusahaan terhadap regulasi, peraturan, dan standar yang diterapkan.

As the third line in the three lines model concept, SPI holds a greater role in executing audit services through a risk-based audit approach. SPI is responsible for evaluating the effectiveness of internal controls and risk management in the Company's operational activities concerning applicable regulations, rules, and standards.

KEGIATAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUN 2024

Di tahun 2024, SPI memiliki inisiatif selain tugas dan kegiatan rutin serta penugasan lainnya, yaitu:

ACTIVITIES AND IMPLEMENTATION OF DUTIES IN 2024

In 2024, besides its routine tasks and other assignments, SPI conducted the following initiatives:

No	Judul Inisiatif Initiative Title	Deskripsi Inisiatif Description of Initiative
1	Tindak Lanjut Hasil <i>External Assessment Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP) Follow-up on the Results of the External Assessment of the Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil <i>external assessment</i> dan implementasi <i>roadmap improvement</i> SPI. Implementation of follow-up actions based on the results of the external assessment and the SPI improvement roadmap.
2	<i>Self-Assessment Quality and Assurance Improvement Program</i> (QAIP)	Pelaksanaan <i>self-assessment</i> . Conducting self-assessment.
3	IT <i>Operational Assessment</i>	Pelaksanaan IT <i>Operational Assessment</i> dengan melibatkan vendor pihak ketiga yang independen. Conducting IT <i>Operational Assessment</i> involving an independent third-party vendor.



Akuntan Publik

PUBLIC ACCOUNTANT

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik adalah pihak independen yang bertugas memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Akuntan Publik menjadi bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas validitas atau audit laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Public Accountants and Public Accounting Firms are independent parties responsible for auditing the Company's Financial Statements in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. In carrying out their responsibilities, Public Accountants serve as part of the internal control system, aiming to provide reasonable assurance regarding the validity or audit of the financial statements, compliance with prevailing laws and regulations, as well as the effectiveness of the internal control system.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

RUPS Tahunan 2024 telah menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik guna melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Dana Jaminan Tahun Buku 2024 KPEI, dengan perincian di bawah ini:

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

The 2024 Annual GMS approved the appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Financial Statements and the Guarantee Fund Financial Statements for IDCclear's 2024 Financial year, with the details outlined below:

Nama KAP Public Accounting Firm Name	Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited
Alamat dan Kontak Address and Contact	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, lantai 7. Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia. Telepon: (021) 5289 5000
Nama Akuntan Publik Pemeriksa Name of Examining Public Accountant	Danil Setiadi Handaja, CPA
Periode Penugasan Assignment Period	Periode penugasan KAP adalah mulai tanggal 1 Juli 2024 hingga 25 Maret 2025 The assignment period of the Public Accounting Firm is from July 1, 2024, to March 25, 2025.
Jasa Yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan & Laporan Keuangan Dana Jaminan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Tidak ada jasa asurans maupun non-asurans lainnya yang diberikan oleh Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited The audit services cover the Company's Financial Statements and the Guarantee Fund Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024. No other assurance or non-assurance services were provided by Purwantono, Sungkoro & Surja, a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited.
Biaya Jasa Service Fees	Biaya jasa audit Laporan Keuangan KPEI sebesar Rp587.092.512 dan biaya jasa audit Laporan Keuangan Dana Jaminan sebesar Rp142.984.332, untuk pemeriksaan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 The audit fee for IDCclear's Financial Statements amounts to Rp. 587,092,512, while the audit fee for the Guarantee Fund Financial Statements amounts to Rp142,984,332, for the financial year ending December 31, 2024.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited telah memenuhi ketentuan regulator dan merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

The Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited, has complied with regulatory requirements and is an independent Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK).

Dengan demikian daftar KAP dan AP yang dipergunakan KPEI dalam 5 (lima) tahun terakhir, adalah:

Accordingly, the list of Public Accounting Firms and Public Accountants engaged by IDCclear over the past 5 (five) years is as follows:

Tahun Buku Financial year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Nama Akuntan Publik Public Accountant Name	Biaya Jasa Audit Audit Service Fees (Rp)
2024	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja, a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited	Danil Setiadi Handaja, CPA	730.076.844
2023	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja, a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited	Danil Setiadi Handaja, CPA	683.617.499
2022	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja, a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited	Danil Setiadi Handaja, CPA	660.500.000
2021	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja, a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited	Yovita	641.818.182
2020	KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota dari Ernst & Young (EY) Global Limited Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja, a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited	Yovita	626.363.636

LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS

PROFESSIONS/

Nama Lembaga/ Institusi Name of the Institutions	Alamat Address	Jenis Lembaga/ Institusi Institution Type	Jasa Yang Diberikan Services Provided	Periode Penugasan Assignment Provided	Biaya/Imbalan Fees
KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 7 Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Jasa Audit Laporan Keuangan Perusahaan & Laporan Keuangan Dana Jaminan Audit Services for the Company's Financial Statements & Guarantee Fund Financial Statements	Juli 2024-Maret 2025 July 2024-March 2025	730.076.844
Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants.	Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No 1, Menteng, Jakarta	Organisasi Profesi Akuntan Publik Public Accountant Professional Organization	Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Mekanisme Pelaporan Keuangan Segmen Operasi CCP PUVA Focus Group Discussion (FGD) Speaker Financial Reporting Mechanism for the CCP PUVA Operating Segment	September 2024 September 2024	15.000.000

Laporan Keuangan
Consolidated Financial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

Tinjauan Pendukung Bisnis
Business Support Overview

Analisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

Profil Perusahaan
Company Profile

Laporan Manajemen
Management Reports

Ikhtisar Utama
Highlights

Pengendalian Internal

INTERNAL CONTROL

Fungsi pengendalian internal bertujuan untuk memastikan penerapan *Governance, Risk Management, Compliance* (GRC) yang tepat, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur di seluruh fungsi operasional yang dirancang untuk melindungi aset Perusahaan. Penerapan pengendalian internal yang efektif dapat menjamin keakuratan informasi keuangan, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko kerugian.

KERANGKA PENGENDALIAN INTERNAL

KPEI mengadopsi prinsip dasar pengendalian dari COSO - *Internal Control Integrated Framework* sebagai dasar kerangka pengendalian internal Perusahaan. Kerangka ini mencakup 5 (lima) komponen pengendalian internal yang mendukung KPEI dalam mencapai keyakinan yang layak dan memadai (*reasonable assurance*) terkait pencapaian sasaran Perusahaan.

Kelima komponen ini dijalankan secara terintegrasi oleh seluruh unsur organisasi KPEI, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, pejabat Perusahaan, hingga seluruh karyawan. Setiap tingkatan dalam organisasi berperan dalam pengendalian internal melalui proses bisnis masing-masing yang mendukung Perusahaan untuk mencapai sasaran. Hal tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sasaran, yaitu:

1. Operasional (*Operational*); berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis KPEI, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, serta menjaga aset Perusahaan dari kerugian;
2. Pelaporan (*Reporting*); berkaitan dengan pelaporan keuangan dan non-keuangan kepada internal dan eksternal KPEI, yang mencakup keandalan/keakuratan, ketepatan waktu, transparansi, atau ketentuan lain sebagaimana ditetapkan oleh regulator atau kebijakan Perusahaan; dan
3. Kepatuhan (*Compliance*); berkaitan dengan kepatuhan KPEI terhadap peraturan, undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku.

The internal control function aims to ensure the proper implementation of *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC), enabling the organization to achieve its objectives effectively and efficiently. The internal control system encompasses policies and procedures across all operational functions, designed to safeguard the Company's assets. Effective implementation of internal controls ensures the accuracy of financial information, operational efficiency, compliance with applicable laws and regulations, and mitigation of potential losses.

INTERNAL CONTROL FRAMEWORK

IDClear adopts the fundamental control principles from the COSO - *Internal Control Integrated Framework* as the foundation for its internal control framework. This framework comprises 5 (five) components of internal control that support IDClear in achieving reasonable assurance regarding the attainment of its corporate objectives.

These five components are executed in an integrated manner across all elements of IDClear's organization, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, and company officers to all employees. Every level within the organization plays a role in internal control through their respective business processes, supporting the Company in achieving its objectives. These objectives fall into 3 (three) categories:

1. Operational: related to the effectiveness and efficiency of IDClear's business operations, including operational and financial performance goals, as well as safeguarding the Company's assets from loss;
2. Reporting: related to financial and non-financial reporting to internal and external stakeholders of IDClear, which includes reliability/accuracy, timeliness, transparency, or other provisions as determined by regulators or Company policies; and;
3. Compliance: related to IDClear's compliance with applicable regulations, laws, and other legal provisions.

5 (lima) Komponen Pengendalian Internal 5 (five) Components of Internal Control



Lingkungan Pengendalian
Control Environment



Penilaian Risiko
Risk Assessment



Aktivitas Pengendalian
Controlling Activities



Informasi dan Komunikasi
Information and Communication



Aktivitas Pengawasan
Monitoring Activities

1. Operasional

Implementasi pengendalian internal operasional berupa penetapan peraturan, kebijakan dan standar prosedur yang diperlukan, guna memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mendukung tujuan yang diinginkan serta menyiapkan perubahan dan penyempurnaannya apabila diperlukan.

Pengendalian operasional dalam KPEI tetap menggunakan RKAT sebagai mekanisme kontrol utama didukung oleh kegiatan audit secara berkala, sosialisasi peraturan dan kebijakan Perusahaan serta penerapan standarisasi ISO untuk meningkatkan kepatuhan.

Kegiatan audit operasional antara lain diterapkan pada Divisi Kliring dan Penyelesaian (KPE), Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR), Divisi Operasional Teknologi Informasi (OIT), Divisi Pengembangan Teknologi Informasi (PTI), Sekretaris Perusahaan (SPE), dan Divisi Hukum (HUK).

Dalam rangka memperkuat pengendalian internal serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, KPEI telah melakukan sertifikasi ISO, yang terdiri dari:

- ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
- ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- ISO 22301:2012 Sistem Manajemen Keberlangsungan Usaha
- ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

2. Pelaporan Keuangan

Implementasi pengendalian internal pada aspek pelaporan keuangan diwujudkan melalui:

- Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan lengkap dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menjadi informasi yang andal untuk kepentingan pengambilan keputusan manajemen KPEI.
- Penyusunan RKAT yang harus disetujui oleh RUPS dengan mekanisme pengamanan dan pengawasan

1. Operasional

The implementation of operational internal controls involves establishing necessary rules, policies, and standard procedures to ensure that business activities proceed as planned, support desired objectives, and prepare for changes and improvements as needed.

Operational controls within IDClear continue to utilize the RKAT as the primary control mechanism supported by regular audit activities, dissemination of company regulations and policies, and the implementation of ISO standardization to enhance compliance.

Operational audit activities are implemented in divisions such as Clearing and Settlement Division (KPE), Guarantee and Risk Management Division (PPR), Information Technology Operations Division (OIT), Information Technology Development Division (PTI), Corporate Secretary (SPE), and Legal Division (HUK).

To strengthen internal controls and improve operational efficiency and effectiveness, IDClear has obtained ISO certification, which includes:

- ISO 9001:2015 Quality Management System
- ISO 27001:2022 Information Security Management System
- ISO 22301:2012 Business Continuity Management System
- ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

2. Financial Reporting

The implementation of internal controls in financial reporting encompasses:

- Preparation and presentation of Financial Statements in a complete and accurate manner, accountable to provide reliable information for IDClear management decision-making purposes.
- Formulation of RKAT which must be approved by the GMS, with mechanisms for safeguarding and

atas penggunaan anggaran dan aset Perusahaan berupa laporan pertanggungjawaban secara berkala dan audit oleh pihak independen.

- Penerapan sistem pengelolaan keuangan yang patuh pada Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan lain yang relevan, serta prosedur dan kebijakan pengelolaan keuangan yang ketat dengan pemeriksaan secara berkala oleh auditor independen.

3. Kepatuhan pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam menjalankan usahanya, KPEI berkomitmen kuat untuk senantiasa memastikan seluruh unsur KPEI, dimulai dari SDM, sistem, teknologi, prosedur, peraturan, strategi maupun rencana usaha, hingga pelaksanaan operasional, tetap berada pada koridor kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi acuan kepatuhan KPEI antara lain:

- Undang-Undang mengenai Pasar Modal;
- Peraturan OJK;
- Peraturan Bank Indonesia (PBI); dan
- *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI).

monitoring the use of the Company's budget and assets through periodic accountability reports and audits by independent parties.

- Adherence to financial management systems compliant with Financial Accounting Standards and other relevant regulations, as well as stringent financial management procedures and policies, subject to regular examination by independent auditors.

3. Compliance with Laws and Regulations

In conducting its business operations, IDClear is strongly committed to ensuring that all elements of IDClear, starting from human resources, systems, technology, procedures, regulations, strategies, business plans, to operational implementation, remain within the bounds of compliance with applicable laws and regulations. Some regulations that serve as references for IDClear's compliance include:

- Laws related to the Capital Market;
- OJK regulations;
- Bank Indonesia regulations (PBI); and
- Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI).

TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Setiap tahun, KPEI melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) untuk menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal Perusahaan melalui *assurance* yang dilakukan oleh SPI. Evaluasi ini bertujuan memberikan keyakinan yang layak (*reasonable assurance*) bahwa komponen-komponen atas pengendalian internal tersebut tersedia secara memadai dan diterapkan dengan efektif.

Ketidakcukupan komponen atau inefisiensi dalam pelaksanaan pengendalian internal, hal tersebut dapat menyebabkan pengendalian internal menjadi tidak efektif (*deficiencies in internal control*) yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan.

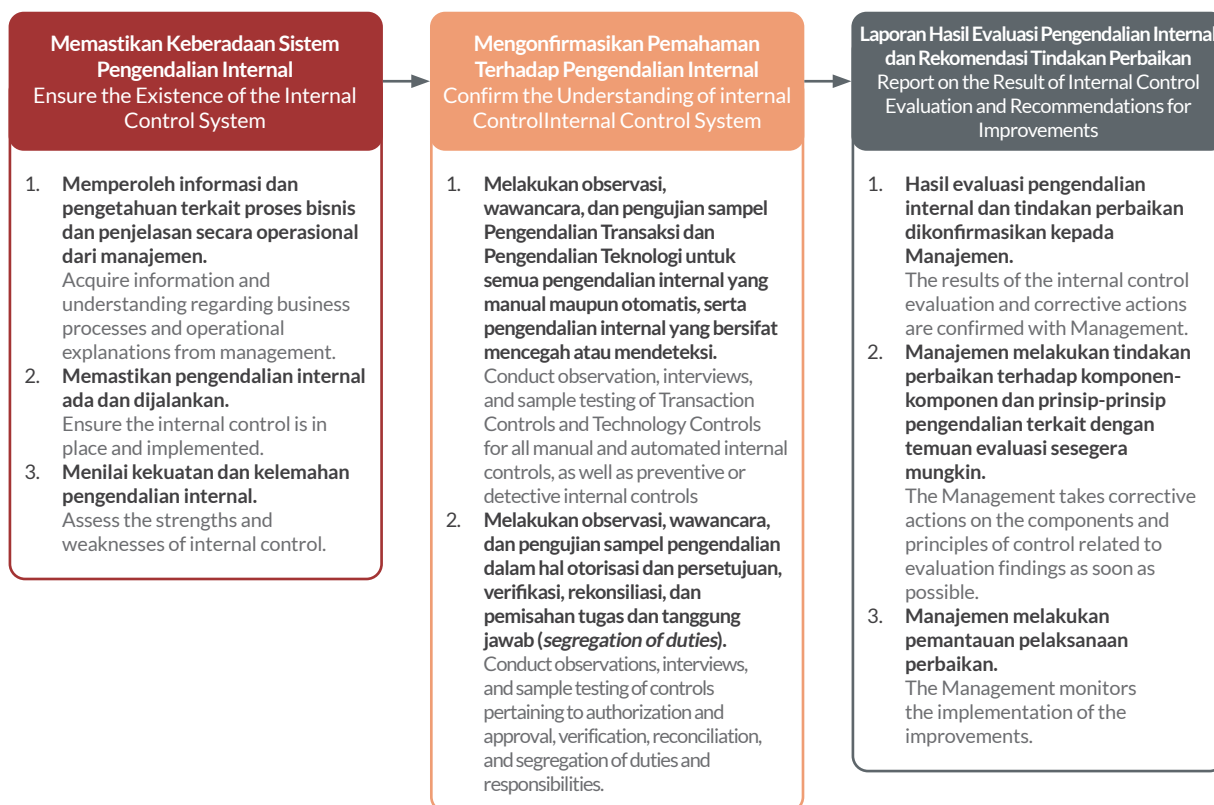
Proses *self-assessment* yang digunakan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal KPEI digambarkan dalam bagan berikut:

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Every year, IDClear conducts a self-assessment to evaluate the adequacy and effectiveness of the Company's internal control through assurance activities carried out by SPI. This evaluation aims to provide reasonable assurance that the internal control components are sufficiently present and effectively implemented.

Inadequacies in the components or inefficiencies in the implementation of internal controls, these may lead to deficiencies in internal control, potentially affecting the achievement of the Company's objectives.

The self-assessment process used to evaluate IDClear's internal control system is illustrated in the following diagram:



PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk tahun buku 2024, Direksi, Dewan Komisaris KPEI, serta Komite Audit menilai bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah diterapkan dengan efektif, memberikan keyakinan yang layak dan memadai (*reasonable assurance*) terkait pencapaian sasaran Perusahaan, dengan ruang-ruang perbaikan yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

For the 2024 financial year, the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Audit Committee of IDCLEAR concluded that the Company's internal control system has been implemented effectively, providing reasonable assurance regarding the achievement of the Company's objectives with areas for improvement that must continue to be enhanced to support the Company's ongoing development and business growth.

Manajemen Risiko Korporasi

CORPORATE RISK MANAGEMENT

Dalam rangka memperkuat kapasitas sebagai *Central Counterparty* (CCP) berstandar internasional dan pengembangan dan perluasan layanan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, KPEI terus mengembangkan sistem manajemen risiko yang mengacu pada praktik terbaik dalam implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM).

Sistem manajemen ini bertujuan untuk mengelola ketidakpastian yang ada dan mengubahnya menjadi pengendalian risiko yang dapat melindungi kepentingan dan aset Perusahaan dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai risiko menjadi prioritas utama dalam budaya kerja, sehingga risiko yang muncul dapat diidentifikasi, dikendalikan, ditangani, atau dampaknya diminimalkan dengan strategi mitigasi yang efektif dan efisien.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

KPEI melaksanakan manajemen risiko dengan pendekatan Tiga Lini Pertahanan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan risiko yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel dalam organisasi. Dengan membagi peran secara jelas, KPEI dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko, sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi. Pendekatan ini terdiri dari:

- Lini pertama adalah seluruh Fungsi Bisnis sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*);
- Lini kedua adalah Manajemen Risiko Korporasi sebagai pengelola risiko; dan
- Lini ketiga adalah Satuan Pemeriksa Internal (SPI) sebagai pengawas dan pemberi *assurance*.

In order to strengthen its capacity as an internationally recognized Central Counterparty (CCP) and to support the development and expansion of services in the money market and foreign exchange market, IDCclear continuously enhances its risk management system by adopting best practices in the implementation of Enterprise Risk Management (ERM).

This risk management system is designed to manage uncertainties and transform them into risk controls that safeguard the Company's interests and assets in achieving its established objectives.

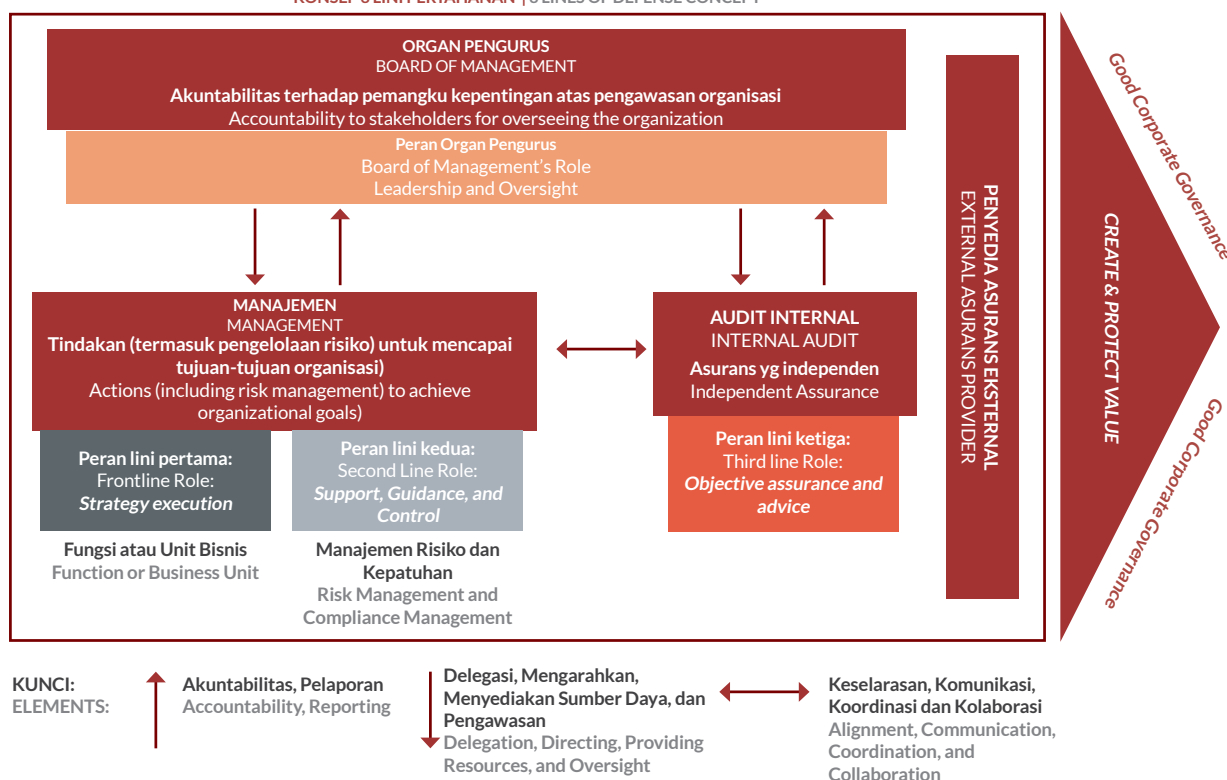
Raising awareness and understanding of risk is a top priority within the corporate culture, enabling emerging risks to be identified, controlled, addressed, or their impacts minimized through effective and efficient mitigation strategies.

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

IDCclear implements risk management through the Three Lines of Defense approach, aimed at establishing a stronger, more transparent, and accountable risk management system within the organization. By clearly defining roles, IDCclear can more effectively identify, manage, and monitor risks, thereby enhancing business sustainability and regulatory compliance. This approach consists of:

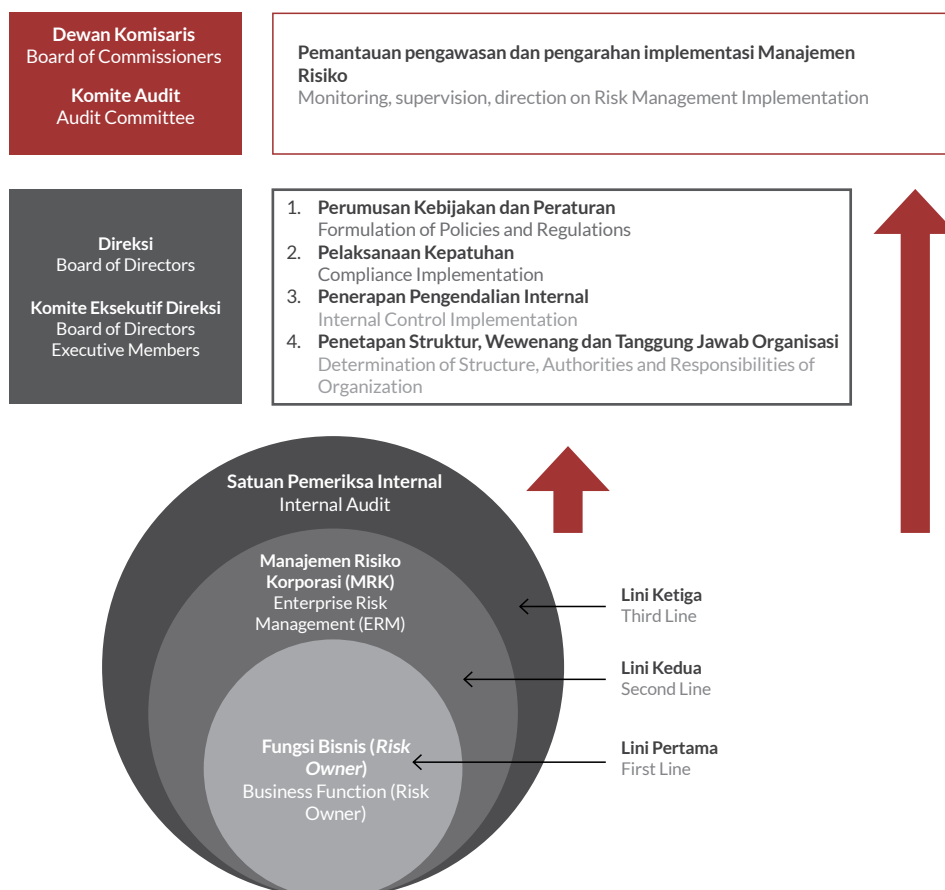
- The first line includes all Business Functions as the Risk Owners;
- The second line covers Corporate Risk Management as the risk manager; and
- The third line involves The Internal Audit Unit (SPI) as the independent oversight and assurance provider.

KONSEP 3 LINI PERTAHANAN | 3 LINES OF DEFENSE CONCEPT



Berdasarkan pendekatan tersebut, kemudian dikembangkan kerangka manajemen risiko yang melibatkan seluruh unsur Perusahaan, dengan setiap pihak memiliki peran dan tugas masing-masing. Kerangka kerja manajemen risiko KPEI digambarkan dalam bagan berikut:

Based on this approach, it was then developed into a risk management framework that involves all elements of the Company, with each party having its own specific roles and responsibilities. IDClear's risk management framework is illustrated in the following diagram:



MANAJEMEN RISIKO KORPORASI

Manajemen Risiko Korporasi (MRK) adalah sistem pengelolaan risiko terdiri atas prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang bekerja secara terintegrasi untuk mengelola dan mengontrol risiko bisnis KPEI pada tingkat korporat. Prinsip kerja MRK mengacu pada ISO 31000:2018 dengan tujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai Perusahaan. Manajemen risiko ini terintegrasi dalam tata kelola dan proses organisasi. Penerapan MRK di KPEI didukung oleh kepemimpinan yang solid, komitmen manajemen puncak, dan keterlibatan aktif seluruh unsur organisasi.

Proses kerja MRK di KPEI terdiri dari:

1. Penetapan konteks;
2. Penilaian risiko; dan
3. Penanganan risiko.

Penetapan konteks mencakup penentuan tujuan dan lingkungan operasional perusahaan, identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko, serta penentuan ruang lingkup dan batasan manajemen risiko. Penilaian risiko terdiri dari tiga proses utama: identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* perusahaan. Penanganan risiko mencakup perencanaan, penetapan prioritas, dan pelaksanaan strategi mitigasi. Ketiga tahap ini dilakukan bersama pemilik risiko serta dipantau dan ditinjau oleh Unit Pemantauan dan Pelaporan Risiko Korporasi (PRK), dengan hasil akhir berupa profil risiko Perusahaan.

Manajemen Risiko Korporasi (MRK) KPEI berpedoman pada Pedoman Manajemen Risiko KPEI, yang mengatur tata kelola manajemen risiko secara menyeluruh. Pedoman ini juga mencakup pelaksanaan *Risk Assessment*, yaitu kegiatan penilaian risiko tahunan yang dikoordinasikan oleh Unit Pemantauan dan Pelaporan Risiko Korporasi (PRK). Kegiatan *Risk Assessment* melibatkan seluruh pemilik risiko, mulai dari tingkat divisi hingga unit, dengan hasil akhir yang disusun dalam Laporan Profil Risiko Korporasi.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko korporasi di KPEI dilaksanakan oleh Unit Pemantauan dan Pelaporan Risiko Korporasi (PRK) yang berada di bawah Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko Korporasi (PSM). Unit ini bertanggung jawab atas 2 (dua) tugas utama, yaitu:

1. Fungsi Manajemen Risiko Korporasi (MRK)

Sebagai lini pertahanan kedua, PRK bertugas mengelola dan mengendalikan risiko korporasi guna meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian sasaran strategis perusahaan.

Tugas utama PRK dalam penerapan MRK meliputi:

- Merumuskan Pedoman Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

Enterprise Risk Management (ERM) is a risk management system consisting of risk management principles, frameworks, and processes that operate in an integrated manner to manage and control IDClear's business risks at the corporate level. ERM is guided by the principles of ISO 31000:2018, with the objective of creating and protecting corporate value. This risk management approach is embedded within the Company's governance and organizational processes. The implementation of ERM at IDClear is supported by strong leadership, the commitment of top management, and the active involvement of all elements within the organization.

The ERM process at IDClear consists of:

1. Establishing the context;
2. Risk assessment; and
3. Risk treatment.

Establishing the context involves defining the Company's objectives and operational environment, identifying internal and external factors that influence risks, and determining the scope and boundaries of risk management. Risk assessment consists of three main processes: risk identification, risk analysis, and risk evaluation. Risk evaluation aims to determine the acceptable level of risk based on the Company's risk appetite and risk tolerance. Risk treatment includes planning, prioritizing, and implementing mitigation strategies. These three stages are carried out in collaboration with the risk owners and are monitored and reviewed by the Corporate Risk Monitoring and Reporting Unit (PRK), resulting in the Company's overall risk profile.

IDClear's Enterprise Risk Management (ERM) is guided by the IDClear's Risk Management Guidelines, which govern the overall structure of risk management. These guidelines also cover the implementation of Risk Assessment, an annual risk evaluation activity coordinated by the Corporate Risk Monitoring and Reporting Unit (PRK). The Risk Assessment involves all risk owners, from the divisional to the unit level, and culminates in the preparation of the Corporate Risk Profile Report.

THE RISK MANAGEMENT GOVERNANCE STRUCTURE

Corporate risk management at IDClear is carried out by the Corporate Risk Monitoring and Reporting Unit (PRK) under the Strategic Planning and Corporate Risk Management Division (PSM). This unit is responsible for two main functions:

1. Enterprise Risk Management (ERM) Function

As the second line of defense, PRK is responsible for managing and controlling corporate risks to minimize their impact on the achievement of the Company's strategic objectives.

Key responsibilities of PRK in implementing ERM include:

- Formulating Risk Management Guidelines based on ISO 31000:2018;

- Mengoordinasikan pelaksanaan *risk assessment* yang melibatkan seluruh pemilik risiko di tingkat divisi dan unit.
- Memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi *risk assessment*.
- Menyusun profil risiko organisasi.
- Memantau pelaksanaan mitigasi risiko di seluruh unit.
- Memberikan konsultasi terkait manajemen risiko.
- Menindaklanjuti isu risiko operasional yang dihadapi organisasi.

2. Fungsi Business Continuity Management (BCM)

KPEI telah menerapkan BCM sebagai pilar pendukung ketahanan usaha, yang terintegrasi dengan MRK. KPEI juga telah mengadopsi standar ISO 22301:2012 untuk Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) dan memperoleh sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang kompeten.

Dalam penerapan BCM, Unit PRK berperan sebagai:

- Koordinator dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, memelihara, dan mengevaluasi *Business Continuity Procedure* (BCP), serta Pedoman Sistem Manajemen dan Kebijakannya.
- Fasilitator dan koordinator dalam kegiatan pengujian BCM.
- Koordinator saat terjadi kondisi darurat dan aktivasi BCM.

- Coordinating risk assessment involving all risk owners at both divisional and unit levels;
- Providing recommendations based on the results of the risk assessment;
- Developing the organization's risk profile;
- Monitoring the implementation of risk mitigation across all units;
- Providing consultations related to risk management;
- Following up on operational risk issues faced by the organization.

2. Business Continuity Management (BCM) Function

IDClear has implemented BCM as a key pillar of business resilience, integrated with the ERM framework. IDClear has also adopted ISO 22301:2012 as the standard for its Business Continuity Management System (BCMS) and has obtained certification from a qualified certification body.

In implementing BCM, the PRK Unit acts as:

- The coordinator in drafting, establishing, implementing, maintaining, and evaluating the Business Continuity Procedure (BCP), as well as related system guidelines and policies;
- The facilitator and coordinator for BCM testing activities;
- The coordinator during emergency situations and BCM activation.

PROFIL RISIKO DAN MITIGASINYA

KPEI mengklasifikasikan risiko utama menjadi enam kategori, yakni risiko finansial, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai risiko yang dikelola oleh KPEI beserta strategi mitigasinya.

RISK PROFILE AND MITIGATION

IDClear classifies its key risks into six categories: financial risk, operational risk, reputational risk, strategic risk, compliance risk, and legal risk. The following outlines the risks managed by IDClear along with their corresponding mitigation strategies.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Deskripsi Risiko Risk Description	Cara Pengelolaan Risiko Risk Management Strategies
1.	Risiko Finansial Financial Risk	Risiko finansial yang dikelola oleh KPEI mencakup risiko ketidakcukupan aset lancar untuk membiayai operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu ke depan serta risiko pendapatan investasi yang berada di bawah target imbal hasil yang diharapkan. The financial risk managed by IDClear includes the risk of insufficient current assets to finance the Company's operations over a certain period in the future, and the risk of investment income falling below the expected target return.	Dalam mengelola risiko tersebut, perusahaan telah menjalankan beberapa upaya pengendalian, antara lain pemantauan dan evaluasi rasio aset secara bulanan, pemantauan harian kinerja portofolio investasi, penyesuaian alokasi dan komposisi portofolio sesuai dengan kondisi ekonomi, serta diversifikasi portofolio investasi. In managing these risks, the Company has implemented several control measures, including monthly monitoring and evaluation of asset ratios, daily monitoring of investment portfolio performance, adjustments to portfolio allocation and composition based on economic conditions, and investment portfolio diversification.
2.	Risiko Operasional Operational Risk	Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang berdampak pada operasional Perusahaan Operational Risk refers to the potential consequences of inadequacies and/ or malfunctions in internal processes, human errors, system failures, and/or external events affecting the Company's operations.	Dalam mengelola risiko tersebut, KPEI melakukan pemantauan operasional bisnis secara harian, pemeliharaan sistem, redundansi sistem, serta menyediakan lingkungan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC). Selain itu, KPEI menerapkan proses review berjenjang, melakukan evaluasi prosedur internal secara berkala, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). In managing these risks, IDClear conducts daily operational business monitoring, system maintenance, system redundancy, and ensures the availability of a Disaster Recovery Center (DRC). IDClear also implements a structured review process, conducts regular reviews of internal procedures, and enhances human resource capacity.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Deskripsi Risiko Risk Description	Cara Pengelolaan Risiko Risk Management Strategies
3.	Risiko Reputasi Reputation Risk	Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat persepsi negatif terhadap perusahaan Reputation Risk is the potential consequence of a decline in stakeholders' trust resulting from negative perceptions of the Company.	Untuk menghadapi risiko tersebut, setiap masukan dari pelanggan melalui Survei Kepuasan Pelanggan ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi KPEI. Upaya ini juga mencerminkan komitmen KPEI dalam meningkatkan kualitas layanan serta menjaga reputasi perusahaan di mata seluruh pemangku kepentingan. To address this risk, each feedback provided by customers is followed up on and serves as an improvement point for IDClear. This effort also reflects IDClear's commitment to enhancing service quality and maintaining the Company's reputation across all stakeholders.
4.	Risiko Strategis Strategic Risk	Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Strategic risk is the risk that arises due to inaccuracy in making or implementing strategic decisions, as well as failure to anticipate changes in the business environment.	Untuk mengelola risiko tersebut, perusahaan melakukan kajian dengan menggunakan sumber referensi yang valid, melakukan <i>benchmarking</i> dengan perusahaan sejenis, serta melaksanakan <i>feasibility study</i> . To address these risks, the Company conducts studies by seeking valid reference sources, benchmarking against similar companies, and conducting feasibility studies.
5.	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku Compliance risk is the risk arising from the Company's non-compliance or failure to adhere to applicable laws, regulations, and provisions.	Guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar internasional, KPEI menerapkan prosedur pemantauan kepatuhan, melakukan asesmen, serta menindaklanjuti rekomendasi untuk pemenuhannya. To ensure the Company's compliance with international standards, IDClear implements compliance monitoring procedures, conducts assessments, and follows up on recommendations to address any gaps.
6	Risiko Hukum Legal Risk	Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan dalam aspek hukum Legal risk is the risk arising from legal claims or weaknesses in legal aspects.	Guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, KPEI menyusun peraturan perusahaan sesuai dengan implementasi bisnis dan perundang-undangan yang berlaku, melakukan analisis serta memberikan pendapat hukum yang akurat, memberikan pendampingan hukum, serta bekerja sama dengan konsultan hukum. To ensure compliance with applicable laws, IDClear establishes company regulations aligned with business implementation and prevailing legislation, conducts legal analyses and provides accurate legal opinions, offers legal assistance, and collaborates with legal consultants.

KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO KORPORASI TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Unit PRK berhasil menyelesaikan sejumlah kegiatan yang berfokus pada 2 (dua) kegiatan utama yaitu kegiatan terkait *Enterprise Risk Management* (ERM) dan kegiatan terkait *Business Continuity Management* (BCM) sebagai berikut :

Kegiatan terkait Manajemen Risiko Korporasi (ERM)

Berikut adalah kegiatan terkait ERM di tahun 2024:

1. Pengembangan Sistem ERM
Pengembangan sistem ERM yang dimulai sejak 2023 telah selesai dan resmi *go live* pada 31 Oktober 2024. Dengan sistem ERM, proses *risk assessment*, *Business Impact Analysis* (BIA), pelaporan risiko, serta pemantauan mitigasi risiko dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
2. *Risk Assessment* dan *Business Impact Analysis* (BIA)
Kegiatan ini dimulai setelah sistem ERM resmi *go live* pada Oktober 2024. Sebagai langkah awal, pelatihan diberikan kepada seluruh *risk officer* dan *risk owner* guna memastikan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan sistem ERM untuk *risk assessment* dan BIA.
3. *Risk Awareness*
Kegiatan *Risk Awareness* dilakukan pada tanggal 16–24 Desember 2024, dengan menyampaikan artikel terkait Risiko Operasional dan Risiko Reputasi kepada seluruh

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ACTIVITIES IN 2024

In 2024, the PRK Unit successfully completed several activities focused on two main areas: Enterprise Risk Management (ERM) and Business Continuity Management (BCM), as follows:

Activities related to Enterprise Risk Management (ERM)

The following are the ERM-related activities carried out in 2024:

1. ERM System Development
The development of the ERM system, which began in 2023, was completed and officially went live on October 31, 2024. With the ERM system, the processes of risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), risk reporting, and risk mitigation monitoring can be carried out more effectively and efficiently.
2. Risk Assessment and Business Impact Analysis (BIA)
This activity commenced after the ERM system officially went live in October 2024. As an initial step, training was provided to all risk officers and risk owners to ensure understanding and competence in using the ERM system for risk assessment and BIA.
3. Risk Awareness
Risk Awareness activities were conducted from December 16 to 24, 2024, by distributing articles related to Operational Risk and Reputational Risk to all

karyawan, yang dilengkapi dengan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman karyawan terhadap artikel-artikel yang sudah disampaikan.

4. Training ERM

Pada tanggal 19 Juni 2024 telah dilaksanakan *In-House Training ERM Fundamental* untuk seluruh *Risk Officer*, dengan menghadirkan pembicara eksternal.

5. Pemantuan Kejadian Risiko dan Mitigasi Risiko

Pemantauan kejadian risiko (*Risk Event*) dilakukan untuk memastikan bahwa risiko yang terjadi di unit kerja telah diidentifikasi dan didokumentasikan dengan baik, serta telah diterapkan langkah mitigasi yang tepat dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan terkait Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM)

Berikut adalah kegiatan terkait BCM di tahun 2024 :

1. Pengembangan *Alternative Arrangements*

Inisiatif pengembangan *Alternative Arrangements* dilakukan untuk menyediakan sistem alternatif dalam penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, yang dapat digunakan oleh KPEI untuk melanjutkan proses yang terhenti akibat kendala tertentu. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memenuhi rekomendasi *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* dan *Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)*, yang mengharuskan *Financial Market Infrastructure (FMI)* memiliki *alternative arrangements* guna memastikan kelangsungan pemrosesan transaksi yang bersifat *time-critical*.

2. Penyempurnaan Dokumen IT *Disaster Recovery Plan (DRP)*

Inisiatif ini dilakukan untuk meninjau dan menyempurnakan dokumen IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) sebagai panduan teknis bagi KPEI dalam menghadapi bencana yang disebabkan atau terkait dengan sistem IT. Selain itu, inisiatif ini juga menjadi langkah awal menuju desentralisasi pemeliharaan dokumen. IT DRP merupakan bagian dari pelaksanaan *Business Continuity Procedures*, bersama dengan *Business Continuity Plan (BCP)*, *Emergency Response Plan (ERP)*, dan *Communication Plan (CP)*.

3. Pemenuhan *Compliance* KPEI sebagai CCP PUVA dari Aspek BCM dan ERM

Inisiatif ini dilakukan untuk penyediaan dokumen terkait BCM dan ERM guna memenuhi ketentuan KPEI selaku peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang wajib memiliki dan menyusun Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) sehubungan dengan pelaksanaan operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS, baik untuk lini bisnis Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) maupun lini bisnis *Central Counterparty* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

4. Program BCM

Program BCM merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (ISO 22310:2019). Pada tahun 2024, terdapat sebelas program BCM yang telah dilaksanakan, terdiri atas tujuh simulasi *Business Continuity Plan (BCP)* dan empat kunjungan rutin

employees, complemented by a post-test to measure employees' comprehension of the articles provided.

4. ERM Training

On June 19, 2024, an In-House ERM Fundamental Training was held for all Risk Officers, featuring an external speaker.

5. Monitoring Risk Events and Risk Mitigation

Monitoring of risk events is conducted to ensure that risks occurring within work units have been properly identified and documented, and that appropriate and effective mitigation measures have been implemented in accordance with applicable regulations.

Activities related to Business Continuity Management (BCM)

The following are BCM-related activities in 2024:

1. Development of *Alternative Arrangements*

The initiative to develop *Alternative Arrangements* was undertaken to provide an alternative system for settling Equity-Based Exchange Transactions, which can be used by IDClear to continue processes that are halted due to certain obstacles. This initiative also aims to comply with recommendations from the *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* and the *Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)*, which require *Financial Market Infrastructures (FMI)* to have alternative arrangements to ensure the continuity of time-critical transaction processing.

2. Enhancement of the IT *Disaster Recovery Plan (DRP)* Document

This initiative is carried out to review and improve the IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) document as a technical guideline for IDClear in dealing with disasters caused by or related to IT systems. Additionally, this initiative serves as an initial step towards decentralizing the maintenance of the document. The IT DRP is part of the implementation of *Business Continuity Procedures*, along with the *Business Continuity Plan (BCP)*, *Emergency Response Plan (ERP)*, and *Communication Plan (CP)*.

3. Compliance Fulfillment of IDClear as CCP PUVA from BCM and ERM Aspects

This initiative is undertaken to provide documents related to BCM and ERM in order to comply with IDClear's requirements as a participant in the Bank Indonesia Payment System, which must have and prepare Written Policies and Procedures (KPT) concerning the operational implementation of the BI-RTGS and BI-SSSS Systems, both for the business line of the Clearing and Guarantee Institution (LKP) and the business line of the Central Counterparty for Money Market and Foreign Exchange (PUVA).

4. BCM Program

The BCM Program is a routine activity conducted by the Company to implement the Business Continuity Management System (ISO 22310:2019). In 2024, there were eleven BCM programs carried out, consisting of seven Business Continuity Plan (BCP) simulations and four routine visits to the Alternate Site. The list of the

Alternate Site. Berikut adalah daftar BCM Program dimaksud:

- Simulasi BCP SRO I melibatkan BEI, KPEI dan KSEI;
- Pengujian Sistem Cadangan BI-RTGS dan BI-SSSS;
- Tes login dalam rangka migrasi server FMI BI;
- Simulasi IT DRP untuk sistem KPEI yang terhubung dengan system BI-RTGS dan BI-SSSS;
- Simulasi BCP SRO II dan Keamanan Siber;
- Simulasi BCP Sistem e-BOCS PPA;
- Live Test DRC Sistem e-BOCS PPA;
- Kunjungan *alternate site* Kuarter 1, 2, 3, dan 4.

5. Expert Briefing IT DRP

Pada tanggal 11 dan 12 Juli 2024 telah dilaksanakan *In-House Training (Expert Briefing)* mengenai penyusunan dokumen IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) untuk Business Continuity Officer di Unit Operasional Administrasi Sistem (OAS), dengan menghadirkan pembicara eksternal.

6. BCM Awareness

- Menyiapkan infografis dokumen BCM untuk disampaikan kepada karyawan, meliputi: Pedoman Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU); Dokumen Emergency Response Plan (ERP); Dokumen Business Continuity Plan (BCP); Dokumen Communication Plan (CP); dan Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP).
- Pelaksanaan kuis Pedoman dan Prosedur SMKU untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan BCM Awareness.

BCM Programs is as follows:

- BCP Simulation SRO I involving IDX, IDCclear, and KSEI;
- Testing of the Backup Systems for BI-RTGS and BI-SSSS;
- Login test related to the FMI BI server migration;
- IT DRP Simulation for IDCclear systems connected to the BI-RTGS and BI-SSSS systems;
- BCP Simulation SRO II and Cybersecurity;
- BCP Simulation for the e-BOCS PPA System;
- Live Test of the DRC for the e-BOCS PPA System;
- Alternate site visits for Quarters 1, 2, 3, and 4.

5. Expert Briefing IT DRP

On July 11 and 12, 2024, an In-House Training (Expert Briefing) on the preparation of the IT Disaster Recovery Plan (IT DRP) document was conducted for Business Continuity Officers in the Operational Administration System Unit (OAS), featuring an external speaker.

6. BCM Awareness

- Preparing infographic documents on BCM to be delivered to employees, including: the Business Continuity Management System (BCMS) Guidelines; Emergency Response Plan (ERP) Document; Business Continuity Plan (BCP) Document; Communication Plan (CP) Document; and Disaster Recovery Plan (DRP) Document.
- Conducting a quiz on the BCMS Guidelines and Procedures to measure the success of BCM Awareness implementation.

TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Direksi melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko KPEI setidaknya sekali dalam setahun, bersamaan dengan evaluasi implementasi sistem pendukung manajemen risiko, seperti Sistem Manajemen Mutu (SMM), Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU), Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Selain itu, Komite Audit, sebagai organ Dewan Komisaris, bersama Unit PRK juga meninjau pelaksanaan dan pengelolaan manajemen risiko dan manajemen kelangsungan usaha setiap tiga bulan untuk memperoleh masukan dan arahan dari Dewan Komisaris atau Komite Audit.

PERNYATAAN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Komite Audit menilai bahwa sistem manajemen risiko yang didukung oleh BCM di KPEI sudah memadai, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di perusahaan.

Beberapa langkah perbaikan yang perlu ditindaklanjuti antara lain:

- Penyediaan proses alternatif untuk mengurangi risiko jika sistem utama KPEI tidak tersedia.

REVIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT PROCESS

The Board of Directors reviews and evaluates IDCclear's risk management system at least once a year, concurrently with the evaluation of the implementation of risk management support systems such as the Quality Management System (QMS), Business Continuity Management System (BCMS), Information Security Management System (ISMS), and Anti-Bribery Management System (ABMS). Additionally, the Audit Committee, as a body of the Board of Commissioners, together with the Corporate Risk Monitoring and Reporting Unit (PRK), reviews the implementation and management of risk management and business continuity every three months to obtain input and guidance from the Board of Commissioners or Audit Committee.

STATEMENT ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Commissioners and the Audit Committee assess that the risk management system supported by BCM at IDCclear is adequate, although there remain several areas that require follow-up to improve the quality of risk management implementation in the company.

Several corrective actions that need to be followed up include:

- Provision of alternative processes to reduce risk if IDCclear's main system is unavailable.

- Peningkatan efektivitas identifikasi dan pelaporan risiko agar penyebab risiko dapat diketahui lebih awal dan tepat
- Tindakan koreksi dan mitigasi yang lebih optimal dan tepat sasaran guna memastikan bahwa jumlah kejadian risiko dapat ditekan dan tidak berulang.

Masukan dari Dewan Komisaris terkait hal ini telah mulai ditindaklanjuti oleh Unit PRK pada tahun 2024 dan akan terus berlanjut hingga tahun 2025.

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO KE DEPAN

Pengembangan *Enterprise Risk Management* (ERM) selanjutnya difokuskan pada beberapa inisiatif utama, antara lain:

1. Implementasi Sistem ERM untuk meningkatkan efektivitas dalam penilaian risiko, analisis dampak bisnis (BIA), pemantauan, serta mitigasi risiko.
2. Kajian penerapan *Key Risk Indicator* (KRI) guna memperkuat penilaian dan pemantauan risiko, yang memungkinkan Perusahaan beralih dari manajemen risiko reaktif ke proaktif, serta memastikan pengelolaan risiko yang lebih sistematis dan selaras dengan tujuan strategis.
3. Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko (*Risk Management Maturity Assessment*) bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, mengukur kesesuaian dan efektivitas kerangka kerja, prinsip, serta proses manajemen risiko, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

- Improving the effectiveness of risk identification and reporting so that risk causes can be detected earlier and more accurately.
- More optimal and targeted corrective and mitigation actions to ensure that the number of risk incidents can be reduced and prevented from recurring.

Input from the Board of Commissioners regarding these matters has begun to be addressed by the PRK Unit in 2024 and will continue through 2025.

FUTURE RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT PLAN

The further development of Enterprise Risk Management (ERM) will focus on several key initiatives, including:

1. Implementation of the ERM System to enhance effectiveness in risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), monitoring, and risk mitigation.
2. Study on the application of Key Risk Indicators (KRI) to strengthen risk assessment and monitoring, enabling the Company to shift from reactive to proactive risk management and ensuring more systematic risk management aligned with strategic objectives.
3. Risk Management Maturity Assessment aimed at evaluating the effectiveness of risk management implementation based on ISO 31000, measuring the suitability and effectiveness of the framework, principles, and risk management processes, while identifying areas that need improvement.

Kode Etik

CODE OF CONDUCT

KPEI memiliki Pedoman Perilaku sebagai kode etik yang mengatur standar perilaku dan etika dalam pelaksanaan kegiatan usaha serta kehidupan sehari-hari karyawan di semua tingkat. Pedoman Perilaku ini merupakan bagian integral dari Peraturan Perusahaan, Nilai-nilai Perusahaan, dan elemen penting dalam penerapan tata kelola yang baik. Pedoman Perilaku tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs resmi KPEI di <https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/manualkebijakan-perusahaan>.

POKOK-POKOK PEDOMAN PERILAKU

Pokok-pokok yang terkandung dalam Pedoman Perilaku KPEI terdiri dari dua pokok yaitu; Standar Etika Perusahaan dan Standar Perilaku Perorangan.

Standar Etika Perusahaan, terdiri dari:

1. Etika Perusahaan terhadap Karyawan
2. Etika Perusahaan terhadap Pemerintah/Regulator
3. Etika Perusahaan terhadap Pemegang Saham
4. Etika Perusahaan terhadap Anggota Kliring dan Partisipan
5. Etika Perusahaan terhadap Penyedia Barang/Jasa
6. Etika Perusahaan terhadap Masyarakat

Standar Perilaku Perorangan, terdiri dari:

1. Penyimpanan dan Pencatatan Data dan Pelaporan
2. Etika Kerja Antar Karyawan
3. Menjaga Kerahasiaan Informasi Perusahaan
4. Perlindungan terhadap Data dan Sistem Informasi Perusahaan
5. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
6. Pengungkapan Informasi dan *Insider Trading*
7. Kejujuran
8. Anti Penyuapan
9. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan
10. Larangan Hubungan Saudara/Keluarga
11. Kepemilikan Efek bagi Karyawan KPEI
12. Etika dalam Pemberian Insentif dan Penghargaan
13. Menerima dan Memberi Hadiah
14. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
15. Penggunaan dan Perlindungan Aset Perusahaan
16. Aktivitas Politik

PENYEBARLUASAN DAN PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU

KPEI melakukan sosialisasi dan internalisasi Pedoman Perilaku kepada seluruh karyawan Perusahaan melalui berbagai bentuk, seperti *refreshment* atau pengenalan yang dilakukan baik dalam forum tatap muka maupun melalui media komunikasi Perusahaan lainnya. Pedoman Perilaku disebarluaskan ke seluruh tingkatan organisasi menggunakan sarana seperti *e-mail*, portal internal, atau media sosial Perusahaan. KPEI mewajibkan seluruh karyawan, entitas anak, afiliasi, serta

IDClear has established a Code of Conduct that sets forth behavioral and ethical standards in carrying out business activities and daily life for employees at all levels. This Code of Conduct is an integral part of the Company's Regulations, Corporate Values, and a key element in implementing good governance. The Code of Conduct is publicly accessible via IDClear's official website at <https://www.idclear.co.id/id/tentang-kpei/tata-kelola-kpei/manualkebijakan-perusahaan>.

CODE OF CONDUCT PRINCIPLES

The main points contained in IDClear's Code of Conduct consist of two key elements: Corporate Ethical Standards and Individual Behavioral Standards.

The Corporate Ethics Standards consist of:

1. Corporate Ethics towards Employees
2. Corporate Ethics towards Government/Regulators
3. Corporate Ethics towards Shareholders
4. Corporate Ethics towards Clearing Members and Participants
5. Corporate Ethics towards Suppliers of Goods/Services
6. Corporate Ethics towards the Community

The Individual Behavioral Standards consist of:

1. Data Storage and Recording and Reporting
2. Interpersonal Ethics Among Employees
3. Maintaining Confidentiality of Company Information
4. Protection of Company Data and Information Systems
5. Intellectual Property Rights (IPR)
6. Disclosure of Information and Insider Trading
7. Honesty
8. Anti-Bribery
9. Conflict of Interest and Abuse of Position
10. Prohibition of Family Relationships
11. Securities ownership by IDClear Employees
12. Ethics in Incentives and Rewards
13. Receiving and Giving Gifts
14. Compliance with Laws and Regulations
15. Use and Protection of Company Assets
16. Political Activities

DISSEMINATION AND IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT

IDClear conducts dissemination and internalization of the Code of Conduct to all employees through various methods, such as refresher sessions or introductions conducted both in face-to-face forums and through other Company communication media. The Code of Conduct is disseminated across all organizational levels using channels such as email, internal portals, or the Company's social media platforms. IDClear requires all employees, subsidiaries, affiliates, and

pemangku kepentingan lainnya untuk membaca, memahami, dan mematuhi Pedoman Perilaku tersebut.

Setiap karyawan akan menerima salinan Pedoman Perilaku dan diminta untuk menandatangani formulir pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah menerima, memahami, dan setuju untuk mematuhi Pedoman Perilaku yang kemudian disimpan oleh Unit *Human Capital* (HCA). Karyawan juga didorong untuk saling menjaga dan mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai inti Perusahaan dengan mematuhi dan menjalankan Pedoman Perilaku.

Pedoman Perilaku ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. SPI bertugas untuk mengawasi dan memverifikasi penerapan Pedoman Perilaku yang tidak dapat diterapkan dengan baik. Pedoman Perilaku yang berlaku saat ini adalah hasil pembaruan pada 13 September 2021.

PENEGAKAN DAN SANKSI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku berlaku tanpa kecuali untuk semua tingkat pegawai dengan ketentuan dan sanksi yang sama. Setiap perbuatan yang menyimpang atau potensi penyimpangan dari Pedoman Perilaku wajib dilaporkan oleh saksi atau korban.

Prosedur pelaporan mengikuti jenjang jabatan, dimulai dengan laporan yang disampaikan kepada atasan langsung. Laporan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan investigasi oleh SPI. Jika pelanggaran dianggap signifikan dan membahayakan Perusahaan, baik secara materiil maupun immaterial, SPI akan melaporkan kejadian tersebut kepada Direksi dan/atau Komite Audit yang kemudian akan meneruskan laporan kepada Dewan Komisaris untuk rekomendasi tindak lanjut.

Sanksi atas pelanggaran diberikan secara bertahap, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, dan dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Sanksi administratif; dan
4. Pemutusan hubungan kerja.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran atas Pedoman Perilaku yang ditetapkan KPEI.

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PERILAKU SECARA SETARA

Pedoman Perilaku merupakan panduan praktis tertulis yang mengatur hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh karyawan Perusahaan. Pedoman ini bersifat universal dan berlaku secara setara tanpa pengecualian dengan penerapan sanksi yang sama tanpa memandang jabatan atau posisi. Ketentuan ini mencakup semua tingkatan, mulai dari staf, kepala unit, kepala divisi, manajemen puncak, direksi, hingga dewan komisaris, termasuk pihak-pihak yang memiliki hubungan usaha atau keuangan dengan KPEI yang dapat bertindak atas nama Perusahaan.

other stakeholders to read, understand, and comply with the Code of Conduct.

Each employee receives a copy of the Code of Conduct and is required to sign a declaration form confirming that they have received, understood, and agreed to comply with the Code of Conduct. This form is then kept by the Human Capital Unit (HCA). Employees are also encouraged to uphold and remind each other of the importance of implementing the Company's core values by adhering to and practicing the Code of Conduct.

The Code of Conduct is reviewed and updated periodically according to the Company's needs. SPI is responsible for supervising and verifying the implementation of the Code of Conduct, especially in areas where compliance may be lacking. The current version of the Code of Conduct was updated on September 13, 2021.

ENFORCEMENT AND SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct applies without exception to all employee levels, with the same provisions and sanctions. Any deviations or potential violations of the Code of Conduct must be reported by witnesses or victims.

The reporting procedure follows the chain of command, beginning with a report submitted to the immediate supervisor. The report will then be followed up with an investigation by the SPI. If the violation is deemed significant and poses a material or immaterial risk to the Company, the SPI will report the incident to the Board of Directors and/or the Audit Committee, who will then forward the report to the Board of Commissioners for further recommendations.

Sanctions for violations are imposed progressively, based on the severity of the violation, and may include:

1. Verbal warning;
2. Written warning;
3. Administrative sanctions; and
4. Termination of employment.

Throughout 2024, there were no violations of the Code of Conduct established by IDCclear.

EQUAL IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is a written practical guide that regulates the dos and don'ts for all employees of the Company. This code is universal and applies equally without exception, with the same sanctions enforced regardless of position or rank. These provisions cover all levels, from staff, Unit Heads, Division Heads, Senior Management, Board of Directors, to the Board of Commissioners, including parties with business or financial relationships with IDCclear who may act on behalf of the Company.

PERNYATAAN MENGENAI BUDAYA PERUSAHAAN

KPEI telah menetapkan nilai inti perusahaan, yaitu TRUST. Mencerminkan *Integrity, Prudence, Customer Focus, Fellowship, dan Achievement of Excellence*. Seluruh elemen dan tingkatan di KPEI diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai TRUST sebagai bagian dari budaya kerja. Penghayatan nilai-nilai tersebut dalam perilaku kerja menjadi kunci dalam membangun karakter Perusahaan, meningkatkan integritas dan kedisiplinan sumber daya manusia, mendorong kinerja serta perkembangan individu, dan memberikan pedoman yang jelas dalam pengambilan keputusan bagi manajemen maupun seluruh karyawan KPEI.

STATEMENT REGARDING CORPORATE CULTURE

IDCclear has established the Company's core values summarized by the acronym TRUST. Reflecting *Integrity, Prudence, Customer Focus, Fellowship, and Achievement of Excellence*. All elements and levels within IDCclear are expected to internalize these TRUST values as an integral part of the work culture. Embracing these values in daily work behavior is key to building the Company's character, enhancing the integrity and discipline of human resources, driving individual performance and development, and providing clear guidelines for decision-making by management and all employees in IDCclear.



Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi

POLICY ON ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION

Sebagai pelaku industri sekaligus *Self-Regulatory Organization* (SRO) di pasar modal, proses bisnis KPEI melibatkan interaksi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk di tingkat internasional. Upaya mengantisipasi potensi tindakan suap dan korupsi dalam pelaksanaan proses bisnis, KPEI telah menetapkan kebijakan antisuap dan antikorupsi yang diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan nilai inti perusahaan di seluruh lapisan organisasi.

Kebijakan antisuap dan antikorupsi terintegrasi dengan berbagai pedoman pendukung lainnya, yaitu:

- Board Manual
- Pedoman Perilaku
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- Whistleblowing System
- Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan

Direksi KPEI menetapkan kebijakan ini dengan tujuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi tindakan suap dan korupsi. Efektivitas kebijakan tersebut ditinjau secara berkala dan diselaraskan dengan kebijakan terkait lainnya. Kebijakan ini disosialisasikan kepada seluruh pihak, baik internal Perusahaan, sesama SRO, pelaku pasar modal, maupun pihak eksternal lainnya yang berhubungan dengan KPEI.

Komitmen KPEI terhadap praktik antisuap dan antikorupsi diwujudkan dengan perolehan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada 8 Desember 2021, setelah melalui proses audit dan verifikasi yang menyeluruh.

Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan penguatan prinsip antisuap dan antikorupsi, KPEI secara rutin menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi kepada karyawan. Pada tahun 2024, pelatihan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan, antara lain:

As an industry player and a Self-Regulatory Organization (SRO) in the capital market, IDClear's business processes involve intensive interactions with various stakeholders, including those at the international level. To anticipate potential acts of bribery and corruption within its business operations, IDClear has established an anti-bribery and anti-corruption policy, accompanied by the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and the Company's core values across all levels of the organization.

The anti-bribery and anti-corruption policy is integrated with several supporting guidelines, including:

- Board Manual
- Code of Conduct
- Corporate Governance Guidelines
- Whistleblowing System
- Anti-Bribery Management System
- Anti-Bribery Management Policy

IDClear's Board of Directors has established this policy with the aim of preventing, detecting, responding to, and enhancing oversight of potential bribery and corruption activities. The effectiveness of this policy is reviewed periodically and aligned with other related policies. This policy is disseminated to all relevant parties, including internal stakeholders, fellow SRO, capital market participants, and other external parties engaged with IDClear.

IDClear's commitment to anti-bribery and anti-corruption practices is demonstrated by its achievement of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) certification on December 8, 2021, following a thorough audit and verification process.

As part of its ongoing efforts to reinforce and refresh anti-bribery and anti-corruption principles, IDClear regularly conducts training and awareness sessions for employees. In 2024, the following trainings and awareness programs were conducted:

Tanggal Date	Judul Pelatihan Title of Training	Penyelenggara Organizer	Jumlah Peserta Number of Participants
1 April 2024 April 1, 2024	Imbauan untuk Tidak Memberikan Hadiah kepada Insan KPEI dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Reminder Not to Give Gifts to IDClear Personnel in Observance of Eid al-Fitr	Tim FKAP* The Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) Team	Seluruh Insan KPEI Pihak Eksternal Anggota Kliring All IDClear Personnel External Parties Clearing Members
7 Mei 2024 May 7, 2024	Kuis Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Anti-Bribery Management System Awareness Quiz	Tim FKAP* The Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) Team	Seluruh Insan KPEI All IDClear Personnel
17 Desember 2024 December 17, 2024	Imbauan untuk Tidak Memberikan Hadiah kepada Insan KPEI dalam rangka Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Reminder Not to Give Gifts to IDClear Personnel in Observance of Christmas and New Year	Tim FKAP* The Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) Team	Seluruh Insan KPEI Pihak Eksternal Anggota Kliring All IDClear Personnel External Parties Clearing Members

*FKAP: Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)
The Anti-Bribery Compliance Function (FKAP)

Whistleblowing System

WHISTLEBLOWING SYSTEM

KPEI mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengawasan kegiatan usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Salah satu bentuk partisipasi tersebut melalui sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini disediakan oleh KPEI sebagai saluran untuk melaporkan setiap tindakan atau kejadian yang berpotensi melanggar hukum, pedoman perilaku, maupun peraturan Perusahaan.

Selain menerima laporan pelanggaran atau indikasi pelanggaran, WBS juga berfungsi untuk mendeteksi tindakan kecurangan (*fraud*), mencegah praktik kerja yang tidak etis, meningkatkan kesadaran serta kepedulian seluruh karyawan dan memperkuat implementasi GCG di Perusahaan.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Karyawan, mitra usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan laporan pelanggaran melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat WBS@idclear.co.id dan nomor PO BOX-1023-JKS-12010.

KPEI berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap setiap laporan yang diterima, dengan mengedepankan asas kehati-hatian dan praduga tak bersalah. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi:

1. Kecurangan atau kejahatan tindak korupsi;
2. Penyalahgunaan aset Perusahaan;
3. Kecurangan dalam pencatatan atau pelaporan keuangan;
4. Perbuatan melanggar hukum (termasuk penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya); dan
5. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja.

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tanggal Date	Tema Theme	Peserta Participant	Keterangan Description
9 Januari 2024 January 9, 2024	Sosialisasi Mekanisme Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) Dissemination on Whistleblowing System Reporting Mechanism	Seluruh Insan KPEI All IDClear Employees	Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dengan penyampaian materi melalui <i>e-mail</i> . Selain itu, kami juga melakukan survey kepada insan KPEI terkait <i>Awareness Whistleblowing System</i> KPEI. The dissemination activity was carried out by distributing informational materials via email. In addition, a survey was conducted among IDClear employees to assess their awareness of the Company's Whistleblowing System.

IDClear encourages stakeholder participation in overseeing business activities as part of its efforts to enhance the implementation of Good Corporate Governance (GCG). One form of such participation is through the Whistleblowing System (WBS). This system is provided by IDClear as a channel for reporting any actions or incidents that may potentially violate laws, the Code of Conduct, or Company regulations.

In addition to receiving reports of violations or suspected misconduct, the WBS also serves to detect fraudulent activities, prevent unethical work practices, raise employee awareness and concern, and strengthen the implementation of GCG within the Company.

SUBMISSION OF VIOLATION REPORTS

Employees, business partners, the public, and other stakeholders may report violations via email to WBS@idclear.co.id or by mail to PO BOX-1023-JKS-12010.

IDClear is committed to giving due attention to every report received, guided by the principles of prudence and presumption of innocence. The types of violations that may be reported include:

1. Fraud or acts of corruption;
2. Misuse of Company assets;
3. Fraud in financial reporting or recordkeeping;
4. Acts that violate the law (including violence against employees or management, extortion, drug use, harassment, or other criminal acts); and
5. Acts that endanger safety and security in the workplace.

DISSEMINATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

PENGELOLA PELAPORAN

Pengelolaan WBS dilakukan oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TPPP) yang berasal dari internal KPEI. TPPP dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi dan beranggotakan Kepala SPI, Kepala Divisi Hukum, dan Kepala Divisi *Human Capital* dan *General Affair* dengan tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi dan keahliannya. TPPP diketuai oleh Kepala SPI.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

KPEI memberikan apresiasi terhadap kepedulian pemangku kepentingan yang berpartisipasi melaporkan pelanggaran melalui WBS. Oleh karena itu, KPEI menjamin perlindungan bagi setiap pelapor dan menjaga kerahasiaan pelaporan hingga proses penanganan laporan selesai. *E-mail* pelaporan hanya dapat diakses oleh TPPP.

Ketentuan mengenai hak dan perlindungan bagi pelapor, mencakup:

1. Pelapor dapat meminta informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya;
2. Pelapor berhak memperoleh jaminan dan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor;
3. Pelapor berhak memperoleh jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
4. Pelapor berhak memperoleh jaminan keselamatan dari ancaman pihak terlapor; dan
5. Pelapor berhak untuk memperoleh perlindungan dari Perusahaan, meliputi perlindungan dari tekanan, pemecatan, penurunan dan penundaan kenaikan pangkat atau jabatan, diskriminasi dan pelecehan dalam segala bentuk, pembelaan dari gugatan hukum dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi yang bersangkutan.

PENANGANAN PELAPORAN

Proses penanganan laporan dalam WBS diatur melalui prosedur yang jelas. Setiap laporan akan diproses secara objektif dan profesional hingga mencapai tahap penyelesaian. Hal tersebut dirangkum dalam bagan sebagai berikut:

REPORTING MANAGEMENT

The Whistleblowing System (WBS) is managed by the Whistleblowing Report Management Team (TPPP), which consists of internal personnel from IDClear. The TPPP is established by a Board of Directors Decision Letter and comprises the Head of Internal Audit (SPI), the Head of the Legal Division, and the Head of the Human Capital and General Affairs Division, each responsible according to their respective competencies and expertise. The team is chaired by the Head of Internal Audit.

PROTECTION FOR THE WHISTLEBLOWER

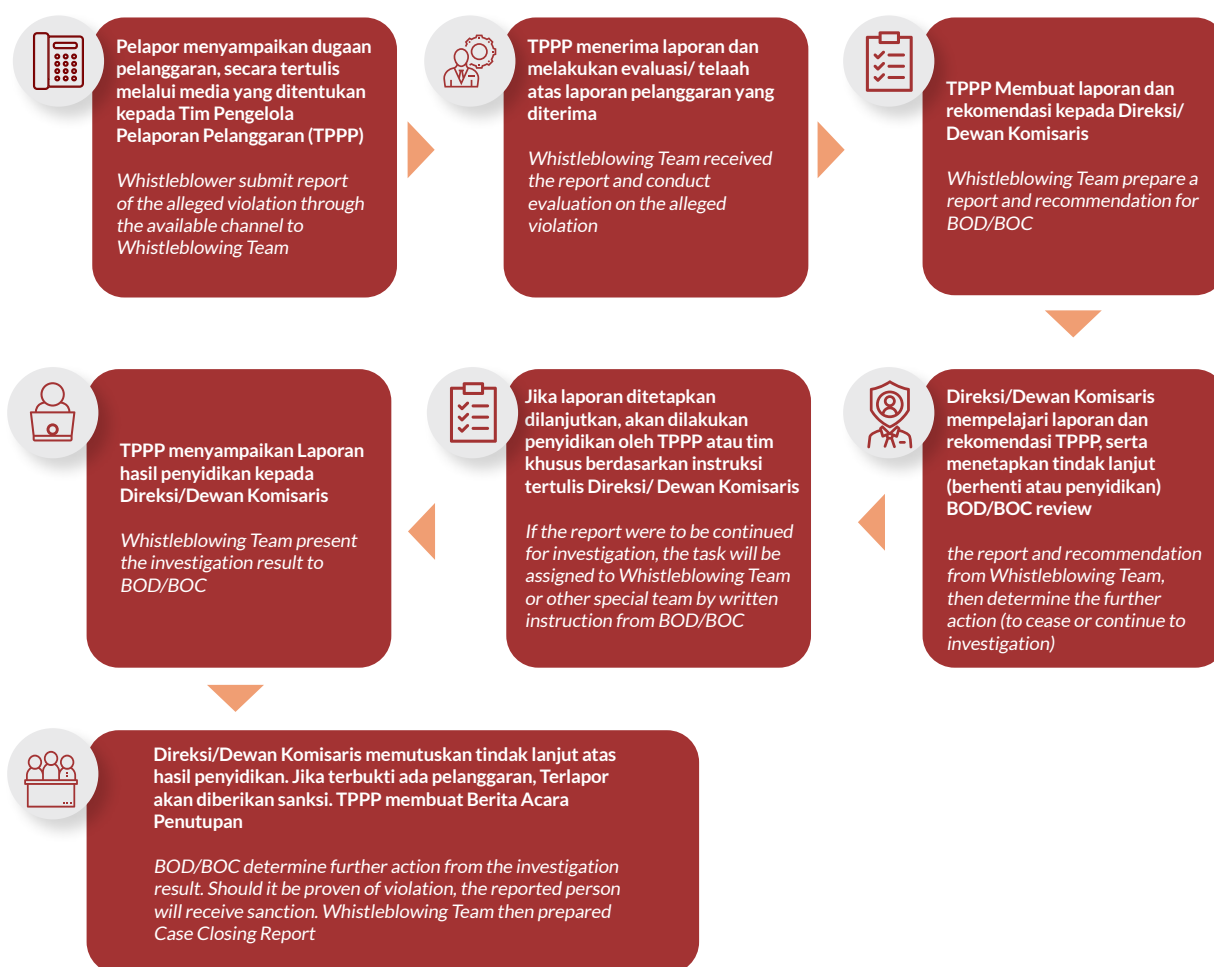
IDClear appreciates the concern of stakeholders who participate in reporting violations through the Whistleblowing System (WBS). Therefore, IDClear guarantees protection for every whistleblower and ensures the confidentiality of all reports until the resolution process is completed. The reporting email account is accessible only by the Whistleblowing Report Management Team (TPPP).

Provisions regarding protection for the whistleblower or reporting party, include:

1. The Whistleblower can request information regarding the follow-up of their reports;
2. The Whistleblower has the right to obtain guarantees and protection for the confidentiality of the reporter's identity;
3. The Whistleblower has the right to obtain guarantees for the confidentiality of the contents of the report submitted;
4. The Whistleblower has the right to obtain safety guarantees from threats from the reported party; and
5. The Whistleblower has the right to obtain protection from the Company, including protection from pressure, dismissal, reduction and postponement of promotions or positions, discrimination and harassment in all forms, defense from lawsuits and detrimental records in the personal data file concerned.

REPORTING HANDLING

The handling of reports submitted through the WBS follows a clearly defined procedure. Each report is processed objectively and professionally until resolution. This process is illustrated in the following flowchart:



JUMLAH PENGADUAN DI TAHUN 2024

Selama tahun 2024, tidak ada laporan yang diterima baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Selain itu, tidak terdapat laporan yang sedang dalam proses penanganan, maupun penerapan sanksi atau tindak lanjut atas laporan yang telah selesai diproses.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2024

Sehubungan dengan tidak adanya laporan selama tahun 2024, maka tidak terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan di tahun 2024.

NUMBER OF REPORTS IN 2024

Throughout 2024, no reports were received from either internal or external parties. In addition, there were no reports under investigation, nor any sanctions or follow-up actions related to resolved reports.

SANCTIONS/FOLLOW-UP ACTIONS ON REPORTS IN 2024

As no reports were received in 2024, there were no sanctions or follow-up actions taken during the year.



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility



Seperti nelayan yang menjaring hasil laut sekaligus menjaga kelestariannya, KPEI berkomitmen menjalankan usaha yang mengedepankan aspek ekonomi sekaligus tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berlandaskan prinsip ESG, KPEI mendukung peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem pasar modal demi keberlanjutan jangka panjang.

Like a wise fisherman who nets the sea while preserving its sustainability, IDClear is committed to running a business that prioritizes economic aspects as well as social and environmental responsibility. Based on ESG principles, IDClear supports the improvement of the quality of life and independence of the community and maintains the balance of the capital market ecosystem for long-term sustainability.





Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

GOVERNANCE OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



KOMITMEN PERUSAHAAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan pasar modal Indonesia, KPEI tidak hanya berkomitmen pada perannya dalam menyediakan layanan kliring dan penjaminan, tetapi juga pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui program-program TJSL yang terintegrasi, KPEI berupaya memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan.

Pelaksanaan TJSL KPEI berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang mencakup pengembangan komunitas dan peningkatan literasi keuangan. Berbagai inisiatif TJSL KPEI difokuskan

COMPANY'S COMMITMENT TO SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

As one of the key pillars in supporting the sustainability of the Indonesian capital market, IDClear is committed not only to its role in providing clearing and guarantee services but also to Social and Environmental Responsibility (TJSL). Through integrated TJSL programs, IDClear strives to make a tangible contribution in creating a positive impact on both society and the environment.

IDClear's Social and Environmental Responsibility (TJSL) is carried out based on the principles of sustainability and aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), focusing on community development and enhancement of financial

pada program-program yang memiliki nilai strategis yang dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. KPEI juga berusaha meningkatkan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan dengan mengadakan kegiatan lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar.

Sebagai entitas yang mendukung ekosistem pasar modal, KPEI percaya bahwa keberhasilan perusahaan harus diiringi dengan kontribusi aktif terhadap keberlanjutan masyarakat dan lingkungan. Melalui implementasi TJSL yang menyeluruh dan berbasis prinsip keberlanjutan, KPEI tidak hanya berupaya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem yang harmonis antara masyarakat, lingkungan, dan pasar modal yang berkelanjutan.

STRATEGI DAN PROGRAM TJSL

Pelaksanaan TJSL KPEI diselaraskan dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan serta menjadi bagian dari strategi Perusahaan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dimulai sejak tahun 2021. Selain itu, KPEI juga mengarahkan TJSL Perusahaan pada kegiatan yang memuat prinsip keberlanjutan guna mendukung program Pemerintah dalam mencapai *Sustainability Development Goals* (SDGs), yang telah diterapkan oleh KPEI secara bertahap dengan target implementasi penuh pada tahun 2030.

Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI senantiasa berusaha memberikan nilai tambah keberadaannya baik di pasar modal maupun pasar keuangan serta masyarakat umum. Perusahaan berkomitmen bahwa kelangsungan usaha tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan dengan menjadi mitra bagi peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) berupa program kegiatan maupun kontribusi yang membawa manfaat bagi pemangku kepentingan. KPEI berusaha untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas program TJSL di antaranya melalui penerapan prinsip keberlanjutan agar dapat menyentuh lebih banyak lagi aspek sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan TJSL di KPEI berpedoman pada beberapa ketentuan dan perundangan yang berlaku berikut ini:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT);
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012);

literacy. IDClear's various TJSL initiatives are centered on strategic programs that aim to achieve a balance among economic growth, environmental sustainability, and social welfare. IDClear also strives to raise environmental and sustainability awareness through environmental activities that actively engage the surrounding community.

As an entity supporting the capital market ecosystem, IDClear believes that corporate success must be accompanied by active contributions to community and environmental sustainability. Through comprehensive implementation of TJSL based on sustainability principles, IDClear aims not only to deliver social benefits but also to help build a harmonious ecosystem among society, the environment, and a sustainable capital market.

TJSL'S STRATEGY AND PROGRAMS

IDClear's TJSL implementation is aligned with the Company's vision, mission, and values, and being a part of its strategy under the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), which has been in place since 2021. In addition, IDClear also directs its TJSL activities toward activities grounded in sustainability principles, supporting the Government's programs to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), which IDClear has been gradually implementing with a target of full implementation by 2030.

As a Clearing and Guarantee Institution, IDClear continuously strives to deliver added value through its presence not only in the capital market and financial sectors but also to the broader public. The Company is committed to ensuring business continuity that encompasses not only economic aspects but also social and environmental aspects, by acting as a partner in improving the quality of life and fostering community independence.

This commitment is realized through the implementation of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) in the form of activity programs and contributions that bring value to stakeholders. IDClear strives to continuously enhance the scope and quality of its TJSL programs, including through the application of sustainability principles, in order to address a broader range of social and environmental aspects.

In its implementation, IDClear's TJSL activities refer to the following applicable laws and regulations:

- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (Company Law);
- Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management;
- Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection;
- Law No. 13 of 2003 on Manpower;
- Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility;

- Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik;
- *Global Standard Initiative* (GRI) yang merupakan *best practice* yang diadopsi Perusahaan.

Selain acuan di atas, pelaksanaan TJSL KPEI diselaraskan dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan. Manajemen secara konsisten memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan TJSL dengan memasukkan strategi terkait TJSL ke dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disusun di tahun 2020. Selain itu, KPEI juga mengarahkan kegiatan TJSL Perusahaan sejalan dengan program pemerintah *Sustainability Development Goals* (SDGs), yang dilakukan KPEI secara bertahap dengan target implementasi penuh pada tahun 2030.

Hingga tahun 2024 kegiatan TJSL KPEI setidaknya telah diselaraskan dengan 5 (lima) dari 17 (tujuh belas) target *Sustainability Development Goals* (SDGs), yakni meliputi: SDG No.4 Pendidikan Bermutu; SDG No.8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; SDG No.9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi; SDG No.10 Pengurangan Kesenjangan; dan SDG No.16 Perdamaian Keadilan Kelembagaan yang Kuat. Di tahun 2024, KPEI semakin memperkuat nilai-nilai yang menjadi *guidance* serta tujuan, visi, misi dan landasan pelaksanaan program TJSL KPEI, termasuk kebijakan TJSL, berupa Pedoman, SOP, dan Petunjuk Pelaksanaan internal.

KPEI berkomitmen untuk menjalankan kegiatan TJSL dengan praktek terbaik, guna mengoptimalkan hasil dan meningkatkan nilai bagi penerima manfaat. Guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif, KPEI menetapkan beberapa kebijakan sebagai landasan pelaksanaan TJSL, berupa Pedoman GCG, Kebijakan TJSL KPEI, dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang direview secara berkala, serta SK Direksi terkait penanggung jawab kegiatan TJSL.

PELAKSANAAN PROGRAM TJSL 2024

Adapun program TJSL yang telah dilakukan KPEI di sepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Pelaksanaan Program TJSL KPEI Tahun 2024 Implementation of IDClear's 2024 TJSL Program



Februari | February

Pasar Modal Indonesia selenggarakan Kegiatan Donor Darah di Jakarta, 24 Februari 2024, Jakarta Pusat, Dalam rangka HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia, OJK bersama SRO bekerja sama dengan PMI Jakarta Pusat menyelenggarakan kegiatan Donor Darah di Jakarta Pusat pada tanggal 24 Februari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu PMI dalam mengumpulkan kantong darah dari masyarakat sehingga mampu mencukupi stok kantong darah khususnya di wilayah Jakarta Pusat.

Indonesia Capital Market Holds Blood Donation Event in Jakarta, on February 24, 2024, Central Jakarta, in celebration of the 46th Anniversary of the Indonesia Capital Market, OJK together with the SROs collaborated with the Indonesian Red Cross (PMI) Central Jakarta to organize a blood donation event on February 24, 2024. This activity aimed to support PMI in collecting blood bags from the public to help ensure sufficient blood stock, particularly in the Central Jakarta area.

- OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies;
- Global Reporting Initiative (GRI), adopted by the Company as a best practice.

In addition to the aforementioned references, the implementation of IDClear's TJSL is aligned with the Company's vision, mission, and values. Management consistently provides full support for TJSL activities by incorporating TJSL-related strategies into the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), which was developed in 2020. Moreover, IDClear aligns the Company's TJSL activities with the Government's Sustainable Development Goals (SDGs) programs, which have been gradually implemented with a target of full realization by 2030.

Until 2024, IDClear's TJSL activities were aligned with at least 5 (five) out of the 17 (seventeen) Sustainability Development Goals (SDGs) targets, namely: SDG No.4 on Quality Education; SDG No. 8 on Decent Work and Economic Growth; SDG No. 9 on Industry, Innovation, and Infrastructure; SDG No. 10 on Reduced Inequality; and SDG No. 16 on Peace, Justice, and Strong Institutions. In 2024, IDClear further strengthened the values that guide the objectives, vision, mission, and foundations of its TJSL programs, including its TJSL policy framework, which consists of internal Guidelines, SOPs, and Implementation Manuals.

IDClear is committed to carrying out its Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities by applying best practices, to optimize outcomes and enhance value for beneficiaries. To ensure effective implementation, IDClear established several policies as the foundation for TJSL execution, including the GCG Guidelines, IDClear's TJSL Policy, Standard Operating Procedures (SOPs), which are reviewed periodically, and Board of Directors' Decisions related to the assignment of responsibility for TJSL activities.

IMPLEMENTATION OF THE 2024 TJSL PROGRAM

The TJSL programs implemented by IDClear throughout 2024 are outlined in the attached list below.



Maret | March

CSR HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia: Penyerahan Bantuan Sumur Bor di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, 3 Maret 2024, Pulau Rote, NTT, Dalam rangka HUT ke-46 Pasar Modal Indonesia, pada 3 Maret 2024, OJK bersama SRO melaksanakan program CSR berupa pemberian bantuan Pembangunan Sumur Bor di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Program TJSL ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat.

46th Anniversary of the Indonesia Capital Market CSR Programs: Handover of Bore Well Assistance in Rote Island, East Nusa Tenggara, on March 3, 2024, on Rote Island, NTT, as part of the 46th Anniversary celebration of the Indonesia Capital Market, on March 3, 2024, OJK together with the SROs carried out a CSR program by providing assistance for the construction of a bore well in Rote Island, East Nusa Tenggara. This program is expected to help meet the clean water needs of the local community



April | April

KPEI memberikan bantuan berupa fasilitas pelatihan yang dikelola oleh Yayasan Salam Rancage kepada masyarakat sekitar (perempuan). Kegiatan ini merupakan Pengembangan Usaha Sosial Berbasis Pemberdayaan Perempuan, pelatihan ini menghasilkan kerajinan tangan yang siap dipasarkan sehingga dapat menjadi nilai ekonomis kepada Yayasan maupun peserta pelatihan.

IDClear provided assistance in term of training facilities managed by the Salam Rancage Foundation for the surrounding community (women). This activity was part of a women empowerment-based social enterprise development program. The training produced handicrafts ready for market, generating economic value for both the Foundation and the participants.



Juli | July

KPEI Selenggarakan CSR Penanaman Pohon Produktif di Desa Jayagiri, Bandung 6 Juli 2024, Jayagiri, Bandung, Dalam rangka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah Desa Jayagiri, Bandung, pada 6 Juli 2024, KPEI melakukan penanaman pohon produktif yang diikuti oleh seluruh insan KPEI. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Diharapkan hasil penanaman ini dapat dikelola oleh kelompok tani setempat, sehingga dapat mendatangkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat di Desa Jayagiri.

IDClear Holds CSR Activity in terms of Planting of Productive Trees in Jayagiri Village, Bandung, on July 6, 2024, in Jayagiri, Bandung, as part of its Social and Environmental Responsibility in Jayagiri Village, Bandung, IDClear carried out a productive tree planting activity on July 6, 2024, with participation from all IDClear employees. The activity aimed to preserve nature and improve environmental quality. It is expected that the results of this planting can be managed by the local farmer group, and thus, it can provide sustainable economic benefits for the community in Jayagiri Village.



Agustus | August

Dalam rangka melaksanakan kegiatan CSR, KPEI memberikan bantuan satu set peralatan sablon dan perlengkapan daur ulang kertas kepada Yayasan Ummu Amanah pada 13 Agustus 2024 di Bekasi, Jawa Barat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman berwirausaha dan kepedulian terhadap lingkungan.

As part of its CSR activities, IDClear provided a set of screen-printing equipment and paper recycling tools to the Ummu Amanah Foundation on August 13, 2024, in Bekasi, West Java. This assistance was expected to enhance entrepreneurial understanding and environmental awareness.



September | September

Pada 12 September 2024, KPEI menyerahkan bantuan CSR berupa satu set peralatan pembuatan konten digital kepada Yayasan Akhiruz Zaman di Bekasi, Jawa Barat. Pemberian bantuan ini akan mendukung Yayasan untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas konten yang dihasilkan, hal ini juga merupakan bagian dari upaya KPEI untuk memberikan kemandirian finansial pada Yayasan tersebut.

On September 12, 2024, IDClear delivered CSR assistance in the form of a digital content creation equipment set to the Akhiruz Zaman Foundation in Bekasi, West Java. This support aims to help the Foundation continuously improve the quality and quantity of its content production and this is also part of IDClear's effort to promote financial independence for the Foundation



September | September

KPEI Serahkan Bantuan CSR Pelampung ke Palembang, 16 November 2024, Palembang. Sebagai bagian dari kegiatan Capacity Building Anggota Kliring & Partisipan (CBAKP) tahun 2024 di Palembang, KPEI menyerahkan 140 unit jaket pelampung keselamatan pada 16 November 2024. Bantuan ini didistribusikan kepada 10 Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan 2 yayasan yang berfokus pada kegiatan kemanusiaan dan kebencanaan di Palembang dan sekitarnya.

Pemberian bantuan pelampung tersebut akan mendukung operasional lembaga-lembaga penerima dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya di wilayah rawan banjir dan area berisiko tinggi lainnya.

IDClear Delivers CSR in the form of Life Jacket Assistance in Palembang, on November 16, 2024, Palembang, as part of the 2024 Clearing Members & Participants Capacity Building (CBAKP) activities in Palembang, IDClear distributed 140 safety life jackets on November 16, 2024. The assistance was allocated to 10 Amil Zakat Institutions (LAZ) and 2 foundations focused on humanitarian and disaster response activities in Palembang and surrounding areas.

This life jacket donation supports the operational capacity of recipient institutions in disaster mitigation efforts, particularly in flood-prone and other high-risk areas.



Desember | December

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Pasar Modal ke-47, pada 3 Desember 2024 *Self Regulatory Organization* (SRO) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan CSR Donor Darah yang terbuka untuk seluruh karyawan di Gedung BEI, Jakarta. Kegiatan CSR di bidang sosial ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Hasil dari kegiatan Donor Darah ini akan didistribusikan oleh PMI ke beberapa Rumah Sakit yang membutuhkan.

In commemoration of the 47th Anniversary of the Indonesian Capital Market, on December 3, 2024, the Self-Regulatory Organizations (SRO) in collaboration with the Indonesian Red Cross (PMI) organized a Blood Donation CSR activity open to all employees at the Indonesia Stock Exchange Building (IDX), Jakarta. This social-focused CSR initiative is expected to foster greater empathy and concern for others. The blood collected from this event is going to be distributed by PMI to several hospitals in need.

Laporan Keuangan
Consolidated FinancialTanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Desember | December

SRO Pasar Modal Salurkan Bantuan untuk Lingkungan dan Sektor Pendidikan di Semarang, 20 Desember 2024, SDN Tambakharjo Semarang, Pada 20 Desember 2024, SRO Pasar Modal selenggarakan kegiatan CSR dalam rangka 47 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia (HUT ke-47 Pasar Modal Indonesia). Kegiatan ini ditandai dengan penanaman mangrove dan bantuan pendidikan untuk SDN Tambakharjo Semarang. Diharapkan dari kegiatan ini dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan menyerap karbon dioksida, serta dapat meningkatkan perlengkapan sekolah yang dapat mewujudkan Pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Capital Market SRO Provides Environmental and Educational Assistance in Semarang, on December 20, 2024, SDN Tambakharjo Semarang, on December 20, 2024, the Capital Market SRO conducted a CSR activity as part of the 47th Anniversary of the Reactivation of the Indonesian Capital Market. The event included mangrove planting and educational support for SDN Tambakharjo in Semarang. This activity was expected to help preserve the environment by absorbing carbon dioxide and enhance school facilities to foster better and higher-quality education.

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate GovernanceTinjauan Pendukung Bisnis
Business Support OverviewAnalisa Dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and AnalysisProfil Perusahaan
Company ProfileLaporan Manajemen
Management ReportsIkhtisar Utama
Highlights

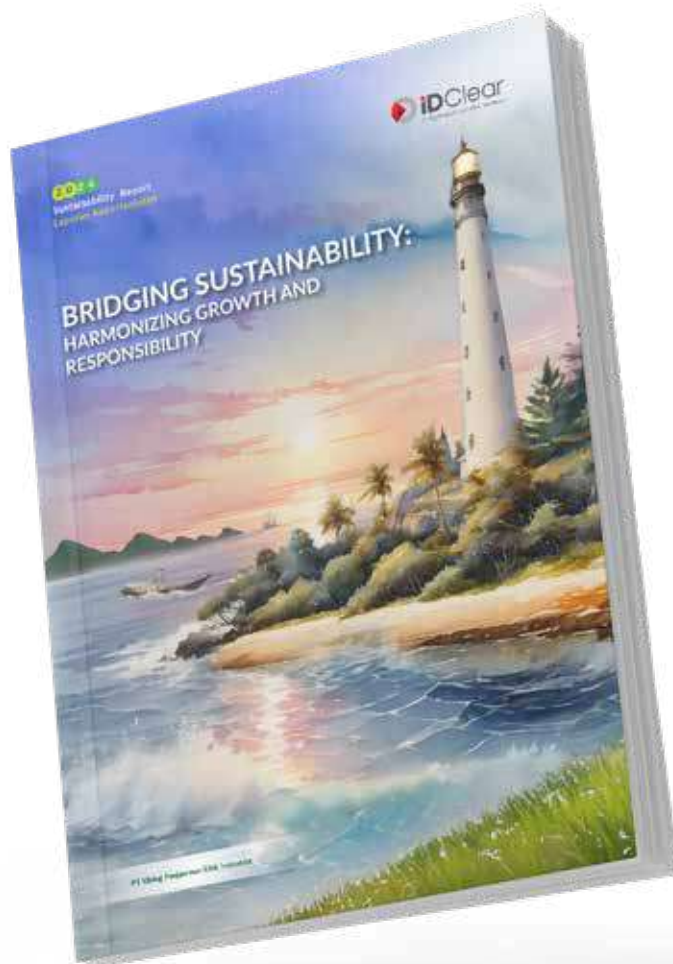


Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. Merujuk hal tersebut di atas, KPEI menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2024 secara terpisah,

In accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 16/SEOJK.04/2021 on the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies, the Sustainability Report constitutes an integral part of the Annual Report, though it may be presented separately. Referring to the above, IDCLEAR publishes the Sustainability Report for 2024 Financial year as a standalone document,





yang mencakup poin-poin sebagai berikut:
which includes the following sections:

1. Pendahuluan Preface	5. Tata Kelola Keberlanjutan; Sustainability Governance	9. Kinerja Sosial Social Performance
2. Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan Sustainability Performance Highlights	6. Kinerja Ekonomi; Economic Performance	10. Produk dan Layanan; Products and Services
3. Sambutan Direksi Message from Board of Directors	7. Kinerja Lingkungan; Environmental Performance	11. Lampiran. Appendix
4. Profil Perusahaan Company Profile	8. Ketenagakerjaan Workforce	

Lampiran

Appendix



A painting of a sunset over the ocean. The sky is filled with warm, orange and red clouds. The sun is low on the horizon, casting a bright reflection on the water. In the foreground, a large, blue wave is breaking, with white foam. The overall style is painterly and atmospheric.

08

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial statements as December 31, 2024
and for the year then ended with independent auditor's report*



iDClear

Kliring Penjaminan Efek Indonesia

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1-2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3-4	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	5	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	7-94	<i>Notes to the Financial Statements</i>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/*Domicile as
Stated in ID Card*
Nomor Telepon/*Phone Number*
Jabatan/*Position*

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/*Domicile as
Stated in ID Card*
Nomor Telepon/*Phone Number*
Jabatan/*Position*

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

- : Iding Pardi
: Indonesia Stock Exchange Building Tower I 5th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Bumi Mas Raya Blok DE No. 6
: RT.003/RW.008, Cikokol, Tangerang
: Banten
: (021) 5155115
: Direktur Utama/*President Director*

- : Umi Kulsum
: Indonesia Stock Exchange Building Tower I 5th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Jl. Angrek Garuda V Blok G14/25
: RT.008/RW.002, Kemanggisan, Palmerah
: Jakarta
: (021) 5155115
: Direktur/*Director*

Menyatakan bahwa/*Declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements;*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The Company's financial statements do not contain any material incorrect information or fact nor do they omit information or fact;*
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 25 Maret/March 25, 2025



AF2ALX433797877

Iding Pardi
Direktur Utama/*President Director*

Umi Kulsum
Direktur/*Director*

The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan
Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami terhadapnya, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Pengakuan pendapatan jasa kliring transaksi efek

Penjelasan atas hal audit utama:

Pendapatan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp537.355.251.406 merupakan ukuran penting yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan dan merupakan faktor utama yang mendorong profitabilitas. Pendapatan ini terutama merupakan pendapatan jasa kliring transaksi efek yang dicatat ketika jasa dialihkan ke pelanggan pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Perusahaan dapat diperoleh sebagai pertukaran atas jasa tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matters is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Revenue recognition from securities clearing transactions

Description of the key audit matter:

The Company's revenue for the year ended December 31, 2024 amounting to Rp537,355,251,406 is an important measure used to evaluate the Company's performance and is the primary driving factor for profitability. It primarily comprises revenue from securities clearing transactions, which is recognized when control of the service is transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those services.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan jasa kliring transaksi efek
(lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama (lanjutan):

Pada umumnya pendapatan mungkin diakui secara tidak tepat dalam hal penggunaan tarif sehingga terdapat risiko ketidakakuratan perhitungan pendapatan jasa kliring transaksi efek dan meningkatkan kemungkinan salah saji material. Karena signifikansi keuangannya, kesalahan penyajian atas pendapatan dapat memiliki dampak substansial pada laporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan jasa kliring transaksi efek merupakan hal audit utama bagi kami. Catatan 2p pada laporan keuangan Perusahaan terlampir menyajikan pengungkapan atas pendapatan Perusahaan.

Respons audit:

Kami mengevaluasi dan menguji rancangan dan efektivitas kendali utama atas proses pendapatan jasa kliring transaksi efek. Atas dasar sampel, kami melakukan pengujian rinci pisah batas transaksi menjelang dan setelah tanggal 31 Desember 2024 untuk memastikan bahwa pendapatan dicatat pada periode yang sesuai. Atas dasar sampel, kami melakukan pengujian rinci atas transaksi pendapatan ke dokumen pendukung utama untuk memastikan keterjadian atas pendapatan serta telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dicatat pada jumlah dan periode yang tepat.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

Key audit matter (continued)

Revenue recognition from securities clearing
transactions (continued)

Description of the key audit matter (continued):

In general, revenues may be inappropriately recognized in terms of the rate applied, therefore there is a risk of inaccuracy of calculation of the revenue from securities clearing transactions and increase in the risk of material misstatement. Due to its financial significance, misstatement in revenue can have a substantial impact on the overall Company financial statements. Accordingly, recognition of revenue from securities clearing transactions is a key audit matter to us. Note 2p to the accompanying Company financial statements provide the relevant disclosures on the Company's revenue.

Audit response:

We evaluated and assessed the design and operating effectiveness of the key controls over the revenue from securities clearing transactions process. We performed detailed testing on cut-off transactions to ensure that revenues were recognized in the correct period. We performed test of details of the revenue transactions by verifying to the supporting documents to ensure the occurrence of the revenue and whether it has been recognized in accordance with the applicable accounting standards and recorded in the proper period.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan jasa kliring transaksi efek
(lanjutan)

Respons audit (lanjutan):

Kami juga melakukan pengujian rinci dengan menentukan akun buku besar yang digunakan untuk mencatat entri antara pendapatan jasa kliring transaksi efek, piutang usaha dan kas dan setara kas, serta menggunakan korelasi (pencatatan entri jurnal) antara akun-akun tersebut untuk melakukan kembali (reperform) pencatatan entri jurnal. Kami melengkapi prosedur ini dengan pengujian informasi yang dihasilkan oleh Perusahaan atas entri jurnal kas untuk memastikan bahwa kas tersebut adalah kas sebenarnya yang berasal dari pelanggan. Kami juga mengevaluasi kecukupan dan keakuratan pengungkapan pendapatan jasa kliring transaksi efek dalam laporan keuangan Perusahaan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

Key audit matter (continued)

Revenue recognition from securities clearing
transactions (continued)

Audit response (continued):

We also performed test of details by identifying which general ledger accounts are used to post entries among revenue from securities clearing transactions, account receivables and cash and cash equivalents and use the correlation (journal entry postings) among those accounts to reperform the posting of journal entries. We supplemented this procedure with testing of the information produced by the Company over cash journal entries to ensure they are real cash from customers. We also evaluated the adequacy and accuracy of the disclosures related to revenue from securities clearing transactions in the company financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (the "Annual Report") other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

Other information (continued)

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Company or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan (lanjutan)**

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00408/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/III/2025 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements (continued)**

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/Public Accountant Registration No. AP.1008

25 Maret 2025/March 25, 2025



00408

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	796.154.636.149	4	908.470.295.469	Cash and cash equivalents
Investasi	707.550.293.477	5	443.214.756.260	Investments
Piutang penyelesaian transaksi efek	1.671.150.505.200	6	1.982.087.120.800	Securities transactions settlement receivables
Piutang usaha	98.475.264.542	8,31	85.536.887.212	Trade receivables
Piutang lain-lain	12.372.444.292	9,31	9.503.587.799	Other receivables
Uang muka dan biaya dibayar dimuka				Advances and prepaid expenses
- bagian lancar	32.403.122.591	10	36.766.969.162	- current portion
Uang muka pada entitas asosiasi	1.300.000.000	12,30	-	Advance payment on associated entity
Total Aset Lancar	3.319.406.266.251		3.465.579.616.702	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Dana pengaman	1.876.449.594	7	1.171.140.632	Security funds
Dana disisihkan sebagai cadangan	399.437.509.117	11,32	194.137.716.957	Reserve for guarantee
Investasi di saham	348.444.288.458	12,30	362.173.673.056	Investment in shares
Piutang lain-lain	3.036.433.837	9	2.851.928.269	Other receivables
Uang muka dan biaya dibayar dimuka				Advances and prepaid expenses
- bagian tidak lancar	350.000.000	10,28	9.949.241.944	- non current portion
Aset tetap - neto	263.018.255.499	13	274.075.874.264	Fixed assets - net
Aset hak guna - neto	43.450.060.873	14	31.288.162.346	Right of use assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	12.928.396.513	28	11.937.900.505	Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	8.370.932.095	15	7.262.155.078	Other assets
Total Aset Tidak Lancar	1.080.912.325.986		894.847.793.051	Total Non-Current Asset
TOTAL ASET	4.400.318.592.237		4.360.427.409.753	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang penyelesaian transaksi efek	1.671.150.505.200	6	1.982.087.120.800	Securities transactions settlement payables
Utang pajak	17.922.766.159	16	17.981.506.973	Taxes payable
Utang lain-lain	46.449.089.501	17	48.122.316.028	Other payables
Beban akrual	93.800.719.150	18,30	87.499.482.164	Accrued expenses
Liabilitas sewa				Lease liabilities
- bagian jangka pendek	11.459.572.831	19,35	18.305.485.103	- current portion
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.840.782.652.841		2.153.995.911.068	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Dana pengaman	1.876.449.594	7	1.171.140.632	Security funds
Liabilitas imbalan kerja	13.084.077.000	29	14.431.554.000	Employee benefits obligation
Liabilitas sewa				Lease liabilities
- bagian jangka panjang	33.391.672.226	19,35	19.773.328.826	- non-current portion
Total Liabilitas Jangka Panjang	48.352.198.820		35.376.023.458	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas	1.889.134.851.661		2.189.371.934.526	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Share capital - Rp8,000,000
masing-masing sebesar				par value per share and
Rp8.000.000 per saham				Authorized - 500,000 shares
Modal dasar - 500.000 saham				Subscribed and
Modal ditempatkan dan				paid-up - 225,000 shares
disetor - 225.000 saham				(2023: 200,000 shares)
(2023 : 200.000 saham)	1.800.000.000.000	20	1.600.000.000.000	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lain	(5.075.636.230)	5,12	3.684.036.661	Retained earnings
Saldo laba				Appropriated
Ditentukan penggunaannya	284.249.924.974	2i,21	204.950.849.467	Unappropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	432.009.451.832		362.420.589.099	
Total Ekuitas	2.511.183.740.576		2.171.055.475.227	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4.400.318.592.237		4.360.427.409.753	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENDAPATAN				REVENUES
Jasa kliring				Securities
transaksi efek	537.355.251.406	2p,30	459.891.868.714	clearing transactions
Jasa pengelolaan				Guarantee fund and collateral
Dana Jaminan dan Agunan	46.805.265.380	2p,33a	33.426.789.423	management services
Jasa kliring				Derivative
transaksi derivatif	1.408.062.677	2p	-	clearing transactions
Jasa lainnya	1.015.664.180	22	877.167.075	Other services
Bagian laba bersih				Share in profit
entitas asosiasi	-	12	3.440.139.818	of associates
Pendapatan investasi	107.217.540.201	27	84.938.753.293	Investment income
Keuntungan				Gain on
selisih kurs - neto	1.460.870.801	2d	1.051.473.800	foreign exchange - net
Pendapatan dividen	379.564.383	2p	254.721.735	Dividend income
Pendapatan denda	1.968.724	2p	1.723.165.066	Penalty income
Lainnya	1.476.090.279		2.576.309.594	Others
Total Pendapatan	697.120.278.031		588.180.388.518	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Gaji, honor				Salaries, honorarium
dan tunjangan	147.584.883.517	23,30	146.969.559.915	and allowances
Beban kontribusi tahunan ke OJK	87.987.636.546	18	74.129.373.782	Annual fees to FSA
Beban penyusutan				Depreciation expense
aset tetap	78.323.027.534	13	68.118.418.879	of fixed asset
Beban pemeliharaan				Information technology
teknologi informasi	71.760.267.972	25	66.342.548.775	maintenance expenses
Beban administrasi	44.781.842.761	26	39.251.151.034	Administrative
Beban pengembangan usaha	44.219.935.271	24	40.941.981.880	Business development
Bagian rugi bersih				Share in loss
entitas asosiasi	12.419.632.969	12,35	-	of associates
Amortisasi				Amortization of
aset hak guna	15.231.096.200	14	15.751.505.128	right of use asset
Beban konsultan	7.477.738.881		3.116.124.164	Consultant fees
Lainnya	2.645.728.181	14,19	4.978.499.963	Others
Total Beban	512.431.789.832		459.599.163.520	Total Expenses
LABA SEBELUM				PROFIT BEFORE
BEBAN PAJAK FINAL DAN				FINAL TAX AND
PAJAK PENGHASILAN	184.688.488.199		128.581.224.998	INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak final	(16.596.530.795)		(14.516.469.407)	Final tax expense
LABA SEBELUM				PROFIT BEFORE
PAJAK PENGHASILAN	168.091.957.404		114.064.755.591	INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan	(18.918.156.931)	28	(8.083.245.445)	Income tax expense
LABA BERSIH				PROFIT
TAHUN BERJALAN	149.173.800.473		105.981.510.146	FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	(285.862.233)	29	(287.857.446)	Remeasurement of employee benefits obligation - net of tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
(Kerugian)/keuntungan bersih dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(8.759.672.891)	5,12	2.386.543.546	Net (loss)/gain from changes in fair value of fair value through other comprehensive income financial assets
Total Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak	(9.045.535.124)		2.098.686.100	Total Other Comprehensive Income For the Year, net of tax
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	140.128.265.349		108.080.196.246	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive Income	Saldo laba/Retained earnings			Jumlah ekuitas/ Total equity	
				Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Tidak ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo per 31 Desember 2022		1.600.000.000.000	1.297.493.115	189.247.626.154	272.430.159.712		2.062.975.278.981	Balance as of December 31, 2022
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	105.981.510.146		105.981.510.146	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain:								Other comprehensive income:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	28.29	-	-	-	(287.857.446)		(287.857.446)	Remeasurement of employee benefits obligation - net of tax
Keuntungan belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.12	-	2.386.543.546	-	-		2.386.543.546	Unrealized gain on changes in fair value of fair value through other comprehensive income financial assets
Cadangan jaminan	21.21a	-	-	12.703.223.313	(12.703.223.313)		-	Guarantee reserves
Cadangan wajib	21b	-	-	3.000.000.000	(3.000.000.000)		-	Mandatory reserves
Saldo per 31 Desember 2023		1.600.000.000.000	3.684.036.661	204.950.849.467	362.420.589.099		2.171.056.475.227	Balance as of December 31, 2023
Laba bersih tahun berjalan					149.173.800.473		149.173.800.473	Profit for the year
Penambahan modal disetor		200.000.000.000	-	-	-		200.000.000.000	Increase in share capital
Penghasilan komprehensif lain:								Other comprehensive income:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	28.29	-	-	-	(285.862.233)		(285.862.233)	Remeasurement of employee benefits obligation - net of tax
Kerugian belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.12	-	(8.759.672.891)	-	-		(8.759.672.891)	Unrealized loss on changes in fair value of fair value through other comprehensive income financial assets
Cadangan jaminan	21.21a	-	-	5.299.075.507	(5.299.075.507)		-	Guarantee reserves
Cadangan wajib	21b	-	-	74.000.000.000	(74.000.000.000)		-	Mandatory reserves
Saldo per 31 Desember 2024		1.800.000.000.000	(6.076.636.230)	284.249.924.974	432.009.451.832		2.511.183.740.576	Balance as of December 31, 2024

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan usaha	571.836.479.361		537.004.136.117
Pembayaran kepada pemasok	(195.437.725.212)		(208.283.460.130)
Pembayaran kepada direksi, komisaris, dan karyawan	(150.638.245.578)		(101.566.678.950)
Pembayaran pajak penghasilan tahun berjalan	(36.563.924.548)		(34.990.183.709)
Pembayaran kepada OJK	(48.813.556.020)		(107.212.955.349)
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	140.383.028.003		84.950.857.979
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pelepasan investasi	50.000.000.000		5.000.000.000
Penempatan investasi	(317.588.198.993)		(145.008.930.700)
Penerimaan bunga dan dividen	115.219.672.141		69.799.114.021
Perolehan aset tetap	(69.012.133.769)		(106.878.674.975)
Penempatan cadangan	(205.299.075.507)		(12.703.223.313)
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	(2.900.000.000)	12	-
Penjualan aset tetap	126.283.786	13	-
Kas Neto (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(429.453.452.342)		(189.791.714.967)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITY
Pembayaran liabilitas sewa	(23.245.234.981)	19	(16.450.494.388)
Penambahan modal disetor	200.000.000.000	20	
Kas Neto Diperoleh Dari/ (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	176.754.765.019		(16.450.494.388)
(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(112.315.659.320)		(121.291.351.376)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	908.470.295.469	4	1.029.761.646.845
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	796.154.636.149	4	908.470.295.469

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 dari Mudofir Hadi, S.H. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-9083.HT.01.01.Th.96 tanggal 24 September 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 4 Februari 1997, Tambahan No. 484. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 05 tanggal 26 September 2024 dari Titik Krisna Murti Wikaningsih, S.H., M.Kn. mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0061216.AH.01.02 Tahun 2024, tanggal 26 September 2024.

Perusahaan mendapat persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat Keputusannya No. KEP-26/PM/1998 tanggal 1 Juni 1998.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pasar modal dengan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian atas Transaksi Bursa dan Transaksi Efek di Luar Bursa yang teratur, wajar dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; mendukung kegiatan Pemerintah dalam pengembangan pasar keuangan dengan melaksanakan fungsi sebagai *Central Counterparty* guna mencapai pasar keuangan yang berintegritas, efisien, tertib, teratur dan transparan; menyelenggarakan aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya.

Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1997. Aktivitas Perusahaan adalah menyelenggarakan jasa kliring penyelesaian transaksi bursa untuk perdagangan efek dengan warkat dan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk perdagangan efek tanpa warkat. Jasa pelaksanaan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk perdagangan efek tanpa warkat dimulai sejak tanggal 24 Juli 2000, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 1687/PM/2000.

1. GENERAL

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (the Company) was established based on notarial deed No. 8 dated August 5, 1996 of Mudofir Hadi, S.H. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-9083.HT.01.01.Th.96 dated September 24, 1996 and were published in Supplement No. 484 to State Gazette No. 10 dated February 4, 1997. The Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 05 dated September 26, 2024 from Titik Krisna Murti Wikaningsih, S.H., M.Kn. concerning Amendments to the Articles of Association of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. The amendments have been approved by the Minister of Justice and Human Rights through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0061216.AH.01.02 of 2024, dated September 26, 2024.

The Company obtained its operating license as a Clearing and Guarantee Institution from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in his decision letter No. KEP-26/PM/1998 dated June 1, 1998.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company was established to support the Government's policy in developing the capital market by providing clearing and guarantee services for the settlement of Exchange Transactions and Securities Transactions Outside the Exchange in an orderly, fair and efficient manner in accordance with the laws and regulations applies; supporting Government activities in financial market development by carrying out functions as Central Counterparty in order to achieve financial markets with integrity, efficiency, order, regularly and transparency; organizing other financial service support activities.

The Company commenced its operations in 1997. The Company is engaged in providing clearing services for settlements of stock exchange transactions on scrip trading of securities, as well as clearing and guarantee services for settlements of stock exchange transactions on scripless trading of securities. Settlement guarantee services for scripless trading of securities became effective on July 24, 2000, based on the decision letter of the Chairman of Bapepam-LK No. 1687/PM/2000.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perusahaan juga menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa untuk perdagangan derivatif yaitu Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE), Jasa Pinjam Meminjam Efek dan *Triparty Repo*.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Jumlah karyawan Perusahaan adalah 157 dan 142 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Komisaris Utama	Hoesen
Komisaris	Ronald Waas Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama	Iding Pardi
Direktur	Antonius Herman Azwar Umi Kulsum
Komite Audit	Ronald Waas Uriep Budhi Prasetyo Arini Imamawati Arief M. Prawirawinata

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

1. GENERAL (continued)

The Company also provides services for clearing and guarantee of derivative securities transactions, such as stock index futures trading, services for securities lending and *Triparty Repo*.

The Company is located at Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

The Company had 157 and 142 employees as of December 31, 2024 and 2023 (unaudited).

The Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 and December 31, 2023, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Hoesen	President Commissioner
	Ronald Waas Uriep Budhi Prasetyo	Commissioners
	Iding Pardi	President Director
	Antonius Herman Azwar Umi Kulsum	Directors
	Ronald Waas Uriep Budhi Prasetyo Arini Imamawati Arief M. Prawirawinata	Audit Committee

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The material accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company are set out below:

a. Basis of Presentation of Financial Statements

Statements of compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan ke dalam Rupiah.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan:

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (dahulu PSAK 1)

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan hak nya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of Presentation of Financial Statements (continued)

Statements of compliance (continued)

The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Company are consistently applied for the years covered by the financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency. Numbers presented in financial statements, unless specifically stated, are rounded into Rupiah.

b. Changes of Accounting Principles

The Company initially adopted all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2024, including the following revised standards that have affected the financial statements:

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of SFAS 201: Non-current Liabilities with Covenants (Previously SFAS 1)

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (dahulu PSAK 1) (lanjutan)

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amandemen PSAK 116 Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik (dahulu PSAK 73):

Amandemen PSAK 116 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen ini tidak memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan.

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) Untuk diperdagangkan,
- 3) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) Kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes of Accounting Principles (continued)

Amendment of SFAS 201: Non-current Liabilities with Covenants (Previously SFAS 1) (continued)

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

Amendment to SFAS 116: Lease Liability in a Sale and Leaseback (previously SFAS 73)

The amendment to SFAS 116 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendments had no significant impact on the company's financial statements.

c. Current and non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- 1) *Expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- 2) *Held primarily for the purpose of trading,*
- 3) *Expected to be realized within 12 months after the reporting period, or*
- 4) *Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.*

All other assets are classified as non-current.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Klasifikasi lancar dan tak lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- 1) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- 2) Untuk diperdagangkan,
- 3) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) Tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar.

d. Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Perusahaan menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) yang berlaku masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Dolar Amerika Serikat	16.157	15.439

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Dalam kegiatan normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Current and non-current classification (continued)

A liability is current when it is:

- 1) Expected to be settled in the normal operating cycle,
- 2) Held primarily for the purpose of trading,
- 3) Due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- 4) There is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d. Foreign Currency Transactions

The Company maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions.

As of the statement of financial position date, all foreign currency monetary assets and liabilities are translated into Rupiah at Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) on December 31, 2024 and 2023, respectively. The resulting net foreign exchange gains or losses are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities denominated in foreign currency as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are as follows:

e. Transactions with Related Parties

In its normal course of business, the Company enters into transactions with related parties as defined under SFAS 224, "Related Party Disclosures".

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity).

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
- i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- i. The entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a company of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employee benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari perusahaan yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

f. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Transactions with Related Parties (continued)

- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
 - viii. The entity, or any member of a company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

f. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Classification of Financial Instruments

Di bawah ini merupakan klasifikasi instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan:

Sets out below the classification of the Company's financial instruments:

Instrumen keuangan/ Financial instrument	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ Category as defined by SFAS 109	Golongan/ Class	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial assets	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Setara kas/Cash equivalent	
		Piutang penyelesaian transaksi efek/ Securities transactions settlement receivables	
		Piutang usaha/Trade receivables	
		Piutang lain-lain/Other receivables	
		Dana pengaman/Security funds	
		Dana disisihkan sebagai cadangan jaminan/ Reserve for guarantee funds	
		Aset lain-lain/Other assets	Dana kliring anggota kliring tidak aktif/Clearing fund of inactive clearing members
			Uang jaminan/ Security deposits
	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Fair value through other comprehensive income	Investasi di saham/ Investment in shares	
		Investasi/Investment	Obligasi/Bonds
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Biaya perolehan diamortisasi/ Amortized cost	Utang penyelesaian transaksi efek/ Securities transactions settlement payables	
		Utang penyelesaian transaksi efek/ Securities transactions settlement payables	
		Beban akrual/Accrued expense	
		Dana pengaman/Security funds	
		Liabilitas sewa/Lease liabilities	
		Utang lain-lain/Other payable	Dana kliring anggota kliring tidak aktif/Clearing fund of inactive clearing members

Aset Keuangan

Financial Assets

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Initial Recognition and Measurement

Semua aset keuangan awalnya diakui pada nilai wajar namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar (perdagangan cara biasa) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal saat Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular-way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan (SPPI).

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit Loss* (FVTPL).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

The Company's financial assets are classified as follows:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss.
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.
- Financial assets measured at amortized cost.

The Company used 2 (two) methods to classify its financial assets, which based on the Company's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets (SPPI).

SPPI Test

As a first step of its classification process, the Company assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Company applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than *de minimis* exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as *Fair Value through Profit Loss* (FVTPL).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti: (lanjutan)

- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Business model assessment

The Company determines its business model at the level that best reflects how it manages Company's of financial assets to achieve its business objective.

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as: (continued)

- How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);
- The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Company's assessment.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from the Company's original expectations, the Company does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing seperti berikut ini:

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Perusahaan secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the business model test and the contractual cash flow test show that financial assets entering into classifications are measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

This classification is intended for financial instruments owned to be traded or at the time of initial acknowledgement has been determined by the Company to be measured at fair value through profit or loss.

A financial asset is classified as held for trading, if:

- It has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- On initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- It is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition, if:

- Such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or
- A group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Company is provided internally by the management.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 31d.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI")

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, kecuali keuntungan atau kerugian atas selisih kurs dan kerugian penurunan nilai. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lain di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) (continued)

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in Note 31d.

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI")

Financial assets are managed in a business model whose objectives will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets and contractual requirements of financial assets which on a certain date increase the cash flow solely from the principal and interest payments (*solely payments of principal and interest*) of the amount owed.

At the initial recognition, debt instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognized at the fair value plus the transaction fees and subsequently measured at fair value where the gain or loss of changes in fair value are recognized as other comprehensive income, except for gain or loss on the exchange rate and impairment loss. Dividend from equity is recognized in profit or loss post.

Expected credit losses are recognized as an additions of other comprehensive income in the statement of financial position (not reducing the number of recorded financial assets in financial statements). Interest income is calculated using the effective interest rate method.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai "pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tahun pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" (dahulu PSAK 71) telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 239 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" (dahulu PSAK 55) dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Financial assets measured at amortized costs

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial assets in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial assets that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (*solely payments of principal and interest*) of the amount owed. At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "interest income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial assets and is acknowledged in the financial statements as "the establishment of a reserve impairment loss".

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of the year report date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial assets, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Adoption of SFAS 109, "Financial Instrument" (previously SFAS 71) change the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with SFAS, "Financial Instrument: Recognition and Measurement" 239 (previously SFAS 55) to expected credit loss. The Company adopts simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian dihitung atas aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah telah terjadi gagal bayar (default) termasuk berapa lama telah terjadi tunggakan pembayaran, pemburukan kualitas kredit dari pihak ketiga dan pengetahuan tentang kejadian tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan pihak ketiga untuk melakukan pembayaran.

Model *three-stage* digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, yang mensyaratkan aset keuangan untuk dinilai sebagai berikut:

- *Stage 1*: aset keuangan dimana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal;
- *Stage 2*: aset keuangan dimana terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, namun tidak terdapat gagal bayar (*default*); atau
- *Stage 3*: aset keuangan yang mengalami gagal bayar (*default*).

Untuk aset keuangan pada *stage 1*, kerugian kredit ekspektasian dihitung berdasarkan kerugian kredit yang diekspektasikan akan terjadi selama 12 bulan kedepan. Untuk aset keuangan pada *stage 2* dan *3*, kerugian kredit ekspektasian dihitung berdasarkan kerugian kredit yang diekspektasikan akan terjadi selama umur instrumen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced by allowance on impairment losses account. When the financial asset is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Expected credit losses are calculated on the Company's financial assets that are measured at amortized cost and at fair value through other comprehensive income. Factors considered in determining whether a default has taken place include how many days past the due date a payment is, deterioration in the credit quality of a counterparty, and knowledge of specific events that could influence a counterparty's ability to pay.

A three-stage model is used for calculating expected credit losses, which requires financial assets to be assessed as:

- *Stage 1*: financial assets where there has been no significant increase in credit risk since original recognition;
- *Stage 2*: financial assets where there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, but no default; or
- *Stage 3*: financial assets that are in default.

For financial assets in stage 1, expected credit losses are calculated based on the credit losses that are expected to be incurred over the following 12-month period. For financial assets in stages 2 and 3, expected credit losses are calculated based on credit losses expected to be incurred over the life of the instrument.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the assets expire, or when it transfers the financial assets and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the assets and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial assets, the Company continues to recognize the financial assets and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial assets in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial assets other than its entirety (e.g., when the Company retains an option to repurchase part of a transferred assets), the Company allocates the previous carrying amount of the financial assets between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Penghentian pengakuan aset keuangan (lanjutan)

Derecognition of financial assets (continued)

Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Financial Liabilities and Equity Instruments

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Classification as debt or equity

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Financial liabilities at amortized cost

Setelah pengukuran awal, liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premium atas biaya perolehan dan transaksi yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui dalam laba rugi.

After initial measurement, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction cost that is an integral part of the effective interest rate. The amortization is recognized in the profit or loss.

Metode suku bunga efektif

Effective interest method

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Perusahaan perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal. Perusahaan akan mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terkena dampak dari perubahan model bisnis. Perubahan tujuan model bisnis Perusahaan harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) Perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) Hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) Pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities and Equity Instruments (continued)

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Reclassification of Financial Instruments

The Company is allowed to reclassify the financial assets owned if the Company changes the business model for the management of financial assets and the Company is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Changes in the business model should significantly impact the Company's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Company needs to prove the change to external parties. The Company will classify all financial assets impacted by changes in the business model. The changes of the Company's business model must have an impact before the reclassification date.

The following are not considered as change in business model: (a) The change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) Temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) The transfer of financial assets between parts of the Company and different business models.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Piutang dan Utang Penyelesaian Transaksi Efek

Piutang dan utang penyelesaian transaksi efek merupakan tagihan/liabilitas Perusahaan kepada anggota kliring atas transaksi bursa dengan lelang berkesinambungan (*auction market*) atas saham dan obligasi maupun kontrak berjangka indeks efek.

i. Dana Pengaman, Cadangan Jaminan, Cadangan Skin In The Game (SITG), dan Dana Jaminan

Dana Pengaman

Dalam rangka penanganan kegagalan penyelesaian transaksi perdagangan kontrak berjangka indeks efek secara *netting*, anggota kliring diwajibkan menyetor dana pengaman. Dana pengaman yang berasal dari setoran anggota kliring, serta hasil pengelolaannya, ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka yang akan digunakan untuk menanggulangi kegagalan dalam penyelesaian transaksi perdagangan kontrak berjangka indeks efek.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities and Equity Instruments (continued)

Offsetting of Financial Instrument

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the dates of placement.

h. Securities Transactions Settlement Receivables and Payables

Securities transactions settlement receivables and payables represent the Company's receivable/payable arising from normal securities transactions with continuous auction (*auction market*) on stocks, bonds and stock index futures trading by the clearing members.

i. Security Funds, Reserve for Guarantee Fund, Reserve for Skin In The Game (SITG), and Guarantee Fund

Security Funds

For the purpose of handling failure on net settlement of stock index futures trading, the clearing members are required to contribute to a security funds. The security funds arising from contributions of clearing members and the yield thereon are placed in time deposits which will be used for the purpose of handling any failures in settlement of stock index futures transactions.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Dana Pengaman, Cadangan Jaminan, Cadangan Skin In The Game (SITG), dan Dana Jaminan (lanjutan)

Dana Pengaman (lanjutan)

Dana pengaman dapat ditarik kembali apabila anggota kliring yang bersangkutan tidak lagi memakai jasa Perusahaan dan telah menyelesaikan seluruh liabilitasnya pada Perusahaan.

Cadangan Jaminan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-25/PM/2000 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, yang diperbaharui dengan Surat Keputusan No. KEP-46/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004 yang digantikan dengan peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014, Perusahaan membentuk cadangan jaminan yang disisihkan dari laba bersih Perusahaan dan dipergunakan untuk membiayai penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Cadangan jaminan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Cadangan Skin In The Game (SITG)

Berdasarkan Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) dalam *Rulebook* KPEI terkait CCP Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) versi 8, September 2024, diatur bahwa cadangan *Skin In The Game* (SITG) merupakan kontribusi alokasi modal Perusahaan yang diperuntukan dalam penanganan Kondisi Wanprestasi Transaksi PUVA. Cadangan *Skin In The Game* ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Dana Jaminan

Berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam No. KEP-26/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Dana Jaminan, yang sebelumnya diatur dalam surat Bapepam-LK No. S-1484/PM/1997 tanggal 27 Juni 1997, Bapepam memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan pungutan sebesar 0,01% dari nilai transaksi bursa sebagai salah satu sumber utama pembentukan dana jaminan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Security Funds, Reserve for Guarantee Fund, Reserve for Skin In The Game (SITG), and Guarantee Fund (continued)

Security Funds (continued)

The security funds are refundable once the clearing member ceases to utilize the Company's services and its liabilities to the Company have been fully settled.

Reserve for Guarantee Fund

In accordance with the decision letter of the Chairman of Bapepam No. KEP-25/PM/2000, regarding Securities Transactions Settlement Guarantee as amended with the decision letter of the Chairman of Bapepam No. KEP-46/PM/2004 dated December 9, 2004 which had been replaced by FSA regulation No. 26/POJK.04/2014 on November 19, 2014, the Company established a reserve for guarantee fund which is taken from the Company's net income and will be used to guarantee the settlement of securities transactions. The reserve for guarantee fund is placed in time deposits.

Reserve for Skin in The Game (SITG)

Based on the Provisions on Handling Default Conditions (*Default Management*) in the KPEI Rulebook related to CCP Money Market and Foreign Exchange (PUVA) version 8, September 2024, it is stipulated that the *Skin In The Game* (SITG) reserve is a contribution of the Company's capital allocation which is intended for handling Default Conditions of PUVA Transactions. The *Skin In The Game* Reserve is placed in the form of a time deposit.

Guarantee Fund

Based on the decision letter of the Chairman of the Bapepam No. KEP-26/PM/2000 dated June 30, 2000 regarding Guarantee Fund, which was previously regulated by the decision letter of the chairman of Bapepam No. S-1484/PM/1997 dated June 27, 1997, Bapepam has approved the Company to collect 0.01% of cumulative value of securities transactions as one of main source for the guarantee fund.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

i. Dana Pengaman, Cadangan Jaminan, Cadangan Skin In The Game (SITG), dan Dana Jaminan (lanjutan)

Dana Jaminan (lanjutan)

Berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam No. KEP-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004, Bapepam menyetujui Perusahaan untuk memungut dana jaminan sebesar 0,005% dari nilai transaksi kontrak berjangka dan 0,00125% dari nilai transaksi obligasi. Sehubungan dengan perubahan dari Bapepam ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 19 November 2014, OJK menerbitkan peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa, dimana OJK menyatakan mencabut dan tidak berlakunya Keputusan Bapepam No. KEP-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004.

Berdasarkan peraturan tersebut, anggota kliring wajib membayar kontribusi dana jaminan yang tidak dapat ditarik kembali. Dana jaminan berasal dari kontribusi awal anggota kliring baru yang penetapannya ditetapkan dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi setiap anggota kliring yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran OJK.

Berdasarkan perubahan terakhir sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.04/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.04/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi, menjadi sebagai berikut:

- Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk Transaksi Bursa sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap transaksi Bursa.
- Kontribusi Dana Jaminan dari Nilai Transaksi Khusus untuk:
 - a. Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka, sebesar 0,0003% (tiga per satu juta) dari nilai setiap transaksi Kontrak Berjangka;
 - b. Transaksi Bursa atas Kontrak Opsi sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai Kontrak Opsi;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

i. Security Funds, Reserve for Guarantee Fund, Reserve for Skin In The Game (SITG), and Guarantee Fund (continued)

Guarantee Fund (continued)

Based on the decision letter of the Chairman of Bapepam No. KEP-47/PM/2004 dated December 9, 2004, Bapepam has approved the Company to collect 0.005% of futures transactions and 0.00125% of bond transactions for the guarantee fund. In relation with the change from Bapepam to Financial Services Authority (FSA), on November 19, 2014, the FSA published the FSA regulation No. 26/POJK.04/2014 on the settlement of exchange transactions, which replace Bapepam Decree No. KEP-47/PM/2004 dated December 9, 2004.

Under the regulation, the clearing member shall pay the guarantee fund contribution, which cannot be withdrawn subsequently. Guarantee fund contribution arising from an initial contribution of new clearing member is regulated in the Guarantee Fund regulation and the contribution is based on the transaction value of each clearing member as established based on the FSA circular.

In relation with the last amendment in FSA Circular Letter No. 10/SEOJK.04/2022 dated June 29, 2022, regarding changes in the FSA Circular Letter No. 8/SEOJK.04/2020 regarding contributions for Guarantee Fund Based on Transaction Value, are as follows:

- Contribution of Guarantee Fund Based on Transaction Value for Securities Transaction is 0.01% (one per ten thousand) from each of the Securities transaction.
- Contribution of Guarantee Fund for Special Transaction Value:
 - a. Securities transaction for future securities contract transaction value is 0.0003% (three per one million) from each of the future securities contract transaction value;
 - b. Securities transaction for option contract Transaction value is 0.01% (one per ten thousand) from each of the equity option contract transaction;

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Dana Pengaman, Cadangan Jaminan, Cadangan *Skin In The Game* (SITG), dan Dana Jaminan (lanjutan)

Dana Jaminan (lanjutan)

- Kontribusi Dana Jaminan dari Nilai Transaksi Khusus untuk: (lanjutan)
 - c. Transaksi Bursa atas Efek bersifat Utang dan Sukuk, sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai setiap transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk;
 - d. Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur jatuh tempo, sebesar 0,003% (tiga per seratus ribu) dari nilai penerbitan Waran Terstruktur.

Dana jaminan digunakan apabila cadangan jaminan dan pinjaman bank tidak mencukupi dalam penanggulangan kegagalan penyelesaian transaksi bursa dan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman bank dalam rangka penjaminan penyelesaian transaksi bursa tersebut. Dana Jaminan bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan diwajibkan untuk mengelola dana jaminan tersebut dan penggunaannya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dana jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara dan/atau deposito bank dengan komposisi yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko. Hasil investasi Dana Jaminan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan kepada lembaga kliring dan penjaminan.

j. Investasi di Saham

Investasi dalam saham termasuk investasi pada entitas asosiasi dan investasi dalam bentuk saham lain. Investasi dalam bentuk saham lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana Perusahaan memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Security Funds, Reserve for Guarantee Fund, Reserve for *Skin In The Game* (SITG), and Guarantee Fund (continued)

Guarantee Fund (continued)

- Contribution of Guarantee Fund for Special Transaction Value: (continued)
 - c. Securities transaction for debt and Sukuk Securities' transaction value is 0.00125% (one hundred twenty-five per ten million) from each of the Debt and Sukuk securities transaction value;
 - d. Securities transactions for Structured Warrants transaction value is 0.003% (three hundred thousand) of the issuance value of Structured Warrants.

Guarantee fund is used when the reserves for guarantee fund and bank loans are not sufficient to cover for clearing transaction settlement failure and as collateral for a bank loan to guarantee the settlement of the transaction. The guarantee fund does not belong to a certain party and is not distributed to anyone for any other purpose other than those stated in the regulation. Based on the regulation, the Company is responsible for managing the guarantee fund, and its utilization should be reported to the Financial Service Authority.

The guarantee fund is only allowed to be invested in Government Bonds and/or time deposits with a certain composition which has been approved by a credit policy and risk management committee. The investment's results, net of the management fee, should be added to the guarantee fund.

j. Investment in Shares

Investments in shares include investments in associates and other investments in shares. Other Investments in shares are classified as fair value through other comprehensive income. An associate is an entity over which the Company has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Investasi di Saham (lanjutan)

j. Investment in Shares (continued)

Penghasilan serta aset dan liabilitas dari entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The results of operations and assets and liabilities of associates are accounted using the equity method of accounting, except when the investment is classified as fair value through other comprehensive income.

Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan pada laporan posisi keuangan, dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi. Jika bagian Perusahaan atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Perusahaan pada entitas asosiasi (yang mencakup kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto Perusahaan pada entitas asosiasi) maka Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian lebih lanjut dan tambahan kerugian hanya diakui oleh Perusahaan sepanjang entitas memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Company's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Company's share of losses of an associate exceeds the Company's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the associate), the Company discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Perusahaan atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Company's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment.

Setiap kelebihan kepemilikan Perusahaan dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Any excess of the Company's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Setelah menerapkan metode ekuitas, Perusahaan menentukan apakah perlu mengakui rugi penurunan nilai atas investasi pada perusahaan asosiasi. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Jika ada bukti seperti itu, Perusahaan menghitung jumlah penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang dapat dipulihkan dari entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakui kerugian dalam "bagian laba (rugi) perusahaan asosiasi" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

After application of the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on its investments in associates. At each reporting date, the Company determined whether there is objective evidence that the investment in associate is impaired. If there is such evidence, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value, and the recognizes the loss within "share in profit (loss) of associates" in the statement of profit loss and other comprehensive income.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)

j. Investasi di Saham (lanjutan)

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perusahaan mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Perusahaan mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 113.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas pelepasan investasi asosiasi dalam laba rugi dengan turut memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang tersisa. Selanjutnya, Perusahaan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Perusahaan melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Perusahaan mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Perusahaan tetap menerapkan metode ekuitas, Perusahaan mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)

j. Investments in Shares (continued)

The Company discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or when the investment is classified as held for sale. When the Company retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Company measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with SFAS 113.

The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Company accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. The Company reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Company continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Company reduces its ownership interest in an associate but the Company continues to use the equity method, the Company reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Pengukuran Nilai Wajar

k. Fair Value Measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- In the principal market for the asset or liability; or*
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif, ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya. Investasi dalam unit reksadana dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

The fair value of financial instruments traded in active markets, is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources. Investments in mutual fund units are stated at market value, in accordance with the net value of assets of the mutual funds at the statement of financial position date.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto tersebut.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially has the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

k. Fair Value Measurement (continued)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Tingkat 1 - Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

l. Biaya Dibayar Dimuka

l. Prepaid Expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are charged to profit or loss over their beneficial periods using the straight-line method.

m. Aset Tetap

m. Fixed Assets

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Aset Tetap (lanjutan)

m. Fixed Assets (continued)

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years	
Peralatan dan sistem komputer	4	Computer hardware and system
Renovasi	4	Leasehold improvements
Peralatan dan perabotan kantor	4	Furniture and fixtures
Kendaraan	4	Vehicles
Sistem utama	6	Main system

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs are charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of equipments and facilities are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Fixed asset items are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of equipment and facilities is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan dan hanya akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost. Construction in progress are not depreciated and will be reclassified to the appropriate fixed asset account when completed and ready for use.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

n. Impairment of Non-Financial Assets

Pada akhir setiap tahun pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

At the end of the year reporting, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

If the recoverable amount of non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation.

o. Sewa

o. Lease

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan mempertimbangkan apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Lease (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company considers whether:

- The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:
 1. The Company has the right to operate the asset; or
 2. The Company has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used during the period of use.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Company recognizes a right of use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right of use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa. Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan utama Perusahaan diperoleh dari (i) Jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan efek di bursa sebesar 0,009% dari nilai transaksi; (ii) Jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan kontrak berjangka indeks efek LQ45 sebesar Rp2.000 yang dihitung berdasarkan frekuensi transaksi anggota kliring yang bersangkutan; (iii) Jasa pinjam meminjam efek sebesar 1% per tahun dari nilai transaksi pinjam meminjam efek; (iv) Jasa Fasilitas *triparty repo* sebesar 0,02% per bulan dari setiap nilai transaksi yang masih berjalan di bulan yang bersangkutan; (v) Jasa pengelolaan dana jaminan sebesar maksimal 10% dari hasil investasi dana jaminan; (vi) Jasa pengelolaan agunan sebesar maksimal 10% dari hasil investasi agunan dan administrasi agunan; (vii) Jasa kliring SPPA AK sebesar maksimal 0,000375% dari nilai transaksi perdagangan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) di bursa; (viii) Jasa kliring transaksi *Over The Counter* (OTC) Derivatif sebesar 0,005% dari nilai transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) dan Jasa pengelolaan agunan transaksi OTC Derivatif sebesar maksimal 10% dari hasil investasi agunan.

Pendapatan diakui pada saat jasa diserahkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Lease (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable. Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the outstanding liability balance.

p. Revenue and Expense Recognition

Revenue

The Company's main revenues are derived from (i) Clearing and settlement guarantee services for securities transaction at the stock exchange amounting to 0.009% of the transaction value; (ii) Clearing and settlement guarantee services for LQ45 stock index futures trading transaction amounting to Rp2,000 which is calculated based on the total transactions of clearing members; (iii) Borrowing and lending stocks services amounting to 1% per annum of the borrowing and lending stocks transaction; (iv) Triparty repo facility service amounting to 0.02% per month of each ongoing transaction; (v) Guarantee fund management services amounting to 10% maximum of investment income of guarantee fund; (vi) Collateral management services amounting to 10% maximum of investment income of collateral and collateral administration; (vii) SPPA AK clearing service amounting to 0.000375% maximum of the transaction value of Debt Securities and/or Sukuk (EBUS) traded on the exchange; (viii) Clearing services for Over The Counter (OTC) Derivative transactions amounting to 0.005% of the Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) transaction value and Collateral management services for OTC Derivative transactions amounting to maximum of 10% of the collateral investment results.

Revenue is recognized when the service is rendered.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan Bunga

Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Pendapatan Denda

Penghasilan denda pada tanggal 31 Desember 2024 diperoleh dari denda atas keterlambatan pembayaran tagihan jasa layanan kliring Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dan pada tanggal 31 Desember 2023 diperoleh dari peristiwa gagal bayar atas penyelesaian transaksi bursa milik PT Royal Investium Sekuritas.

Beban

Beban yang terjadi pada umumnya dibebankan pada saat terjadinya (basis akrual).

q. Imbalan Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang tidak berumur lebih dari 56 tahun. Iuran yang ditanggung Perusahaan diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Imbalan Pasca Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 11/2003. Program iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasti pasca kerja tanpa pendanaan.

Perusahaan mengadakan program pensiun dini untuk karyawan tetap yang telah bekerja paling sedikit 10 tahun dan berumur 46 tahun. Imbalan program pensiun dini sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

Interest Income

Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset's net carrying amount on initial recognition.

Penalty Income

Penalty income as of December 31, 2024 is derived from delay in payment of debt securities and sukuk (EBUS) clearing service and as of December 31, 2023 is derived from clearing transaction settlement failure of PT Royal Investium Sekuritas.

Expenses

Expenses are generally recognized when incurred (accrual basis).

q. Employee Benefits

Defined Contribution Pension Plan

The Company has a defined contribution pension plan covering all of its permanent employees who are not more than 56 years old. The Company's contributions are recognized as expense in the current period of contribution.

Defined Post Employment Benefits

The Company also provides defined post-employee benefits to its employees in accordance with Labor Law No. 11/2003. Defined contribution plan is used as a funding instrument for pension benefit as stated in the Labor Law. The shortage of benefits provided under the defined contribution pension plan against the benefits required by the Labor Law is accounted for as unfunded defined post-employee benefits.

The Company provides early retirement program benefit for all the permanent employee who have worked for a minimum period of 10 years and are at least 46 years old. The early retirement program benefits are in accordance with the Company's Regulation.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Imbalan Kerja (lanjutan)

q. Employee Benefits (continued)

Imbalan Pasca Kerja Imbalan Pasti (lanjutan)

Defined Post Employment Benefits (continued)

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

The post-employment benefits is determined using the *Projected Unit Credit Method* with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- (i) Biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- (ii) Beban atau pendapatan bunga bersih; dan
- (iii) Pengukuran kembali

- (i) Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses in curtailments and settlements);
- (ii) Net interest expense or income; and
- (iii) Remeasurements

Perusahaan menyajikan dua kategori pertama biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu. Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

The Company presents the first two components of defined benefit cost in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs. The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit in the Company's defined benefit plans.

Imbalan Kerja Jangka Panjang lain

Other Long-term Employment Benefits

Imbalan kerja jangka panjang lain berupa Insentif Masa Kerja untuk kelipatan masa kerja 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) tahun.

Other long term employment benefits in the form of Long Service Awards every multiple 3 (three) and 6 (six) years of services.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lain ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini kewajiban.

Other long-term employee benefits are determined using the *Projected Unit Credit Method*. The other long-term employee benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the present value of the obligations.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK 212 "Pajak Penghasilan", PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 212 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan bunga kas di bank, deposito berjangka, obligasi dan dividen sebagai pos tersendiri.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Taxation

The Company applied SFAS 212 "Income Taxes", The revised SFAS prescribes the accounting treatment for income taxes.

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction suffered a loss.

Referring to revised SFAS 212 as mentioned above, final tax is no longer governed by SFAS 212. Therefore, the Company has decided to present all of the final tax arising from interest income of cash in banks, time deposits, bonds and dividend as separate line items.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates. Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. The Company also presented interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Company reassesses unrecognized deferred tax assets. The Company recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity. Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya.

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas. Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

t. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyelesaian), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir periode yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows. When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

t. Events After Reporting Period

Post period-end events that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan apabila aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan".

Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2f.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 28.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - sebagai penyewa

Perusahaan menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities if they meet the definition set forth in SFAS 109, "Financial instrument".

Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2f.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 28.

Lease term of contracts with renewal and termination options - as lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perusahaan memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Perusahaan mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Perusahaan menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 14.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap, termasuk tanaman produktif, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 6 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri pasar modal dan keuangan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

The Company has several lease contracts that include extension and termination options. The Company applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Company considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 14.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets, including bearer plants, are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 6 years, which are common life expectancies applied in the capital market industry.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap (lanjutan)

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Aset pajak tangguhan diungkapkan dalam Catatan 28.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui Penghasilan Komprehensif Lain dalam periode terjadinya.

Penjelasan lebih rinci atas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 29.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets (continued)

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details on fixed asset are disclosed in Note 13.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Deferred tax assets are disclosed in Note 28

Pension Plan and Employee Benefits

The measurement of the Company's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through Other Comprehensive Income the the period in which they occur.

Further details on employee benefits are disclosed in Note 29.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Apabila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diukur berdasarkan harga yang berlaku di pasar aktif, maka nilai wajarnya diukur dengan menggunakan teknik penilaian termasuk *Discounted Cash Flow*. Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diamati jika memungkinkan, namun jika hal ini tidak memungkinkan, tingkat penilaian diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Penilaian meliputi pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan volatilitas. Perubahan asumsi yang berkaitan dengan faktor-faktor ini dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan. Lihat Catatan 31 untuk pengungkapan lebih lanjut.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Perusahaan yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Perusahaan menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Fair value measurement of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be measured based on prices prevailing in active markets, their fair values are measured using valuation techniques including *Discounted Cash Flow*. Input for this model is drawn from observable markets where possible, but if this is not possible, a level of valuation is required in determining fair value. The assessment includes considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk, and volatility. Changes in the assumptions relating to these factors could affect the reported fair value of the financial instruments. See Note 31 for further disclosures.

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Company would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Company that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Kas	32.132.174	40.000.000	Cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.182.393.652	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	151.006.923	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	179.664.210	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	35.268.414	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	23.015.897	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	17.234.985	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	1.280.673.295	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	505.642.912	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	160.083.414	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	66.423.683	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	24.215.897	PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	17.884.985	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	52.762.622	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	22.200.041	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	72.588.156	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	22.450.003	PT Bank CIMB Niaga Tbk
	1.663.546.744	2.149.962.345	
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	238.066.225.708	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	265.993.000.000	-	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	218.038.299.559	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	304.569.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Usaha Syariah	256.921.000.000	85.624.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Business Unit
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	267.001.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	33.478.731.523	-	PT Bank SMBC Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	31.048.033.565	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	794.458.957.231	906.280.333.124	
Total kas dan setara kas	796.154.636.149	908.470.295.469	Total cash and cash equivalents

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kisaran tingkat bunga deposito berjangka per tahun:		
Rupiah		
Pihak berelasi	6,70% - 6,75%	-
Pihak ketiga	0,00% - 6,81%	4,75% - 7,25%
Dolar Amerika Serikat		
Pihak ketiga	4,25%	2,25%

*Interest rate range per annum
on time deposits:*
Rupiah
Related Parties
Third Parties
United Stated Dollar
Third Parties

5. INVESTASI

Rincian investasi terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:		
Obligasi		
Pihak berelasi		
Obligasi Korporasi	73.454.963.135	-
Sekuritas Rupiah		
Bank Indonesia (SRBI)	99.011.056.760	-
Pihak ketiga		
Surat Berharga Negara	472.944.217.997	292.365.958.445
Obligasi Korporasi	62.113.055.585	150.848.797.815
Total	707.550.293.477	443.214.756.260

*Investment measured at
fair value through
other comprehensive income:*
Bonds
Related Parties
Corporate Bonds
Bank Indonesia
Rupiah Securities (SRBI)
Third Parties
Government Bonds
Corporate Bonds
Total

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

a. Investments measured at fair value through other comprehensive income

Seri/Series	31 Desember/December 31, 2024			
	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0081	16.700.000.000	16.677.061.715	6,50%	15 Juni/June 15, 2025
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
SNI 0625	3.129.800.000	3.191.044.565	2,30%	23 Juni/June 23, 2025
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds				
PBS 036	10.824.000.000	10.715.760.000	5,38%	15 Agustus/August 15, 2025
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds				
PBS 017	15.000.000.000	14.883.552.600	6,13%	15 Oktober/October 15, 2025
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0086	528.000.000	518.911.246	5,50%	15 April/April 15, 2026
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds				
PBS032	20.000.000.000	19.364.428.200	4,88%	15 Juli/July 15, 2026
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
ORI 024T3	3.300.000.000	3.273.630.228	6,10%	15 Oktober/October 15, 2026
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds				
PBS 003	20.000.000.000	19.605.246.400	6,00%	15 Januari/January 15, 2027
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0090	48.127.000.000	46.280.893.520	5,13%	15 April/April 15, 2027
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0064	48.000.000.000	46.775.691.840	6,13%	15 Mei/May 15, 2028

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2024

Seri/Series	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds PBS 030	3.156.000.000	3.053.793.225	5,88%	15 Juli/July 15, 2028
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds FR 0095	48.000.000.000	47.068.668.960	6,38%	15 Agustus/August 15, 2028
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds PBSG 001	20.000.000.000	19.965.076.400	6,63%	15 September/September 15, 2029
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds RI 0230	3.129.800.000	2.893.440.315	2,85%	14 Februari/February 14, 2030
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0104	20.000.000.000	19.536.460.200	6,50%	15 Juli/July 15, 2030
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0087	20.374.000.000	19.852.572.905	6,50%	15 Februari/February 15, 2031
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0091	35.284.000.000	34.019.811.328	6,38%	15 April/April 15, 2032
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0065	50.000.000.000	48.667.081.500	6,63%	15 Mei/May 15, 2033
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0100	30.000.000.000	29.223.861.000	6,63%	15 Februari/February 15, 2034
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds PBS 029	17.647.000.000	17.203.177.950	6,38%	15 Maret/March 15, 2034
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0103	45.000.000.000	44.090.657.550	6,75%	15 Juli/July 15, 2035
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0045	5.000.000.000	6.083.396.350	9,75%	15 Mei/May 15, 2037
Subtotal	483.199.600.000	472.944.217.997		

31 Desember/December 31, 2024

Seri/Series	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Peringkat/ rating	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Obligasi Korporasi/ Corporate Bonds					
Pihak berelasi/related parties					
Berkelanjutan I Bank BRI tahap II Tahun 2023 Seri B	30.000.000.000	29.860.149.000	6,35%	idAAA ¹⁾	17 Oktober/October 17, 2025
Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia Tahun 2022 Seri B	3.500.000.000	3.479.732.970	6,85%	idAAA ¹⁾	21 Juni/June 21, 2027
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	4.500.000.000	4.415.519.115	6,45%	idAAA ¹⁾	20 Juli/July 20, 2027
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 Seri B	16.500.000.000	15.855.821.850	6,10%	idAAA ¹⁾	4 Juli/July 4, 2028
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B	20.000.000.000	19.843.740.200	5,75%	idAAA ¹⁾	16 Agustus/August 16, 2025
Subtotal	74.500.000.000	73.454.963.135			
Pihak ketiga/third parties					
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	2.958.025.350	5,35%	idAAA ¹⁾	26 April/April 26, 2025
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A	2.500.000.000	2.484.308.600	5,50%	idAAA ¹⁾	24 Mei/May 24, 2025
Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	3.000.000.000	2.992.418.820	7,00%	AA(idn) ¹⁾	8 Juli/July 8, 2025
Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II tahun 2022 Seri A	3.000.000.000	2.982.716.610	6,25%	idAA ¹⁾	15 Juli/July 15, 2025
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I tahun 2022 Seri B	10.000.000.000	9.926.086.400	5,75%	idAAA ¹⁾	5 Agustus/August 5, 2025

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

5. INVESTMENTS (continued)

a. Investments measured at fair value through other comprehensive income (continued)

31 Desember/December 31, 2024

Seri/Series	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Peringkat/ rating	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Obligasi Korporasi/ Corporate Bonds					
Pihak ketiga/third parties					
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	5.019.649.750	6,00%	AAA(idn)**)	9 Agustus/August 9, 2025
Obligasi Berwawasan Lingkungan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B	10.000.000.000	9.977.635.700	6,80%	idAAA*)	28 Oktober/October 28, 2025
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	3.000.000.000	2.936.679.090	6,00%	idAAA*)	17 November/November 17, 2026
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri C	13.000.000.000	13.309.497.630	8,65%	idAAA*)	18 November/November 18, 2026
Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	5.015.490.250	7,40%	AAA(idn)**)	1 September/September 1, 2027
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2024	4.540.000.000	4.510.547.385	6,70%	idAAA*)	6 Desember/December 6, 2027
Subtotal	62.040.000.000	62.113.055.585			
Total	136.540.000.000	135.568.018.720			

*) Peringkat berdasarkan PEFINDO
 **) Peringkat berdasarkan Fitch Ratings

The rating based on PEFINDO *)
 The rating based on Fitch Ratings **)

31 Desember/December 31, 2024

Seri/Series	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Jatuh Tempo/ Maturity Date
IDSR020125183S	5.000.000.000	4.997.115.500	2 Januari/January 2, 2025
IDSR241025364S	10.000.000.000	9.433.823.000	24 Oktober/October 24, 2025
IDSR311025364S	5.000.000.000	4.710.613.000	31 Oktober/October 31, 2025
IDSR211125364S	20.000.000.000	18.767.328.000	21 November/November 21, 2025
IDSR281125364S	15.400.000.000	14.431.677.260	28 November/November 28, 2025
IDSR191225364S	50.000.000.000	46.670.500.000	19 Desember/December 19, 2025
Subtotal	105.400.000.000	99.011.056.760	
Total	725.139.600.000	707.550.293.477	

31 Desember/December 31, 2023

Seri/Series	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0070	15.000.000.000	15.060.656.250	8,38%	15 Maret/March 15, 2024
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0077	15.000.000.000	15.096.535.650	8,13%	15 Mei/May 15, 2024
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0081	16.700.000.000	16.726.507.931	6,50%	15 Juni/June 15, 2025
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
SNI 0625	3.129.800.000	2.982.626.952	2,30%	23 Juni/June 23, 2025
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds				
PBS 036	10.824.000.000	10.637.682.700	5,38%	15 Agustus/August 15, 2025
Surat Berharga Syariah Negara / Government Sharia Bonds				
PBS 017	15.000.000.000	14.868.795.450	6,13%	15 Oktober/October 15, 2025
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0086	528.000.000	519.037.100	5,50%	15 April/April 15, 2026
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds				
PBS 003	10.000.000.000	9.849.254.300	6,00%	15 Januari/January 15, 2027
Surat Berharga Negara/ Government Bonds				
FR 0090	48.127.000.000	46.517.633.120	5,13%	15 April/April 15, 2027

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

5. INVESTMENTS (continued)

a. Investments measured at fair value through other comprehensive income (continued)

31 Desember/December 31, 2023

Seri/Series	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0064	48.000.000.000	47.453.040.000	6,13%	15 Mei/May 15, 2028
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds PBS 030	3.156.000.000	3.086.083.155	5,88%	15 Juli/July 15, 2028
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds FR 0095	48.000.000.000	47.913.120.000	6,38%	15 Agustus/August 15, 2028
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds RI 0230	3.129.800.000	2.803.507.503	2,85%	14 Februari/February 14, 2030
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0087	10.374.000.000	10.355.502.051	6,50%	15 Februari/February 15, 2031
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0091	25.284.000.000	25.060.457.835	6,38%	15 April/April 15, 2032
Surat Berharga Syariah Negara/ Government Sharia Bonds PBS 029	17.647.000.000	17.171.218.448	6,38%	15 Maret/March 15, 2034
Surat Berharga Negara/ Government Bonds FR 0045	5.000.000.000	6.264.300.000	9,75%	15 Mei/May 15, 2037
Subtotal	294.899.600.000	292.365.958.445		

31 Desember/December 31, 2023

Obligasi/Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Peringkat/ rating	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Obligasi Korporasi/ Corporate Bonds					
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019 Seri C	10.000.000.000	10.066.471.300	9,15%	idAAA ¹⁾	16 April/April 16, 2024
Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 Seri C	10.000.000.000	10.080.783.200	7,80%	idAAA ¹⁾	19 Desember/December 19, 2024
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	2.939.412.450	5,35%	idAAA ¹⁾	26 April/April 26, 2025
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A	2.500.000.000	2.439.453.300	5,50%	idAAA ¹⁾	24 Mei/May 24, 2025
Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Seri A	3.000.000.000	2.985.348.210	7,00%	AA(idn) ²⁾	8 Juli/July 8, 2025
Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II tahun 2022 Seri A	3.000.000.000	2.945.749.080	6,25%	idAA ¹⁾	15 Juli/July 15, 2025
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I tahun 2022 Seri B	10.000.000.000	9.815.860.300	5,75%	idAAA ¹⁾	5 Agustus/August 5, 2025
Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	4.926.159.100	6,00%	AAA(idn) ²⁾	9 Agustus/August 9, 2025
Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B	20.000.000.000	19.624.508.000	5,75%	idAAA ¹⁾	16 Agustus/August 16, 2025
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI tahap II Tahun 2023 Seri B	30.000.000.000	29.762.581.500	6,35%	idAAA ¹⁾	17 Oktober/October 17, 2025
Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B	10.000.000.000	9.967.608.900	6,80%	idAAA ¹⁾	28 Oktober/October 28, 2025
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigraya Finansial Tahap II Tahun 2021	3.000.000.000	2.918.139.180	6,00%	idAAA ¹⁾	17 November/November 17, 2026
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri C	13.000.000.000	13.624.177.970	8,65%	idAAA ¹⁾	18 November/November 18, 2026
Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) I PT Bank Negara Indonesia Tahun 2022 Seri B	3.500.000.000	3.444.971.390	6,85%	idAAA ¹⁾	21 Juni/June 21, 2027

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

5. INVESTMENTS (continued)

a. Investments measured at fair value through other comprehensive income (continued)

31 Desember/December 31, 2023					
Obligasi/Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Peringkat/ rating	Jatuh Tempo/ Maturity Date
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri C	4.500.000.000	4.418.415.945	6,45%	idAAA ^{*)}	20 Juli/July 20, 2027
Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 Seri B	5.000.000.000	5.046.990.550	7,40%	AAA(idn) ^{**)}	1 September/September 1, 2027
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023 Seri B	16.500.000.000	15.842.167.440	6,10%	idAAA ^{*)}	4 Juli/July 4, 2028
Subtotal	152.000.000.000	150.848.797.815			
Total	446.899.600.000	443.214.756.260			

^{*)} Peringkat berdasarkan PEFINDO
^{**)} Peringkat berdasarkan Fitch Ratings

The rating based on PEFINDO ^{*)}
The rating based on Fitch Ratings ^{**)}

Tidak ada penjualan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

There is no sales of investment measure at fair value through other comprehensive income financial assets for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

Kerugian/keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain masing-masing adalah kerugian sebesar Rp5.177.609.137 dan keuntungan sebesar Rp1.147.960.163 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Unrealized Loss/gain on fair value of through other comprehensive income financial assets are loss amounted to Rp5,177,609,137 and gain amounted to Rp1,147,960,163 for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar obligasi ditetapkan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI).

As of December 31, 2024 and 2023, the fair value of bonds were determined based on reference price from PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI).

Kualitas kredit untuk seluruh investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah *stage* 1.

Credit quality of all investments measured at fair value through other comprehensive income as of December 31, 2024 and 2023 are stage 1.

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat efek-efek pada pihak berelasi.

b. By relationship

As of December 31, 2024 and 2023, there were no marketable securities with related parties.

c. Cadangan kerugian penurunan nilai investasi

Cadangan atas penurunan nilai investasi tidak dibentuk karena manajemen berkeyakinan investasi akan tertagih seluruhnya.

c. Allowance for impairment of investment

The allowance for impairment of investment was not provided as management believes investment will be fully collectible.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

Piutang dan Utang Penyelesaian Transaksi Efek

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Piutang penyelesaian transaksi efek	1.671.150.505.200	1.982.087.120.800
Utang penyelesaian transaksi efek	(1.671.150.505.200)	(1.982.087.120.800)

Piutang dan utang kliring dan penyelesaian transaksi efek merupakan kewajiban pembayaran oleh/kepada anggota kliring sehubungan dengan transaksi efek yang terjadi pada T+0 (pada hari transaksi efek) sampai dengan T+2 (dua hari setelah tanggal transaksi efek).

6. SECURITIES TRANSACTIONS CLEARING AND SETTLEMENT

Securities Transactions Settlements Receivables and Payables

Securities transactions settlements receivables

Securities transactions settlements payables

Securities transaction settlement receivables and payables represent obligations from/to the clearing members arising from securities transactions which occurred on T+0 (on the day of securities transaction) until T+2 (two days after the securities transaction date).

7. DANA PENGAMAN

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Aset dana pengaman		
Deposito berjangka	1.876.449.594	1.171.140.632
Liabilitas dana pengaman		
Setoran anggota kliring	(1.876.449.594)	(1.171.140.632)

Dana pengaman merupakan agunan atas transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) yang ditempatkan dalam rekening giro atau ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama anggota kliring.

7. SECURITY FUNDS

*Security funds asset
Time deposits*

*Security funds liability
Clearing members' contribution*

The security funds represents deposits for Securities Index Futures Trading (KBIE) transactions which are placed in current accounts or in time deposits under the clearing member's name.

8. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha terdiri dari:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Pihak berelasi		
Jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan efek (Catatan 30b.i)	51.725.414.024	49.316.120.650
Jasa pengelolaan dan administrasi agunan	2.023.316.521	1.762.476.252
Jasa pengelolaan dana jaminan	44.537.045.360	34.458.290.310
Jasa kliring Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA)	1.943.012	-
Jasa CCP PUVA	187.545.625	-
Total	98.475.264.542	85.536.887.212

8. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables are as follows:

*Related party
Clearing and settlement guarantee services for the securities transaction (Note 30b.i)
Collateral management services and administration
Guarantee fund management services
Market Management Alternative clearing services
CCP PUVA services*

Total

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

8. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha berasal dari jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan efek, jasa kliring dan penjaminan transaksi perdagangan kontrak berjangka indeks efek kepada anggota kliring yang penagihannya dilakukan melalui PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dari jasa pengelolaan dana jaminan (Catatan 33a), dari jasa pengelolaan agunan, dari jasa kliring Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) atas efek bersifat utang, dan dari jasa usaha CCP PUVA (Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta Asing).

Seluruh piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing digolongkan sebagai Stage 1.

Perusahaan tidak membentuk pencadangan piutang karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut belum jatuh tempo dan dapat ditagih seluruhnya.

8. TRADE RECEIVABLES (continued)

Trade receivables are from clearing and settlement guarantee for securities, clearing and settlement guarantee for stock index future trading transactions with clearing members which were collected through PT Bursa Efek Indonesia (BEI) and from guarantee fund management services (Note 33a), from collateral management services, from market management alternative clearing services for debt securities, and from CCP PUVA (Central Counterparty for money market and foreign exchange) services.

All trade receivables as of December 31, 2024 and 2023 are classified as Stage 1.

No allowance for impairment loss was provided by the Company as the management believes that the trade receivables has not yet due and fully collectible.

9. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian piutang lain-lain terdiri dari:

9. OTHER RECEIVABLES

The details of other receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Aset Lancar			Current Assets
Bunga atas Surat Berharga Negara dan obligasi korporasi	9.095.210.958	5.581.194.688	Interest on government bonds and corporate bonds
Bunga atas deposito berjangka	1.217.488.954	2.107.433.352	Interest on time deposits
Pinjaman karyawan	1.403.643.908	998.145.333	Loans to employees
Lainnya	656.100.472	816.814.426	Others
	12.372.444.292	9.503.587.799	
Aset Tidak Lancar			Non-current Assets
Pinjaman karyawan	3.036.433.837	2.851.928.269	Loans to employees

Lainnya termasuk piutang dari Self-Regulatory Organization (SRO) masing-masing sebesar Rp297.471.976 dan Rp648.810.905 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 30b.iii).

Others included receivable from Self-Regulatory Organization (SRO) amounted to Rp297,471,976 and Rp648,810,905 for December 31, 2024 and 2023, respectively (Note 30b.iii).

Perusahaan tidak membentuk pencadangan piutang lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut belum jatuh tempo dan dapat ditagih seluruhnya.

No allowance for impairment loss was provided by the Company as the management believes that the other receivables has not yet due and fully collectible.

Termasuk dalam bunga atas surat berharga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah piutang bunga kepada pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp1.436.576.183 dan RpNihil (Catatan 30b.ix).

Included in the interest of government bonds and corporate bonds for the years ended December 31, 2024 and 2023 are interest receivable from related parties amounted to Rp1,436,576,183 and RpNil, respectively (Note 30b.ix).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Uang muka dan biaya dibayar dimuka Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah		
Bagian lancar		
Uang muka pajak		
PPH 29 (Catatan 28)		
Tahun 2024	8.891.852.801	-
Lisensi dan pemeliharaan		
teknologi informasi	19.029.117.257	8.263.246.434
Asuransi	3.268.497.214	2.024.165.422
Tunjangan kendaraan		
direksi (Catatan 30)	700.000.000	700.000.000
Uang muka operasional dan lainnya	513.655.319	25.779.557.306
Total bagian lancar	32.403.122.591	36.766.969.162
Bagian tidak lancar		
Uang muka pajak		
PPH 29 (Catatan 28)		
Tahun 2023	-	8.891.853.055
Tunjangan kendaraan		
direksi (Catatan 30)	350.000.000	1.050.000.000
Pemeliharaan dan Lisensi TI	-	7.388.889
Total bagian tidak lancar	350.000.000	9.949.241.944
Total	32.753.122.591	46.716.211.106

10. ADVANCE AND PREPAID EXPENSES

The advance and prepaid expenses by the Company are as follows:

Rupiah	
Current portion	
Prepaid tax	
article 29 (Note 28)	
Year 2024	
Information technology	
license and maintenance	
Insurance	
Vehicle allowance	
for directors (Note 30)	
Operational and other advances	
Total current portion	
Non-current portion	
Prepaid tax	
article 29 (Note 28)	
Year 2023	
Vehicle allowance	
for directors (Note 30)	
Total non-current portion	
Total	

11. DANA DISISIHKAN SEBAGAI CADANGAN

Dana disisihkan sebagai cadangan terdiri dari dana disisihkan sebagai cadangan jaminan dan cadangan Skin In The Game CCP PUVA, dana disisihkan sebagai cadangan tersebut diinvestasikan Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah		
Cadangan jaminan		
Pihak berelasi		
Kas		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	1.881.028	-
Deposito berjangka		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	199.433.307.089	-
Pihak ketiga		
Kas		
PT Bank Tabungan Negara		
(Persero) Tbk	2.321.000	996.000
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	-	2.489.375
Deposito berjangka		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	-	194.134.231.582
Sub Total	199.437.509.117	194.137.716.957

11. RESERVE FOR GUARANTEE

The allocated funds for guarantee consists of reserve for guarantee fund and reserve for Skin In The Game CCP PUVA, these allocated funds are invested by the Company in time deposits are as follows:

Rupiah	
Guarantee fund	
Related parties	
Cash	
PT Bank Rakyat Indonesia	
(Persero) Tbk	
Time deposits	
PT Bank Rakyat Indonesia	
(Persero) Tbk	
Third parties	
Cash	
PT Bank Tabungan Negara	
(Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia	
(Persero) Tbk	
Time deposits	
PT Bank Rakyat Indonesia	
(Persero) Tbk	
Sub Total	

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. DANA DISISIHKAN SEBAGAI CADANGAN (lanjutan)

Dana disisihkan sebagai cadangan terdiri dari dana disisihkan sebagai cadangan jaminan dan cadangan Skin In The Game CCP PUVA, dana disisihkan sebagai cadangan tersebut diinvestasikan Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024
Cadangan Skin In The Game CCP PUVA	
Pihak berelasi	
Deposito berjangka	
PT Bank Rakyat Indonesia	
(Persero) Tbk	200.000.000.000
Sub Total	200.000.000.000
Total	399.437.509.117

Kisaran tingkat bunga deposito berjangka per tahun:
Rupiah 6,70% - 6,71%

Jumlah dana yang disisihkan untuk cadangan jaminan sama dengan jumlah yang disetujui di Rapat Umum Pemegang Saham (Catatan 21a).

11. RESERVE FOR GUARANTEE (continued)

The allocated funds for guarantee consists of reserve for guarantee fund and reserve for Skin In The Game CCP PUVA, these allocated funds are invested by the Company in time deposits are as follows: (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	
Reserve for Skin In The Game CCP PUVA		
Related parties		
Time deposits		
PT Bank Rakyat Indonesia		
(Persero) Tbk	-	
Sub Total	-	Sub Total
Total	194.137.716.957	Total

Interest rate range per annum on time deposits:
Rupiah 6,80% - 7,00%

The amount of allocated funds for guarantee fund is equal to the amount approved by Annual Shareholder Meetings (Note 21a).

12. INVESTASI DI SAHAM

Investasi di saham merupakan investasi pada entitas lain, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Investasi asosiasi -	
Metode ekuitas	
PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI)	163.988.270.644
PT Penyelenggara Program Perlindungan	
Investor Efek Indonesia (PPPIEI)	71.829.928.145
PT IDX Solusi Teknologi Informasi (ISTI)	31.795.525.741
PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)	8.902.189.674
PT Indonesian Capital Market Electronic	
Library (I-CAMEL)	5.399.922.130
	281.915.836.334
Aset keuangan pada nilai wajar	
melalui penghasilan komprehensif lain	
PT Kustodian Sentral	
Efek Indonesia (KSEI)	62.410.450.781
PT Tivi Bursa Indonesia (TIVI)	4.118.001.343
	66.528.452.124
	348.444.288.458

12. INVESTMENT IN SHARES

Investments in shares represents investment in other entities, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Associates -		
Equity method		
PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI)	171.467.518.963	
PT Penyelenggara Program Perlindungan		
Investor Efek Indonesia (PPPIEI)	71.880.831.125	
PT IDX Solusi Teknologi Informasi (ISTI)	37.915.181.249	
PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)	7.330.189.475	
PT Indonesian Capital Market Electronic		
Library (I-CAMEL)	5.169.501.463	
	293.763.222.275	
Financial asset at fair value through		
other comprehensive income		
PT Kustodian Sentral		
Efek Indonesia (KSEI)	62.410.450.781	
PT Tivi Bursa Indonesia (TIVI)	6.000.000.000	
	68.410.450.781	
	362.173.673.056	

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI DI SAHAM (lanjutan)

Nilai wajar kepemilikan 15% saham PT Tivi Busa Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah dinilai oleh Penilai Independen. Metode penilaian yang digunakan menggunakan *discounted cash flow* (DCF) dan pendekatan pasar dengan metode Pembanding Perusahaan Terbuka (GPTCM). Tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas untuk modal (*free cash flow to firm* atau FCFF) adalah WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) sebesar 11,21% (2023: 15,05%), termasuk didalamnya penggunaan *Discount Lack of Control* dan *Discount for Lack of Marketability* masing-masing sebesar 40% dan 30% sebagai kepemilikan non pengendali.

12. INVESTMENT IN SHARES (continued)

The fair value of 15% shares ownership of PT Tivi Bursa Indonesia as of December 31, 2024 and 2023 has been internally Independent Appraiser valued. The valuation method used was the discounted cash flow (DCF) method and the market approach using the Public Company Comparator method (GPTCM). The discount rate used for discounted cash flow to capital (*free cash flow to the entity* or FCFF) was WACC (*Weighted Average Cost of Capital*) of 11.21% (2023: 15.05%) including the *Discount Lack of Control* and *Discount for Lack of Marketability* of 40% and 30%, respectively, as non-controlling ownership.

Investasi pada entitas lain/ <i>Investment in other entities</i>	Kegiatan usaha utama/ <i>Principal business activity</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	
			31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)	Jasa pengolahan dan penyediaan data efek/ <i>Processes and provides securities data</i>	Jakarta	33,33%	33,33%
PT Indonesian Capital Market Electronic Library (I-CAMEL)	Jasa informasi dan edukasi pasar modal/ <i>Education and information on capital market</i>	Jakarta	33,33%	33,33%
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI)	Mengelola dana perlindungan aset pemodal di pasar modal/ <i>Manages investors protection fund in capital market</i>	Jakarta	33,33%	33,33%
PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI)	Jasa pendanaan/ <i>Financing services</i>	Jakarta	29,97%	29,97%
PT IDX Solusi Teknologi Informasi (ISTI)	Jasa pengadaan teknologi informasi/ <i>Technology procurement services</i>	Jakarta	33,33%	33,33%
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi/ <i>Central custodian services and transaction settlement</i>	Jakarta	12,50%	12,50%
PT Tivi Bursa Indonesia	Jasa penyiaran pasar modal/ <i>Capital market broadcasting</i>	Jakarta	15,00%	15,00%

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates using equity method are as follows:

31 Desember/December 31, 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi/ Share in profit (loss) of associates	Bagian atas penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi/ Share in other comprehensive income of associates	Saldo akhir/ Ending balance
PHEI	7.330.189.475	-	1.471.968.137	100.032.062	8.902.189.674
I-CAMEL	5.169.501.463	1.600.000.000	(1.317.111.460)	(52.467.673)	5.399.922.130
PPPIEI	71.880.831.125	-	1.109.141.699	(1.160.044.679)	71.829.928.145
PEI	171.467.518.963	-	(7.575.087.682)	95.839.363	163.988.270.644
ISTI	37.915.181.249	-	(6.108.543.663)	(11.111.845)	31.795.525.741
Total	293.763.222.275	1.600.000.000	(12.419.632.969)	(1.027.752.972)	281.915.836.334

31 Desember/December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi/ Share in profit (loss) of associates	Bagian atas penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi/ Share in other comprehensive income of associates	Saldo akhir/ Ending balance
PHEI	6.530.052.699	-	811.947.795	(11.811.019)	7.330.189.475
I-CAMEL	7.034.949.952	-	(1.854.639.847)	(10.808.642)	5.169.501.463
PPPIEI	71.980.089.865	-	1.085.464.743	(1.184.723.483)	71.880.831.125
PEI	168.194.820.927	-	3.272.698.036	-	171.467.518.963
ISTI	37.754.291.353	-	124.669.091	36.220.805	37.915.181.249
Total	291.494.204.796	-	3.440.139.818	(1.171.122.339)	293.763.222.275

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI DI SAHAM (lanjutan)

Pada 12 Desember 2023 berdasarkan surat No. S-0404/TICMI/12-2023, 3 (tiga) *Self-Regulatory Organization* (SRO) telah melakukan penyetoran tambahan modal ke I-CAMEL sejumlah Rp4.800.000.000 dengan rincian BEI, KPEI dan KSEI masing-masing sebesar Rp1.600.000.000. Tambahan modal disetor tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0054274 tanggal 5 Maret 2024.

Pada 23 Oktober 2024 berdasarkan surat No. S-0231/TICMI/10-2024, 3 (tiga) *Self-Regulatory Organization* (SRO) telah melakukan penyetoran tambahan modal ke I-CAMEL sejumlah Rp3.900.000.000 dengan rincian BEI, KPEI dan KSEI masing-masing sebesar Rp1.300.000.000. Tambahan modal disetor tersebut masih menunggu disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dicatat sebagai uang muka pada entitas asosiasi (Catatan 30b.vii).

Berdasarkan surat No. S-066/PEI.DIR/06-2024, dinyatakan bahwa sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) tertanggal 12 Juni 2024, Perusahaan menerima pendapatan dividen setelah pajak dari PEI sebesar Rp379.564.383.

Berdasarkan surat No. S-090/PEI.DIR/06-2023, dinyatakan bahwa sesuai putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) tertanggal 12 Mei 2023, Perusahaan menerima pendapatan dividen setelah pajak dari PEI sebesar Rp254.721.735.

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES (continued)

Based on letter No. S-0404/TICMI/12-2023, on December 12, 2023, 3 (three) *Self-Regulatory Organizations* (SRO) have subscribed and fully paid a capital injection into I-CAMEL amounted to Rp4,800,000,000 where BEI, KPEI and KSEI's injection amounted to Rp1,600,000,000 each. This additional paid-in-capital to I-CAMEL has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0054274 dated March 5, 2024.

On October 23, 2024, 3 (three) *Self-Regulatory Organizations* (SRO) have subscribed and fully paid a capital injection into I-CAMEL amounted to Rp3,900,000,000 where BEI, KPEI and KSEI's injection amounted to Rp1,300,000,000 each. This additional paid-in-capital to I-CAMEL has not yet approved by the Ministry of Law and Human Rights and currently recorded as advance payment for associated entity (Note 30b.vii).

According to letter No. S-066/PEI.DIR/06-2024, it was stated in accordance with the decision of Annual Shareholder Meeting (AGM) of PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) dated at June 12, 2024, the Company has received a dividend income net after tax from PEI amounted to Rp379,564,383.

According to letter No. S-090/PEI.DIR/06-2023, it was stated in accordance with the decision of Annual Shareholder Meeting (AGM) of PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) dated at May 12, 2023, the Company has received a dividend income net after tax from PEI amounted to Rp254,721,735.

Summarized financial information in respect of associates is set out below:

31 Desember/December 31, 2024						
	PHEI	I-CAMEL	PPPEI	PEI	ISTI	
Aset lancar	29.739.769.182	6.633.974.159	61.410.019.623	549.748.349.957	47.942.563.374	Current assets
Aset tidak lancar	4.232.829.470	23.610.062.936	161.281.778.535	28.754.152.364	88.620.166.051	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	4.578.490.885	4.489.381.004	6.330.099.583	17.500.215.994	34.914.542.485	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	2.684.867.822	5.652.879.523	850.363.005	13.827.542.771	6.252.070.109	Non-current liabilities
Pendapatan	32.503.684.740	21.096.908.735	20.783.818.231	57.754.857.162	115.991.694.632	Revenue
Laba (rugi) tahun berjalan	4.416.346.046	(3.950.859.465)	3.461.113.104	(23.785.590.087)	(17.779.657.539)	Profit (loss) for the year
Total penghasilan komprehensif lain	300.126.197	(157.419.362)	(3.480.482.086)	319.784.326	(33.338.868)	Total other comprehensive income
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	4.716.472.243	(4.108.278.827)	(19.368.982)	(23.465.805.761)	(17.812.996.407)	Total comprehensive income (loss) for the year
31 Desember/December 31, 2023						
	PHEI	I-CAMEL	PPPEI	PEI	ISTI	
Aset lancar	26.392.140.684	5.622.224.381	62.596.990.283	612.703.253.573	43.741.100.085	Current assets
Aset tidak lancar	1.636.150.656	17.425.436.386	157.664.115.971	8.649.046.436	97.366.987.290	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	4.332.369.247	7.057.355.745	4.597.046.472	43.015.756.977	23.734.807.047	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	1.703.154.391	480.249.626	-	6.206.015.960	3.616.360.890	Non-current liabilities
Pendapatan	28.948.867.750	18.762.587.903	19.626.068.374	59.532.752.453	109.851.084.497	Revenue
Laba (rugi) tahun berjalan	2.436.086.995	(5.564.475.987)	3.256.719.903	12.219.252.764	374.044.675	Profit (loss) for the year
Total penghasilan komprehensif lain	(35.436.602)	(32.429.169)	(3.554.525.902)	-	108.673.285	Total other comprehensive income
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	2.400.650.393	(5.596.905.156)	(297.805.999)	12.219.252.764	482.717.960	Total comprehensive income (loss) for the year

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. INVESTASI DI SAHAM (lanjutan)

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas terhadap jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan; adalah sebagai berikut:

12. INVESTMENT IN SHARES (continued)

Reconciliation of the above summarized financial information to the carrying amount of the interest in the associates recognized in the financial statements; is as follow:

31 Desember/December 31, 2024						
	PHEI	I-CAMEL	PPPIEI	PEI	ISTI	
Aset bersih entitas asosiasi	26.709.239.945	20.101.776.568	215.511.335.570	547.174.743.556	95.396.116.831	Net assets of the associate
Proporsi bagian kepemilikan Perusahaan	33,33%	33,33%	33,33%	29,97%	33,33%	Proportion of the Company's ownership interest
Nilai tercatat	8.902.189.674	6.699.922.130	71.829.928.145	163.988.270.644	31.795.525.741	Carrying amount
31 Desember/December 31, 2023						
	PHEI	I-CAMEL	PPPIEI	PEI	ISTI	
Aset bersih entitas asosiasi	21.992.767.702	15.510.055.396	215.664.059.782	572.130.527.072	113.756.919.438	Net assets of the associate
Proporsi bagian kepemilikan Perusahaan	33,33%	33,33%	33,33%	29,97%	33,33%	Proportion of the Company's ownership interest
Nilai tercatat	7.330.189.475	5.169.501.463	71.880.831.125	171.467.518.963	37.915.181.249	Carrying amount

13. ASET TETAP

Rincian aset tetap terdiri dari:

13. FIXED ASSETS

The details of fixed assets are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2024	
Biaya perolehan						At cost
Peralatan dan sistem komputer	515.927.824.526	1.201.917.432	-	42.796.212.809	559.925.954.767	Computer hardware and system
Renovasi	17.913.403.500	-	-	-	17.913.403.500	Leasehold improvements
Peralatan dan perabotan kantor	4.322.974.897	38.000.000	-	-	4.360.974.897	Furniture and fixtures
Kendaraan	1.321.030.000	-	(376.950.000)	-	944.080.000	Vehicles
Sistem utama	156.838.985.715	-	-	30.408.425.975	187.247.411.690	Main system
Aset tetap dalam penyelesaian	48.562.672.265	67.772.216.377	(1.746.725.000)	(73.204.638.784)	41.383.524.818	Construction in progress
	744.886.890.903	69.012.133.769	(2.123.675.000)	-	811.775.349.672	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Peralatan dan sistem komputer	434.072.821.223	43.423.095.565	-	-	477.495.916.788	Computer hardware and system
Renovasi	1.492.783.615	4.478.350.875	-	-	5.971.134.490	Leasehold improvements
Peralatan dan perabotan kantor	1.076.711.213	1.084.702.052	-	-	2.161.413.265	Furniture and fixtures
Kendaraan	1.276.950.468	15.557.500	(376.950.000)	-	915.557.968	Vehicles
Sistem utama	32.891.750.120	29.321.321.542	-	-	62.213.071.662	Main system
	470.811.016.639	78.323.027.534	(376.950.000)	-	548.757.094.173	
Nilai Tercatat	274.075.874.264				263.018.255.499	Carrying Value
	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 31, 2023	
Biaya perolehan						At cost
Peralatan dan sistem komputer	482.276.177.118	3.495.722.750	(1.299.261.289)	31.455.185.947	515.927.824.526	Computer hardware and system
Renovasi	16.079.030.372	668.334.500	(12.077.730.372)	13.243.789.000	17.913.403.500	Leasehold improvements
Peralatan dan perabotan kantor	558.025.628	425.000.000	(753.648.028)	4.093.597.297	4.322.974.897	Furniture and fixtures
Kendaraan	1.321.030.000	-	-	-	1.321.030.000	Vehicles
Sistem utama	97.515.633.765	4.056.660.250	(774.274.741)	56.040.966.441	156.838.985.715	Main system
Aset tetap dalam penyelesaian	66.665.758.600	86.730.432.350	-	(104.833.518.685)	48.562.672.265	Construction in progress
	664.415.655.483	95.376.149.850	(14.904.914.430)	-	744.886.890.903	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Peralatan dan sistem komputer	391.163.066.280	43.344.737.167	(434.982.224)	-	434.072.821.223	Computer hardware and system
Renovasi	11.713.195.333	1.623.768.167	(11.844.179.885)	-	1.492.783.615	Leasehold improvements
Peralatan dan perabotan kantor	558.025.628	1.076.711.202	(558.025.617)	-	1.076.711.213	Furniture and fixtures
Kendaraan	1.261.392.968	15.557.500	-	-	1.276.950.468	Vehicles
Sistem utama	11.221.242.647	22.057.644.843	(387.137.370)	-	32.891.750.120	Main system
	415.916.922.856	68.118.418.879	(13.224.325.096)	-	470.811.016.639	
Nilai Tercatat	248.498.732.627				274.075.874.264	Carrying Value

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan biaya pengembangan sistem jasa kliring dan penjaminan dengan tingkat penyelesaian masing-masing sebesar 80% pada 31 Desember 2024, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2025. Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap dalam penyelesaian merupakan biaya pengembangan sistem jasa kliring dan penjaminan dengan tingkat penyelesaian masing-masing sebesar 82%, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan melakukan pelepasan aset tetap sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya perolehan	376.950.000	14.904.914.430
Akumulasi penyusutan	376.950.000	(13.224.325.096)
Kerugian pelepasan aset tetap	-	1.680.589.334

Construction in progress represents development costs of clearing and guarantee services system with degree of completion of 80% as of December 31, 2024 respectively, which are estimated to be completed at year 2025. As of December 31, 2024, Construction in progress represents development costs of clearing and guarantee services system with degree of completion of 82% which are estimated to be completed in 2024 (unaudited).

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has disposed fixed assets as follows:

Cost
Accumulated depreciation

Loss on disposal of fixed assets

Pengurangan aset tetap yang merupakan penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

Deduction of fixed assets related to assets disposal are as follows:

	31 Desember/December 31		
	2024	2023	
Hasil penjualan aset tetap	126.283.786	-	Proceeds from sale of fixed assets
Nilai buku	-	-	Book value
Keuntungan penjualan aset tetap	126.283.786	-	Gain on sale of fixed assets

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of fixed assets as of reporting date.

Beban penyusutan adalah Rp78.323.027.534 dan Rp68.118.418.879 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Depreciation expenses was amounted to Rp78,323,027,534 and Rp68,118,418,879 for the year ended December 31, 2024, and 2023, respectively.

Nilai perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh, namun masih digunakan oleh Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp393.687.631.631 dan Rp359.311.654.455 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The acquisition value of fixed assets that have been fully depreciated but still in used by the Company as of December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp393,687,631,631 and Rp359,311,654,455, respectively.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap telah diasuransikan kepada PT AIG Insurance Indonesia, PT Malacca Trust Wuwungan, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, dan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dengan perincian sebagai berikut:

	Nilai pertanggungan/ Insurance coverage
Seluruh risiko dan gempa bumi	
Kerusakan material	21.614.082.089
Peralatan elektronik	166.202.863.749
Perlindungan kriminalitas	70.000.000.000
Kendaraan	1.090.515.000

Jatuh tempo/ Expiration date
31 Desember/December 31, 2025
31 Desember/December 31, 2025
31 Desember/December 31, 2025
29 Juli/July 29, 2025
30 September/September 30, 2025
22 November/November 25, 2025

Property all risk and earthquake
Material damage
Electronic equipment
Comprehensive crime
Motor vehicles

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset tetap telah diasuransikan kepada PT AIG Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Malacca Trust Wuwungan dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

	Nilai pertanggungan/ Insurance coverage
Seluruh risiko dan gempa bumi	
Kerusakan material	32.9074.553.500
Peralatan elektronik	73.709.206.877
Perlindungan kriminalitas	70.000.000.000
Kendaraan	1.090.515.000

Jatuh tempo/ Expiration date
31 Desember/December 31, 2024
31 Desember/December 31, 2024
31 Desember/December 31, 2024
29 Juli/July 29, 2025
29 Juli/July 29, 2025
22 November/November 25, 2025

Property all risk and earthquake
Material damage
Electronic equipment
Comprehensive crime
Motor vehicles

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As of December 31, 2024, fixed assets were insured with PT AIG Insurance Indonesia, PT Malacca Trust Wuwungan, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, and PT Asuransi Dayin Mitra Tbk with details as follows:

As of December 31, 2023, fixed assets were insured with PT AIG Insurance Indonesia, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Malacca Trust Wuwungan, and PT Asuransi Allianz Utama Indonesia with details as follows:

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

14. ASET HAK GUNA

Rincian aset hak guna terdiri dari:

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2024
Biaya perolehan				
Sewa ruangan kantor	77.762.018.579	27.392.994.727	-	105.155.013.306
Sewa peralatan kantor	1.292.168.997	-	-	1.292.168.997
	79.054.187.576	27.392.994.727	-	106.447.182.303
Akumulasi penyusutan				
Sewa ruangan kantor	(46.658.451.804)	(15.046.500.629)	-	(61.704.952.433)
Sewa peralatan kantor	(1.107.573.426)	(184.595.571)	-	(1.292.168.997)
	(47.766.025.230)	(15.231.096.200)	-	(62.997.121.430)
Nilai Tercatat	31.288.162.346			43.450.060.873

14. RIGHT OF USE ASSETS

The details of right of use assets are as follows:

	At cost
Rental office space	
Rental fixtures	
Accumulated depreciation	
Rental office space	
Rental fixtures	
Carrying Value	

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET HAK GUNA (lanjutan)

14. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2023	
Biaya perolehan					At cost
Sewa ruangan kantor	76.305.454.139	1.456.564.440	-	77.762.018.579	Rental office space
Sewa peralatan kantor	1.292.168.997	-	-	1.292.168.997	Rental fixtures
	77.597.623.136	1.456.564.440	-	79.054.187.576	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Sewa ruangan kantor	(31.183.840.033)	(15.474.611.771)	-	(46.658.451.804)	Rental office space
Sewa peralatan kantor	(830.680.069)	(276.893.357)	-	(1.107.573.426)	Rental fixtures
	(32.014.520.102)	(15.751.505.128)	-	(47.766.025.230)	
Nilai Tercatat	45.583.103.034			31.288.162.346	Carrying Value

Tabel berikut menyajikan jumlah aset hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi:

The following table are shows the right of use assets which presented in statement of profit and loss:

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/ For the Year Ended December 31, 2024				
	Beban penyusutan/ Depreciation expenses	Beban bunga/ Interest expenses	Total	
Sewa ruangan kantor	15.046.500.629	2.640.930.051	17.687.430.680	Rental office space
Sewa peralatan kantor	184.595.571	4.798.139	189.393.710	Rental fixtures
Total	15.231.096.200	2.645.728.190	17.876.824.390	Total

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ For the Year Ended December 31, 2023				
	Beban penyusutan/ Depreciation expenses	Beban bunga/ Interest expenses	Total	
Sewa ruangan kantor	15.474.611.771	3.270.978.370	18.745.590.141	Rental office space
Sewa peralatan kantor	276.893.357	26.932.259	303.825.616	Rental fixtures
Total	15.751.505.128	3.297.910.629	19.049.415.757	Total

Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

The average lease term is 5 (five) years.

Perusahaan juga memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah. Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan pada sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

The Company also has certain leases with leases of 12 months or less and leases of low value assets. The Company applies recognition exemptions to short-term and low-value leases for these leases.

15. ASET LAIN-LAIN

15. OTHER ASSETS

Rincian aset lain-lain terdiri dari:

The details of other assets are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Dana kliring anggota kliring tidak aktif (Catatan 17)	4.627.386.735	4.414.891.233	Clearing fund of inactive clearing members (Note 17)
Uang jaminan	3.743.545.360	2.847.263.845	Security deposits
Total	8.370.932.095	7.262.155.078	Total

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Sesuai dengan Surat No. S-2324/PM/1997 tanggal 6 Oktober 1997, Bapepam-LK menyetujui Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kliring, penyelesaian pembayaran, pengelolaan dana kliring serta pengendalian risiko. Perusahaan menerima dan mengelola dana kliring sebesar 2% dari modal disetor anggota kliring. Hasil pengelolaan atas setoran tersebut diakumulasikan sebagai bagian dari dana kliring.

Dana kliring anggota kliring tidak aktif merupakan dana kliring yang belum dapat dikembalikan Perusahaan karena anggota kliring tidak aktif. Sampai dengan 31 Desember 2024, dana tersebut belum ditentukan penggunaannya oleh Perusahaan. Liabilitas dana kliring anggota kliring tidak aktif dicatat dalam akun utang lain-lain (Catatan 17).

15. OTHER ASSETS (continued)

Based on Bapepam-LK approval No. S-2324/PM/1997 dated October 6, 1997, the Company performs clearing, settlement, clearing fund management and risk management activities. In relation to these activities, the Company receives and manages a clearing fund equivalent to 2% of the clearing members' paid-up capital. The return from investing the fund is accumulated as part of the clearing fund.

Clearing fund of inactive clearing members represents the clearing fund which can not be returned by the Company due to inactive clearing members. Until December 31, 2024, the use of this fund has not been decided by the Company. The clearing fund liabilities to inactive clearing members are presented as other payables (Note 17).

16. UTANG PAJAK

Rincian utang pajak terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	246.228.076	48.025.354	Article 4(2)
Pasal 21	418.759.633	10.971.802.830	Article 21
Pasal 23	380.291.064	189.498.660	Article 23
Pasal 29	11.848.177.779	-	Article 29
Pajak pertambahan nilai - neto	5.029.309.607	6.772.180.129	Value added tax - net
Total	17.922.766.159	17.981.506.973	Total

16. TAXES PAYABLE

The details of taxes payable are as follows:

17. UTANG LAIN-LAIN

Rincian utang lain-lain terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pembelian aset tetap	31.878.500.497	41.745.250.356	Purchase of fixed assets
Dana kliring anggota kliring tidak aktif (Catatan 15)	4.627.386.734	4.414.891.233	Clearing fund of inactive clearing members (Note 15)
Titipan saham	855.565.867	855.565.867	Share deposit
Pembelian lainnya	6.037.664.192	538.651.435	Purchase of other
Pemeliharaan dan lisensi perangkat lunak	2.743.924.200	271.129.325	Software license and maintenance
Lainnya	306.048.011	296.827.812	Others
Total	46.449.089.501	48.122.316.028	Total

17. OTHER PAYABLES

The details of other payable are as follows:

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. BEBAN AKRUAL

Rincian beban akrual terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2024
Personalia	56.914.796.813
Pemeliharaan teknologi informasi	12.005.154.032
Biaya kontribusi tahunan	13.858.262.766
Pengembangan pasar modal (Catatan 30b.iii)	3.387.178.481
Keperluan kantor	3.535.792.361
Biaya konsultan	4.099.534.697
Total	93.800.719.150

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggantikan Surat Keputusan Ketua Bapepam - LK No. KEP-181/BL/2007, Perusahaan diharuskan untuk membayar iuran tahunan ke OJK dengan tarif 15% dari pendapatan usaha. Jumlah biaya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp87.987.636.546 dan Rp74.129.373.782.

18. ACCRUED EXPENSES

The details of accrued expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Personnel	47.710.548.913	Personnel
Information technology maintenance	17.562.201.084	Information technology maintenance
Annual contribution	-	Annual contribution
Capital market development (Note 30b.iii)	13.948.502.362	Capital market development (Note 30b.iii)
Office supplies	6.206.415.058	Office supplies
Consultant fees	2.071.814.747	Consultant fees
Total	87.499.482.164	Total

Based on Government Regulation No. 11 Year 2014 on levies by the Financial Service Authority (FSA) which replaces Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-181/BL/2007, the Company is required to pay an annual fee at the rate 15% of the operating revenue. Total contribution for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp87,987,636,546 and Rp74,129,373,782, respectively.

19. LIABILITAS SEWA

Rincian liabilitas sewa terdiri dari:

	1 Januari/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Beban bunga/ Interest expenses	Pembayaran/ Payments	31 Desember/ December 31, 2024	
Aset pendasar						Underlying assets
Bangunan	37.870.513.488	27.371.937.919	2.645.728.190	(23.036.934.540)	44.851.245.057	Property
Peralatan kantor	208.300.441	-	-	(208.300.441)	-	Fixtures
Jumlah	38.078.813.929	27.371.937.919	2.645.728.190	(23.245.234.981)	44.851.245.057	Total
	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Beban bunga/ Interest expenses	Pembayaran/ Payments	31 Desember/ December 31, 2023	
Aset pendasar						Underlying assets
Bangunan	49.273.817.201	1.456.564.440	3.270.978.370	(16.130.846.523)	37.870.513.488	Property
Peralatan kantor	501.016.057	-	26.932.259	(319.647.875)	208.300.441	Fixtures
Jumlah	49.774.833.258	1.456.564.440	3.297.910.629	(16.450.494.398)	38.078.813.929	Total

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024
Dalam 12 bulan mendatang	11.459.572.831
2 tahun	8.553.789.179
3 tahun	4.253.032.795
4 tahun	20.584.850.252
Pembayaran sewa	44.851.245.057

Per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, liabilitas sewa dikurangi porsi jangka pendek terdiri dari sewa bagian jangka panjang masing-masing sebesar Rp33.391.672.226 dan Rp19.773.328.826.

19. LEASE LIABILITIES

The details of lease liabilities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Within the next 12 months	18.305.485.103	Within the next 12 months
2 years	11.269.277.868	2 years
3 years	6.543.772.998	3 years
4 years	1.960.277.960	4 years
Lease payments	38.078.813.929	Lease payments

The analysis of the maturities related to leases is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	
Within the next 12 months	18.305.485.103	Within the next 12 months
2 years	11.269.277.868	2 years
3 years	6.543.772.998	3 years
4 years	1.960.277.960	4 years
Lease payments	38.078.813.929	Lease payments

As of December 31, 2024 and 2023, lease liabilities net of current portion consists of lease liabilities from non current portion amounted to Rp33,391,672,226 and Rp19,773,328,826, respectively.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 26 September 2024, disahkan oleh notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 05 tertanggal 26 September 2024, pemegang saham menyetujui perubahan struktur permodalan perseroan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 26 September 2024, disahkan oleh notaris Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Salinan Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 05 tertanggal 26 September 2024, pemegang saham menyetujui perubahan struktur permodalan perseroan. Sehubungan dengan pembentukan *Central Counter Party* (CCP) Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA), terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp200.000.000.000 dengan klasifikasi saham seri B yang berasal dari Bank Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Danamon Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dengan demikian, jumlah modal disetor perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.800.000.000.000 dan Rp1.600.000.000.000.

Modal saham yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

20. SHARE CAPITAL

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on September 26, 2024, ratified by notary Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M.Kn., Copy of GMS Decision Statement Number 5 dated September 26, 2024, shareholders approved changes to the company's capital structure.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on September 26, 2024, ratified by notary Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., M. Kn., Copy of GMS Decision Statement Number 05 dated September 26, 2024, shareholders approved changes to the company's capital structure In connection with the formation of the Central Counter Party (CCP) Money Market and Foreign Exchange (PUVA), there is an additional paid-in capital of IDR200,000,000,000 with a classification of series B shares originating from Bank Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Danamon Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tk and PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Thus, the amount of paid-up capital of the company for the years ended 31 December 2024 and 2023 is Rp1,800,000,000,000 and Rp1,600,000,000,000, respectively.

Share capital as of December 31, 2024 and 2023 consist of:

26 September/September 26, 2024 – 31 Desember/December 31, 2024

Nama Pemegang Saham	Klasifikasi saham/ Classification of share	Jumlah saham/ Number of share ownership	Persentase pemilikan/ Percentage of capital	Total modal disetor/ Total paid-up	Name of Shareholder
PT Bursa Efek Indonesia	Seri A1	173.980	77,32%	1.391.840.000.000	PT Bursa Efek Indonesia
PT Bursa Efek Indonesia	Seri A2	26.020	11,56%	208.160.000.000	PT Bursa Efek Indonesia
Bank Indonesia	Seri B	5.000	2,22%	40.000.000.000	Bank Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank Danamon Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Seri B	2.500	1,11%	20.000.000.000	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Total		225.000	100%	1.800.000.000.000	Total

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal saham yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari: (lanjutan)

20. SHARE CAPITAL (continued)

Share capital as of December 31, 2024 and 2023 consist of: (continued)

1 Januari/January 1, 2024 – 25 September/September 25, 2024				
Nama Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of share	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-up capital	Name of Shareholder
PT Bursa Efek Indonesia	200.000	100	1.600.000.000.000	PT Bursa Efek Indonesia
31 Desember/December 31, 2023				
Nama Pemegang Saham	Jumlah saham/ Number of share	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total modal disetor/ Total paid-up capital	Name of Shareholder
PT Bursa Efek Indonesia	200.000	100	1.600.000.000.000	PT Bursa Efek Indonesia

21. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

a. Cadangan Jaminan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 24 Juni 2024 yang disahkan oleh notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Risalah No. 124/VI/2024, pemegang saham memutuskan antara lain menyisihkan 5% dari laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 atau sebesar Rp5.299.075.507 sebagai dana cadangan jaminan (Catatan 11).

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 29 Mei 2023 yang disahkan oleh notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Risalah No. 128/V/2023, pemegang saham memutuskan antara lain menyisihkan 5% dari laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 atau sebesar Rp12.703.223.313 sebagai dana cadangan jaminan (Catatan 11).

b. Cadangan Wajib

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 24 Juni 2024 yang disahkan oleh notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Risalah No. 124/VI/2024, pemegang saham memutuskan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai cadangan wajib sebesar Rp74.000.000.000 atau 69,82% yang merupakan bagian tahapan dalam pemenuhan cadangan wajib sebesar minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

21. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

a. Guarantee Reserve Fund

Based on Annual Shareholder Meeting (AGM) dated June 24, 2024 as stated in the Resume of the AGM No. 124/VI/2024, by notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the shareholders decided to approve the guarantee reserve fund of 5% of net income for the year ended December 31, 2023 amounting to Rp5,299,075,507 (Note 11).

Based on Annual Shareholder Meeting (AGM) dated May 29, 2023 as stated in the Resume of the AGM No. 128/V/2023, by notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the shareholders decided to approve the guarantee reserve fund of 5% of net income for the year ended December 31, 2022 amounting to Rp12,703,223,313 (Note 11).

b. Mandatory Reserve Fund

Based on Annual Shareholder Meeting (AGM) dated June 24, 2024 as stated in the Resume of the AGM No. 124/VI/2024, by notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the Company's shareholders decided to approve the mandatory reserve fund of a certain amount of net income for the year ended December 31, 2023 amounting to Rp74,000,000,000 or 69.82% which is part of the stages in fulfilling the mandatory reserve of 10% minimum of the total issued and paid-up capital according to the requirements in Law No. 40 of 2007 related to Limited Company.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA (lanjutan)

b. Cadangan Wajib (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 29 Mei 2023 yang disahkan oleh notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Risalah No. 128/V/2023, pemegang saham memutuskan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 sebagai cadangan wajib sebesar Rp3.000.000.000 yang merupakan bagian tahapan dalam pemenuhan cadangan wajib sebesar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Cadangan Skin In The Game (SITG)

Berdasarkan Perjanjian Antar Pemegang Saham mengenai Pembentukan Central CounterParty (CCP) pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia tanggal, 12 Agustus 2024, Poin 6.1.a menyatakan bahwa penyertaan modal yang dilakukan Bank Indonesia dan 8 (delapan) pihak Bank sebesar Rp200.000.000.000 diperuntukkan guna keperluan penggunaan sumber dana dalam hal terjadi kegagalan (default waterfall) pada kegiatan CCP PUVA.

22. JASA LAINNYA

Rincian pendapatan lainnya terdiri dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2024	2023
Pihak berelasi:		
Pinjam Meminjam Efek	282.186.034	-
Jasa kliring Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)	19.381.422	-
Pihak ketiga:		
Pinjam Meminjam Efek	655.889.019	863.725.143
Jasa kliring Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)	42.527.371	-
Jasa informasi m-Clears	15.680.334	13.441.932
Total	1.015.664.180	877.167.075

21. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS
(continued)

b. Mandatory Reserve Fund (lanjutan)

Based on Annual Shareholder Meeting (AGM) dated May 29, 2023 as stated in the Resume of the AGM No. 128/V/2023, by notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the shareholders decided to approve the mandatory reserve fund of a certain amount of net income for the year ended December 31, 2022 amounting to Rp3,000,000,000 which is part of the stages in fulfilling the mandatory reserve of 20% of the total issued and paid-up capital according to the requirements in Law No. 40 of 2007 related to Limited Company.

c. Skin In The Game (SITG) Reserve

Based on the Agreement between Shareholders regarding the Establishment of Central CounterParty (CCP) at PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dated August 12, 2024, Point 6.1.a states that the capital participation made by Bank Indonesia and 8 (eight) Bank parties amounting to Rp200.000.000.000 is allocated for the purpose of using sources of funds in the event of failure (default waterfall) in the CCP PUVA.

22. OTHER SERVICES

The details of other revenues are as follows:

Related parties:
Securities lending and borrowing
Market Management Alternative clearing services
Third parties:
Securities lending and borrowing
Market Management Alternative clearing services
m-Clears information services
Total

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN GAJI, HONOR DAN TUNJANGAN

23. SALARIES, HONORARIUM AND ALLOWANCE EXPENSES

Rincian beban gaji, honor dan tunjangan terdiri dari:

The details of salaries, honorarium and allowance expenses are as follows:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2024	2023	
Karyawan	103.768.898.130	103.501.206.192	Employees
Direksi dan Komisaris (Catatan 30b.ii)	40.283.468.387	40.669.040.723	Directors and Commissioners (Note 30b.ii)
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 29)	3.532.517.000	2.799.313.000	Provision for employee benefits (Note 29)
Total	147.584.883.517	146.969.559.915	Total

24. BEBAN PENGEMBANGAN USAHA

24. BUSINESS DEVELOPMENT EXPENSES

Rincian beban pengembangan usaha terdiri dari:

The details of business development expenses are as follows:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2024	2023	
Pengembangan pasar modal	27.567.394.407	26.601.748.670	Capital market development
Perjalanan dinas	4.176.270.156	2.482.178.668	Business trip
Telekomunikasi	5.060.000.000	4.732.666.666	Telecommunication
Komisi fasilitas intraday	1.153.660.987	1.446.582.784	Intraday facility commission
Publikasi	958.097.785	1.159.718.564	Publication
Sumbangan (CSR)	2.116.867.624	781.750.000	Donation (CSR)
Sponsor	515.000.000	599.684.720	Sponsorship
Pelatihan Anggota Kliring	2.012.898.322	2.312.868.703	Training for Clearing Members
Lainnya	659.745.990	824.783.105	Others
Total	44.219.935.271	40.941.981.880	Total

Pengembangan pasar modal merupakan beban untuk kegiatan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi kepada pelaku pasar dan asosiasi lainnya.

Capital market development represents expenses incurred for the activities of socialization, education, and coordination to market participants and other association.

25. BEBAN PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI

25. INFORMATION TECHNOLOGY MAINTENANCE EXPENSES

Akun ini merupakan beban pemeliharaan sistem komputer dan perangkat keras untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp71.760.267.972 dan Rp66.342.548.775.

This account represents expenses incurred for maintenance of computer system, and hardware for the year then ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp71,760,267,972 and Rp66,342,548,775, respectively.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN ADMINISTRASI

Rincian beban administrasi terdiri dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2024	2023
Telekomunikasi	9.341.145.327	8.083.528.292
Perlengkapan kantor	17.090.901.226	15.923.290.699
Asuransi	6.248.519.524	5.582.416.772
Pelatihan dan literatur	5.823.711.994	4.015.522.291
Transportasi	1.495.023.879	664.950.960
Sewa	1.796.027.912	1.096.051.416
Rapat	2.421.841.472	2.430.456.062
Lainnya	564.671.427	1.454.934.542
Total	44.781.842.761	39.251.151.034

26. ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of administrative expenses are as follows:

Telecommunication
Office supplies
Insurance
Training and library
Transportation
Rent
Meeting
Others
Total

27. PENDAPATAN INVESTASI

Rincian pendapatan investasi terdiri dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2024	2023
Pihak berelasi:		
Penghasilan bunga		
Jasa giro dan deposito berjangka	12.639.775.224	-
Obligasi	1.692.231.250	-
Pihak ketiga:		
Penghasilan bunga		
Jasa giro dan deposito berjangka	64.039.665.364	64.234.330.683
Obligasi	28.845.868.363	20.704.422.610
Total	107.217.540.201	84.938.753.293

The details of investment income are as follows:

Related parties:
Interest income
Current accounts and time deposits
Bonds

Third parties:
Interest income
Current accounts and time deposits
Bonds
Total

28. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2024	2023
Pajak tangguhan	(513.205.203)	(3.911.465.826)
Pajak kini	19.431.362.134	11.994.711.271
Beban pajak	18.918.156.931	8.083.245.445

28. INCOME TAX EXPENSE

The Company's income tax expense consists of the following:

Deferred tax
Current tax
Income tax expense

Pada tanggal 29 Oktober 2021, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, antara lain mengatur bahwa tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 29, 2021, based on Law No. 7 year 2021 Harmonization of Taxation Regulation, among others regulates that income tax rate on corporate taxpayer and permanent establishment's corporate taxable income 22% which will be effective for fiscal year 2022 onwards.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan. Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sudah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

28. INCOME TAX EXPENSE (continued)

The income tax calculation for the year ended December 31, 2024 will be basis for preparing Annual Income Tax Return (SPT). The income tax calculation for the year ended December 31, 2023 is already in line with the submitted Annual Income Tax Return.

A reconciliation between profit before income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income, is as follows:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2024	2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	168.091.957.404	114.064.755.591	Profit before income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Imbalan kerja	(1.634.982.000)	1.588.931.000	Employee benefits
Penyusutan aset tetap	(5.138.514.974)	(816.986.961)	Depreciation of fixed assets
Imbalan kerja lainnya	9.106.247.898	17.007.446.078	Other employee benefits
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban gaji, honor dan tunjangan	381.707.352	(1.450.702.192)	Salaries, honorarium and allowance expenses
Beban administrasi	(4.153.890.129)	1.345.094.710	Administrative expenses
Beban pengembangan usaha	1.467.020.170	(1.005.929.050)	Business development expenses
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	12.419.632.972	(3.440.139.818)	Share in loss of associate entity
Rugi penghapusan aset tetap		(2.382.499.623)	Loss on disposal of fixed assets
Pendapatan dividen	(379.564.383)	(254.721.735)	Dividend income
Penghasilan bunga	(90.621.009.407)	(70.422.284.040)	Interest income
Lainnya	(1.214.231.564)	288.450.908	Others
Laba kena pajak	88.324.373.339	54.521.414.868	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan	19.431.362.134	11.994.711.271	Corporate income tax expense
Pajak penghasilan dibayar dimuka			Prepaid income taxes
Pasal 23	(201.184.346)	117.564.326	Article 23
Pasal 25	(9.348.000.000)	20.769.000.000	Article 25
Total	(9.549.184.346)	20.886.564.326	Total
Kurang/(lebih) bayar pajak penghasilan	9.882.177.788	(8.891.853.055)	Income Tax under/(over) payment

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2024	
Provisi imbalan kerja	3.174.941.889	(359.696.040)	63.251.100	2.878.496.949	Employee benefit obligation
Aset tetap	(1.733.362.167)	(1.130.473.294)	-	(2.863.835.461)	Fixed assets
Provisi imbalan lainnya	10.496.320.783	2.003.374.537	-	12.499.695.320	Other benefits obligation
Kerugian belum terealisasi pada investment di tvi bursa	-	-	414.039.705	414.039.705	Unrealized loss on investment in Tivi Bursa
Aset pajak tangguhan - neto	11.937.900.505	513.205.203	477.290.805	12.928.396.513	Deferred tax assets - net

	31 Desember/ December 31, 2022	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/Charged to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2023	
Provisi imbalan kerja	3.038.983.429	349.564.820	(213.606.360)	3.174.941.889	Employee benefit obligation
Aset tetap	(1.553.625.036)	(179.737.131)	-	(1.733.362.167)	Fixed assets
Provisi imbalan lainnya	6.754.682.646	3.741.638.137	-	10.496.320.783	Other benefits obligation
Aset pajak tangguhan - neto	8.240.041.039	3.911.465.826	(213.606.360)	11.937.900.505	Deferred tax assets - net

Rekonsiliasi antara beban pajak Perusahaan dan hasil perkalian laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the Company's income tax expense and the amount computed by applying the effective tax rates to profit before income tax expenses per statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,		
	2024	2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	168.091.957.404	114.064.755.591	Profit before income tax expense per statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku	36.980.230.629	25.094.246.230	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effect of permanent differences:
Beban gaji, honor dan tunjangan	83.975.617	(319.154.482)	Salaries, honorarium and allowance expenses
Beban administrasi	(913.855.828)	295.920.835	Administrative expenses
Beban pengembangan usaha	322.744.437	(221.304.391)	Business development expense
Bagian rugi/(laba) bersih entitas asosiasi	2.732.319.254	(756.830.760)	Share in loss/(gain) of associates
Rugi penghapusan aset tetap	-	(524.149.917)	Loss on disposal of fixed assets
Pendapatan dividen	(83.504.164)	(56.038.782)	Dividend income
Penghasilan bunga	(19.936.622.070)	(15.492.902.488)	Interest income
Lainnya	(267.130.944)	63.459.200	Others
Beban Pajak	18.918.156.931	8.083.245.445	Tax Expense

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor KEP/00007/KP-CT/KPP.0708/2025 tanggal 14 Maret 2025, menetapkan bahwa Perusahaan memiliki kelebihan pembayaran PPh pasal 25/29 Badan Masa/Tahun Pajak Januari - Desember 2023 sebesar Rp8.166.172.019. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak maka terdapat kelebihan pembayaran pajak Rp7.057.311.893 yang akan dikembalikan kepada Perusahaan dan sisanya sebesar Rp1.108.860.126 akan dikompensasikan sebagai Utang Pajak dan/atau Deposit Pajak.

29. IMBALAN KERJA

Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan, PT BNI Life Insurance. Jumlah karyawan yang berhak atas program ini adalah 130 dan 127 karyawan masing-masing per 31 Desember 2024 dan 2023. Beban program iuran pasti ini dicatat pada akun gaji, honor dan tunjangan masing-masing sebesar Rp2.653.691.300 dan Rp2.549.754.724 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai UU Ketenagakerjaan No. 11/2003 dan Peraturan Perusahaan. Kekurangan antara imbalan yang disediakan oleh program iuran pasti dibandingkan dengan imbalan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dicatat sebagai liabilitas imbalan kerja (porsi tanpa pendanaan).

Program Pasca Kerja Imbalan Pasti

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah 157 dan 142 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

28. INCOME TAX EXPENSE (continued)

Deferred Tax (continued)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Company calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due and subsequent years.

Based on the Decrease on the Refund of Excess Tax Payments Number KEP/00007/KP-CT/KPP.0708/2025 dated March 14, 2025, it was determined that the Company had an excess payment of Article 25/29 Income Tax for the Company for the Tax Period/Year January - December 2023 amounting to Rp8,166,172,019. After a tax audit was carried out, there was an excess tax payment of Rp7,057,311,893 which would be returned to the Company and the remainder of Rp1,108,860,126 would be compensated as Tax Debt and/or Tax Deposit.

29. EMPLOYEE BENEFITS

Defined Contribution Pension Plan

The Company provides Defined Contribution Pension Plan for all permanent employees which is managed by PT BNI Life Insurance's Financial Institution Pension Fund. The number of employees entitled to the plan totaled 130 and 127 employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively. Defined contribution pension plan expense amounted to Rp2,653,691,300 and Rp2,549,754,724 for the year then ended December 31, 2024 and 2023, respectively, were recorded under salaries, honorarium and allowances account.

The Company is required to provide defined post-employment benefits to its employees in accordance with Labor Law No. 11/2003 and the Company's Regulation. The shortage of benefits provided under the pension contribution plan against the benefits based on the Labor Law is recorded as employee obligation (unfunded portion).

Defined Post-employment Benefits

The number of employees entitled to the benefits totaled 157 and 142 employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memenuhi persyaratan imbalan yang didasarkan pada masa kerja karyawan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut masing-masing adalah 157 dan 142 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain program pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Imbalan pasca kerja imbalan pasti	10.603.701.000	11.853.217.000
Imbalan kerja jangka panjang lain	2.480.376.000	2.578.337.000
Total	13.084.077.000	14.431.554.000

Beban imbalan pasca kerja selain program pensiun iuran pasti, diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31, 2024		
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total
Diakui pada laba (rugi):			
Biaya jasa kini	779.945.000	1.262.733.000	2.042.678.000
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	161.369.000	-	161.369.000
Bunga neto atas liabilitas	695.991.000	90.089.000	786.080.000
Pengukuran kembali atas imbalan kerja hanya untuk imbalan kerja jangka panjang lain	-	433.885.000	433.885.000
Kelebihan pembayaran	108.505.000	-	108.505.000
	1.745.810.000	1.786.707.000	3.532.517.000
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:			
Pengukuran kembali dari imbalan pasti neto:			
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	523.094.000	-	523.094.000
Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(235.589.000)	-	(235.589.000)
Total	287.505.000	-	287.505.000

29. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other Long-term Employee Benefits

The Company provides other long-term employee benefits such as long service award for qualify employees. Other long-term benefits was determined based on years of services of the employees. The number of employees entitled to such benefits totaled 157 and 142 employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

The amounts included in the statement of financial position in relation the obligation in respect of the employee benefits other than define contribution pension plan are as follows:

Defined post-employment benefits
Other long-term employee benefits

Employee benefit expenses other than defined contribution pension plan are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income as follows:

Recognized in profit (loss):
Current service costs
Past service cost
due to plan amendment
Net interest of liability

Remeasurement of employee benefit - only for other long-term employee benefits
Excess benefits paid

Recognized in other comprehensive income:
Remeasurement on the net defined benefit liability:

Actuarial loss arising from experience adjustment
Actuarial gain arising from changes in financial assumptions

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

Beban imbalan pasca kerja selain program pensiun iuran pasti, diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah: (lanjutan)

29. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other Long-term Employee Benefits (continued)

Employee benefit expenses other than defined contribution pension plan are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31, 2023				
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total	
Diakui pada laba (rugi):				Recognized in profit (loss):
Biaya jasa kini	804.913.000	1.267.616.000	2.072.529.000	Current service costs
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(66.810.000)	-	(66.810.000)	Past service cost
Bunga neto atas liabilitas	706.277.000	141.119.000	847.396.000	due to plan amendment
Kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lain	-	(53.802.000)	(53.802.000)	Net interest of liability
	1.444.380.000	1.354.933.000	2.799.313.000	Actuarial loss on other long-term employee benefits
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:				Recognized in other comprehensive income:
Pengukuran kembali dari imbalan pasti neto:				Remeasurement on the net defined benefit liability:
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	135.392.000	-	135.392.000	Actuarial loss arising from changes in financial assumptions
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(1.106.330.000)	-	(1.106.330.000)	Actuarial gain arising from experience adjustment
Total	(970.938.000)	-	(970.938.000)	Total

Beban imbalan pasca kerja dicatat pada bagian dari beban gaji, honor dan tunjangan (Catatan 23).

Employee benefit expenses were recorded as part of salaries, honorarium and allowance expenses (Note 23).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2024			
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total
Nilai kini kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai awal tahun	11.853.217.000	2.578.337.000	14.431.554.000
Biaya jasa kini	779.945.000	1.262.733.000	2.042.678.000
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	161.369.000	-	161.369.000
Beban bunga	695.991.000	90.089.000	786.080.000
Imbalan yang dibayarkan	(3.174.326.000)	(1.884.668.000)	(5.058.994.000)
Pengukuran kembali atas imbalan kerja hanya untuk imbalan kerja jangka panjang lain	-	433.885.000	433.885.000
Pengukuran kembali: Keuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(235.589.000)	-	(235.589.000)
Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian	523.094.000	-	523.094.000
Nilai kini kewajiban imbalan yang tidak didanai pada akhir tahun	10.603.701.000	2.480.376.000	13.084.077.000

31 Desember/December 31, 2023			
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total
Nilai kini kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai awal tahun	11.631.225.000	2.182.336.000	13.813.561.000
Biaya jasa kini	804.913.000	1.267.616.000	2.072.529.000
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(66.810.000)	-	(66.810.000)
Beban bunga	706.277.000	141.119.000	847.396.000
Kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lain	-	(53.802.000)	(53.802.000)
Imbalan yang dibayarkan	(251.450.000)	(958.932.000)	(1.210.382.000)
Pengukuran kembali: Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	135.392.000	-	135.392.000
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(1.106.330.000)	-	(1.106.330.000)
Nilai kini kewajiban imbalan yang tidak didanai pada akhir tahun	11.853.217.000	2.578.337.000	14.431.554.000

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan.

29. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other Long-term Employee Benefits (continued)

Movements in the present value of unfunded employee benefits obligation are as follows:

Present value of unfunded employee benefits obligation at beginning of the year
 Current service costs
 Past service cost due to plan amendment
 Interest costs
 Benefit payments
 Remeasurement of employee benefit - only for other long-term employee benefits
 Remeasurement on:
 Actuarial gain arising from change in financial assumptions
 Actuarial loss arising from adjustments
 Present value of unfunded employee benefits obligation at end of the year

Present value of unfunded employee benefits obligation at beginning of the year
 Current service costs
 Past service cost due to plan amendment
 Interest costs
 Actuarial loss on other long-term employee benefits
 Benefit payments
 Remeasurement on:
 Actuarial loss arising from change in financial assumptions
 Actuarial gain arising from experience adjustments
 Present value of unfunded employee benefits obligation at end of the year

Significant actuarial assumptions for include the determination of the defined employee benefits obligation are discount rate and expected salary rate.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

Analisis sensitivitas di bawah ini merupakan kenaikan/(penurunan) liabilitas imbalan karyawan yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan (tidak diaudit).

	31 Desember/December 31, 2024		
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total
Tingkat diskonto			
+1%	(473.085.000)	(44.027.000)	(517.112.000)
-1%	524.128.000	45.571.000	569.699.000
Tingkat kenaikan gaji			
+1%	1.807.129.000	45.233.000	1.852.362.000
-1%	(1.241.328.000)	(44.521.000)	(1.285.849.000)

	31 Desember/December 31, 2023		
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total
Tingkat diskonto			
+1%	(476.770.000)	(44.577.000)	(521.347.000)
-1%	526.191.000	46.082.000	572.273.000
Tingkat kenaikan gaji			
+1%	1.896.598.000	45.452.000	1.942.050.000
-1%	(1.346.289.000)	(44.802.000)	(1.391.091.000)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan kerja. Mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan kerja telah dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* diproyeksikan pada akhir tahun pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

Durasi kewajiban untuk imbalan pasca kerja imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing 9,7 tahun dan 8,9 tahun (tidak diaudit)

29. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other Long-term Employee Benefits (continued)

The sensitivity analysis below represent increase/(decrease) of employee benefits obligation which have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant (unaudited).

	31 Desember/December 31, 2024		
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total
Tingkat diskonto			
+1%	(473.085.000)	(44.027.000)	(517.112.000)
-1%	524.128.000	45.571.000	569.699.000
Tingkat kenaikan gaji			
+1%	1.807.129.000	45.233.000	1.852.362.000
-1%	(1.241.328.000)	(44.521.000)	(1.285.849.000)

	31 Desember/December 31, 2023		
	Imbalan pasca kerja imbalan pasti/ Defined post-employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lain/Other long-term employee benefits	Total
Tingkat diskonto			
+1%	(476.770.000)	(44.577.000)	(521.347.000)
-1%	526.191.000	46.082.000	572.273.000
Tingkat kenaikan gaji			
+1%	1.896.598.000	45.452.000	1.942.050.000
-1%	(1.346.289.000)	(44.802.000)	(1.391.091.000)

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting year, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the statement of financial position.

The duration of liabilities for defined post-employment benefits and other long-term employee benefits as of December 31, 2024 and 2023 is 9.7 and 8.9 years, respectively (unaudited).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

Perhitungan imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing dihitung oleh aktuaris independen kantor konsultan aktuaria Steven & Mourits. Penilaian aktuarial menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Tingkat diskonto	7,10%	6,60%
Tingkat kenaikan gaji	7,00%	7,00%
Tingkat kematian	(TMI IV)-2019	(TMI IV)-2019
Tingkat pengunduran diri	15% sampai 25 tahun, menurun linier sampai 1% pada usia 46 tahun dan berikutnya/ 15% up to age 25, reducing linearly to 1% at age 46 and thereafter	

Jadwal jatuh tempo dari liabilitas imbalan pasti yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kurang dari 1 tahun	3.997.364.000	4.588.728.000
1 tahun	1.281.284.000	2.761.306.000
2 - 5 tahun	8.297.218.000	7.405.431.000
Lebih dari 5 tahun	18.817.599.000	17.095.047.000
Total	32.393.465.000	31.850.512.000

29. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other Long-term Employee Benefits (continued)

The employee benefits for the year ended December 31, 2024 and 2023 was calculated by an independent actuary, Steven & Mourits. The actuarial valuations were carried out using the following key assumptions:

Discount rate
Salary increment rate
Mortality rate
Resignation rate

The undiscounted maturity profile of defined benefits obligations as of December 31, 2024 and 2023, respectively, are as follows (unaudited):

Within one year
1 year
2 - 5 years
More than 5 years

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

a. Sifat Hubungan Berelasi

- Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah *Self Regulatory Organization (SRO)* diawasi oleh OJK, yang didirikan dengan tujuan yang sama yaitu untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Pasar Modal Nasional.

30. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Nature of the Relationship

- The Company, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) are *Self Regulatory Organization (SRO)* monitored by FSA, which were established with the same purpose, mainly to support the Government policies in order to develop the National Capital Market.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

a. Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

- ii. SRO merupakan pemegang saham atas PHEI, I-CAMEL, PPPIEI, PT Tivi Bursa Indonesia, PEI dan PT IDX Solusi Teknologi Informasi.
- iii. Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris dari Perusahaan.
- iv. Dana Jaminan merupakan unit pengelola dana jaminan yang mempunyai personal manajemen kunci yang sama.
- v. Bank Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Danamon Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan anggota CCP PUVA yang memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan.

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, antara lain:

- i. Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yaitu seluruh pendapatan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi efek yang berasal dari anggota kliring yang dipungut terlebih dahulu oleh BEI dan kemudian dibayarkan kepada KPEI. Pendapatan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi efek masing-masing sebesar Rp537.355.251.406 dan Rp459.891.868.714 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Pada setiap tanggal pelaporan, piutang yang timbul atas transaksi ini dicatat sebagai piutang usaha kepada pihak berelasi (Catatan 8).

30. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

a. Nature of the Relationship (continued)

- ii. SRO are the shareholders of PHEI, I-CAMEL, PPPIEI, PT Tivi Bursa Indonesia, PEI and PT IDX Solusi Teknologi Informasi.
- iii. Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of entity, directly or indirectly, including any director and commissioner of the Company.
- iv. Guarantee Fund is a guarantee fund management unit which having the same key management personnels.
- v. Bank Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Danamon Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, and PT Bank Maybank Indonesia Tbk are members of CCP PUVA which are the shareholders of the Company.

b. Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties, as follows:

- i. The Company entered into certain transactions with related parties, whereas all clearing and settlement guarantee fees from clearing members were collected first by BEI and then paid to KPEI. Total clearing and settlement guarantee fees amounted to Rp537,355,251,406 and Rp459,891,868,714 for the year ended December 31, 2024, and 2023, respectively. As of reporting date, receivables for this transaction were recorded as trade receivables to related party (Note 8).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

30. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

b. Transactions with Related Parties (continued)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, antara lain: (lanjutan)

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties, as follows: (continued)

- ii. Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka pendek untuk Komisaris dan Direksi sebagai berikut (Catatan 23):

- ii. Short-term benefits paid to the Commissioners and Directors of the Company are as follows (Note 23):

Untuk Tahun yang
berakhir pada Tanggal 31 Desember/
For the Year Ended December 31,

	2024	2023	
Gaji	10.239.888.550	9.791.203.100	Salaries
Apresiasi	8.328.859.000	7.367.439.800	Appreciation
Uang jasa	1.802.230.516	1.827.626.857	Severance
Tunjangan lain-lain	19.912.490.321	21.682.770.966	Other allowances
Total	40.283.468.387	40.669.040.723	Total

- iii. SRO juga melakukan transaksi untuk pengembangan pasar modal. Pada tanggal pelaporan, beban-beban BEI dan KSEI yang dibayarkan Perusahaan terlebih dahulu dicatat sebagai piutang lain-lain, dan disisi lain, beban-beban Perusahaan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh BEI dan KSEI dicatat sebagai beban akrual.

- iii. SRO also conducted transaction for capital market development. As of reporting date, expenses of BEI and KSEI which were paid first by the Company were recorded as other receivables, and on the other side, expenses of the Company which were paid first by BEI and KSEI were recorded as accrued expenses.

Rincian atas piutang lain-lain dan beban akrual adalah sebagai berikut:

Details of other receivables and accrued expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Piutang lain-lain (Catatan 9)			Other receivables (Note 9)
PT Bursa Efek Indonesia	135.822.025	439.874.895	PT Bursa Efek Indonesia
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	161.649.950	208.936.010	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Total	297.471.976	648.810.905	Total
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Beban akrual (Catatan 18)			Accrued expenses (Note 18)
PT Bursa Efek Indonesia	3.211.734.820	13.831.233.406	PT Bursa Efek Indonesia
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	151.689.668	117.268.956	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Total	3.363.424.488	13.948.502.362	Total

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, antara lain: (lanjutan)

- iv. Perusahaan menggunakan layanan penyediaan data harga pasar wajar obligasi dari PHEI dengan biaya sebesar Rp300.000.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.
- v. Perusahaan menggunakan ruangan yang berada di gedung BEI lantai LL dan 2 yang disewa dari BEI dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp727.440.000 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.
- vi. PT IDX Solusi Teknologi Informasi

Transaksi berelasi dengan ISTI diperoleh terutama untuk tujuan jasa teknologi informasi terkait pengembangan industri pasar modal dan keuangan.
- vii. PT Indonesia Capital Market Electronic Library (I-CAMEL)

Pada Januari 2024, 3 (tiga) Self-Regulatory Organization (SRO) melakukan penyeteroran tambahan modal disetor ke I-CAMEL masing-masing sejumlah Rp1.600.000.000.

Pada Januari dan Oktober 2024, 3 (tiga) Self-Regulatory Organization (SRO) melakukan penyeteroran tambahan modal disetor ke I-CAMEL masing-masing sejumlah Rp1.600.000.000 dan Rp1.300.000.000.
- viii. Perusahaan mengutip biaya masing-masing sebesar 10% atas jasa pengelolaan dana jaminan dan jasa pengelolaan agunan yang dilakukan oleh Dana Jaminan. Pendapatan jasa pengelolaan dana jaminan dan jasa pengelolaan agunan masing-masing sebesar Rp40.123.464.292 dan Rp6.681.801.088 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta Rp31.043.504.786 dan Rp2.383.284.637 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

**30. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**b. Transactions with Related Parties
(continued)**

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties, as follows: (continued)

- iv. The Company uses the service of PHEI for sourcing of bond market price in the exchange of fees which amounted to Rp300,000,000 for the year ended December 31, 2024 and 2023, respectively.
- v. The Company rents office space at Indonesia Stock Exchange building, LL and 2nd floors from BEI for rental fee of Rp727,440,000 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.
- vi. PT IDX Solusi Teknologi Informasi

The related transaction with ISTI is primarily for the development of information technology services.
- vii. PT Indonesia Capital Market Electronic Library (I-CAMEL)

On January 2024, 3 (three) Self-Regulatory Organization (SRO) have subscribed and fully paid a capital injection into I-CAMEL amounted to Rp1,600,000,000.

On January and October 2024, 3 (three) Self-Regulatory Organization (SRO) have subscribed and fully paid a capital injection into I-CAMEL amounted to Rp1,600,000,000 and Rp1,300,000,000.
- viii. The Company quotes fee of 10% each for guarantee fund management services and collateral management services performed by the Guarantee Fund. Total guarantee fund management services and collateral management services amounted to Rp40,123,464,292 and Rp6,681,801,088 for the year ended December 31, 2024, and also Rp31,043,504,786 and Rp2,383,284,637 for the year ended December 31, 2023, respectively.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI
(lanjutan)

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, antara lain: (lanjutan)

ix. Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kas dan setara kas	505.722.772.452	-
Investasi	152.622.279.695	-
Piutang usaha	98.475.264.542	85.536.887.212
Piutang lain-lain	1.734.048.159	648.810.905
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	1.050.000.000	1.750.000.000
Dana disisihkan sebagai cadangan	399.435.188.117	-
Investasi di saham	348.444.288.458	362.173.673.056
Beban akrual	3.387.178.481	13.948.502.362
Modal saham	1.800.000.000.000	1.600.000.000.000
Jasa lainnya	301.567.456	-
Beban gaji, honor dan tunjangan	40.283.468.387	40.669.040.723
Pendapatan investasi	14.332.006.474	-

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 4), dan ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 20) dan saldo laba.

30. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transactions with Related Parties
(continued)

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties, as follows: (continued)

ix. The Company has related parties transactions are as follows:

Cash and cash equivalents
Investments
Trade receivables
Other receivables
Advances and prepaid expenses
Reserve for guarantee
Investment in shares
Accrued expenses
Share capital
Other services
Salaries, honorarium, and allowance expenses
Investment income

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as going concern. The Company's capital structure consists of cash and cash equivalents (Note 4), and shareholder's equity which consists of subscribed capital stock (Note 20) and retained earnings.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Klasifikasi instrumen keuangan

b. Classification of financial instruments

Klasifikasi aset keuangan (maksimum eksposur resiko kredit) dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Classification of the Company's financial assets (maximum credit risk exposure) and liabilities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
<u>Aset keuangan lancar</u>		
Investasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Surat Berharga Negara dan SRBI	571.955.274.757	292.365.958.445
Obligasi korporasi	135.595.018.720	150.848.797.815
Biaya perolehan diamortisasi		
Setara kas	796.114.636.149	908.430.295.469
Piutang usaha	98.475.264.542	85.536.887.212
Piutang penyelesaian transaksi efek	1.671.150.505.200	1.982.087.120.800
Piutang lain-lain	12.372.444.292	9.503.587.799
<u>Aset keuangan tidak lancar</u>		
Investasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Investasi di saham	344.326.287.115	362.173.673.056
Biaya perolehan diamortisasi		
Aset dana pengaman	1.876.449.594	1.171.140.632
Dana disisihkan sebagai cadangan	399.437.509.117	194.137.716.957
Piutang lain-lain	3.036.433.837	2.851.928.269
Aset lain-lain	8.370.932.095	7.262.155.078
Total aset keuangan	4.042.710.755.418	3.996.369.261.532
<u>Liabilitas keuangan lancar</u>		
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang penyelesaian transaksi Bursa	1.671.150.505.200	1.982.087.120.800
Utang lain-lain	46.449.089.501	48.122.316.028
Liabilitas sewa		
- bagian jangka pendek	11.459.572.831	18.305.485.103
Beban akrual	93.800.719.150	87.499.482.164
<u>Liabilitas keuangan tidak lancar</u>		
Liabilitas dana pengaman	1.876.449.594	1.171.140.632
Liabilitas sewa		
- bagian jangka panjang	33.391.672.226	19.773.328.826
Total liabilitas keuangan	1.858.128.008.502	2.156.958.873.553

Current financial assets
Investment in fair value through other comprehensive income:
Government bonds and SRBI
Corporate bonds
Amortized cost
Cash equivalents
Trade receivables
Securities transactions settlement receivables
Other receivables

Non current financial assets
Investment in fair value through other comprehensive income:
Investment in shares
Amortized cost
Security funds asset
Reserve for guarantee
Other receivables
Other assets

Total financial assets

Current financial liabilities
Financial liabilities at amortized cost
Securities transactions settlement payable
Other payables
Lease liabilities
- current portion
Accrued expenses

Non current financial liabilities
Security funds liability
Lease liabilities
- non-current portion

Total financial liabilities

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan

c. Financial risk management policies and objectives

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko signifikan. Perusahaan beroperasi berdasarkan pedoman yang telah disetujui oleh Dewan Direksi.

The Company's financial risk management policies are aimed at ensuring that adequate financial resources are available for operations, business development, and management of significant risks. The Company operates on the basis of guidelines approved by the Board of Directors.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterparty* atas kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan terutama diperoleh dari aset keuangan FVOCI (Catatan 5). Perusahaan meminimalkan risiko kredit tersebut dengan melakukan analisis atas pemilihan alternatif lembaga keuangan penerbit investasi dan penetapan komposisi penempatan investasi. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan deposito berjangka, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 4 dan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai.

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Financial risk management policies and objectives (continued)

Credit risk

Credit risk arises from the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. The Company's exposure to credit risk mainly arises from financial assets FVOCI (Note 5). The Company minimizes credit risk by performing an analysis of the financial institution that issued such investments and determining the policy for composition of investment. For other financial assets such as cash and cash equivalents and time deposits, the Company minimizes credit risk by placing the funds with reputable financial institutions (Notes 4 and 5).

On December 31, 2024 and 2023, there is no past due or impaired receivables.

31 Desember/December 31, 2024

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
<u>Aset keuangan lancar</u>					<u>Current financial assets</u>
Investasi yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Investment measured at fair value through other comprehensive income:
Surat Berharga Negara dan SRBI	571.955.274.757	-	-	571.955.274.757	Government bonds and SRBI
Obligasi korporasi	135.595.018.720	-	-	135.595.018.720	Corporate bonds
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Setara kas	796.114.636.149	-	-	796.114.636.149	Cash equivalents
Piutang usaha	98.475.264.542	-	-	98.475.264.542	Trade receivables
Piutang penyelesaian transaksi efek	1.671.150.505.200	-	-	1.671.150.505.200	Securities transactions
Piutang lain-lain	12.372.444.292	-	-	12.372.444.292	Settlement receivables
					Other receivables
<u>Aset keuangan tidak lancar</u>					<u>Non current financial assets</u>
Investasi yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Investment measured at fair value through other comprehensive income:
Investasi di saham	348.444.288.458	-	-	348.444.288.458	Investment in shares
Biaya perolehan diamortisasi:					Amortized cost:
Aset dana pengaman	1.876.449.594	-	-	1.876.449.594	Security funds asset
Dana disisihkan sebagai cadangan	399.437.509.117	-	-	399.437.509.117	Reserve for guarantee
Piutang lain-lain	3.036.433.837	-	-	3.036.433.837	Other receivables
Aset lain-lain	8.370.932.095	-	-	8.370.932.095	Other assets
Total	4.046.828.756.761	-	-	4.046.828.756.761	Total

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management policies and objectives (continued)

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. (lanjutan)

On December 31, 2024 and 2023, there is no past due or impaired receivables. (continued)

	31 Desember/December 31, 2023				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Aset Keuangan					Financial Assets
<u>Aset keuangan lancar</u>					<u>Current financial assets</u>
Investasi yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Investment measured at fair value through other comprehensive income:
Surat Berharga Negara	292.365.958.445	-	-	292.365.958.445	Government bonds
Obligasi korporasi	150.848.797.815	-	-	150.848.797.815	Corporate bonds
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Setara kas	908.430.295.469	-	-	908.430.295.469	Cash equivalents
Piutang usaha	85.536.887.212	-	-	85.536.887.212	Trade receivables
Piutang penyelesaian transaksi efek	1.982.087.120.800	-	-	1.982.087.120.800	Securities transactions settlement receivables
Piutang lain-lain bagian lancar	9.503.587.799	-	-	9.503.587.799	Other receivables - current assets
<u>Aset keuangan tidak lancar</u>					<u>Non current financial assets</u>
Investasi yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Investment measured at fair value through other comprehensive income:
Investasi di saham	362.173.673.056	-	-	362.173.673.056	Investment in shares
Biaya perolehan diamortisasi:					Amortized cost:
Aset dana pengaman	1.171.140.632	-	-	1.171.140.632	Security funds asset
Dana disisihkan sebagai cadangan jaminan	194.137.716.957	-	-	194.137.716.957	Reserve for guarantee fund
Piutang lain-lain bagian tidak lancar	2.851.928.269	-	-	2.851.928.269	Other receivables - non current assets
Aset lain-lain	7.262.155.078	-	-	7.262.155.078	Other assets
Total	3.996.369.261.532	-	-	3.996.369.261.532	Total

Risiko pasar

Market risk

i. Risiko suku bunga

i. Interest rate risk

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of the Company's financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rate. The risk of interest rate movements that could affect profit or loss and other comprehensive income. Interest rate fluctuation is one factor that is considered by the Company in carrying out its investment policies.

Instrumen keuangan Perusahaan terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang).

The Company's financial instruments are exposed to fair value interest rate risk (i.e. fixed-rate instruments) and cash flow interest rate risk (i.e. floating rate instruments).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management policies and objectives (continued)

Risiko pasar (lanjutan)

Market risk (continued)

i. Risiko suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

Analisis sensitivitas di bawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Analisis ini disajikan dengan asumsi saldo aset keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang periode.

The sensitivity analysis below had been determined based on the exposure of the financial assets to interest rates as of December 31, 2024 and 2023. The analysis is prepared assuming the amount of the assets outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole periods.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akan mengalami peningkatan (penurunan) masing-masing sebesar Rp13.881.054.351 dan Rp13.159.452.360.

If interest rate had been 100 basis points higher (lower) and other variables held constant, the Company profit before income tax expense for the year ended December 31, 2024 and 2023 would increase (decrease) by Rp13,881,054,351 and Rp13,159,452,360, respectively.

100 basis poin adalah tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko suku bunga kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

The 100 basis point is the sensitivity rate used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rate.

ii. Risiko nilai tukar

ii. Foreign exchange risk

Risiko nilai tukar adalah risiko terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh pergerakan nilai tukar dari mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan pengawasan pergerakan kurs mata uang asing terhadap pendapatan atau biaya yang akan diterima atau dibayarkan. Perusahaan tidak memiliki eksposur yang material terhadap fluktuasi nilai tukar karena mayoritas transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang fungsional (rupiah).

Foreign exchange risk is the risk of losses due to changes in the exchange rates of the foreign currencies used by the Company. The Company has monetary assets and liabilities in foreign currencies. The Company has a policy to monitor foreign currency exchange rate movements relative to revenue or expenses that will be received or paid. The company does not have material foreign currency exposure because most of the transactions are using the functional currencies (rupiah).

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko
keuangan (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

iii. Risiko harga lain

Perusahaan juga menghadapi risiko harga pasar lain terkait investasi efek FVOCI. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Perusahaan mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan yang ditentukan dalam kebijakan investasi Perusahaan. Kebijakan tersebut juga mengatur pengawasan terhadap pergerakan dari investasi efek tersebut.

Analisa sensitivitas berikut ini ditentukan berdasarkan eksposur risiko harga reksadana dan obligasi pada akhir periode pelaporan.

Berdasarkan penilaian internal manajemen, Perusahaan menggunakan 1% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 untuk menghitung kenaikan (penurunan) harga efek sebagai akibat perubahan nilai wajar:

Laba (rugi) dari penambahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 akan mengalami kenaikan (penurunan) masing-masing sebesar Rp4.471.976.000 dan Rp4.468.156.000.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas arus kas saat jatuh tempo, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk melikuidasi aset, ataupun mendapatkan pendanaan yang mencukupi. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelola likuiditas secara hati-hati dengan memelihara kecukupan saldo kas dan ketersediaan modal kerja.

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK
AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Financial risk management policies and
objectives (continued)

Market risk (continued)

iii. Other price risk

The Company is also exposed to market price risk in respect of investment in FVOCI. To manage its price risk arising from these investments, the Company diversifies its portfolio. Diversification of the portfolio is done in accordance with the limits set in the Company's Investment Policy. This policy also set-up the control for monitoring of its movement.

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to mutual fund and bond price risk at the end of the reporting period.

Based on management's internal assessment, the Company uses 1% as of December 31, 2024 and 2023, respectively, to calculate the increase (decrease) as a result of changes in fair value:

Net fair value gain (loss) on changes in fair value through other comprehensive income in the equity as of December 31, 2024 and 2023 would increased (decreased) by Rp4,471,976,000 and Rp4,468,156,000, respectively.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of the Company's inability to fulfill its cash flow obligations when they become due, as a result of inability to liquidate assets or to obtain sufficient funding. The Company has a policy to manage liquidity prudently by maintaining an adequate cash balance and availability of working capital.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Tabel berikut ini merupakan analisis likuiditas instrumen keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan arus kas untuk semua aset dan liabilitas keuangan non-derivatif. Jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang paling awal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Dicantumkan informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Perusahaan dimana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Financial risk management policies and objectives (continued)

The following table represents the analysis of the Company's liquidity of financial instruments as of December 31, 2024 and 2023 based on exposure on due date on cash flows maturities for all non- derivative financial assets and liabilities. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Company may be required to pay. The inclusion of information of non-derivative financial assets is necessary in order to understand the Company liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and liability basis.

31 Desember/December 31, 2024					
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari tiga bulan/ Less than three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Satu sampai dengan lima tahun/ One to five years	Total
Aset Keuangan:					
Tanpa bunga					
Investasi di saham		-	-	348.444.288.458	348.444.288.458
Piutang penyelesaian transaksi efek		1.671.150.505.200	-	-	1.671.150.505.200
Piutang usaha		98.475.264.542	-	-	98.475.264.542
Piutang lain-lain	3,50%-7,34%	10.424.307.959	1.948.136.333	3.036.433.837	15.408.878.129
Aset lain-lain	6,00%	-	-	8.370.932.095	8.370.932.095
Bunga tetap					
Investasi yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,30%-8,65%	4.997.115.500	225.553.090.569	477.000.087.408	707.550.293.477
Bunga variabel					
Setara kas	4,25%-6,81%	796.114.636.149	-	-	796.114.636.149
Aset dana pengaman	2,50%	-	-	1.876.449.594	1.876.449.594
Dana disisihkan sebagai cadangan	6,50%-6,70%	-	-	399.437.509.117	399.437.509.117
Total		2.581.161.829.350	277.501.226.902	1.238.165.700.509	4.046.828.756.761
Liabilitas Keuangan:					
Tanpa bunga					
Biaya perolehan diamortisasi		-	-	-	-
Utang penyelesaian transaksi efek		1.671.150.505.200	-	-	1.671.150.505.200
Beban akrual		93.800.719.150	-	-	93.800.719.150
Utang lain-lain		8.781.588.392	31.878.500.497	5.789.000.612	46.449.089.501
Bunga variabel					
Liabilitas dana pengaman	2,50%	-	-	1.876.449.594	1.876.449.594
Liabilitas sewa	5,29% - 8,10%	-	19.949.352.658	24.901.892.399	44.851.245.057
Total		1.773.732.812.742	51.827.853.155	32.567.342.605	1.858.128.008.502

Financial Assets:
Non-interest bearing
Investment in shares
Securities transactions
settlement receivables
Trade receivables
Other receivables
Other assets

Fixed rate
Investment measured at fair value through other comprehensive income

Variable interest
Cash equivalents
Security funds asset
Reserve for guarantee

Total

Financial Liabilities:
Non-interest bearing
Amortized cost
Securities transactions
settlement payable
Accrued expenses
Other payables

Variable interest
Securities funds liability
Lease liability

Total

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Financial risk management policies and objectives (continued)

31 Desember/December 31, 2023

	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang/ Weighted average effective interest rate	Kurang dari tiga bulan/ Less than three months	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ Three months to one year	Satu sampai dengan lima tahun/ One to five years	Total
Aset Keuangan:					
Tanpa bunga					
Investasi di saham		-	-	362.173.673.056	362.173.673.056
Piutang penyelesaian transaksi efek		1.982.087.120.800	-	-	1.982.087.120.800
Piutang usaha		85.536.887.212	-	-	85.536.887.212
Piutang lain-lain	4,03% - 7,34%	6.524.697.760	2.978.890.039	2.851.928.269	12.355.516.068
Aset lain-lain	6,00%	-	-	7.262.155.078	7.262.155.078
Bunga tetap					
Investasi yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,30% - 9,75%	15.060.656.250	35.243.790.150	392.910.309.860	443.214.756.260
Bunga variabel					
Setara kas	4,75% - 7,25%	908.430.295.469	-	-	908.430.295.469
Aset dana pengaman	2,50%	-	-	1.171.140.632	1.171.140.632
Dana disisihkan sebagai cadangan jaminan	4,10% - 5,75%	-	-	194.137.716.957	194.137.716.957
Total		2.997.639.657.491	38.222.680.189	960.506.923.852	3.996.369.261.532
Liabilitas Keuangan:					
Tanpa bunga					
Biaya perolehan diamortisasi		1.982.087.120.800	-	-	1.982.087.120.800
Utang penyelesaian transaksi efek		87.499.482.164	-	-	87.499.482.164
Beban akrual		33.700.424.259	4.073.691.766	10.348.200.003	48.122.316.028
Utang lain-lain		-	-	-	-
Bunga variabel					
Liabilitas dana pengaman	2,50%	-	-	1.171.140.632	1.171.140.632
Liabilitas sewa	5,29% - 8,10%	-	18.305.485.103	19.773.328.826	38.078.813.929
Total		2.103.287.027.223	22.379.176.869	31.292.669.461	2.156.958.873.553

Financial Assets:
Non-interest bearing
Investment in shares
Securities transactions
settlement receivables
Trade receivables
Other receivables
Other assets

Fixed rate
Investment measured at fair value through other comprehensive income

Variable interest
Cash equivalents
Security funds asset
Reserve for guarantee fund

Total

Financial Liabilities:
Non-interest bearing
Amortized cost
Securities transactions settlement payable
Accrued expenses
Other payables

Variable interest
Securities funds liability
Lease liability

Total

d. Pengukuran Nilai Wajar

d. Fair Value Measurements

Nilai wajar aset keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

The fair values of financial assets are determined using valuation techniques and assumption as follows:

- Nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan dipasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar sebagai berikut:
 - Nilai wajar efek obligasi dinyatakan berdasarkan referensi harga pasar dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan.
 - Nilai wajar investasi saham PT Tivi Bursa Indonesia dinyatakan berdasarkan metode penilaian.

- The fair values of financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined with reference to quoted market prices as follows:
 - The fair value of bond securities are determined based on reference from PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) as of the reporting date.
 - The fair value of investment in PT Tivi Bursa Indonesia stated based on the valuation method.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

d. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar aset keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut: (lanjutan)

- Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

- Tingkat 1: Dikutip dari harga di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- Tingkat 2: Yang melibatkan input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga); dan
- Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2024			
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset				
Investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Surat Berharga Negara, SRBI dan Obligasi Korporasi	348.444.288.458	-	348.444.288.458	-
Investasi di saham pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.118.001.343	-	-	4.118.001.343
Total	352.562.289.801	-	348.444.288.458	4.118.001.343

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair Value Measurements (continued)

The fair values of financial assets are determined using valuation techniques and assumption as follows: (continued)

- The carrying amount of other financial assets and liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry prevailing market variable interest rates.

The Company classified the fair value measurement using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements, are as follows:

- Level 1: Quoted prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
- Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the asset and liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices); and
- Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Fair value of financial assets and liabilities, including its carrying amount as December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Assets
Investment measured at fair value through other comprehensive income Government Bonds SRBI and Corporate Bonds
Investment in shares measured at fair value through other comprehensive income
Total

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL (lanjutan)

31. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

d. Fair Value Measurements (continued)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Fair value of financial assets and liabilities, including its carrying amount as December 31, 2024 and 2023 are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2023					
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset					Assets
Investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi	442.066.796.095	-	443.214.756.260	-	Investment measured at fair value through other comprehensive income Government Bonds, and Corporate Bonds
Investasi di saham pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000	Investment in shares measured at fair value through other comprehensive income
Total	448.066.796.095	-	443.214.756.260	6.000.000.000	Total

32. INFORMASI LAINNYA

32. OTHER INFORMATION

Perusahaan menyajikan informasi lainnya sehubungan dengan pengembangan lini bisnis Perusahaan sejak 30 September 2024 menjadi Central Counter Party (CCP) di:

The Company presents other information in connection with the development of the Company's business line since September 30, 2024 to become the Central Counter Party (CCP) in:

- Segmen Pasar Modal merupakan operasional bisnis yang bergerak di bidang jasa kliring, penjaminan dan pinjam meminjam Efek.
- Segmen Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) yang merupakan operasional bisnis yang bergerak di bidang jasa kliring dan penjaminan transaksi PUVA.

- Capital Market Segment is a business operation engaged in clearing services, guarantees and securities lending and borrowing.
- Money Market and Foreign Exchange Segment (PUVA) which is a business operation engaged in clearing services and guarantees of PUVA transactions.

Informasi lainnya pada periode 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini:

The other information for the period ending December 31, 2024, is presented in the table below:

31 Desember 2024/December 31, 2024					
	Pasar Modal/ Capital Market	Pasar Uang & Valuta Asing/ Money & Foreign Exchange Market	Total/ Total		
Pendapatan				Revenue	
Jasa Kliring Transaksi Efek	537.355.251.406	-	537.355.251.406	Clearing and settlement securities	
Jasa Pengelolaan Agunan & Dana Jaminan	46.805.265.380	-	46.805.265.380	Guarantee fund and collateral management services	
Jasa Kliring OTC Derivatif	-	1.408.062.677	1.408.062.677	Clearing and OTC derivatives	
Jasa Lainnya	1.015.664.180	-	1.015.664.180	Other services	
Pendapatan Investasi	104.402.649.263	2.814.890.938	107.217.540.201	Investment Income	
Pendapatan Lainnya	3.318.494.187	-	3.318.494.187	Others Income	
Total Pendapatan	692.897.023.816	4.223.254.215	697.120.278.031	Total Revenue	
Beban	500.514.181.444	11.917.608.388	512.431.789.832	Expenses	
Laba Sebelum Pajak	192.383.142.972	(7.694.654.773)	184.688.488.199	Profit before tax	
Beban Pajak	35.514.687.726	-	35.514.687.726	Tax expense	
Laba Bersih	156.868.455.246	(7.694.654.773)	149.173.800.473	Profit for the period	
Total Aset	4.130.278.074.375	270.040.517.862	4.400.318.592.237	Total Asset	
Total Liabilitas	1.871.153.642.961	17.981.208.700	1.889.134.851.661	Total Liabilities	

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Dana Jaminan

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-26/PM/2000 tentang Dana Jaminan tanggal 31 Desember 2000, yang sebelumnya diatur dalam surat Bapepam No. S-1484/PM/1997 tanggal 27 Juni 1997, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) disetujui untuk melakukan pungutan sebesar 0,01% dari nilai transaksi efek sebagai salah satu sumber utama pembentukan dana jaminan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004, Bapepam-LK memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk melakukan pungutan Dana Jaminan sebesar 0,005% dari nilai transaksi kontrak berjangka dan 0,00125% dari nilai transaksi obligasi.

Sehubungan dengan perubahan dari Bapepam ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 19 November 2014, OJK menerbitkan peraturan No. 26/POJK.04/2014 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa, dimana OJK menyatakan mencabut dan tidak berlakunya Keputusan Bapepam No. KEP-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004, kecuali mengenai pungutan sebesar 0,01% dari nilai transaksi efek sebagai salah satu sumber utama pembentukan dana jaminan. Ketentuan ini diatur kembali sesuai Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.04/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi.

Perubahan terakhir sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.04/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.04/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi, menjadi sebagai berikut:

- Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk Transaksi Bursa sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap transaksi Bursa.

33. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Guarantee Fund

Based on the Decision Letter of the Chairman of the Capital Supervisory Agency (Bapepam) No. KEP-26/PM/2000 dated December 31, 2000 regarding Guarantee Fund, which is previously regulated by the Letter of the Bapepam No. S-1484/PM/1997 dated June 27, 1997, Bapepam has approved PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) to collect 0.01% of cumulative value of securities transactions as the main source for the guarantee fund.

Based on the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-47/PM/2004 dated December 9, 2004, Bapepam-LK has approved the Company to withheld Guarantee Fund of 0.005% and 0.00125%, respectively, of the value of futures and debt securities transactions.

In relation with the change from Bapepam to Financial Services Authority (FSA), on November 19, 2014, the FSA issued regulation No. 26/POJK.04/2014 on the settlement of securities transactions, which replaced Bapepam Decree No. KEP-47/PM/2004 dated December 9, 2004, except collection of 0.01% of securities transactions value as the main funding for the guarantee fund. This regulation is reaffirmed in FSA Circular Letter No. 23/SEOJK.04/2015 dated August 27, 2015 regarding contribution for Guarantee Fund Based on Transaction Value.

In relation with the last amendment in FSA Circular Letter No. 10/SEOJK.04/2022 dated June 29, 2022, regarding changes in the FSA Circular Letter No. 8/SEOJK.04/2020 dated May 26, 2020 regarding Contributions for Guarantee Fund Based on Transaction Value, are as follows:

- *Contribution of Guarantee Fund Based on Transaction Value for Securities Transaction is 0.01% (one per ten thousand) from each of the Securities transaction.*

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

a. Dana Jaminan (lanjutan)

Perubahan terakhir sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.04/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.04/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi, menjadi sebagai berikut: (lanjutan)

- Kontribusi Dana Jaminan dari Nilai Transaksi Khusus untuk:
 - a. Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka, sebesar 0,0003% (tiga per satu juta) dari nilai setiap transaksi Kontrak Berjangka;
 - b. Transaksi Bursa atas Kontrak Opsi sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai Kontrak Opsi;
 - c. Transaksi Bursa atas Efek bersifat Utang dan Sukuk, sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai setiap transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk;
 - d. Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur jatuh tempo, sebesar 0,003% (tiga per seratus ribu) dari nilai penerbitan Waran Terstruktur.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, posisi dana jaminan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kas di bank dan deposito berjangka	7.932.406.297.088	7.312.406.317.190
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	60.390.000.000
Investasi	592.329.588.200	370.328.325.000
Piutang dana jaminan	34.768.601.151	40.382.944.791
Piutang bunga	151.495.986.770	40.483.049.926
Liabilitas	(44.627.029.573)	(34.541.353.052)
Aset Neto	8.666.373.443.636	7.789.449.283.855

33. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

a. Guarantee Fund (continued)

In relation with the last amendment in FSA Circular Letter No. 10/SEOJK.04/2022 dated June 29, 2022, regarding changes in the FSA Circular Letter No. 8/SEOJK.04/2020 dated May 26, 2020 regarding Contributions for Guarantee Fund Based on Transaction Value, are as follows: (continued)

- Contribution of Guarantee Fund for Special Transaction Value:
 - a. Securities Transaction for Future Securities Contract transaction value is 0.0003% (three per one million) from each of the Future Securities Contract transaction value;
 - b. Securities Transaction for Option Contract transaction value is 0.01% (one per ten thousand) from each of the Equity Option Contract transaction;
 - c. Securities Transaction for Debt and Sukuk Securities' transaction value is 0.00125% (one hundred twenty-five per ten million) from each of the Debt and Sukuk Securities transaction value;
 - d. Securities Transactions for Structured Warrants transaction value is 0.003% (three per hundred thousand) from each of the issuance value of Structured Warrants.

As of December 31, 2024 and 2023, the financial position of the guarantee fund is as follows:

Cash in banks and time deposits
Restricted time deposits
Investments
Guarantee fund receivables
Interest receivables
Liabilities
Net Assets

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- b. Pada Agustus 2002, PT Usaha Bersama Sekuritas mengalami gagal bayar atas transaksi saham. KPEI memperkirakan adanya potensi kegagalan beruntun sebesar Rp30.986.550.000. KPEI memutuskan untuk menunda penyelesaian transaksi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK tanggal 11 November 2002 dan surat OJK No. S-45/PM.212/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal tanggapan terkait permasalahan transaksi saham PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) yang menyatakan bahwa tata cara penyelesaian transaksi saham BIMA tersebut dikembalikan kepada para pihak yang melakukan transaksi, dengan tetap mempertimbangkan potensi tuntutan dari pihak-pihak terkait.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Perusahaan masih melakukan penundaan penyelesaian sehubungan dengan status hukum transaksi tersebut.

c. Perjanjian sewa ruang kantor

Perusahaan menandatangani perjanjian sewa ruang kantor dengan PT First Jakarta International (FJI) untuk masa sewa yang berakhir pada 31 Agustus 2024, atas ruang kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4 dan 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53.

Berdasarkan Addendum XXIV tanggal 14 Oktober 2016, masa sewa telah diperpanjang sampai dengan 1 September 2024 untuk ruang kantor lantai 2, 4, dan 5. Berdasarkan surat penunjukkan No. KPEI-1247/DIR/1021 tanggal 1 Oktober 2021 untuk ruangan *suite* 211 masa sewa telah diperpanjang sampai dengan 1 September 2034.

Perusahaan tidak memiliki opsi untuk membeli kantor yang disewa pada akhir masa sewa, namun memiliki opsi untuk perpanjangan sebelum masa kontrak berakhir.

- d. Perusahaan memperoleh fasilitas *intraday* (perjanjian *intraday*) dari PT Bank Permata Tbk yang telah diadendum terakhir tanggal 27 Januari 2024, dengan fasilitas kredit Rp1.500.000.000.000 dengan biaya fasilitas sebesar 0,475% per tahun yang jatuh tempo pada 27 Januari 2025. Fasilitas kredit ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelesaian transaksi harian perdagangan saham di BEI.

33. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- b. In August 2002, PT Usaha Bersama Sekuritas failed to settle securities transactions. KPEI estimated potential recurring failure of Rp30,986,550,000. KPEI decided to postpone the settlement of such transaction. The decision was in accordance with the letter of the Chairman of Bapepam-LK dated November 11, 2002 and letter from Financial Service Authority ("FSA") No. S-45/PM.212/2018 on January 11, 2018, regarding response on issue of the stock transaction of PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) which stated that the arrangement of stock transaction settlement of BIMA shares depends on the parties who executed the transaction, by still considering the potential lawsuit from relevant parties.

As of the date of the issuance of these financial statements, KPEI and the Guarantee Fund still postponed the settlement of such transaction.

c. Office space lease agreement

The Company entered into an office space lease agreement with PT First Jakarta International (FJI) for a period expiring on August 31, 2024, for an office space at Indonesia Stock Exchange Building, fourth and fifth floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53.

Based on Addendum XXIV dated October 14, 2016, the rental period for office space on second floor, fourth and fifth floors were extended until September 1, 2024. Based on letter of appointment No. KPEI-1247/DIR/1021 dated October 1, 2021, for suite 211 the rental period has been extended until September 1, 2034.

The Company does not have an option to purchase the leased office at the expiry of the lease periods, but has the option to extend before the contract period ends.

- d. The Company obtained an intraday facility (intraday agreement) from PT Bank Permata Tbk which was recently amended on January 27, 2024, with the maximum credit facility up to Rp1,500,000,000,000 with fee facility of 0.475% per annum due on January 27, 2025. This credit facility is solely intended for handling settlement of daily transaction in BEI.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)

- e. Perusahaan memperoleh fasilitas *intraday* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan fasilitas kredit Rp500.000.000.000 dan biaya fasilitas sebesar 1,25% per tahun. Perjanjian fasilitas *intraday* ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan kedua pihak berhak mengevaluasi perjanjian. Fasilitas kredit dipergunakan untuk penyelesaian dana secara *multi-batch settlement* atas pemenuhan kewajiban serah efek oleh anggota kliring.
- f. Perusahaan memperoleh fasilitas *intraday* dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp3.000.000.000.000 dengan *fee* fasilitas sebesar 0,475% per tahun yang akan jatuh tempo pada 19 Juli 2025. Fasilitas kredit ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelesaian transaksi harian perdagangan di BEI.
- g. Perusahaan memperoleh fasilitas *intraday* dari PT Bank Central Asia Tbk, dengan fasilitas kredit sebesar Rp2.500.000.000.000. Pada tanggal 31 Juli 2024, perjanjian ini diperpanjang hingga 11 Maret 2025. Fasilitas ini diberikan kepada Perusahaan untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa.
- h. Perusahaan memperoleh fasilitas *intraday* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp1.800.000.000.000 dengan *fee* fasilitas sebesar 0,475% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2025. Fasilitas kredit ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelesaian transaksi harian perdagangan saham di BEI.
- i. Perusahaan memperoleh fasilitas *intraday* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp3.500.000.000.000 dengan *fee* fasilitas sebesar 0,475% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Juni 2025. Fasilitas kredit ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelesaian transaksi harian perdagangan di BEI.
- j. Perusahaan memperoleh fasilitas *money market* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp60.390.000.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2024 dan tidak diperpanjang. Fasilitas kredit ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penanggulangan kegagalan pada penyelesaian transaksi harian perdagangan saham di BEI.

33. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- e. The Company obtained an *intraday* facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk where both parties agreed with the maximum credit facility of Rp500,000,000,000 with fee facility of 1.25% per annum. This *intraday* facility shall be effective for unlimited time and both parties have the right to evaluate the facility. This credit facility is solely intended for the completion of a *multi-batch settlement* funds by transferring effect of clearing member.
- f. The Company obtained an *intraday* facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp3,000,000,000,000 with fee facility of 0.475% per annum which will due on July 19, 2025. This facility is solely intended for handling settlement of daily transactions in BEI.
- g. The Company obtained an *intraday* facility from PT Bank Central Asia Tbk where both parties agreed with the maximum credit facility of Rp2,500,000,000,000. On July 31, 2024, this credit facility was extended to March 11, 2025. This facility is solely intended for securities transactions settlement.
- h. The Company obtained an *intraday* facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp1,800,000,000,000 with fee facility of 0.475% per annum which will due on October 31, 2025. This facility is solely intended for handling the settlement of daily transactions in BEI.
- i. The Company obtained an *intraday* facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp3,500,000,000,000 with fee facility of 0.475% per annum which will due on June 21, 2025. This facility is solely intended for handling settlement of daily transactions in BEI.
- j. The Company obtained a *money market* facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp60,390,000,000 which matured on February 7, 2024 and not been extended. This credit facility is solely intended for dealing with failures in settlement of daily transaction in BEI.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

Untuk perjanjian-perjanjian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah mematuhi seluruh kondisi dan persyaratan pada masing-masing setiap perjanjian tersebut.

34. PERISTIWA PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Keputusan No. SR-02/BL/2009 tertanggal 6 Januari 2009, Bapepam-LK telah memerintahkan Perusahaan untuk melakukan pembekuan aset-aset atas nama PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS), sehubungan dengan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Bapepam-LK terhadap adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang diduga dilakukan oleh SPS, kecuali aset-aset untuk penyelesaian transaksi bursa yang terjadi sebelum keluarnya surat tersebut, yang merupakan kewajiban kepada Perusahaan.

Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2012, terdapat proses hukum atas gugatan yang diajukan oleh beberapa nasabah SPS, dengan salah satunya menjadikan Perusahaan sebagai turut tergugat I.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh nasabah tersebut hanya menuntut ganti rugi kepada Tergugat I atas aset-aset nasabah SPS yang diduga diselewengkan oleh SPS, dan tidak menuntut ganti rugi kepada Perusahaan, namun hanya meminta Perusahaan selaku Turut Tergugat I mematuhi putusan Majelis Hakim apabila aset-aset milik SPS, yang saat ini sedang dibekukan oleh Perusahaan berdasarkan perintah Bapepam-LK, diputuskan untuk diserahkan kepada Para Penggugat.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, belum terdapat arahan dari otoritas berwenang dan/atau putusan instansi terkait kepada KPEI untuk menyerahkan aset-aset SPS kepada pihak tertentu.

33. AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

For all agreements as of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with all important conditions and covenants required by each significant agreement.

34. OTHERS SIGNIFICANT EVENTS

Based on decision letter of Bapepam-LK No. SR-02/BL/2009 dated January 6, 2009, Bapepam-LK has ordered the Company to freeze the assets of PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) in connection with the on-going investigation by Bapepam-LK of the alleged violation of capital market regulations by SPS, except for assets for the settlement of securities transactions of SPS that occurred before the decision letter was issued which represent obligations to the Company.

In the period from 2009 to 2012, there was a legal process for lawsuits filed by several SPS customers, one of which named the Company as co-defendant I.

The management of the Company believes that the civil lawsuit as mentioned above will not have a significant impact on the financial statements of the Company, considering that the claim submitted by the customers is only demanding compensation from defendant I for assets of SPS customers that were allegedly embezzled by SPS and is not demanding compensation from the Company; it only requests the Company, as co-defendant I, to comply with the Judges' decision if it is decided that SPS assets that were frozen by the Company based on the instruction from Bapepam-LK are to be surrendered to the Plaintiffs.

As of the date of the issuance of these financial statements, there have been no directives from the relevant authorities and/or decisions from related institutions to KPEI regarding the submission of SPS assets to any specific party.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. TRANSAKSI NON-KAS

35. NON-CASH TRANSACTIONS

	Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31,		
	2024	2023	
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	66.888.458.780	149.666.062.262	Addition of fixed assets through account payables
Bagian (laba) rugi bersih entitas asosiasi	(12.419.632.972)	3.440.139.818	Equity in net (gain) loss of associates
Rugi/(laba) belum terealisasi atas kenaikan nilai wajar aset keuangan penghasilan komprehensif lain	7.577.576.177	(2.386.543.546)	Unrealized loss/(gain) on increase in fair value of financial assets through other comprehensive income

Tambahan informasi arus kas

Supplementary cash flow information

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the statements of cash flow are as follows:

	1 Januari/ January 1, 2024	Arus kas/ cash flow	Non-arus kas/ Non-cash flow Additions	31 Desember/ December 31, 2024	
Liabilitas sewa	38.078.813.929	(23.245.234.981)	30.017.666.109	44.851.245.057	Lease liabilities
	1 Januari/ January 1, 2023	Arus kas/ cash flow	Non-arus kas/ Non-cash flow Additions	31 Desember/ December 31, 2023	
Liabilitas sewa	49.774.833.258	(16.450.494.398)	4.754.475.069	38.078.813.929	Lease liabilities

36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

36. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Pada tanggal 14 Maret 2025, Perusahaan menerima Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak untuk jenis pajak PPh 25/29 Badan masa/ tahun pajak Januari – Desember 2023, dengan sisa nilai kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp7.057.311.893.

On March 14, 2025, the Company received a Decision Letter for the Refund of Excess Tax Payment for the type of Corporate Income Tax Article 25/29 for the tax period/year January – December 2023, with the remaining excess tax payment amounting to Rp7,057,311,893.

37. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

37. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar atas laporan keuangan yang diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 25 Maret 2025.

The management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements which were completed and authorized for issuance by the Directors on March 25, 2025.

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Laporan keuangan Dana Jaminan
tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Financial statements of Guarantee Fund
as of December 31, 2024 and for the year then ended
with independent auditor's report



iDClear

Kliring Penjaminan Efek Indonesia

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN DANA JAMINAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
FINANCIAL STATEMENTS OF
GUARANTEE FUND
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi	Halaman/ Page	Table of Contents
Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Penghasilan Komprehensif	2	<i>Statement of Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Neto	3	<i>Statement of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	5-36	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN DANA JAMINAN TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

1. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/*Domicile as
Stated in ID Card*
Nomor Telepon/*Phone Number*
Jabatan/*Position*

: Iding Pardi
: Indonesia Stock Exchange Building Tower I 5th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Bumi Mas Raya Blok DE No. 6
: RT.003/RW.008, Cikokol, Tangerang
: Banten
: (021) 5155115
: Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name*
Alamat kantor/*Office address*

Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/*Domicile as
Stated in ID Card*
Nomor Telepon/*Phone Number*
Jabatan/*Position*

: Umi Kulsum
: Indonesia Stock Exchange Building Tower I 5th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
: Jl. Anggrek Garuda V Blok G14/25
: RT.008/RW.002, Kemanggisan, Palmerah
: Jakarta
: (021) 5155115
: Direktur/*Director*

Menyatakan bahwa/Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements;*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The Company's financial statements do not contain any material incorrect information or fact nor do they omit information or fact;*
4. *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 27 Februari/February 27, 2025


Iding Pardi
Direktur Utama/*President Director*


Umi Kulsum
Direktur/*Director*

*The original report included herein is in
the Indonesian language.*

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/II/2025

**Pengelola Dana Jaminan
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan dana jaminan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("Dana Jaminan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Jaminan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Dana Jaminan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/II/2025

**The Management of Guarantee Fund
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia**

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of guarantee fund of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (the "Guarantee Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Guarantee Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Guarantee Fund in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Jaminan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Dana Jaminan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Dana Jaminan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/II/2025 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Guarantee Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Guarantee Fund or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Guarantee Fund's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/II/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/II/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Dana Jaminan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Dana Jaminan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Jaminan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-3/1/II/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Guarantee Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Guarantee Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Guarantee Fund to cease to continue as a going concern.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/II/2025 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00104/2.1032/AU.1/09/1008-
3/1/II/2025 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements (continued)**

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
(continued)*

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/Public Accountant Registration No. AP.1008

27 Februari 2025/February 27, 2025



The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION OF
GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET				ASSETS
Kas di bank dan deposito berjangka	7.932.406.297.088	4	7.312.406.317.190	Cash in banks and time deposits
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	4c	60.390.000.000	Restricted time deposits
Investasi	592.329.588.200	5	370.328.325.000	Investments
Piutang dana jaminan	34.768.601.151	6	40.382.944.791	Guarantee fund receivables
Piutang bunga	151.495.986.770	7	40.483.049.926	Interest receivables
TOTAL ASET	8.711.000.473.209		7.823.990.636.907	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET NETO				LIABILITIES AND NET ASSETS
Beban akrual	44.627.029.573	8	34.541.353.052	Accrued expenses
TOTAL LIABILITAS	44.627.029.573		34.541.353.052	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	8.666.373.443.636		7.789.449.283.855	With restrictions from resources provider
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	8.711.000.473.209		7.823.990.636.907	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
DANA JAMINAN
 Untuk Tahun yang berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OF
GUARANTEE FUND
 For the Year Ended
 December 31, 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023
PENDAPATAN			INCOME
Kontribusi dari Anggota Bursa	486.390.164.963	2	432.962.269.843
Penghasilan bunga	445.808.378.633	9	344.817.785.694
TOTAL PENDAPATAN	932.198.543.596		777.780.055.537
BEBAN			EXPENSES
Pengelolaan Dana Jaminan	(44.537.045.363)	2i, 10	(34.458.290.313)
Kerugian perubahan nilai wajar surat utang negara yang belum direalisasi	(436.925.000)	5a	(1.296.475.000)
Administrasi	(191.724.248)	2h	(126.297.105)
Lain-lain	(142.984.331)	8	(138.484.930)
TOTAL BEBAN	(45.308.678.942)		(36.019.547.348)
SURPLUS	886.889.864.654		741.760.508.189
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	(9.965.704.873)	5b	353.472.979
TOTAL SURPLUS DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	876.924.159.781		742.113.981.168
			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
			TOTAL SURPLUS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
DANA JAMINAN
 Untuk Tahun yang berakhir
 pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS OF
GUARANTEE FUND
 For the Year Ended
 December 31, 2024
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET NETO				NET ASSETS
DENGAN PEMBATAHAN DARI				WITH RESTRICTIONS FROM
PEMBERI SUMBER DAYA				RESOURCES PROVIDER
Saldo awal	7.789.095.810.876		7.047.335.302.687	Beginning balance
Surplus tahun berjalan	886.889.864.654		741.760.508.189	Surplus in current year
Saldo akhir	8.675.985.675.530		7.789.095.810.876	Ending balance
PENGHASILAN				OTHER
KOMPREHENSIF LAIN				COMPREHENSIVE INCOME
Saldo awal	353.472.979		-	Beginning balance
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	(9.965.704.873)		353.472.979	Other comprehensive income for the year
Saldo akhir	(9.612.231.894)		353.472.979	Ending balance
TOTAL ASET NETO	8.666.373.443.636		7.789.449.283.855	TOTAL NET ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
DANA JAMINAN
Untuk tahun yang berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
OF GUARANTEE FUND
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,			
	2024	Catatan/ Notes	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari penghasilan bunga	330.791.063.472		321.231.496.283
Pembayaran biaya pengelola dana jaminan	(34.458.290.314)		(17.285.061.806)
Pembayaran untuk beban administrasi	(327.787.110)		(264.782.035)
Penerimaan dari deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	60.390.000.000		-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	356.394.986.048		303.681.652.442
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan atas obligasi jatuh tempo	-	5a	50.000.000.000
Pembayaran untuk investasi pada surat utang negara	(228.399.514.753)		(343.875.000.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(228.399.514.753)		(293.875.000.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan kontribusi dari anggota bursa	492.004.508.603		432.787.056.260
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	492.004.508.603		432.787.056.260
KENAIKAN NETO KAS DI BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA	619.999.979.898		442.593.708.702
KAS DI BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA AWAL PERIODE	7.312.406.317.190	4	6.869.812.608.488
KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA AKHIR PERIODE	7.932.406.297.088	4	7.312.406.317.190
			NET INCREASE IN CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS
			CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS AT BEGINNING OF PERIOD
			CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS AT END OF PERIOD

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

Dana Jaminan dibentuk oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("Perusahaan") berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Pasal 55 ayat 4, tentang penyelesaian transaksi bursa yang menetapkan bahwa Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan Dana Jaminan penyelesaian transaksi bursa yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. KEP-26/PM/2000 tentang Dana Jaminan tanggal 31 Desember 2000, yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-1484/PM/1997 tanggal 27 Juni 1997, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") disetujui untuk melakukan pungutan sebesar 0,01% dari nilai transaksi efek sebagai salah satu sumber utama pembentukan Dana Jaminan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004, Bapepam menyetujui KPEI untuk memungut Dana Jaminan sebesar 0,005% dari nilai transaksi kontrak berjangka dan 0,00125% dari nilai transaksi obligasi.

Sehubungan dengan perubahan dari Bapepam ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 19 November 2014, OJK menerbitkan peraturan No. 26/POJK.04/2014 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa, dimana OJK menyatakan mencabut dan tidak berlakunya Keputusan Bapepam No. Kep-47/PM/2004 tanggal 9 Desember 2004, kecuali mengenai pungutan sebesar 0,01% dari nilai transaksi efek sebagai salah satu sumber utama pembentukan Dana Jaminan. Ketentuan ini diatur kembali sesuai Surat Edaran OJK No. 23/SEOJK.04/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi.

Pada tahun 2020, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 23/SEOJK.04/2015 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi telah dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.04/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. GENERAL

The Guarantee Fund was established by PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (the "Company") based on Article 55 section 4 of the Capital Market Law No. 8 concerning securities transactions settlement which states that a Clearing and Guarantee Institution may establish a Guarantee Fund for securities transactions settlement to be funded by the users of such service.

Based on the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) No. KEP-26/PM/2000 dated December 31, 2000 regarding Guarantee Fund, which was previously regulated by the Decision Letter of the Chairman of Bapepam No. S-1484/PM/1997 dated June 27, 1997, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") was approved to collect 0.01% of the securities value transactions as the main source for the Guarantee Fund.

Based on the Decision Letter of the Chairman of Bapepam No. Kep-47/PM/2004 dated December 9, 2004, Bapepam has approved KPEI to collect 0.005% of future contract transactions value and 0.00125% of bond transactions value for the Guarantee Fund.

In relation with the change from Bapepam to Financial Services Authority (FSA), on November 19, 2014, the FSA issued regulation No. 26/POJK.04/2014 on the settlement of securities transactions, which replaced Bapepam Decree No. Kep-47/PM/2004 dated December 9, 2004, except collection of 0.01% of securities transactions value as the main funding for the Guarantee Fund. This regulation is reaffirmed in FSA Circular Letter No. 23/SEOJK.04/2015 dated August 27, 2015 regarding contribution for Guarantee Fund based on transaction value.

In 2020, the FSA Circular Letter No. 23/SEOJK.04/2015 about contributions for Guarantee Fund based on transaction value has been revoked and replaced with FSA Circular Letter No. 8/SEOJK.04/2020 dated May 26, 2020, regarding contributions for Guarantee Fund based on transaction value.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Perubahan terakhir sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.04/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.04/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi, menjadi sebagai berikut:

- Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi untuk Transaksi Bursa sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai setiap transaksi Bursa.
- Kontribusi Dana Jaminan dari Nilai Transaksi Khusus untuk:
 - a. Transaksi Bursa atas Kontrak Berjangka, sebesar 0,0003% (tiga per satu juta) dari nilai setiap transaksi Kontrak Berjangka;
 - b. Transaksi Bursa atas Kontrak Opsi sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai Kontrak Opsi; dan
 - c. Transaksi Bursa atas Efek bersifat Utang dan Sukuk, sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai setiap transaksi Efek bersifat Utang dan Sukuk.
 - d. Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur jatuh tempo, sebesar 0,003% (tiga per seratus ribu) dari nilai penerbitan Waran Terstruktur.

Berdasarkan peraturan tersebut, Anggota Kliring wajib membayar kontribusi Dana Jaminan yang tidak dapat ditarik kembali, kontribusi Dana Jaminan berasal dari kontribusi awal Anggota Kliring baru yang penetapannya ditetapkan dalam peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta kontribusi yang didasarkan pada nilai transaksi setiap Anggota kliring yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran OJK.

Dana Jaminan digunakan apabila cadangan jaminan dan kredit bank tidak mencukupi dalam penanggulangan kegagalan penyelesaian transaksi bursa dan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank dalam rangka penjaminan penyelesaian transaksi bursa tersebut.

1. GENERAL (continued)

The last amendment in Financial Services Authority Circular Letter No. 10/SEOJK.04/2022 dated June 29, 2022, regarding changes in the Financial Services Authority Circular Letter No. 8/SEOJK.04/2020 dated May 26, 2020 regarding contributions for Guarantee Fund Based on Transaction Value, are as follows:

- Contribution of Guarantee Fund Based on Transaction Value for Securities Transaction is 0.01% (one per ten thousand) from each of the Securities transaction.
- Contribution of Guarantee Fund for Special Transaction Value:
 - a. Securities transaction for future securities contract transaction value is 0.0003% (three per one million) from each of the future securities contract transaction value;
 - b. Securities transaction for option contract transaction value is 0.01% (one per ten thousand) from each of the equity option contract transaction; and
 - c. Securities transaction for Debt and Sukuk Securities' transaction value is 0.00125% (one hundred twenty-five per ten million) from each of the Debt and Sukuk securities transaction value.
 - d. Securities transactions for Structured Warrants transaction value is 0.003% (three per one hundred thousand) of the issuance value of Structured Warrants.

Under the regulation, the Clearing Member shall pay the Guarantee Fund contribution which are not refundable, Guarantee Fund contribution come from an initial contribution of new Clearing Member as regulated in the Clearing Guarantee Institution Regulations and the contribution which is based on the transaction value of each clearing member as regulated by the circular letter of FSA.

Guarantee Fund is used when the fund reserved for Guarantee Fund and bank loans are not sufficient to settle for securities transaction settlement failure and as collateral for obtaining bank loan to guarantee the transaction settlement.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Dana Jaminan bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak didistribusikan kepada siapapun untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 26/POJK.04/2014. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPEI diwajibkan untuk mengelola Dana Jaminan tersebut dan penggunaannya wajib dilaporkan kepada OJK.

Dana Jaminan hanya dapat diinvestasikan dalam Surat Utang Negara dan/atau deposito berjangka dengan komposisi yang disetujui oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko. Hasil investasi Dana Jaminan setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan wajib ditambahkan ke dalam Dana Jaminan.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 157 dan 142 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (tidak diaudit).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Hoesen
Ronald Waas
Uriep Budhi Prasetyo

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Iding Pardi
Antonius Herman Azwar
Umi Kulsum

President Director
Director
Director

Ketua Komite Audit
Anggota
Anggota
Anggota

Ronald Waas
Uriep Budhi Prasetyo
Arini Imamawati
Arief M. Prawirawinata

Audit Committee Chairman
Member
Member
Member

1. GENERAL (continued)

The Guarantee Fund does not belong to a certain party and is not distributable to anyone for any purpose other than those stated in the regulation of Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 26/POJK.04/2014. Based on the regulation, KPEI is responsible for managing the Guarantee Fund, and the usage must be reported to the FSA.

The Guarantee Fund can only be invested in Government Bonds and/or time deposits with composition as approved by credit policy and risk management committee. The investment's return, net of management fee should be accumulated to the Guarantee Fund.

The Company is located at Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

The Company had 157 and 142 employees as of December 31, 2024 and December 31, 2023, respectively (unaudited).

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Operasional Dana Jaminan dikelola oleh Unit Penjaminan dan Pengelolaan Agunan (PAG) di bawah Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR). Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) dan Kepala Unit Penjaminan dan Pengelolaan Agunan (PAG) adalah pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan evaluasi atas pengelolaan Dana Jaminan secara optimal.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Dana Jaminan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" dimana laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan jika sumber daya yang diterima oleh entitas berorientasi nonlaba mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi melekat pada sumber daya tersebut, Perusahaan dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan atau tidak adanya pembatasan oleh pemberi sumber daya.

Perusahaan melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah Perusahaan merupakan suatu Perusahaan berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum Perusahaan tersebut, sehingga dapat menerapkan interpretasi ini.

1. GENERAL (continued)

The Operational of Guarantee Fund are managed by Penjaminan dan Pengelolaan Agunan (PAG) Unit under the Division of Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR). Head of Division Penjaminan dan Pengelolaan Risiko (PPR) and Head of Unit Penjaminan dan Pengelolaan Agunan (PAG) are parties that responsible for planning, monitoring, and evaluating the management of Guarantee Fund optimally.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of Compliance

The financial statements of Guarantee Fund have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK - IAI).

The financial statements are presented in accordance with Interpretation of Financial Accounting Standard (IFAS) 335, "Financial Reporting Presentation For Non Profit Organization" whereas the financial statements consist of statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in net assets, statement of cashflow and notes to financial statements. A non profit-oriented Company might adjust the descriptions used for some of the posts contained in the financial statements if the resources received by the non profit-oriented entity required the entity to meet the inherent conditions to those resources, the Company may present the amount of such resources by their nature, i.e. with restrictions or without restrictions by the resource provider.

The Company conducts its own assessment to determine whether the Company is a non-profit oriented Company, regardless of the Company's legal entity form, so as to apply this interpretation.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

a. Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan Perusahaan adalah:

1. Apakah sumber daya Perusahaan berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut;
3. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual dengan menggunakan basis historis akuntansi, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur pada berdasarkan penilaian lain seperti dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun bersangkutan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Perusahaan menyelenggarakan catatan akuntansi dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

a. Statement of Compliance (continued)

Some factors that the Company should consider are the following:

1. Whether the Company's non profit-oriented resources come from the resource provider whom expect no refund or economic benefits proportional to the amount of resources provided;
2. Produce goods and/or services without aim of cultivating profits, and if a non profit-oriented entity generates a profit, then the amount is not distributed to the founder or owner of the non profit-oriented entity;
3. There is no such ownership as it generally does in a profit-oriented business entity, in a sense that ownership of non profit-oriented entity cannot be sold, transferred or redeemed or such ownership does not reflect the proportion of resource sharing of a non profit-oriented entity at the time of liquidation or dissolution the non profit-oriented entity.

b. Basis of Preparation

The financial statements, except statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The statements of cash flows are presented using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The Company maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**c. Standar dan amendemen/penyesuaian
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) yang berlaku efektif pada tahun
berjalan**

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024:

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**c. Standards and amendments/improvements
of the Statements of Financial Accounting
Standards (SFAS) effective in the current
year**

The Company has applied a number of amendments/improvements of SFAS that are relevant to its operations and effective for annual beginning on or after January 1, 2024:

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

**Financial Accounting Standards
Nomenclature**

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**c. Standar dan amendemen/penyesuaian
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) yang berlaku efektif pada tahun
berjalan**

Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024: (lanjutan)

Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Tidak terdapat dampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan terkait penerapan amandemen PSAK tersebut.

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Dana Jaminan (entitas pelapor).

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**c. Standards and amendments/improvements
of the Statements of Financial Accounting
Standards (SFAS) effective in the current
year**

The Company has applied a number of amendments/improvements SFAS that are relevant to its operations and effective for annual beginning on or after January 1, 2024: (continued)

Amendment of SFAS 201: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

There is no significant impact to the Company's financial statements from application of the amendment of SFAS.

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Guarantee Fund (reporting entity).

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- i. has control or joint control over the reporting entity;

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: (lanjutan)
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Transactions with Related Parties (continued)

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person: (continued)
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - vi. Entities controlled or jointly controlled by persons identified in number (a).
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain,
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan melalui pengujian *Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI) dan model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan.

Pengujian *Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI)

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**d. Transactions with Related Parties
(continued)**

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Financial Instruments

Financial Assets

The Company classifies its financial assets into the following category:

- financial assets measured at fair value through profit or loss,
- financial assets measured at fair value through other comprehensive income,
- financial assets measured at amortized cost.

The Company used 2 (two) methods to classify its financial assets, which based on the contractual cash flow of the financial assets through *Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI) test and the Company's business model in managing the financial assets.

Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) Test

As a first step of its classification process, the Company assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortization of the premium/discount).

The most significant elements of interest within arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Company applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengujian *Solely Payments of Principal and Interest* (SPPI) (lanjutan)

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) Test (continued)

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as Fair Value through Profit Loss ("FVTPL").

Business model assessment

The Company determines its business model at the level that best reflects how it manages Companies of financial assets to achieve its business objective.

The Company's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- *How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;*
- *The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;*
- *How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);*
- *The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Company's assessment.*

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realized in a way that is different from the Company's original expectations, the Company does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL")

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

- (b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI")

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awalnya, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, kecuali keuntungan atau kerugian atas selisih kurs dan kerugian penurunan nilai. Dividen dari instrumen ekuitas diakui di dalam pos laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

- (a) Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the business model test and the contractual cash flow test show that financial assets entering into classifications are measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

This classification is intended for financial instruments owned to be traded or at the time of initial acknowledgement has been determined by the Company to be measured at fair value through profit or loss.

Financial assets are categorized as owned to be traded if acquired or owned primarily for purposes of sale or repurchase in the near term or if they are part of a particular portfolio of financial instruments that are jointly managed and there is evidence of a current short-term profit taking pattern.

- (b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI")

Financial assets are managed in a business model whose objectives will be fulfilled by obtaining contractual cash flows and selling financial assets and contractual requirements of financial assets which on a certain date increase the cash flow solely from the principal and interest payments (*solely payments of principal and interest*) of the amount owed.

At the initial recognition, debt instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognized at the fair value plus the transaction fees and subsequently measured at fair value where the gain or loss of changes in fair value are recognized as other comprehensive income, except for gain or loss on the exchange rate and impairment loss. Dividend from equity is recognized in profit or loss post.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (b) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lain di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

- (c) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif dan diakui sebagai "pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

- (b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI") (continued)

Expected credit losses are recognized as an additions of other comprehensive income in the statement of financial position (not reducing the number of recorded financial assets in financial statements). Interest income is calculated using the effective interest rate method.

- (c) Financial assets measured at amortized costs

Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments (*solely payments of principal and interest*) of the amount owed.

At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.

Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the statement of comprehensive income and is recognized as "interest income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is acknowledged in the financial statements as "the establishment of allowance for impairment loss".

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 239, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*life time*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount of financial assets on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial assets at FVTPL.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Adoption of SFAS 109, "Financial Instrument" change the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with SFAS 239, "Financial Instrument: Recognition and Measurement" to expected credit loss. The Company adopts simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Kerugian kredit ekspektasian dihitung atas aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah telah terjadi gagal bayar (*default*) termasuk berapa lama telah terjadi tunggakan pembayaran, pemburukan kualitas kredit dari pihak ketiga dan pengetahuan tentang kejadian tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan pihak ketiga untuk melakukan pembayaran.

Model *three-stage* digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, yang mensyaratkan aset keuangan untuk dinilai sebagai berikut:

- *Stage 1*: aset keuangan dimana tidak terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal;
- *Stage 2*: aset keuangan dimana terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, namun tidak terdapat gagal bayar (*default*); atau
- *Stage 3*: aset keuangan yang mengalami gagal bayar (*default*).

Untuk aset keuangan pada *stage 1*, kerugian kredit ekspektasian dihitung berdasarkan kerugian kredit yang diekspektasikan akan terjadi selama 12 bulan kedepan. Untuk aset keuangan pada *stage 2* dan *3*, kerugian kredit ekspektasian dihitung berdasarkan kerugian kredit yang diekspektasikan akan terjadi selama umur instrumen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced by allowance on impairment losses account. When the financial asset is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Expected credit losses are calculated on the Company's financial assets that are measured at amortized cost and at fair value through other comprehensive income. Factors considered in determining whether a default has taken place include how many days past the due date a payment is, deterioration in the credit quality of a counterparty, and knowledge of specific events that could influence a counterparty's ability to pay.

A three-stage model is used for calculating expected credit losses, which requires financial assets to be assessed as:

- *Stage 1*: financial assets where there has been no significant increase in credit risk since original recognition;
- *Stage 2*: financial assets where there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, but no default; or
- *Stage 3*: financial assets that are in default.

For financial assets in stage 1, expected credit losses are calculated based on the credit losses that are expected to be incurred over the following 12-month period. For financial assets in stages 2 and 3, expected credit losses are calculated based on credit losses expected to be incurred over the life of the instrument.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen keuangan dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Liabilitas keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Financial liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengukuran awal, liabilitas diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premium atas biaya perolehan dan transaksi yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui dalam laba rugi.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities and Equity Instruments (continued)

Subsequent Measurement

Financial liabilities at amortized cost

After initial measurement, financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction cost that is an integral part of the effective interest rate. The amortization is recognized in the profit or loss.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled, or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi

Di bawah ini merupakan klasifikasi instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan:

Instrumen keuangan/ <i>Financial instrument</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ <i>Category as defined by SFAS 109</i>	Akun/ <i>Account</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Kas di bank dan deposito berjangka/ <i>Cash in banks and time deposits</i>
		Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya/ <i>Restricted time deposits</i>
		Piutang Dana Jaminan/ <i>Guarantee Fund receivables</i>
		Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>
	Nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Fair value through profit or loss</i>	Investasi/ <i>Investment</i>
	Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Fair value through other comprehensive income</i>	
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Beban akrual/ <i>Accrued expenses</i>

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan Dana Jaminan jika Perusahaan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perusahaan seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Perusahaan perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Perubahan tujuan model bisnis Perusahaan harus berdampak sebelum tanggal reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Classification

Sets out below the classification of the Company's financial instruments:

Reclassification of Financial Instruments

The Company is allowed to reclassify the financial assets of Guarantee Fund if the Company changes the business model for the management of financial assets and the Company is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Changes in the business model should significantly impact the Company's operational activities such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Company needs to prove the change to external parties.

The changes of the Company's business model must have an impact before the reclassification date.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) Perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) Hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) Pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perusahaan dengan model bisnis berbeda.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

f. Kas dan Deposito Berjangka

Kas dan deposito berjangka terdiri dari kas di bank dan penempatan dalam deposito berjangka. Kas dan deposito berjangka tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijaminkan. Deposito berjangka memiliki tenor 3, 6 dan 12 bulan akan tetapi dapat dicairkan setiap waktu.

Perusahaan telah memisahkan tersendiri deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas perjanjian kredit dengan bank untuk penanggulangan kegagalan pada penyelesaian transaksi bursa sebagai kas yang dibatasi penggunaannya untuk kepentingan pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Reclassification of Financial Instruments (continued)

The following are not considered as change in business model: (a) The change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) Temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) The transfer of financial assets between parts of the Company and different business models.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency, or bankruptcy.

f. Cash in Banks and Time Deposits

Cash in banks and time deposits consist of cash in banks and placement in time deposits. Cash in banks and times deposits are unrestricted and unpledged. Time deposits have tenor of 3, 6 and 12 months but can be redeemed at anytime.

The Company segregates time deposits which are used as collateral for credit agreements with the bank to overcome failures in the settlement of stock exchange transactions as a restricted cash for reporting purposes.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

g. Provisi

Provisi diakui ketika Dana Jaminan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Dana Jaminan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga yang berlaku setelah dikurangi pajak final.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Beban administrasi merupakan beban bank dan transfer.

Beban lain-lain merupakan beban audit dan kustodi.

i. Pengelolaan Dana Jaminan

Berdasarkan peraturan OJK No. 26/POJK.04/2014 tanggal 19 November 2014, Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi maksimum 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan investasi bersih setelah pajak. Biaya jasa pengelolaan dibebankan dalam laporan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

g. Provisions

Provisions are recognized when the Guarantee Fund has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Guarantee Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

h. Revenue and Expense Recognition

Interest income is accrued on a timely basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate net of final tax.

Expenses are recognized when incurred.

Administration expense consists of bank charges and transfer expense.

Other expenses consists of audit fee and custody fee.

i. Guarantee Fund Management

Based on the FSA regulation No. 26/POJK.04/2014 on November 19, 2014, a Clearing and Guarantee Institution is allowed to charge an investment management fee at maximum of 10% (ten percent) of net investment income after tax. The management fee is charged to statement of comprehensive income for the year.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

i. Pengelolaan Dana Jaminan (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan No. Kep-043/DIR/KPEI/0823 tanggal 15 Agustus 2023, terdapat perubahan atas peraturan layanan Perusahaan No. II-12 tentang Penempatan Agunan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan Pinjam Meminjam Efek.

Bahwa dalam rangka perluasan pemberian layanan Perusahaan dalam pengelolaan Agunan yang bertujuan memberikan kemudahan dan nilai tambah kepada Anggota Kliring, Perusahaan melakukan penambahan instrumen keuangan sebagai Agunan berupa Unit Penyertaan Reksa Dana, jasa pengelolaan Dana Minimum Kas, dan pengenaan biaya kepada Anggota Kliring atas pengelolaan Dana Minimum Kas dan pengelolaan Agunan yang ditempatkan pada KPEI.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG MATERIAL**

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, yang dijelaskan dalam Catatan 2, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain.

Estimasi dan asumsi terkait berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Hasil aktualnya dapat berbeda dengan estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa depan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

i. Guarantee Fund Management (continued)

Based on Decree No. Kep-043/DIR/KPEI/0823 dated August 15, 2023, there was an changes in Company service regulation No. II-12 regarding Placement of Collateral for Exchange Transactions of Equity Securities, Participation Units of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts, and Borrowing and Lending Stock.

In order to expand of the Company services in collateral management aimed at providing convenience and value added to Clearing Members, the Company adds financial instruments as collateral in the form of Mutual Fund Participation Units, Minimum Cash Fund management services, and imposition of fees to Clearing Members for the management of Minimum Cash Funds and management of Collateral placed in the KPEI.

**3. MATERIAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2, management is required to make judgments, estimates and assumption about the carrying amount of assets and liabilities that are not readily apparent from other source.

The estimates and associated assumption are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results could differ from those estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG MATERIAL (lanjutan)**

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan kriteria dalam PSAK 109, "Instrumen Keuangan". Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2e atas laporan keuangan.

Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model *discounted cash flow*.

Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak memungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-390/PJ/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (DJPTB) oleh KPEI, DJPTB bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak dipergunakan untuk menambah kemampuan ekonomis Perusahaan yang bersangkutan dan Surat Dirjen Pajak No. S-259/PJ.321/2003 tanggal 1 April 2003 tentang perlakuan pajak penghasilan atas pembentukan DJPTB setelah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-390/PJ/2002.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. MATERIAL ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company designates classification of certain asset and liability as financial asset and financial liability by considering the criteria defined in SFAS 109, "Financial Instruments". Financial asset and financial liability are recognized in accordance with the Company's accounting policy as disclosed in Note 2e to the financial statements.

Determination of fair values of financial assets and financial liabilities

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the discounted cash flow model.

The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. The judgment includes consideration of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Income Tax

Based on Director General of Taxes Decree No. KEP-390/PJ/2002 dated August 22, 2002 about the treatment of income tax on Exchange Transaction Settlement Guarantee Fund (DJPTB) by KPEI, DJPTB is not considered as income as long as it is not used to increase the economic capability of the respective Company and Director General of Taxes letter No. S-259/PJ.321/2003 dated April 1, 2003 about income tax treatment for the establishment of the DJPTB after the issuance of Director General of Taxes Decree No. KEP-390/PJ/2002.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DI BANK DAN DEPOSITO BERJANGKA
DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

a. Rincian kas di bank dan deposito berjangka:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kas di bank		
Rupiah		
Pihak ketiga		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	50.098.684	1.085.619
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.961.934	4.141.934
PT Bank Permata Tbk	3.870.970	1.170.970
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.054.189	3.250.696
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.011.879	1.126.848
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.469.687	7.984.942
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.460.001	60.002
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.150.000	2.050.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.780.000	1.780.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (d/h PT Bank BTPN Tbk)	1.259.999	1.799.999
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	999.899	1.619.899
Total kas di bank	75.117.242	26.070.909

Deposito berjangka		
Rupiah		
Pihak ketiga		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.765.561.008.603	2.456.599.965.101
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.585.362.262.968	1.880.492.073.246
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.788.784.182.222	1.790.026.368.946
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	792.623.726.053	1.185.261.838.988
Total deposito berjangka	7.932.331.179.846	7.312.380.246.281
Total kas di bank dan deposito berjangka	7.932.406.297.088	7.312.406.317.190

Kisaran tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah	6,50% - 6,85%	5,90% - 7,20%

**b. Deposito berjangka berdasarkan jangka
waktu**

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Deposito berjangka		
3 bulan	2.183.605.557	7.312.380.246.281
6 bulan	7.930.147.574.289	-
Total	7.932.331.179.846	7.312.380.246.281

**4. CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS AND
RESTRICTED CASH**

a. Details of cash in banks and time deposits:

Cash in banks	
Rupiah	
Third parties	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank OCBC NISP Tbk	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (formerly PT Bank BTPN Tbk)	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
Total cash in banks	

Time deposits	
Rupiah	
Third parties	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Total time deposits	

**Total cash in banks
and time deposits**

Interest rates range on time deposits per annum Rupiah	

b. Time deposits by tenor

Time deposits	
3 months	
6 months	
Total	

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA DAN KAS
YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

**c. Deposito berjangka yang dibatasi
penggunaannya**

Deposito yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp60.390.000.000 pada tanggal 31 Desember 2023 dengan suku bunga sebesar 5,90% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo ini dipisahkan dari kas di bank dan deposito berjangka sebagai jaminan atas perjanjian kredit *uncommitted* sebesar Rp60.390.000.000 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2024 dan tidak diperpanjang kembali.

**4. CASH IN BANKS AND TIME DEPOSITS AND
RESTRICTED CASH (continued)**

c. Restricted time deposits

Restricted time deposits that deposited at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp60,390,000,000 as of December 31, 2023 with effective rate of 5.90% for the year ended December 31, 2023. This balance is separated from cash in banks and time deposits based on its use as collateral for an uncommitted loan agreement amounting to Rp60,390,000,000 with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which matured on February 7, 2024 and not been extended.

5. INVESTASI

Rincian investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	25.017.400.000	25.454.325.000
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	567.312.188.200	344.874.000.000
Total	592.329.588.200	370.328.325.000

5. INVESTMENTS

The details of the investments are as follows:

*Investments measured at fair value through profit or loss
Investments measured at fair value through other comprehensive income*

Total

**a. Investasi yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi**

Rincian investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah sebagai berikut:

**a. Investments measured at fair value through
profit or loss**

The details of investments measured at fair value through profit or loss are as follows:

31 Desember/December 31, 2024					
Surat Utang Negara	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Government Bonds
FR 0059	25.000.000.000	25.017.400.000	7,00%	15 Mei/May 15, 2027	FR 0059
Total	25.000.000.000	25.017.400.000			Total

31 Desember/December 31, 2023					
Surat Utang Negara	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Government Bonds
FR 0059	25.000.000.000	25.454.325.000	7,00%	15 Mei/May 15, 2027	FR 0059
Total	25.000.000.000	25.454.325.000			Total

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INVESTASI (lanjutan)

a. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar Surat Utang Negara dinilai berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia. Kerugian belum terealisasi akibat perubahan nilai wajar sebesar Rp436.925.000 dan Rp1.296.475.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Selama tahun berjalan tidak terdapat realisasi keuntungan/kerugian.

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	25.454.325.000	76.750.800.000
Penambahan kerugian tahun berjalan	(436.925.000)	(1.296.475.000)
Investasi yang jatuh tempo	-	(50.000.000.000)
Saldo akhir	25.017.400.000	25.454.325.000

*Beginning balance
Additional loss during the year
Matured investments
Ending balance*

b. Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Rincian investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

5. INVESTMENTS (continued)

a. Investments measured at fair value through profit or loss (continued)

As of December 31, 2024 and 2023, the fair values of the Government Bonds were based on reference price issued by PT Penilai Harga Efek Indonesia. Unrealized loss due to changes in fair value amounted to Rp436,925,000 and Rp1,296,475,000 for the years ended December 31, 2024 and 2023. During the year, there is no realization of gain/loss.

b. Investments measured at fair value through other comprehensive income

The details for investments measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

31 Desember/December 31, 2024					
Surat Utang Negara	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Government Bonds
PBS 0036	50.000.000.000	49.500.000.000	5,38%	15 Agustus/August 15, 2025	PBS 0036
FR 0090	50.000.000.000	48.082.050.000	5,13%	15 April/April 15, 2027	FR 0090
FR 0064	150.000.000.000	146.174.100.000	6,13%	15 Mei/May 15, 2028	FR 0064
FR 0087	53.000.000.000	51.643.571.000	6,50%	15 Februari/February 15, 2031	FR 0087
FR0091	189.000.000.000	182.228.319.000	6,38%	15 April/April 15, 2032	FR0091
FR0065	42.100.000.000	40.977.698.200	6,625%	15 Mei/May 15, 2033	FR0065
FR0100	50.000.000.000	48.706.450.000	6,625%	15 Februari/February 15, 2031	FR0100
Total	584.100.000.000	567.312.188.200			Total
31 Desember/December 31, 2023					
Surat Utang Negara	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Government Bonds
PBS 0036	50.000.000.000	49.139.350.000	5,38%	15 Agustus/August 15, 2025	PBS 0036
FR 0090	50.000.000.000	48.328.000.000	5,13%	15 April/April 15, 2027	FR 0090
FR 0064	150.000.000.000	148.290.750.000	6,13%	15 Mei/May 15, 2028	FR 0064
FR 0091	100.000.000.000	99.115.900.000	6,38%	15 April/April 15, 2032	FR 0091
Total	350.000.000.000	344.874.000.000			Total

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai wajar obligasi pemerintah ditetapkan berdasarkan harga referensi dari PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI). Kerugian dan keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.965.704.873 dan Rp353.472.979.

As of December 31, 2024 and 2023, the fair value of government bonds were determined based on reference price from PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI). Unrealized loss and gain from changes in fair value through other comprehensive income for the years ended as of December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp9,965,704,873 and Rp353,472,979, respectively.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. INVESTASI (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal	344.874.000.000
Aset keuangan yang baru dibeli	231.160.900.000
Pengukuran kembali (Penurunan)/kenaikan dari perubahan nilai wajar	1.242.993.073 (9.965.704.873)
Saldo akhir	567.312.188.200

Seluruh investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan sebagai *stage 1*.

c. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat transaksi efek-efek dengan pihak berelasi.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai investasi

Cadangan atas penurunan nilai investasi tidak dibentuk karena manajemen berkeyakinan bahwa investasi akan tertagih seluruhnya.

6. PIUTANG DANA JAMINAN

Akun ini merupakan piutang atas tagihan Dana Jaminan kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pemungutan Biaya atas Transaksi, Kliring dan Penyelesaian serta Dana Jaminan atas Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. BEI:SP-00310A/BEI.HKM/12-2011, No. KPEI: PJ-034/KPEI/1211 dan No. KSEI:SP-0047/11/DIR/KSEI/1211, tanggal 29 Desember 2011, bahwa antara BEI, KPEI dan KSEI telah menyepakati untuk pemungutan biaya atas transaksi, kliring dan penyelesaian serta Dana Jaminan Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan melalui BEI.

5. INVESTMENTS (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	
	-	<i>Beginning balance</i>
	343.875.000.000	<i>New financial assets purchased</i>
	645.527.021	<i>Remeasurement</i>
	353.472.979	<i>(Decrease)/increase from changes in fair value</i>
Saldo akhir	344.874.000.000	<i>Ending balance</i>

All investments measured at fair value through other comprehensive income as of December 31, 2024 and 2023 are classified as *stage 1*.

c. By relationship

As of December 31, 2024 and 2023, there were no marketable securities transaction with related parties.

d. Allowance for impairment of Investment

The allowance for impairment of investment was not provided as management believes that it the investment will be fully collectible.

6. GUARANTEE FUND RECEIVABLES

This account represents Guarantee Fund receivables from PT Bursa Efek Indonesia (BEI) arising from agreement on the collection of fees on Transactions, Clearing and Settlement, and Guarantee Funds for Equity Securities Transactions between PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. BEI:SP-00310A/BEI.HKM/12-2011, No. KPEI: PJ034/KPEI/1211 and No. KSEI:SP0047/11/DIR/KSEI/1211, dated December 29, 2011, whereas BEI, KPEI and KSEI have agreed to collect fees for transactions, clearing and settlement, and Guarantee Fund for Equity Securities Transaction through BEI.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG DANA JAMINAN (lanjutan)

Seluruh piutang Dana Jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 digolongkan sebagai *stage 1*.

Cadangan atas penurunan nilai piutang Dana Jaminan tidak dibentuk karena manajemen berkeyakinan beban piutang akan tertagih seluruhnya.

6. GUARANTEE FUND RECEIVABLES (continued)

All Guarantee Fund receivables as of December 31, 2024 and 2023 are classified as *stage 1*.

The allowance for impairment of Guarantee Fund receivables was not provided as management believes that the receivables will be fully collectible.

7. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari piutang bunga atas:

7. INTEREST RECEIVABLES

This account consists of accrued interest receivables from:

	31 Desember/ Desember 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah		
Pihak ketiga		
Deposito berjangka		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49.233.265.656	14.426.712.343
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	49.164.448.071	10.465.845.694
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	33.317.425.495	8.369.061.234
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	12.144.376.258	3.396.780.655
Surat Utang Negara		
FR 0091	2.259.140.625	1.195.312.500
FR 0087	1.218.496.500	-
FR 0100	1.203.681.250	-
FR 0064	1.033.593.750	1.033.593.750
PBS 0036	907.031.250	918.400.000
FR 0090	480.468.750	480.468.750
FR 0065	337.184.165	-
FR 0059	196.875.000	196.875.000
Total	151.495.986.770	40.483.049.926

Rupiah	
Third parties	
Time deposits	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Government Bonds	
FR 0091	
FR 0087	
FR 0100	
FR 0064	
PBS 0036	
FR 0090	
FR 0065	
FR 0059	
Total	

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari beban pengelolaan Dana Jaminan, beban jasa audit dan beban jasa kustodian.

8. ACCRUED EXPENSES

This account consists of accrued Guarantee Funds management fees, audit service fee and custodian service fees.

9. PENGHASILAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

9. INTEREST INCOME

This account consists of the following:

	Untuk tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December 31,	
	2024	2023
Deposito berjangka	421.413.618.312	328.838.747.287
Surat Utang Negara	24.354.110.754	15.903.754.632
Giro	40.649.567	75.283.775
Total	445.808.378.633	344.817.785.694

Time deposits
Government Bonds
Current accounts

Total

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Dana Jaminan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, antara lain:

No.	Sifat Hubungan Berelasi/ <i>Nature of Relationship</i>	Pihak Berelasi/ <i>Related Party</i>	Transaksi/ <i>Transaction</i>
1.	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Mempunyai personal manajemen kunci yang sama/ <i>Having the same key management personnels</i>	Pengelola Dana Jaminan/ <i>Fund management services</i>

**10. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Guarantee Fund entered into certain transactions with related party, as follows:

**11. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan (maksimum eksposur risiko kredit) dan liabilitas keuangan Dana Jaminan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2024	31 Desember/ <i>December 31,</i> 2023
<u>Aset Keuangan</u>		
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	25.017.400.000	25.454.325.000
Investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	567.312.188.200	344.874.000.000
Biaya perolehan diamortisasi		
Kas di bank dan deposito berjangka	7.932.406.297.088	7.312.406.317.190
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	60.390.000.000
Piutang Dana Jaminan	34.768.601.151	40.382.944.791
Piutang bunga	151.495.986.770	40.483.049.926
Total aset keuangan	8.711.000.473.209	7.823.990.636.907
<u>Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Beban akrual	44.627.029.573	34.541.353.052

**11. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT**

a. Categories of Financial Instruments

Classification of the Guarantee Fund's financial assets (maximum credit risk exposure) and liabilities are as follows:

<u>Financial Assets</u>
<i>Investment measured at fair value through profit or loss</i>
<i>Investment measured at fair value through other comprehensive income</i>
<i>Amortized cost</i>
<i>Cash in banks and time deposits</i>
<i>Restricted time deposits</i>
<i>Guarantee Fund receivables</i>
<i>Interest receivables</i>
Total financial assets
<u>Financial liability at amortized cost</u>
<i>Accrued expenses</i>

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko
Keuangan**

Kebijakan manajemen risiko keuangan Dana Jaminan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko pasar (risiko tingkat bunga dan risiko harga lain), risiko kredit, dan risiko likuiditas yaitu tersedia pada saat dibutuhkan sesuai dengan fungsi Dana Jaminan untuk menalangi kegagalan transaksi bursa.

Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Perusahaan. Aset keuangan Perusahaan adalah kas dan deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang Dana Jaminan, piutang bunga dan investasi dalam Surat Utang Negara.

Penempatan Dana Jaminan pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan Investasi Dana Jaminan, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas kas dan deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, serta piutang bunga dan investasi dalam Surat Utang Negara adalah terbatas karena *counterparties* adalah lembaga yang terpercaya.

**11. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT (continued)**

**b. Financial Risk Management Policies and
Objectives**

Objectives of Guarantee Fund's financial risk management policy is to ensure that funds are placed in secured instruments and financial institutions, in accordance with policy, with consideration of associated risks which includes market risk (interest rate risk and price risk), credit risk, and liquidity risk which is available at the time when it needed in accordance with the function of Guarantee Fund to settle failed securities transactions.

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Guarantee Fund. Guarantee Fund's financial assets include cash in banks and time deposits, restricted cash, Guarantee Fund receivables, interest receivables and investment in Government Bonds.

Placements of Guarantee Fund in financial institutions are made after careful analysis by considering the performance of banks, placement limits for bank as defined in Investment Policy for Guarantee Fund, and with management approval.

Credit risk on cash in banks and time deposits, restricted cash, and related interest receivables and investment in Government Bonds are limited because the counterparties are reputable institution.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko
Keuangan**

Risiko kredit atas piutang Dana Jaminan dari BEI adalah terbatas, karena tidak pernah terjadi keterlambatan ataupun ketidaktertagihan dalam pembayaran dan tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

i. Risiko tingkat bunga

Risiko tingkat bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba aktivitas. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Dana Jaminan dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Analisis sensitivitas di bawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, aset bersih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akan mengalami peningkatan (penurunan) masing-masing sebesar Rp27.359.435.353 dan Rp6.337.496.915.

ii. Risiko harga

Perusahaan juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi di nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan penghasilan komprehensif lainnya (FVOCI). Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi, Perusahaan mendiversifikasi portofolio miliknya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan komposisi dan batasan yang ditetapkan oleh komite kebijakan kredit dan pengendalian risiko. Kebijakan tersebut juga mengatur pengawasan terhadap pergerakan dari investasi efek tersebut.

**11. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT (continued)**

**b. Financial Risk Management Policies and
Objectives**

Credit risk on Guarantee Fund receivables from BEI is considered limited due to no experience of late or default payment and not impaired as of December 31, 2024 and 2023.

i. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of the financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate. The risk of interest rate movements could affect income from activity. Interest rate fluctuation is one of factor that is considered by the Guarantee Fund in carrying out its investment policies.

The sensitivity analysis below had been determined based on the exposure of the interest rates of financial assets as of December 31, 2024 and 2023.

If interest rate higher (lower) by 100 basis points and the other variables held constant, the net assets as of December 31, 2024 and 2023 will increase (decrease) by Rp27,359,435,353 and Rp6,337,496,915 respectively.

ii. Price risk

The Company is also exposed to market price risk in respect of its investment in fair value through profit or loss (FVTPL) and other comprehensive income (FVOCI). To manage its price risk arising from these investments, the Company diversifies its portfolio. Diversification of the portfolio is done in accordance with the limits set by the credit and risk management committee. This policy also set-up the control for monitoring of its movement.

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Kebijakan dan Tujuan Manajemen Risiko
Keuangan (lanjutan)

ii. Risiko harga (lanjutan)

Analisa sensitivitas berikut ini dihitung berdasarkan harga surat utang negara pada akhir periode pelaporan.

Jika harga surat utang negara naik (turun) 1% maka keuntungan (kerugian) nilai wajar surat utang negara yang belum direalisasi pada laporan penghasilan komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 akan mengalami kenaikan (penurunan) masing-masing sebesar Rp6.091.000.000 dan Rp3.750.000.000.

c. Pengukuran Nilai Wajar Instrumen
Keuangan

Nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan referensi harga pasar dari PT Penilai Harga Efek Indonesia pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan suku bunga pasar mengambang yang berlaku.

Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut:

- a) Tingkat 1: Dikutip dari harga di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- b) Tingkat 2: Yang melibatkan input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga);

11. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT (continued)

b. Financial Risk Management Policies and
Objectives (continued)

ii. Price risk (continued)

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to government bonds price risk at the end of the reporting period.

If government bonds price higher (lower) by 1% therefore, unrealized gain (loss) on fair value of government bonds in statement of comprehensive income for the six-month period ended December 31, 2024 and 2023 would increase (decrease) by Rp6,091,000,000 and Rp3,750,000,000, respectively.

c. Fair Value Measurements

The fair values of financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) and other comprehensive income (FVOCI) with standard terms and conditions and traded on active liquid markets are determined based on market prices reference from PT Penilai Harga Efek Indonesia as of the reporting date.

The carrying amount of other financial assets and liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry prevailing variable market interest rates.

The Company classified the fair value measurement using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements as follows:

- a) Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
- b) Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**c. Pengukuran Nilai Wajar Instrumen
Keuangan (lanjutan)**

Perusahaan mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan tingkat hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran, sebagai berikut: (lanjutan)

- c) Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat di observasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut ini merupakan nilai wajar aset keuangan berdasarkan kelompok sesuai dengan hierarki pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

31 Desember/December 31, 2024					
	Nilai tercatat/ Carrying Amount	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Investasi	25.017.400.000	-	25.017.400.000	-	Financial assets measured at fair value through profit or loss Investments
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Investasi	567.312.188.200	-	567.312.188.200	-	Financial assets measured at fair value through other comprehensive income Investments
Total	592.329.588.200	-	592.329.588.200	-	Total
31 Desember/December 31, 2023					
	Nilai tercatat/ Carrying Amount	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi Investasi	25.454.325.000	-	25.454.325.000	-	Financial assets measured at fair value through profit or loss Investments
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Investasi	344.874.000.000	-	344.874.000.000	-	Financial assets measured at fair value through other comprehensive income Investments
Total	370.328.325.000	-	370.328.325.000	-	Total

12. KOMITMEN

- a. Perusahaan memperoleh fasilitas *money market* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp60.390.000.000 yang telah jatuh tempo tanggal 7 Februari 2024 dan tidak diperpanjang. Fasilitas kredit ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka penanggulangan kegagalan pada penyelesaian transaksi harian perdagangan saham di BEI.

Untuk perjanjian fasilitas *money market* pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah mematuhi seluruh kondisi dan persyaratan pada masing-masing perjanjian tersebut.

**11. FINANCIAL INSTRUMENTS AND FINANCIAL
RISK MANAGEMENT (continued)**

c. Fair Value Measurements (continued)

The Company classified the fair value measurement using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements as follows: (continued)

- c) Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The following table shows the financial instruments measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy as of December 31, 2024 and 2023:

12. COMMITMENTS

- a. The Company obtained a money market facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounting to Rp60,390,000,000 which has been matured on February 7, 2024 and not extended. This credit facility is solely intended for dealing with failures in settlement of daily transaction in BEI.

For the money market facility agreement as of December 31, 2023, the Company has complied with all important conditions and covenants required by significant agreement.

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DANA JAMINAN**

**Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
OF GUARANTEE FUND**

**As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. KOMITMEN (lanjutan)

- b. Pada Agustus 2002, PT Usaha Bersama Sekuritas gagal dalam penyelesaian transaksi surat berharga. KPEI memperkirakan kegagalan sistemik sebesar Rp30.986.550.000. KPEI memutuskan untuk menunda penyelesaian atas transaksi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam tanggal 11 November 2002 dan surat OJK No. S-45/PM.212/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal tanggapan terkait permasalahan transaksi saham PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA) yang menyatakan bahwa tata cara penyelesaian transaksi saham BIMA tersebut dikembalikan kepada para pihak yang melakukan transaksi, dengan tetap mempertimbangkan potensi tuntutan dari pihak-pihak terkait.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Perusahaan masih melakukan penundaan penyelesaian sehubungan dengan status hukum transaksi tersebut.

12. COMMITMENTS (continued)

- b. In August 2002, PT Usaha Bersama Sekuritas failed to settle securities transactions. KPEI estimated systemic potential default of Rp30,986,550,000. KPEI decided to postpone the settlement of such transaction in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK dated November 11, 2002 and letter from FSA No. S-45/PM.212/2018 dated January 11, 2018 regarding response on issue of stock transaction of PT Primarindo Asia Infrastructure (BIMA) which stated that the arrangement of stock transaction settlement of BIMA shares depends on the parties who executed the transaction, by still considering the potential lawsuit from relevant parties.

As of the date of issuance of these financial statements, the Company still postponed the settlement in relation to legal status of the transaction.

13. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Dana Jaminan yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2025.

13. THE COMPLETIONS OF FINANCIAL STATEMENTS

Board of Directors of the Company is responsible for the preparation of the Guarantee Fund financial statements which were completed and authorized to be issued on February 27, 2025.

2024

Annual Report
Laporan Tahunan



www.idclear.co.id



PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 5
Jln. Jenderal Sudirman kavling 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

☎ +62800 100 5734 (free);
+62-816 115 5000

✉ customer.care@idclear.co.id



Internal pages of this book are printed on recycled
and FSC certified paper.

Cover are printed on FSC certified paper.